





PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

TAHUN 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Penanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 13);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Hulu Sungai Tengah selanjutnya di sebut dengan Bupati;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah secara nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2021 mempunyai fungsi pokok :
   a. Menjadi acuan bagi seluruh stakeholder di Daerah, karena memuat seluruh kebijakan publik.
   b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena memuat arah kebijakan Pembangunan daerah satu tahun.
   c. Menggambarkan kepastian arah kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

(2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP.

(3) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kerangka pembangunan tahun kelima RPJMD periode tahun 2016-2021.

(4) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(5) Penjabaran RPJMD Tahun 2016-2021 ke dalam RKPD Tahun 2021 dilakukan melalui pemetaan program.

(6) Pemetaan program RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyesuaikan dengan program yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

(7) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.
c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.
d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
g. BAB VII PENUTUP

Pasal 4

RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME PENYUSUNAN RKPD

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

(1) Bappelitbangda menyusun rancangan awal RKPD.

(2) Rancangan Awal RKPD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai acuan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Kepala Bappelitbangda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

(2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(3) Rancangan RKPD menjadi Bahan Musrenbang RKPD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 7

(1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.

(2) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappelitbangda Setiap Tahun dalam rangka membahas rancangan RKPD tahun berikutnya.

(3) Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar Perangkat Daerah dan Antar Rencana Pembangunan Kecamatan.

Bagian Ketiga

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 8

(1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappelitbangda.

(2) Bappelitbangda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi pendanaan yang menunjukan prakiraan maju.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengendalian

Pasal 9

(1) Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Menyeluruh dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappelitbangda.

(2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Pengendalian oleh Bappelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan, sehingga program dan kegiatan tersebut sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

(4) Pemantauan Kepala Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

(5) Kepala Bappelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan yang dilakukan oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 10

(1) Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah secara menyeluruh dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bappelitbangda.

(2) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

(3) Kepala Bappelitbangda menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dan hasilnya akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode selanjutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 20 Juli 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

FARIED FAKHMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2020, NOMOR 30

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		vii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3	Hubungan Antar Dokumen	8
1.4	Maksud dan Tujuan	10
1.5	Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah	10
BAB II	**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**	12
2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah	12
	2.1.1 *Aspek Geografi dan Demografi*	13
	2.1.2 *Aspek Kesejahteraan Masyarakat*	35
	2.1.3 *Aspek Pelayanan Umum*	61
	2.1.4 *Aspek Daya Saing Daerah*	80
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD	83
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	94
BAB III	**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**	99
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	99
	3.1.1 *Kondisi Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah*	99
	3.1.2 *Tantangan dan Prospek serta Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah*	116
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	130
	3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	130
	3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	136
BAB IV	**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	158
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	158
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021	160
	4.2.1 *Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional*	160
	4.2.2 *Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan*	165
	4.2.3 *Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah*	167

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 196

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 217

BAB VII PENUTUP 290

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	2.1	Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah	14
TABEL	2.2	Formasi Batuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	17
TABEL	2.3	Curah Hujan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018	19
TABEL	2.4	Rata-Rata Suhu dan Kelembaban Udara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018	20
TABEL	2.5	Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016-2035	27
TABEL	2.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2019	30
TABEL	2.7	Sex Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019	31
TABEL	2.8	Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019	32
TABEL	2.9	PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2019	37
TABEL	2.10	PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2019	38
TABEL	2.11	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014-2018	45
TABEL	2.12	PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2014-2018	49
TABEL	2.13	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2018	52
TABEL	2.14	Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2018	55
TABEL	2.15	APK dan APM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006-2018	58
TABEL	2.16	AKHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006-2019	59
TABEL	2.17	Persentase Gizi Buruk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2019	60
TABEL	2.18	Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2019	60
TABEL	2.19	Indikator Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2013-2019	61
TABEL	2.20	Indikator Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2013-2019	62
TABEL	2.21	Indikator Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013-2019	64
TABEL	2.22	Indikator Capaian Kinerja Urusan Perumahan Dan Permukiman Tahun 2013-2019	65
TABEL	2.23	Indikator Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2013-2019	65
TABEL	2.24	Indikator Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2013 – 2019	66

TABEL	2.25	Indikator Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2019	67
TABEL	2.26	Indikator Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014-2019	68
TABEL	2.27	Indikator Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2013-2019	68
TABEL	2.28	Indikator Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2014-2019	69
TABEL	2.29	Indikator Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2013-2019	70
TABEL	2.30	Indikator Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2013-2019	70
TABEL	2.31	Indikator Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2013-2019	71
TABEL	2.32	Indikator Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2019	71
TABEL	2.33	Indikator Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2013-2019	72
TABEL	2.34	Indikator Capaian Kinerja Urusan Keamanan dan Ketertiban Tahun 2013-2019	72
TABEL	2.35	Indikator Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2013-2019	73
TABEL	2.36	Indikator Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014-2019	74
TABEL	2.37	Indikator Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2013-2019	74
TABEL	2.38	Indikator Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2014-2019	75
TABEL	2.39	Indikator Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2019	75
TABEL	2.40	Indikator Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2013-2019	76
TABEL	2.41	Indikator Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2019	76
TABEL	2.42	Indikator Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2013-2019	77
TABEL	2.43	Indikator Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2013-2019	77
TABEL	2.44	Indikator Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2013-2019	78
TABEL	2.45	Indikator Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2013-2019	78
TABEL	2.46	Indikator Capaian Kinerja Urusan Industri Tahun 2013-2019	79
TABEL	2.47	Indikator Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014-2019	80
TABEL	2.48	Pencapaian Indikator Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2013-2019	81
TABEL	2.49	Pencapaian Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Tahun 2013-2019	82

TABEL	2.50	Indikator Iklim Investasi Tahun 2013-2019	82
TABEL	2.51	Pencapaian Indikator Sumber Daya Manusia Tahun 2013-2019	83
TABEL	2.52	Pencapaian Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sampai Dengan Tahun 2019	84
TABEL	2.53	Pencapaian Realisasi Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2019	88
TABEL	3.1	Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 – 2019 (juta rupiah)	100
TABEL	3.2	Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 – 2019 (juta rupiah)	101
TABEL	3.3	Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 – 2018 (%)	103
TABEL	3.4	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 – 2018 (%)	106
TABEL	3.5	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 – 2018	111
TABEL	3.6	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 – 2019	113
TABEL	3.7	Realisasi, Proyeksi dan Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah	128
TABEL	3.8	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021	131
TABEL	3.9	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021	134
TABEL	3.10	Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020	135
TABEL	3.11	Perbandingan Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021	150
TABEL	3.12	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021	155
TABEL	4.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021	159
TABEL	4.2	Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2021	161
TABEL	4.3	Sasaran dan Target Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	165
TABEL	4.4	Target Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Berdasarkan Indikator Pembangunan	168
TABEL	4.5	Target Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Berdasarkan Indikator Sasaran	169
TABEL	4.6	Prioritas Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Berdasarkan Sasaran	171
TABEL	4.7	Hubungan Isu Strategis dengan Prioritas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	171
TABEL	4.8	Perbandingan Tema RKP/RKPD 2021 antara Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	176

TABEL	4.9	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Daerah	177
TABEL	4.10	Sinkronisasi Target Sasaran Pembangunan Nasional dengan Daerah Tahun 2021	179
TABEL	4.11	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	179
TABEL	4.12	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	184
TABEL	5.1	Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan Tahun 2021 sesuai Urusan/Bidang	197
TABEL	5.2	Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan Tahun 2021 sesuai Prioritas Daerah	200
TABEL	5.3	Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2021	216
TABEL	6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021	218
TABEL	6.2	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021	221
TABEL	6.3	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021	239

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	1.1	Hubungan Antar Dokumen	9
GAMBAR	2.1	Peta Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah	15
GAMBAR	2.2	Kawasan Strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah	29
GAMBAR	2.3	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 - 2019	30
GAMBAR	2.4	Distribusi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019	32
GAMBAR	2.5	Piramida Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018	34
GAMBAR	2.6	Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2019	39
GAMBAR	2.7	Distribusi Struktur Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018	40
GAMBAR	2.8	Peranan Sektor PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2014 - 2018 (persen)	41
GAMBAR	2.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2014 - 2018 (persen)	41
GAMBAR	2.10	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018	42
GAMBAR	2.11	Perkembangan Sektor Dominan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2017	43
GAMBAR	2.12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2018	46
GAMBAR	2.13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2015-2018	47
GAMBAR	2.14	Tingkat Inflasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2018	48
GAMBAR	2.15	Perbandingan Gini Ratio Tahun 2015 -2018 Kabupaten HST, HSS, HSU dan Balangan	51
GAMBAR	2.16	Perbandingan Tingkat Kemiskinan 6 (Enam) Kabupaten Se-Banua Enam dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2018	53
GAMBAR	2.17	IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2018	55
GAMBAR	3.1	Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 - 2018	102
GAMBAR	3.2	Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 - 2018	104
GAMBAR	3.3	Distribusi Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018	105
GAMBAR	3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018	108

GAMBAR	3.5	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2018	109
GAMBAR	3.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Banua Enam dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018	110
GAMBAR	3.7	Perbandingan Perkembangan PDRB perkapita Banua Enam Tahun 2015 - 2018	111
GAMBAR	3.8	Tingkat Inflasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 - 2019	112
GAMBAR	3.9	Tingkat Kemiskinan Banua Enam dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2019	114
GAMBAR	3.10	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2019	115
GAMBAR	3.11	Tingkat Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2019	115
GAMBAR	4.1	Elemen Pendukung Pencapaian Visi	158

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui sistem perencanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah maka Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sesuai dengan amanat peraturan perundangan di atas, maka untuk tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

RKPD ini disusun dengan memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan, rencana kerja dan pendanaan yang merupakan

penjabaran dari RPJMD sebagai rencana tahunan untuk tahun 2021 yang bersinergi dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang disusun harus mempedomani rumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2021, digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah (*Top-Down*) dan bawah-atas (*Bottom-Top*). Pendekatan teknokratis dilakukan dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya, pendekatan partisipatif dengan melibatkan *stakeholders* dalam proses perencanaan pembangunan daerah, pendekatan politis dengan melihat arahan RPJMD Kabupaten HST Tahun 2016–2021 serta dengan melihat pokok-pokok pikiran DPRD, dan pendekatan perencanaan *Top-Down* dengan melakukan sinergi terhadap RPJMN, RPJMD Provinsi Kalsel, Rancangan RKPD Provinsi Kalsel, tujuan *SDGs,* dan SPM yang ditetapkan pemerintah dan lain-lain, serta melalui pendekatan perencanaan *Bottom-Up* melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada tingkat desa/kelurahan, pelaksanaan musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten.

Seiring dengan perkembangan peraturan saat ini, sangat menekankan untuk pengintegrasikan antara perencanaan dan penganggaran. Termasuk dalam hal ini adalah proses penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan, sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana dengan adanya peraturan terbaru tersebut, turut memberikan dampak dan konsekuensi dalam proses dan tahapan perencanaan di daerah.

Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perencanaan terutama untuk penyusunan RKPD Tahun 2021, yang selain harus mempedomani program/kegiatan sesuai RPJMD yang masih berlaku, namun juga harus sudah mengakomodir kegiatan/sub

kegiatan dengan nomenklatur yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut.

Hal ini sebagaimana telah ditegaskan pula melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Didalamnya menyebutkan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2021 tetap berpedoman pada RPJMD yang berlaku. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Daerah diperintahkan untuk melakukan pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD/Renstra dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang terbaru, dimana kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan RPJMD/Renstra tersebut, akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS, sepanjang tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD.

Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor: 130/736/SJ tersebut diatas, juga menyebutkan bahwa APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan, RKPD merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah kabupaten dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dengan tersusunnya RKPD ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang konsisten untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan prioritas daerah. RKPD Tahun 2021 yang disusun ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 dan APBD Tahun Anggaran 2021.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Penanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, TLN 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
23. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negarai Republik Indonesia Nomor 6485);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkup Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 04);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016–

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 05);

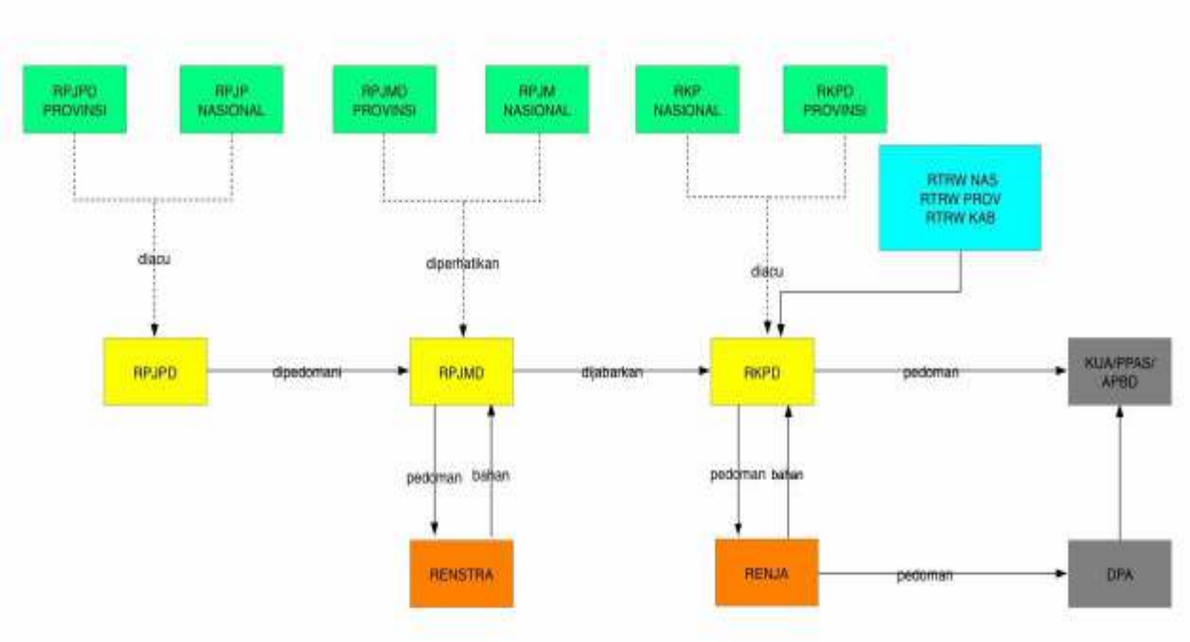
37. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Keberadaan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 memiliki hubungan dengan Dokumen Perencanaan lainnya karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan. Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2021 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat, perencanaan tingkat provinsi serta dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Adapun hubungan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 dengan dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :



Gambar 1. 1. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021 yang telah disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2000-2025. RKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk Tahun 2021 yang berwawasan 1 (satu) tahunan. Renja Perangkat Daerah tahun 2021 merupakan penjabaran teknis RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 juga mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan, serta memperhatikan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 merupakan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka maksud penyusunan RKPD ini adalah untuk memberi arahan dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara khusus, maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 ini adalah :

1. Menjabarkan pelaksanaan tahun ke-6 RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016–2021.
2. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD dan kebutuhan masyarakat yang berkembang serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2021.
3. Mengidentifikasi proyeksi ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan.
4. Memberikan arahan dan tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 ini adalah :

1. Menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah 2021.
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2021.

1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dokumen RKPD tahun 2021 terdiri dari 6 bab, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu bagian wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki ibukota di Barabai. Sejarah terbentuknya Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki napak tilas yang tidak singkat. Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimulai pada bulan September 1953 dimana tokoh-tokoh masyarakat bermusyawarah untuk menuntut agar Barabai menjadi daerah otonom sendiri terpisah dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi daerah Kewedanan Barabai yang pada zaman sebelum Perang Dunia II disebut Barabai Plaatslijke. Pada tanggal 28 Maret 1954 dari hasil berbagai musyawarah dibentuk panitia pendirian daerah Barabai. Selanjutnya, dalam periode pelaksanaan, beberapa partai politik yang ada di Barabai seperti Murba, Parindra dan PNI mengeluarkan resolusi menuntut agar daerah yang dahulunya disebut Kewedanan Barabai dijadikan Kabupaten Daerah Tingkat II.

Setelah perjuangan yang cukup panjang tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Februari 1957 Nomor Pem- 20/2/II, Barabai ditetapkan menjadi Kabupaten Administratif Barabai. Selanjutnya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri mengukuhkan ketetapan tersebut pada tanggal 5 Desember 1959 Nomor Des-575-1-9. Pada tanggal 23 Desember 1959 dilaksanakan serah terima jabatan antara pejabat bupati Hulu Sungai Selatan dengan daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Tengah. Dengan dasar tersebut, maka ditetapkanlah tanggal 24 Desember 1959 sebagai hari lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah sebagai daerah otonom yang melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri hingga saat ini.

Perjalanan sejarah daerah ini dijadikan sebagai sebuah pendorong semangat yang tak lekang oleh waktu dimana pembangunan daerah harus terus diupayakan untuk kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Tengah. Oleh karena itu, rumusan kebijakan daerah melalui data dan informasi yang tersaji pada gambaran umum kondisi daerah ini menjadi titik tolak pengembangan berbagai program prioritas. Pembahasan gambaran umum kondisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan dijabarkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah sebagai berikut :

2.1.1.Aspek Geografi dan Demografi

Dalam pengkajian fenomena pembangunan daerah sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan, data dan informasi terkait geografi dan demografi wilayah menjadi landasan dan dasar kajian yang penting. Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis, utamanya dalam memberikan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran aspek geografi memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah hingga identifikasi wilayah rawan bencana. Selain itu, analisis terhadap aspek demografi dalam pembangunan daerah dapat memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat pelaksana utama pembangunan sekaligus obyek pembangunan adalah penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama utamanya dalam partisipasi

sumberdaya manusia dalam pencapaian pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

a. Karakteristik lokasi dan wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki wilayah seluas 1,770,77 km^2 yang beribukota di Barabai. Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 11 kecamatan, 8 kelurahan dan 161 desa.

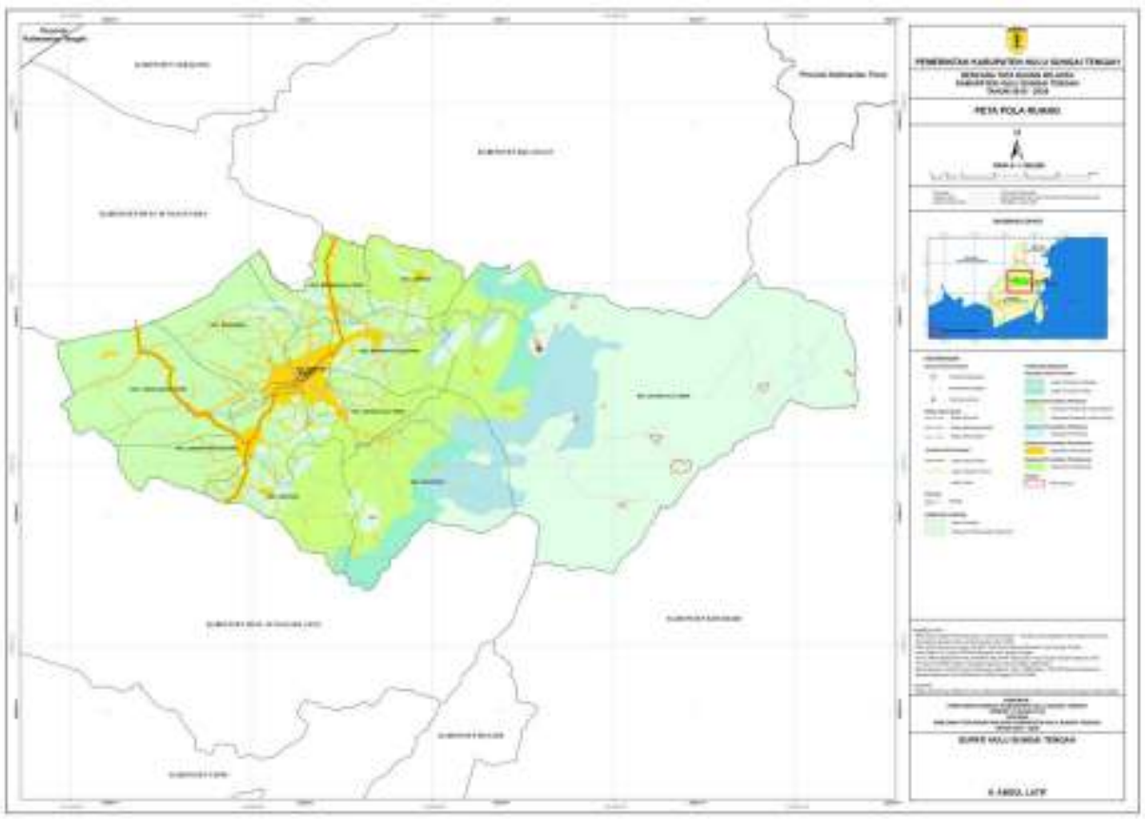
Adapun pembagian wilayah administratif kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2. 1. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (km²)	%	Kelu rahan	Desa	RW	RT
1	Haruyan	Haruyan	101,35	5,72	-	17	51	103
2	Batu Benawa	Pagat	54,44	3,07	-	14	41	80
3	Hantakan	Hantakan	208,55	11,78	-	12	36	60
4	BatangAlai Selatan	Birayang	76,06	4,3	1	18	51	90
5	Batang Alai Timur	Tandilang	778,71	43,98	-	11	33	57
6	Barabai	Barabai	40,71	2,3	6	12	30	90
7	Labuan Amas Selatan	Pantai Hambawang	97,82	5,52	1	17	51	91
8	Labuan Amas Utara	Kasarangan	170,32	9,62	-	16	40	102
9	Pandawan	Pandawan	116,41	6,57	-	21	60	127
10	Batang Alai Utara	Ilung	65,36	3,69	-	14	42	82
11	Limpasu	Limpasu	61,04	3,45	-	9	27	47
	Jumlah		1,770,77	100	8	161	462	929

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka, 2014

Berdasarkan persentase luas wilayah kecamatan, kecamatan terluas adalah Kecamatan Batang Alai Timur dengan wilayah seluas 771,42 Km2 atau 43,73 % dari total wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Barabai dengan wilayah seluas 40,83 Km2 atau 2,31 % dari total wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



Gambar 2. 1. Peta Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	Kab. Balangan
Sebelah Timur	Kab. Kotabaru
Sebelah Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan
Sebelah Barat	Kab. Hulu Sungai Utara

2. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036, secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 2°27'0.9"-2°46'55" lintang selatan dan 115°9'17"-115°53'33" bujur timur. Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, daerah hulu sungai yang umumnya disebut "Banua Anam". Kabupaten ini memiliki jarak 165 km dari Kota Banjarmasin yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan letak geografis dan batas wilayah tersebut, maka posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat strategis dan berada di tengah perlintasan kawasan hulu sungai dan jalur lintas antar provinsi.

3. Topografi

Secara topografi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 3 (tiga) kawasan yakni : kawasan rawa, dataran rendah, dan wilayah pegunungan Meratus yang merupakan kawasan pedalaman dan terpencil. Ketinggian terendah yakni dengan tinggi permukaan (-6)-7 mdpl seluas 24.586,15 ha, tinggi permukaan >7-25 mdpl seluas 30.839,69 ha, tinggi permukaan >25-100 mdpl seluas 22.251,72 ha, tinggi permukaan >100-500 mdpl seluas 49.030,5 ha, tinggi permukaan >500 -1.000 mdpl seluas 41.216,73 ha, sedangkan permukaan tertinggi yakni tinggi permukaan > 1.000 mdpl seluas 9.152,63 ha. Kawasan tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di Gunung Halau-Halau/Gunung Besar Pegunungan Meratus dengan ketinggian ± 1.851 mdpl. Kemiringan tanah bervariasi yaitu terendah 0-2 % seluas 132.517,72 ha, 2-15 % seluas 20.168,37 ha, 15-40 % seluas 21.336,86 ha dan >40 % seluas 3.054,46 ha. Untuk kawasan rawa tersebar berada di Kecamatan Batang Alai Utara, Pandawan, Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan dan Haruyan. Budidaya yang dilaksanakan mayoritas hanya di musim kemarau dengan komoditas padi dan hortikultura. Kawasan rawa di Kabupaten

Hulu Sungai Tengah juga dijadikan sebagai lumbung ikan dan tempat budidaya kerbau. Pada dataran rendah, budidaya dapat dilakukan sepanjang tahun dengan komoditas pertanian yang lebih luas dan beragam yaitu padi dan hortikultura, perikanan serta peternakan. Kawasan dataran rendah lebih potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya, mengingat keunggulan dan kemudahan penangannya dibandingkan kawasan rawa dan pegunungan. Dari dataran rendah inilah, dihasilkan komoditas padi, sayur mayur, ternak besar dan kecil, perikanan budidaya karamba dan kolam, perkebunan karet, kelapa serta tanaman lainnya.

4. Geologi

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari Histosol-HS seluas 8.601,52 ha dan Acrisol–AC (terdiri atas Ferric Acrisols, Humic Acrisols, Lithosols, Humic Ferralsols dan Orthic Acrisols) seluas 168.475,92 ha. Jenis batuan yang terdiri dari formasi batuan, sandi, penyusun, endapan dan luasan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2. Formasi Batuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Formasi	Sandi	Penyusun	Endapan	Luas (Ha)
Formasi Pudak	Kap	*Extrusive: intermediate:*	*Volcanism: submarine*	3.491,26
Formasi Haruyam	Kvh	*Extrusive:mafic: lava*	*Volcanism: submarine*	13.854,10
Granit Kelai	Kgr1	*Intrusive: felsic*	*Plutonism: sub-volcanic*	27.518,15
Tonalit Sepauk	Kls	*Intrusive: felsic: granitoid*	*Plutonism: batholiths*	2.970,46
Intrusi Sintang	Toms	*Intrusive: intermediate*	*Plutonism: sub-volcanic*	11.089,80
Malihan Pinoh	PzTRp	*Metamorphic: schist*	*Metamorphism: regional: high-grade*	8.703,95
Ofiolit Jura	Mub	*Ophiolite*		3.135,90
Endapan alluvium	Qa	*Sediment: clastic: alluvium*	*Terrestrial: alluvial*	56.531,49

Formasi	Sandi	Penyusun	Endapan	Luas (Ha)
Formasi Pitap	Ksp	*Sediment: clastic: flysch*	*Neritic*	30.249,47
Formasi Warukin	Tmw	*Sediment: clastic:sandstone*	*Littoral: delta*	18.352,75
Batu Nunggal	Kpb/LAUT			1.180,13
TOTAL LUAS				177.077

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka, 2014

5. Hidrologi

Secara hidrologi, ada 3 wilayah aliran sungai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sungai Batang Alai, sungai Barabai dan sungai Haruyan dan satu saluran (kanal) pengendali banjir yang membentang dari Kecamatan Batu Benawa ke Rawa Bangkau. Disamping itu ada 1 bendung yaitu Bendung Batang Alai dan 3 Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu DI Intangan di Kecamatan Batang Alai Selatan, DI Haruyan dan DI Mangunang di Kecamatan Haruyan. Sedangkan DI kewenangan kabupaten adalah DI Baruh di Kecamatan Limpasu, DI Kahakan di Kecamatan Batu Benawa dan DI Telang di Kecamatan Batang Alai Utara. Untuk pemanfaatan sumber air dengan debet di atas 100 liter/ detik meliputi sumber mata air sungai Batang Alai dan sungai Barabai.

6. Klimatologi

Secara klimatologi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki jumlah curah hujan tahunan rata-rata pada tahun 2018 adalah sebanyak 191 mm^3 dengan jumlah hari hujan rata-rata sebanyak 11 hari/bulan. Intensitas hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, hal ini terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 3. Curah Hujan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Hujan	
		Hari	MM^3
1	Januari	14	266
2	Februari	14	214
3	Maret	13	242
4	April	16	198
5	Mei	11	118
6	Juni	6	86
7	Juli	7	113
8	Agustus	5	140
9	September	7	106
10	Oktober	7	135
11	November	13	277
12	Desember	17	398
	Rata-rata	11	191

Sumber : Kabupaten HST Dalam Angka Tahun 2019

Intensitas suhu udara di Hulu Sungai Tengah rata-rata 27,2 °C, ini menunjukkan bahwa daerah Hulu Sungai Tengah berhawa sejuk. Sedangkan rata-rata kelembaban udara di Hulu Sungai Tengah adalah 85,3%. Berikut adalah tabel yang menunjukkan rata-rata kelembaban udara dan rata-rata suhu udara selama setahun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4. Rata-Rata Suhu dan Kelembaban Udara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018

No	Bulan	Rata-rata Suhu Udara (°C)	Rata-rata Kelembaban Udara (%)
1	Januari	26,8	87
2	Februari	27,1	86
3	Maret	27,2	86
4	April	27,0	87
5	Mei	27,7	85
6	Juni	27,2	85
7	Juli	26,9	85
8	Agustus	27,1	83
9	September	26,7	82
10	Oktober	27,6	84
11	November	27,7	86
12	Desember	27,1	88
	Rata-rata	27,2	85,3

Sumber : Kabupaten HST Dalam Angka Tahun 2019

7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2035, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terbagi atas 2 kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupa Kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan alam, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi. Lebih rinci dijelaskan sebagai berikut.

a). Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan lindung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seluas 60.087 ha, yang meliputi : Kecamatan Batang Alai Timur seluas 57.357 tepatnya di Desa Batu Tangga, Nateh, Tandilang, Pembakulan, Muara Hungi, Datar Batung, Batu Perahu, Juhu, dan Aing Bantai; Kecamatan Hantakan seluas 2.363 ha, tepatnya di Desa Datar Ajab, Patikalain, Haruyan Dayak, dan Pasting; Kecamatan Haruyan seluas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar tepatnya di Desa Sungai Harang; dan Kecamatan Batang Alai Selatan seluas 256 ha tepatnya di Desa Wawai Gardu dan Tanah Habang. Di dalam kawasan hutan lindung tersebut terdapat kawasan permukiman seluas ha yang tersebar di Kecamatan Batang Alai Timur dan Kecamatan Hantakan.

- Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

  Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan resapan air yang terletak di Kecamatan Hantakan dan Batang Alai Timur.

- Kawasan Perlindungan Setempat

  Kawasan perlindungan setempat terdiri dari : sempadan sungai seluas 604 ha yang berada di sepanjang kanan dan kiri sungai diseluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Kawasan sekitar danau/waduk yang terdapat di Desa Mantaas dan Desa Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara dan Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan; Kawasan sekitar mata air yang meliputi Desa Juhu, Desa Batu Perahu, Desa Aing Bantai, Muara Hungi, Pembakulan, Hinas Kiri, Atiran, Datar Batung, Nateh di Kecamatan Batang Alai Timur, Desa Patikalain, Desa Hinas Kanan, Desa Datar Ajab, Desa Tilahan, Desa Kindingan di Kecamatan Hantakan dan

Desa Batu Panggung di Kecamatan Haruyan; Kawasan sempadan mata air yang meliputi kawasan mata air di Kecamatan Batang Alai Timur, Kecamatan Hantakan, dan Kecamatan Haruyan; dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang meliputi Kawasan RTH di Perkotaan Barabai, Perkotaan Birayang, Perkotaan Pantai Hambawang, Perkotaan Pagat, Perkotaan Pandawan, Perkotaan, Perkotaan Kasarangan, Perkotaan Ilung, Perkotaan Hantakan, Perkotaan Tandilang dan Perkotaan Limpasu.

- Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Alam

  Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan alam meliputi : Lingkungan non bangunan yang terdiri dari monumen Divisi IV ALRI di Desa Birayang Surapati Kecamatan Batang Alai Selatan, monumen Tugu Pahlawan di Taman Dwi Warna Kecamatan Barabai, dan peninggalan situs Batu di Desa Juhu Kecamatan Batang Alai Timur; Lingkungan bangunan non gedung yang terdiri dari makam H. Amin Desa Walangku Kecamatan Labuan Amas Utara, situs makam Tumenggung Jayapati Kecamatan Limpasu, makam wali katum (M. Ramli) desa Tabudarat Kecamatan Labuan Amas Selatan, makam Pahlawan di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa dan makam Pahlawan di Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan; dan Lingkungan bangunan gedung yang terdiri dari Gedung Sarikat Islam dan Balai Rakyat di Kecamatan Barabai.

- Kawasan Rawan Bencana Alam

  Kawasan Rawan Bencana Alam terdiri dari : Kawasan rawan tanah longsor, yang meliputi Desa Muara Hungi, Desa Batu Perahu, Desa Atiran, Desa Hinas Kiri, Desa Juhu di Kecamatan Batang Alai Timur, Desa Alat, Desa Hinas Kanan, Desa Alat, Desa Murung B, Desa Patikalain, Desa Haruyan Dayak,

Desa Pasting, Desa Tilahan, Desa Naungan Seberang, Desa Kindingan di Kecamatan Hantakan, dan Desa Batu Panggung di Kecamatan Haruyan; Kawasan rawan banjir yang meliputi sempadan Sungai Batang Alai, Sungai Barabai dan Sungai Haruyan; Kawasan rawan kebakaran meliputi kawasan rawan kebakaran hutan di Kecamatan Batang Alai Timur, Batang Alai Utara, Hantakan, Haruyan, Labuan Amas Utara dan Pandawan serta Kawasan rawan kebakaran permukiman di Kecamatan Barabai.

- Kawasan Lindung Geologi

  Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yang meliputi : daerah air tanah langka di Kecamatan Barabai, Pandawan dan Batu Benawa; daerah yang memiliki akuifer produktifitas kecil di Kecamatan Batang Alai Utara dan Kecamatan Labuan Amas Selatan; dan daerah yang memiliki jenis tanah bergambut di Kecamatan Labuan Amas Utara, Pandawan dan Labuan Amas Selatan.

b). Kawasan Budidaya

Sedangkan untuk penggunaan lahan kawasan budidaya, terdiri atas : kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan partanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industry, kawasan peruntukan parawisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya. Lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdiri atas hutan produksi tetap seluas 8.816 ha yang tersebar di Kecamatan Hantakan, Batang Alai Timur, Haruyan dan hutan produksi terbatas

seluas 14.007 ha yang tersebar di Kecamatan Batang Alai Timut, Batang Alai Selatan, dan Hantakan.

- Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri atas Kawasan peruntukan pertanian lahan basah yang telah ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian berkelanjutan seluas 43.600 ha, kawasan peruntukan pertanian lahan kering seluas 4.526 ha, kawasan peruntukan hortikultura yang tersebar di seluruh kecamatan, Kawasan peruntukan perkebunan seluas 31.907 ha, Kawasan peruntukan peternakan yang meliputi kawasan perternakan kerbau rawa, kawasan perternakan sapi dan kawasan peternakan unggas.

- Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Meliputi : kawasan perikanan budidaya air tawar di seluruh kecamatan; kawasan perikanan tangkap di Kecamatan Labuan Amas Utara, Pandawan, Haruyan, Labuan Amas Selatan, dan Batang Alai Utara; kawasan industri pengolahan dan pemasaran ikan di Kecamatan Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan, Pandawan, Haruyan, dan Kecamatan Barabai; kawasan reservat konservasi perikanan seluas 10 ha di Desa Manta'as Kecamatan Labuan Amas Utara; kawasan pendaratan ikan di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara.

- Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi : mineral logam terdiri dari emas, mangan, besi dan galena; mineral bukan logam terdiri dari phospat dan lempung; batuan terdiri dari granit, andesit, batu gamping, marmer dan tanah merah.

- Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas kawasan peruntukan industri menengah berupa industri karet di Kecamatan Haruyan dan Indutri Logam di Kecamatan Batang Alai Selatan; kawasan Industri kecil dan mikro berupa industry kopiah haji di Kecamatan Labuan Amas Selatan, industry kerajinan anyaman, batubata, meubel di Kecamatan Pandawan, industry meubel di Kecamatan Batu Benawa, industry jasa perbengkelan dan mesin dan industry produk makanan olahan di Kecamatan Barabai, industry kerajinan sapu ijuk dan mainan tradisional di Kecamatan Haruyan, industry meubel dan hasil perikanan di Kecamatan Labuan Amas Utara, industry aneka makanan di Kecamatan Batang Alai Selatan, dan industry arang kelapa di Kecamatan Limpasu.

- Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan parawisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari parawisata budaya meliputi parawisata religious di kecamatan Pandawan, Barabai dan Labuan Amas Selatan, parawisata budaya di Kecamatan Haruyan dan Labuan Amas Utara; Parawisata alam yang tersebar di Kecamatan Batu Benawa, Hantakan, Haruyan, Batang Alai Timur, Batang Alai Selatan dan Limpasu; dan yang terakhir parawisata buatan di Kecamatan Barabai berupa wisata kuliner pujasera dan kerajinan jamu sari gading, Kecamatan Haruyan berupa wisata kerajinan anyaman ijuk, Kecamatan Pandawan berupa wisata kerajinan anyaman purun dan Kecamatan Labuan Amas Selatan berupan wisata kerajinan kopiah haji dan sulam bordir.

- Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seluas 12.730 ha, yang tersebar pada Kawasan Permukiman Barabai seluas 2.535 ha, kawasan

permukiman Batang Alai Selatan seluas 1.326 ha, kawasan permukiman Batang Alai Timur seluas 213 ha, Kawasan Permukiman Batang Alai Utara seluas 1.046 ha, Kawasan Permukiman Batu Benawa seluas 617 ha, Kawasan Permukiman Hantakan seluas 417 ha, Kawasan Permukiman Haruyan seluas 874 ha, Kawasan Permukiman Labuan Amas Selatan seluas 1.773 ha, Kawasan Permukiman Labuan Amas Utara seluas 1.615 ha, Kawasan Permukiman Limpasu seluas 447 ha, dan Kawasan Permukiman Pandawan seluas 1.508 ha.

- Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan Peruntukan Lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari kawasan perdagangan yang tersebar di Kecamatan Barabai, Labuan Amas Selatan, Batang Alai Selatan dan Pandawan; kawasan pertahanan dan keamanan meliputi Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer (Kodim)-1002/Barabai dan Batalion Yonif-621/Manuntung di Kecamatan Barabai, Kepolisan Sektor dan Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di wilayah kecamatan.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan keadaan geografis, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai daya dukung untuk mengembangkan berbagai potensi sumberdaya dengan kebijakan pembangunan spasial dalam rumusan kawasan strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Daya dukung geografis tersebut antara lain letak Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berada di pusat banua anam dan menjadi perlintasan jalur antar daerah dan jalur antar provinsi sehingga posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat strategis untuk menjadi pusat perdagangan dan bisnis. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat mendukung untuk berbagai budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Dalam rangka realisasi pembangunan, dirumuskan kawasan strategis untuk mendukung potensi

pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2. 5. Rencana Kawasan Strategis
Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016-2035

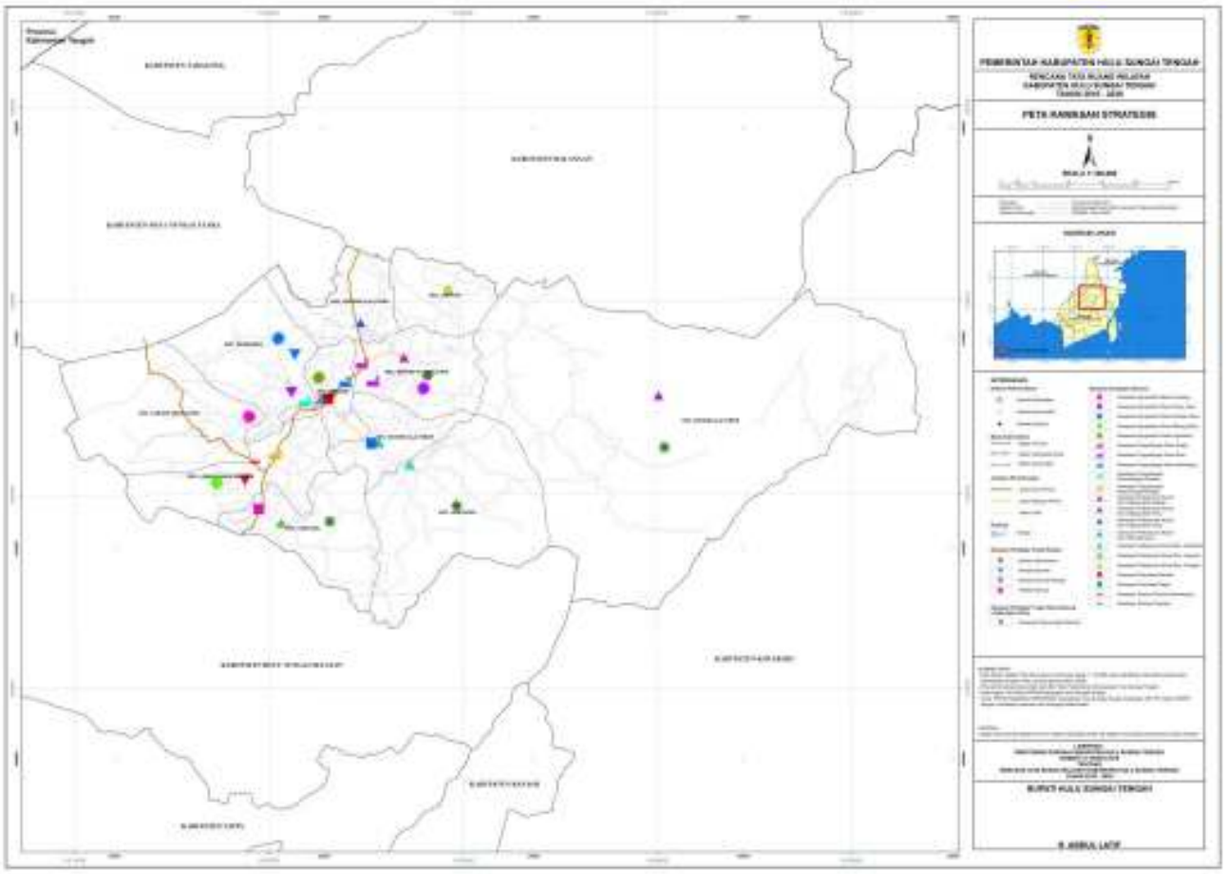
Kawasan Strategis	Sudut Kepentingan	Lokasi	
Kabupaten	Kepentingan pertumbuhan ekonomi	Perkotaan Barabai sebagai ibukota kabupaten	
		Kawasan Pagat di Kecamatan Batu Benawa	
		Kawasan *agropolitan*	Pasar agribisnis di Kecamatan Barabai
			Desa Banua Kupang di kecamatan Labuan Amas Utara
			Desa Cukan Lipai di Kecamatan Batang Alai Selatan
			Desa Kambat Utara di Kecamatan Pandawan
			Desa Murung Taal dan Mahang Baru di Kecamatan Labuan Amas Selatan
		Kawasan pergudangan	Desa Mandingin di Kecamatan Barabai
			Desa Kapar dan Desa Kias di kecamatan Batang Alai Selatan
			Desa Sungai Rangas di Kecamatan Labuan Amas Selatan
			Desa Matang Ginalun di Kecamatan Pandawan

Kawasan Strategis	Sudut Kepentingan	Lokasi	
			Kawasan Jalan Lingkar Utara dan Selatan Kota Barabai
		Kawasan terminal Pantai Hambawang di Kecamatan Labuan Amas Selatan	
		Kawasan terminal terpadu di Kecamatan Barabai	
		Kawasan *strategis* ekonomi jalan lingkar utara dan lingkar selatan Kota Barabai	
		Kawasan perkebunan karet	Kecamatan Batang Alai Selatan
			Kecamatan Hantakan
			Kecamatan Batang Alai Timur
			Kecamatan Limpasu
			Kecamatan Batang Alai Utara
			Kecamatan Batu Benawa
			Kecamatan Haruyan
	Kepentingan Sosial Budaya	Mesjid Karamat Pelajau di desa Pelajau kecamatan Pandawan	
		Mesjid Karamat Desa Jatuh kecamatan Pandawan	
		Makam Wali Katum di desa Tabudarat Hulu kecamatan Labuan Amas Selatan	
		Wisata Budaya di Desa Barikin Kecamatan Haruyan	
	Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Kawasan pegunungan meratus di Kecamatan Batang Alai Timur, Hantakan, sebagian Kecamatan Haruyan dan Batang Alai Selatan	

Kawasan Strategis	Sudut Kepentingan	Lokasi
	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan pegunungan meratus di Kecamatan Batang Alai Timur, Hantakan, sebagian Kecamatan Haruyan dan Batang Alai Selatan

Sumber : RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2035

Detail lokasi kawasan strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Gambar 2. 2. Kawasan Strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah

c. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2011 berjumlah 244.889 Jiwa, sedangkan hasil proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2018 diperkirakan berjumlah 269.384 jiwa. Dalam kurun waktu enam tahun, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

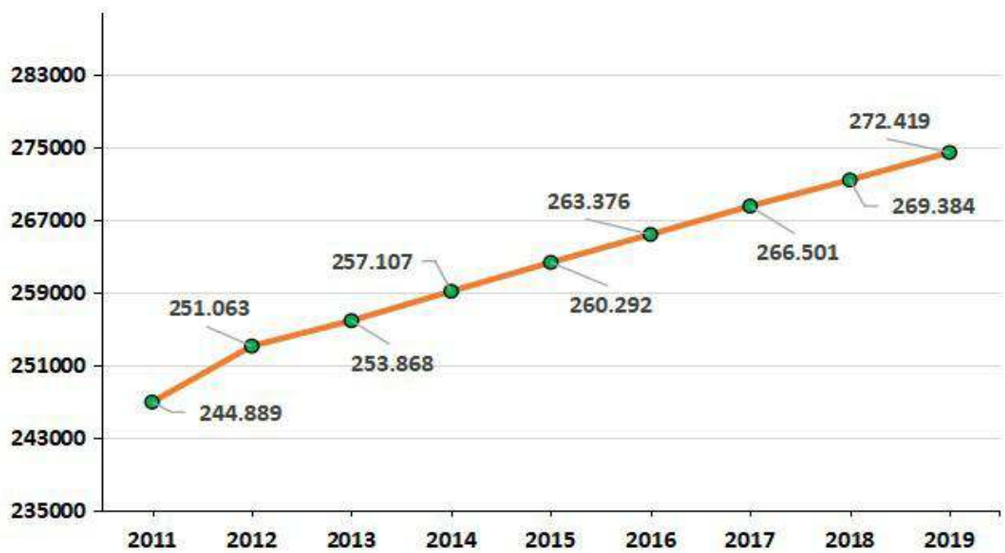
mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 15.403 jiwa atau sebesar 8,83%. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2019

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total Penduduk
2011	122.213	122.676	244.889
2012	125.312	125.751	251.063
2013	126.887	126.981	253.868
2014	128.464	128.643	257.107
2015	130.252	130.040	260.292
2016	131.875	131.501	263.376
2017	133.695	132.806	266.501
2018	135.173	134.211	269.384
2019	136.778	135.641	272.419

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus meningkat, dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 berkisar rata-rata sebesar 1,382%.



Gambar 2. 3. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 - 2019

Pada tahun 2019, terjadi perubahan struktur jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang pada tahun-tahun sebelumnya jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki. Diketahui bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki, dimana pada tahun 2019 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 136.778 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 135.641 jiwa dengan sex ratio 100,84.

Tabel 2. 7. Sex Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk	Sex ratio
1	Haruyan	101,35	22.837	100,80
2	Batu Benawa	54,44	20.085	100,53
3	Hantakan	208,55	12.975	102,51
4	Batang Alai Selatan	76,06	23.775	98,65
5	Batang Alai Timur	778,71	8.065	100,02
6	Barabai	40,71	60.873	101,33
7	Labuan Amas Selatan	97,82	29.029	96,91
8	Labuan Amas Utara	170,32	30.600	104,18
9	Pandawan	116,41	33.754	100,81
10	Batang Alai Utara	65,36	19.239	100,85
11	Limpasu	61,04	11.187	103,66
Jumlah		1770,77	272.419	100,84

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2020

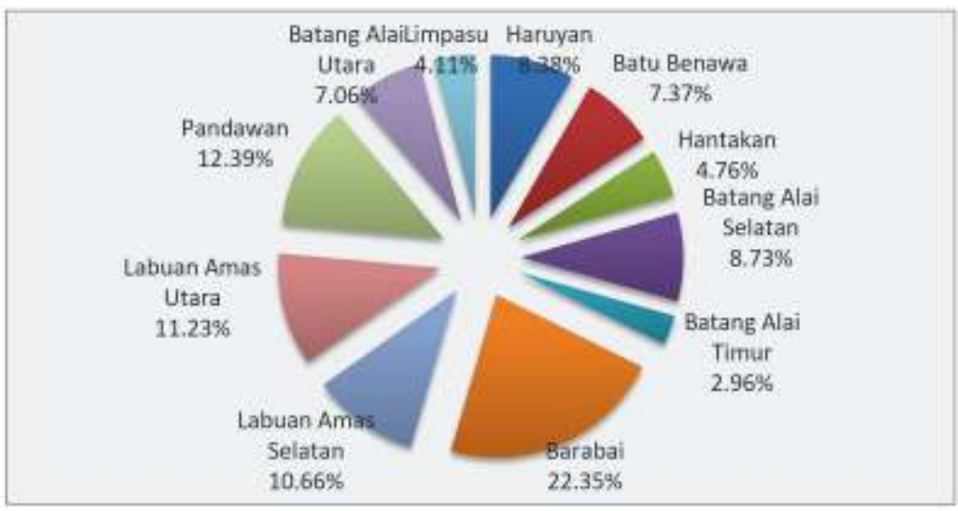
Meskipun terjadi perubahan struktur jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, tetap terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya baik jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Peningkatan jumlah penduduk ini akan berdampak pada kepadatan penduduk. Pada tahun 2019, tingkat Kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 154 jiwa/Km^2. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8. Kepadatan Penduduk
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per km2)
1	Haruyan	101,35	22.837	8,38	225
2	Batu Benawa	54,44	20.085	7,37	369
3	Hantakan	208,55	12.975	4,76	62
4	Batang Alai Selatan	76,06	23.775	8,73	313
5	Batang Alai Timur	778,71	8.065	2,96	10
6	Barabai	40,71	60.873	22,35	1495
7	Labuan Amas Selatan	97,82	29.029	10,66	297
8	Labuan Amas Utara	170,32	30.600	11,23	180
9	Pandawan	116,41	33.754	12,39	290
10	Batang Alai Utara	65,36	19.239	7,06	294
11	Limpasu	61,04	11.187	4,11	183
Jumlah		1770,77	272.419	100,00	154

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2020

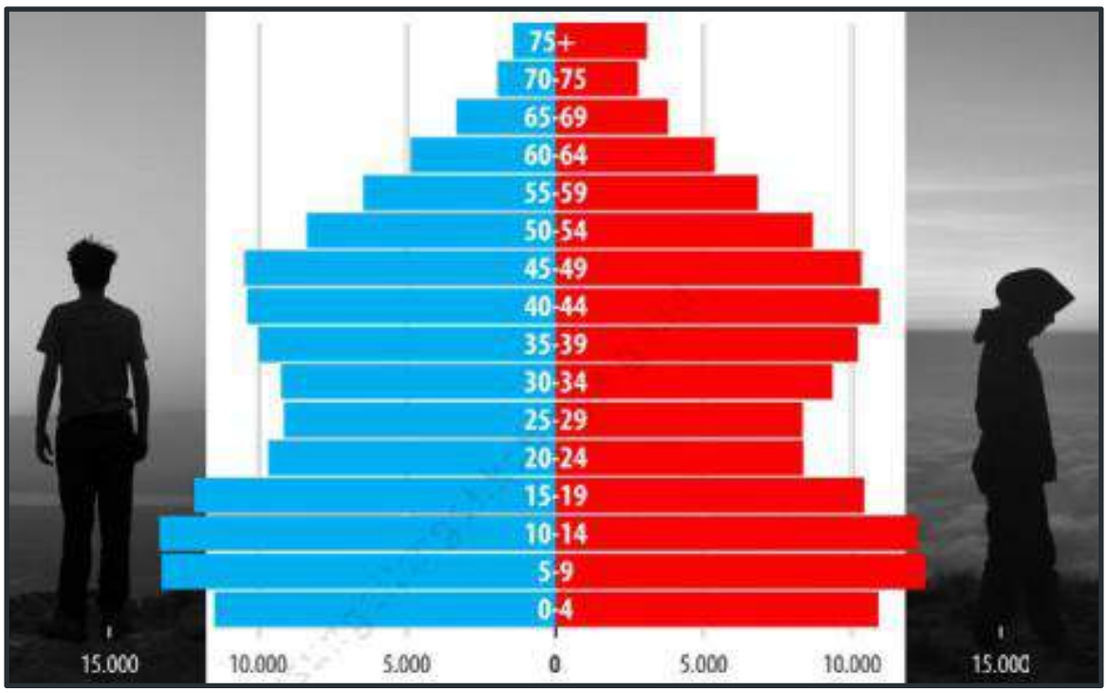
Tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat di Kecamatan Barabai yakni sebesar 1.495 Jiwa/Km2 yang merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Batang Alai Timur sebesar 10 Jiwa/Km2 yang merupakan Kecamatan terluas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ketimpangan distribusi penduduk di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2019, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 4. Distribusi Penduduk
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019

Distribusi penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilihat berdasarkan wilayah kecamatan tidak merata, terdapat *gap* yang cukup tinggi antara kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak (Kecamatan Barabai sebanyak 60.041 jiwa atau 22,29%) dengan kecamatan yang minim penduduk (Kecamatan Batang Alai Timur sebanyak 7.983 jiwa atau 2,96%). Konsentrasi penduduk tertinggi di Kecamatan Barabai yang merupakan ibukota dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu, penduduk juga banyak tinggal di Kecamatan lain, seperti Kecamatan Pandawan (12,38%) yang sebagian wilayahnya dekat dengan perkotaan Barabai, Kecamatan Labuan Amas Utara (11,23%) dan Labuan Amas Selatan (10,67%) yang sebagian wilayahnya dilalui jalur antar provinsi. Ketimpangan distribusi penduduk ini dikarenakan tidak meratanya fasilitas antar wilayah kecamatan. Daerah perkotaan lebih menarik sebagian besar penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikarenakan fasilitasnya yang lebih lengkap.

Sebagai bahan perbandingan, maka berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 269.384 jiwa yang terdiri atas 135.173 jiwa penduduk laki-laki dan 134.211 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin 100,7. Perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seimbang. Selain itu, sebanyak 73.665 jiwa (27,35%) penduduk kelompok umur 0-14 tahun, 179.394 jiwa (66,59%) penduduk kelompok umur 15-64 tahun, dan 16.325 jiwa (6,06%) penduduk kelompok umur 65 tahun keatas dengan rasio ketergantungan 50,16. Setiap 100 penduduk umur produktif harus menanggung 51 penduduk bukan angkatan kerja dan penduduk umur tidak produktif.



Gambar 2. 5. Piramida Penduduk
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki piramida penduduk muda atau ekspansif. Sebagian besar penduduk merupakan penduduk umur muda dengan jumlah kelahiran dan kematian masih cukup tinggi. Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah didominasi penduduk umur sekolah atau penduduk kelompok umur 5-19 tahun. Piramida penduduk meramping pada penduduk kelompok umur 20-34 tahun.

Jumlah kelahiran selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini ditandai dengan semakin kecilnya jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok umur 5-9 tahun. Hal ini terkait dengan semakin intensifnya program Keluarga Berencana (KB) dan meningkatnya kesadaran pasangan usia subur untuk mengatur kelahiran. Selain itu, masih banyaknya penduduk usia tua menunjukkan semakin baiknya tingkat kesehatan dan meningkatnya angka harapan hidup di Kabupaten HST.

2.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai bagian dari capaian pembangunan yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan social serta seni budaya dan olahraga. Pada aspek ini terlihat sebuah f*enomena* daerah serta *analisis* dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

a. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah antara lain: Produk *Domestik Regional Bruto* (3), PDRB Perkapita, struktur perekonomian wilayah, Indeks gini, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju *inflasi* hingga angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam *monitoring* dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan.

1. Nilai Produk *Domestik Regional Bruto*

   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu regional yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. Pada penghitungan periode ini, metode penghitungan PDRB mengalami perubahan terkait tahun dasar dan metodologi penghitungannya. Rincian sektor lapangan usaha pada PDRB meningkat menjadi 17 kategori dimana sebelumnya hanya 9 sektor lapangan usaha. Peningkatan cakupan kategori ini juga menimbulkan efek berupa revisi dan penyempurnaan nilai PDRB pada lima tahun terakhir sehingga analisis periodik juga terbatas pada penghitungan dengan metode yang baru.

Berdasarkan lapangan usaha, analisis PDRB terbagi atas Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK).

Analisis PDRB atas dasar harga berlaku bertujuan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun yang bersangkutan dan untuk menunjukkan pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja pada lapangan usaha-lapangan usaha di suatu wilayah tertentu pada tahun yang bersangkutan. PDRD ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 9. PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2019

	Lapangan Usaha *Industry*	2016	2017	2018*	2019**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry and Fishing*	1 438 481,11	1 552 876,09	1 653 103,25	1 696 065,98
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	41 245,20	45 103,30	49 115,27	53 049,94
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	834 626,42	909 127,66	954 457,34	1 007 380,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	8 009,75	9 396,53	11 016,36	11 863,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities*	26 596,51	29 616,70	32 011,69	35 009,69
F	Konstruksi/*Construction*	485 430,83	534 455,30	571 076,24	609 608,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	590 745,17	650 138,90	727 025,65	822 619,29
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	280 293,47	295 713,33	314 752,10	339 749,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	199 080,72	216 325,03	238 989,59	265 640,95
J	Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*	230 403,55	254 175,64	279 494,09	306 504,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	114 810,84	130 691,05	144 034,66	155 356,37
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	184 570,40	194 416,89	212 244,46	231 202,07
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	11 030,67	12 209,51	13 591,73	14 816,96
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	594 262,35	625 694,83	674 696,52	744 384,49
P	Jasa Pendidikan/*Education*	417 915,02	446 506,38	481 935,69	522 363,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ *Human Health and Social Work Activities*	112 486,81	119 507,06	128 888,85	140 191,11
R,S,T,U	Jasa lainnya/*Other Services Activities*	77 646,01	84 026,42	92 370,35	102 173,30
	Produk Domestik Regional Bruto ***Gross Regional Domestic Product***	**5 647 634,82**	**6 109 980,60**	**6 578 803,84**	**7 057 979,38**

Sumber/*Source:* Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah/*BPS-Statistics of Hulu Sungai Tengah Regency*

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2020

Dilihat dari Tabel diatas, PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami kenaikan sebesar 24,97%. Hal ini menunjukan bahwa adanya peningkatan kemampuan sumber daya ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan bertujuan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun berdasarkan pada tahun dasar. Tahun dasar perhitungan PDRB ADHK adalah tahun 2010. PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 10. PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2019

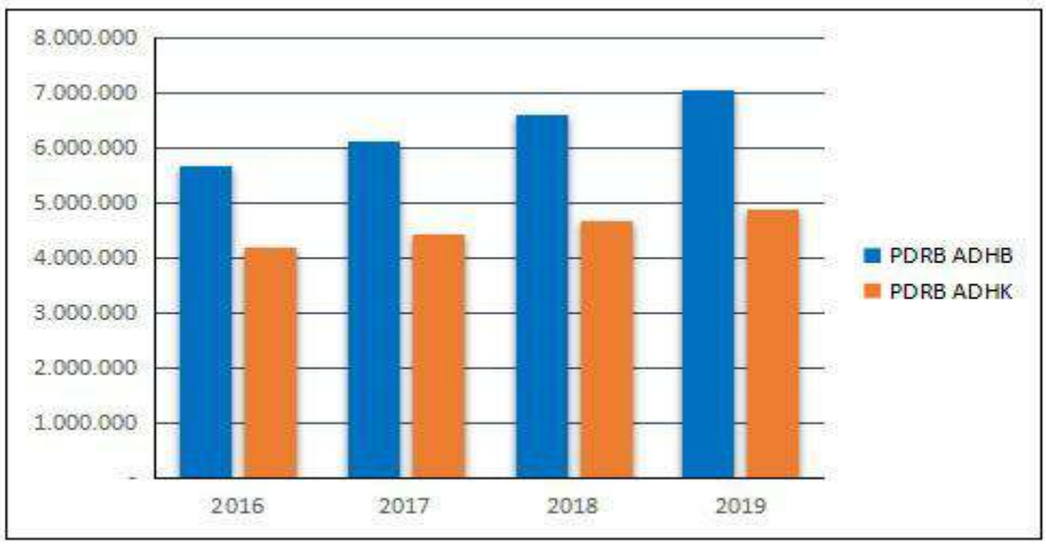
	Lapangan Usaha *Industry*	2016	2017	2018*	2019**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry and Fishing*	1 096 329,53	1 160 066,07	1 210 146,83	1 229 216,77
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	30 010,91	32 551,46	34 546,86	36 949,77
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	621 114,41	654 098,45	682 458,43	706 125,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	6 150,30	6 465,67	6 931,29	7 272,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities*	20 529,28	22 101,85	23 346,19	25 127,01
F	Konstruksi/*Construction*	364 374,64	391 177,42	407 254,81	428 013,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	425 930,53	456 360,29	492 947,42	532 688,25
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	204 016,06	214 432,81	225 343,96	237 392,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	152 504,70	161 485,74	172 438,32	185 766,16
J	Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*	192 365,25	205 835,24	220 717,12	238 166,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	83 559,24	91 212,05	96 408,78	101 011,30
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	142 590,37	149 731,01	159 786,54	170 901,27
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	7 689,67	8 218,90	8 826,28	9 393,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	405 706,31	416 555,90	432 551,65	457 867,36
P	Jasa Pendidikan/*Education*	302 861,57	318 700,93	336 476,78	358 766,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ *Human Health and Social Work Activities*	80 882,53	84 827,17	88 480,02	94 160,56
R,S,T,U	Jasa lainnya/*Other Services Activities*	55 338,23	58 170,78	61 637,76	65 306,70
	Produk Domestik Regional Bruto ***Gross Regional Domestic Product***	**4 191 953,53**	**4 431 991,74**	**4 660 299,03**	**4 884 126,26**

Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah/*BPS-Statistics of Hulu Sungai Tengah Regency*

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2020

Rentan waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 PDRD ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus mengalami peningkatan sebesar 16,51%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2019.

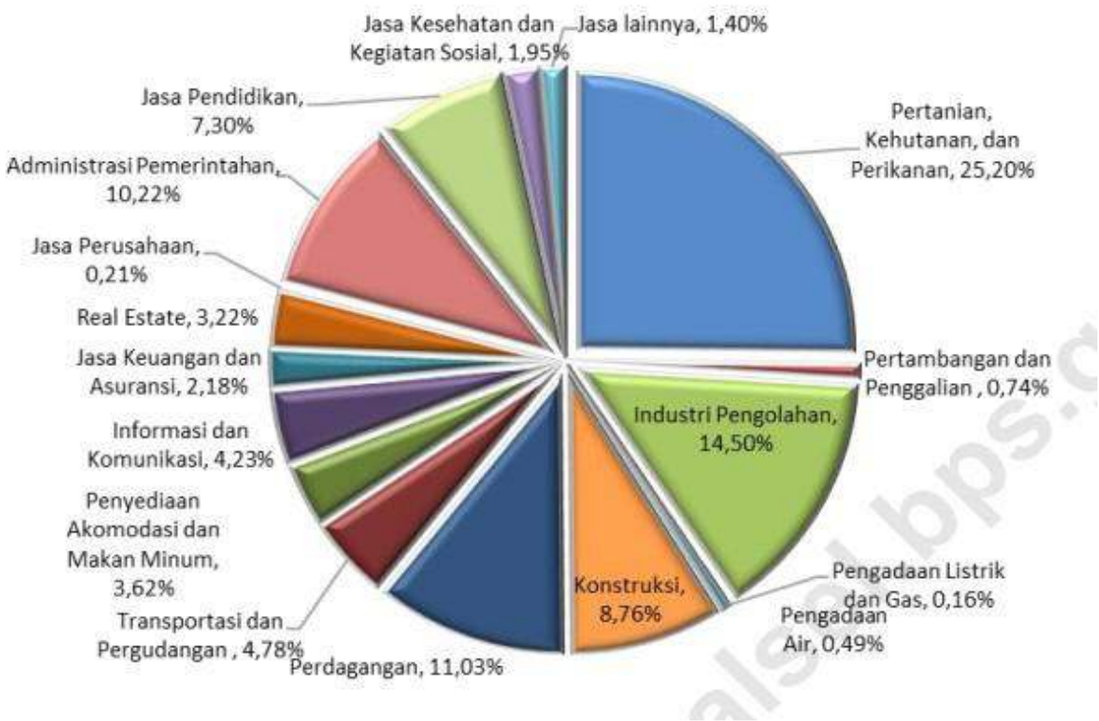
Dilihat dari perkembangan PDRB ADHB maupun PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Perkembangan ini menunjukan adanya perbaikan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 6. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2019

Pada tahun 2018, perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicirikan oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kategori lain yang juga mendominasi perkembangan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah kategori Industri Pengelohan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Administrasi Pemerintahan. Kategori-kategori dominan tersebut memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Hulu Sungai

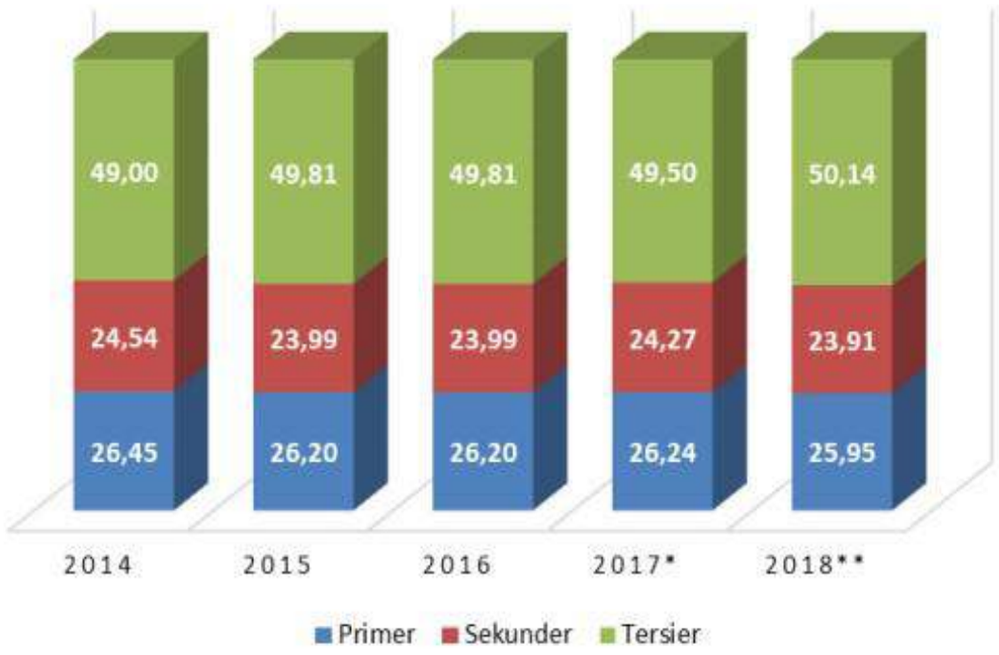
Tengah sebesar 60,95%. Distribusi masing-masing sektor/ kategori pada tahun 2018 tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut.



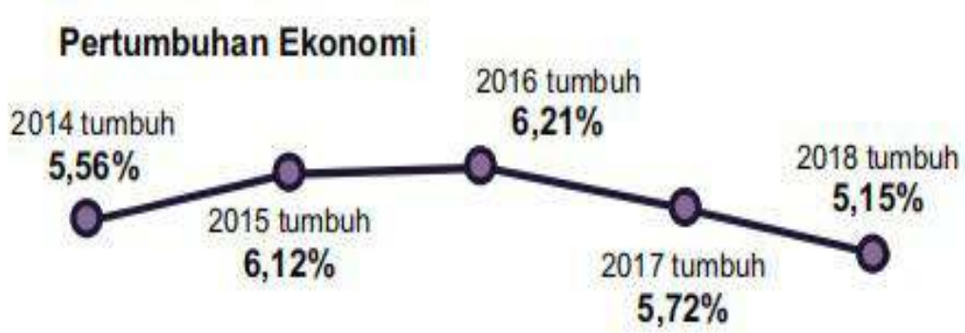
Gambar 2. 7. Distribusi Struktur Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018

Jika dilihat dari sisi sektornya, perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2014 sampai 2018 didominasi oleh sektor Tersier. Kontribusinya pun selama kurun waktu lima tahun tersebut memiliki tren yang meningkat. Peningkatan pada sektor Tersier di tahun 2018 tersebut terutama dikarenakan peningkatan pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sejak tahun 2016 hingga 2018 memiliki kecenderungan melambat. Rentang pertumbuhan ekonominya tahun 2014 - 2018 antara 5,15% sampai 6,21%. Perekonomian tahun 2018 menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Salah satunya dikarenakan adanya perlambatan pertumbuhan pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Industri Pengolahan.



Gambar 2. 8. Peranan Sektor PDRB
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2014 - 2018 (persen)



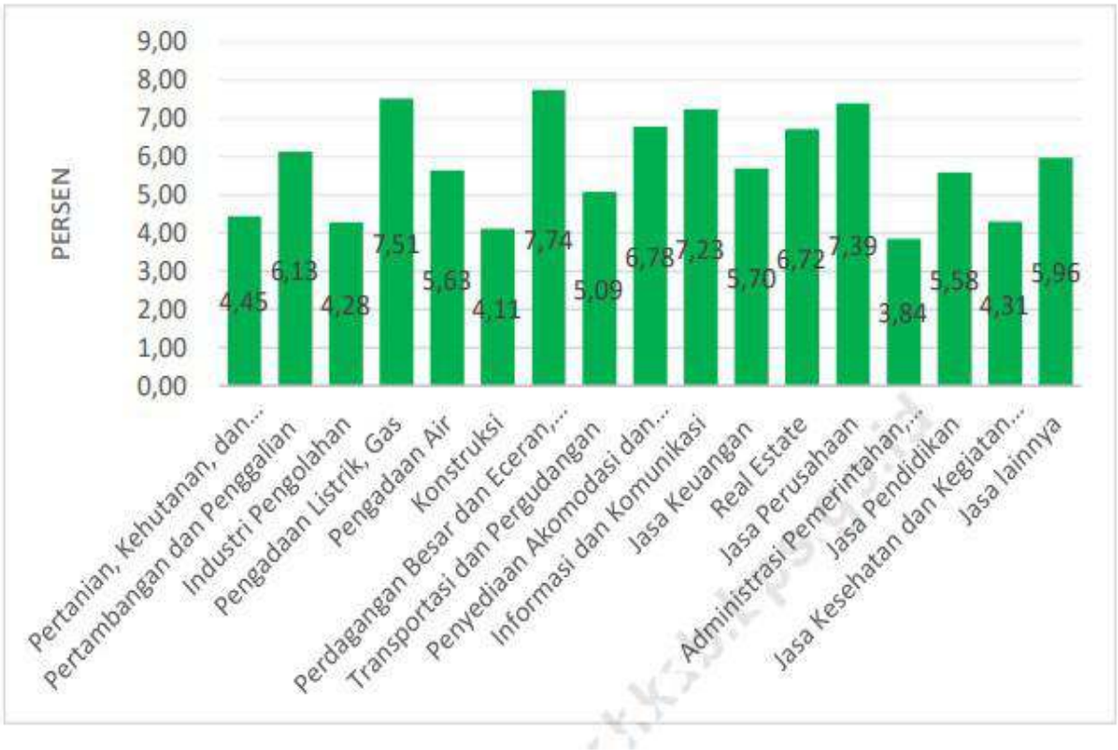
Gambar 2. 9. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2014 - 2018 (persen)

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 7,74 persen. Salah satu penyebabnya adalah telah dibukanya Pasar Agrobisnis di Barabai yang lebih besar dan representatif. Pasar Agrobisnis bertujuan untuk mendukung pemasaran hasil pertanian masyarakat Hulu Sungai Tengah.

Pembangunan Pasar Agrobisnis merupakan langkah yang tepat, selain mendukung perekonomian masyarakat, juga lebih menyentuh kepentingan petani dan kebutuhan masyarakat.

Umumnya para petani butuh wadah untuk memperluas akses pemasaran untuk mempercepat proses jual beli. Hal tersebut karena hasil panen dari produk pertanian tidak tahan lama, sehingga butuh proses jual beli yang sesegera mungkin.

Tertinggi kedua adalah pengadaan listrik dan gas, mampu tumbuh sebesar 7,51 persen. Maraknya pembangunan perumahan memicu kenaikan permintaan akan listrik dan gas. Tertinggi ketiga ditempati oleh jasa perusahaan dengan pertumbuhan mencapai 7,39 persen.

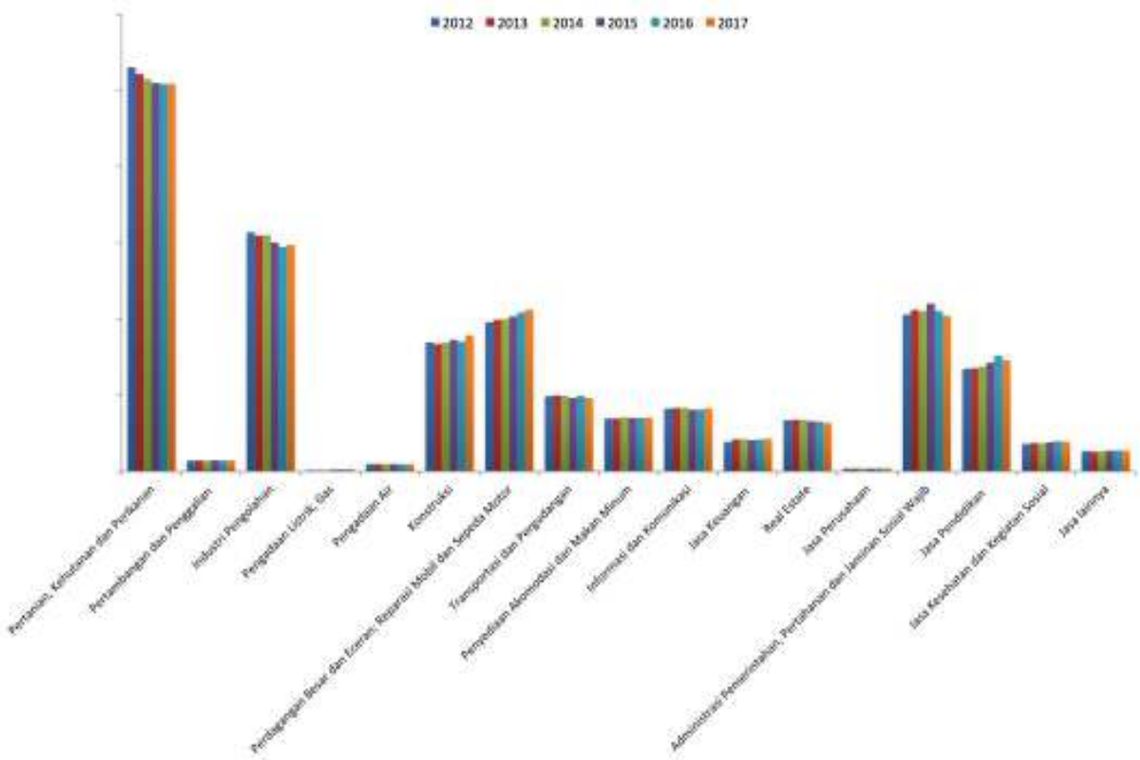


Gambar 2. 10.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018

Dari 17 lapangan usaha yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan positif. Dua belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar 5 hingga 10 persen. Sedangkan sisanya mengalami pertumbuhan positif namun kurang dari 5 persen. Ada lima lapangan usaha yang pertumbuhannya masih dibawah 5 persen antara lain adalah: pertanian, kehutanan, dan perikanan (4,45 persen); industri pengolahan (4,28 persen); konstruksi (4,11 persen); administrasi pemerintahan,

pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar (3,84 persen); dan jasa kesehatan (4,31 persen).

Produktivitas pertanian yang masih rendah menyebabkan kategori tersebut hanya tumbuh sebesar 4,45 persen. Sementara itu, adanya efisiensi anggaran pemerintah menjadikan lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib hanya mampu tumbuh sebesar 3,84 persen. Efisiensi anggaran juga berdampak pada pertumbuhan konstruksi yang hanya mencapai 4,11 persen.



Gambar 2. 11. Perkembangan Sektor Dominan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2017

Kecenderungan penurunan pada sektor pertanian yang merupakan sektor dominan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu diwaspadai. Hal ini dikarenakan terjadinya pergeseran perekonomian daerah atau makin ditinggalkannya sektor primer karena kurangnya nilai tambah yang diterima. Kasus yang sama juga terjadi pada sektor industri pengolahan, penurunan ini menggambarkan bahwa industri pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak mampu bersaing dengan produk industri pengolahan dari daerah lain, sehingga perlu

upaya agar sektor ini tidak semakin menurun distribusinya. Sektor dominan lainnya seperti sektor jasa pemerintah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan sektor ini seiring dengan perkembangan kemampuan fiskal daerah, semakin tinggi kemampuan fiskal daerah maka semakin tinggi kontribusi sektor jasa pemerintah terhadap perekonomian daerah, begitu juga sebaliknya. Sektor dominan yang merupakan sektor potensial untuk dikembangkan yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sebagai daerah yang posisinya berada di tengah-tengah kawasan hulu sungai merupakan kawasan yang ideal sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Selain struktur perekonomian, dapat diketahui laju pertumbuhan PDRB pada masing-masing sektor dengan melihat kepada PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini yang menyajikan laju pertumbuhan (%) Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut Lapangan Usaha, dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

Nilai PDRB Hulu Sungai Tengah atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah terbebas dari pengaruh inflasi.

Selama 9 (sembilan) tahun terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi, namun selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2017 dan 2018, laju pertumbuhan ekonomi melambat, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 11. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014-2018

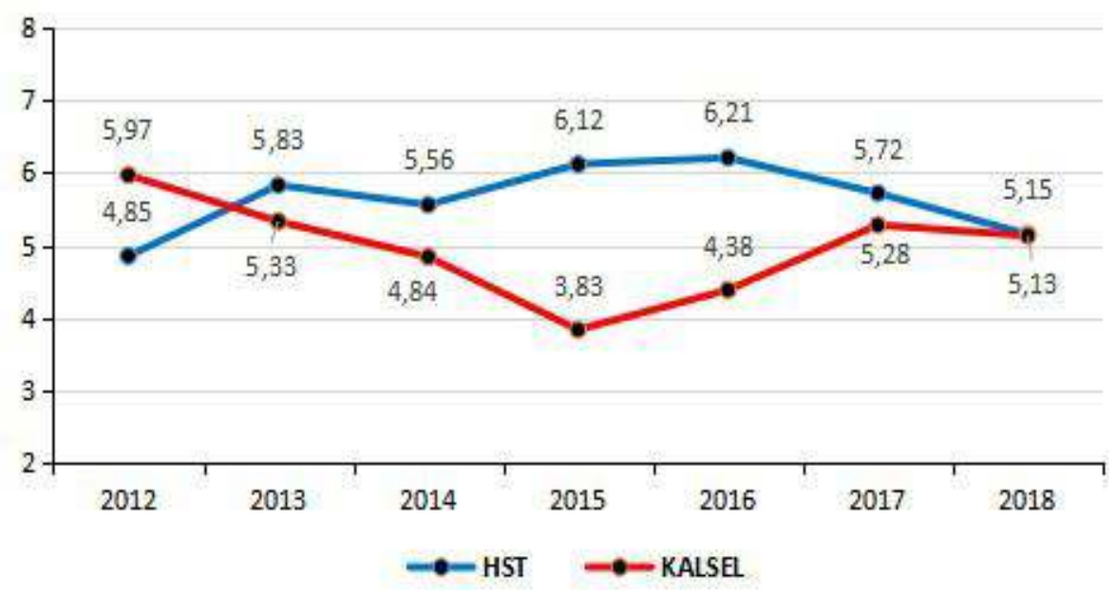
Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry & Fishing*	3,59	4,99	5,89	5,73	4,45
B	Pertambangan dan Penggalian/ *Mining & Quarrying*	6,43	5,86	5,33	8,47	6,13
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	4,46	2,04	5,83	5,56	4,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity & Gas*	18,09	30,97	5,90	5,13	7,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ *Water supply, Sewerage, Waste Management &Remediation Activities*	6,97	6,77	7,12	7,66	5,63
F	Konstruksi/*Construction*	6,54	7,33	6,33	7,36	4,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ *Wholesale &Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles*	7,05	9,37	7,91	6,89	7,74
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation & Storage*	5,85	5,73	6,70	5,11	5,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accomodation & food Service Activities*	6,23	7,17	7,52	5,89	6,78
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information &Communication*	7,89	8,99	8,90	7,00	7,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial & Insurance Activities*	6,36	4,43	6,31	9,16	5,70
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	6,89	5,09	6,02	5,01	6,72
M,N	Jasa Perusahaan/*Bussiness Activities*	5,11	5,70	7,33	6,88	7,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration & Defence; Compulsory Social Security*	5,76	8,75	2,06	2,67	3,84
P	Jasa Pendidikan/*Education*	8,40	7,95	7,99	5,23	5,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ *Human Health and Social Work Activities*	6,34	7,63	9,13	4,88	4,31
R,S,T,U	Jasa lainnya/*Other Service Activities*	7,45	6,00	6,97	5,12	5,96
Produk Domestik Regional Bruto/Gross *Regional Domestic Product*		5,56	6,12	6,21	5,72	5,15

*Angka sementara/*Preliminary Figures*
**Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Sumber : PDRB Kabupaten HST Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2014-2018

Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2018 (PDRB ADHK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 4,66 triliun rupiah. Angka tersebut naik dibandingkan tahun 2017 yang hanya 4,43 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang mencapai 5,72 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017, namun angkanya mendekati sama denga laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018, yang juga mengalami sedikit penurunan dari tahun 2017 sebelumnya. Berikut grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018.

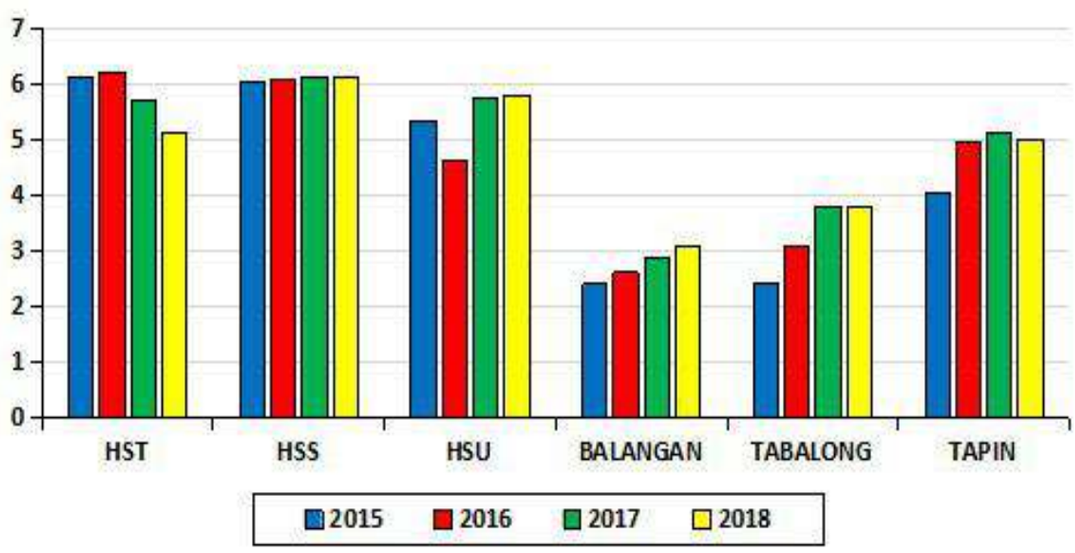


Gambar 2. 12. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2018

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi sangat tergantung dengan kinerja sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor utama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

serta mempunyai kontribusi terbesar terhadap total PDRB. Selain itu, penurunan pada beberapa sektor dominan lainnya sangat berpengaruh terhadap turunnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibandingkan dengan beberapa Kabupaten sekitar, selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dapat dilihat pada Gambar Grafik berikut ini.



Gambar 2. 13. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2015-2018

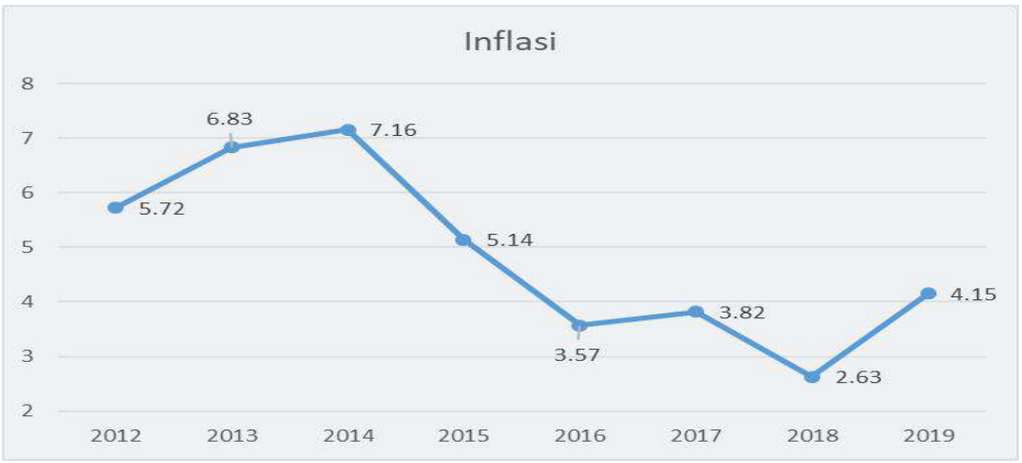
2. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Terjadinya inflasi dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), terjadinya negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi, tingginya permintaan barang dan jasa, dan perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi menggambarkan perubahan harga komoditi yang dihitung berdasarkan perubahan IHK (Indeks Harga Konsumen). IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (defiasi) dari barang dan jasa.

Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan hanya dihitung di 2 (dua) kota, yaitu di kota Banjarmasin dan kota Tanjung. Inflasi di kota Barabai menggunakan kota Tanjung karena jarak lebih dekat dan memiliki karakteristik yang sama sehingga diasumsikan harga, kualitas, dan spesifikasi dari komoditas sama.

Tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurun tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 terjadi fluktuasi. Lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 14. Tingkat Inflasi
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2019

Inflasi tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 7,16 %. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM pada tahun 2014. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi deflasi yakni 5,14 % pada tahun 2015 dan 3,57 % pada tahun 2016 serta naik pada tahun 2017 menjadi 3,82 %, Selanjutnya, pada tahun 2018

mengalami penurunan menjadi 2,63% tetapi naik kembali pada tahun 2019 menjadi 4,15%.

3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita bertujuan untuk menunjukkan nilai PDRB perorang yakni gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro. Menurut klasifikasi Bank Dunia, pendapatan perkapita kurang dari $1.045 dikategorikan sebagai pendapatan perkapita rendah, sementara pendapatan perkapita antara $1.045 - $4.125 termasuk pendapatan perkapita menengah kebawah, dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari $12.746 temasuk pendapatan perkapita tinggi.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Berikut PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah Menurut Lapangan Usaha, dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.

Tabel 2. 12. PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2014-2018

	2014	2015	2016	2017*	2018**
Nilai PDRB/*GRDP* (Milliar Rupiah/*Billion rupiahs*)					
- ADHB/ *at current price*	4 540	5 136	5 648	6 123	6 601
- ADHK/ *at 2010 Constant Price*	3 719	3 947	4 192	4 432	4 660
PDRB per Kapita/*Per Capita GRDP* (Ribu Rupiah/*Thousand rupiahs*)					
- ADHB/ *at current price*	17 657	19 731	21 443	22 974	24 504
- ADHK/ *at 2010 Constant Price*	14 465	15 163	15 916	16 629	17 298
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ *Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price*	4,23	4,83	4,97	4,48	4,02
Jumlah Penduduk (orang)/*Population (People)*	257 107	260 292	263 376	266 501	269 384
Pertumbuhan Penduduk (%)/*Population Growth (%)*	1,28	1,24	1,18	1,19	1,08

*)Angka sementara/*Preliminary Figures*
**)Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Sumber : PDRB Kabupaten HST Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurun tahun 2014-2018 semakin meningkat setiap tahunnya. Apabila diukur dalam USD menurut klasifikasi bank dunia, PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk dalam kategori wilayah berpendapatan menengah kebawah.

Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Tengah atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 17,65 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 24,50 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan oleh pengaruh faktor inflasi. Ketika menghilangkan faktor inflasi, terlihat bahwa pertumbuhan PDRB perkapita berkisar antara 4,02 hingga 4,97 persen selama periode 2014-2018.

4. Indeks Gini

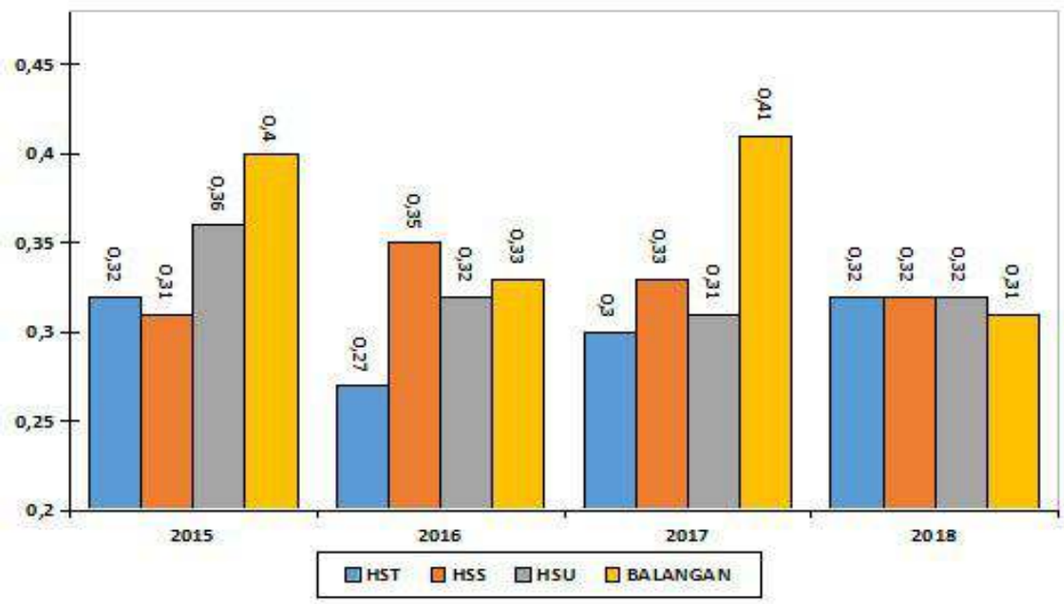
Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Indeks Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Hal ini penting untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat atau hanya dinikmati oleh segelintir orang yang akhirnya menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Angka gini ratio dibawah 0,3 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan cukup merata atau masih baik, angka gini ratio diatas 0,5 dapat diartikan tingkat ketimpangan

pendapatan dikatakan serius atau buruk, sedangkan jika diantara 0,3-0,5 kondisi ketimpangan sedang.

Dari data dalam 5 tahun terakhir, angka gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih berada di angka 0,3 keatas, yang berarti tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Hulu Sungai Tengah masih kategori sedang. Pada tahun 2018, angka Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah 0,32.

Berikut grafik perbandingan gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) selama kurun waktu 2015-2018 dengan 3 (tiga) kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), dan Kabupaten Balangan. Pada tahun 2018, keempat kabupaten tersebut memiliki angka gini ratio yang relatif sama, yaitu berkisar antara 0,31-0,32, atau sama-sama memiliki kondisi tingkat ketimpangan kategori sedang.



Gambar 2. 15. Perbandingan Gini Ratio Tahun 2015 -2018 Kabupaten HST, HSS, HSU dan Balangan

5. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dimana hal ini merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah. Dalam mengukur kemiskinan dapat digunakan konsep

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Untuk tahun 2018, garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp354.214,- dengan persentase penduduk miskin di tahun 2018 sebesar 6,01%. Dengan kata lain, pada tahun 2018, sebanyak 16.140 jiwa penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di bawah garis kemiskinan. Data-data kondisi kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 13. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2018

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/bln)	Tingkat Kemiskinan (%)
2012	241.973	5,68
2013	257.580	5,57
2014	268.522	5,65
2015	279.530	5,81
2016	322.392	6,18
2017	341.024	6,09
2018	354.214	6,01

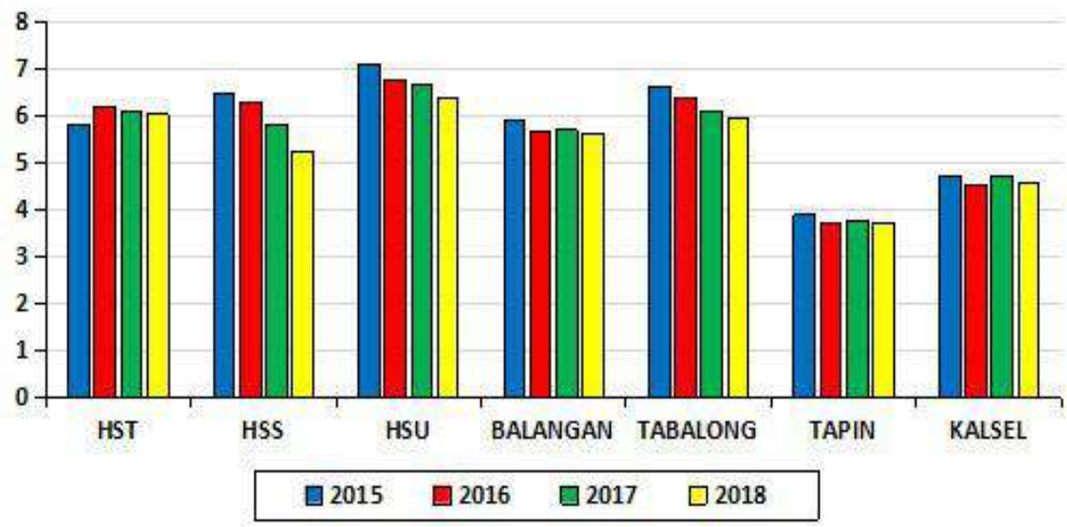
Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2019

Selama tahun 2015-2018, angka kemiskinan Kabupaten HST berfluktuatif. Tahun 2015 persentase penduduk miskin hanya 5,81%, kemudian selalu meningkat dan menjadi 6,18% pada tahun 2016. Angka kemiskinan akhirnya menurun menjadi 6,01% pada tahun 2018.

Persentase kemiskinan Kabupaten HST pada tahun 2018 sebesar 6,01% tersebut merupakan angka kemiskinan tertinggi kedua jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Persentase tertinggi ditempati

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang mencapai 6,38% pada tahun 2018. Sedangkan, persentase kemiskinan terendah berada di Kabupaten Banjar yang hanya 2,70%. Setelah itu, diikuti oleh Kabupaten Tapin dan Kota Banjarmasin dengan persentase masing-masing 3,70% dan 4,18%.

Berikut ditampilkan gambar grafik perbandingan tingkat kemiskinan selama kurun waktu tahun 2015-2018 antara 6 (enam) Kabupaten se-Banua Enam dengan Kalimantan Selatan.



Gambar 2. 16. Perbandingan Tingkat Kemiskinan 6 (Enam) Kabupaten Se-Banua Enam dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2018

Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu mendapat perhatian yang serius. hal ini dikarenakan trend kenaikan pada jumlah penduduk miskin maupun tingkat kemiskinan pada tahun 2015 dan 2016 serta pada tahun 2018 sedikit menurun, namun tetap lebih tinggi dibandingkan kemiskinan Kalimantan Selatan dan Kabupaten lainnya. Meskipun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode 2015 sampai dengan 2018 laju pertumbuhan ekonomi tinggi, peningkatan pendapat perkapita serta penurunan angka inflasi, namun tidak berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Perlu adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menangani fenomena tersebut. Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, angka kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir masih lebih tinggi.

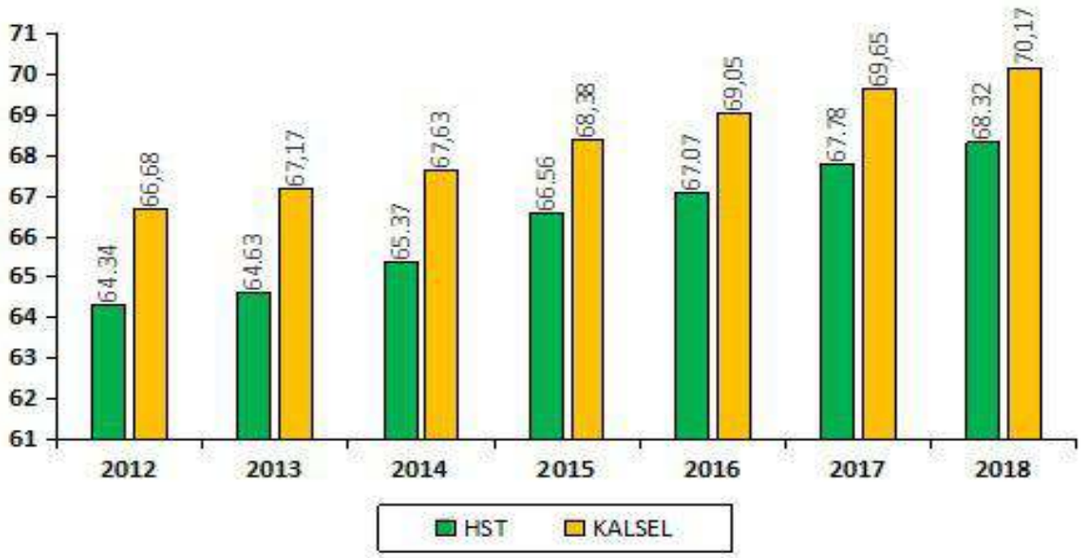
b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Perkembangan aspek kesejahteraan masyarakat khususnya fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat secara umum dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, IPM dapat dijadikan indeks acuan pembangunan manusia di suatu daerah.

1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks komposit dari komponen kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Indeks kesehatan merupakan dimensi umur panjang dan sehat yang diukur dari indikator umur harapan hidup. Indeks pendidikan mencerminkan dimensi pengetahuan yang diukur dari angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedang indeks pendapatan merupakan dimensi kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita rill. Semakin tinggi angka yang dihasilkan semakin baik kualitas manusianya.

Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan metode perhitungan baru pada kurun tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan, namun masih dibawah IPM Kalimantan Selatan. Berikut gambaran perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai tengah dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan pada kurun waktu tahun 2012-2018.



Gambar 2. 17. IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2018

Pada tahun 2012, IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 64,34 dan terus meningkat sampai tahun 2018 menjadi 68,32. Lebih rinci perkembangan komponen perhitungan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 14. Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2018

Tahun	Umur Harapan Hidup (Th)	Angka Harapan Sekolah (Th)	Rata-rata Lama Sekolah (Th)	Pengeluaran Riil Per Kapita (Rp.000,-)	IPM
2012	64,06	11,23	6,90	10.802	64,34
2013	64,24	11,25	6,94	10.960	64,63
2014	64,33	11,42	7,27	11.040	65,37
2015	64,83	11,94	7,52	11.142	66,56
2016	65,06	12,00	7,53	11.527	67,07
2017	65,30	12,17	7,79	11.635	67,78
2018	65,54	12,18	7,80	12.140	68,32

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2019

Kenaikan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini adalah hasil komposit dari kenaikan angka umur harapan hidup dari 64,06 (tahun) pada tahun 2012 menjadi 65,54 (tahun) pada tahun 2018 atau naik 1,48 tahun. Sama halnya dengan angka harapan sekolah selama kurun tahun 2012 sampai dengan 2018 naik dari 11,23 tahun menjadi 12,18 tahun atau naik 0,95 tahun. Rata-rata lama sekolah juga mengalami kenaikan selama kurun tahun 2012 sampai dengan 2018 dari 6,90 tahun menjadi 7,80 tahun atau naik sebesar 0,90 tahun. Begitu juga dengan pengeluaran perkapita rill naik dari Rp10.802,- pada tahun 2012 menjadi Rp 12.140,- pada tahun 2018.

2. Pendidikan

▪ Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Perbedaan mendasar antara APM dan APK adalah bahwa APM mengukur jumlah siswa yang bersekolah sesuai dengan umur usia sekolahnya, sedangkan APK tidak memperhatikan siswa yang bersekolah sesuai dengan umur usia sekolah. Baik APK maupun APM merupakan indikator untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Indikator ini dapat menunjukkan keterjangkauan pendidikan di suatu daerah.

APK Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tingkat SD/MI pada 10 tahun terakhir sudah melebihi angka 100%, pada kurun tahun 2006-2012 berkisar antara 111–114 %, pada

tahun 2013 kembali naik ke angka 117,52%, akan tetapi pada tahun 2017 turun menjadi 109,32% dan pada tahun 2018 menurun lagi menjadi 105,02%. Sedang APM Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tingkat SD/MI dari tahun 2020–2011 selalu mengalami peningkatan dan pada tahun 2012 sudah mencapai 97,49%, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 87,07% dan stagnan pada tahun 2014, serta meningkat kembali menjadi 99,12% pada tahun 2017, dan menerus hingga tahun 2018 menjadi 99,54%.

Sementara itu APK Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada jenjang SMP/MTs dari tahun ke tahun mengalami trend peningkatan dimana pada tahun 2014 sudah mencapai angka 100,53%. Akan tetapi turun menjadi 81,27% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menjadi 73,02%. Begitu pula untuk APM SMP/MTs selalu meningkat dari tahun 2006 sampai dengan angka 85,69% pada tahun 2013, tetapi pada tahun 2014 turun menjadi 78,90% dan pada tahun 2017 turun kembali menjadi 72,66% dan pada tahun 2018 menjadi 71,13%.

Pada tingkat SMA/SMK/MA, APK Kabupaten Hulu Sungai Tengah kurun tahun 2006–2011 selalu meningkat, tetapi dari tahun 2012-2015 mengalami kecenderungan penurunan hingga pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 84,90% dan 84,73%. Sedangkan pencapaian APM SMA/SMK/MA pada tahun 2006–2011 mengalami peningkatan, tetapi kurun tahun 2012–2015 terjadi fluktuasi dimana sempat naik sampai angka 81,63% pada tahun 2013, dan terus turun hingga menjadi 55,81% pada tahun 2015. Pada tahun 2017 sempat naik menjadi 66,63%, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 66,06%.

Perkembangan APK dan APM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 15. APK dan APM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006-2018

No.	Tahun	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA/SMK	
		APK	APM	APK	APM	APK	APM
1	2006	102,06	92,06	89,78	69,11	44,00	34,00
2	2007	102,06	92,21	84,62	77,05	82,00	67,00
3	2008	110,05	95,90	91,16	74,88	86,00	74,00
4	2009	112,38	97,08	95,67	77,00	87,09	75,00
5	2010	113,51	98,23	96,21	76,90	88,01	79,87
6	2011	114,11	99,18	98,43	77,94	91,13	82,81
7	2012	111,43	97,49	97,50	85,36	86,43	78,81
8	2013	117,52	87,07	97,47	85,69	82,75	81,63
9	2014	103,91	87,06	100,53	78,90	80	67,10
10	2015	102,76	88,75	99,89	82,63	75,74	55,81
11	2016	106,68	96,49	89,91	74,85	83,71	64,97
12	2017	109,32	99,12	81,27	72,66	84,90	66,63
13	2018	105,02	99,54	73,02	71,13	84,73	66,06

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2019

Pada kedua indikator (APM dan APK) tersebut, baik pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK menunjukkan tren penurunan pada 2 (dua) tahun terakhir yakni tahun 2017 dan 2018, yang berarti terjadinya penurunan anak usia sekolah yang bersekolah. Terlepas dari hal tersebut, perlu adanya upaya dalam rangka peningkatan keterjangkauan pelayanan pendidikan sehingga terjadi peningkatan jumlah anak usia sekolah yang dapat bersekolah baik melalui peningkatan sarana prasarana, pembiayaan maupun peningkatan minat bersekolah.

3. Kesehatan

▪ Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Fokus kesejahteraan Sosial lainnya dapat tergambar dari tingkat Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). AKHB adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. AKHB didapatkan dengan menghitung Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran. Semakin kecil AKHB yang dicapai berarti

tingkat kesejahteraan masyarakat makin rendah karena berkaitan dengan kemampuan pengetahuan tentang pentingnya pelayanan kesehatan dan kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Perkembangan AKHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 16. AKHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006-2019

No.	Tahun	AKB per 1,000 kelahiran	AKHB
1	2006	7	993
2	2007	12	988
3	2008	14	986
4	2009	11	989
5	2010	10	990
6	2011	13	987
7	2012	12	988
8	2013	12	988
9	2014	18	982
10	2015	18	982
11	2016	18	982
12	2017	14	986
13	2018	12	988
14	2019	12	988

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. HST, 2020

▪ Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kurun tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 17. Persentase Gizi Buruk
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2019

Tahun	Balita Gizi Buruk
2016	0,03 %
2017	0,03 %
2018	0,02 %
2019	0,04 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.HST, 2020

4. Ketenagakerjaan

▪ Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja atau disebut juga kesempatan kerja digunakan untuk mengetahui peluang atau tersedianya lapangan pekerjaan sehingga penduduk angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai keahliannya masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja merupakan seberapa besar permintaan atas tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 18. Rasio Penduduk Yang Bekerja
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2019

TAHUN	PENDUDUK BEKERJA	ANGKATAN KERJA	RASIO PENDUDUK BEKERJA
2011	129.882	137.574	0,94
2012	128.801	135.299	0,95
2013	127.339	129.502	0,98
2014	123.276	128.481	0,96
2015	135.082	139.214	0,97
2016	136.754	140.934	0,97
2017	138.463	144.426	0,96
2018	139.391	146.496	0,95
2019	134.441	140.335	0,96

Sumber : Dinas PTSP, Namod, Naker Kab. HST, 2020

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2019 sebesar 96% dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja sedangkan 4% dari angkatan kerja masih mencari kerja atau pengangguran.

2.1.3.Aspek Pelayanan Umum

a. fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Indikator-indikator utama pencapaian dalam pembangunan pelayanan pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut.

Tabel 2. 19. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2013-2019

No	Indikator	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata lama sekolah (th)	6,94	7,27	7,27	7,58	7,79	7,53	7,80
2	Usia Harapan Sekolah (th)	11,25	11,42	11,42	12	12,17	12	12,18
3	Angka Melek Huruf (%)	97,5	97,56	97,57	97,92	97,50	98,89	98,00
4	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)	98,54	100	88,75	99,98	93,19	89,84	99,87
5	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (%)	87,28	89,01	86,23	92,20	91,43	97,5	86,6
6	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	110,83	87,28	77,14	74,9	75,5	77,0	75,3
7	Rasio Guru/Murid	932,57	1159,1	846,41	787,75	838,78	819,51	769,23
8	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	85	88	96	62	80,0	85,0	90,0
9	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	81	86	92	70	80,0	88,0	91,0
10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,14	0,15	0,02	0,006	0,03	0,15	0,1
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,29	0,4	0,3	0,1	0,99	0,75	0,60

No	Indikator	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100	92,96	99,78	100	100
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	99,92	100	94,10	98,27	97,56	100
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	100,77	88,49	90,19	97,40	100,0	99,8	90,87
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA (%)	86,74	63,86	63,98	80,45	100,0	99,0	99,35
16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	73,41	75,92	71,73	85,64	90,82	85,07	88,49

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

2. Kesehatan

Derajat kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah hasil dari upaya pembangunan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

Tabel 2. 20. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2013-2019

No	Indikator	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio Posyandu per jumlah balita	15,08	16,88	17,90	55,70	61,98	61	60,11
2	Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik per satuan penduduk	0,09	0,25	0,60	0,30	0,35	0.24	0,35
3	Rasio Rumah Sakit Per satuan Penduduk	0,0039	0,0039	0,0038	0,0038	0,0038	0.0074	4,20
4	Rasio dokter per satuan penduduk	0,17	0,12	0,15	0,27	0,22	0,15	0,35
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,29	2,51	2,52	0,83	0,49	0,27	4,20
6	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	54%	100%	85,60%	68,52%	66,78%	86,26%	75,73%

No	Indikator	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80,40%	83%	83,40%	84,51%	84,40%	83,00%	96,14%
8	Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	81,1	91,1	85,8	90,53	84,61	80,5	65,5
9	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	37,60%	37,00%	46,96%	39,40%	43,81%	49,00%	33%
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Cakupan kunjungan Bayi	84,00%	68,79%	72,65%	76,96%	83,50%	83,30%	71,50%
14	Cakupan puskesmas	172,73	172,73	172,73	152,50	155,70	155,70	172,73
15	Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu,Poskesdes, Polindes dll)	97,63	57,14	95,00	56,70	60,50	60,50	60,50

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

3. Pekerjaan Umum

Pembangunan urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

Tabel 2. 21. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (baik dan sedang)	59,02%	61,06%	63,60%	66,13%	67,06%	67,88%	69,63%
2	Rasio jaringan Irigasi	5,07%	5,45%	12,74%	17,42%	17,56%	17,64%	17,96%
3	Persentase rumah tangga bersanitasi yang layak	64,58%	64,58%	64,27%	66,18%	72,23%	80,06%	88,89%
4	Persentase infrastruktur pejalan kaki yang layak di perkotaan	4,72%	6,89%	8,16%	9,07%	22,67%	33,40%	34,40%
5	Persentase berkurangnya luas genangan	6,77%	12,27%	22,99%	25,52%	29,44%	46,11%	53,89%
6	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	22,75%	24,09%	25,63%	27,18%	28,22%	28,53%	29,31%
7	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	19,55%	20,60%	25,12%	46,13%	52,20%	57,54%	60,83%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 22. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perumahan Dan Permukiman Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rumah Tangga pengguna air bersih	73,86%	80,00%	73,73%	74,28%	76,99%	78,97%	80,58%
2	Rumah tangga pengguna listrik	77,56%	82,56%	87,56%	88,14%	89,95%	94,01%	94,27%
3	Rumah tangga Bersanitasi	64,58%	64,58%	64,27%	66,18%	72,23%	80,06%	88,89%
4	Lingkungan pemukiman kumuh	7,99%	7,99%	7,99%	7,46%	6,93%	4,66%	2,69%
6	Rumah Layak Huni	86,54%	87,39%	90,36%	90,28%	90,82%	91,15%	93,48%
7	Rasio permukiman layak huni	92,01%	92,01%	92,01%	92,54%	93,07%	95,34%	97,31%

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

5. Penataan Ruang

Pembangunan Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

Tabel 2. 23. Indikator Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase penambahan luas Ruang Terbuka Hijau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase peraturan Tata ruang Daerah yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundangan Tata Ruang	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	42,86%	42,86%	42,86%

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	Meningkatnya kepuasan pelayanan pemanfaatan ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase tingkat kepatuhan sesuai dengan rekomendasi pemanfaatan ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

6. Perhubungan

Pembangunan urusan Perhubungan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 24. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2013 – 2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	162.000	145.800	129.600	111.800	110.300	109.400	103.000
2	Rasio ijin trayek	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,008
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	1,326	1,392	1,448	1327	1020	945	836
4	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	1	1	1	1	1	1	1
5	Angkutan darat	0,077	0,086	0,096	0,107	0,116	0	2,079
6	Kepemilikan KIR angkutan umum	994	1.023	1.010	1.056	1.169	1.225	1.258
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	15 menit	15 menit	15 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum							
	1. mobil angkutan umum	-	-	-	-	-	-	-
	2. mobil bus	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	3. mobil barang							
	a, JBB s/d 2ton	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	b, JBB 2 tons/d 7 ton	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	c, JBB 7 ton keatas	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	Pemasangan rambu-rambu	99	115	207	N/A	24	N/A	65

Sumber : Dinas LH dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

7. Lingkungan Hidup

Pembangunan urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 25. Indikator Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Penanganan Sampah	85,14%	82,36%	95,61%	72,86%	50,11%	73,90%	74,00%
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	0,5	0,55	0,63	0,47	0,31	0,79	0,81
4	Penegakan Hukum Lingkungan	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas LH dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

8. Kependudukan dan Catatan Sipil

Pembangunan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 26. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kepemilikan KTP	74,48%	87%	85,13%	89,93%	95,43%	98,13%
2	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,94	0,8	0,85	0,90	0,96	0,98%
3	Rasio bayi ber akte kelahiran	0,67	0,74	0,86	0,89	0,96	100%
4	Kepemilikan akta kelahiran per 100 penduduk	0,17	0,25	0,35	0,45	0,50	0,45%
5	Rasio pasangan ber akte nikah	0,22	0,74	0,38	0,52	0,54	0,58%
6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

9. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 27. Indikator Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,45	3,39	3,35	3,31	3,24	3,19	3,17
2	Rasio akseptor KB	78,30	78,40	69,82	77	80	86	80

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	Cakupan peserta KB aktif	76,79	81,30	69,82	76,18	76	79	79,65
4	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	35,23	35,20	35,23	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinsos, PPKB, PPPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

10. Sosial

Pembangunan Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 28. Indikator Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2014-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	13	13	14	14	14	13
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	13,18	13,74	16	16	20	17
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	13,18	38,46	16	19	22	60

Sumber : Dinsos, PPKB, PPPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

11. Ketenagakerjaan

Pembangunan Ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 29. Indikator Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	16,4	5,48	6,06	1,50	0	0	0
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,12%	69,51%	71,12%	71,65%	71,96%	74,58%	74,85%
3	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan	285 orang	560 orang	229 orang	194 orang	386 orang	447 orang	585 orang
4	Tingkat pengangguran terbuka	1,67%	4,05%	4,05%	5,37%	4,13%	4,13%	3,63%
5	Keselamatan dan perlindungan	1,50	1,20	1,20	1,70	2,70	2,70	2,70
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas PTSP Namod dan Naker Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

12. Koperasi dan UKM

Pembangunan Koperasi dan UKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 30. Indikator Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Koperasi aktif	47,74%	47,74%	47,74%	47,74%	47,74%	68,83%	70,12%
2	Proporsi Usaha Mikro dan Kecil	97,39%	92,88%	92,88%	93,50%	95,85%	91,65%	98,58%

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

13. Penanaman Modal

Pembangunan urusan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 31. Indikator Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1	2	1	0	98	13	187
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp Milyar	0,075	15,4	4,7	79,331	40,22	61,265	114,156
3	Sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintahan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Indeks kepuasan layanan masyarakat	80,06	80,67	86,06	81,57	81,56	83,74	83,18

Sumber : Dinas PTSP Namod dan Naker Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

14. Kebudayaan

Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 32. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	3	3	3	3	9	9
2	Jumlah Benda, Situs,dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	16	16	16	16	16	16	16

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

15. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 33. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Organisasi Pemuda/OKP Yang Aktif	14	14	14	17	18	18	27
2	Jumlah organisasi olahraga	29	29	29	29	29	30	32
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	5	5	6	6	6	6	6
4	Jumlah Kegiatan Olahraga Yang Diikuti	7	7	7	7	7	7	7
5	Gelanggang/balai remaja (selain swasta)	1	1	1	1	2	2	2
6	Jumlah Lapangan Olahraga milik Pemda	78	78	78	78	95	101	101

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata Kabupaten HST, 2020

16. Keamanan dan Ketertiban

Pembangunan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 34. Indikator Capaian Kinerja Urusan Keamanan dan Ketertiban Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1	6	4	4	0	1
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	5	5	1	1	3
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10,000 penduduk	41	41	42	43	187	157	157
4	Jumlah linmas per 10,000 penduduk	2	2	2	2	2	2	2

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5	Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan	2	2	2	2	2	2	2
6	Penegakan PERDA	0	0	0	20	20	20	20
7	Cakupan patroli petugas Satpol PP	20	20	20	20	20	20	20
8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten	80	80	80	55	60	65	100
9	Petugas Linmas di Kabupaten	1.380	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	78%	78%	80%	95%	100%	100%	100%
11	Tingkat waktu tanggap (reponse time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	82%	90%	85%	95%	100%	100%	100%

Sumber : Satpol PP dan PK, Kesbangpol dan BPBD Kab. HST, 2020

17. Ketahanan Pangan

Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 35. Indikator Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ketersediaan pangan utama	48%	45%	50%	52%	78%	76,6%	84,0%
2	Regulasi Ketahanan Pangan	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan Kabupaten HST, 2020

18. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 36. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio kecukupan sarana/prasarana desa	25:161	160:161	160:161	160:161	161:161	161:161
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	N/A	220	220	220	220	220
3	LPM Aktif	12	12	23	38	161	161
4	PKK Aktif	181	181	181	181	181	181
5	Posyandu Aktif	404	418	420	420	430	429
6	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	35,40%	34,80%	35%	35%	40%	40%

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

19. Statistik

Pembangunan Statistik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 37. Indikator Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Buku ”Kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku ”PDRB Kabupaten”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

20. Kearsipan

Pembangunan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 38. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2014-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah SKPD Yang Melaksanakan Kearsipan Sesuai Ketentuan	5	10	12	16	36	36
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	0	1	1	1	2

Sumber : Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

21. Komunikasi dan Informatika

Pembangunan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 39. Indikator Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah jaringan komunikasi	66	68	72	75	77	77
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	33	33	35	37	33	N/A
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	12	12	12	12	12	12
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	5	7	3	4	5	3
5	Website milik pemda	4	5	5	7	9	9
6	Sistem informasi manajemen pemda	N/A	9	5	8	12	21

Sumber : Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 2020

22. Perpustakaan

Pembangunan Perpustakaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 40. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun	24.509 Org	39.879 Org	20.584 Org	28.545 Org	36.505 Org	36.505 Org	40.249 Org
2	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan	7.555 Judul	7.555 Judul	7.555 Judul	7.555 Judul	9.039 Judul	9.039 Judul	9.739 Judul
3	Jumlah Perpustakaan	391	403	419	419	419	420	493

Sumber : Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu sungai Tengah, 2020

23. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 41. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	84,92	80,34	77,46	82	86	90	53,39
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,08	19,66	22,54	18	14	11	13,33
3	Rasio KDRT	0,0057%	0,0010%	0,0026%	0,0026%	0,0020%	0,0012%	0,0041%

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	93,89	93,89	94,50	96	98	98	100

Sumber : Dinsos, PPKB. PPPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

b. fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Pembangunan Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 42. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	4,83	4,86	5,07	5,10	5,25	5,25	5,35
2	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	26,09	25,74	25,53	25,47	25,50	25,20	25,24

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

2. Pariwisata

Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 43. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kunjungan wisata pertahun	64.244	74.000	54.390	68.780	69.689	77.208	80.705

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	Kontribusi sektor parawisata terhadap PDRB	12,93	9,57	8,86	7,15	8,14	8,30	8,38

Sumber : Disporapar Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

3. Perikanan dan Kelautan

Pembangunan Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 44. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Produksi Perikanan	9907,00	9041,60	9969,33	10271,50	10480,50	10611,50	10713,50
2	Konsumsi Ikan	105,73	105,74	105,78	50,86	50,87	51,35	51,40
3	Cakupan bina kelompok nelayan	28	8	3	16	21	13	13
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	7.591,5	6.569,2	5.717,4	7.691	7.740	7.829	7.907

Sumber : Dinas KP dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

4. Perdagangan

Pembangunan Perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 45. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,96	10	10,17	10,44	10,44	10,62	11,03

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	Ekspor bersih perdagangan (Rp Milyar)	848,2	339,7	250,7	264,7	476,8	263,54	230,64

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

5. Industri

Pembangunan Industri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 46. Indikator Capaian Kinerja Urusan Industri Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	15,48%	15,52%	15,03%	14,73%	14,77%	14,87%	14,50%
2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	N/A	5,91%	5,35%	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase tingkat pertumbuhan IKM	3,44%	4,50%	5,36%	5,77%	3,44%	15,89%	22,61%
4	Cakupan bina kelompok pengrajin	7,14	14,28	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

c. fokus Layanan Urusan Penunjang

1. Perencanaan Pembangunan

Pembangunan urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 47. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya RPJPD yang ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya RKPD yang ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	98,73%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

2.1.4.Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lain. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah, infrastruktur, iklim berinvestasi dan Sumber Daya Manusia.

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pada fokus kemampuan ekonomi daerah, pencapaian beberapa indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 48. Pencapaian Indikator Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ kapita/ bulan (Rp)	906.853	940.932	973.461	752.361	880.008	929.531	961.871
2	Pengeluaran Konsumsi RT non pangan/ kapita/ bulan (Rp, juta)	484.045	503.448	521.474	315.632	379.063	402.006	421.370
3	Pengeluaran Konsumsi pangan RT per kapita/ bulan (Rp)	422.808	437.484	451.987	436.729	500.945	527.525	540.495
4	Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan (%)	53,38	53,50	53,57	41,95	43,07	43,25	43,81
5	Produktivitas total daerah (Rp)	19.533.143	21.394.770	21.907.259	22.880.372	23.853.485	24.826.598	25.799.711
6	Nilai Tukar Petani	105,14	99,77	99,03	96,069	93,398	90,73	88,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pencapaian pada indikator aspek daya saing daerah dengan fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 49. Pencapaian Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1.511	1.511	1.700	1.800	1.825	1.920	1.242
2	Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum	33.864	33.412	32.863	32.100	30.100	7.825	8.102
3	Jumlah orang / barang melalui dermaga / bandara / terminal per tahun	8.564	8.472	8.257	7.800	7.300	6.900	7.075
4	Rasio ketersediaan daya listrik	62,28	68,01	70,11	89,41	92,49	98,37	99,05
5	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	88,35 %	89,88 %	91,00 %	99,36 %	99,87 %	99,59 %	99,65 %
6	Persentase penduduk yang menggunakan HP / telepon	90 %	90 %	90 %	90 %	92 %	92 %	95%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Pencapaian indikator aspek daya saing daerah dengan fokus iklim investasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 50. Indikator Iklim Investasi Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka kriminalitas	10,6	8,83	11,93	6,87	5,72	N/A	N/A
2	Lama proses perijinan	1 - 15 hari	1 - 15 hari	1 - 15 hari	1 - 15 hari	1 - 15 hari	1 - 15 hari	1 - 15 hari
3	Jumlah pajak dan retribusi daerah	27 jenis	27 jenis	27 jenis	27 jenis	28 jenis	28 jenis	28 jenis

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	3	2	0	0	2	3	3
5	Persentase desa berkembang terhadap total desa	N/A	N/A	25%	25%	25%	67%	81%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Pencapaian pada indikator aspek daya saing daerah dengan fokus sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 51. Pencapaian Indikator Sumber Daya Manusia Tahun 2013-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio lulusan S1/S2/S3	8,60%	19,20%	13,00%	16,47%	4,13%	3,63%	2,96%
2	Rasio Ketergantungan	N/A	51,08	50,74	50,55	50,34	50,16	50,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD

Pelaksanaan program dan kegiatan merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Capaian dari sasaran pembangunan daerah merupakan hasil dari pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 52. Pencapaian Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sampai Dengan Tahun 2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (2014/ 2015)	Capaian Kinerja s.d Tahun 2019	Target Tahun 2021 (RPJMD)
Misi 1 : Peningkatan Kualitas kehidupan dan keserasian hubungan antara ulama dan umara						
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Angka kriminalitas (jumlah kasus tertangani/10.000 penduduk)	11,93	13	<10
			Jumlah kejadian konflik SARA	0	0	0
		Meningkatnya kualitas hubungan ulama dan umara	Jumlah kegiatan forum koordinasi antar umat beragama	2	0	2
Misi 2 : Peningkatan kualitas Sumberdaya manusia yang meliputi bidang kesehatan dan pendidikan serta kemandirian						
2	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,35	7,80	8,0
			Usia harapan sekolah (tahun)	11,52	12,18	12,50
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	64,65	65,54	67,50
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,05	3,63	4-6

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (2014/ 2015)	Capaian Kinerja s.d Tahun 2019	Target Tahun 2021 (RPJMD)
Misi 3 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, jembatan dan perumahan layak huni secara merata, serta pembangunan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan						
3	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Meningkatnya pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Persentase Desa berkembang	25,47	81	81,37
			Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	59,91	68,70	62,13
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman	Persentase rumah layak huni (persen)	81,25	93,48	98,12
			Luas Kawasan Kumuh (Ha)	141,46	47,70	0
			Cakupan layanan air bersih (persen)	89,41	80,58	100
4	Meningkatkan Ketersediaan Dan Keterjangkauan Akses Pangan	Tercapainya ketersediaan bahan pangan utama	Jumlah Ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	535,98	675,72	574,04
Misi 4 : Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan						

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (2014/ 2015)	Capaian Kinerja s.d Tahun 2019	Target Tahun 2021 (RPJMD)
5	Meningkatkan perekonomian daerah	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (persen)	5,57	5,15	4-6
			Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (persen)	3,64	4,45	4-5
6	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan (persen)	5,65	5,93	3,97
		Meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat	Pendapatan per kapita (ADHB/Rp)	20.234	24.504	36.051
			Indeks Gini	0,29	0,302	<0,30
Misi 5 : Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara mandiri yang berorientasi pada pelestarian hutan dan ekosistem						
7	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,72	70,003	69,4
			Indeks Pencemaran Air	45,3	61	60,1
			Indeks Pencemaran Udara	81,2	92,73	92
			Indeks Tutupan Lahan	59,43	59,71	59,43
Misi 6 : Peningkatan pelayanan masyarakat						
8	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,50	88,74	85,00

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (2014/ 2015)	Capaian Kinerja s.d Tahun 2019	Target Tahun 2021 (RPJMD)
Misi 7 : Peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah						
9	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	52 (CC)	63,9 (B)	85 (A)
			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,82 (Tinggi)	3,1982 (Sangat Tinggi)	3,10 (Sangat Tinggi)

Adapun terkait Evaluasi Kinerja Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah pada tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2019 di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terangkum dan tersaji secara lengkap dan menyeluruh untuk setiap Perangkat Daerah (SKPD) pada Lampiran Dokumen RKPD Kabupaten HST Tahun 2021 ini.

Tabel 2. 53. Pencapaian Realisasi Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 - 2019

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)			REALISASI CAPAIAN TAHUN					PERANGKAT DAERAH (PEMANGKU SPM)
	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PENDIDIKAN	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	92,63	85,06	85,47	85,45	85,42	Dinas Pendidikan
2	PENDIDIKAN	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
3	PENDIDIKAN	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
4	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	4458	4830	3880	3737	3595	Dinas Kesehatan
5	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	4201	4292	3885	3870	3813	Dinas Kesehatan
6	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	4295	4286	3973	3824	3786	Dinas Kesehatan

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)			REALISASI CAPAIAN TAHUN					PERANGKAT DAERAH (PEMANGKU SPM)
	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	14288	16815	16625	15620	17126	Dinas Kesehatan
8	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	4697	9685	8539	8223	12406	Dinas Kesehatan
9	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	715	1228	25065	21692	73430	Dinas Kesehatan
10	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	3067	6000	6721	10858	10996	Dinas Kesehatan
11	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	9465	12565	17331	17578	23075	Dinas Kesehatan
12	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan penderita *diabetes melitus*	Jumlah Warga Negara penderita *diabetes melitus* yang mendapatkan layanan kesehatan	1357	2310	3939	3095	2609	Dinas Kesehatan
13	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	16	43	60	89	279	Dinas Kesehatan

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)			REALISASI CAPAIAN TAHUN					PERANGKAT DAERAH (PEMANGKU SPM)
	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan orang terduga *tuberkulosis*	Jumlah Warga Negara terduga *tuberkulosis* yang mendapatkan layanan kesehatan	561	483	505	544	2226	Dinas Kesehatan
15	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency virus)*	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency virus)* yang mendapatkan layanan kesehatan	8	15	20	2695	4154	Dinas Kesehatan
16	PEKERJAAN UMUM	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan pokok air minum sehari - hari	73,73	74,28	76,99	78,97	80,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	PEKERJAAN UMUM	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pengolahan air limbah Domestik	64,27	66,18	72,23	80,06	88,89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	PERUMAHAN RAKYAT	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni	0%	0%	0%	100%	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)			REALISASI CAPAIAN TAHUN					PERANGKAT DAERAH (PEMANGKU SPM)
	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	PERUMAHAN RAKYAT	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah bupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	0%	0%	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
20	TRANTIBUM LINMAS	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	-	-	32	23	30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
21	TRANTIBUM LINMAS	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-	-	-	41	36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	TRANTIBUM LINMAS	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-	-	150	180	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	TRANTIBUM LINMAS	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	-	-	34	67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24	TRANTIBUM LINMAS	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	-	96	231	53	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)			REALISASI CAPAIAN TAHUN					PERANGKAT DAERAH (PEMANGKU SPM)
	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	SOSIAL	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	137	137	137	137	108	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26	SOSIAL	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	-	-	3	3	3	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27	SOSIAL	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	70	70	70	20	20	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28	SOSIAL	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)			REALISASI CAPAIAN TAHUN					PERANGKAT DAERAH (PEMANGKU SPM)
	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	SOSIAL	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	174	231	1722	988	247	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan evaluasi pencapaian dari sasaran pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ada beberapa permasalahan utama pembangunan (permasalahan umum daerah) yang menjadi tantangan pada tahun 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu :

1. Peningkatan sumber daya manusia belum optimal.
   Berdasarkan data evaluasi capaian sasaran pembangunan, IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih berada kelompok daerah menengah ke bawah dengan angka 68,80. Dibandingkan dengan 13 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih berada pada peringkat ke-9. Rata-rata laju pertumbuhan angka IPM dalam 3 tahun terakhir juga masih sangat rendah yaitu hanya 0,587, dibawah dari rata-rata laju pertumbuhan IPM Prov. Kalimantan Selatan dan terendah dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan kabupaten-kabupaten tetangga, yaitu HSU mencapai 0,857; Balangan 0,847; HSS 0,700; Tapin 0,620; dan Tabalong 0,597. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia masih menjadi permasalahan pembangunan yang harus menjadi prioritas untuk ditangani. Apalagi peningkatan kualitas SDM menjadi isu strategis yang harus menjadi perhatian utama pada era persaingan antar daerah yang semakin meningkat.

2. Konektivitas pada beberapa desa terpencil belum baik dan lancar.
   Dari capaian indikator pembangunan yaitu jalan dalam kondisi baik dan sedang yaitu sebesar 68,7%, maka ada sekitar 31,3% jalan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam kondisi rusak. Selain itu masih ada beberapa desa dan anak desa yang masih belum punya aksesibilitas yang baik sehingga wilayah-wilayah pinggiran tidak berkembang dengan baik.

3. Pemenuhan infrastruktur dasar (kumuh, air minum dan sanitasi) belum optimal

Dari data evaluasi capaian pembangunan infrastruktur dasar khususnya terkait dengan pembangunan sanitasi belum dapat melayani kebutuhan seluruh warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Masih ada sekitar 19,42% masyarakat belum terlayani air bersih/minum. Begitu pula dengan pelayanan persampahan juga belum bisa mencapai 100%, luas kawasan kumuh masih cukup tinggi yaitu 47,7 Ha.

4. Laju pertumbuhan ekonomi menurun.
   Dari data realisasi laju pertumbuhan ekonomi dalam 3 tahun terakhir terus terjadi perlambatan. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,21%, maka pada tahun 2017 terjadi perlambatan yaitu dengan laju pertumbuhan 5,72 % dan pada tahun 2018 turun lagi menjadi 5,15% dan pada tahun 2019 diproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi hanya 4,80%. Ini menjadi permasalahan besar ketika pada tahun 2020 yang berjalan ini terjadi bencana pandemic Covid-19, yang bukan saja menjadi masalah kesehatan, tetapi juga berdampak pada masalah social dan ekonomi yang sangat besar.

5. Angka kemiskinan masih tinggi.
   Angka kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih tinggi yaitu pada angka 5,93%, lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan yang besarnya 4,47%. Angka kemiskinan Kabupaten HST ini apabila dibandingkan dengan 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, berada pada posisi peringkat ke 11.

6. Ancaman kerusakan lingkungan.
   Dari data evaluasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai angka 70,00 dengan predikat baik. Tetapi ancaman kerusakan lingkungan tetap menjadi perhatian dan masalah ketika PT. Antang Gunung Meratus terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi batubara. Seperti diketahui bahwa sebagian wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah masuk dalam wilayah pertambangan batubara PT Antang Gunung Meratus, sehingga cepat atau lambat, eksploitasinya akan mencapai wilayah HST.

Selain itu di wilayah Kab. HST juga ada wilayah pertambangan batubara PT. Mantimin Coal Mining (MCM) yang pada saat sekarang sudah mulai melakukan proses AMDAL, sehingga ini juga akan menjadi ancaman terjadinya kerusakan lingkungan.

7. Pelayanan publik belum standar dan memuaskan.
   Data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan mencapai 88,74. Namun jika dilihat dari hasil penilaian Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan masih pada angka 83,96, sehingga masih perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dan SOP pelayanan public untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat yang membutuhkan.

8. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum tinggi.
   Dari data hasil evaluasi SAKIP, maka realisasi tahun 2019 adalah sebesar 63,9. Nilai tersebut masih rendah sehingga implementasi reformasi birokrasi masih jauh dari harapan.

Selain permasalahan pokok pembangunan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu :

1. Adanya pandemi wabah Covid-19 yang menyebar luas di seluruh dunia, yang sangat berdampak buruk tidak saja dari aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek social dan ekonomi yang mengganggu serta merubah segala sektor dan tatanan hidup manusia. Banyaknya sektor yang terdampak, setelah pandemi Covid-19 berakhir (berkurang/terkontrol).
2. Potensi masuknya dan berkembangnya paham radikal masih cukup tinggi.
3. Masih tingginya penyakit masyarakat, penggunaan minuman keras, narkoba dan zat aditif lainnya. Antisipasi atau penanggulangan PEKAT di masyarakat masih belum optimal terlaksana.
4. Masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
5. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah.
6. Adanya anak usia sekolah yang putus sekolah.

7. Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
8. Belum tercapainya target nilai Ujian SD dan SMP.
9. Masih rendahnya peran serta orang tua dalam memotivasi anak dalam belajar serta membangun psikologis anak.
10. Rendahnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan.
11. Belum tercapainya target angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir.
12. Masih kurangnya alat kesehatan yang memenuhi standar.
13. Masih kurangnya tenaga PONEK yang sudah terlatih.
14. Kasus gizi buruk masih terjadi yang lebih dikarenakan oleh faktor ekonomi (pengangguran).
15. Rendahnya aksesibilitas terhadap layanan rujukan yang berkualitas.
16. Ruang IGD yang tersedia masih belum memadai atau memenuhi standar.
17. Rendahnya budaya baca.
18. Belum tersedia gudang arsip Kabupaten tersendiri.
19. Belum tersedianya rumah singgah terkait penanganan sosial.
20. Belum optimalnya anggaran untuk penanganan bayi terlantar, serta biaya pengiriman pasien ODGJ ke RS Sambang Lihum.
21. Belum optimalnya manajemen penanggulangan bencana
22. Masih rendahnya kompetensi serta keahlian tenaga TRC (Tanggap Bencana) Kabupaten.
23. Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja.
24. Masih terbatas atau belum optimalnya fasilitas serta kualitas infrastruktur publik/umum yang dibangun.
25. Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman dan perumahan.
26. Belum optimalnya penataan ruang dan bangunan.
27. Belum tersedianya tenaga ahli pemetaan dalam rangka penyelesaian masalah segmen desa.
28. Belum maksimalnya produksi pertanian (TPH, peternakan)
29. Masih rendahnya produksi, harga dan mutu hasil perkebunan
30. Belum maksimalnya produksi hasil perikanan
31. Kuantitas terjadinya penangkapan ikan ilegal masih tinggi

32. Pengelolaan produksi hasil TPH, perikanan dan peternakan masih belum berorientasi pasar
33. Masih adanya penduduk rawan pangan
34. Masih terbatasnya kemampuan kelembagaan pertanian
35. Masih rendahnya pendapatan/ kesejahteraan petani
36. Belum tersedianya Tenaga Metrologi terkait perdagangan.
37. Belum maksimalnya peran sektor perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi.
38. Rendahnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
39. Masih rendahnya kemampuan keterampilan para pelaku usaha mandiri/UMKM di Kabupaten HST.
40. Lemahnya kebijakan pelayanan perizinan dan kebijakan investasi
41. Belum optimalnya penggalian potensi investasi/penanaman modal
42. Belum dikelolanya obyek dan potensi pariwisata secara optimal
43. Masih banyaknya keluarga miskin dan PMKS
44. Masih rendahnya peran serta pemuda dalam pembangunan
45. Belum optimalnya manajemen kependudukan dan pencatatan sipil.
46. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat/melengkapi data kependudukan.
47. Kurangnya sarana untuk mendukung pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak).
48. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa.
49. Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
50. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangkan seni budaya daerah.
51. Belum memadainya ruang PATEN di seluruh Kantor Kecamatan yang memenuhi standar pelayanan, dengan harus tersedianya ruang bermain anak dan ruang laktasi.
52. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
53. Pelayanan komunikasi dan informatika yang tidak optimal.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kondisi perekonomian daerah biasanya digambarkan dengan beberapa indikator seperti PDRB, struktur PDRB (ekonomi), pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi dan lain-lain.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu regional yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. Pada penghitungan periode ini, metode penghitungan PDRB mengalami perubahan terkait tahun dasar dan metodologi penghitungannya. Rincian sektor lapangan usaha pada PDRB meningkat menjadi 17 kategori dimana sebelumnya hanya 9 sektor lapangan usaha. Peningkatan cakupan kategori ini juga menimbulkan efek berupa revisi dan penyempurnaan nilai PDRB pada lima tahun terakhir sehingga analisis periodik juga terbatas pada penghitungan dengan metode yang baru. Berdasarkan lapangan usaha, analisis PDRB terbagi atas Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK).

Analisis PDRB atas dasar harga berlaku bertujuan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun yang bersangkutan dan untuk menunjukkan pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja pada lapangan

usaha-lapangan usaha di suatu wilayah tertentu pada tahun yang bersangkutan. PDRD ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1. Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 – 2019 (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,168,374.57	1,311,303.95	1,438,481.11	1,552,876.09	1,653,103.25	1,696,065.98
B	Pertambangan dan Penggalian	32,483.44	37,873.59	41,245.20	45,103.30	49,115.27	53,049.94
C	Industri Pengolahan	704,619.04	773,784.63	834,626.42	909,127.66	954,457.34	1,007,380.02
D	Pengadaan Listrik, Gas	3,962.11	6,154.27	8,009.75	9,396.53	11,016.36	11,863.13
E	Pengadaan Air	22,216.48	24,529.42	26,596.51	29,616.70	32,011.69	35,009.69
F	Konstruksi	383,502.60	443,596.35	485,430.83	534,455.30	571,076.24	609.608.58
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	454,419.58	523,715.27	590,745.17	650,138.90	727,025.65	822,619.29
H	Transportasi dan Pergudangan	225,279.81	247,667.53	280,293.47	295,713.33	314,752.10	339,749.59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	161,766.36	180,577.30	199,080.72	216,325.03	238,989.59	265,640.90
J	Informasi dan Komunikasi	189,102.51	208,790.66	230,403.55	254,175.64	279,494.09	306,504,69
K	Jasa Keuangan	95,882.40	104,070.21	114,810.84	130,691.05	144,034.66	155,357.37
L	Real Estate	153,856.09	169,147.75	184,570.40	194,416.89	212,244.46	231,202.07
M,N	Jasa Perusahaan	8,863.59	9,966.65	11,030.67	12,209.51	13,591.73	14,816.96
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	478,157.33	566,129.70	594,262.35	625,694.83	674,696.52	744,384.49
P	Jasa Pendidikan	312,880.92	359,611.03	417,915.02	446,506.38	481,935.69	522,363.84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	83,785.84	98,979.53	112,486.81	119,507.06	128,888.85	140,191.14
R,S,T,U	Jasa lainnya	60,681.21	69,985.24	77,646.01	84,026.42	92,370.35	102,173.30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,539,833.87	5,135,883.09	5,647,634.82	6,109,980.60	6,578,803.84	7,057,79.38

Perkembangan PDRB ADHB selalu meningkat setiap tahunnya dari Rp 4.538.833,87 juta pada tahun 2014 naik menjadi Rp 6.578.803,84 juta pada tahun 2018 atau rata-rata naik sebesar 9,25% per tahun. Hal ini menunjukan

bahwa adanya peningkatan kemampuan sumber daya ekonomi khususnya pada aspek produksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan bertujuan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun berdasarkan pada tahun dasar. Tahun dasar perhitungan PDRB ADHK adalah tahun 2010. Kondisi dan perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2014 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2. Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 – 2019 (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	986,151.07	1,035,330.37	1,096,329.53	1,160,066.07	1,210,146.83	1,229,216.77
B	Pertambangan dan Penggalian	26,915.31	28,493.63	30,010.91	32,551.46	34,546.86	36,949.77
C	Industri Pengolahan	575,174.66	586,902.19	621,114.41	654,098.45	682,458.43	706,125.84
D	Pengadaan Listrik, Gas	4,434.23	5,807.43	6,150.30	6,465.67	6,931.29	7,272.43
E	Pengadaan Air	17,948.91	19,164.63	20,529.28	22,101.85	23,346.19	25,127.01
F	Konstruksi	319,287.50	342,698.93	364,374.64	391,177.42	407,254.81	428,013.59
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	360,892.49	394,718.14	425,930.53	456,360.29	492,947.42	532,688.25
H	Transportasi dan Pergudangan	180,852.42	191,213.07	204,016.06	214,432.81	225,343.96	237,392.85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	132,348.26	141,832.60	152,504.70	161,485.74	172,438.32	185,766.16
J	Informasi dan Komunikasi	162,077.09	176,640.20	192,365.25	205,835.24	220,717.12	238,166.38
K	Jasa Keuangan	75,261.28	78,598.30	83,559.24	91,212.05	96,408.78	101,011.30
L	Real Estate	127,973.14	134,489.53	142,590.37	149,731.01	159,786.54	170,901.27
M,N	Jasa Perusahaan	6,777.84	7,164.25	7,689.67	8,218.90	8,826.28	9,393.06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	365,540.46	397,518.69	405,706.31	416,555.90	432,551.65	457,867.36
P	Jasa Pendidikan	259,798.82	280,461.14	302,861.57	318,700.93	336,476.78	358,766.96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,866.93	74,118.10	80,882.53	84,827.17	88,480.02	94,160.56
R,S,T,U	Jasa lainnya	48,804.61	51,734.56	55,338.23	58,170.78	61,637.76	65,306.70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		3,719,105.01	3,946,885.76	4,191,953.53	4,431,991.74	4,660,299.03	4,884,126.26

Perkembangan PDRB ADHK juga selalu meningkat setiap tahunnya dari Rp 3.719.105,01 juta pada tahun 2014 naik menjadi Rp 4.660.299,03 juta pada tahun 2018 atau rata-rata naik sebesar 5,6 % per tahun. Hal ini menunjukan bahwa adanya peningkatan pertumbuhan produksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



Gambar 3. 1. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 - 2018

b. Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 masih didominasi oleh kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai sekitar lebih dari 25%. Kontribusi terbesar lainnya adalah lapangan usaha industri pengolahan sekitar 14,5%, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar sekitar 11%, lapangan usaha jasa pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib sebesar 10%, lapangan usaha konstruksi sebesar 9% dan lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 7,5%. Lapangan usaha lainnya berkontribusi kurang dari 5%. Konstribusi masing-masing lapangan usaha

pembentuk struktur ekonomi dapat di lihat pada tabel berikut.

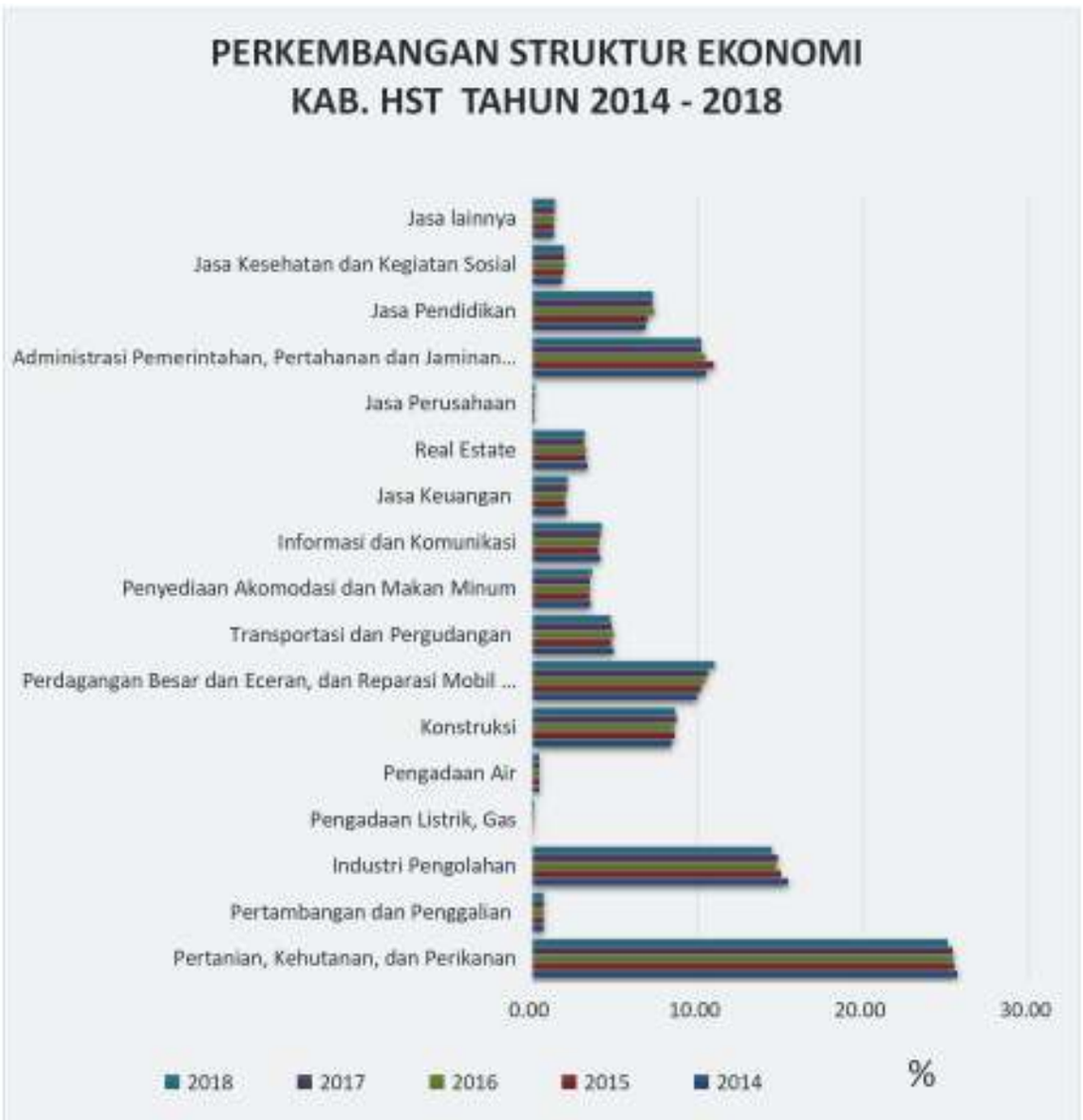
Tabel 3. 3. Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 – 2018 (%)

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.74	25.53	25.47	25.42	25.13
B	Pertambangan dan Penggalian	0.72	0.74	0.73	0.74	0.75
C	Industri Pengolahan	15.52	15.07	14.78	14.88	14.51
D	Pengadaan Listrik, Gas	0.09	0.12	0.14	0.15	0.17
E	Pengadaan Air	0.49	0.48	0.47	0.48	0.49
F	Konstruksi	8.45	8.64	8.60	8.75	8.68
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.01	10.20	10.46	10.64	11.05
H	Transportasi dan Pergudangan	4.96	4.82	4.96	4.84	4.78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.56	3.52	3.53	3.54	3.63
J	Informasi dan Komunikasi	4.17	4.07	4.08	4.16	4.25
K	Jasa Keuangan	2.11	2.03	2.03	2.14	2.19
L	Real Estate	3.39	3.29	3.27	3.18	3.23
M,N	Jasa Perusahaan	0.20	0.19	0.20	0.20	0.21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.53	11.02	10.52	10.24	10.26
P	Jasa Pendidikan	6.89	7.00	7.40	7.31	7.33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.85	1.93	1.99	1.96	1.96
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.34	1.36	1.37	1.38	1.40
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Kecenderungan penurunan pada sektor pertanian yang merupakan sektor dominan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu diwaspadai. Hal ini dikarenakan terjadinya pergeseran perekonomian daerah atau makin ditinggalkannya sektor primer karena kurangnya nilai tambah yang diterima. Kasus yang sama juga terjadi pada sektor industri pengolahan, penurunan ini menggambarkan bahwa industri pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak mampu bersaing dengan produk industri pengolahan dari daerah lain, sehingga perlu upaya agar sektor ini tidak semakin menurun distribusinya.

Sektor dominan lainnya seperti sektor jasa pemerintah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan sektor ini seiring dengan perkembangan kemampuan fiskal daerah, semakin tinggi kemampuan fiskal daerah maka semakin tinggi kontribusi sektor jasa pemerintah terhadap perekonomian daerah, begitu juga sebaliknya.

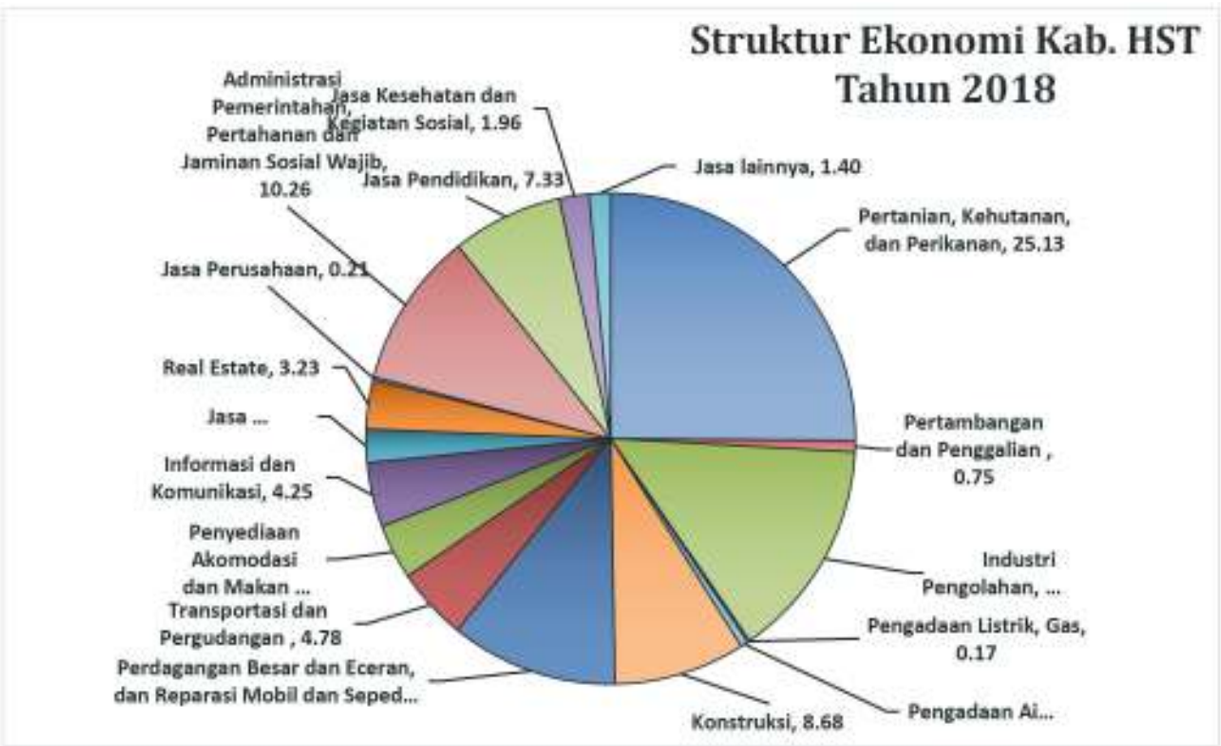
Sektor dominan yang merupakan sektor potensial untuk dikembangkan yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sebagai daerah yang posisinya berada di tengah-tengah kawasan hulu sungai merupakan kawasan yang ideal sebagai pusat perdagangan dan jasa.



Gambar 3. 2. Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 - 2018

Perkembangan struktur perekonomian dilihat masing-masing sektor dari tahun ke tahun terlihat ada perubahan tetapi masih lamban yaitu bergerak dari sektor primer ke sekunder dan tersier (perdagangan dan jasa). Memang struktur ekomoni tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih didominasi oleh sektor primer dan sekunder. Perekonomian masih bertumpu pada lapangan usaha pertanian secara umum dan hasil-hasil olahannya, perdagangan dan aktivitas pemerintahan.

Ini menandakan bahwa perkembangan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih sangat tergantung dengan pertanian dan aktivitas pemerintahan, sehingga sangat rentan terhadap kondisi iklim dan anggaran serta kualitas belanja pemerintah. Selain itu, pangsa industri manufaktur juga menjadi nilai tambah dalam produksi barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hal ini tidak terlepas dari dukungan kinerja industri pengolahan makanan dan minuman, industri karet dan industri farmasi.



Gambar 3. 3. Distribusi Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018

c. Pertumbuhan Ekonomi

Selain struktur perekonomian, dapat diketahui laju pertumbuhan PDRB pada masing-masing sektor dengan melihat pada laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Berikut laju pertumbuhan masing-masing sektor pembentuk PDRB dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 3. 4. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 – 2018 (%)

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.59	4.99	5.89	5.81	4.32	4.92
B	Pertambangan dan Penggalian	6.43	5.86	5.33	8.47	6.13	6.44
C	Industri Pengolahan	4.46	2.04	5.83	5.31	4.34	4.39
D	Pengadaan Listrik, Gas	18.09	30.97	5.90	5.13	7.20	13,46
E	Pengadaan Air	6.97	6.77	7.12	7.66	5.63	6.83
F	Konstruksi	6.54	7.33	6.33	7.36	4.11	6.33
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.05	9.37	7.91	7.14	8.02	7.90
H	Transportasi dan Pergudangan	5.85	5.73	6.70	5.11	5.09	5,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.23	7.17	7.52	5.89	6.78	6.72
J	Informasi dan Komunikasi	7.89	8.99	8.90	7.00	7.23	8.00
K	Jasa Keuangan	6.36	4.43	6.31	9.16	5.70	6.39
L	Real Estate	6.89	5.09	6.02	5.01	6.72	5.95
M,N	Jasa Perusahaan	5.11	5.70	7.33	6.88	7.39	6.48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.76	8.75	2.06	2.67	3.84	4.62
P	Jasa Pendidikan	8.40	7.95	7.99	5.23	5.58	7.03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.34	7.63	9.13	4.88	4.31	6.45
R,S,T,U	Jasa lainnya	7.45	6.00	6.97	5.12	5.96	6.30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5.56	6.12	6.21	5.73	5.15	5.75

Indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada data terakhir tahun 2018 masih stabil meskipun laju pertumbuhan melambat dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,73%, terjadi perlambatan menjadi 5,15% pada tahun 2018. Semakin terintergrasinya perekonomian antar wilayah, internasional, nasional dan regional serta semakin terbukanya perekonomian negara di dunia maka akan saling mempengaruhi. Dampak dari lesunya ekonomi global dapat

dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga terjadi perlambatan. Pada tahun 2017 ekonomi Indonesia tumbuh 5,17%, maka pada tahun 2018 turun menjadi 5,02%. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2017 tumbuh 5,17%, maka pada tahun 2018 melambat menjadi 4,08%.

Di tengah masalah perlambatan ekonomi global, ternyata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih stabil diatas pertumbuhan Indonesia dan Kalimantan Selatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk kategori tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2018 dipengaruhi turunnya laju pertumbuhan sektor-sektor yang berkontribusi besar atau unggulan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah banyak disebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi yaitu dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 25,47%, terjadi penurunan laju pertumbuhan dari 5,81% pada tahun 2017 menjadi 4,32% pada tahun 2018. Penyumbang terbesar lainnya yaitu industri pengolahan juga terjadi penurunan pertumbuhan dari 5,31% pada tahun 2017 menjadi 4,34% pada tahun 2018. Sementara penyumbang terbesar lainnya yaitu perdagangan besar dan eceran dan reparasi mesin, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib terjadi peningkatan laju pertumbuhan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilihat dari rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir, yakni sektor pengadaan listrik dan gas mengalami

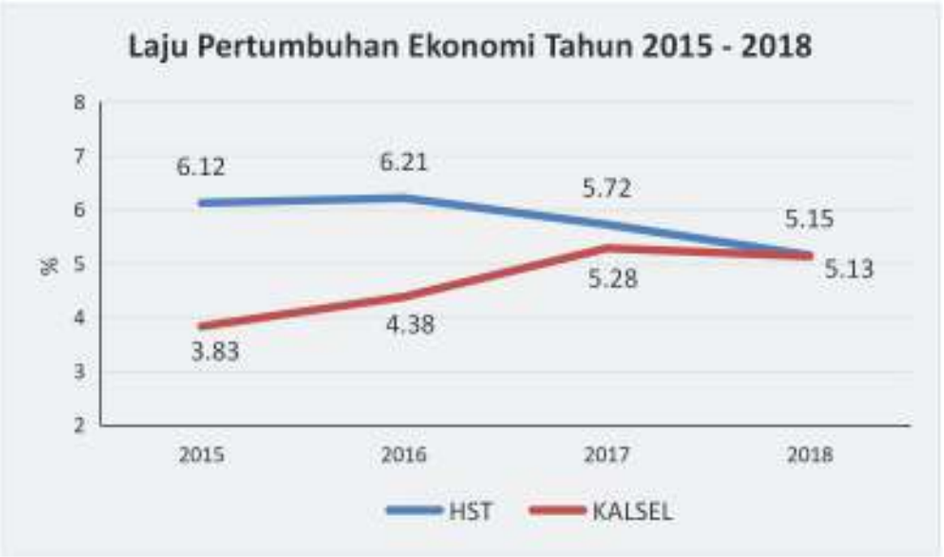
pertumbuhan tertinggi yakni rata-rata sebesar 13,46%, sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh rata-rata 8,00%, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh rata-rata 7,90%. Dari 17 sektor pembentuk PDRB, ada 4 sektor rata-rata pertumbuhannya di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi (5,75%), yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan dan sektor jasa pemerintahan, pertahanan dan jaminal social wajib. Sedang sektor lainnya dengan rata-rata pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi.

Untuk tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi sektoral, dari 17 sektor maka ada 6 sektor yang laju pertumbuhannya di bawah laju pertumbuhan ekonomi dan ada 11 sektor yang laju pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi (5,15%), seperti terlihat pada grafik berikut.



Gambar 3. 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018

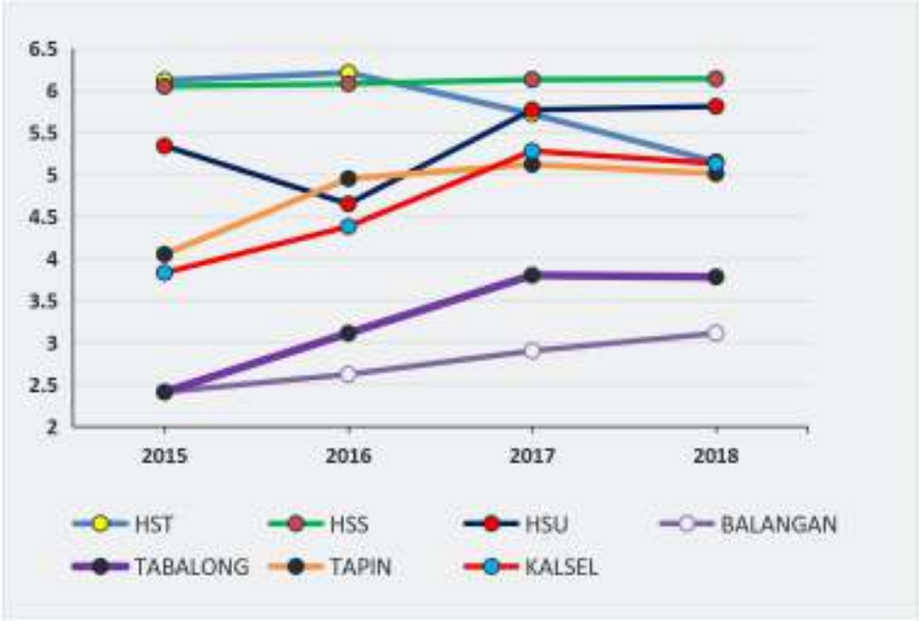
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada kecenderungan terjadi perlambatan dari tahun ke tahun. Walaupun begitu laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2018.



Gambar 3. 5. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2018

Dibandingkan dengan kabupaten tetangga, maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di tengah.





Gambar 3. 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Banua Enam dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi sangat tergantung dengan kinerja sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor utama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta mempunyai kontribusi terbesar terhadap total PDRB. Selain itu, penurunan pada beberapa sektor dominan lainnya sangat berpengaruh terhadap turunnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2018 berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara. Tetapi posisi ini masih di atas Kabupaten Tapin dan Balangan dan Tabalong yang merupakan daerah pertambangan.

d. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita bertujuan untuk menunjukkan nilai PDRB perorang yakni gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro. Menurut klasifikasi Bank Dunia, pendapatan perkapita kurang dari $1.045 dikategorikan sebagai pendapatan perkapita rendah, sementara pendapatan perkapita antara $1.045 - $4.125

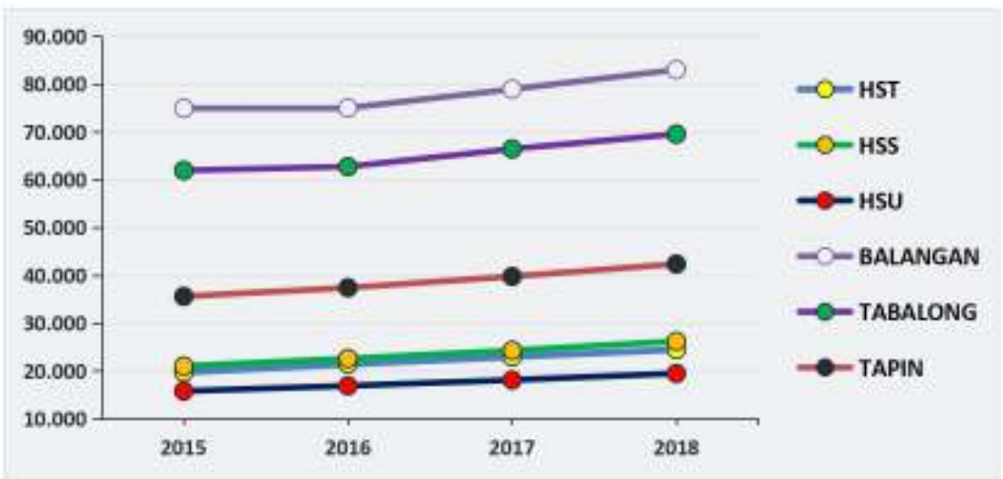
termasuk pendapatan perkapita menengah kebawah, dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari $12.746 temasuk pendapatan perkapita tinggi. Berikut PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 3. 5. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	17,66	19,75	21,45	23,02	24,50
Laju Pertumbuhan	-	11,83	8,61	7,32	6,43

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurun tahun 2014-2018 semakin meningkat setiap tahunnya. Apabila diukur dalam USD menurut klasifikasi bank dunia, PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk dalam kategori wilayah berpendapatan menengah kebawah.

Dibandingkan dengan kabupaten tetangga, PDRB per kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada urutan ke-2 terbawah setelah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada urutan terendah.



Gambar 3. 7. Perbandingan Perkembangan PDRB perkapita Banua Enam Tahun 2015 - 2018

e. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Terjadinya inflasi dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), terjadinya negatif supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi, tingginya permintaan barang dan jasa, dan perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurun tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 terjadi fluktuasi. Lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3. 8. Tingkat Inflasi
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 - 2019

Inflasi tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 7,16%. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM pada tahun 2014. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi deflasi yakni 5,03% pada tahun 2015 dan 3,68% pada tahun 2016 serta naik pada tahun 2017 menjadi 3,82%. Kemudian

turun lagi pada tahun 2018 menjadi 2,63% tetapi kembali naik pada tahun 2019 menjadi 4,15%. Pendorong inflasi umumnya adalah harga gula pasir dan perhiasan emas. Sedang pendorong deflasi/penahan inflasi adalah harga ikan nila dan cabai serta daging ayam ras.

f. Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dimana hal ini merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah. Dalam mengukur kemiskinan dapat digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Data-data kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 – 2019

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/bln)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)
2012	241.973	14.274	5,68
2013	257.580	14.181	5,57
2014	268.522	14.557	5,65
2015	279.530	15.080	5,81
2016	322.392	16.220	6,18
2017	341.024	16.169	6,09
2018	354.214	16.170	6,01
2019	365.008	16.096	5,93

Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu mendapat perhatian yang serius. hal ini dikarenakan trend kenaikan pada jumlah penduduk miskin maupun tingkat kemiskinan pada tahun 2015 dan 2016 serta turun pada tahun 2017 dan stagnan pada tahun 2018. Angka kemiskinan ini masih lebih tinggi dibandingkan kemiskinan Kalimantan Selatan dan Kabupaten lainnya. Meskipun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode 2015 sampai dengan 2017 laju pertumbuhan ekonomi tinggi, peningkatan pendapat perkapita serta penurunan angka inflasi, namun tidak berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan yang cenderung stagnan.



Gambar 3. 9. Tingkat Kemiskinan Banua Enam dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2019

Dibandingkan dengan kabupaten tetangga, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih berada di bawah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong, tetapi berada di atas angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 3. 10. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2019



Gambar 3. 11. Tingkat Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2019

3.1.2. Tantangan dan Prospek serta Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tantangan yang akan dihadapi perekonomian daerah adalah :

a. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi internasional dan nasional

Diproyeksikan terjadinya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dunia disebabkan karena merosotnya perdagangan dunia, pariwisata dan fluktuasi keuangan dunia, menyebabkan laju pertumbuhan dunia juga melambat bahkan diperkirakan negatif. Hal ini tentu juga berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi nasional. Penurunan harga komoditas dunia menyebabkan menurunnya nilai ekspor Indonesia, bahkan Provinsi Kalimantan Selatan dengan komoditi ekspor terbesar adalah batu bara, sawit dan karet akan terdampak. Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu daerah penghasil karet.

Menurunnya pendapatan negara akan berakibat pada menurunnya jumlah transfer ke daerah, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah salah satu penggerak ekonominya masih bertumpu pada sektor jasa pemerintahan.

b. Investasi yang masih terbatas

Tantangan pertumbuhan ekonomi adalah pada tinggi rendahnya investasi yang masuk ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada kondisi sekarang investasi yang masuk masih rendah dan terbatas dengan ditolaknya investasi tambang dan perkebunan besar sawit.

c. Kondisi iklim

Penyumbang terbesar ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan share sekitar 25 %. Berusaha di sektor ini masih sangat rentan terhadap perubahan iklim,

sehingga apabila iklim tidak mendukung akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

d. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang cukup tinggi masih dibarengi dengan tingginya angka kemiskinan. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif. Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan pollitik. Angka kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum memberi dampak yang signifikan pada pengentasan kemiskinan. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk menekan angka kemiskinan, justru lebih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi.

e. Kualitas Sumber Daya Manusia,

Dalam melihat kualitas SDM, bisa dilihat dari keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programes (UNDP) sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. IPM dihitung dengan menggunakan metodologi baru, utamanya dalam pendekatan penghitungan indeks pendidikan. Pada metode baru ini, IPM dibangun melalui

pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), dan Daya Beli Per Kapita (standar hidup layak/ekonomi). Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, kualitas SDM Kabupaten Hulu Sungai Tengah jika dilihat berdasarkan IPM tergolong menengah – rendah. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah nilai IPM pada tahun 2019 adalah 68,8 atau berada pada kategori sedang. IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah menempati peringkat ke-9 dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan,

f. Ketersediaan Infrastruktur yang lengkap dan berkualitas
Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh kelengkapan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas khususnya pada sektor transportasi/konektivitas, pertanian dan perdagangan serta industri akan menjadi tantangan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.

g. Masih Kecilnya Share Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada PDRB Provinsi Kalimantan Selatan
Meskipun perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, tetapi share Kabupaten Sungai Tengah untuk perekonomian Kalimantan Selatan sangat kecil. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dituntut untuk menggali dan memanfaatkan secara optimal seluruh potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan share Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain tantangan dalam pembangunan ekonomi juga dapat dilihat potensi dan prospek ekonomi dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi

Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Salah satu indikator ekonomi penting yang sering menjadi sorotan banyak pihak adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Besar kecilnya pertumbuhan PDRB suatu wilayah, dipengaruhi oleh pertumbuhan stok kapital (modal), pertumbuhan tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Semakin besar pertumbuhan ketiga faktor tersebut, maka akan semakin besar juga pertumbuhan PDRB suatu daerah dan sebaliknya. Namun pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tujuan akhir pembangunan ekonomi adalah mewujudkan kesejahteraan penduduk (welfare) dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu media perantara untuk meraihnya. Dengan demikian, yang menjadi target pengambil kebijakan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan output) yang tinggi, akan tetapi juga sampai sejauh mana hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka fokus perhatian akan tertuju pada identifikasi sektor lapangan usaha yang dapat mendorong pencapaian sekaligus kedua tujuan di atas (pertumbuhan ekonomi tinggi dan penciptaan kesejahteraan). Kesejahteraan sebetulnya mencakup dimensi yang luas, dan paling utama adalah dimensi pemerataan. Jika kesejahteraan hanya mengerucut kepada segolongan kecil penduduk, belum dapat dikatakan bahwa tujuan pembangunan tercapai. Pembangunan juga belum tercapai pada saat ekonomi mampu tumbuh tinggi, namun pada saat yang sama masih banyak dijumpai penduduk yang terjebak dalam kubangan kemiskinan.

Untuk itu dapat dijelaskan potensi dan prospek pembangunan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah dengan meningkatkan pertumbuhan pertumbuhan stok kapital (modal) melalui penguatan sektor unggulan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam postur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah komponen modal/kapital memiliki share cukup tinggi dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau menjadi komponen kedua yang memiliki share terbesar setelah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran modal sangat penting dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dalam kerangka makro ekonomi, akumulasi modal dapat bersumber dari tabungan domestik atau menarik modal dari luar. Untuk memaksimalkan tabungan domestik, Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus mampu menggerakkan roda ekonomi berputar lebih cepat. Nilai tambah yang tercipta akan meningkatkan tingkat tabungan domestik. Untuk mencapainya diperlukan strategi yang efektif, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan semua potensi sumber pertumbuhan yang dimiliki. Hal tersebut berarti pilihannya adalah penguatan sektor/lapangan usaha yang menjadi unggulan daerah.

Hasil identifikasi berdasarkan sisi LQ, Shift Share dan Tifologi Klassen, menunjukkan bahwa lapangan usaha unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu Konstruksi, Perdagangan Besar Dan Eceran, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, serta Jasa Pendidikan. Selain itu ada pula sektor industri pengolahan yang memiliki share terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto non pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sementara untuk mengoptimalkan penarikan modal dari luar pilihannya dapat berupa peningkatan efisiensi produksi dan penguatan daya beli penduduk. Efisiensi produksi tidak terlepas dari penyediaan infrastruktur yang memadai dan untuk memenuhi hal tersebut, menjadi tantangan yang cukup besar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Infrastruktur merupakan barang publik, maka

penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pilihan yang dapat ditempuh untuk memupuk modal adalah penguatan sektor unggulan dan penguatan daya beli penduduk. Kedua hal tersebut saling terkait satu sama lain, dan memerlukan proses yang tidak singkat. Artinya hal tersebut juga terkait dengan transisi ekonomi yang terjadi. Tentunya transisi dari sektor yang kurang produktif mengarah kepada sektor yang lebih produktif.

Berdasarkan potensi dan prospek ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yakni :

a. Meningkatkan pembangunan sektor-sektor unggulan penyumbang terbesar ekonomi.

   Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk sektor pertanian masih didominasi komoditas padi. Dengan Nilai Tukar Petani (NTP) padi yang dibawah 100 %, maka potensi komoditas lain seperti hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan (di luar karet) perlu digalakkan karena mempunyai NTP di atas 100 %.

b. Pemerataan pembangunan dengan mengoptimalkan sektor konstruksi.

   Proporsi usaha/perusahaan pada Sektor Konstruksi sebenarnya tidak sampai dua persen dari total usaha/perusahaan berdasarakan hasil Sensus Ekonomi 2016 yang dilakukan Badan Pusat Statisik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun kontribusinya dalam menghasilkan nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup tinggi. Tahun 2018 porsi nilai tambah yang dihasilkan dalam PDRB non pertanian mencapai lebih dari 10 persen.

   Pertumbuhan ekonomi Sektor Konstruksi juga menunjukkan performa yang baik, secara rata-rata

dalam 5 tahun terakhir berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi total. Dengan adanya program pemerintah mengenai percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur, peran sektor ini pada pembangunan nasional akan semakin meningkat. Dengan demikian, sektor ini memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian meski dengan jumlah usaha yang terbilang sedikit. Selain itu, Sektor Konstruksi menyerap tenaga kerja sebanyak 4.371 tenaga kerja atau sekitar 7,07 persen.

Pada skala usaha Usaha Menengah Besar (UMB), penyerapan tenaga kerja bahkan mencapai 32,94 persen, atau yang terbesar di antara sektor lainnya. Jika penyerapan tenaga kerja dihitung berdasarkan rata-rata per usaha, sektor konstruksi merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar kedua setelah sektor Jasa Pendidikan, yaitu rata-rata sebanyak 8 tenaga kerja per usaha. Sedangkan untuk proporsi pekerja antara Usaha Mikro Kecil (UMK) dan UMB sangat timpang, yaitu 92 : 8, hal ini sebanding dengan jumlah usaha konstruksi skala UMK jauh lebih besar yaitu mencapai 70,35 persen.

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di sektor konstruksi, dilakukan dengan beberapa kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah diarahkan untuk peningkatan pemerataan dan peningkatan aksesibiltas wilayah serta peningkatan ketahanan pangan.

c. Mengoptimalkan pembangunan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Hulu Sungai Tengah merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memilih sebagai daerah pusat perdagangan di Banua Enam, Hal ini didukung dengan lokasi daerah yang cukup strategis, yaitu berada ditengah-tengah atau diantara lima

kabupaten lainnya. Meskipun daerah tersebut kaya potensi Sumber Daya Alam, pemerintah dan masyarakat sepakat untuk tidak membangun pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit sebagaimana kabupaten lainnya, karena dinilai merusak alam dan banyak merugikan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, selain sektor pertanian dan perikanan, sektor perdagangan dipilih menjadi salah satu pendapatan utama bagi warga di daerah tersebut.

Sektor ini menyumbang nilai tambah yang cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal ini tercermin dari kontribusinya pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) non pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mencapai 10,61 persen, atau terbesar kedua setelah sektor Industri Pengolahan pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor juga menunjukkan performa yang sangat baik, mencapai 8,02 persen pada tahun 2018. Sedangkan selama tahun 2015-2018, pertumbuhan ekonomi sektor ini selalu di atas pertumbuhan ekonomi total.

Selain kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tergolong tinggi. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor juga memiliki jumlah usaha terbanyak. Jumlah usaha sektor ini lebih dari separuh dari seluruh usaha non pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau mencapai 52,7 persen. Seiring dengan hal itu, sektor ini juga menyerap tenaga kerja paling banyak, yaitu sekitar 39,96 persen dari keseluruhan tenaga kerja nonpertanian. Dengan kata lain, empat di antara sepuluh tenaga kerja pada usaha nonpertanian bekerja pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

Usaha Mikro kecil (UMK) jauh lebih banyak dari Usaha Menengah Besar (UMB) dengan perbandingan yang cukup jauh. Dari total 17.454 usaha pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, hampir semuanya adalah UMK, yaitu mencapai 99,96 persen. Hal ini tidak jauh berbeda jika melihat dari sisi tenaga kerja, dari total 24.689 tenaga kerja pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, 96,32 persen diantaranya merupakan tenaga kerja pada UMK.

d. Mengoptimalkan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Meskipun dari sisi pangsa PDRB, kontribusi sektor ini cukup kecil. Selama lima tahun terakhir, share sektor penyediaan akomodasi dan makan minum rata-rata hanya mencapai 3,51 persen pertahun. Namun demikian, pertumbuhan setiap tahunnya cukup tinggi dan selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi total. Rata-rata pertumbuhan pertahun mencapai 7,34 persen. Selain itu, usaha ini menjadi andalan mata pencaharian penduduk Hulu Sungai Tengah. Sekitar 9.613 orang bekerja pada sektor ini. Lapangan usaha tersebut sekaligus menjadi sektor unggulan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pada hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum memiliki pertumbuhan yang realtif lebih cepat, memiliki daya saing dan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan rata-rata daerah di Provinsi Jawa Tengah lainnya.

Daya beli masyarakat yang cukup baik serta tingginya tingkat konsumsi masyarakat Hulu Sungai Tengah menjadi salah satu aspek pendorong tumbuhnya sektor ini. Dalam selang waktu 5 tahun terakhir banyak bermunculan hotel/penginapan serta usaha kuliner baru yang turut mendorong pertumbuhan sektor tersebut.

Secara umum, jumlah aktivitas penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum menempati urutan kedua terbanyak setelah usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi dan perawatan mobil atau sepeda motor. Jumlah usaha pada sektor ini mencapai 6.151 atau 18,58 persen dari total usaha non pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tidak hanya itu, aktivitas ini menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, yaitu sekitar 9.613 atau mencapai 15,56 persen dari keseluruhan tenaga kerja nonpertanian. Lebih jauh lagi, sektor usaha ini mampu menjadi andalan bagi pelaku ekonomi berskala kecil. Jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) pada sektor ini mencapai 9594 usaha, atau sekitar 99,98 persen dari keseluruhan usaha penyedia akomodasi dan makan minum.

e. Mengoptimalkan sektor jasa Pendidikan untuk peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pencetak modal manusia yang unggul

Pendidikan dipandang sebagai suatu investasi di bidang sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Oleh karenanya, penyelenggaraan pendidikan sangat penting, karena mampu mencetak sumber daya manusia berkualitas yang merupakan modal dasar pembangunan. Dengan demikian, aktivitas pendidikan baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta merupakan investasi sekaligus ladang usaha bagi penduduk Hulu Sungai Tengah. Dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nonpertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, peran usaha pendidikan merupakan yang terbesar kelima dengan share sebesar 7,28 persen. Selain itu, selama periode 2012-2017 kontribusi Sektor Pendidikan terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah selalu baik.

Dalam penyediaan lapangan pekerjaan, sektor ini memiliki peran yang cukup penting. Sektor ini mampu

menyerap tenaga kerja sebesar 8657 tenaga kerja atau 14,01 persen dari tenaga kerja non pertanian. Angka tersebut berada pada peringkat ketiga setelah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor (Sektor G); dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Sektor I), padahal jumlah usaha ini terbilang sedikit, hanya 1.014 atau hanya mencapai 3,06 persen. Selain itu, mayoritas usaha pada sektor ini berskala mikro kecil (UMK), mencapai 99,41 persen, hal tersebut dikarenakan aktivitas ini umumnya berupa usaha nonprofit dan merupakan bagian dari pelayanan dasar pemerintah.

Aktifitas ekonomi pada kegiatan jasa pendidikan tercermin dari nilai PDRB sektor lapangan usaha jasa pendidikan. Dalam perekonomian Hulu Sungai Tengah, selama selang waktu 2012-2017 porsi sektor tersebut rata-rata mencapai 7,03 persen. Sementara pertumbuhan pertahun rata-rata mencapai 9,97 persen dalam selang waktu yang sama. Pertumbuhan sektor lapangan usaha jasa pendidikan didorong oleh besarnya animo masyarakat untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada putra putrinya, diantaranya memasukkan anak-anak mereka ke berbagai lembaga kursus untuk menambah dan melengkapi pendidikan yang dienyam pendidikan formalnya.

f. Peningkatan produktivitas Industri Pengolahan sebagai Lapangan Usaha Andalan

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nonpertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya pada periode 2012-2017. Industri pengolahan termasuk salah satu tulang punggung perekonomian Hulu Sungai Tengah dengan kontribusi mencapai 23 persen terhadap PDRB nonpertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Selain menciptakan nilai tambah, industri pengolahan termasuk andalan untuk penyerapan tenaga kerja.

Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016 yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa jumlah usaha industri pengolahan (Sektor C) mencapai 3.872 atau 11,70 persen dari total usaha nonpertanian. Jumlah usaha pada sektor ini menempati urutan ketiga setelah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor (Sektor G) dan Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum (Sektor I). Padahal kontribusi Sektor C terhadap PDB nonpertanian jauh di atas kedua sektor tersebut. Artinya, secara kasat mata produktivitas usaha industri pengolahan lebih tinggi dari Sektor G dan I. Uniknya, hampir seluruh usaha industri pengolahan berskala kecil. Jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) sebesar 99,04 persen. Penentuan skala usaha salah satunya mempertimbangkan jumlah tenaga kerja. Jika dilihat secara rata-rata, jumlah tenaga kerja pada industri pengolahan UMK mencapai 2 tenaga kerja per usaha, sementara untuk Usaha Menengah Besar (UMB) mencapai 144 tenaga kerja per usaha. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri pengolahan mencapai 7.410 atau 11,99 persen dari total tenaga kerja pada usaha-usaha selain pertanian.

Industri pengolahan merupakan usaha yang memerlukan keahlian khusus. Industri pengolahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi industri karet serta industri yang berbasis rumah tangga seperti industri kopiah haji, industri anyaman purun, industri gula merah dan lain-lain.

Kebijakan ekonomi tahun 2021 secara detail dapat digambarkan pada indikator-indikator makro ekonomi seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. 7. Realisasi, Proyeksi dan Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi				Proyeksi		Target
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	PDRB adhb	Rp (juta)	5.140.313	5.649.533	6.135.771	6.578.803	7.057.979	7.573.250	8.150.774
2	PDRB adhk	Rp (juta)	3.947.042	4.192.093	4.431.596	4.660.299	4.884.126	5.120.070	5.379.751
3	Pertumbuhan Ekonomi adhb	%	13,23	9,91	8,61	7,67	7,28	7,30	7,62
4	Pertumbuhan Ekonomi adhk	%	6,13	6,21	5,72	5,15	4,80	4,83	5,00
5	Tingkat inflasi	%	5,14	3,57	3,82	2,63	4,15	2,8	2,37
6	Jumlah Penduduk miskin	%	5,81	6,18	6,09	6,01	5,93	5,60	6,00
7	Tingkat Pengangguran	%	2,97	2,97	4,13	3,63	2,96	3,50	3,71
8	PDRB per kapita	Rp /kap (juta)	19,75	21,45	22,92	24,42	25,91	27,49	29,27
9	Besaran Indeks Gini	-	0,33	0,27	0,3	0,295	0,295	0,295	0,295
10	Besaran IPM	-	66,56	67,07	67,78	68,32	68,80	70,84	70,14

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi				Proyeksi		Target
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
11	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	%	0,16	0,18	0,20	0,20	0,19	0,17	0,11
12	Rasio Pendapatan Daerah terhadap PDRB	%	21,50	22,44	17,06	15,84	17,27	15,98	15,12

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kesinambungan pembangunan daerah membutuhkan pendanaan yang bersumber dari pos-pos pendapatan daerah. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus berusaha menggali segala potensi dan sumber-sumber pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana transfer maupun dari sumber lainnya yang sah. Disamping pendapatan daerah, dalam rangka pemenuhan anggaran belanja daerah juga diperhitungkan dari besarnya pembiayaan daerah. Dari pos-pos inilah dapat diperhitungkan sejauh mana pembangunan daerah dapat didanai.

Pendanaan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat ini masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yakni diatas 90% dari total pendapatan daerah. Meskipun demikian, sejalan dengan konteks otonomi daerah, secara bertahap Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus berupaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Secara rinci realisasi dan proyeksi pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 8. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020 (APBD)	Tahun 2021
1	**Pendapatan Daerah**	**1.267.822.948.739**	**1.125.165.680.319**	**1.132.223.322.681**	**1.219.107.267.371**	**1.210.370.713.557**	**1.232.158.402.919**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**96.994.158.192**	**118.421.755.241**	**91.332.357.283**	**117.059.912.839**	**120.842.980.641**	**130.340.069.003**
1.1.1	Pajak Daerah	9.965.754.476	12.083.082.101	12.853.345.156	13.567.359.199	13.156.872.000	9.209.810.400
1.1.2	Retribusi Daerah	10.017.993.958	11.311.663.467	8.607.453.298	10.985.811.066	11.835.487.561	8.284.841.292
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.275.374.095	7.310.808.360	7.862.245.494	3.173.704.322	7.300.000.000	5.000.000.000
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	69.735.035.663	87.716.201.313	62.009.313.335	89.333.038.252	88.550.621.080	107.845.417.311
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.170.054.185.547**	**1.006.398.203.018**	**1.040.798.550.792**	**1.101.617.444.043**	**1.071.009.967.916**	**1.084.555.477.916**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	**1.117.073.672.972**	**947.578.509.002**	**975.329.480.912**	**1.017.241.020.881**	**990.402.706.000**	1.003.948.216.000
1.2.1.1	Dana Perimbangan	**931.939.688.972**	**770.217.653.002**	**827.531.025.912**	**889.486.273.881**	**850.358.210.000**	**873.788.090.000**
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	**689.864.055.021**	**614.004.305.201**	**658.114.884.142**	**706.794.327.466**	**671.673.188.000**	**695.103.068.000**

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020 (APBD)	Tahun 2021
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	160.829.096.021	94.262.789.201	138.373.468.142	172.194.089.466	126.570.120.000	150.000.000.000
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	529.034.959.000	519.741.516.000	519.741.516.000	534.600.238.000	545.103.068.000	545.103.068.000
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	**242.075.633.951**	**156.213.347.801**	**169.416.141.770**	**182.691.946.415**	**178.685.022.000**	**178.685.022.000**
1.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	233.111.153.951	73.652.440.094	59.355.325.712	81.480.649.177	70.976.986.000	70.976.986.000
1.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	8.964.480.000	82.560.907.707	110.060.816.058	101.211.297.238	107.708.036.000	107.708.036.000
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	5.000.000.000	53.985.765.000	34.750.000.000	-	9.884.370.000	-
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	83.258.129.000	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-
1.2.1.5	Dana Desa	96.875.855.000	123.375.091.000	113.048.455.000	127.754.747.000	130.160.126.000	130.160.126.000
1.2.2	Transfer Antar Daerah	**52.980.512.575**	**58.819.694.016**	**65.469.069.880**	**84.376.423.162**	**80.607.261.916**	**80.607.261.916**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	52.980.512.575	58.819.694.016	65.469.069.880	84.376.423.162	80.607.261.916	80.607.261.916

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020 (APBD)	Tahun 2021
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**774.605.000**	**345.722.060**	**92.414.606**	**429.910.489**	**18.517.765.000**	**17.262.856.000**
1.3.1	Hibah	774.605.000	345.722.060	92.414.606	429.910.489	18.517.765.000	17.262.856.000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

Kerangka pendanaan untuk membiayai rencana kerja pembangunan daerah selain berasal dari pendapatan daerah juga berasal dari penerimaan pembiayaan daerah. Secara rinci gambaran penerimaan pembiayaan daerah dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 9. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021

No.	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	**Pembiayaan Daerah**	**51,272,192,504**	**62,097,331,913**	**11.287.238.618**	**122.467.077.232**	**135.521.132.945**	**125.000.000.000**
1.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**51,272,192,504**	**62,097,331,913**	**11.287.238.618**	**122.467.077.232**	**135.521.132.945**	**125.000.000.000**
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	51,272,192,504	62,097,331,913	11.287.238.618	122.467.077.232	135.521.132.945	125.000.000.000
1.1.2	Transfer Dari Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Penerimaan Piutang	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Penerimaan Penyertaan Modal pada Bank Kalsel	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

Proyeksi total kemampuan pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2021 Lebih rinci total sebagai berikut.

Tabel 3. 10. Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	PENDAPATAN DAERAH	1.267.822.948.739	1.125.165.680.319	1.132.223.322.681	1.219.107.267.371	1.210.370.713.557	1.232.158.402.919
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	51,272,192,504	62,097,331,913	11.287.238.618	122.467.077.232	135.521.132.945	125.000.000.000
3	**JUMLAH**	**1.319.095.141.243**	**1.187.263.012.232**	**1.143.510.561.299**	**1.341.574.344.603**	**1.345.891.846.502**	**1.357.158.402.919**

Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020

3.2.2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari 3 sumber pendapatan daerah tersebut, kemampuan keuangan daerah masih bertumpu pada pendapatan transfer. Sekitar 90 % pendapatan daerah masih tergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun Prov. Kalimantan Selatan, 9 – 10 % dari Pendapatan Asli Daerah dan 0 – 1 % dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah diarahkan pada pendapatan yang bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan pendapatan daerah dari pendapatan transfer berasal dari transfer pemerintah pusat dan dari transfer pemerintah Provinsi. Transfer pemerintah pusat berasal dari dana perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Transfer Provinsi berasal dari pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan. Dana perimbangan berasal dari sumber bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk pencapaian target proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2021 dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber-sumber pendapatan tersebut baik PAD maupun sumber pendapatan lainnya. Kebijakan yang ditempuh untuk peningkatan pendapatan daerah adalah melalui :

1. Peningkatan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan khususnya pajak dan retribusi daerah.
2. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
3. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran wajib pajak

dan wajib retribusi.

4. Memantapkan pendataan dan sosialisasi serta penyempurnaan sistem dan prasarana dan sarana pengalihan pemungutan PBB.
5. Penyusunan dan perubahan peraturan daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah serta mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah yang telah ada.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah.
7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sebagai alat penunjang untuk melaksanakan pemungutan pendapatan daerah.
8. Pembuatan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah.
9. Peningkatan koordinasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana perimbangan dan dana dekonsentrasi yang berasal dari APBN dan APBD Propinsi.
10. Penyiapan data dukung yang tervalidasi dalam rangka kesiapan untuk pengusulan kegiatan dari dana alokasi khusus (DAK).
11. Percepatan realisasi kegiatan dan laporan dari dana alokasi khusus (DAK).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan optimalisasi sumber-sumber PAD yang berasal dari :

1. Pajak Daerah

   Ada 10 sumber penerimaan pajak daerah yang akan dipungut yaitu berasal dari pemungutan PBB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Sarang Burung Walet.

2. Retribusi Daerah

   Penerimaan retribusi daerah bersumber pada pungutan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

   Penerimaan dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan hanya berasal dari laba atas penyertaan modal.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

   Penerimaan Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan berasal dari penerimaan jasa giro, denda keterlambatan dan pendapatan BLUD, pendapatan dana kapitasi BPJS, penerimaan dari hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan, serta penerimaan bunga deposito.

Pendapatan dari Pendapatan asli daerah diproyeksikan sesuai dengan perhitungan potensi dan situasi kondisi perekonomian daerah.

Pendapatan dari dana transfer berasal dari transfer pusat dan transfer antar daerah. Transfer pusat diharapkan dari 3 sumber yaitu :

1. Dana Perimbangan yang terdiri dari :

   a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak (DBH/BP)

      Dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat adalah dalam bentuk bagi hasil pajak penghasilan, pajak PBB Pemerataan, pajak PBB sektor pertambangan migas, dan PBB biaya pemungutan sektor pertambangan migas. Dana bagi hasil bukan pajak meliputi bagi hasil provisi sumberdaya hutan (PSDH), bagi hasil iuran tetap (land-rent), royalti, bagi hasil pungutan dari perikanan, dan bagi hasil dari pertambangan minyak bumi. Pendapatan dari dana ini masih diproyeksikan dan akan disesuaikan apabila ada ketetapan pemerintah tentang alokasi DBH maka proyeksi tersebut akan disesuaikan.

   b. Dana Alokasi Umum (DAU)

      DAU adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom setiap

tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dari dana ini masih diproyeksikan sama dengan tahun sebelumnya dan akan disesuaikan apabila ada ketetapan pemerintah tentang alokasi DAU.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK terbagi atas 2 yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik terdiri dari DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan yang meliputi 12 bidang DAK yang diterima yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan/irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, transportasi darat dan perdagangan serta industri kecil menengah.

DAK Non Fisik berupa Dana Operasional PAUD, Dana Operasional Pendidikan Kesetaraan, Tunjangan profesi guru, tunjangan tambahan guru, Biaya Operasional Kesehatan (BOK), Biaya Jaminan Persalinan (Jampersal), dan Biaya Operasional KB, Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Pariwisata dan UKM.

Pendapatan dari dana ini masih diproyeksikan sama dengan tahun sebelumnya dan akan disesuaikan apabila ada ketetapan pemerintah tentang alokasi DAK.

2. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria /kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan dari dana ini tidak diproyeksikan ada, sampai ada ketetapan pemerintah tentang alokasi DID, dan akan disesuaikan setelah ada ketetapan.

3. Dana Desa

Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pendapatan dari dana ini masih diproyeksikan sama dengan tahun sebelumnya dan akan disesuaikan apabila ada ketetapan pemerintah tentang alokasi Dana Desa.

Transfer antar daerah adalah sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Provinsi maupun daerah lainnya yang terdiri dari :

1. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Bagi Hasil dipekirakan hanya berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yaitu dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan

dan Pajak Rokok.

Pendapatan dari dana ini masih diproyeksikan sama dengan tahun sebelumnya dan akan disesuaikan apabila ada ketetapan pemerintah tentang alokasi dari pemerintah provinsi.

2. Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan dari dana ini tidak diproyeksikan ada, sampai ada ketetapan pemerintah tentang alokasi Bantuan Keuangan dalam APBD Provinsi Kalimantan Selatan, dan akan disesuaikan setelah ada ketetapan.

Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari :

1. Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dari dana ini diproyeksikan sebesar alokasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian hibah maupun usulan hibah. Untuk sementara pendapatan dari hibah adalah untuk program air minum perdesaan dari APBN dan hibah luar negeri untuk program pembangunan dan pengelolaan irigasi partisipatif terintegrasi (Integrated Partisifatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP).

2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dari dana ini tidak diproyeksikan ada, sampai ada ketetapan pemerintah tentang alokasi dana darurat, dan akan disesuaikan setelah ada ketetapan.

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan dari dana ini tidak diproyeksikan ada.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah serta menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah sesuai prioritas RPJMD yang telah ditetapkan. Belanja Daerah diarahkan pada pemenuhan klasifikasi sebagai berikut :

1. Pemenuhan belanja program prioritas pembangunan daerah yakni program yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan RPJMD (*money follow program*).
2. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat.
3. Pemenuhan belanja untuk program-program pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat dan Prov. Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan peraturan perundangan.
4. Pendanaan program prioritas yang memiliki sasaran dan indikator yang terukur dan merupakan penyelenggaraan urusan lainnya serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
5. Pendanaan program-program pembangunan yang mengakomodir aspirasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)

6. Pendanaan program-program pembangunan yang mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dan / atau hasil reses DPRD.
7. Pendanaan operasional Pemerintahan Daerah

Dalam pelaksanaannya perencanaan belanja daerah menganut prinsip anggaran yang dinamis dan berimbang, dimana total belanja daerah akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah dan kemampuan dari anggaran pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran belanja. Jadi apabila terjadi anggaran belanja yang melebihi anggaran pendapatan atau defisit, maka defisit dapat ditutupi oleh sisa anggaran penerimaan pembiayaan sehingga SiLPA tahun anggaran berjalan tidak negatif. Perencanaan belanja daerah diarahkan untuk selalu menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Disamping itu perencanaan belanja daerah disusun dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta harus memuat target kinerja yang terukur untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Dalam penyusunan perencanaan belanja daerah juga mensyaratkan holistik dan integratif di semua program dan kegiatan.

Perencanaan belanja daerah pada tahun anggaran 2021 secara garis besar terbagi atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memperhitungkan pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja lainnya di setiap SKPD.

Dalam perencanaan belanja daerah, terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja

Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan belanja pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1(satu) periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja operasi terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

   Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai ini meliputi :

   a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
   b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN.
   c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
   d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
h. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN.
i. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN.

2. Belanja Barang Jasa

Merupakan belanja untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat / pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3. Belanja Bunga

Merupakan belanja pembayaran bunga utang. Pada tahun anggaran 2021 diproyeksikan pada pos ini tidak ada belanja, karena tidak adanya kewajiban bagi Pemerintah Kab. HST untuk membayar utang.

4. Belanja Subsidi

Merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau masyarakat. Mengingat kemampuan keuangan daerah dan pemberian subsidi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun anggaran 2021 tidak menganggarkan belanja subsidi.

5. Belanja Hibah

Merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/ perorangan. Pada tahun anggaran 2021 pada pos belanja ini dilakukan penganggaran dalam rangka memberikan bantuan hibah kepada organisasi profesi, organisasi semi pemerintah, kelompok masyarakat yang menunjang pembangunan daerah seperti organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.

6. Belanja Bantuan Sosial

Merupakan belanja pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok/ anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada tahun anggaran 2021 melalui pos belanja bantuan sosial dianggarkan dana untuk menampung pemberian bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan seperti bantuan kepada panti asuhan, bantuan untuk program pengentasan kemiskinan dan lain-lain.

Belanja modal meliputi :

1. Belanja Tanah

   Belanja ini digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

2. Belanja Peralatan dan Mesin

   Belanja peralatan dan mesin ini digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

3. Belanja Bangunan dan Gedung

   Belanja bangunan dan gedung ini, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

4. Belanja Jalan

   Belanja jalan ini, digunakan untuk menganggarkan jalan mencakup jalan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

5. Belanja Irigasi dan Jaringan

   Belanja irigasi dan jaringan ini, digunakan untuk menganggarkan irigasi dan jaringan mencakup irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

6. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

Belanja Tidak Terduga pada tahun anggaran 2021 melalui pos ini dianggarkan dana untuk menampung belanja-belanja untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan darurat tersebut, meliputi :

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Belanja Transfer meliputi :

1. Belanja Bagi Hasil

   Merupakan belanja bagi hasil pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa. Pada tahun anggaran 2021 melalui pos belanja bagi hasil dianggarkan dana 10 % dari hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk diberikan kepada pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

   Merupakan belanja bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi/ pemerintah desa/ pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa. Pada tahun anggaran 2021 melalui pos belanja bantuan keuangan dianggarkan dana yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam menjalankan otonomi desa, bantuan kepada desa yang melaksanakan Pemilihan Pembakal yang besarannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan bantuan keuangan kepada Partai Politik. Anggaran belanja bantuan keuangan kepada desa akan disesuaikan apabila ada ketetapan alokasi dana perimbangan dari pemerintah.

Dari proyeksi kemampuan pendanaan dan dengan prinsip anggaran berimbang, belanja daerah diproyeksikan sama dengan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak ada defisit anggaran tahun berjalan. Belanja Daerah ini terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 11. Perbandingan Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	BELANJA DAERAH	**1.256.997.809.330**	**1.175.975.773.613**	**1.040.776.891.936**	**1.223.919.331.772**	**1.345.891.846.502**	**1.356.805.291.046**
1	**BELANJA OPERASI**	**749.994.287.265**	**664.689.376.396**	**659.506.045.617**	**781.228.103.422**	**955.852.504.548**	**928.346.273.383**
1.1	Belanja Pegawai	488.935.927.300	435.522.347.699	442.515.089.973	476.474.791.926	562.873.069.413	531.652.744.452
	Belanja Barang dan Jasa	245.892.659.865	206.846.170.797	199.734.264.492	280.668.496.711	335.203.867.410	377.924.578.331
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	13.468.450.100	9.630.807.900	5.915.136.000	12.444.666.007	47.895.917.725	4.666.250.600
	Belanja Bantuan Sosial	1.697.250.000	12.690.050.000	11.341.555.152	11.640.148.778	9.879.650.000	14.102.700.000
2	**BELANJA MODAL**	**340.222.906.965**	**324.702.093.289**	**201.894.563.582**	**238.208.536.731**	**185.976.609.448**	**223.339.119.863**
	Belanja Tanah						
	Belanja Peralatan dan Mesin						

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Belanja Bangunan dan Gedung						
	Belanja Jalan						
	Belanja Irigasi dan Jaringan						
	Belanja Aset Tetap Lainnya						
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**816.074.200**	**204.000.000**	**341.284.265**	**3.541.899.011**	**2.332.863.500**	**4.000.000.000**
4	**BELANJA TRANSFER**	**165.964.540.900**	**186.380.303.928**	**179.034.998.472**	**200.940.792.608**	**201.729.869.006**	**201.119.897.800**
	Belanja Bagi Hasil	1.697.206.000	763.159.028	3.052.331.972	2.291.884.108	2.499.235.956	1.749.465.000
	Belanja Bantuan Keuangan	164.267.334.900	185.617.144.900	175.982.666.500	198.648.908.500	199.230.633.050	199.370.432.800

Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020

Kenaikan kemampuan belanja daerah disebabkan naiknya proyeksi kemampuan pendanaan daerah pada tahun 2021. Agar pembangunan daerah tetap bisa dilaksanakan maka dalam perencanaan belanja difokuskan pendanaan terhadap program-program paling prioritas. Perencanaan belanja dengan memakai prinsip skala prioritas diharapkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tetap tercapai. Disamping itu diharapkan setiap SKPD dapat secara kreatif mengusahakan peluang-peluang pendanaan di luar APBD seperti dana-dana APBD Provinsi, APBN maupun dana swasta.

Berdasarkan urusan Pemerintahan, maka Belanja Daerah pada tahun anggaran 2021 adalah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Urusan yang akan dibiayai dan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyrakat;
6. Sosial;
7. Tenaga Kerja;
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Pangan;
10. Pertanahan;
11. Lingkungan Hidup;
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15. Perhubungan;
16. Komunikasi dan Informatika;
17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Penanaman Modal;
19. Kepemudaan dan Olah Raga;
20. Statistik;
21. Persandian;

22. Kebudayaan;
23. Perpustakaan;
24. Kearsipan;
25. Kelautan dan Perikanan;
26. Pariwisata;
27. Pertanian;
28. Energi dan Sumberdaya Mineral;
29. Perdagangan; dan
30. Perindustrian;
31. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka belanja daerah diarahkan untuk membiayai keperluan belanja pada perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. HST No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
3. Dinas Kesehatan;
4. RSUD H, Damanhuri;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
12. Dinas Perdagangan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
16. Dinas Pertanian;
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
18. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
19. Dinas Perpustakaan;

20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Inspektorat;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
26. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
27. Kecamatan Barabai;
28. Kecamatan Batu Benawa;
29. Kecamatan Hantakan;
30. Kecamatan Batang Alai Selatan;
31. Kecamatan Limpasu;
32. Kecamatan Batang Alai Timur;
33. Kecamatan Batang Alai Utara;
34. Kecamatan Pandawan;
35. Kecamatan Labuan Amas Utara;
36. Kecamatan Labuan Amas Selatan; dan
37. Kecamatan Haruyan

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Ada beberapa pos penerimaan pembiayaan daerah yaitu SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi), pembayaran pokok utang dan pemberian dana talangan.

Secara rinci realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 12. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**51,272,192,504**	**62,097,331,913**	**11.287.238.618**	**122.467.077.232**	**135.521.132.945**	**125.000.000.000**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	51,272,192,504	62,097,331,913	11.287.238.618	122.467.077.232	135.521.132.945	125.000.000.000
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		-	-	-	-	-
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	-	-	-	-	-
2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya						
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**51,272,192,504**	**62,097,331,913**	**11.287.238.618**	**122.467.077.232**	**135.521.132.945**	**125.000.000.000**

Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020

Dengan melihat proyeksi belanja daerah dan proyeksi pendapatan daerah maka akan terjadi defisit anggaran. Kebijakan besarnya defisit anggaran adalah maksimal sama dengan besarnya pembiayaan netto dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan tidak boleh negatif. Dengan demikian defisit anggaran harus dapat ditutupi oleh pembiayaan netto sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan adalah nihil (tidak negatif).

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021 merupakan penjabaran tahun terakhir dari Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016-2021 ditetapkan yakni **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT HULU SUNGAI TENGAH YANG AGAMIS, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT".** Untuk melihat elemen-elemen yang mendukung tercapainya visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021. gambaran visi di atas dapat terlihat pada diagram berikut.



Gambar 4. 1. Elemen Pendukung Pencapaian Visi

Visi tersebut mengandung makna bahwa untuk mendukung pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat empat elemen utama yaitu aspek agamis, aspek mandiri, aspek sejahtera, dan aspek bermartabat. Dalam mencapai visi tersebut dijabarkan kedalam misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 4. 1. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Peningkatan Kualitas kehidupan dan keserasian hubungan antara ulama dan umara	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
			Meningkatnya kualitas hubungan ulama dan umara
2.	Peningkatan kualitas Sumberdaya manusia yang meliputi bidang kesehatan dan pendidikan serta kemandirian	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			Meningkatnya kualitas tenaga kerja
3.	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, jembatan dan perumahan layak huni secara merata, serta pembangunan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Meningkatnya pemerataan infrastruktur yang berkualitas
			Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman
		Meningkatkan Ketersediaan Dan Keterjangkauan Akses Pangan	Tercapainya ketersediaan bahan pangan utama
4.	Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan perekonomian daerah	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya tingkat kemiskinan
			Meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat
5.	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara mandiri yang berorientasi pada pelestarian hutan dan ekosistem	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
6.	Peningkatan pelayanan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
7.	Peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas
			Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 adalah : **"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial".** Tema tersebut merupakan tema yang responsive dan adaftif terhadap wabah pandemic Covid-19 dan pemulihannya. Sesuai tema diatas, fokus pembangunan diarahkan pada :

- Pemulihan industri, pariwisata dan investasi
- Reformasi sistem kesehatan nasional
- Reformasi sistem jaring pengaman sosial
- Reformasi sistem ketahanan bencana

Pemulihan industri dan perdagangan, fokus menguatan pada pemulihan produktivitas, akselerasi industri substitusi impor, peningkatan ekspor, afirmasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan pengurangan biaya-biaya. Pemulihan pariwisata fokus pada penguatan peningkatan aksesibilitas, peningkatan wisatawan domestic, peningkatan pemasaran wisata, peningkatan event dan percepatan kesiapan destinasi. Pemulihan investasi dengan fokus menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian usaha, perluasan positif list investasi, percepatan integrasi sistem perizinan, promosi investasi terarah dan pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata dan infrastruktur.

Reformasi sistem kesehatan nasional difokuskan pada penguatan Germas (promotif dan preventif), penguatan health security dan penguatan sumber daya berupa fasilitas, farmasi,

alkes dan SDM kesehatan. Reformasi sistem ketahanan bencana fokus pada peningkatan kesiapsiagaan di masa pra bencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat. Peningkatan kesiapsiagaan di masa pra bencana dengan memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat, meningkatkan investasi pengurangan resiko bencana dan penyusunan rencana kontijensi, rencana operasi dan strategi lainnya sebagai SOP penanganan bersama kejadian bencana. Penguatan sistem operasi tanggap darurat dengan memperkuat manajemen krisis terpadu dan multi sektor, memperkuat sistem data bencana terpadu dan satu referensi dan memperkuat sistem logistic (terutama pangan) dan jarring pengaman sosial.

Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan sebagai berikut :

Tabel 4. 2. Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 – 5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,5 – 8,2
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2 – 9,7
Rasio Gini	0,377 – 0,379
Indeks Pembangunan Manusia	72,78 – 72,90
Penurunan Emisi Gas Kaca (GRK) (%)	23,5 – 24,14
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	3,41 – 4,26
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas (%)	3,35 – 4,21
Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,20

Dengan sasaran dan target pembangunan tahun 2021 tersebut maka prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

   Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi Covid-19. Pelaksanaannya diantaranya dengan menjalankan :

   - Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan;
   - Penguatan penyediaan energi yang terjangkau;
   - Penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor;
   - Pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata;
   - Penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

2. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

   Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**

   Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial;

peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalitasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan

ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana non alam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui : penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

Dari 7 prioritas pembangunan tersebut, ada penekanan pada 4 prioritas yaitu Prioritas Nasional (PN) 1 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Tema pembangunan provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 yakni "**MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL MENUJU GERBANG IBU KOTA NEGARA".**

Sesuai tema diatas, maka fokus pembangunan adalah investasi hilirisasi industri, pariwisata dan pertanian, industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sasaran dan Target Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang harus dicapai pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3. Sasaran dan Target Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

No	Sasaran Provinsi Kalsel	Target Tahun 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi	3,5 – 4,03
2.	IKLH	64
3.	Tingkat Kemiskinan	5,40
4.	Indeks Pembangunan Manusia	71,27
5.	Gini Rasio	0,330
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,06
7.	Tingkat Pertumbuhan Penduduk	1,38

Sasaran pembangunan tersebut diatas dicapai dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas :

1. Transformasi struktur ekonomi ke sektor industri, pertanian dan pariwisata.

   Arah kebijakan sebagai berikut :

   a. Peningkatan produksi pertanian
   b. Mendorong industri pengolahan bahan mentah/setengah jadi
   c. Mendorong pariwisata dan pengembangan geopark
   d. Pemberdayaan IKM/ UMKM
   e. Peningkatan penggunaan produk lokal
   f. Peningkatan nilai investasi
   g. Pengembangan industri digital

2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

   Arah kebijakan sebagai berikut :

   a. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah
   b. Peningkatan indeks pembangunan pemuda
   c. Penurunan penyakit melalui germas
   d. Penurunan prevalensi stunting
   e. Penurunan angka pernikahan anak
   f. Peningkatan kualitas tenaga kerja
   g. Peningkatan ketahanan budaya dan kualitas seni masyarakat
   h. Peningkatan prestasi olahraga

3. Memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian.

   Arah kebijakan sebagai berikut :

   a. Pengembangan kawasan prioritas
   b. Pengembangan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi
   c. Pemenuhan pencapaian infrastruktur dasar

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan.

   Arah kebijakan sebagai berikut :

   a. Penguatan reformasi birokrasi
   b. Pemeliharaan Ketentraman, ketertiban umum masyarakat dan konsolidasi demokrasi pasca pilkada

c. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
d. Penyederhanaan perizinan dan peningkatan pelayanan publik

5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk memperkuat ketahanan bencana.

   Arah kebijakan sebagai berikut :

   a. Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan hidup
   b. Penanganan mitigasi dan pasca bencana
   c. Mendorong penggunaan energy terbarukan

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah disusun dengan pendekatan Holistik, integratif, tematik dan spasial (HITS) dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan *money follow programe*. Prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021 pada dasarnya merupakan prioritas pembangunan tahun rencana yang dianalisis dari:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RJMD Tahun 2016-2021.
2. Analisis Kebijakan Pusat dan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Telaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah
4. Analisis terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan
5. Analisis prioritas dan sasaran pembangunan daerah
6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dari hasil analisis tersebut menghasilkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan sumber daya manusia
2. Peningkatan kesejahteraan
3. Kelestarian lingkungan
4. Peningkatan infrastruktur
5. Peningkatan pelayanan publik

6. Kantrantibum yang kondusif
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

Berdasarkan pada visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021 dan arah pembangunan tahun ke 6 (enam) RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021, tema Pembangunan tahun 2021 adalah **"Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Menuju HST Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat".** Tetapi dengan adanya bencana non alam pandemi Covid-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 dan belum diketahui kapan berakhirnya bencana non alam ini, maka tema pembangunan tahun 2021 ini akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang baik secara nasional maupun provinsi.

Dengan melihat tema pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, maka Tema Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021, selanjutnya diubah dan disesuaikan kembali menjadi **"Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Dukung Lingkungan Menuju Hulu Sungai Tengah Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat".**

Sesuai dengan tema pembangunan di atas, maka Target dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ingin dicapai pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 4. Target Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Berdasarkan Indikator Pembangunan

No.	Indikator Pembangunan	Target Tahun 2021	Target RPJMD
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5	4 - 6
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,71	4 - 6
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0	3,97
4.	Rasio Gini	0,295	< 0,30
5.	Indeks Pembangunan Manusia	70,14	71,75

Tabel 4. 5. Target Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Berdasarkan Indikator Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021	Target RPJMD
1.	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Angka kriminalitas (jumlah kausus tertangani/10.000 penduduk)	< 10	< 10
2.	Meningkatnya kualitas hubungan ulama dan umara	Jumlah kejadian konflik SARA	0	0
		Jumlah kegiatan forum koordinasi antar umat beragama	2	2
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,3	8
		Usia harapan sekolah (tahun)	12,68	12,50
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	66,28	67,50
5.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	3,71	4 - 6
6.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Persentase Desa berkembang (persen)	81,37	81,37
		Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang (persen)	62,13	62,13
7.	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman	Persentase rumah layak huni (persen)	86,5	98,12
		Luas Kawasan Kumuh (Ha)	13,68	0
		Cakupan layanan air bersih (persen)	81,72	100,00
8.	Tercapainya ketersediaan bahan pangan utama	Jumlah Ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	637,5	574,04
9.	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (persen)	5	4 - 6
		Laju pertumbuhan PDRB sektor	4	4 - 5

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021	Target RPJMD
		Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (persen)		
10.	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan (persen)	6	3,97
	Meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat	Pendapatan per kapita (ADHB/Rp juta)	26.000	36.052
		Indeks Gini	0,295	<0,30
12.	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,0	69,4
		Indeks Pencemaran Air	60,1	60,1
		Indeks Pencemaran Udara	92	92
		Indeks Tutupan Lahan	59,43	59,43
13.	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75	85
14.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Opini BPK	WTP	WTP
15.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	80 (A)	85 (A)
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,20 (Sangat Tinggi)	3,10 (Sangat Tinggi)

Prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2021 dengan memperhatikan sasaran pembangunan, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 6. Prioritas Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Berdasarkan Sasaran

No.	Sasaran	Prioritas Pembangunan
1.	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	HST Agamis
	Meningkatnya kualitas hubungan ulama dan umara	
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	HST Cerdas dan Bermartabat
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	HST Sehat
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	HST Terampil
3.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur yang berkualitas	HST Mantap
	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman	
	Tercapainya ketersediaan bahan pangan utama	
4.	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah	HST Sejahtera dan Mandiri
	Menurunnya tingkat kemiskinan	
	Meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat	
5.	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	HST Hijau dan Berseri
6.	Meningkatnya kepuasan masyarakat	HST Prima
7.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	HST Berkinerja
	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah	

Hubungan Isu Strategis dengan Prioritas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 7. Hubungan Isu Strategis dengan Prioritas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1.	Peningkatan sumber daya manusia	HST Cerdas dan Bermartabat
		HST Sehat
		HST Terampil

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah
2.	Peningkatan kesejahteraan	HST Sejahtera dan Mandiri
3.	Kelestarian lingkungan	HST Hijau dan Berseri
4.	Peningkatan infrastruktur	HST Mantap
5.	Peningkatan pelayanan publik	HST Prima
6.	Kantrantibum yang kondusif	HST Agamis
7.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	HST Berkinerja

Berdasarkan isu strategis, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021 maka arah kebijakan yang dijalankan, adalah :

a. Prioritas Daerah 1 :

HST Agamis *(Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)*

Arah Kebijakan :

- Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
- Peningkatan penyelenggaraan forum silaturahmi antara ulama, habaib dan pemuka agama
- Meningkatkan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba /pekat

b. Prioritas Daerah 2 :

HST Cerdas dan Bermartabat *(Meningkatkan daya saing pendidikan)*

Arah Kebijakan :

- Meningkatkan daya saing pendidikan
- Meningkatkan pemasyarakatan olahraga

c. Prioritas Daerah 3 :

HST Sehat *(Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan)*

Arah Kebijakan :

- Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
- Pemenuhan pemberian jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat (universal health coverage)
- Pemenuhan standart kebutuhan SDM kesehatan

- Peningkatan prasarana dan sarana kesehatan
- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan sistem layanan kesehatan dalam rangka penguatan pencegahan Covid 19.
- Pemberian beasiswa pendidikan dokter & dokter spesialis.

d. Prioritas Daerah 4 :

HST Terampil *(Meningkatkan keterampilan masyarakat)*

Arah Kebijakan :

- Peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja
- Pelatihan keterampilan bagi pemuda
- Pelatihan bagi keluarga miskin
- Pelatihan keterampilan bagi perempuan dan keluarga

e. Prioritas Daerah 5 :

HST Mantap *(Pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi)*

Arah Kebijakan :

- Pemenuhan sanitasi, air bersih dan kualitas rumah tidak layak huni (hst barakat)
- Peningkatan konektivitas khususnya pada daerah terpencil
- Peningkatan kualitas infrastruktur publik
- Peningkatan pengelolaan persampahan & air limbah

f. Prioritas Daerah 6 :

HST Sejahtera dan Mandiri *(Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualtas (inklusif)*

Arah Kebijakan :

- Pengembangan usaha mandiri dan produktif yang mendorong perekonomian masyarakat
- Pengembangan pertanian tanaman pangan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi
- Peningkatan usaha hortikultura, peternakan, perikanan, industri pengolahan, pariwisata dan konstruksi dengan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi
- Fasilitasi pemasaran produk ukm
- Melanjutkan penanganan kemiskinan by name by address

- Pemberian bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rangka pemenuhan spm sosial
- Peningkatan infrastruktur pertanian
- Peningkatan pengelolaan irigasi & sumber daya air

g. Prioritas Daerah 7 :

HST Hijau dan Berseri *(Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan)*

Arah Kebijakan :

- Pengelolaan lingkungan secara bijaksana dan ramah lingkungan
- Terjaganya kelestarian hutan dengan peningkatan advokasi dan kampanye kelestarian lingkungan
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan
- Pengembangan /pembangunan /rehabilitasi/ pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan

h. Prioritas Daerah 8 :

HST Prima *(Meningkatkan pelayanan publik)*

Arah Kebijakan :

- Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan publik
- Peningkatan SOP pelayanan

i. Prioritas Daerah 9 :

HST Berkinerja *(Meningkatkan kinerja pemerintah daerah)*

Arah Kebijakan :

- Peningkatan kapasitas pemerintah daerah
- Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintah daerah
- Penguatan fungsi pembinaan APIP
- Peningkatan pembiayaan pembangunan

Dengan adanya pandemic Covid 19 yang berlangsung sejak bulan Maret 2020 dan belum dapat ditentukan kapan berakhirnya bencana tersebut dan bahkan diramalkan bisa berlangsung hingga 2-3 tahun ke depan terutama pada dampak sosial ekonomi, maka

pada tahun 2021 perlu diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

a. Penanganan Kesehatan

Penanganan kesehatan terus dilakukan melalui prioritas HST Sehat terutama :

- Peningkatan kapasitas sarana prasarana pada Fasilitas Puskesmas maupun RSUD dalam penanganan Covid 19, baik dalam hal pencegahan, pelacakan maupun pengobatan.
- Penyediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan dan pengawasan protokol kesehatan dan adaptasi penerapan kebiasaan-kebiasaan baru.
- Peningkatan sosialisasi dan pelaksanaan adaptasi kebiasaan-kebiasaan baru baik pada instansi pemerintah daerah, sektor pendidikan, perdagangan maupun pariwisata maupu pada sektor publik dan masyarakat.

b. Penanganan Dampak Ekonomi

Penanganan dampak ekonomi dilakukan melalui prioritas HST Sejahtera dan Mandiri terutama :

- Menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dengan mendorong sektor pembangunan sektor pertanian.
- Pemberian bantuan pangan kepada masyarakat yang terpapar dan terdampak.
- Peningkatan penciptaan lapangan kerja yang bersifat lokal.
- Mendorong peningkatan aktifitas ekonomi lokal dengan belanja pemerintah daerah yang bisa membantu UMKM.
- Peningkatan kapasitas UMKM baik melalui pelatihan, fasilitasi kemitraan, fasilitasi permodalan, maupun perintisan pemasaran digital.

c. Penanganan Dampak Sosial

Penanganan dampak sosial juga dilakukan melalui prioritas HST Sejahtera dan Mandiri terutama pada peningkatan /perbaikan pelaksanaan bantuan sosial pada PMKS ataupun pada masyarakat yang terdampak dan terpapar baik melalui perbaikan pendataan, pemantauan dan evaluasi.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2021, serta memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021. Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dapat dilihat dari keterkaitan tema dan prioritas pembangunan.

Keterkaitan Tema RKP 2021 dan Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dengan Tema RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 8. Perbandingan Tema RKP/RKPD 2021 antara Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tema RKP		Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial
Tema RKPD Prov. Kalsel		Mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial menuju gerbang Ibu Kota Negara
Tema RKPD Kab. HST		Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Dukung Lingkungan Menuju Hulu Sungai Tengah Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat

Adapun keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4. 9. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Prov. Kalsel	Prioritas Kab. HST
PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PD 1 : Transformasi struktur Ekonomi ke Sektor Industri, Pertanian, dan Pariwisata	PD 6 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualtas (**HST Sejahtera dan Mandiri**)
PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PD 3 : Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	PD 5 : Pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi **(HST Mantap)**
PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PD 2 : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	PD 2 : Meningkatkan daya saing pendidikan **(HST Cerdas dan Bermartabat)**
		PD 3 : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan (**HST Sehat**)
		PD 4 : Meningkatkan keterampilan masyarakat (**HST Terampil**)
		PD 6 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualtas (**HST Sejahtera dan Mandiri**)
		PD 8 : Meningkatkan pelayanan publik **(HST Prima)**

Prioritas Nasional	Prioritas Prov. Kalsel	Prioritas Kab. HST
PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PD 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	PD 1 : Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum **(HST Agamis)**
		PD 2 : Meningkatkan daya saing pendidikan **(HST Cerdas dan Bermartabat)**
PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PD 3 : Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	PD 5 : Pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi **(HST Mantap)**
PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PD 5 : Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup untuk Memperkuat Ketahanan Bencana	PD 7 : Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan **(HST Hijau dan Berseri)**
PN 7 : Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	PD 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	PD 9 : Meningkatkan kinerja pemerintah daerah **(HST Berkinerja)**
		PD 1 : Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum **(HST Agamis)**

Sedangkan keterkaitan target dan sasaran pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2021, tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 4. 10. Sinkronisasi Target Sasaran Pembangunan Nasional dengan Daerah Tahun 2021

No.	Indikator Pembangunan	Target Nasional	Target Prov. Kalsel	Target Kab. HST
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 – 5,5	3,5 – 4,03	5
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,5 – 8,2	5,06	3,71
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,2 – 9,7	5,40	6,0
4.	Rasio Gini	0,377 – 0,379	0,330	0,295
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78 – 72,90	71,27	70,14

Sinkronisasi program kegiatan prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2021, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4. 11. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Dengan Program Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Prioritas Nasional	Prioritas/ Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten
1.	**2.**	**3**
1.	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas**
1.1	**Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)**	-
1.2	**Peningkatan Kuantitas/Ketersediaan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi**	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.3	**Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan**	Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

No.	Prioritas Nasional	Prioritas/ Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten
1.	2.	3
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
1.4	**Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman dan Kelautan**	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
1.5	**Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi**	Program Pengembangan UMKM
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
1.6	**Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi**	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Meningkatkan kinerja pemerintah daerah (HST Berkinerja)
		Program Pengembangan UMKM
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.7	**Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)**	-

No.	Prioritas Nasional	Prioritas/ Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten
1.	2.	3
1.8	**Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi**	-
2.	**Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**	-
2.1	**Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera**	
2.2	**Pengembangan Wilayah Pulau Jawa-Bali**	
2.3	**Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara**	
2.4	**Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan**	
2.5	**Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi**	
2.6	**Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku**	
2.7	**Pembangunan Wilayah Pulau Papua**	
3	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan pelayanan publik (HST Prima)**
3.1	**Pengendalian Sosial dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan**	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualtas (HST Sejahtera dan Mandiri)
3.2	**Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial**	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial
3.3	**Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan**	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		Meningkatkan daya saing pendidikan
3.4	**Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas**	Program Pengelolaan Pendidikan

No.	Prioritas Nasional	Prioritas/ Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten
1.	2.	3
		Meningkatkan keterampilan masyarakat (HST Terampil)
3.5	**Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda**	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3.6	**Pengentasan Kemiskinan**	-
3.7	**Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing**	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (HST Agamis)**
4.1	**Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter**	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		Meningkatkan daya saing pendidikan (HST Cerdas dan Bermartabat)
4.2	**Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia**	Program Pengembangan Kebudayaan
4.3	**Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial**	-
4.4	**Meningkatkan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter**	-
5	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi**
5.1	**Infrastruktur Pelayanan Dasar**	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

No.	Prioritas Nasional	Prioritas/ Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten
1.	2.	3
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Penyelenggaraan Jalan
5.2	**Infrastruktur Ekonomi**	Program Penyelenggaraan Jalan
5.3	**Infrastruktur Perkotaan**	-
5.4	**Energi dan Ketenagalistrikan**	-
5.5	**Transformasi Digital**	
6	**Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**	**Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan**
6.1	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
6.2	**Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim**	Program Penanggulangan Bencana
6.3	**Pembangunan Rendah Karbon**	-
7	**Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik**	
		Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (HST Agamis)
7.1	**Konsolidasi Demokrasi**	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
7.2	**Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri**	-
7.3	**Penegakan Hukum Nasional**	**Meningkatkan kinerja pemerintah daerah (HST Berkinerja)**
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
7.4	**Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Pengelolaan keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

No.	Prioritas Nasional	Prioritas/ Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten
1.	2.	3
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Assistensi
		Program Kepegawaian Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
7.5	**Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional**	**Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (HST Agamis)**
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 4. 12. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Program Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas/ Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten
1.	2.	3
1.	**Transformasi struktur Ekonomi ke Sektor Industri, Pertanian, dan Pariwisata**	**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (HST Sejahter dan Mandiri)**
1.1	**Peningkatan Produksi Hasil Pertanian**	
a	Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Penyediaan dan Pengembangan Parasarana Pertanian
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.1	**Peningkatan Produksi Hasil Pertanian**	
a	Peningkatan Produksi Produktivitas Tanaman Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
b	Pengembangan Usaha Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
c	Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
d	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
e	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
f	Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas/ Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten
1.	2.	3
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
g	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
1.1	**Peningkatan Produksi Hasil Pertanian**	
a	Pengembangan Usaha Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
b	Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
c	Pengembangan Sentra-sentra Industri Kecil	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
d	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
1.2	**Mendorong Industri Pengolahan Bahan Mentah/Setengah Jadi**	
a	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
b	Pengembangan Usaha Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
c	Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
d	Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
e	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
1.3	**Mendorong Pariwisata dan Pengembangan Geopark**	
a	Pengembangan Pariwisataa.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
b	Pengembangan, Penggalian, dan Aktualisasi Unsur Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
c	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
d	Pengembangan Potensi Ekonomi Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
1.4	**Pembinaan Wirausaha Baru**	
a	Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
b	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Pengembangan UMKM
c	Peningkatan SDM KUMKM, Promosi, Kemitraan & Jaringan KUMKM	Program Pengembangan UMKM

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas/ Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten
1.	2.	3
d	Pengembangan Usaha, Permodalan/Pembiayaan dan Legalitas Usaha dan Koperasi dan Promosi Kemitraan dan Jaringan Koperasi dan UK	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
e	Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
f	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
g	Pengembangan Usaha, Permodalan/Pembiayaan dan Legalitas Usaha dan Koperasi dan Promosi Kemitraan dan Jaringan Koperasi dan UK	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
h	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
i	Pengembangan Potensi Ekonomi Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
1.5	**Peningkatan Penggunaan Produksi Lokal**	-
a	Program Diversifikasi Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
b	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
c	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	-
d	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	-
e	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	-
f	Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
1.6	**Peningkatan Nilai Investasi**	
a	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
b	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
c	Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Meningkatkan kinerja pemerintah daerah (HST Berkinerja)
1.7	**Pengembangan Industri Digital**	

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas/ Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten
1.	2.	3
a	Pengembangan Usaha, Permodalan/Pembiayaan dan Legalitas Usaha dan Koperasi dan Promosi Kemitraan dan Jaringan Koperasi dan UK	Program Pengembangan UMKM
b	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
c	Pengelolaan dan Pengembangan e-Government	Program Aplikasi Informatika
d	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	-
e	Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	**Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**	**Meningkatkan pelayanan publik (HST Prima)**
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualtas (HST Sejahtera dan Mandiri)
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial
2	**Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**	**Meningkatkan daya saing pendidikan (HST Cerdas dan Bermartabat)**
2.1	**Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah**	
a	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Kejuruan	-
b	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Khusus	-
c	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan
d	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
e	Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
f	Peningkatan Kualitas SDM Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2.2	**Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda**	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas/ Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten
1.	2.	3
a	Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
b	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
c	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan
d	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Kejuruan	-
e	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
f	Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional	
g	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
h	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Politik	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
2.3	**Penurunan Penyakit tidak Menular melalui Germas**	
a	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
b	Pembinaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
c	Peningkatan Kualitas SDM Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2.3	**Penurunan Penyakit tidak Menular melalui Germas**	
a	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
b	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
c	Pembinaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
d	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
e	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
f	Pembinaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
g	Pengembangan Lingkungan Sehat Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas/ Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten
1.	2.	3
2.4	**Penurunan Prevalensi Stunting**	
a	Peningkatan Kemandirian Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
b	Pengembangan Usaha Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan (**HST Sehat**)
2.4	**Penurunan Prevalensi Stunting**	
a	Perlindungan Hak Perempuan Dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
b	Pembinaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
c	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Pemberdayaan Sosial
d	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
e	Pengembangan Keciptakaryaan	-
2.4	**Penurunan Prevalensi Stunting**	
	Peningkatan Kemandirian Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Pembinaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Pemberdayaan Sosial
	Pengembangan Lingkungan Sehat Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
2.5	**Penurunan Angka Pernikahan Usia Dini**	
a	Perlindungan Hak Perempuan Dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Perlindungan Perempuan
b	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatkan keterampilan masyarakat (HST Terampil)

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas/ Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten
1.	2.	3
2.5	**Penurunan Angka Pernikahan Usia Dini**	
a	Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
b	Pembinaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
c	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatkan keterampilan masyarakat (HST Terampil)
2.6	**Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja**	
	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Kejuruan	-
	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial
	Pengaturan Jasa Konstruksi	-
2.7	**Peningkatan Ketahanan Budaya dan Kualitas Seni Masyarakat**	
a	Pengembangan, Penggalian, dan Aktualisasi Unsur Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
b	Pengembangan Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
c	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Politik	
d	Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
e	Penguatan Manajemen Kelitbangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
2.8	**Peningkatan Prestasi Olahraga**	
	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3	**Memperkuat Sarana dan Prasarana yang Berkualitas**	-
3.1	**Pengembangan Kawasan Prioritas**	
a	Penyelenggaraan Penataan Ruang	
b	Pengembangan Keciptakaryaan	
3	**Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian**	**Pemenuhan Infrastruktur Dasar Dan Penunjang Ekonomi (HST Mantap)**
3.2	**Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi**	

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas/ Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten
1.	2.	3
a	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
b	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
c	Penguasaan Tanah dan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan	Program Penatagunaan Tanah
d	Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3.3	**Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar**	
a	Pengembangan Lingkungan Sehat Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
b	Peningkatan Kawasan dan Infrastruktur Pedesaan	-
c	Pengembangan Keciptakaryaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
d	Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Baku	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
e	Pengembangan Air Tanah	-
f	Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
g	Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Baku	-
h	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
i	Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3.3	**Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar**	
a	Pengembangan Air Tanah	
4	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan**	**Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (HST Agamis)**
4.2	**Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum Masyarakat dan Konsolidasi Demokrasi Pasca PILKADA**	
a	Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas/ Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten
1.	2.	3
b	Penataan Daerah Otonomi	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
c	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
d	Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
e	Pembinaan Pemerintahan Desa	
f	Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
g	Keningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
h	Pengelolaan dan Pengembangan e-Government	Program Aplikasi Informatika
i	Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
4.1	**Penguatan Reformasi Birokrasi Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender**	
a	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Program Penyelenggaraan Pengawasan
4.1	**Penguatan Reformasi Birokrasi Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender**	
a	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
b	Penerapan Prinsip-prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asitensi
4.4	**Penyederhanaan Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Publik**	
a	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
b	Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
c	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesamsatan	-
d	Pelayanan BLUD	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
e	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas/ Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten
1.	2.	3
4.3	**Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	
a	Pengembangan dan Penata Kelolaan E-Goverment	Program Aplikasi Informatika
b	Pengembangan dan Pengelolaan Komunikasi Publik	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
c	Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
4.1	**Penguatan Reformasi Birokrasi Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender**	
		Meningkatkan kinerja pemerintah daerah (HST Berkinerja)
a	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan
b	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan
c	Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Memperkuat Ketahanan Bencana**	**Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan (HST Hijau dan Berseri)**
5.1	**Peningkatan Daya Dukung SDA & Lingkungan Hidup**	
a	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
b	Pengendalian, Perusakan Lingkungan Hidup, dan Pengusahaan Bidang Pertambangan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
c	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
d	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
e	Pengelolaan Ruang Laut	-
f	Pemanfaatan Kawasan Hutan Tahura Sultan Adam	-
g	Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan dan Konservasi Cadangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas/ Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten
1.	2.	3
5.1	**Peningkatan Daya Dukung SDA & Lingkungan Hidup**	
a	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	
b	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
5.1	**Peningkatan Daya Dukung SDA & Lingkungan Hidup**	
a	Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan dan Konservasi Cadangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
b	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
5.1	**Peningkatan Daya Dukung SDA & Lingkungan Hidup**	**-**
a	Pengelolaan Ruang Laut	
		Meningkatkan keterampilan masyarakat (HST Terampil)
5.2	**Penanganan Mitigasi dan Pasca Bencana**	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	Program Penanggulangan Bencana
	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
	Program Tanggap Darurat Bencana	Program Penanggulangan Bencana
	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Program Penanggulangan Bencana
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5.3	**Mendorong Penggunaan Energi Terbarukan**	-
a	Pembinaan dan Pengembangan Energi	-
b	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	-
5.3	**Mendorong Penggunaan Energi Terbarukan**	

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas/ Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten
1.	**2.**	**3**
a	Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	
b	Pembinaan dan Pengembangan Energi	
5.3	**Mendorong Penggunaan Energi Terbarukan**	**-**
a	Pembinaan dan Pengembangan Energi	

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 pada prinsipnya masih tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021 yang masih berlaku. Namun, mulai tahun 2021, terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dan Renstra yang ada, digantikan dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan (nomenklatur perencanaan pembangunan daerah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Meskipun pada tahun 2021 terjadi perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah, namun indikator dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra yang masih berlaku saat ini, tidak mengalami perubahan dan masih tetap dipergunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 ini.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 diuraikan atas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang berkaitan langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, dan yang kedua adalah program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, semuanya merupakan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah terpilih untuk tahun 2021. Berdasarkan prioritas pembangunan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2021, maka rencana program, kegiatan, serta sub kegiatan prioritas daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, dapat dirangkum dan disajikan pada **Tabel 5.1**, **Tabel 5.2** dan **Tabel 5.3** sebagaimana terlampir.

Tabel 5.1 menyajikan perkiraan pagu pendanaan tahun 2021 yang diambil dari Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2021 dari setiap Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian setiap pagu anggaran tersebut dikelompokkan, diakumulasi dan ditampilkan berdasarkan Urusan/Bidang yang bersesuaian menurut kewenangannya, berdasarkan nomenklatur terbaru sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Tabel 5. 1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan Tahun 2021 sesuai Urusan/Bidang

Kode		Urusan/Bidang	Perkiraan Pagu 2021
1		2	3
1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	425.063.736.124
1	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	44.507.310.400
1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	453.242.386.962
1	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	122.541.477.743
1	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16.373.440.000
1	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.122.060.000
1	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	18.918.569.000
2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	253.316.616.243
2	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	779.786.000
2	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	485.861.400
2	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	603.429.067
2	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	9.442.530.000
2	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	12.237.648.756
2	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.279.464.100
2	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	206.033.970.184
2	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.802.701.000
2	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.094.152.000
2	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.215.334.736
2	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	330.980.000

Kode		Urusan/Bidang	Perkiraan Pagu 2021
1		2	3
2	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	490.229.000
2	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.525.036.500
2	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	58.900.000
2	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	76.872.000
2	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	467.865.000
2	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	295.476.500
2	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	96.380.000
3		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	19.108.902.801
3	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.561.582.100
3	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.548.804.000
3	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	11.171.105.701
3	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.107.110.000
3	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.720.301.000
4		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	48.275.239.785
4	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	16.706.008.518
4	4.02	SEKRETARIAT DPRD	31.569.231.267
5		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	16.959.507.794
5	5.01	PERENCANAAN	3.271.704.394
5	5.02	KEUANGAN	7.152.326.800
5	5.03	KEPEGAWAIAN	9.164.290.000
5	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	947.350.000
6		**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	1.939.720.000
6	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	1.939.720.000
7		**UNSUR KEWILAYAHAN**	15.028.226.368

Kode		Urusan/Bidang	Perkiraan Pagu 2021
1		2	3
7	7.01	KECAMATAN	165.310.490.048
8		**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	1.196.250.600
8	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.196.250.600
X		**Semua Urusan**	573.917.091.331
X	X.XX	**Semua Bidang**	21.234.932.379.247

Tabel 5.2 menyajikan nama Sub-Sub Kegiatan menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dipilih dan disusun oleh setiap Perangkat Daerah dalam Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2021 masing-masing, dimana sub-sub kegiatan beserta pagu anggaran dan Perangkat Daerah Pemangkunya sebagaimana tercantum pada Tabel 5.2 tersebut, adalah nama-nama sub kegiatan yang direncanakan di tahun 2021 yang mendukung pelaksanaan pencapaian 9 (sembilan) Prioritas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021. Sub-Sub Kegiatan tersebut dikelompokkan berdasarkan isu strategis, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021 sesuai dengan Prioritas Daerah yang bersesuaian dengan kewenangannya.

Adapun 9 Prioritas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. **Prioritas Daerah 1 : HST Agamis**
(Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)

b. **Prioritas Daerah 2 : HST Cerdas dan Bermartabat**
(Meningkatkan daya saing pendidikan)

c. **Prioritas Daerah 3 : HST Sehat**
(Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan)

d. **Prioritas Daerah 4 : HST Terampil**
(Meningkatkan keterampilan masyarakat)

e. **Prioritas Daerah 5 : HST Mantap**

(Pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi)

f. **Prioritas Daerah 6 : HST Sejahtera dan Mandiri**

(Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualtas (inklusif)

g. **Prioritas Daerah 7 : HST Hijau dan Berseri**

(Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan)

h. **Prioritas Daerah 8 : HST Prima**

(Meningkatkan pelayanan publik)

i. **Prioritas Daerah 9 : HST Berkinerja**

(Meningkatkan kinerja pemerintah daerah)

Tabel 5. 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan Tahun 2021 sesuai Prioritas Daerah

PRIORITAS DAERAH	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN 2021 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMANGKU
1	2	3	4
HST AGAMIS	*Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	3.469.830.000	SATPOLPPDAMKAR
HST AGAMIS	*Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota*	177.000.000	SATPOLPPDAMKAR
HST AGAMIS	*Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	4.571.536.000	SEKDA
HST AGAMIS	*Fasilitasi Bantuan Hukum*	153.495.000	SEKDA
HST AGAMIS	*Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	80.520.000	SEKDA
HST AGAMIS	*Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	154.570.000	SEKDA
HST AGAMIS	*Fasilitasi Keprotokolan*	2.685.140.000	SEKDA
HST AGAMIS	*Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	681.355.000	SEKDA
HST AGAMIS	*Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	20.200.000	KECAMATAN
HST AGAMIS	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	40.850.000	KECAMATAN

PRIORITAS DAERAH	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN 2021 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMANGKU
1	2	3	4
HST AGAMIS	*Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	41.060.000	KECAMATAN
HST AGAMIS	*Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	46.720.000	KECAMATAN
HST AGAMIS	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	740.665.000	KECAMATAN
HST AGAMIS	*Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	517.425.000	KECAMATAN
HST AGAMIS	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	34.180.000	KESBANGPOL
HST AGAMIS	*Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	31.620.000	KESBANGPOL
HST AGAMIS	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Sit*	760.250.600	KESBANGPOL
HST AGAMIS	*Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	21.980.000	KESBANGPOL
HST AGAMIS	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	254.940.000	KESBANGPOL
HST AGAMIS	*Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di*	47.130.000	KESBANGPOL

PRIORITAS DAERAH	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN 2021 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMANGKU
1	2	3	4
HST AGAMIS	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan*	46.150.000	KESBANGPOL
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Penambahan Ruang Kelas Baru*	2.136.174.500	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	1.445.227.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas*	4.453.836.250	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU*	650.597.700	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah*	376.827.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	129.701.750	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Pengadaan Perlengkapan Sekolah*	1.163.195.800	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar*	358.958.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar*	272.945.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*	404.903.400	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*	7.536.488.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*	124.430.000	DISDIK

PRIORITAS DAERAH	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN 2021 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMANGKU
1	2	3	4
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	343.400.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	813.300.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Pengadaan Perlengkapan Sekolah*	3.249.440.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama*	112.400.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	124.148.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*	322.875.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	2.237.288.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	50.000.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD*	416.688.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD*	11.984.600.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD*	244.285.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD*	179.200.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan*	513.060.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan*	616.800.000	DISDIK

PRIORITAS DAERAH	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN 2021 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMANGKU
1	2	3	4
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan*	360.000.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan*	2.107.600.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar*	59.150.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal*	60.900.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal*	60.750.000	DISDIK
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota*	317.475.000	DISPORAPAR
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Seleksi Atlet Daerah*	939.355.000	DISPORAPAR
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/ Kota*	42.000.000	DISPORAPAR
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota*	25.000.000	DISPORAPAR
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Pengembangan Organisasi Keolahragaan*	1.125.000.000	DISPORAPAR
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat*	1.305.530.000	SEKDA
HST CERDAS DAN BERMARTABAT	*Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	80.520.000	SEKDA
HST SEHAT	*Pembangunan Puskesmas*	9.143.897.364	DINKES
HST SEHAT	*Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	2.004.738.081	DINKES
HST SEHAT	*Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi*	100.000.000	DINKES

PRIORITAS DAERAH	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN 2021 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMANGKU
1	2	3	4
HST SEHAT	*Pengadaan Obat, Vaksin*	5.819.731.004	DINKES
HST SEHAT	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil*	1.091.549.000	DINKES
HST SEHAT	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin*	68.530.000	DINKES
HST SEHAT	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita*	16.440.000	DINKES
HST SEHAT	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif*	203.018.000	DINKES
HST SEHAT	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat*	217.180.000	DINKES
HST SEHAT	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis*	133.284.000	DINKES
HST SEHAT	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV*	109.716.000	DINKES
HST SEHAT	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)*	71.380.000	DINKES
HST SEHAT	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	83.560.000	DINKES
HST SEHAT	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	9.500.000	DINKES
HST SEHAT	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	290.500.000	DINKES
HST SEHAT	*Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	103.900.000	DINKES
HST SEHAT	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya*	25.000.000	DINKES
HST SEHAT	*Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	137.912.000	DINKES
HST SEHAT	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)*	15.080.000	DINKES
HST SEHAT	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA*	15.080.000	DINKES
HST SEHAT	*Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	906.851.000	DINKES

PRIORITAS DAERAH	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN 2021 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMANGKU
1	2	3	4
HST SEHAT	*Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	55.563.635.032	DINKES
HST SEHAT	*Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah*	16.680.000	DINKES
HST SEHAT	*Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	126.761.223.000	RSUDHD
HST SEHAT	*Operasional Pelayanan Puskesmas*	14.735.907.500	DINKES
HST SEHAT	*Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	810.180.000	DINKES
HST SEHAT	*Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota*	1.336.980.000	DINKES
HST SEHAT	*Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	6.395.454.000	DINKES
HST TERAMPIL	*Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan*	10.500.000	BPBD
HST TERAMPIL	*Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota*	35.000.000	BPBD
HST TERAMPIL	*Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota*	367.000.000	BPBD
HST TERAMPIL	*Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota*	90.000.000	BPBD
HST TERAMPIL	*Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi*	450.000.000	PM-PTSP-NAKER
HST TERAMPIL	*Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	159.130.000	DINSOSPPPAKB
HST TERAMPIL	*Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	7.075.000	DINSOSPPPAKB
HST TERAMPIL	*Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda*	163.761.500	DISPORAPAR
HST TERAMPIL	*Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota*	709.225.000	DISPORAPAR
HST TERAMPIL	*Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah*	125.000.000	DISPORAPAR
HST MANTAP	*Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan*	20.212.904.480	PUPR

PRIORITAS DAERAH	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN 2021 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMANGKU
1	2	3	4
HST MANTAP	*Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan*	8.560.764.000	PUPR
HST MANTAP	*Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik*	4.380.525.000	PUPR
HST MANTAP	*Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan*	2.140.000.000	PUPR
HST MANTAP	*Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase*	575.800.000	PUPR
HST MANTAP	*Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota*	13.936.685.000	PUPR
HST MANTAP	*Penataan Bangunan dan Lingkungan*	2.981.935.000	PUPR
HST MANTAP	*Pembangunan Jalan*	1.880.000.000	PUPR
HST MANTAP	*Pelebaran Jalan Menuju Standar*	5.760.610.000	PUPR
HST MANTAP	*Rekonstruksi Jalan*	8.289.750.000	PUPR
HST MANTAP	*Pemeliharaan Berkala Jalan*	5.515.895.000	PUPR
HST MANTAP	*Pemeliharaan Rutin Jalan*	2.430.675.000	PUPR
HST MANTAP	*Pembangunan Jembatan*	1.712.500.000	PUPR
HST MANTAP	*Penggantian Jembatan*	8.786.000.000	PUPR
HST MANTAP	*Pemeliharaan Rutin Jembatan*	442.380.000	PUPR
HST MANTAP	*Pemeliharaan Berkala Jembatan*	1.255.030.000	PUPR
HST MANTAP	*Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh*	6.646.000.000	DISPERKIM
HST MANTAP	*Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU*	295.900.000	DISPERKIM
HST MANTAP	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh*	100.750.000	DISPERKIM

PRIORITAS DAERAH	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN 2021 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMANGKU
1	2	3	4
HST MANTAP	*Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian*	5.564.720.000	DISPERKIM
HST MANTAP	*Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan*	60.990.000	DISPERKIM
HST MANTAP	*Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.*	82.540.000	DISPERKIM
HST MANTAP	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	9.159.990.000	DISPERKIM
HST MANTAP	*Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah*	200.000.000	DISPERKIM
HST MANTAP	*Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali*	5.286.496.000	DLHP
HST MANTAP	*Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota*	331.740.000	DLHP
HST MANTAP	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan*	5.137.278.000	DLHP
HST MANTAP	*Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD*	266.055.000	DPMPD
HST MANTAP	*Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa*	44.656.000	DPMPD
HST MANTAP	*Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa*	106.080.000	DPMPD
HST MANTAP	*Peningkatan Kapasitas Kelembagaan*	592.360.000	DPMPD
HST MANTAP	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*	7.242.856.300	KECAMATAN
HST MANTAP	*Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	3.162.962.200	KECAMATAN
HST MANTAP	*Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa*	32.520.000	KECAMATAN

PRIORITAS DAERAH	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN 2021 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMANGKU
1	2	3	4
HST MANTAP	*Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	10.000.000	KECAMATAN
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa*	843.250.000	PUPR
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan*	17.106.044.000	PUPR
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa*	1.925.000.000	PUPR
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan*	838.790.000	PUPR
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa*	679.990.000	PUPR
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Operasional Unit Pengelola Irigasi*	1.400.682.763	PUPR
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Pemberian Layanan Rujukan*	416.600.000	DINSOSPPPAKB
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Penyediaan Permakanan*	4.297.303.000	DINSOSPPPAKB
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Penyediaan Alat Bantu*	158.500.000	DINSOSPPPAKB
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Penjangkauan Anak-Anak Terlantar*	18.000.000	DINSOSPPPAKB
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	121.863.500	DINSOSPPPAKB
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	576.588.000	DINSOSPPPAKB

PRIORITAS DAERAH	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN 2021 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMANGKU
1	2	3	4
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Penyediaan Makanan*	175.500.000	DINSOSPPPAKB
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Penyediaan Sandang*	262.750.000	DINSOSPPPAKB
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan*	480.460.000	DINSOSPPPAKB
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Fasilitasi Kerja sama Antar Desa*	38.320.000	DPMPD
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa*	201.250.737.800	DPMPD
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*	3.460.165.384	DPMPD
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat*	117.142.000	DPMPD
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	74.724.000	DPMPD
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	83.730.000	DPMPD
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi*	64.190.000	DISDAG
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi*	208.790.000	DISDAG
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	132.340.000	DKP-KAN

PRIORITAS DAERAH	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN 2021 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMANGKU
1	2	3	4
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil*	15.097.000	DKP-KAN
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	448.115.000	DKP-KAN
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan*	1.956.448.500	DINTAN
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak*	371.039.334	DINTAN
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B*	708.135.000	DINTAN
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya*	3.605.169.501	DINTAN
HST SEJAHTERA DAN MANDIRI	*Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	4.571.536.000	SEKDA
HST HIJAU DAN BERSERI	*Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota*	13.936.685.000	PUPR
HST HIJAU DAN BERSERI	*Penataan Bangunan dan Lingkungan*	2.981.935.000	PUPR
HST HIJAU DAN BERSERI	*Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota*	33.997.038	DLHP
HST HIJAU DAN BERSERI	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut*	779.756.600	DLHP
HST HIJAU DAN BERSERI	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim*	78.758.800	DLHP

PRIORITAS DAERAH	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN 2021 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMANGKU
1	2	3	4
HST HIJAU DAN BERSERI	*Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat*	121.280.000	DLHP
HST HIJAU DAN BERSERI	*Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*	229.898.000	DLHP
HST HIJAU DAN BERSERI	*Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH*	7.800.000	DLHP
HST HIJAU DAN BERSERI	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan*	75.200.000	DLHP
HST HIJAU DAN BERSERI	*Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*	97.360.000	DLHP
HST HIJAU DAN BERSERI	*Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota*	24.160.000	DLHP
HST HIJAU DAN BERSERI	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan*	33.924.318	DLHP
HST PRIMA	*Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil*	580.530.700	DISDUKCAPIL
HST PRIMA	*Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan*	541.321.300	DISDUKCAPIL
HST PRIMA	*Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*	153.326.000	PM-PTSP-NAKER
HST PRIMA	*Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah*	85.063.000	SEKDA
HST PRIMA	*Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum*	48.840.000	SEKDA
HST PRIMA	*Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	34.060.000	SEKDA
HST PRIMA	*Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik*	402.485.000	SEKDA

PRIORITAS DAERAH	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN 2021 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMANGKU
1	2	3	4
HST PRIMA	*Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	158.015.000	SEKDA
HST PRIMA	*Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian*	578.668.968	SEKDA
HST PRIMA	*Pengelolaan Perlengkapan*	406.560.000	SEKDA
HST PRIMA	*Pengelolaan Rumah Tangga*	3.143.247.800	SEKDA
HST PRIMA	*Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	281.801.000	SEKDA
HST PRIMA	*Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	154.570.000	SEKDA
HST PRIMA	*Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	335.560.000	SEKDA
HST PRIMA	*Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*	721.225.000	BPPRD
HST PRIMA	*Pengelolaan Data Kepegawaian*	60.170.000	BKDSDM
HST PRIMA	*Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1.197.939.200	KECAMATAN
HST PRIMA	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan*	281.780.000	KECAMATAN
HST PRIMA	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan*	7.200.000	KECAMATAN
HST PRIMA	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	135.710.000	KECAMATAN
HST BERKINERJA	*Pengelolaan Media Komunikasi Publik*	8.540.000	DISKOMINFO
HST BERKINERJA	*Pelayanan Informasi Publik*	98.500.000	DISKOMINFO
HST BERKINERJA	*Layanan Hubungan Media*	2.240.399.000	DISKOMINFO
HST BERKINERJA	*Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik*	14.012.500	DISKOMINFO
HST BERKINERJA	*Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas*	150.649.236	DISKOMINFO

PRIORITAS DAERAH	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN 2021 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMANGKU
1	2	3	4
HST BERKINERJA	*Penataan Administrasi Pemerintahan*	85.000.000	SEKDA
HST BERKINERJA	*Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	297.068.000	SEKDA
HST BERKINERJA	*Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	145.440.000	SEKDA
HST BERKINERJA	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup*	169.453.750	SEKDA
HST BERKINERJA	*Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	335.560.000	SEKDA
HST BERKINERJA	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota*	970.328.000	BAPPELITBANGDA
HST BERKINERJA	*Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah*	430.625.000	BAPPELITBANGDA
HST BERKINERJA	*Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah*	121.000.000	BAPPELITBANGDA
HST BERKINERJA	*Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah*	10.250.000	BAPPELITBANGDA
HST BERKINERJA	*Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah*	27.400.000	BAPPELITBANGDA
HST BERKINERJA	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian*	620.056.394	BAPPELITBANGDA
HST BERKINERJA	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan*	345.400.000	BAPPELITBANGDA
HST BERKINERJA	*Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*	539.200.000	BPPRD
HST BERKINERJA	*Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*	91.900.000	BPPRD
HST BERKINERJA	*Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat*	23.650.000	BPPRD

PRIORITAS DAERAH	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN 2021 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMANGKU
1	2	3	4
HST BERKINERJA	*Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*	224.050.000	BPPRD
HST BERKINERJA	*Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*	109.154.400	BPPRD
HST BERKINERJA	*Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN*	2.682.910.000	BKDSDM
HST BERKINERJA	*Penataan dan Mutasi Jabatan*	193.600.000	BKDSDM
HST BERKINERJA	*Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN*	607.400.000	BKDSDM
HST BERKINERJA	*Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	91.800.000	BKDSDM
HST BERKINERJA	*Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat*	4.906.420.000	BKDSDM
HST BERKINERJA	*Pengembangan Karir dan Promosi ASN*	340.000.000	BKDSDM
HST BERKINERJA	*Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan*	212.390.000	BKDSDM
HST BERKINERJA	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial*	210.350.000	BAPPELITBANGDA
HST BERKINERJA	*Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*	726.650.000	BAPPELITBANGDA
HST BERKINERJA	*Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan*	10.350.000	BAPPELITBANGDA
HST BERKINERJA	*Audit Kinerja dan Keuangan*	38.650.000	INSPEKTORAT
HST BERKINERJA	*Review Kinerja dan Keuangan*	67.700.000	INSPEKTORAT
HST BERKINERJA	*Pemantauan Kinerja dan Keuangan*	136.190.000	INSPEKTORAT
HST BERKINERJA	*Evaluasi Kinerja dan Keuangan*	56.760.000	INSPEKTORAT
HST BERKINERJA	*Pemantauan Kinerja dan Keuangan*	1.356.470.000	INSPEKTORAT

PRIORITAS DAERAH	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN 2021 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMANGKU
1	2	3	4
HST BERKINERJA	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan*	226.600.000	INSPEKTORAT
HST BERKINERJA	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan*	57.350.000	INSPEKTORAT

Tabel 5.3 menyajikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2021 dari seluruh Perangkat Daerah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SKPD di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta perkiraan pendanaannya, yang telah disusun menggunakan nomenklatur Urusan /Bidang /Program /Kegiatan /Sub Kegiatan yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, namun tetap mempertahankan atau mempergunakan indikator kinerja sesuai RPJMD atau Renstra Tahun 2016-2021 yang masih berlaku saat ini, atau tanpa adanya perubahan indikator. **Tabel 5.3** ini disajikan dalam bentuk kumpulan **Tabel T-B.56** Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dari masing-masing Perangkat Daerah (37 SKPD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang terangkum dan disajikan pada Lampiran RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 ini.

Tabel 5. 3. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2021

TERLAMPIR PADA LAMPIRAN RKPD 2021

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta Nilai Target untuk Tahun 2021, yang masing-masing disajikan pada **Tabel 6.1** dan **Tabel 6.2**. Adapun pada **Tabel 6.3** disajikan data Target Tahun 2021 berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tabel 6. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
1	Angka kriminalitas (jumlah kausus tertangani/10.000 penduduk)	%	< 10	<10	
2	Jumlah kejadian konflik SARA	kali	0	0	
3	Jumlah kegiatan forum koordinasi antar umat beragama	kali	2	2	
4	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	tahun	8,3	8	
5	Usia harapan sekolah (tahun)	tahun	12,68	12,5	
6	Angka Harapan Hidup (tahun)	tahun	66,28	67,5	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	%	3,71	4 - 6	
8	Persentase rumah layak huni (persen)	%	86,5	98,12	
9	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	ha	13,68	0	
10	Cakupan layanan air bersih (persen)	%	81,72	100	
11	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	%	62,13	62,13	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
12	Persentase Desa berkembang	%	81,37	81,37	
13	Jumlah Ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	(kg/ kapita/ tahun)	637,5	574,04	
14	Laju Pertumbuhan ekonomi (persen)	%	5	4 - 6	
15	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (persen)	%	4	4 - 5	
16	Angka kemiskinan (persen)	%	6	3,97	
17	Pendapatan per kapita (ADHP/Rp)	Rp (juta)	26.000	36.051	
18	Indeks Gini	%	0,295	<0,30	
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	70,0	69,4	
20	Indeks Pencemaran Air	-	60,1	60,1	
21	Indeks Pencemaran Udara	-	92	92	
22	Indeks Tutupan Lahan	-	59,43	59,43	
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	88,75	85	
24	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
25	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	-	80 (A)	85 (A)	
26	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	-	3,20 (Sangat Tinggi)	3,10 (Sangat Tinggi)	

Tabel 6. 2. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Konstan)	%	4 - 6	4 - 6	
2	Laju inflasi	-	6,10	6,00	
3	PDRB per kapita	juta rupiah	32.743	32.743	
4	Indeks Gini	-	< 0,30	< 0,3	
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	96,03	96,03	
6	Angka kriminalitas	-	< 10	< 10	
7	Angka melek huruf	-	98,26	98,26	
8	Angka rata-rata lama sekolah	-	8,00	8,00	
9	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	-	103,00	103,00	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
10	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	-	100	100,00	
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	-	90,25	90,25	
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	-	93	93	
13	Angka kelangsungan hidup bayi	-	995,00	995,00	
14	Angka usia harapan hidup	-	67,50	67,50	
15	Persentase balita gizi buruk	-	0,010	0.010	
16	Rasio penduduk yang bekerja	-	99,00	99,00	
17	Jumlah grup kesenian	kelompok	20	20	
18	Jumlah klub olahraga	buah	5	5	
19	Jumlah gedung olahraga	buah	3	3	
20	Angka partisipasi sekolah dasar	-	90,25	90,25	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
21	Angka partisipasi sekolah menengah pertama	-	93	93	
22	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	-	90	90	
23	Rasio guru/murid	-	426.621	426.621	
24	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	-	426.621	426.621	
25	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	%	-	-	
26	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	99,00	99,00	
27	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99,00	100,00	
28	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0	
29	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0	0	
30	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	
31	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
32	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	-	100	100	
33	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	-	88	88	
34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	90	90	
35	Rasio posyandu per satuan balita	-	23.5	25	
36	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	-	0,9	1	
37	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	-	0,008/1.000	0,008/1.000	
38	Rasio dokter per satuan penduduk	-	0,19	0,20	
39	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	-	4,75	4,89	
40	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	-	100	100	
41	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	92,00	92,50	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
42	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	
43	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	-	100	100	
44	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	-	60,00	60,00	
45	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	
46	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	
47	Cakupan kunjungan bayi	%	95,00	100,00	
48	Cakupan puskesmas	%	172.73	172.73	
49	Cakupan pembantu puskesmas	%	80.00	80.00	
50	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-	73,00	75,00	
51	Rasio Jaringan Irigasi	-	18,50	20,00	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
52	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	-	N/A	N/A	
53	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	78,50	80,00	
54	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	84	85	
55	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	5,00	5,00	
56	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	82,45	83,73	
57	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	%	34,00	34,39	
58	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	99,00	99,00	
59	Rumah tangga pengguna air bersih	%	96,20	95,58	
60	Rumah tangga pengguna listrik	%	99,40	100,00	
61	Rumah tangga ber-Sanitasi	%	75,00	75,00	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
62	Lingkungan pemukiman kumuh	%	1,41	1,41	
63	Rumah layak huni	%	86,50	86,50	
64	Rasio permukiman layak huni	%	99,60	99,60	
65	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	30,00	30,00	
66	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	9,40	10,00	
67	Ruang publik yang berubah peruntukannya	-	0	0	
68	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	ADA	ADA	
69	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	ADA	ADA	
70	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	-	ADA	ADA	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
71	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	
72	Jumlah arus penumpang angkutan umum	-	160	160	
73	Rasio ijin trayek	-	0,002	0.002	
74	Jumlah uji kir angkutan umum	-	1,805	1,805	
75	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	-	1	1	
76	Cakupan Angkutan darat	-	0,164	0,164	
77	Kepemilikan KIR angkutan umum	-	1,193	1,193	
78	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	15	15	
79	Pemasangan Rambu-rambu	buah	350	350	
80	Persentase penanganan sampah	%	100	100	
81	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	%	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
82	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	-	5,00	5.00	
83	Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	
84	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	-	1.00	1.00	
85	Rasio bayi berakte kelahiran	-	1.00	1.00	
86	Rasio pasangan berakte nikah	-	0.98	0.98	
87	Kepemilikan KTP	%	98,00	100.00	
88	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	-	0.73	0.73	
89	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	-	ADA	ADA	
90	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	-	SUDAH	SUDAH	
91	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	67,30	64,42	
92	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	35,58	35,58	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
93	Rasio KDRT	%	0	0	
94	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0	
95	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	99,00	100,00	
96	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	
97	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	N/A	N/A	
98	Rasio akseptor KB	%	85,68	85,68	
99	Cakupan peserta KB aktif	%	84,33	84,33	
100	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	29,11	29,11	
101	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	PA	13	13	
102	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	%	35,20	36,52	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
103	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	38,40	39,66	
104	Angka partisipasi angkatan kerja	-	73,00	73,21	
105	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0,70	0,00	
106	Tingkat partisipasi angkatan kerja	-	73,00	73,21	
107	Pencari kerja yang ditempatkan	%	88,50	100,00	
108	Tingkat pengangguran terbuka	-	4 - 6	4 - 6	
109	Keselamatan dan perlindungan	%	9,00	10,00	
110	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	82,00	100,00	
111	Persentase koperasi aktif	%	58,50	60,00	
112	Proporsi Usaha Mikro dan Kecil	%	90,70	90,00	
113	Jumlah investor (PMDN/PMA)	-	3	3	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
114	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	-	130,000,000,000	150,000,000,000	
115	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	3	3	
116	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	16	16	
117	Jumlah organisasi pemuda	-	25	25	
118	Jumlah organisasi olahraga	-	28	28	
119	Jumlah kegiatan kepemudaan	-	6	6	
120	Jumlah kegiatan olahraga	-	8	8	
121	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	-	0.017	0.017	
122	Lapangan olahraga	-	0.025	0.025	
123	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	8	8	
124	Kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan	6	6	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
125	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	-	44	45	
126	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	-	3	3	
127	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	-	2	2	
128	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah	-	ADA	ADA	
129	Penegakan PERDA	%	100	100	
130	Cakupan patroli petugas Satpol PP	-	20	20	
131	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	100	100	
132	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	-	-	-	
133	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
134	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	
135	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	-	100	100	
136	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	85,00	85,00	
137	Regulasi ketahanan pangan	-	ADA	ADA	
138	Ketersediaan pangan utama	-	574,04	574,04	
139	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelp	220	220	
140	LPM Aktif	-	-	-	
141	PKK aktif	TP PKK	181	181	
142	Posyandu aktif	-	445	445	
143	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	-	40,00	40,00	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
144	Buku ”kabupaten dalam angka”	-	ADA	ADA	
145	Buku ”PDRB kabupaten”	-	ADA	ADA	
146	Pengelolaan arsip secara baku	-	15	15	
147	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	1	1	
148	Jumlah jaringan komunikasi	-	80	80	
149	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	buah	20	35	
150	Jumlah surat kabar nasional/lokal	SKH	12	12	
151	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	stasiun	7	7	
152	Website milik pemerintah daerah	domain	5	5	
153	Sistim Informasi Manajemen Pemda	-	10	10	
154	Jumlah perpustakaan	-	65	65	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
155	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	-	63,5	65	
156	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	-	25	25	
157	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	-	5,25	5,25	
158	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	27,50	27,50	
159	Kunjungan wisata	-	85,00	86,5	
160	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	-	10,00	10,00	
161	Produksi perikanan	-	111,50	111,65	
162	Konsumsi ikan	-	106,13	106,13	
163	Cakupan bina kelompok nelayan	-	40	40	
164	Produksi perikanan kelompok nelayan	-	8	8	
165	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,47	12,47	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
166	Ekspor Bersih Perdagangan	-	385,000,000,000	400,000,000,000	
167	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	-	11,12	11,12	
168	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	-	5,65	5,65	
169	Pertumbuhan Industri.	-	8,95	9,29	
170	Cakupan bina kelompok pengrajin	-	19,85	20,25	
171	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	-	1,115,200	1,117,117	
172	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	-	350,700	363,063	
173	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	2	2	
174	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	-	35	35	
175	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	-	8,8	8,8	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Terget RPJMD 2021	Ket
176	Rasio ketersediaan daya listrik	-	94,00	95,88	
177	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	99,10	100,00	
178	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	99,00	99,00	
179	Angka kriminalitas	-	< 10	<10	
180	Lama proses perijinan	-	5 HARI	5 HARI	
181	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	-	37	37	
182	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	buah	4	4	
183	Persentase desa berstatus desa berkembang terhadap total desa	%	81	81	
184	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	19,08	20,00	
185	Rasio ketergantungan	-	47,50	47,50	
186	Persentase implementasi rencana kelitbangan	-	-	-	

Tabel 6. 3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pendidikan yang bekarakter	Indeks Integritas Nilai UN SD	Angka	75	DISDIK
01.01	meningkatnya pendidikan SD yang berkualitas	Nilai rata - rata Ujian SD	Angka	6,3	DISDIK
		Indeks Integritas Nilai UN SD	Angka	75	DISDIK
01.02	Meningkatkan kualitas guru yang berkompeten	Rasio Guru/siswa	Orang	1/20	DISDIK
2	Meningkatnya kualitas pendidikan yang bekarakter	Indeks Integritas Nilai UN SMP	Angka	75	DISDIK
02.01	meningkatkan pendidikan sekolah menengah pertama yang berprestasi dan berkualitas	Indeks Integritas Nilai UN SMP	Angka	75	DISDIK
		Rata-rata Nilai kelulusan SMP	Angka	7	DISDIK
3	Meningkatnya kualitas pendidikan yang bekarakter	Nilai rata - rata Ujian SD	Angka	6,3	DISDIK
4	Meningkatnya aksebilitas pendidikan	Angka Putus sekolah SD	Angka	0	DISDIK

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
04.01	meningkatnya manajemen pendidikan	Angka Putus sekolah SD	persentase	0	DISDIK
		Angka Putus Sekolah SMP	persentase	0	DISDIK
5	Meningkatnya aksebilitas pendidikan	Angka Putus Sekolah SMP	Angka	0	DISDIK
6	Meningkatnya aksebilitas pendidikan	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	persentase	99,49	DISDIK
06.01	Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat	angka putus sekolah	persentase	0	DISDIK
7	Meningkatkan Kelestarian Bangunan dan Benda cagar Budaya	Tingkat kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah	persentase	84	DISDIK
07.01	Meningkatkan Kelestarian Bangunan dan Benda Cagar Budaya	Tingkat kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah	persentase	84	DISDIK
		Tingkat kelestarian budaya daerah	persentase	50	DISDIK
8	Meningkatkan Kelestarian Bangunan dan Benda cagar Budaya	Tingkat kelestarian budaya daerah	persentase	50	DISDIK

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
9	Meningkatnya kualitas pendidikan yang bekarakter	Rata-rata nilai Ujian SMP	angka	7	DISDIK
10	Meningkatnya aksebilitas pendidikan	Rasio Guru/siswa	Orang	1:20	DISDIK
11	Meningkatnya kualitas pendidikan yang bekarakter	Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi Minimal A	persentase	75	DISDIK
12	Meningkatnya kualitas pendidikan yang bekarakter	Persentase Lembaga DIKMAS yang Terakreditasi Minimal B	persentase	75	DISDIK
13	Meningkatnya kualitas pendidikan yang bekarakter	Persentase Sekolah SD yang Terakreditasi Minimal A	persentase	75	DISDIK
14	Meningkatnya kualitas pendidikan yang bekarakter	Persentase Sekolah SMP yang Terakreditasi Minimal A	persentase	75	DISDIK
15	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	%	70	DINKES
15.01	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	Rasio	181/100.000 KH	DINKES
		Angka Kematian Bayi	Rasio	12/1000 KH	DINKES
15.02	Meningkatkan Status Kesehatan	Prosentase Peningkatan Status Gizi	%	80	DINKES

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
	Masyarakat	Masyarakat			
15.03	Meningkatnya Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Perbup/Perda Tentang Gerakan Masyarakat Sehat	buah	1	DINKES
15.04	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta peningkatan cakupan imunisasi	Persentasi desa/kelurahan yang mencapai UCI	%	93,5	DINKES
		Persentasi Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang ditanggulangi < 24 jam	%	100	DINKES
		Persentasi dea/keluarahan yang memilki Posbindu PTM aktif	%	70	DINKES
		Persentasi keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus	%	100	DINKES
		Case Fatality Rate DBD	%	100	DINKES
		Pengendalian Penyakit Menular	%	100	DINKES

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
15.05	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Prosentasi Sarana dan Prasarana Puskesmas yang terstandarisasi	%	31,57	DINKES
		Prosentasi Puskesmas yang terakreditasi	%	31,57	DINKES
		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	DINKES
		Persentase pemenuhan kebutuhan ketersediaan obat dan vaksin di sarana kesehatan	%	100	DINKES
		Jumlah peralatan kesehatan yang didistribusikan ke fasyankes sesuai kebutuhan	Set	1	DINKES
		Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi sesuai standar	Kegiatan	1	DINKES
		Jumlah alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga memiliki izin	Sertifikat	10	DINKES
		Tidak ada kasus keracunan karena makanan	kasus	0	DINKES

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
		Tidak ada kasus keracunan karena obat	kasus	0	DINKES
16	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Tingkat Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit	persen	98	RSUDHD
16.01	Meningkatkan kualitas Pelayanan Pasien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RS	persen	98	RSUDHD
		Peningkatan Akreditasi Rumah sakit dari Utama menjadi Paripurna	Nilai	Paripurna	RSUDHD
		BOR, TOI, BTO, AVLOS yang ideal	persen	100	RSUDHD
17	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang	persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang	persen	48,45	PUPR
18	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur ke-PU-an yang berkualitas	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	persen	70	PUPR
19	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur ke-PU-an yang berkualitas	Prosentase Cakupan Layanan Air Minum	persen	86,63	PUPR

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
20	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur ke-PU-an yang berkualitas	Prosentase Luas lahan pertanian yang terairi jaringan irigasi dengan baik	persen	45	PUPR
21	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur ke-PU-an yang berkualitas	Prosentase Infrastruktur Keciptakaryaan yang layak	persen	67,69	PUPR
22	Terpenuhinya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Yang Layak	Persentase Sarana dan Prasarana Perumahan Yang Layak	%	88.03	DISPERKIM
22.01	Terwujudnya infrastruktur rumah, perumahan dan permukiman yang layak	Persentase Sarana dan Prasarana Perumahan Yang Layak	%	88.03	DISPERKIM
		Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	%	23.92	DISPERKIM
		Persentase sarana dan prasarana permukiman yang layak	%	78.80	DISPERKIM
23	Terpenuhinya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Yang Layak	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	%	23.92	DISPERKIM

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
24	Terpenuhinya Infrastruktur Rumah, Perumahan dan Permukiman yang Layak	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh Perkotaan	%	13.68	DISPERKIM
24.01	Terwujudnya infrastruktur permukiman yang layak di kawasan kumuh	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh Perkotaan	%	13.68	DISPERKIM
25	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pertanahan	Persentase pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	persen	75	DISPERKIM
26	Terpenuhinya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Yang Layak	Persentase Sarana dan Prasarana Permukiman Yang Layak	%	78,8	DISPERKIM
27	Meningkatkan ketertiban Administrasi Pertanahan	Jumlah dokumen Raperbup mengenai Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Pendaftaran Tanah dan sosialisasi Perbup NSPM	Raperbub/ Sosialisasi	1	DISPERKIM
27.01	Meningkatnya ketertiban Administrasi Pertanahan	Tersedianya rumusan kebijakan pendaftaran tanah berupa Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)	Raperbub/ Sosialisasi	1	DISPERKIM

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
28	Terwujudnya Sistem Informasi Pertanahan yang komprehensif secara sistematis	Terwujudnya data Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang komprehensif secara sistematis	Sistem / Peta	2	DISPERKIM
28.01	Meningkatnya Sistem Informasi Pertanahan yang komprehensif secara sistematis	Terwujudnya data Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang komprehensif secara sistematis	Sistem / Peta	2	DISPERKIM
29	Meningkatkan ketertiban dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	80	SATPOLPPDAMKAR
29.01	Meningkatnya ketertiban dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	80	SATPOLPPDAMKAR
30	Meningkatkan Waktu Tanggap Respon (Time Respon Rate)	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	100	SATPOLPPDAMKAR

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
30.01	Meningkatnya Waktu Tanggap Respon (Time Respon Rate)	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	100	SATPOLPPDAMKAR
31	Meningkatkan Waktu Tanggap Respon (Time Respon Rate)	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Menit	5	SATPOLPPDAMKAR
31.01	Meningkatnya Waktu Tanggap Respon (Time Respon Rate)	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Menit	5	SATPOLPPDAMKAR
32	Meningkatkan ketertiban dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat	Indeks ketertiban umum	%	80	SATPOLPPDAMKAR
33	Meningkatkan ketertiban dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat	Indeks ketenteraman masyarakat	%	100	SATPOLPPDAMKAR
34	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban	Persentasi Penanganan Konflik Sosial	Kasus	0	KESBANGPOL
34.01	Meningkatnya partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program pemerintah	Fasilitasi ormas yang aktif	Kegiatan	2	KESBANGPOL
35	Meningkatkan Ketentramkan dan	Jumlah Potensi Konflik sosial yang dapat	Pertemuan	6	KESBANGPOL

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
	Ketertiban Umum	di atasi			
35.01	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat dan politik	Masyarakat yang di bina	Kegiatan	2	KESBANGPOL
		Angka partisipasi pemilu	%	72	KESBANGPOL
36	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi	Kasus	0	KESBANGPOL
36.01	Menurunkan tingkat konflik sosial di masyarakat	Jumlah Potensi konflik sosial yang dapat di atasi	Kasus	0	KESBANGPOL
37	Meningkatkan kesetaraan KB aktif	Persentasi pasangan usua subur yang ber KB	%	80	DINSOSPPPAKB
37.01	Jumlah peningkatan sasaran KB aktif	Persentasi pasangan usia subur yang ber KB	%	80	DINSOSPPPAKB
38	Peningkatan pemberdayaan perempuan	Indeks pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	100	DINSOSPPPAKB

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
38.01	Indeks Pembanguna Gender (IPG) Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	Persentasi Kelompok usaha perempuan / keluarga masyarakat yang dapat meningkatkan ekonomi dan Persentasi SKPD yang menerapkan PPRG	%.	100	DINSOSPPPAKB
39	Meningkatnya keterampilan perempuan dan keluarga	Terwujudnya kabupaten layak anak	%	100	DINSOSPPPAKB
39.01	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) dan menurunnya angka kekerasan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Pemenuhan hak anak dan partisifasi anak	%	100	DINSOSPPPAKB
39.02	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	kasus	5	DINSOSPPPAKB
40	Meningkatkan kemandirian penyandang masalah sosial	Persentasi PMKS	%	100	DINSOSPPPAKB
40.01	Persentasi PMKS	Persentasi PMKS	%	100	DINSOSPPPAKB
41	Meningkatkan pelayanan panti asuhan , panti jompo dan panti rehabilitasi	Tingkat kepuasa pelayan panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	PA	14	DINSOSPPPAKB

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
41.01	Meningkatkan pelayanan panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi	Tingkat Kepuasan pelayanan panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	PA	14	DINSOSPPPAKB
42	Meningkatkan Pelayanan terhadap korban bencana alam	Tingkat pelayan terhadap korban bencana alam dan sosial	%	100	DINSOSPPPAKB
42.01	Tingkat pelayanan terhadap korban bencana alam sosial	Tingkat pelayanan terhadap korban bencana alam sosial	%	100	DINSOSPPPAKB
43	Persentasi PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	Jumlah PMKS	%	100	DINSOSPPPAKB
43.01	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentasi PMKS yang mendapat rehabilitasi	%	100	DINSOSPPPAKB
43.02	Menurunkan angka penyandang masalah sosial	Jumlah PMKS	%	100	DINSOSPPPAKB
44	Menurunkan daerah rawan bencana	Persentase wilayah desa tanggap dan tangguh bencana	%	100	BPBD
44.01	Pelaksanaan sosialisasi tanggap bencana	Jumlah masyarakat yang paham	Orang	300	BPBD

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
44.02	Pembinanaan desa tangguh bencana	Jumlah desa tangguh bencana	Desa	6	BPBD
44.03	Pelatihan tanggap bencana	Jumlah tenaga tanggap bencana yang aktif	Orang	30	BPBD
44.04	Melaksanakan pemetaan daerah rawan bencana	Luas dan sebaran wilayah bencana yang terdeteksi	Kecamatan	6	BPBD
45	Menurunkan korban dan kerugian akibat bencana	Persentase penurunan korban dan kerugian akibat bencana	%	60	BPBD
45.01	Penanganan korban bencana	Tingkat Waktu tanggap darurat penanganan bencana	Jam	1	BPBD
45.02	Mobilitas kebencanaan	Jumlah sarana mobilitas kebencanaan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	Unit	40	BPBD
45.03	Memberikan Pelayan Logistik	Jumlah logistik yang disalurkan	Item	20	BPBD
45.04	Peningkatan pelayanan non pangan	Jumlah pelayanan kebencanaan non pangan	Item	7	BPBD
46	Meningkatkan pemulihan pasca bencana	persentase pemulihan aspek fisik dan non fisik pasca bencana	%	100	BPBD

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
46.01	Memberikan pelayanan perbaikan infrastruktur pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki pasca bencana	%	100	BPBD
47	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	kg/kap/thn	559,97	DKP-KAN
47.01	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	82,29	DKP-KAN
		Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar	persen	80	DKP-KAN
		Persentase Ketersediaan Lumbung Pangan Masyarakat yang terisi Bahan Pangan Utama	%	100	DKP-KAN
		Persentase Pemberdayaan Kelompok distribusi Pangan Masyarakat yang berpartisipasi untuk menjaga stabilisasi Harga Pangan	%	85	DKP-KAN
		Persentase Tingkat Konsumsi Pangan	%	92,55	DKP-KAN
48	Meningkatkan Produksi Perikanan	Tercapainya Hasil produksi Perikanan	ton	10303	DKP-KAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
48.01	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan perkapita/pertahun	perkapita/tahun	50,65	DKP-KAN
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1	DKP-KAN
48.02	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi ikan tangkap	ton	8053	DKP-KAN
		Jumlah Laporan Yang di tindak lanjuti	laporan	4	DKP-KAN
		Melaksanakan Pengkayaan (restocking) Sumberdaya Perikanan	ekor	105.000	DKP-KAN
48.03	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Ikan Budidaya	ton	2267	DKP-KAN
		Persentase peningkatan produksi perikanan	%	1	DKP-KAN
		Persentase peningkatan Konsumsi Ikan perkapita/pertahun	%	0,2	DKP-KAN
49	Mengendalikan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	Persentase Penurunan Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	%	0,1	DLHP

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
49.01	Terkendalinya Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan	Persentase Industri/Kegiatan Yang Memenuhi Ketentuan Pengelolaan LH	%	70	DLHP
		Persentase Peningkatan IKLH	%	0,1	DLHP
		Persentase Cakupan Layanan Persampahan Kawasan Perkotaan	%	77	DLHP
50	Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	Persentase Pelayanan Perhubungan	%	95	DLHP
50.01	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perhubungan	%	95	DLHP
51	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tepat Waktu	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	persen	70,80%	DISDUKCAPIL
52	Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah status Desa Berkembang	desa	126	DPMPD
53	Meningkatkan layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Persentase kualitas layanan komunikasi dan informasi publik	%	90	DISKOMINFO
54	Meningkatkan kualitas data statistik	Persentase kualitas data statistik	%	95	DISKOMINFO

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
	daerah				
54.01	Meningkatnya kualitas data statistik	Pesentase skpd yang menyampaikan kelengkapan data lengkap dan valid	%	95	DISKOMINFO
55	Meningkatkan Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase pengamanan informasi dan persandian	%	75	DISKOMINFO
55.01	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase SKPD menerapkan standarisasi pengamanan informasi dan persandian	%	75	DISKOMINFO
56	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK dan E-Goverment	Persentase Kualitas Pengelolaan Sarana Infrastruktur TIK dan E-Government	%	90	DISKOMINFO
56.01	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK dan E-Goverment	Indek Pemeringkatan E-Government Indonesia (PEGI)	Indek	3,4 dari 4,0	DISKOMINFO
		Indek Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indek	4,5 dari 5,0	DISKOMINFO

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
57	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pelayanan Perizinan	Hasil Indeks kepuasan masyarakat di bidang pelayanan perizinan	Nilai IKM	85	PM-PTSP-NAKER
57.01	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Pelayanan Perizinan	Rata-rata Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	85	PM-PTSP-NAKER
58	Meningkatkan Investasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Realisasi investasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Rupiah	71799795324	PM-PTSP-NAKER
58.01	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)	Rupiah	71799795324	PM-PTSP-NAKER
59	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja	Angka Partisipasi	%	73,21	PM-PTSP-NAKER
59.01	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Bersertifikat Terampil	%	100	PM-PTSP-NAKER
60	Meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan terhadap Pekerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan sistem pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Secara Berkesinambungan	Perusahaan	85	PM-PTSP-NAKER

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
60.01	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan Tentang Aturan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan sistem aturan ketenagakerjaan	%	51,52	PM-PTSP-NAKER
60.02	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Pekerja	Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial dengan perjanjian bersama yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	Kasus	0	PM-PTSP-NAKER
61	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja urusan kepemudaan keolahragaan dan kepariwisataan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85	DISPORAPAR
62	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Jumlah Kunjungan Wisatawan	wisatawan	86.000	DISPORAPAR
63	Meningkatkan pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan	Prosentase Organisasi Kepemudaan dan pemuda yang mandiri	%	100	DISPORAPAR
63.01	Meningkatnya Kemandirian pemuda dalam pembangunan daerah	Persentasi organisasi kepemudaan dan pemuda yang mandiri	%	100	DISPORAPAR

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
64	Meningkatkan pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan	Tingkat Partisipasi paskibra Kabupaten Hulu Sungai Tengah	%	83,33	DISPORAPAR
65	Meningkatkan kualitas olahraga	Permasyarakatan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	kegiatan	20	DISPORAPAR
66	Meningkatkan kualitas olahraga	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	buah	14/2	DISPORAPAR
67	Meningkatkan kualitas olahraga	Peningkatan prestasi olahraga pelajar	peringkat	7	DISPORAPAR
67.01	Meningkatnya prestasi olahraga pelajar dan olahraga masyarakat	Peringkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	peringkat	7	DISPORAPAR
68	Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan	Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan	persen	76	PERPUS
69	Meningkatkan Kualitas pengelolaan kearsipan	Persentase peningkatan Perangkat Daerah yang tertib arsip	SKPD	37	PERPUS
70	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan	%	2	DINTAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
		Nasional - Padi)			
70.01	Meningkatnya Produksi TPH	Jumlah Produksi Padi	Ton	284558	DINTAN
		Jumlah Produksi Jagung	Ton	5092	DINTAN
		Jumlah Produksi Kedelai	Ton	821	DINTAN
		Jumlah Produksi Cabe Besar	Ton	1033,95	DINTAN
		Jumlah Produksi Cabe Rawit	Ton	120,61	DINTAN
		Jumlah Produksi Bawang Merah	Ton	67,95	DINTAN
		Jumlah Produksi Jeruk	Ton	11249,36	DINTAN
		Jumlah Produksi Kacang Tanah	Ton	887	DINTAN
		Jumlah Produksi Kacang Hijau	Ton	378	DINTAN
		Jumlah Produksi Ubi Kayu	Ton	4052	DINTAN
		Jumlah Produksi Tomat	Ton	1095,92	DINTAN
		Jumlah Produksi Pisang	Ton	18013,36	DINTAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Produksi Durian	Ton	1032,14	DINTAN
		Jumlah Produksi Rambutan	Ton	7543,31	DINTAN
70.02	Meningkatnya Produktivitas TPH	Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Padi)	Ku/Ha	52,25	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Jagung)	Ku/Ha	40,25	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Kedelai)	Ku/Ha	13,19	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Cabe Besar)	Ku/Ha	84,75	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Cabe Rawit)	Ku/Ha	17,48	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Bawang Merah)	Ku/Ha	75,5	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Jeruk)	Ku/Ha	148,3	DINTAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Kacang Tanah)	Ku/Ha	14,3	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Kacang Hijau)	Ku/Ha	12,1	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Ubi Kayu)	Ku/Ha	140,99	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Tomat)	Ku/Ha	97,85	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Pisang)	Ku/Ha	190,4	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Durian)	Ku/Ha	115	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Rambutan)	Ku/Ha	68	DINTAN
71	Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian	% Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian	%	15	DINTAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
71.01	Meningkatkan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Beras Kemasan)	Kelompok	3	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Keripik Pisang)	Rumah Tangga	5	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Keripik Singkong)	Rumah Tangga	5	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Sirup Jeruk)	Rumah Tangga	20	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Tempe)	Kelompok	3	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Telur Asin)	Rumah Tangga	5	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Gula Semut)	Rumah Tangga	20	DINTAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Bokar)	Kelompok	11	DINTAN
72	Meningkatkan Pola Pertanian Modern	% Kelompok Tani yang Naik Kelas	Kelompok	438	DINTAN
72.01	Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian	% Kelompok yang Meningkat Skornya	%	35	DINTAN
		% Peningkatan Skor Kinerja Penyuluhan Pertanian	%	5	DINTAN
73	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Nasional - Jagung)	%	2	DINTAN
74	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Nasional - Kedelai)	%	1	DINTAN
75	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi Peternakan	%	2,5	DINTAN
75.01	Meningkatnya Produksi Peternakan	Jumlah Produksi Daging	Kg	2850000	DINTAN
		Jumlah Produksi Telur	Butir	4797068	DINTAN
76	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi Perkebunan	%	4,54	DINTAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
76.01	Meningkatnya Produksi Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Karet, Kelapa, Aren, Kakao,Kopi, Sagu, Lada)	Ton	20.712;4.578;983;0;133;237;13,8	DINTAN
77	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Nasional - Cabe Besar)	%	3	DINTAN
78	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Nasional - Cabe Rawit)	%	2,7	DINTAN
79	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Nasional - Bawang Merah)	%	23,24	DINTAN
80	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Nasional - Jeruk)	%	3,4	DINTAN
81	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Daerah - Kacang Tanah)	%	0,98	DINTAN
82	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Daerah - Kacang Hijau)	%	1,1	DINTAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
83	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Daerah - Ubi Kayu)	%	0,98	DINTAN
84	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Daerah - Tomat)	%	3,75	DINTAN
85	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Daerah - Pisang)	%	2,67	DINTAN
86	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Daerah - Rambutan)	%	3,78	DINTAN
87	Meningkatkan Jenis Produk Pertanian Yang Bernilai Tambah	Jumlah Jenis Produk Pertanian Yang Bernilai Tambah	Jenis	8	DINTAN
87.01	Meningkatkan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Beras Kemasan)	Kelompok	3	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Keripik Pisang)	Kelompok	5	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Keripik Singkong)	Kelompok	5	DINTAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Sirup Jeruk)	Kelompok	20	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Tempe)	Kelompok	3	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Telur Asin)	Kelompok	5	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Gula Semut)	Kelompok	20	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Gula Semut)	Kelompok	20	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Bokar)	Kelompok	11	DINTAN
88	Meningkatkan peran koperasi dan UMK dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah	Persentasi koperasi yang sehat	%	60	DISDAG
88.01	Meningkatnya peran koperasi dan UMK dalam mendukung pertumbuhan	Persentasi koperasi yang tumbuh dan	%	60	DISDAG

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
	perekonomian daerah	berkembang			
		Pertumbuhan UMK	UMK	10574	DISDAG
89	Meningkatkan peran koperasi dan UMK dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah	Persentasi Pertumbuhan UMK	%	25	DISDAG
90	Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah	% temuan barang yang mengandung bahan berbahaya dan kadaluarsa	%	20	DISDAG
90.01	Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah	% temuan barang yang mengandung bahan berbahaya dan kadaluarsa	%	20	DISDAG
		Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	400 M	DISDAG
91	Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah	Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	400 M	DISDAG
92	Meningkatkan kemandirian IKM	Persentase Tingkat pertumbuhan IKM	%	11,12	DISDAG
92.01	Meningkatnya pertumbuhan IKM	Persentase Tingkat pertumbuhan IKM	%	11,12	DISDAG

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
93	Peningkatan produk perundang-undangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Persentase produk hukum daerah yang harmonis, tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi	%	100	SEKDA
93.01	Meningkatnya produk perundang-undangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Persentase produk hukum daerah yang harmonis, tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi	%	100	SEKDA
94	Penurunan kasus/sengketa/perkara hukum	Persentase kasus/sengketa/perkara hukum yang diselesaikan	%	100	SEKDA
94.01	Penurunan kasus/sengketa/perkara hukum	Persentase kasus/sengketa/perkara hukum yang diselesaikan	%	100	SEKDA
95	Peningkatan kepedulian terhadap HAM	Nilai implementasi RANHAM	predikat	peduli	SEKDA
95.01	Meningkatnya kepedulian terhadap HAM	Nilai implementasi RANHAM	predikat	peduli	SEKDA

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
96	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	predikat	tinggi	SEKDA
96.01	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Predikat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	predikat	tinggi	SEKDA
		Disampaikannya LKPJ tepat waktu	predikat	Tepat waktu	SEKDA
		Jumlah desa/kelurahan yang ditetapkan batas desanya dalam perbup	desa/kelurahan	80	SEKDA
		Jumlah kesepakatan Kepala Daerah yang dihasilkan	dokumen	0	SEKDA
97	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Disampaikannya LKPJ tepat waktu	%	Tepat waktu	SEKDA
98	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Pemda	predikat	A	SEKDA
98.01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Pemda	predikat	A	SEKDA

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
99	Peningkatan kualitas pelayanan birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPP di daerah	%	100	SEKDA
99.01	Meningkatnya kualitas pelayanan birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Publik	%	100	SEKDA
100	Peningkatan kelengkapan regulasi BUMD	Tingkat kelengkapan regulasi BUMD	%	100	SEKDA
100.01	Meningkatnya kelengkapan regulasi BUMD	Tingkat kelengkapan regulasi BUMD	%	100	SEKDA
101	Kelancaran bidang ekonomi	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan bidang ekonomi yang selesai ditindaklanjuti	%	100	SEKDA
101.01	Kelancaran bidang ekonomi	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan bidang ekonomi yang selesai ditindaklanjuti	%	100	SEKDA
		Jumlah Perbub standar satuan harga Kab. HST yang terbit	dokumen	2	SEKDA

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
102	Terkendalinya pelaksanaan pembangunan	Tingkat kesesuaian pelaksanaan administrasi pembangunan dengan perencanaan	%	100	SEKDA
102.01	Terkendalinya pelaksanaan pembangunan	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan	%	100	SEKDA
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan aturan	%	100	SEKDA
103	Terkendalinya pelaksanaan pembangunan	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan aturan	%	100	SEKDA
104	Peningkatan kualitas hubungan ulama dan umara dalam pembangunan daerah	Persentase rekomendasi hasil pertemuan yang dilaksanakan sesuai kesepakatan	%	100	SEKDA
104.01	Meningkatnya kualitas hubungan ulama dan umara dalam pembangunan daerah	Persentase rekomendasi hasil pertemuan yang dilaksanakan sesuai kesepakatan	%	100	SEKDA

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
105	Peningkatan pelayanan kemasyarakatan	Persentase jumlah mahasiswa/santri yang terfasilitasi beasiswa yang memenuhi komitmen sesuai perjanjian	%	100	SEKDA
105.01	Meningkatnya pelayanan kemasyarakatan	Persentase jumlah mahasiswa/santri yang terfasilitasi beasiswa yang memenuhi komitmen sesuai perjanjian	%	100	SEKDA
		Persentase jumlah asrama yang berfungsi dengan baik	%	100	SEKDA
		Persentase hasil koordinasi (rencana tindak lanjut) kesehatan dan olahraga yang dilaksanakan	%	100	SEKDA
106	Peningkatan pelayanan publik di bidang kehumasan	Persentase klarifikasi isu/berita negatif tentang kebijakan Pimpinan Daerah	%	100	SEKDA
106.01	Meningkatnya pelayanan publik di bidang kehumasan	Persentase klarifikasi isu/berita negatif tentang kebijakan Pimpinan Daerah	%	100	SEKDA

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
107	Peningkatan kelancaran aktifitas Kepala Daerah	Hasil survey kepuasan Kepala Daerah terhadap pelayanan keprotokolan	predikat	sangat baik	SEKDA
107.01	Meningkatnya kelancaran aktivitas Kepala Daerah	Hasil survey kepuasan Kepala Daerah terhadap pelayanan keprotokolan	predikat	sangat baik	SEKDA
108	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah desa/kelurahan yang ditetapkan batas desanya dalam perbup	desa/kelurahan	80	SEKDA
109	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah kesepakatan Kepala Daerah yang dihasilkan	dokumen	0	SEKDA
110	Peningkatan pelayanan kemasyarakatan	Persentase jumlah asrama yang berfungsi dengan baik	%	100	SEKDA
111	Kelancaran bidang ekonomi	Jumlah Perbub standar satuan harga Kab. HST yang terbit	dokumen	2	SEKDA
112	Peningkatan pelaku usaha pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C) di daerah yang taat aturan	Persentase pelaku usaha pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C) di daerah yang taat aturan	%	4,5	SEKDA

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
112.01	Meningkatnya pelaku usaha pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C) di daerah yang taat aturan	Persentase pelaku usaha pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C) di daerah yang taat aturan	%	4,5	SEKDA
113	Peningkatan pelayanan kemasyarakatan	Persentase hasil koordinasi (rencana tindak lanjut) kesehatan dan olahraga yang dilaksanakan	%	100	SEKDA
114	Mewujudkan Optimalisasi Kinerja Sekretariat	Tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan	%	100	SEKWAN
115	Mewujudkan Optimalisasi Kinerja Sekretariat	Ketersediaan SDM, Sarana dan Prasarana	%	100	SEKWAN
116	Mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	B	BARABAI
116.01	Rata-rata Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Rasio Rata-rata Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	%	70	BARABAI
117	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa/Kelurahan dengan Tertib Administrasi	Desa/Kelurahan	12	BARABAI

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
117.01	Jumlah Desa/Kelurahan dengan Tertib Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Desa/Kelurahan	18	BARABAI
118	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan pemerintah Desa/Kelurahan	Desa yang Dilakukan Evaluasi Kinerja Perkembangan Pembangunan Desa	Desa/Kelurahan	18	BARABAI
118.01	Jumlah desa yg dilakukan evaluasi Kinerja Perkembangan Pembangunan Desa	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Pemerintahan Desa/kelurahan	Desa / Kelurahan	18	BARABAI
119	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	B	PANDAWAN
120	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rasio indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi desa yang berkategori ? B	%	90	PANDAWAN
121	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan tertib administrasi	Desa	21	PANDAWAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
122	Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang dibina dan dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunan Desa.	Desa	21	PANDAWAN
123	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	nilai	85	LAS
123.01	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	nilai	85	LAS
124	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan dengan tertib administrasi	desa/ kelurahan	15	LAS
124.01	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan dengan tertib administrasi	desa/ kelurahan	15	LAS
125	Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan pemerintahan desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunannya.	desa/ kelurahan	18	LAS
125.01	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pemerintahan desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunannya.	desa/ kelurahan	18	LAS

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
126	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	85	LAU
127	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa	Jumlah desa dengan tertib administrasi	Desa	16	LAU
127.01	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa	Jumlah desa dengan tertib administrasi	Desa	16	LAU
128	Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan pemerintah desa	Jumlah desa yang dilakukan evaluasi yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunannya	Desa	16	LAU
128.01	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pemerintah desa	Jumlah desa yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunannya	Desa	16	LAU
129	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dikecamatan	Kategori	B	HARUYAN
129.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dikecamatan	Kategori	B	HARUYAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
130	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Dengan Tertib Administrasi	Desa	17	HARUYAN
130.01	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Dengan Tertib Administrasi	Desa	17	HARUYAN
131	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Evaluasi Kinerja Perkembangan Pembangunan Desa	Desa	17	HARUYAN
131.01	Meningkatnya Kinerja Perkembangan Pembangunan Desa	Persentase desa Hasil Evaluasi Minimal Kategori Berkembang	%	100	HARUYAN
132	Meningkatkan kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	B	BATU BENAWA
132.01	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	B	BATU BENAWA
133	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi Pemerintahan Desa	Persentase	100% (14 Desa)	BATU BENAWA
133.01	Meningkatnya pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi Pemerintahan Desa	Persentase	100% (14 Desa)	BATU BENAWA

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
134	Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan pemerintahan desa	Persentase Desa hasil evaluasi evaluasi minimal kategori berkembang	Persentase	100% (14 Desa)	BATU BENAWA
134.01	Meningkatnya kinerja perkembangan pembangunan desa	Persentase Desa hasil evaluasi evaluasi minimal kategori berkembang	Persentase	100% (14 Desa)	BATU BENAWA
135	Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan pemerintahan desa	Persentase Desa hasil evaluasi evaluasi minimal kategori berkembang	Persentase	100% (14 Desa)	BATU BENAWA
136	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat	Kategori	B	HANTAKAN
137	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah kelurahan desa dengan tertib administrasi	Desa	12	HANTAKAN
138	Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan pemerintahan desa	Jumlah desa yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunan desa	Desa	12	HANTAKAN
139	Mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas Camat.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	B	BAS
139.01	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	B	BAS

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
140	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa/Kelurahan dengan tertib administrasi	Desa/ Kelurahan	19	BAS
141	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Desa /Kelurahan yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunan Desa	Desa/ Kelurahan	19	BAS
141.01	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunan Desa.	Desa/ Kelurahan	19	BAS
142	Meningkatkan kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) terhaadap pelayanan di Kecamatan	Kategori	B	BATARA
142.01	Rata-rata pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	B	BATARA
143	Meningkatnya Pembinaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa / Kelurahan dengan Tertib Administrasi	Desa	10	BATARA

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
143.01	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang tertib	%	75	BATARA
144	Meningkatnya Kinerja Perkembangan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan Desa	Desa	14	BATARA
144.01	Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembangunan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa / Kelurahan yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunan desa	Desa	14	BATARA
145	Mengoptimalkan pelaksanaan tugas Camat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Kategori	B	BAT
145.01	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	%	100	BAT
146	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan tertib administrasi	Desa	11	BAT
146.01	Meningkatnya pengelolaaan administrasi pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan tertib administrasi	Desa	11	BAT
147	Meningkatkan Kualiatas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	B	LIMPASU

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
	masyarakat				
148	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah Desa dengan tertib Administrasi	Desa	9	LIMPASU
149	Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunan Desa	Desa	9	LIMPASU
150	Meningkatkan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan /pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan : a. BPK , b.Inspektorat	%	80	INSPEKTORAT
150.01	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan/pengawasan	Persentase penyelesaian itindak lanjut hasil pemeriksaan : a. BPK b.Inspektorat	%	80	INSPEKTORAT
		Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah/negara sesuai hasil pemeriksaan : a. BPK, b. Inspektorat	%	80	INSPEKTORAT

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
151	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah	Persentase hasil evaluasi SAKIP Pemda yang mendapat nilai baik terhadap evaluasi Internal	%	90	INSPEKTORAT
152	Meningkatkan Kapabilitas APIP Inspektorat	Livel Kapabilitas APIP	level	3	INSPEKTORAT
152.01	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas (APIP)	Level Kapabilitas APIP	level	3	INSPEKTORAT
153	Meningkatkan akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemkab. HST	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah (SKPD) yang menyajikan sudah sesuai dengan SAP	%	90	INSPEKTORAT
153.01	Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemkab. HST	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah (SKPD) yang menyajikan sudah sesuai dengan SAP	%	90	INSPEKTORAT
154	Meningkatkan Implementasi SPIP	Level/Tingkat Maturitas SPIP	level	3 dengan catatan	INSPEKTORAT
154.01	Meningkatnya Implementasi SPIP	Level /tingkat Maturitas SPIP	level	3	INSPEKTORAT

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
				dengan catatan	
155	Meningkatkan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan /pengawasan	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah/negara sesuai hasil pemeriksaa : a. BPK b. Inspetorat	%	80	INSPEKTORAT
156	Meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian target RPJMD	%	100	BAPPELITBANGDA
156.01	Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian target RPJMD	%	100	BAPPELITBANGDA
		Persentase capaian target RKPD	%	100	BAPPELITBANGDA
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD	%	50	BAPPELITBANGDA
		Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD	%	100	BAPPELITBANGDA
157	Meningkatkan pendanaan pembangunan	Persentase belanja langsung dalam APBD	%	50	BAPPELITBANGDA

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
157.01	Meningkatnya pendanaan pembangunan	Jumlah dana APBN, DAK dan APBD Provinsi di Kab. HST	Rp	≥ 250 Milyar	BAPPELITBANGDA
158	Meningkatkan konsistensi perencanaan dengan penganggaran	Persentase program dan kegiatan RKPD yang dilaksanakan dalam APBD	%	90	BAPPELITBANGDA
158.01	Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran	Persentase program dan kegiatan RKPD yang terakomodir dalam APBD	%	90	BAPPELITBANGDA
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen APBD	%	50	BAPPELITBANGDA
159	Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah	Persentase hasil litbang yang digunakan	%	100	BAPPELITBANGDA
159.01	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	persentase rekomendasi hasil litbang yg dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan daerah	%	100	BAPPELITBANGDA
160	Meningkatkan Kualitas Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelayanan Penatausahaan Pengelolaa Keuangan	%	100	BPKAD

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
160.01	Meningkatkan Kualitas Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	% Ranperda/Ranperbup APBD/APBDP disusun Tepat Waktu	buah	2	BPKAD
		Pengesahan DPA tepat waktu	%	100	BPKAD
		% Ranperda/Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan Tepat Waktu	%	100	BPKAD
		IKM Pelayanan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan	%	90	BPKAD
161	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase keakuratan data BMD	%	100	BPKAD
161.01	Meningkatnya Pengamanan dan Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase keakuratan data BMD	%	100	BPKAD
162	Meningkatkan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Rasio Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Jumlah	25	BPPRD

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
162.01	Meningkatnya Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Rasio Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Jumlah	25	BPPRD
		Prosentase Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	%	15	BPPRD
		Prosentasi Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah	%	20	BPPRD
163	Meningkatkan Kinerja Aparatur	Persentasi pencapaian pelaksanaan perjanjian kinerja di setiap SKPD pada setiap jenjang jabatan	%	100	BKDSDM
163.01	Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur	Indek Profesionalitas ASN	%	90	BKDSDM
164	Meningkatkan Kinerja Aparatur	Persentasi pelayanan administrasi yang dapat diselesaikan secara online	%	100	BKDSDM
164.01	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Tingkat kepuasan layanan kepegawaian	%	90	BKDSDM

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2021		SKPD
			Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6
165	Maningkatkan kinerja aparatur	Persentasi pencapaian pelaksanaan perjanjian kinerja di setiap SKPD pada setiap jenjang jabatan	%	100	BKDSDM
165.01	Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur	Indek Profesionalitas ASN	%	90	BKDSDM
166	Maningkatkan kinerja aparatur	Persentasi pelayanan administrasi yang dapat diselesaikan secara online	%	100	BKDSDM

BAB VII
PENUTUP

Sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 digunakan sebagai pedoman untuk penganggaran tahunan yaitu berupa pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021. KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah digunakan sebagai pedoman menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah agar segera menindaklanjuti dengan menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 yang menjabarkan lebih rinci tentang program, sasaran program, indikator capaian program, keluaran dan hasil kegiatan serta lokasi kegiatan.
2. Kepala Perangkat Daerah agar menindaklanjuti untuk menyusun kerangka anggaran dan regulasi untuk mendukung pencapaian program tersebut dengan pendekatan penganggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program-program RKPD ini dengan sebaik-baiknya.
4. Guna efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD ini, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap penjabaran dan sinergitas serta capaian indikator ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum APBD serta PPAS Tahun Anggaran 2021.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran, dan disiplin serta komitmen para pelaku pembangunan dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi masalah pembangunan dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada yang dimiliki untuk mewujudkan Visi "**Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat**".

Barabai, 20 Juli 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. A. CHAIRANSYAH

L A M P I R A N



L A M P I R A N

EVALUASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2019

37 SKPD

SE- KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

RKPD TAHUN 2021

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DAFTAR SKPD SE- KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	PERANGKAT DAERAH KAB. HST	KET
1	SEKRETARIAT DAERAH	
2	SEKRETARIAT DPRD	
3	RSUD H. DAMANHURI BARABAI	
4	INSPEKTORAT	
5	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	
6	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
10	DINAS PENDIDIKAN	
11	DINAS KESEHATAN	
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
14	DINAS PERDAGANGAN	
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
17	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
19	DINAS PERTANIAN	
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
21	DINAS SOSIAL, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
22	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
23	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
24	DINAS PERPUSTAKAAN	
25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
26	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	PERANGKAT DAERAH KAB. HST	KET
27	KECAMATAN BARABAI	
28	KECAMATAN PANDAWAN	
29	KECAMATAN LIMPASU	
30	KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN	
31	KECAMATAN BATANG ALAI UTARA	
32	KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR	
33	KECAMATAN HANTAKAN	
34	KECAMATAN HARUYAN	
35	KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN	
36	KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA	
37	KECAMATAN BATU BENAWA	

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Administrasi Pemerintahan																				
1	Meningkatnya produk perundang-undangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi		Persentase produk hukum daerah yang harmonis, tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi	%	100			100		100			100			100			100.00		Sekretariat Daerah	-
1.30		**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**Hasil survey tingkat kepuasan terhadap pelayanan produk hukum daerah**	**IKM**	**85**			**0**		**Tinggi**			**85**			**85**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
1.30.1		Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelayanan telaahan hukum yang diberikan sesuai standar	raperda	10,30,250		894,823,000	48	0	12		69,800,000	14		40,365,500	62			620.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah pelayanan telaahan hukum yang diberikan sesuai standar	perbup				196		30			61			257			25,700.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah pelayanan telaahan hukum yang diberikan sesuai standar	kebup				757		250			297			1054			105,400.00		Sekretariat Daerah	-
1.30.5		Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan	Persentase peserta sosialisasi yang paham	%	500		448,485,950	0	0	50		35,150,000	50		22,138,000	50			10.00		Sekretariat Daerah	-
1.30.10		Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumentasi dan informasi produk hukum daerah yang tersedia secara elektronik	perda	10,30,250		722,450,000	48	0	12		22,250,000	14		11,875,380	62			620.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah dokumentasi dan informasi produk hukum daerah yang tersedia secara elektronik	perbup				196		30			61			257			25,700.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah dokumentasi dan informasi produk hukum daerah yang tersedia secara elektronik	kebup				755		250			297			1052			105,200.00		Sekretariat Daerah	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Jumlah dokumentasi dan informasi produk hukum daerah yang tersedia dalam bentuk buku	buku				1260		625			625			1885			188,500.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	96.67		74,378,880	1,328.67						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
2	Penurunan kasus/sengketa/perkara hukum		Persentase kasus/sengketa/perkara hukum yang diselesaikan	%	100			34		100			100			100			100.00		Sekretariat Daerah	-
2.31		**Program Peningkatan Bantuan Hukum**	**Persentase penanganan kasus/sengketa/ perkara hukum dengan bantuan hukum**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
2.31.2		Konsultasi dan Advokasi Hukum	Jumlah kasus/sengketa/perkara hukum yang ditangani	kasus/sengketa/perkara hukum	3		928,635,600	4	0	3		110,000,000	2		1,470,000	6			200.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	66.00		1,470,000	200.00						
												Predikat Kinerja	Sedang			Sangat tinggi						
3	Meningkatnya kepedulian terhadap HAM		Nilai implementasi RANHAM	predikat	76.25			84.16		peduli			75			75			98.36		Sekretariat Daerah	-
3.48		**Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)**	**Persentase data RANHAM yang lengkap**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
3.48.1		Koordinasi RANHAM	Jumlah Laporan RANHAM yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	dokumen	5		116,900,000	5	0	5		29,940,000	5		22,035,000	5			100.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		22,035,000	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Predikat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	predikat	2.6			25.045		tinggi			3.132			3.132			120.46		Sekretariat Daerah	-
4.34		**Program Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah**	**Persentase SKPD yang menyampaikan data LPPD secara lengkap**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Persentase SKPD yang menyampaikan data LKPJ secara lengkap	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Persentase fasilitasi sengketa/konflik sosial yang ditangani	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Persentase kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai standar	**%**	**100**			**0**		**55**			**55**			**55**			**55.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Persentase fasilitasi administrasi pejabat negara yang diselesaikan	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Persentase kerjasama daerah yang difasilitasi	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Persentase hasil koordinasi & monev DKTP yang ditindaklanjuti	**%**	**100**			**100**		**0**			**0**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
4.34.1		Monitoring dan Pelaporan atas penyelenggaraan PATEN	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran monev penyelenggaraan PATEN sesusi standart	kecamatan	4		533,480,000	0	0	6		45,320,000	6		40,072,000	6			150.00		Sekretariat Daerah	-
4.34.2		Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase dokumen kerjasama daerah yang diveryfikasi	%	100		918,500,000	100	0	100		45,500,000	100		44,450,000	100			100.00		Sekretariat Daerah	-
4.34.3		Koordinasi dan fasilitasi kedudukan, hak dan kewajiban pejabat negara	Persentase penyelesaian kelengkapan administrasi pejabat negara	%	100		465,748,940	100	0	100		14,650,000	100		945	100			100.00		Sekretariat Daerah	-
4.34.4		Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi data LPPD	Perangkat Daerah	37		719,035,600	37	0	37		75,568,000	37		74,233,000	37			100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi data LKPJ	perangkat daerah	37			37		37			37			37			100.00		Sekretariat Daerah	-
4.34.5		Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah sisa	Jumlah koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan hari besar nasional dan daerah	kali	10		757,636,667	10	0	10		122,500,000	10		94,275,250	10			100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa/konflik sosial	kali	2			2		2			2			2			100.00		Sekretariat Daerah	-
4.34.7		Monitoring dan pelaporan atas penyelenggaraan DKTP	Jumlah laporan hasil monev penyelenggaraan DKTP	laporan	4		689,460,000	4	0	0		6,000,000	0		0	4			100.00		Sekretariat Daerah	-
Rata - rata kinerja (%)													93.75		253,975,250	87.50						
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
4.40		**Program Pengembangan Wilayah Perbatasan**	**Jumlah segmen batas desa yang disepakati**	**segmen**	**450**			**0**		**200**			**0**			**0**			**0.00**		**Sekretariat Daerah**	-
			Jumlah kecamatan yang dibakukan toponiminya	**kecamatan**	**6**			**1**		**0**			**0**			**1**			**16.67**		**Sekretariat Daerah**	-
			Jumlah segmen batas kabupaten yang disepakati	**segmen**	**2**			**1**		**1**			**0**			**1**			**50.00**		**Sekretariat Daerah**	-
4.40.1		Penegasan perbatasan dalam wilayah daerah	Jumlah segmen batas desa yang dilacak	segmen	100		3,730,121,000	0	0	200		286,915,000	0		31,078,250	0			0.00		Sekretariat Daerah	-
4.40.4		Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Jumlah segmen batas kabupaten yang dilacak	segmen	1		2,289,150,000	2	0	1		81,820,000	0		38,385,000	2			200.00		Sekretariat Daerah	-
													Rata - rata kinerja (%)	0.00		69,463,250	100.00					
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi					
			Disampaikannya LKPJ tepat waktu	%	100			100		100			100			100			100.00		Sekretariat Daerah	-
4.34		**Program Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah**	**Persentase SKPD yang menyampaikan data LPPD secara lengkap**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	-
			Persentase SKPD yang menyampaikan data LKPJ secara lengkap	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	-
			Persentase fasilitasi sengketa/konflik sosial yang ditangani	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	-
			Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	-
			Persentase kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai standar	**%**	**100**			**0**		**55**			**55**			**55**			**55.00**		**Sekretariat Daerah**	-
			Persentase fasilitasi administrasi pejabat negara yang diselesaikan	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	-
			Persentase kerjasama daerah yang difasilitasi	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	-
			Persentase hasil koordinasi & monev DKTP yang ditindaklanjuti	**%**	**100**			**100**		**0**			**0**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	-
4.34.1		Monitoring dan Pelaporan atas penyelenggaraan PATEN	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran monev penyelenggaraan PATEN sesusi standart	kecamatan	4		533,480,000	0	0	6		45,320,000	6		40,072,000	6			150.00		Sekretariat Daerah	-
4.34.2		Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase dokumen kerjasama daerah yang diveryfikasi	%	100		918,500,000	100	0	100		45,500,000	100		44,450,000	100			100.00		Sekretariat Daerah	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
4.34.3		Koordinasi dan fasilitasi kedudukan, hak dan kewajiban pejabat negara	Persentase penyelesaian kelengkapan administrasi pejabat negara	%	100		465,748,940	100	0	100		14,650,000	100		945	100			100.00		Sekretariat Daerah	-
4.34.4		Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi data LPPD	Perangkat Daerah	37		719,035,600	37	0	37		75,568,000	37		74,233,000	37			100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi data LKPJ	perangkat daerah	37			37		37			37			37			100.00		Sekretariat Daerah	-
4.34.5		Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah sisa	Jumlah koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan hari besar nasional dan daerah	kali	10		757,636,667	10	0	10		122,500,000	10		94,275,250	10			100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa/konflik sosial	kali	2			2		2			2			2			100.00		Sekretariat Daerah	-
4.34.7		Monitoring dan pelaporan atas penyelenggaraan DKTP	Jumlah laporan hasil monev penyelenggaraan DKTP	laporan	4		689,460,000	4	0	0		6,000,000	0		0	4			100.00		Sekretariat Daerah	-
													Rata - rata kinerja (%)	93.75		253,975,250	87.50					
													Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Tinggi					
4.40		**Program Pengembangan Wilayah Perbatasan**	**Jumlah segmen batas desa yang disepakati**	**segmen**	**450**			**0**		**200**			**0**			**0**			**0.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Jumlah kecamatan yang dibakukan toponiminya	**kecamatan**	**6**			**1**		**0**			**0**			**1**			**16.67**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Jumlah segmen batas kabupaten yang disepakati	**segmen**	**2**			**1**		**1**			**0**			**1**			**50.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
4.40.1		Penegasan perbatasan dalam wilayah daerah	Jumlah segmen batas desa yang dilacak	segmen	100		3,730,121,000	0	0	200		286,915,000	0		31,078,250	0			0.00		Sekretariat Daerah	-
4.40.4		Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Jumlah segmen batas kabupaten yang dilacak	segmen	1		2,289,150,000	2	0	1		81,820,000	0		38,385,000	2			200.00		Sekretariat Daerah	-
													Rata - rata kinerja (%)	0.00		69,463,250	100.00					
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi					
			Jumlah desa/kelurahan yang ditetapkan batas desanya dalam perbup	desa/kelurahan	169			0		50			0			0			0.00		Sekretariat Daerah	-
4.34		**Program Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah**	**Persentase SKPD yang menyampaikan data LPPD secara lengkap**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Persentase SKPD yang menyampaikan data LKPJ secara lengkap	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Persentase fasilitasi sengketa/konflik sosial yang ditangani	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Persentase kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai standar	**%**	**100**			**0**		**55**			**55**			**55**			**55.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Persentase fasilitasi administrasi pejabat negara yang diselesaikan	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Persentase kerjasama daerah yang difasilitasi	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Persentase hasil koordinasi & monev DKTP yang ditindaklanjuti	**%**	**100**			**100**		**0**			**0**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
4.34.1		Monitoring dan Pelaporan atas penyelenggaraan PATEN	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran monev penyelenggaraan PATEN sesusi standart	kecamatan	4		533,480,000	0	0	6		45,320,000	6		40,072,000	6			150.00		Sekretariat Daerah	-
4.34.2		Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase dokumen kerjasama daerah yang diveryfikasi	%	100		918,500,000	100	0	100		45,500,000	100		44,450,000	100			100.00		Sekretariat Daerah	-
4.34.3		Koordinasi dan fasilitasi kedudukan, hak dan kewajiban pejabat negara	Persentase penyelesaian kelengkapan administrasi pejabat negara	%	100		465,748,940	100	0	100		14,650,000	100		945	100			100.00		Sekretariat Daerah	-
4.34.4		Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi data LPPD	Perangkat Daerah	37		719,035,600	37	0	37		75,568,000	37		74,233,000	37			100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi data LKPJ	perangkat daerah	37			37		37			37			37			100.00		Sekretariat Daerah	-
4.34.5		Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah sisa	Jumlah koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan hari besar nasional dan daerah	kali	10		757,636,667	10	0	10		122,500,000	10		94,275,250	10			100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa/konflik sosial	kali	2			2		2			2			2			100.00		Sekretariat Daerah	-
4.34.7		Monitoring dan pelaporan atas penyelenggaraan DKTP	Jumlah laporan hasil monev penyelenggaraan DKTP	laporan	4		689,460,000	4	0	0		6,000,000	0		0	4			100.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	93.75		253,975,250	87.50						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
4.40		**Program Pengembangan Wilayah Perbatasan**	**Jumlah segmen batas desa yang disepakati**	**segmen**	**450**			**0**		**200**			**0**			**0**			**0.00**		**Sekretariat Daerah**	-
			Jumlah kecamatan yang dibakukan toponiminya	**kecamatan**	**6**			**1**		**0**			**0**			**1**			**16.67**		**Sekretariat Daerah**	-
			Jumlah segmen batas kabupaten yang disepakati	**segmen**	**2**			**1**		**1**			**0**			**1**			**50.00**		**Sekretariat Daerah**	-
4.40.1		Penegasan perbatasan dalam wilayah daerah	Jumlah segmen batas desa yang dilacak	segmen	100		3,730,121,000	0	0	200		286,915,000	0		31,078,250	0			0.00		Sekretariat Daerah	-
4.40.4		Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Jumlah segmen batas kabupaten yang dilacak	segmen	1		2,289,150,000	2	0	1		81,820,000	0		38,385,000	2			200.00		Sekretariat Daerah	-
													Rata - rata kinerja (%)	0.00		69,463,250	100.00					
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi					
			Jumlah kesepakatan Kepala Daerah yang dihasilkan	dokumen	2			1		1			1			2			100.00		Sekretariat Daerah	-
4.34		**Program Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah**	**Persentase SKPD yang menyampaikan data LPPD secara lengkap**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	-
			Persentase SKPD yang menyampaikan data LKPJ secara lengkap	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	-
			Persentase fasilitasi sengketa/konflik sosial yang ditangani	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	-
			Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	-
			Persentase kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai standar	**%**	**100**			**0**		**55**			**55**			**55**			**55.00**		**Sekretariat Daerah**	-
			Persentase fasilitasi administrasi pejabat negara yang diselesaikan	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	-
			Persentase kerjasama daerah yang difasilitasi	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	-
			Persentase hasil koordinasi & monev DKTP yang ditindaklanjuti	**%**	**100**			**100**		**0**			**0**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	-
4.34.1		Monitoring dan Pelaporan atas penyelenggaraan PATEN	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran monev penyelenggaraan PATEN sesusi standart	kecamatan	4		533,480,000	0	0	6		45,320,000	6		40,072,000	6			150.00		Sekretariat Daerah	-
4.34.2		Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase dokumen kerjasama daerah yang diveryfikasi	%	100		918,500,000	100	0	100		45,500,000	100		44,450,000	100			100.00		Sekretariat Daerah	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
4.34.3		Koordinasi dan fasilitasi kedudukan, hak dan kewajiban pejabat negara	Persentase penyelesaian kelengkapan administrasi pejabat negara	%	100		465,748,940	100	0	100		14,650,000	100		945	100			100.00		Sekretariat Daerah	-
4.34.4		Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi data LPPD	Perangkat Daerah	37		719,035,600	37	0	37		75,568,000	37		74,233,000	37			100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi data LKPJ	perangkat daerah	37			37		37			37			37			100.00		Sekretariat Daerah	-
4.34.5		Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah sisa	Jumlah koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan hari besar nasional dan daerah	kali	10		757,636,667	10	0	10		122,500,000	10		94,275,250	10			100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa/konflik sosial	kali	2			2		2			2			2			100.00		Sekretariat Daerah	-
4.34.7		Monitoring dan pelaporan atas penyelenggaraan DKTP	Jumlah laporan hasil monev penyelenggaraan DKTP	laporan	4		689,460,000	4	0	0		6,000,000	0		0	4			100.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	93.75		253,975,250	87.50						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Tinggi						
4.40		**Program Pengembangan Wilayah Perbatasan**	**Jumlah segmen batas desa yang disepakati**	**segmen**	**450**			**0**		**200**			**0**			**0**			**0.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Jumlah kecamatan yang dibakukan toponiminya	**kecamatan**	**6**			**1**		**0**			**0**			**1**			**16.67**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Jumlah segmen batas kabupaten yang disepakati	**segmen**	**2**			**1**		**1**			**0**			**1**			**50.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
4.40.1		Penegasan perbatasan dalam wilayah daerah	Jumlah segmen batas desa yang dilacak	segmen	100		3,730,121,000	0	0	200		286,915,000	0		31,078,250	0			0.00		Sekretariat Daerah	-
4.40.4		Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Jumlah segmen batas kabupaten yang dilacak	segmen	1		2,289,150,000	2	0	1		81,820,000	0		38,385,000	2			200.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	0.00		69,463,250	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
5	Meningkatnya kualitas pelayanan birokrasi		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standart Pelayanan Publik	%	100					27			27			27			27.00		Sekretariat Daerah	-
5.43		**Program Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat daerah**	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen Standar Pelayanan Publik**	**%**	**100**			**25**		**27**			**27**			**27**			**27.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
5.43.9		Fasilitasi peningkatan pelayanan publik	Jumlah Perangkat daerah yang dibina dalam penerapan Standar Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	37		732,540,000		0	10		88,580,000	10		26,740,000	10			27.03		Sekretariat Daerah	-
													Rata - rata kinerja (%)	27.00		26,740,000	100.00					
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi					
6	Meningkatnya kelengkapan regulasi BUMD		Tingkat kelengkapan regulasi BUMD	%	100			100		100			75			75			75.00		Sekretariat Daerah	-
6.36		**Program Peningkatan Kelembagaan Ekonomi Daerah**	**Persentase regulasi BUMD yang dibuat**	**%**	**100**			**50**		**100**			**50**			**50**			**50.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
6.36.1		Pengembangan BUMD	Jumlah draft regulasi BUMD yang dibuat	dokumen	1		309,959,998	6	0	2		168,092,900	1		62,320,000	7			700.00		Sekretariat Daerah	-
													Rata - rata kinerja (%)	inf		62,320,000	inf					
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat Rendah					
7	Terkendalinya pelaksanaan pembangunan		Tingkat kesesuaian pelaksanaan administrasi pembangunan dengan perencanaan	%	100			100		100			100			100			100.00		Sekretariat Daerah	-
7.25		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**Persentase realisasi administrasi pembangunan yang dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
7.25.1		Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi	perangkat daerah	37		351,563,800	37	3,764,000	37		5,500,000	37		5,490,400	37			100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan RFK dengan benar	perangkat daerah	37			37		37			35			35			94.59		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan pembangunan	perangkat daerah	37			37		37			37			37			100.00		Sekretariat Daerah	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Jumlah draft regulasi tentang bidang pembangunan yang telah disusun	draft	5			0		1			0			0			0.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	73.50		5,490,400	73.50						
												Predikat Kinerja	Sedang			Sedang						
7.26		**Program Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan**	**Persentase realisasi pelaksanaan PBJ melalui SPSE**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
7.26.1		Pembinaan Pelayanan PBJ Pemerintah	Jumlah bulan kerja pada proses PBJ yang dapat dilayani oleh SPSE	bulan	12		3,606,079,250	12	455,095,921	12		481,744,000	12		456,901,260	12			100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah peserta yang dapat memahami dan dapat memfungsikan SPSE	orang	80			40		50			50			90			112.50		Sekretariat Daerah	-
7.26.2		Fasilitasi Pelaksanaan PBJ Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang difaslitasi PBJ sesuai aturan	perangkat daerah	37		1,852,375,352	37	139,599,346	37		29,625,000	37		21,623,742	37			100.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	87.33		478,525,002	126.67						
												Predikat Kinerja	Tinggi			Sangat tinggi						
7.50		**Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa**	**Persentase pemenuhan kompetensi sumber daya manusia bidang PBJ**	**%**	**40**			**0**		**20**			**0**			**0**			**0.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
7.50.1		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah peserta sosialisasi/workshop sistem pengadaan barang/jasa	orang			0	0	0	50		161,975,000	51		76,940,500	51			5,100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah personil UKPBJ yg memenuhi kompetensi	orang				0		5			0			0			0.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	nan		76,940,500	inf						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat Rendah						
			Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan aturan	%	100			0		100			100			100			100.00		Sekretariat Daerah	-
7.25		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**Persentase realisasi administrasi pembangunan yang dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
7.25.1		Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi	perangkat daerah	37		351,563,800	37	3,764,000	37		5,500,000	37		5,490,400	37			100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan RFK dengan benar	perangkat daerah	37			37		37			35			35			94.59		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan pembangunan	perangkat daerah	37			37		37			37			37			100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah draft regulasi tentang bidang pembangunan yang telah disusun	draft	5			0		1			0			0			0.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	73.50		5,490,400	73.50						
												Predikat Kinerja	Sedang			Sedang						
7.26		**Program Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan**	**Persentase realisasi pelaksanaan PBJ melalui SPSE**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
7.26.1		Pembinaan Pelayanan PBJ Pemerintah	Jumlah bulan kerja pada proses PBJ yang dapat dilayani oleh SPSE	bulan	12		3,606,079,250	12	455,095,921	12		481,744,000	12		456,901,260	12			100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah peserta yang dapat memahami dan dapat memfungsikan SPSE	orang	80			40		50			50			90			112.50		Sekretariat Daerah	-
7.26.2		Fasilitasi Pelaksanaan PBJ Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang difaslitasi PBJ sesuai aturan	perangkat daerah	37		1,852,375,352	37	139,599,346	37		29,625,000	37		21,623,742	37			100.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	87.33		478,525,002	126.67						
												Predikat Kinerja	Tinggi			Sangat tinggi						
7.50		**Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa**	**Persentase pemenuhan kompetensi sumber daya manusia bidang PBJ**	**%**	**40**			**0**		**20**			**0**			**0**			**0.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
7.50.1		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah peserta sosialisasi/workshop sistem pengadaan barang/jasa	orang			0	0	0	50		161,975,000	51		76,940,500	51			5,100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah personil UKPBJ yg memenuhi kompetensi	orang				0		5			0			0			0.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	nan		76,940,500	inf						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat Rendah						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
8	Meningkatnya kualitas hubungan ulama dan umara dalam pembangunan daerah		Persentase rekomendasi hasil pertemuan yang dilaksanakan sesuai kesepakatan	%	100			0		100			100			100			100.00		Sekretariat Daerah	-
8.32		**Program Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase pertemuan keagamaan yang dilaksanakan**	**%**	**100**			**93.75**		**100**			**76**			**76**			**76.00**		**Sekretariat Daerah**	-
			Persentase bantuan hibah yang disalurkan sesuai aturan dan tepat sasaran	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	-
			Persentase penerima hibah yang melaporkan pertanggungjawaban tepat waktu	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	-
8.32.1		Bina Mental Keagamaan	Jumlah pertemuan ulama dan umara yang dilaksanakan	pertemuan	2		11,272,165,649	2	0	2		1,526,856,668	2		1,283,233,000	2			100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah pertemuan bina mental keagamaan yang dilaksanakan	pertemuan	26			15		27			27			27			103.85		Sekretariat Daerah	-
8.32.4		Koordinasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan	Jumlah penerima bantuan hibah yang di monitoring	penerima	27		1,742,192,585	81	0	27		30,677,000	25		18,834,150	106			392.59		Sekretariat Daerah	-
8.32.5		Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama serta Pengembangan Syiar-Syiar Agama.	Jumlah kegiatan syiar-syiar keagamaan yang dilaksanakan	kali	144		4,100,054,225	39	0	149		1,830,989,400	106		1,589,335,275	106			73.61		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	92.00		2,891,402,425	165.75						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
9	Meningkatnya pelayanan kemasyarakatan		Persentase jumlah mahasiswa/santri yang terfasilitasi beasiswa yang memenuhi komitmen sesuai perjanjian	%	100			100		100			100			100			100.00		Sekretariat Daerah	-
9.7		**Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi**	**Persentase Kerukunan Mahasiswa Murakata Putera dan Puteri di luar daerah yang terlayani**	**%**	**100**			**75**		**88**			**88**			**88**			**88.00**		**Sekretariat Daerah**	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
9.7.1		fasilitasi pembangunan /rehabilitasi asrama mahasiswa di luar daerah	Jumlah asrama yang dibangun	unit	1		28,306,670,096	1	0	1		4,869,860,000	1		4,563,190,350	2			200.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah asrama yang direhabilitasi	unit				0		0			0			0			0.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		4,563,190,350	200.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
9.32		**Program Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase koordinasi kesehatan dan olahraga yang dilaksanakan**	**%**	**100**			**100**		**100**			**59**			**59**			**59.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
9.32.6		Koordinasi Pembinaan Kesehatan dan Olahraga	Jumlah koordinasi pembinaan kesehatan dan olahraga yang difasilitasi dengan baik	kali			0		0	24		17,460,000	14		13,595,000	14			1,400.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	nan		13,595,000	inf						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat Rendah						
9.35		**Program Peningkatan dan Pengembangan SDM**	**Persentase mahasiswa/santri yang menerima bantuan beasiswa**	**%**	**100**			**133**		**100**			**76**			**76**			**76.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
9.35.1		Pemberian Bantuan dan Beasiswa Pendidikan Tinggi	Jumlah mahasiswa/santri yang menerima bantuan beasiswa	orang	25		3,906,480,000	20	0	25		1,749,150,000	24		780,014,625	24			96.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah santri yang menerima bantuan beasiswa	orang				9		3			3			12			1,200.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	96.00		780,014,625	496.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
			Persentase jumlah asrama yang berfungsi dengan baik	%	100			100		100			100			100			100.00		Sekretariat Daerah	-
9.7		**Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi**	**Persentase Kerukunan Mahasiswa Murakata Putera dan Puteri di luar daerah yang terlayani**	**%**	**100**			**75**		**88**			**88**			**88**			**88.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
9.7.1		fasilitasi pembangunan /rehabilitasi asrama mahasiswa di luar daerah	Jumlah asrama yang dibangun	unit	1		28,306,670,096	1	0	1		4,869,860,000	1		4,563,190,350	2			200.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah asrama yang direhabilitasi	unit				0		0			0			0			0.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		4,563,190,350	200.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
9.32		**Program Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase koordinasi kesehatan dan olahraga yang dilaksanakan**	**%**	**100**			**100**		**100**			**59**			**59**			**59.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
9.32.6		Koordinasi Pembinaan Kesehatan dan Olahraga	Jumlah koordinasi pembinaan kesehatan dan olahraga yang difasilitasi dengan baik	kali			0		0	24		17,460,000	14		13,595,000	14			1,400.00		Sekretariat Daerah	-
													Rata - rata kinerja (%)			nan		13,595,000	inf			
													Predikat Kinerja			Sangat Rendah			Sangat Rendah			
9.35		**Program Peningkatan dan Pengembangan SDM**	**Persentase mahasiswa/santri yang menerima bantuan beasiswa**	**%**	**100**			**133**		**100**			**76**			**76**			**76.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
9.35.1		Pemberian Bantuan dan Beasiswa Pendidikan Tinggi	Jumlah mahasiswa/santri yang menerima bantuan beasiswa	orang	25		3,906,480,000	20	0	25		1,749,150,000	24		780,014,625	24			96.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah santri yang menerima bantuan beasiswa	orang				9		3			3			12			1,200.00		Sekretariat Daerah	-
													Rata - rata kinerja (%)			96.00		780,014,625	496.00			
													Predikat Kinerja			Sangat tinggi			Sangat tinggi			
10	Meningkatnya pelayanan publik di bidang kehumasan		Persentase klarifikasi isu/berita negatif tentang kebijakan Pimpinan Daerah	%	100			0		100			100			100			100.00		Sekretariat Daerah	-
10.44		**Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi,dokumentasi kehumasan**	**Persentase pelayanan kehumasan yang sesuai standar**	**%**	**100**			**0**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
10.44.1		Dokumentasi kebijakan keberhasilan pembangunan	Jumlah pelayanan kehumasan sesuai SOP	pelayanan	3600		1,300,830,000	0	0	260		322,985,000	407		311,262,700	407			11.31		Sekretariat Daerah	-
													Rata - rata kinerja (%)			11.00		311,262,700	156.00			
													Predikat Kinerja			Sangat Rendah			Sangat tinggi			
10.45		**Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah**	**Persentase informasi publik yang disebarluaskan melalui media cetak/elektronik**	**%**	**100**			**0**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
10.45.1		Penyebarluasan informasi publik	Jumlah berita daerah yang disusun sesuai standar	berita daerah	9908		6,553,800,000	0	0	1680		2,044,740,000	1680		1,901,041,304	1680			16.96		Sekretariat Daerah	-
													Rata - rata kinerja (%)			16.00		1,901,041,304	100.00			
													Predikat Kinerja			Sangat Rendah			Sangat tinggi			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
11	Meningkatnya kelancaran aktivitas Kepala Daerah		Hasil survey kepuasan Kepala Daerah terhadap pelayanan keprotokolan	IKM	85			0		baik			85			85			100.00		Sekretariat Daerah	-
11.46		**Program pelayanan Keprotokolan**	**Persentase pelayanan keprotokolan**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
11.46.1		Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Jumlah cakupan pelayan keprotokolan sesuai aturan	pejabat	9		11,130,338,400	1	0	2		2,755,038,000	2		2,482,685,633	2			22.22		Sekretariat Daerah	-
11.46.2		Peningkatan Pelayanan Administrasi Pimpinan	Jumlah cakupan pelayanan administrasi pimpinan sesuai aturan	pejabat	9		2,726,248,400	1	0	2		633,600,000	2		265,697,206	2			22.22		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	22.00		2,748,382,839	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi						
11.47		**Program Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan**	**Persentase pelayanan rumah tangga pimpinan**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
11.47.1		Peningkatan Pelayanan Rumah tangga Pimpinan dan perangkat daerah	Jumlah cakupan pelayanan rumah tangga pimpinan dan perangkat daerah yang dilayani dengan baik	rumah jabatan	3		6,420,738,000	2	0	3		4,432,013,341	3		3,912,257,475	3			100.00		Sekretariat Daerah	-
11.47.2		Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah tangga pimpinan	Jumlah sarana dan prasarana rumah tangga pimpinan yang dipelihara dengan baik	rumah jabatan/dinas	3		1,302,485,000	2	0	3		471,600,000	3		402,616,579	3			100.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		4,314,874,054	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Nilai SAKIP Pemda	predikat	80.01			57.87		B			62,5			62,5			77.49		Sekretariat Daerah	-
12.27		**Program Pembinaan dan Pengaturan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah**	**Persentase kelembagaan yang disusun sesuai ketentuan**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan analisis jabatan sesuai aturan	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan analisis beban kerja sesuai aturan	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan evaluasi jabatan sesuai aturan	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
12.27.1		Perubahan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah produk hukum daerah tentang kelembagaan	dokumen	2		355,000,000	3	0	2		34,500,000	2		32,980,500	5			250.00		Sekretariat Daerah	-
12.27.5		Penerapan Anjab, ABK dan Evjab	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi penerapan Analisis Jabatan (Anjab)	Perangkat Daerah	37		248,250,000	37	0	37		119,450,000	37		97,038,375	37			100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi penerapan Analisis Beban Kerja (ABK)	Perangkat Daerah	37			37		37			37			37			100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi penerapan Evaluasi Jabatan (Evjab)	Perangkat Daerah	37			37		37			37			37			100.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		130,018,875	137.50						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
12.42		**Program Penerapan SAKIP**	**Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah rata-rata baik**	**%**	**100**			**54.84**		**60**			**75.68**			**75.68**			**75.68**		**Sekretariat Daerah**	**-**
12.42.11		Fasilitasi SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki dokumen kinerja lengkap	Perangkat Daerah	37		1,190,090,000	37	0	37		306,560,000	37		294,896,750	37			100.00		Sekretariat Daerah	-
12.42.12		Penyusunan Laporan Kinerja Pemda	Jumlah Laporan Kinerja Pemda yang sesuai aturan	dokumen	1		236,665,000	1	0	1		71,500,000	1		32,192,000	1			100.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		327,088,750	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
13	Kelancaran bidang ekonomi		Persentase rekomendasi penyelesaian bidang ekonomi yang selesai ditindaklanjuti	%	100			0		100			50			50			50.00		Sekretariat Daerah	-
13.29		**Program koordinasi Penyusunan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase penyelesaian permasalahan bidang ekonomi yang difasilitasi**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Persentase hasil kajian yang dilaksanakan	**%**	**100**			**100**		**100**			**75**			**75**			**75.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
			Jumlah dokumen standar satuan harga Kab.HST yang disusun	**dokumen**	**2**			**2**		**2**			**1**			**1**			**50.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
13.29.1		Penyusunan Kebijakan Tentang Perekonomian Daerah	Jumlah dokumen draft kajian tentang bidang ekonomi	dokumen	1		372,360,000	1	0	1		107,540,000	1		103,597,800	2			200.00		Sekretariat Daerah	-
13.29.2		Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Perekonomian	Frekuensi rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan bidang ekonomi	kali	4		651,678,000	1	0	4		47,900,000	2		12,913,750	2			50.00		Sekretariat Daerah	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
13.29.3		Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah SKPD yang mengumpulkan bahan penyusunan standar satuan harga Kab.HST sesuai kebutuhan SKPD	SKPD	2		711,245,000	23	0	26		147,130,000	14		66,814,000	14			700.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah koordinasi dalam mempersiapkan bahan penyusunan standar satuan harga Kab.HST	kali				2		4			1			1			100.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	283.33		183,325,550	109.33						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
14	Meningkatnya pelaku usaha pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C) di daerah yang taat aturan		Persentase pelaku usaha pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C) di daerah yang taat aturan	%	4.5			0		0			0			0			0.00		Sekretariat Daerah	-
14.49		**Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan**	**Persentase fasilitasi pelaku usaha di bidang pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C) yang dibina untuk memiliki izin usaha**	**%**	**0**			**0**		**0**			**0**			**0**			**0.00**		**Sekretariat Daerah**	**-**
14.49.1		Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan	Jumlah dokumen tentang pelaku usaha di bidang pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C)	buah			368	0	0	1		111,212,000	1		103,420,000	1			100.00		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah pelaku usaha di bidang pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C) yang menjadi peserta sosialisasi	orang				0		0			0			0			0.00		Sekretariat Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	nan		103,420,000	inf						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat Rendah						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)																				
1	Peningkatan pelayanan terhadap aktifitas Pimpinan dan anggota DPRD		Prosentasi tingkat kepuasan pelayanan Pimpinan dan anggota DPRD	%	100			100		80			85			85			85.00		Sekretariat DPRD	-
1.19		**Program peningkatan pelayanan Pimpinan dan anggota DPRD**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Umum dan Kehumasan**	**%**	**80**			**100**		**80**			**80**			**80**			**100.00**		**Sekretariat DPRD**	**-**
1.19.2		Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah hearing DPRD yang dilayani	kali	100		509,744,709	20	0	12		59,250,000	3		3,278,750	23			23.00		Sekretariat DPRD	-
1.19.5		Kegiatan Reses	Jumlah Reses DPRD yang dilayani	kali	3		8,182,634,316	9	0	3		832,100,000	2		713,470,000	11			366.67		Sekretariat DPRD	-
1.19.11		Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang dilayani pemeriksaan kesehatan	Orang	30		961,560,906	84	0	30		246,660,000	29		152,077,800	113			376.67		Sekretariat DPRD	-
1.19.17		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd	Jumlah Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani	kali	8		19,219,713,590	22	0	7		3,491,010,500	8		2,690,013,655	30			375.00		Sekretariat DPRD	-
													Rata - rata kinerja (%)			66.25		3,558,840,205	340.25			
													Predikat Kinerja			Sedang			Sangat tinggi			
1.20		**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Umum dan Kehumasan**	**%**	**80**			**100**		**80**			**85**			**85**			**106.25**		**Sekretariat DPRD**	**-**
1.20.6		Publikasi dan penyebaran informasi	Jumlah Materi informasi dan publikasi yang disebarkan	buah	100		8,217,235,540	9	0	100		147,450,000	100		143,348,000	109			109.00		Sekretariat DPRD	-
													Rata - rata kinerja (%)			100.00		143,348,000	109.00			
													Predikat Kinerja			Sangat tinggi			Sangat tinggi			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.24		**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan**	**%**	**80**			**100**		**80**			**80**			**80**			**100.00**		**Sekretariat DPRD**	**-**
1.24.1		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Raperda yang dilayani	kali	100		38,655,625,726	24	0	100		6,838,669,800	92		4,253,636,186	92			92.00		Sekretariat DPRD	-
1.24.3		Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang dilayani	kali	100		5,777,881,281	146	0	100		542,784,500	75		418,793,911	221			221.00		Sekretariat DPRD	-
1.24.6		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani	kali	100		16,582,634,802	24	0	24		5,027,268,000	23		4,236,507,092	47			47.00		Sekretariat DPRD	-
1.24.7		Konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah konsultasi pimpinan dan anggota DPRD yang dilayani	kali	100		14,764,851,713	27	0	10		3,624,629,000	11		3,564,766,670	38			38.00		Sekretariat DPRD	-
1.24.14		Rapat-rapat paripurna	Jumlah Rapat Paripurna yang dilayani	kali	100		1,152,104,353	101	0	100		209,680,000	74		42,848,500	175			175.00		Sekretariat DPRD	-
1.24.15		Peningkatan Pelayanan Pembentukan Peraturan Perundangan	Jumlah Naskah Akademis/rancangan Perda Inisiatif DPRD	dokumen	100		0	18	0	2		845,210,000	0		641,956,000	18			18.00		Sekretariat DPRD	-
Rata - rata kinerja (%)													45.83		13,158,508,359	327.17						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah			Sangat tinggi						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah RSUD H. Damanhuri Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Kesehatan																				
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Pasien		Pencapaian kelas rumah sakit menjadi kelas B	Tipe/Kelas	95			0		80			0			0			0.00		RSUD H. Damanhuri	-
			Nilai Akreditasi Rumah sakit	nilai	100	100		270		100	100		100	100		370	100		370.00		RSUD H. Damanhuri	Karakter
			Indeks Kepuasan Pasien	persen	100			90		100			98			98			98.00		RSUD H. Damanhuri	-
1.26		**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata**	**Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar**	**%**	**100**			**60**		**80**			**80**			**80**			**80.00**		**RSUD H. Damanhuri**	**-**
			Persentase kecukupan alat kesehatan yang sesuai kelas RS	**%**	**100**	**100**		**80**		**80**	**80**		**80**	**80**		**80**	**80**		**80.00**		**RSUD H. Damanhuri**	**Karakter**
			Persentase sarana dan prasarana sesuai standart	**%**	**100**	**100**		**60**		**70**	**70**		**70**	**70**		**70**	**70**		**70.00**		**RSUD H. Damanhuri**	**Karakter**
1.26.1		Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran	Persentasi Pengadaan peralatan kesehatan sesuai standar	%	100		179,322,492,531	80	10,101,402,554	90		4,183,280,400	90		3,954,151,563	90			90.00		RSUD H. Damanhuri	-
1.26.2		Kegiatan Pembangunan/Peningkatan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah sarana yang dibangun dan direhabilitasi	buah	100		225,981,944,000	1	26,177,342,588	5		2,816,718,600	5		2,575,000,010	5			5.00		RSUD H. Damanhuri	-
1.26.4		Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit	Jumlah peralatan dan perlengkapan RS yg diadakan	%	100		3,400,000,000	80	936,740,560	100		0	95		0	95			95.00		RSUD H. Damanhuri	-
												Rata - rata kinerja (%)	63.33		6,529,151,573	98.33						
												Predikat Kinerja	Rendah			Sangat tinggi						
1.44		**Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit**	**Indeks kepuasan masyarakat terkait mutu pelayanan keperawatan, pelayanan medis, dan penunjang**	**persen**	**100**			**210**		**80**			**115**			**325**			**325.00**		**RSUD H. Damanhuri**	**-**
			Persentasi Prasarana yang berfungsi baik	**persen**	**100**			**180**		**85**			**145**			**325**			**325.00**		**RSUD H. Damanhuri**	**-**
			Persentasi sarana yg berfungsi baik	**persen**	**100**			**75**		**80**			**80**			**80**			**80.00**		**RSUD H. Damanhuri**	**-**
			Persentasi Pengelolaan Sanitasi dan lingkungan yang sesuai standart	**persen**	**100**			**80**		**90**			**88**			**88**			**88.00**		**RSUD H. Damanhuri**	**-**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Persentasi ketersediaan alat kesehatan dasar	**persen**	**100**			**80**		**90**			**88**			**88**			**88.00**		**RSUD H. Damanhuri**	-
			jumlah tenaga paramedis yang terlatih sesuai standar	**persen**	**100**			**190**		**90**			**88**			**278**			**278.00**		**RSUD H. Damanhuri**	-
			Persentasi SDM pelayanan medis yang bersertifikasi	**persen**	**100**			**70**		**90**			**87**			**87**			**87.00**		**RSUD H. Damanhuri**	-
			Persentasi kelancaran pelayanan perkantoran RSUD	**persen**	**100**			**85**		**90**			**90**			**90**			**90.00**		**RSUD H. Damanhuri**	-
			Persentasi Nilai hasil audit	**persen**	**100**			**210**		**100**			**100**			**310**			**310.00**		**RSUD H. Damanhuri**	-
			Rasio Efektifitas	**%**	**85**			**215**		**85**			**105**			**320**			**376.47**		**RSUD H. Damanhuri**	-
			Persentase SDM keperawatan yang bersertifikasi	**%**	**90**	**90**		**70**		**80**	**80**		**80**	**80**		**80**	**80**		**88.89**		**RSUD H. Damanhuri**	**Karakter**
			Indeks BOR	**%**	**80**	**80**		**70**		**80**	**80**		**80**	**80**		**80**	**80**		**100.00**		**RSUD H. Damanhuri**	**Karakter**
			Rata-rata lama pasien dirawat	**hari**	**4**	**4**		**4**		**4**	**4**		**4**	**4**		**4**	**4**		**100.00**		**RSUD H. Damanhuri**	**Karakter**
			Rata-rata lama Tempat Tidur tidak ditempati	**hari**	**2**	**2**		**2**		**2**	**2**		**2**	**2**		**2**	**2**		**100.00**		**RSUD H. Damanhuri**	**Karakter**
1.44.3		Kegiatan Operasional BLUD	Jumlah pasien yang memakai identitas	orang	18000		9,820,000,000	45000	45,749,889,236	20000		60,819,259,600	250000		0	295000			1,638.89		RSUD H. Damanhuri	-
			Jumlah MCU	orang	550			200		300			450			450			81.82		RSUD H. Damanhuri	-
			Jumlah perawat yang berpakaian sesuai standart	Stel	450			710		400			400			1110			246.67		RSUD H. Damanhuri	-
			Jumlah bahan linen yang disediakan	Lembar	620			1000		1200			1500			1500			241.94		RSUD H. Damanhuri	-
			Jumlah makan minum petugas jaga yang disediakan	Kotak	65000			135000		55000			8000			143000			220.00		RSUD H. Damanhuri	-
			Persentase pemeriksaan kesehatan karyawan	%		100		25		80	80		80	80		80	80		8,000.00		RSUD H. Damanhuri	Karakter
			Persentase ketepatan waktu pemberian makan pasien	%		100		95		100	100		100	100		100	100		10,000.00		RSUD H. Damanhuri	Karakter
			Persentase kelengkapan persediaan obat	%		100		100		100	100		100	100		100	100		10,000.00		RSUD H. Damanhuri	Karakter
			Persentase kelengkapan BAKHP	%		100		100		100	100		100	100		100	100		10,000.00		RSUD H. Damanhuri	Karakter
			Persentase ketepatan terapi gizi/diet pasien	%		100		100		100	100		100	100		100	100		10,000.00		RSUD H. Damanhuri	Karakter
			Persentase kelengkapan diagnosis penunjang	%		100		90		100	100		100	100		100	100		10,000.00		RSUD H. Damanhuri	Karakter
			jumlah tenaga spesialis yang tersedia	orang		26		20		24	24		24	24		24	24		2,400.00		RSUD H. Damanhuri	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	206.83		0	248.92						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Pengawasan																				
1	Meningkatkan kepatuhan terhadap penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan/pengawasan		Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan : a. BPK b.Inspektorat dan Persentase nilai temuan keuangan yang selesai ditindaklanjuti /dikembalikan ke kas daerah/negara sesuai hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat	%	98			180		80			75			255			260.20		Inspektorat	-
1.10		**Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**Persentase SKPD/Obrik yang telah selesai menindaklanjuti temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan**	**%**	**98**			**132**		**80**			**44**			**176**			**179.59**		**Inspektorat**	**-**
1.10.1		Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Jumlah obrik yang diperiksa	obrik	80		3,394,403,800	201	0	80		376,830,000	222		315,375,250	423			528.75		Inspektorat	-
1.10.2		Penanganan kasus-kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah.	Jumlah kasus yang ditangani	Kasus	12		297,146,100	5	0	12		70,430,000	5		23,637,000	5			41.67		Inspektorat	-
1.10.5		Tindak lanjut temuan hasil pengawasan APIP	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Temuan BPK,BPKP, Inspektorat Prov/Kab	120		633,756,000	46	0	85		92,835,000	44		22,537,450	44			36.67		Inspektorat	-
1.10.7		Sosialisasi dan Koordinasi Implementasi Pelaksanaan Good Governance Pemerintah Kabupaten HST	Jumlah kegiatan sosialisasi & Implementasi GG	Kegiatan	5		2,168,408,901	2	0	5		1,651,942,400	4		1,355,088,730	4			80.00		Inspektorat	-
1.10.11		Evaluasi tindaklanjut temuan hasil pengawasan	Jumlah rapat hasil pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut eksternal	Laporan	6		253,000,000	0	0	6		99,880,000	4		77,015,750	4			66.67		Inspektorat	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		1,793,654,180	153.20						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dilingkungan pemerintah daerah		Persentase hasil evaluasi SAKIP Pemda yang mendapat nilai baik terhadap evaluasi Internal	%	100			42		80			62			104			104.00		Inspektorat	-
2.15		**Program Peningkatan Sistem Akuntablitas Kinerja**	**Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapat nilai baik (Minimal B)**	**%**	**100**			**42**		**67**			**62**			**104**			**104.00**		**Inspektorat**	**-**
2.15.1		Kegiatan Evaluasi Laporan kinerja Perangkat Daerah dan review LKIP Pemda	Jumlah SKPD yang mendapat nilai baik	SKPD	39		276,000,000	12	0	25		47,727,750	25		30,304,550	37			94.87		Inspektorat	-
													Rata - rata kinerja (%)			64.00		30,304,550	148.00			
													Predikat Kinerja			Rendah			Sangat tinggi			
3	Meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat		Level Kapabilitas APIP	level	3			level		3 dengan catatan			level			level			0.00		Inspektorat	-
3.11		**Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas (APIP)**	**Persentase tenaga APIP yang bersertifikat (sesuai Standar Kompetensi)**	**%**	**100**			**33**		**60**			**105**			**105**			**105.00**		**Inspektorat**	**-**
3.11.1		Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.	Jumlah tenaga pemeriksa yang memiliki serifikat sesuai jenjang	orang	15		1,282,050,000	19	0	10		31,200,000	2		17,380,000	21			140.00		Inspektorat	-
3.11.3		Bimbingan teknis Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah tenaga APIP yang memahami tentang tehnis pengawasan	orang	13		498,000,000	8	0	30		58,057,500	30		38,494,100	38			292.31		Inspektorat	-
3.11.4		Pendidikan dan Pelatihan Penunjang tugas pokok pengawasan	Jumlah tenaga APIP yang mengikuti diklat pengembangan profesi	0rang	20		310,000,000	8	0	7		16,500,000	4		8,040,000	12			60.00		Inspektorat	-
													Rata - rata kinerja (%)			87.67		63,914,100	169.00			
													Predikat Kinerja			Tinggi			Sangat tinggi			
3.12		**Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	**Persentase Kelengkapan Kebijakan Sistem dan Prosedur**	**%**	**100**			**80**		**80**			**40**			**40**			**40.00**		**Inspektorat**	**-**
3.12.1		Kegiatan Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah pedoman pengawasan (SOP	SOP	5		150,000,000	0	0	5		16,750,000	2		2,874,375	2			40.00		Inspektorat	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.12.3		Kegiatan Pelaksanaan penanganan laporan hasil kekayaan ASN	Jumlah ASN yang melaporkan kekayaan	PNS (LHKSN dan eLHKPN)	3500		90,000,000	1500	0	2500		1,405,000	0		0	0			0.00		Inspektorat	-
												Rata - rata kinerja (%)	20.00		2,874,375	20.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat Rendah						
4	Meningkatkan Implementasi SPIP		Level Maturitas SPIP	level	3	dengan catatan		2		3	3 dengan catatan		2	level		2	level		66.67		Inspektorat	Karakter
4.13		**Program Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kdh**	**Persentase SKPD yang memenuhi level Maturitas SPIP**	**%**	**90**			**0**		**40**			**8**			**8**			**8.89**		**Inspektorat**	**-**
			Persentase SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	**%**	**90**			**0**		**40**			**4**			**4**			**4.44**		**Inspektorat**	**-**
4.13.1		Kegiatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah SKPD yang menerapkan maturitas SPIP secara efektif	SKPD	39		310,000,000	0	0	8		38,910,000	8		5,428,500	8			20.51		Inspektorat	-
4.13.2		Kegiatan Pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah SKPD yang dapat ditetapkan sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK)	SKPD	20		126,000,000	0	0	8		4,862,500	4		0	4			20.00		Inspektorat	-
												Rata - rata kinerja (%)	20.00		5,428,500	75.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sedang						
5	Meningkatkan akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemkab. HST		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah (SKPD) yang menyajikan sudah sesuai dengan SAP	%	100			180		60			100			280			280.00		Inspektorat	-
5.14		**Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah (SKPD) yang telah direviu**	**%**	**100**			**0**		**60**			**100**			**100**			**100.00**		**Inspektorat**	**-**
5.14.9		Reviu Rencana Kegiatan	Jumlah laporan reviu RPJMD,RKPD ,RKA	Laporan/jml reviu	3		238,000,000	3	0	3		95,900,000	5		60,252,200	5			166.67		Inspektorat	-
5.14.13		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan SKPD yang direviu tepat waktu	SKPD	39		258,000,000	74	0	37		58,450,000	37		36,730,500	111			284.62		Inspektorat	-
												Rata - rata kinerja (%)	130.00		96,982,700	233.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Perencanaan																				
1	Meningkatnya pendanaan pembangunan		Jumlah dana APBN, DAK dan APBD Provinsi di Kab. HST	Rp	1E+10			3E+11		3E+09			2,2E+11			2,2E+11			1,759.68		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
1.30		**Program Peningkatan Pembiayaan Pembangunan**	**Persentase kegiatan yang disetujui oleh Pemerintah Pusat (APBN dan DAK) dan Pemerintah Provinsi**	**%**	**60**			**36**		**40**			**0**			**0**			**0.00**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**-**
1.30.1		Koordinasi Penyusunan Program dan Pembiayaan Pembangunan	Jumlah usulan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan (APBN, APBD Prov dan DAK)	usulan	3		309,703,279	1159	0	600		21,895,000	1030		20,742,250	2189			72,966.67		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	34,333.00		20,742,250	364.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
2	Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan daerah		Persentase capaian target RPJMD	%	100			37		lebih atau sama dengan 60			55			55			55.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
			Persentase capaian target RKPD	%	100			91		95			92			92			92.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD	%	50			8		30			19			19			38.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD	%	100					95			100			100			100.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
2.15		**Program Pengembangan Data /informasi**	**% kelengkapan data dan informasi yang valid**	**%**	**100**			**85**		**90**			**85**			**85**			**85.00**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**-**
2.15.2		Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Persentase Jumlah data yang terkumpul dan disusun	%	100	4	313,444,000	0	0	85	lebih besar atau sama dengan 85%	43,485,000	0	2	41,383,000	0	2		0.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Karakter
2.15.5		Penyusunan profile daerah	jumlah buku profil daerah yang disusun	buku	1		300,000,000	1	0	1		90,770,000	0		76,792,000	1			100.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
2.15.6		Survey Persepsi Publik	jumlah laporan hasil survey persepsi publik	Laporan Survey	1		1,178,128,000	1	0	1		171,087,500	1		169,951,500	1			100.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
2.15.7		Pengembangan sistem Database dan Informasi Pembangunan	Jumlah aplikasi perencanaan pembangunan yang berfungsi	aplikasi	1		689,230,400	1	0	1		46,800,000	1		46,300,000	1			100.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	66.67		334,426,500	100.00						
												Predikat Kinerja	Sedang			Sangat tinggi						
2.19		**Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar**	**% program dan kegiatan nasional yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan**	**%**	**100**			**100**		**100**			**0**			**100**			**100.00**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**-**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.19.7		Koordinasi perencanaan penanganan program nasional di daerah	Jumlah masalah/keputusan pokja yang diselesaikan sesuai pedoman/juknis	keputusan pokja	1		2,689,971,734	1	0	1		169,030,000	1		138,473,200	1			100.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		138,473,200	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
2.20		**Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**	**% kesesuaian usulan masyarakat dan SKPD yang sesuai dengan prioritas daerah**	**%**	**85**			**0**		**0**			**0**			**0**			**0.00**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**-**
2.20.1		Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah aparat perencana yang dilatih	orang	45		1,050,000,000	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
2.20.2		Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	jumlah peserta yang memahami kebijakan perencanaan daerah	orang	100		68,300,000	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	0.00		0	0.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat Rendah						
2.21		**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Persentase program dan kegiatan Renja SKPD yang selaras dengan RKPD**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**-**
			Persentase Renstra PD yang selaras dengan RPJMD	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**-**
2.21.8		Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah rancangan Perkada RKPD yg diproses sesuai jadwal (murni dan perubahan) dengan substansi dan proses sesuai dengan Permendagri No.86 tahun 2017	rancangan	2		659,505,758	6	0	2		158,170,000	2		112,968,000	8			400.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.21.9		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	kali	sar atau sama dengan 50	5	1,215,131,409	3	0		1	147,120,000	1	1	98,809,591	4	4		400.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Karakter
2.21.11		Koordinasi penyusunan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang diasistensi penyusunan dokumen perjanjian kinerja (murni dan perubahan)	Perangkat Daerah	75		302,441,814	38	0	38		14,476,000	38		11,812,800	38			50.67		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
2.21.19		Monitoring, Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah monitoring, pengendalian dan evaluasi RPJMD dan atau RKPD yang dilaksanakan	kali	5		959,791,788	9	0	5		146,040,000	5		133,632,000	14			280.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
2.21.20		Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah aplikasi perencanaan pembangunan yang berfungsi	aplikasi	3		1,348,692,200		0	2		204,165,000	2		159,240,250	2			66.67		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
Rata - rata kinerja (%)													84.00		516,462,641	220.00							
Predikat Kinerja													Tinggi			Sangat tinggi							
2.22		**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	**% program dan kegiatan RKPD yang dituangkan ke Renja SKPD bidang Ekonomi**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**-**
			% Rata-rata capaian target Renja SKPD bidang Ekonomi	**%**	**85**	**>= 85**		**85**		**85**	**lebih atau sama dengan 85**		**85**	**>=85**		**85**	**>=85**		**100.00**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Karakter**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.22.3		Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah rencana induk/rencana aksi perencanaan sektoral bidang ekonomi	Rencana Induk/rencana aksi	2		3,050,000,000	1	0	2		478,090,000	2		419,073,400	2			100.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
2.22.4		Koordinasi perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah SKPD yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi Renja	SKPD	4		855,989,468	4	0	4		51,220,000	4		34,813,500	4			100.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
2.22.10		Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	Indeks kinerja komisi irigasi kabupaten Hulu Sungai Tengah	Skor	Min 85	75	0	72	0	75	Min 75	433,618,000	75	75	285,208,171	75	75		7,500.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Karakter
			Tersusunnya Dokumen PSETK Daerah Irigasi	Daerah Irigasi	-			0		107			15			15			1,500.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
Rata - rata kinerja (%)													100.00		739,095,071	104.67							
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi							
2.23		**Program perencanaan sosial dan budaya**	**% program dan kegiatan RKPD yang dituangkan ke Renja SKPD bidang Sosial Budaya**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**-**
			% Rata-rata capaian target Renja SKPD sosial budaya	**%**	**85**	**>=85**		**85**		**85**	**lebih besar atau sama dgn 85**		**85**	**lebih besar/sama dgn 85**		**85**	**>=85**		**100.00**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Karakter**
2.23.5		Penyusunan perencanaan pengembangan bidang sosial dan SDM	Jumlah rencana induk/rencana aksi perencanaan sektoral sub bidang sosial dan SDM	Rencana Aksi	1		600,000,000	0	0	1		145,160,000	1		107,382,500	1			100.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.23.7		Koordinasi perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan pembangunan bidang sosial dan SDM	jumlah SKPD yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi Renja	SKPD	8		300,000,000	0	0	8		24,900,000	8		6,909,000	8			100.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
2.23.8		Koordinasi perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan budaya	jumlah SKPD yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi Renja	SKPD	19		300,000,000	0	0	19		43,500,000	19		9,870,000	19			100.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
2.23.9		Penyusunan perencanaan pengembangan bidang pemerintahan dan budaya	Jumlah rencana induk/rencana aksi perencanaan sektoral sub bidang pemerintahan dan budaya	Rencana Aksi	1		600,000,000	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
						data		0						0		0	0		0.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	75.00		124,161,500	75.00						
												Predikat Kinerja	Sedang			Sedang						
2.26		**Program Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan**	**Persentase peningkatan dana ZIS dalam program pemerintah daerah**	**%**	**50**			**0**		**1**			**0**			**0**			**0.00**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**-**
2.26.1		Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	jumlah peserta yang memahami	orang	100		541,537,600	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	0.00		0	0.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat Rendah						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.27		**Program Perencanaan Infrastruktur**	**% program dan kegiatan RKPD yang dituangkan ke Renja SKPD bidang infrastruktur**	**%**	**500**			**100**		**100**			**100**			**100**			**20.00**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	-
			% Rata-rata capaian target Renja SKPD bidang infrastruktur	**%**	**85**			**85**		**lebih atau sama dengan 85**			**85**			**85**			**100.00**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	-
2.27.1		Koordinasi perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Jumlah SKPD yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi Renja	SKPD	6		1,346,698,900	6	0	6		27,870,000	6		9,793,200	6			100.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
2.27.3		Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur daerah	Jumlah rencana induk/rencana aksi perencanaan sektoral bidang infrastruktur	rencana induk/rencana aksi	1		1,900,000,000	1	0	1		439,560,000	1		399,900,500	1			100.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		409,693,700	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
3	Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran		Persentase program dan kegiatan RKPD yang terakomodir dalam APBD	%	90			98		lebih atau sama dengan 90			98,9			98,9			108.89		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen APBD	%	50			8		15			14			14			28.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.29		**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran**	**% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD**	**%**	**95**					**lebih atau sama dengan 95**			**100**			**100**			**105.26**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**-**
3.29.2		Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah SKPD yang RKA/RKAP sudah diverifikasi yang sesuai dengan RKPD, KUA dan PPAS	SKPD	74		276,102,000	74	0	74		22,941,500	74		22,345,500	74			100.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
3.29.3		Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penyusunan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah dokumen rancangan dan kesepakatan KUA , KUPA , PPAS dan PPAS-P	buah	8		378,871,400	12	0	4		103,449,800	4		83,802,050	16			200.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	75.00		106,147,550	250.00						
												Predikat Kinerja	Sedang			Sangat tinggi						
		Penelitian dan Pengembangan																				
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah		persentase rekomendasi hasil litbang yg dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan daerah	%	100			100		100			50			50			50.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
4.28		**Program Penelitian dan Pengembangan daerah**	**Jumlah topik kajian penelitian dan pengembangan yang dihasilkan**	**kajian**	**11**					**1**			**1**			**1**			**9.09**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**-**
4.28.1		Penyusunan SIDA	Jumlah kajian SIDa	Kajian	1		832,550,000	1	0	0		0	0		0	1			100.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
4.28.2		Penyusunan Kajian Kebijakan pembangunan, inovasi dan teknologi	Jumlah Judul Permasalahan/Topik yang dikaji	Topik Kajian	1		750,000,000	0	0	1		283,030,000	1		245,450,000	1			100.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
4.28.3		Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah orang yang mendapat desiminasi hasil litbang	Orang	40		181,235,600	40	0	40		0	0		0	40			100.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
4.28.4		Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan	Jumlah judul permasalahan/topik yang dikaji	Topik Kajian	1		1,187,611,000	1	0	1		219,300,000	1		218,542,500	1			100.00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
Rata - rata kinerja (%)													50.00		463,992,500	75.00						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah			Sedang						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Keuangan																				
1	Meningkatnya Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		Rasio Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	24			23		24			22			22			91.67		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
			Prosentase Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	%	9			9		9			6			6			133.33		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
1.19		**Program Intensifikasi pajak dan retribusi daerah non PBB dan BPHTB**	**Prosentase jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang target pemungutannya berbasis potensi.**	**%**	**25**			**75**		**25**			**25**			**100**			**400.00**		**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**	**-**
			Indeks Kualitas pelayanan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah	**WP**	**9**			**9**		**9**			**9**			**9**			**100.00**		**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**	**-**
1.19.5		Sosialisasi dan promosi pajak dan retribusi daerah.	Jumlah/Prosentase orang yang hadir saat Sosialisasi	Orang	50		380,265,000	180	0	50		10,900,000	53		4,702,000	233			466.00		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
			Jumlah media sosialisasi yang direspon masyarakat.	Media	90			0		1			0			0			0.00		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
1.19.11		Pengadaan dan penyediaan media pungut pajak dan retribusi daerah	Jumlah media pungut pajak yang dicetak	lembar	11916		867,977,900	51255	0	9720		104,600,000	9720		70,895,000	60975			511.71		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
1.19.13		Pelayanan pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak daerah.	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang ditetapkan.	Objek Pajak	12464		246,153,000	23695	0	11305		77,450,000	9640		65,331,650	33335			267.45		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
1.19.14		Pendaftaran dan pendataan calon WP baru untuk menjaring Wajib Pajak	Jumlah wajib pajak baru yang memiliki NPWD	WP	1298		114,466,000	375	0	150		13,520,000	150		12,695,000	525			40.45		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
1.19.15		Pemutakhiran data sumber-sumber retribusi daerah.	Jumlah Jenis data wajib retribusi daerah yang termuktahirkan	Jenis	5		376,554,000	0	0	3		40,130,000	1		0	1			20.00		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
1.19.16		Analisa potensi retribusi daerah.	Jumlah dokumen kajian analisi potensi retribusi daerah	Dokumen	3		111,310,000	0	0	1		15,090,000	1		0	1			33.33		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
1.19.17		Koordinasi pemungutan retribusi daerah.	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang dirumuskan	Surat Rekomendasi	10		51,846,000	0	0	10		5,700,000	10		4,821,500	10			100.00		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.19.18		Evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.	Jumlah Laporan bulanan penerimaan pajak	dokumen	95%	12	79,705,400	36	0	12	12	0	12	12	0	48	12		50.53		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Karakter
						12		36					0	12		36	12		3,600.00		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Karakter
								36					12			48			4,800.00		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
Rata - rata kinerja (%)													58.67		158,445,150	263.33							
Predikat Kinerja													Rendah			Sangat tinggi							
1.20		**Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB**	**Indeks Pelayanan pemungutan PBB dan BPHTB**	**Skala**	**7**			**17**		**5**			**5**			**22**			**314.29**		**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**	**-**
			Terwujudnya Basis data dan Potensi PBB dan BPHTB yang Handal	**%**	**80**			**233**		**80**			**81**			**314**			**392.50**		**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**	**-**
1.20.1		Pendataan dan Pengelolaan Data Base SISMIOP PBB dan BPHTB	Jumlah Wajib Pajak PBB Baru yang Terdata	WP	PBB 1.850 WP BPHTB 335 WP		1,244,774,100	1448	0	1750		168,115,000	920		69,874,700	2368			236,800.00		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
			Jumlah Wajib Pajak PBB yang Datanya Terkoreksi Sesuai Kondisi Sebenarnya	WP	0			2700		9598			2462			5162			516,200.00		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
1.20.2		Pemuktahiran NJOP PBB	Termutakhirkannya NJOP PBB selaras / mendekati dengan Nilai Pasar	Dokumen	1		330,596,180	0	0	1		3,000,000	0		0	0			0.00		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
1.20.3		Penetapan dan Verifikasi PBB dan BPHTB	Prosentase Realisasi Pemungutan BPHTB Sesuai Target	%	530 WP		1,665,857,000	275	0	100		159,283,400	98.38		148,316,859	373.38			70.45		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
			Tercetaknya SPPT, DHKP dan SSPD Sesuai Pokok Ketetapan PBB dan BPHTB	Dokumen	0			94867		90000			84935			84935			8,493,500.00		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
1.20.5		Penagihan PBB dan BPHTB	Prosentase Realisasi Pemungutan PBB sesuai dengan Pokok Ketetapan / Target	%	100		2,376,653,600	230	0	90		429,700,000	94.11		375,382,500	324.11			324.11		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
1.20.6		Validasi dan Verifikasi Piutang PBB dan BPHTB	Jumlah Subjek dan Objek Wajib Pajak Piutang PBB yang Tervalidasi & Terealisasi Piutangnya.	Wajib Pajak	74000		888,478,840	1484	0	517		37,651,600	0		23,071,600	1484			2.01		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
1.20.8		Penanganan Pengaduan/Keberatan PBB dan BPHTB	Jumlah Pengaduan/Keberatan Pajak PBB dan BPHTB yang Dapat Diselesaikan	Wajib Pajak	44 WP		52,960,000	0	0	36 WP		3,800,000	1		2,533,000	1			2.27		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.20.9		Koordinasi Pengelolaan PBB dan BPHTB	Jumlah Berita Acara Hasil Koordinasi (Rekomendasi) yang Dirumuskan Terkait dengan PBB dan BPHTB	Dokumen	8 Dokumen		49,650,000	0	0	8 Dokumen		12,000,000	2		9,724,575	2			25.00		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
													Rata - rata kinerja (%)		23.17			628,903,234	221.50				
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah				Sangat tinggi				
1.22		**Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah**	**Indeks Kualitas Sistem Pembinaan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah**	**Indeks**	**6**			**0**		**6**			**0**			**0**			**0.00**		**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**	**-**
			Persentase Jenis Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah Yang Komprehensif	**%**	**90**			**90**		**80**			**80**			**170**			**188.89**		**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**	**-**
																			0.00		**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**	**-**
1.22.1		Revisi Perda dan Perbup Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Regulasi Pajak Daerah Yang Diciptakan	Peraturan	3		284,694,600	1	0	1		15,149,900	1		9,255,200	1			33.33		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
1.22.2		Perumusan dan Pembinaan Standar Operasional Prosedur Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur Pajak dan Retribusi Daerah Yang Disusun	SOP	2		167,213,780	0	0	2		11,700,000	2		7,990,500	2			100.00		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
1.22.3		Pembangunan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah	Jumlah Aplikasi Sistem Yang Diciptakan	aplikasi	1		804,140,230	0	0	4		210,550,000	4		182,150,000	4			400.00		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
1.22.4		Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi	Jumlah Aplikasi Sistem Yang Dikembangkan dan Terpelihara	aplikasi	2		397,200,000	0	0	1		51,306,667	1		50,390,667	1			50.00		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
1.22.5		Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Penyebarluasan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	WP/WR			145,781,500	0	0	10000		41,590,000	10000		39,788,000	10000			1,000,000.00		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
			Jumlah Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan	Dokumen				0					0			0			0.00		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.22.6		Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Pengaduan/Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berhasil Diselesaikan DAN Jumlah Berita Acara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Dihasilkan	Dokumen	6		470,627,500	0	0	6		13,237,900	8		9,155,500	8			133.33		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
1.22.7		Rekonsiliasi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Rumusan Hasil Rekonsiliasi Pajak dan Retribusi Daerah Yang Dihasilkan	Dokumen	12		156,762,000	4	0	4		44,144,800	4		33,310,000	4			33.33		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
Rata - rata kinerja (%)													124.83		332,039,867	122.17							
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi							

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Keuangan																				
1	Jumlah Raperda/Raperbup APBD/APBDP disusun tepat waktu			Dokumen	40			8		8			8			8			20.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
			Raperda, Perda, Raperbup, Perbup	Buah	40			8		8			8			8			20.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
2	Meningkatkan Kualitas Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Ranperda/Ranperbup APBD/APBDP disusun Tepat Waktu	buah	2			2		2			0			2			100.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
2.17		**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**-**
2.17.3		Penyusunan Raperda Tentang APBD	Jumlah SKPD yang diverifikasi RKA, Rancangan DPA dan DPA	SKPD	40		150,480,000	40	12,938,820	40		37,519,800	40		7,882,800	40			100.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
2.17.4		Penyusunan Rancangan peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah SKPD yang diverifikasi Anggaran Kas dan SPD	SKPD	40		110,861,600	40	19,024,000	40		27,715,400	40		6,528,300	40			100.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
2.17.5		Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD	Jumlah SKPD yang diverifikasi RKA Perubahan, Rancangan DPA dan DPPA	SKPD	40		26,500,000	40	4,227,350	40		6,625,000	40		6,206,400	40			100.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
2.17.6		Penyusunan Rancangan peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah SKPD yang diverifikasi Perubahan Anggaran Kas dan SPD	SKPD			44,120,000	40	40	40		11,029,800	40		8,378,700	40			4,000.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
													Rata - rata kinerja (%)		28,996,200	133.33						
													Predikat Kinerja			Sangat tinggi						
3	Meningkatnya Pengamanan dan Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase keakuratan data BMD	%	100			85		100			85			85			85.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
3.16		**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah**	**Persentase KIB SKPD yang sesuai dengan neraca LKPD**	**%**	**100**			**100**		**100**			**99**			**99**			**99.00**		**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**-**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Persentase BMD Yang Punya Legalitas	**%**	**100**			**313**		**100**			**233**			**233**			**233.00**		**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**-**
3.16.3		Penyusunan Sistem Informasi Barang Milik Daerah	Persentase Jumlah SKPD yang dilakukan rekonsiliasi BMD	%	37		422,483,450	60	5,744,625	37		76,000,000	40		3,616,100	40			108.11		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
3.16.5		Penghapusan dan Penjualan BMD	Persentase Usulan Penghapusan BMD SKPD yang terealisasi	%	37		475,715,150		22,146,300	90		107,850,000	90		0	90			243.24		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
3.16.6		Sertifikasi Tanah BMD	Jumlah BMD (tanah) yang disertifikasi	Persil	100		1,062,874,400	20	30,604,200	500		715,000,000	94		261,819,165	94			94.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	148.33		265,435,265	75.33						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sedang						
4	Meningkatnya pelayanan penatausahaan pengelolaan keuangan		Persentase Pelayanan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan	%	100					100			100			100			100.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
4.18		**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota**	**Persentase penerbitan SP2D tepat waktu**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**-**
			Persentase Penyampaian Laporan Dana Transfer Tepat Waktu	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**-**
			Persentase Pembayaran Gaji Tepat Waktu	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**-**
4.18.1		Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan gaji pada SKPD	Jumlah daftar gaji SKPD telah disesuaikan dan dicetak	Daftar Gaji	0		41,800,000	555	972	555		10,450,000	742		465	742			74,200.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
4.18.2		Fasilitasi Penatausahaan Pengeluaran	Jumlah SP2D yang dikeluarkan dengan Sumber Dana dan Kode Rekening	buah	4000		112,500,000	5144	16,250,000	6000		37,976,200	6131		34,769,000	6131			153.28		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
4.18.3		Peningkatan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan dana transfer yang disampaikan	buah	0		150,799,600	68	0	68		27,215,000	68		18,711,700	68			6,800.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	153.00		53,945,700	335.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
5	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan sesuai SAP		Jumlah Raperda/Raperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	%	100			100		100			100			100			100.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
5.23		**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kualitas Laporan Keuangan**	**Persentase SKPD dan BPKAD menyampaikan Laporan Keuangan SKPD Tepat Waktu dan sesuai SAP**	**%**	**100**			**100**		**100**			**40**			**40**			**40.00**		**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**-**
			Tepat Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD Pemerintah Daerah	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**			**100**	**100**		**100**	**100**		**100.00**		**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**Karakter**
5.23.1		Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi	Orang	2		105,500,000	120	0	120		22,205,000	0		0	120			6,000.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
5.23.7		Penyusunan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang diverifikasi	SKPD	4		174,004,900	40	11,077,100	40		174,004,900	40		148,453,100	40			1,000.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
5.23.8		Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan	Buah	9		439,400,000	40	28,751,000	40		71,675,000	40		11,603,000	40			444.44		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	481.33		160,056,100	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Kepegawaian																				
1	Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur		Indek Profesionalitas ASN	-	325			57		80			60			117			36.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
1.11		**Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Disiplin PNS/ASN**	**Persentase SKPD yang memberikan tindakan dan melaporkan Pelanggaran disiplin ASN**	**%**	**290**			**85**		**70**			**70**			**155**			**53.45**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah**	**-**
1.11.1		Pembinaan Disiplin Aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin PNS yang selesai diproses tindakan hukumnya.	Orang	5		721,634,179	5	26,950,000	5		35,780,000	6		25,920,000	11			220.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
			Jumlah penurunan pelanggaran disiplin.	Orang	3			0		5			0			0			0.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
			Jumlah proses pemberian izin perkawinan/perceraianyang sesuai prosedur dan tepat waktu.	Orang	20			28		20			13			41			205.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
1.11.4		Sosialisasi/ Orientasi CPNS/PNS	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan faham	Orang	73		671,031,000	0	0	185		36,550,000	185		21,875,000	185			253.42		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
													Rata - rata kinerja (%)			109.50		47,795,000	131.00			
													Predikat Kinerja			Sangat tinggi			Sangat tinggi			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian		Tingkat kepuasan layanan kepegawaian	%	325			57		80			80			137			42.15		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
2.10		**Program Pemutakhiran Data Kepegawaian**	**Persentasi data kepegawaian dan formasi ASN yang akurat**	**%**	**470**			**65**		**85**			**75**			**140**			**29.79**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah**	**-**
2.10.1		Pemutakhiran Database Kepegawaian	Jumlah ASN yang datanya akurat	Orang	4000		952,275,000	2367	0	3000		65,220,334	2850		37,833,000	5217			130.43		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
													Rata - rata kinerja (%)			71.00		37,833,000	173.00			
													Predikat Kinerja			Sedang			Sangat tinggi			
2.12		**Program Pemberhentian dan Kesejahteraan ASN**	**Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai**	**%**	**476**			**85**		**95**			**85**			**170**			**35.71**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah**	**-**
2.12.2		Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian (Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, SK Pensiun dll) yang diproses akurat dan selesai tepat waktu	Dokumen	700		1,434,517,656	1964	0	700		7,000,000	506		0	2470			352.86		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
2.12.5		Pemberian Penghargaan Bagi PNS/ASN Yang Berprestasi	Jumlah PNS/ASN yang diusulkan untuk mendapatkan Piagam Penghargaan	Orang	300		358,105,606	577	0	300		27,300,000	0		0	577			192.33		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
													Rata - rata kinerja (%)			36.00		0	272.00			
													Predikat Kinerja			Sangat Rendah			Sangat tinggi			
2.13		**Program Pengembangan Aparatur Daerah**	**Persentasi proses SK/dokumen yang diselesaikan tepat waktu**	**%**	**566**			**85**		**95**			**0**			**85**			**15.02**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah**	**-**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.13.1		Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji berkala, Pangkat, Cuti dan Pengangkatan PNS/ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala, Surat Izin Cuti PNS, SK Penambahan Masa Kerja, dan SK Pengangkatan menjadi PNS yang selesai diproses akurat dan selesai tepat waktu	SK	2100		1,001,831,759	1733	0	1000		39,980,000	1737		31,500,000	3470			165.24		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
2.13.3		Seleksi dan Pengangkatan dalam Jabatan	Jumlah calon JPT yang lulus seleksi sesuai prosedur	PNS	15;200		3,179,732,619	0	127,660,200	15		423,820,000	0		24,020,000	0			0.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
				PNS				31		200			299			299			29,900.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
2.13.4		Penataan Administrasi Mutasi Kepegawaian	Jumlah SK Mutasi PNS Di Dalam Kabupaten, Surat Rekomendasi Mutasi Keluar/Masuk, dan SK Dalam Jabatan Fungsional PNS akurat dan selesai tepat waktu	SK	500		452,483,896	1748	0	500		2,330,000	408		2,300,000	2156			431.20		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
													Rata - rata kinerja (%)	54.33		57,820,000	309.00					
													Predikat Kinerja	Rendah			Sangat tinggi					
2.16		**Program Administrasi Pengadaan ASN**	**Persentasi CPNS/ASN sesuai kebutuhan pegawai (formasi dan bazzeting)**	**%**	**200**			**15**		**100**			**22**			**37**			**18.50**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah**	**-**
2.16.1		Seleksi Penerimaan ASN	Jumlah peserta seleksi CPNS/ASN yang telah diverifikasi	Orang	194		6,854,643,000	892	0	169		1,076,950,800	37		288,410,000	929			478.87		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
													Rata - rata kinerja (%)	19.00		288,410,000	549.00					
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Pendidikan dan Pelatihan																				
3	Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur		Indek Profesionalitas ASN	-	90			57		80			60			117			130.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
3.15		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah**	**Persentasi Aparatur yang lulus diklat dengan kriteria baik dan pengembangan karir yang terpola**	**%**	**600**			**65**		**100**			**52**			**117**			**19.50**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah**	**-**
3.15.2		Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah ASN yang mendapat bantuan tugas belajar/ikatan dinas sesuai dengan tupoksi	Orang	10		3,517,519,850	1	0	4		120,000,000	2		35,000,000	3			30.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
3.15.4		Pendidikan dan Pelatihan Dasar ASN	Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat prajabatan dengan hasil baik	Orang	194		4,200,564,100	175	0	85		812,300,000	85		790,160,000	260			134.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
3.15.5		Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS/ASN Daerah	Jumlah pejabat struktural yang lulus diklatpim dengan nilai baik	Orang	44		8,920,723,000	30	0	47		993,040,000	5		170,797,000	35			79.55		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
3.15.6		Pendidikan dan pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS/ASN Daerah	Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat tupoksi/fungsional dengan nilai baik	Orang	85		3,926,117,050	8	0	133		787,050,000	66		317,550,000	74			87.06		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.15.9		Penyusunan Rencana Pengembangan SDM/ASN Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	orang	125; 60; 150		5,352,082,600	42	0	125		459,500,000	0		20,000,000	42			33.60		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
			Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas/UKPPI	orang				51		60			31			82			8,200.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
			Proses tugas belajar. Ijin belajar dan pencantuman gelar akademik	orang				132		150			232			232			23,200.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	-
Rata - rata kinerja (%)													30.20		1,333,507,000	166.40						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah			Sangat tinggi						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan																				
1	Pelaksanaan sosialisasi tanggap bencana		Jumlah masyarakat yang paham	%	30			4.6		30			30			34.6			115.33		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
1.22		**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Prosentase desa/kelurahan tanggap dan tangguh bencana di daerah rawan bencana**	**%**	**30**			**5**		**30**			**30**			**30**			**100.00**		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**-**
1.22.1		Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah masyarakat yang paham	Orang	180		845,000,000	20	0	180		12,286,000	180		8,810,000	180			100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
			Jumlah Desa/Kelurahan Tanggap dan Tangguh Bencana	Desa	2			4		8			8			8			400.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
			Jumlah tenaga tanggap bencana yang aktif	Orang	25			25		25			25			25			100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
1.22.2		Penyusunan Peta Rawan Bencana	Luas dan sebaran wilayah bencana yang terdeteksi	Kecamatan	2		846,000,000	1	0	2		0	0		0	1			50.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	150.00		8,810,000	87.50						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Tinggi						
2	Pembinanaan desa tangguh bencana		Jumlah desa tangguh bencana	Desa	8			6		6			6			12			150.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
3	Pelatihan tanggap bencana		Jumlah tenaga tanggap bencana yang aktif	%	75			25		75			75			75			100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
4	Melaksanakan pemetaan daerah rawan bencana		Luas dan sebaran wilayah bencana yang terdeteksi	Kecamatan	2			1		2			2			2			100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
5	Penanganan korban bencana		Tingkat Waktu tanggap darurat penanganan bencana	Hari	30			30		30			30			30			100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
5.30		**Penanganan tanggap darurat bencana**	**Persentase jumlah korban yang ditangani**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**-**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
5.30.1		Posko Komando Siaga bencana	Jumlah peserta latihan/simulasi bagi Tim Reaksi Cepat (TRC)	Orang	25		2,700,000,000	25	0	25		321,045,000	25		223,560,000	25			100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
			Tingkat waktu tanggap darurat penanganan bencana	hari	1			30		30			30			30			-2,800.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
5.30.2		Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan sementara	Jumlah logitik yang disalurkan	%	15		4,927,880,000	100	489,292,000	100		216,427,500	100		182,439,250	100			666.67		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
			Jumlah pelayanan kebencanaan non pangan	Item	7			7		7			7			7			100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	966.50		405,999,250	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
6	Mobilitas kebencanaan		Jumlah sarana mobilitas kebencanaan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	Unit	3			3		3			9			9			300.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
7	Memberikan Pelayan Logistik		Jumlah logistik yang disalurkan	%	100			100		100			100			100			100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
8	Peningkatan pelayanan non pangan		Jumlah pelayanan kebencanaan non pangan	Item	7			7		7			7			7			100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
9	Memberikan pelayanan perbaikan infrastruktur pasca bencana		Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki pasca bencana	%	50			0		30			30			30			60.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
9.31		**Program Pasca Bencana**	**Persentase pemulihan aspek fisik dan non fisik pasca bencana**	**%**	**100**			**50**		**50**			**40**			**40**			**40.00**		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**-**
9.31.1		Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	%	50		270,000,000	100	0	100		81,400,000	100		60,650,000	100			200.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
												Rata - rata kinerja (%)	200.00		60,650,000	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Pendidikan																				
1	meningkatnya pendidikan SD yang berkualitas		Nilai rata - rata Ujian SD	angka	6	6,1		6		6	6		6	6,1		6	6.9		100.00		Dinas Pendidikan	Karakter
			Indeks Integritas Nilai UN SD	angka	72			70		72			75			75			104.17		Dinas Pendidikan	-
1.13		**Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD**	**Persentase siswa SD berprestasi**	**Persentase**	**76**			**0**		**76**			**76**			**76**			**100.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**
			% sekolah yang melaksanakan kurikulum yang berlaku	**Persentase**	**100**			**0**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**
			Persentase Sekolah SD yang mempunyai sarana dan prasarana lengkap, baik dan berfungsi	**Persentase**	**90**			**0**		**80**			**80**			**80**			**88.89**		**Dinas Pendidikan**	**-**
			Persentase Sekolah SD yang mempunyai sarana dan prasarana lengkap, baik dan berfungsi	**Persentase**	**90**			**0**		**80**			**80**			**80**			**88.89**		**Dinas Pendidikan**	**-**
1.13.1		Pengadaan Buku	Jumlah Buku-buku sekolah SD	Paket	35		1,612,000,000	30	0	32		1,612,000,000	32		1,610,815,990	62			177.14		Dinas Pendidikan	-
1.13.2		Pembangunan Ruang ibadah SD	Jumlah Ruang Ibadah Yang dibangun	Unit	5		0	0	0	3		0	0		0	0			0.00		Dinas Pendidikan	-
1.13.4		Pelaksanaan Pra Ujian dan Ujian	Jumlah Siswa yang difasilitasi ikut ujian	siswa	5.700 siswa	5700	754,434,000		4,322	5700	5.700 siswa	730,343,000	4287	4287	480,063,620	4287	4287		75,210.53		Dinas Pendidikan	Karakter
1.13.8		Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	Jumlah tenaga pendidikan yang dapat menerapkan kurikulum	sekolah	89		20,385,000	0	0	89		20,385,000	89		20,302,650	89			100.00		Dinas Pendidikan	-
			Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	Sekolah	89			0		89			0			0			0.00		Dinas Pendidikan	-
			Jumlah kurikulum muatan lokal yang diterapkan	sekolah	89			0		89			0			0			0.00		Dinas Pendidikan	-
1.13.9		Pembangunan ruang Perpustakaan SD	Jumlah Ruang Perpustakaan Yang Dibangun	Unit	2		0	0	0	2		0	0		0	0			0.00		Dinas Pendidikan	-
1.13.11		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan	Jumlah UKS/Kantin Sekolah SD yang dibangun	Unit	9		0	0	0	5		0	0		0	0			0.00		Dinas Pendidikan	-
1.13.15		Penyelenggaraan Akreditasi SD	Jumlah sekolah yang siap diakreditas	sekolah	40		27,250,000	35	0	70		27,250,000	70		21,023,500	70			175.00		Dinas Pendidikan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.13.20		Penyelenggaraan Lomba Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti lomba	Siswa	275 Siswa	275	155,637,500		2	275	275 Siswa	155,527,500	275	275 siswa	146,888,100	275	275 siswa		100.00		Dinas Pendidikan	Karakter
			Jumlah siswa yang dipersiapkan mengikuti lomba tingkat provinsi	Siswa	25 Siswa	25		6		25	25 Siswa		25	25 siswa		25	25 siswa		100.00		Dinas Pendidikan	Karakter
													Rata - rata kinerja (%)	58.27		2,279,093,860	60.73					
													Predikat Kinerja	Rendah			Rendah					
2	meningkatnya anak usia Sekolah SD bersekolah		Persentase orang tua anak sadar wajar 9 tahun	Persentase	102	102		100		100	102		100	100		100	100		98.04		Dinas Pendidikan	Karakter
2.10		**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD**	**Persentase Orang tua anak sadar wajar 9 tahun**	**%**	**102**	**102**		**100**		**100**	**102.92**		**100**	**100**		**100**	**100**		**98.04**		**Dinas Pendidikan**	**Karakter**
			Persentase kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik dan berfungsi	**%**	**90**			**95**		**89.75**			**89.75**			**89.75**			**99.72**		**Dinas Pendidikan**	**-**
2.10.4		Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	Jumlah Sekolah yang di fasilitasi BOS	Sekolah	258	258	2,349,726,000	258	267	258	258	132,315,000	257	258	98,781,450	257	257		99.61		Dinas Pendidikan	Karakter
2.10.6		Pembangunan Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD	Jumlah Luas Halaman dan Pagar Yang Dibangun	Unit	20		0	12	0	16		0	0		0	12			60.00		Dinas Pendidikan	-
2.10.10		Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary SD	Jumlah WC yang direhab	Paket	40		245,900,000	3	0	40		245,900,000	18		199,915,500	21			52.50		Dinas Pendidikan	-
2.10.11		Pembangunan Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru yang di bangun	Ruang	5		0	0	0	4		0	0		0	0			0.00		Dinas Pendidikan	-
2.10.13		Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD	Jumlah WC yang dibangun	Paket	10		1,162,000,000	4	0	8		1,162,000,000	10		1,158,562,000	14			140.00		Dinas Pendidikan	-
2.10.20		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Dasar	Jumlah ruang kelas yang direhab	Ruang	25		4,958,596,000	0	0	24		4,958,596,000	43		4,953,174,900	43			172.00		Dinas Pendidikan	-
2.10.21		Rehabilitasi ruang guru SD	Jumlah ruang guru yang direhab sesuai dengan standar	Ruang	7		379,834,000	0	0	5		379,834,000	3		372,961,700	3			42.86		Dinas Pendidikan	-
2.10.23		Pelaksanaan sosialisasi wajar 9 tahun	Jumlah orang tua siswa rawan tidak bersekolah	Orang	100		12,630,000	0	0	120		10,480,000	120		8,287,000	120			120.00		Dinas Pendidikan	-
2.10.24		Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang dibangun	Ruang	2		438,850,000	3	0	2		438,850,000	2		434,433,500	5			250.00		Dinas Pendidikan	-
2.10.27		Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah meubeleur sekolah SD	Set	300		0	0	0	550		0	0		0	0			0.00		Dinas Pendidikan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.10.29		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat peraga yang dibantu	Paket	35		253,000,000	0	0	35		3,308,327,000	10		3,211,736,600	10			28.57		Dinas Pendidikan	-
												Rata - rata kinerja (%)	64.18		10,437,852,650	92.55						
												Predikat Kinerja	Rendah			Sangat tinggi						
3	Meningkatkan kualitas guru yang berkompeten		Rasio Guru/siswa	orang	20			Jan-20		Jan-20			Jan-20			Jan-20			5.00		Dinas Pendidikan	-
3.20		**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**% guru yg bersertifikat**	**%**	**85**			**195**		**75**			**100**			**295**			**347.06**		**Dinas Pendidikan**	**-**
			Persentase guru yang bersertifikat	**%**	**100**					**80**			**105**			**105**			**105.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**
			Persentase sekolah yang lengkap gurunya	**%**	**100**			**0**		**85**			**110**			**110**			**110.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**
3.20.25		Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SD	Jumlah Guru yang difasilitasi untuk Mengikuti Sertifikasi	Orang	30		1,045,920,000	148	0	0		36,000,000	0		36,000,000	148			493.33		Dinas Pendidikan	-
3.20.26		Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SMP	Jumlah Guru yang difasilitasi untuk Mengikuti Sertifiaksi	Orang	30		486,250,003		0	0		18,000,000	0		18,000,000				0.00		Dinas Pendidikan	-
3.20.28		Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP	Jumlah Guru Yang Meningkat Kompetensinya	Orang	200		1,298,500,000	200	0	2678		229,390,000	2322		198,867,525	2322			1,161.00		Dinas Pendidikan	-
3.20.29		Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik SD	Jumlah Guru Yang Meningkat Kompetensinya	Orang	200		1,341,150,000		0	308		2,337,309,800	308		1,224,637,200	308			154.00		Dinas Pendidikan	-
3.20.30		Pemberian Tunjangan Secara Proporsional kepada Guru di daerah terpencil	Jumlah guru di daerah terpencil yang mendapat tunjangan	Orang	50		7,849,690,000	12	0	12		216,000,000	12		175,250,000	12			24.00		Dinas Pendidikan	-
3.20.34		Penyediaan Bantuan Tenaga Pendidik SD/MDA	Jumlah Guru/Ustadz yang dibantu	Orang	1065		45,923,545,600	400	0	365		6,573,000,000	362		6,385,300,000	362			33.99		Dinas Pendidikan	-
			Jumlah Guru SD yang di kontrak	Orang		425		425		425	425		424	425		424	425		42,400.00		Dinas Pendidikan	Karakter
3.20.35		Penyediaan Bantuan Tenaga Pendidik SMP/Ponpes	Jumlah guru/ustadz yang dibantu	Orang	575		9,366,910,000	500	0	500		1,800,000,000	500		1,797,000,000	500			86.96		Dinas Pendidikan	-
												Rata - rata kinerja (%)	222.43		9,835,054,725	83.43						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
4	meningkatkan pendidikan sekolah menengah pertama yang berprestasi dan berkualitas		Indeks Integritas Nilai UN SMP	angka	75			0		72			72			72			96.00		Dinas Pendidikan	-
			Rata-rata Nilai kelulusan SMP	angka	7	6.7		6		6	6,7		6	7		6	6.7		85.71		Dinas Pendidikan	Karakter
4.14		**Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP**	**Persentase SNP yang terpenuhi pada pendidikan Dasar SMP**	**Persentase**	**75**			**0**		**65**			**90**			**90**			**120.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**
			% sekolah yang melaksanakan kurikulum yang berlaku	**Persentase**	**85**			**0**		**75**			**110**			**110**			**129.41**		**Dinas Pendidikan**	**-**
			Persentase siswa SMP berprestasi	**Persentase**	**65**			**0**		**55**			**55**			**55**			**84.62**		**Dinas Pendidikan**	**-**
4.14.7		Pelaksanaan Pra Ujian dan Ujian SMP	Jumlah siswa yang difasilitasi ikut ujian	orang	5000		4,272,129,260	4585	0	5000		521,715,000	5000		262,327,500	5000			100.00		Dinas Pendidikan	-
4.14.9		Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum SMP	Jumlah ruang laboratorium yang dibangun	Unit	5		3,650,000,000	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Pendidikan	-
4.14.10		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan SMP	Jumlah UKS / Kantin Sekolah SMP yang dibangun	Unit	0		4,650,000,000	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Pendidikan	-
4.14.14		Penyelenggaraan Akreditasi SMP	Jumlah sekolah yang siap diakreditasi	sekolah	20		523,320,000	20	0	20		8,999,500	20		7,601,250	20			100.00		Dinas Pendidikan	-
4.14.15		Penyelenggaraan Lomba Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP	Jumlah siswa yang mengikuti lomba	siswa	13 lomba	13 lomba	1,422,180,001	1443	0	481	13 lomba	287,176,667	398	13	211,908,575	1841	13		14,161.54		Dinas Pendidikan	Karakter
			Jumlah siswa yang dipersiapkan mengikuti lomba tingkat provinsi	siswa				39					13			52			5,200.00		Dinas Pendidikan	-
												Rata - rata kinerja (%)	652.20		481,837,325	116.40						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
5	Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat		angka putus sekolah	Persentase	0			0		0,005			0			0			0.00		Dinas Pendidikan	-
5.18		**Program Pendidikan Non Formal**	**% siswa putus sekolah yg tertampung**	**Persentase**	**85**			**75**		**75**			**75**			**75**			**88.24**		**Dinas Pendidikan**	**-**
			% sarana dan prasarana PNF kondisi baik	**Persentase**	**89**			**85**		**89**			**89**			**89**			**100.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
5.18.4		Pengembangan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan	jumlah siswa yg bisa baca tulis	orang	440		23,601,809,000		0	440		962,579,000	440		833,298,650	440			100.00		Dinas Pendidikan	-
			jumlah siswa yg mendapat bantuan Operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaran	orang				0		500			72			72			7,200.00		Dinas Pendidikan	-
5.18.14		Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah Kelompok Paket A	kelompok	180		1,738,130,000	3	0	13		0	13		0	13			7.22		Dinas Pendidikan	-
5.18.15		Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Kelompok Paket B	kelompok	740		7,186,600,000		0	66		0	66		0	66			8.92		Dinas Pendidikan	-
5.18.16		Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah Kelompok Paket C	kelompok	1700		14,391,470,000	32	0	11		0	11		0	11			0.65		Dinas Pendidikan	-
5.18.20		Pembangunan ruang kelas dan praktek SKB	Jumlah Ruang kelas SKB yang dibangun	Ruang	2		2,217,250,000	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Pendidikan	-
5.18.21		Pembangunan WC SKB	Jumlah WC yang di bangun	Unit	4		264,600,000	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Pendidikan	-
5.18.22		Pengadaan buku - buku SKB	Jumlah Buku SKB Yang tersedia	Paket	2		400,000,000	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Pendidikan	-
5.18.33		Penyediaan Bantuan Tenaga Pendidik PAUD/TKA	jumlah guru yang dibantu	orang	982		53,488,800,000	0	0	982		10,090,800,000	982		10,090,800,000	982			100.00		Dinas Pendidikan	-
			Jumlah Ustadz dan Ustadzah TK Al Qur\'an	orang	1811			0		1811			1811			1811			100.00		Dinas Pendidikan	-
5.18.34		Pembangunan ruang kelas PAUD, Dikmas dan SKB	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	Ruang	5		3,085,350,000	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Pendidikan	-
5.18.35		Rehabilitasi ruang kelas PAUD, Dikmas dan SKB	Jumlah Ruang kelas yang di rehab	Ruang	6		2,228,400,000	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Pendidikan	-
5.18.36		Pengadaan buku-buku PAUD	Jumlah Buku-Buku yang tersedia	Paket	12		620,700,000	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Pendidikan	-
5.18.37		Pembangunan/Rehabilitasi/ Pengadaan Prasarana dan sarana PAUD, Dikmas dan SKB	jumlah ruang kelas yang direhab	Ruang	-	6	3,069,950,000	4	0	6	6	3,069,950,000	6	6	2,940,909,395	6	6		600.00		Dinas Pendidikan	Karakter
			Jumlah ruang kelas yang dibangun	Ruang		8		5		8	8		8	8		8	8		800.00		Dinas Pendidikan	Karakter
			Jumlah WC yang dibangun	unit		0		0		0	0		0	0		0	0		0.00		Dinas Pendidikan	Karakter
			Jumlah WC yang direhab	Unit		1		2		1	1		1	1		1	1		100.00		Dinas Pendidikan	Karakter
			Jumlah buku-buku yang tersedia	Paket		9		2		9	9		2	2		2	2		200.00		Dinas Pendidikan	Karakter

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Jumlah mebeleur yang tersedia	paket		0		0		0	0		0	0		0	0		0.00		Dinas Pendidikan	Karakter
													Rata - rata kinerja (%)	53.08		13,865,008,045	78.00					
													Predikat Kinerja	Rendah			Tinggi					
6	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pendidikan PAUD		Angka Putus sekolah	Persentase	0			0		0,005			75			75			7,500.00		Dinas Pendidikan	-
6.27		**Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**% desa yang mempunyai PAUD**	**Persentase**	**97**			**0**		**90**			**90**			**90**			**92.78**		**Dinas Pendidikan**	**-**
6.27.4		Apresiasi Bunda PAUD	Jumlah Bunda PAUD Desa dan Kecamatan yg mengikuti Apresiasi	Orang	162		1,767,600,000	0	0	142		48,290,000	142		44,648,401	142			87.65		Dinas Pendidikan	-
6.27.5		Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	jumlah PAUD yg menerima BOP	Lembaga	918		1,441,200,000	245	0	248		265,749,900	248		215,504,314	248			27.02		Dinas Pendidikan	-
													Rata - rata kinerja (%)	57.00		260,152,715	100.00					
													Predikat Kinerja	Rendah			Sangat tinggi					
7	meningkatnya anak usia Sekolah SMP bersekolah		meningkatnya anak usia Sekolah SMP bersekolah	Persentase	100			0		99			99			99			99.00		Dinas Pendidikan	-
7.11		**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP**	**Persentase siswa yang mendapat bantuan**	**%**	**100**			**0**		**99**			**0**			**0**			**0.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**
			Persentase kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik dan berfungsi	**%**	**93**			**85**		**89**			**85**			**85**			**91.40**		**Dinas Pendidikan**	**-**
7.11.4		Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	Jumlah WC yang direhab	Unit	5		1,275,000,000	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Pendidikan	-
7.11.5		Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	Jumlah Sekolah yang di fasilitasi BOS	sekolah	35 sekolah	35 Sekolah	251,450,000	35	0	35	35 sekolah	22,800,000	35	35	7,500,500	35	35		100.00		Dinas Pendidikan	Karakter
7.11.7		Pembangunan Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP	Jumlah Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP yang di bangun	Paket	-	2	830,000,000	0	0	6	6	1,558,000,000	6	6	1,547,400,100	6	6		600.00		Dinas Pendidikan	Karakter
7.11.11		Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	Jumlah WC yang dibangun	Unit	4		2,100,000,000	2	0	1		100,150,000	1		99,780,000	1			25.00		Dinas Pendidikan	-
7.11.12		Pengadaan Mebeluer Sekolah SMP	Jumlah mebeleur sekolah SMP	Unit	500		638,700,000	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Pendidikan	-
7.11.25		Penyediaan Beasiswa Kurang Mampu	jumlah siswa yg mendapat bantuan	siswa	80		664,250,000	0	0	57		0	0		0	0			0.00		Dinas Pendidikan	-
7.11.27		Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yg direhab	Unit	5		5,158,500,000	21	0	3		544,560,000	3		541,972,000	3			60.00		Dinas Pendidikan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
7.11.29		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat praktik Siswa yang di bantu	Paket	10		13,784,370,000	51	0	51		3,308,327,000	51		3,211,736,600	51			510.00		Dinas Pendidikan	-
													Rata - rata kinerja (%)	142.00		5,408,389,200	71.43					
													Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sedang					
8	meningkatnya manajemen pendidikan		Angka Putus sekolah SD	persentase	0			0.03		0			0.03			0.03			3.00		Dinas Pendidikan	-
			Angka Putus Sekolah SMP	persentase	0			0.88		0,1			0.88			0.88			88.00		Dinas Pendidikan	-
8.22		**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**% sekolah yag mengisi data dengan lengkap dan benar**	**persentase**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**
			% sekolah yg punya KIB dan KIR dengan benar	**persentase**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**
			jumlah kunjungan website skpd	**orang/tahun**	**10000**			**0**		**7000**			**5000**			**5000**			**50.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**
			% Pemetaan sekolah yang valid	**persentase**	**80**			**0**		**75**			**0**			**0**			**0.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**
8.22.9		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah hasil Pemetaan sekolah	dokumen	3		0	0	0	3		0	0		0	0			0.00		Dinas Pendidikan	-
8.22.12		Evaluasi Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan	persentase sekolah yg punya KIB dan KIR dengan benar	%	100		562,000,000	85	85	100		18,000,000	80		18,000,000	80			80.00		Dinas Pendidikan	-
8.22.15		Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	pesentase sekolah yag mengisi data dengan lengkap dan benar	%	100		652,000,000	100	0	100		71,980,000	100		67,671,000	100			100.00		Dinas Pendidikan	-
8.22.16		Pengelolaan Website	jumlah kunjungan website skpd	kali/tahun	10000		60,000,000	2000	0	7000		18,000,000	5000		18,000,000	5000			50.00		Dinas Pendidikan	-
													Rata - rata kinerja (%)	57.50		103,671,000	62.75					
													Predikat Kinerja	Rendah			Rendah					
9	Meningkatkan Paud, dikmas dan SKB berpresetasi dan berkualitas		Persentase lembaga PAUD Dan DIKMAS yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	Persentase	70			0		70			70			70			100.00		Dinas Pendidikan	-
9.26		**Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal**	**%paud HI**	**persentase**	**6E+07**			**0**		**13**			**13**			**13**			**0.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**
			%paud HI	**persentase**	**20**			**0**		**13**			**13**			**13**			**65.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**
			% GTK dan PTK berprestasi tk. Prov	**persentase**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**
			% PTK PAUD yang memiliki sertifikat perjenjang	**persentase**	**100**			**56**		**100**			**81,94**			**81,94**			**81.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**
			% PTK dikmas yang kompeten	**persentase**	**81**			**0**		**31**			**0**			**0**			**0.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**
			% PAUD HI	**persentase**	**25**			**0**		**13**			**13**			**13**			**52.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
9.26.2		Akreditasi PAUD, Dikmas dan SKB	jumlah PAUD, DIKMAS yang di akreditasi	lembaga	25		450,000,000	39	0	38		0	38		0	38			152.00		Dinas Pendidikan	-
9.26.3		Peringatan Hari Aksara Internasional	Jumlah PTK PAUD, Dikmas yang mengikuti lomba	Persentase	15		975,926,000	0	0	80		0	80		0	80			533.33		Dinas Pendidikan	-
9.26.7		Pendidikan dan Pelatihan Pendidik PAUD	Jumlah PTK PAUD yang bersertifikat	Guru	85		1,298,500,000	0	0	75		57,325,000	75		48,257,500	75			88.24		Dinas Pendidikan	-
9.26.8		Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	Jumlah PTK yang lulus uji kompetensi	org	81		105,000,000	0	0	31		0	0		0	0			0.00		Dinas Pendidikan	-
9.26.9		Sosialisasi PAUD	Jumlah PAUD HI per Kecamatan	Lembaga	25		33,000,000	0	0	25		9,300,000	25		9,292,125	25			100.00		Dinas Pendidikan	-
9.26.10		Apresiasi PTK PAUD Dikmas	Jumlah jenis lomba PTK PAUD, Dikmas	Persentase	15		936,126,000	15	0	15		0	15		0	15			100.00		Dinas Pendidikan	-
												Rata - rata kinerja (%)	162.17		57,549,625	83.33						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Tinggi						
		Kebudayaan																				
10	Meningkatkan Kelestarian Bangunan dan Benda Cagar Budaya		Tingkat kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah	Persentase	84			0		82			50			50			59.52		Dinas Pendidikan	-
			Tingkat kelestarian budaya daerah	Persentase	50			0		40			50			50			100.00		Dinas Pendidikan	-
10.16		**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**Persentase Benda, situs dan kwasan cagar budaya yang baik dan terlindungi**	**Persentase**	**100**			**65**		**65**			**0**			**65**			**65.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**
10.16.5		Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah Benda, situs dan kwasan cagar budaya yang baik dan terlindungi	Orang	20		855,678,000		0	16		96,000,000	16		96,000,000	16			80.00		Dinas Pendidikan	-
												Rata - rata kinerja (%)	80.00		96,000,000	100.00						
												Predikat Kinerja	Tinggi			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
10.17		**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Persentase grup seni budaya Binaan yang aktif**	**Persentase**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Dinas Pendidikan**	**-**
10.17.1		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah grup kesenian yang aktif	Grup	19		2,162,184,500		0	17		255,235,000	10		153,750,000	10			52.63		Dinas Pendidikan	-
10.17.5		Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah	Grup	15		2,067,635,500	2	0	13		402,940,000	12		117,834,150	12			80.00		Dinas Pendidikan	-
Rata - rata kinerja (%)													66.00		271,584,150	75.00						
Predikat Kinerja													Sedang			Sedang						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Kesehatan																				
1	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak		Angka Kematian Ibu	Rasio	181			198		182/100.000			202/100.000			202/100.000			88.40		Dinas Kesehatan	-
			Angka Kematian Bayi	Rasio	16			12		17/1.000			14/1.000			14/1.000			112.50		Dinas Kesehatan	-
1.29		**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi Anak Balita**	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita**	**%**	**100**			**75**		**100**			**82,25**			**82,25**			**82.00**		**Dinas Kesehatan**	**-**
1.29.1		Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Orientasi Kelas Ibu Balita	Orang	38		3,245,904,400	57	39,078,000	76		39,078,000	76		37,538,800	133			350.00		Dinas Kesehatan	-
1.29.4		Pendidikan Pelatihan Perawatan anak Balita	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Skrening Hipotiroid Kongenetal (SHK)	Org	57		429,731,495	0	0	42		22,960,000	42		21,995,000	42			73.68		Dinas Kesehatan	-
													Rata - rata kinerja (%)	136.50		59,533,800	137.50					
													Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi					
1.32		**Program Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak**	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir**	**%**	**100**			**275**		**100**			**73**			**348**			**348.00**		**Dinas Kesehatan**	**-**
1.32.1		Penyuluhan Kesehatan Ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah Ibu Hamil/Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi P4K dan KP Ibu	Orang	6		274,711,000		20,370,000	6		26,784,000	300		26,361,000	300			5,000.00		Dinas Kesehatan	-
1.32.2		Perawatan Bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah Bidan yang Mendapatkan Sosialisasi Pengenalan Tanda Bahaya Kehamilan, Persalinan dan Nifas	Orang	57		329,781,480	103	15,738,500	57		18,160,000	57		17,474,900	160			280.70		Dinas Kesehatan	-
			Jumlah Bidan yang Mendapat Sosialisasi Penanganan Bayi dengan Risiko Tinggi (BBLR)	Orang						57			57			57			5,700.00		Dinas Kesehatan	-
1.32.3		Pertolongan Persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah Bidan yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pertolongan Persalinan dengan Partograf	Orang	76		457,486,300	76	22,338,400	57		40,420,000	57		15,894,800	57			75.00		Dinas Kesehatan	-
			Jumlah Kemitraan dengan Dukun Kampung	Kali				116		135			31			147			14,700.00		Dinas Kesehatan	-
1.32.4		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Jumlah Bidan yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Motivator KP Ibu	Orang	38		2,873,544,000	133	6,873,600	38		5,620,000	38		5,516,500	171			450.00		Dinas Kesehatan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.32.7		Pelayanan kesehatan usia subur dan keluarga berencana	Jumlah Petugas yang Mendapatkan Orientasi Kesehatan Reproduksi	Orang	57		406,398,360	209	27,918,900	57		20,110,000	57		19,585,100	266			466.67		Dinas Kesehatan	-
			Jumlah Buku PUS dan Kohort KB yang tercetak	Buah				340					300			300			30,000.00		Dinas Kesehatan	-
1.32.8		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)	Orang	26		643,269,700	120	82,210,300	180		18,300,000	100		15,660,000	100			384.62		Dinas Kesehatan	-
1.32.10		Pemberian Jaminan Persalinan bagi ibu hamil kurang mampu	Jumlah Ibu Hamil/Bersalin/Nifas dan Bayi Baru Lahir dari Keluarga Tidak Mampu yg Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan Mendapat Pelayanan Jampersal	Orang	1009		30,831,692,000		1,940,899,455	4925		2,755,000,000	1116		1,120,759,400	1116			110.60		Dinas Kesehatan	-
													Rata - rata kinerja (%)	838.43		1,221,251,700	940.14					
													Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi					
2	Meningkatnya status gizi masyarakat		Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Penanganan Kesehatan	%	100			100		100			100			100			100.00		Dinas Kesehatan	-
			Persentase Balita Gizi kurang dan Gizi Buruk Mendapatkan PMT dan Penanganan	%	95			80		90			100			100			105.26		Dinas Kesehatan	-
			Persentase Lansia Mendapat Pemeriksaan Kesehatan/Pelayanan	%	20			18		20			29			29			145.00		Dinas Kesehatan	-
2.20		**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**Persentase Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan dan Penanganan**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Dinas Kesehatan**	**-**
			Persentase Masyarakat (Keluarga) yang Mendapat Pelayanan Gizi	**%**	**80**			**79**		**80**			**81,2**			**81,2**			**101.25**		**Dinas Kesehatan**	**-**
2.20.1		Penyusunan peta masyarakat kurang gizi	Jumlah Puskesmas yang Memiliki Data /Peta Informasi Program Gizi	Puskesmas	19		283,434,110	19	6,129,600	19		9,760,000	19		9,622,400	19			100.00		Dinas Kesehatan	-
2.20.2		Pemberian makanan tambahan dan vitamin	Jumlah Makanan Tambahan, Vitamin dan Mineral untuk Pelayanan dan Penanganan Masalah Gizi oleh Puskesmas	Jenis	75		1,019,746,750	4	48,692,900	4		210,330,000	4		83,096,400	4			5.33		Dinas Kesehatan	-
2.20.3		Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi.	Orang	85		388,343,360	650	19,140,200	171		388,343,360	171		384,903,780	821			965.88		Dinas Kesehatan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Jumlah Remaja Putri yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah	Orang				13303		7965			7965			21268			2,126,800.00		Dinas Kesehatan	-
			Jumlah Obat Gizi (Penurunan Stunting) yang Disediakan	Jenis				4		4			4			4			400.00		Dinas Kesehatan	-
2.20.4		Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah Kader yang Mendapatkan Orientasi/Sosialisasi	Orang	100		317,810,840	425	28,236,600	150		24,196,400	150		23,982,000	575			575.00		Dinas Kesehatan	-
												Rata - rata kinerja (%)	114.00		501,604,580	357.50						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
2.30		**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	**Persentasi Usia Lanjut Mendapat Pelayanan kesehatan**	**%**	**20**			**18**		**20**			**29**			**29**			**145.00**		**Dinas Kesehatan**	**-**
2.30.1		Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Posyandu Lansia Melaksanakan PMT	Buah	100		4,528,530,000	68	50,750,000	68		69,036,000	0		21,587,100	68			68.00		Dinas Kesehatan	-
			Jumlah Petugas yang Mendapatkan Orientasi Pelayanan Kesehatan Lansia	Orang				190		76			76			266			26,600.00		Dinas Kesehatan	-
2.30.3		Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan	Jumlah Petugas Puskesmas yg mendapat Orientasi/Sosialisasi Puskesmas Santun Lansia	Orang	38		150,129,800	76	15,843,400	57		0	57		0	133			350.00		Dinas Kesehatan	-
2.30.8		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Petugas yang Mendapatkan Sosialisasi Pelayanan Puskesmas Santun Lansia	Orang	20		779,538,000	39	26,600,000	57		24,515,000	57		24,160,450	96			480.00		Dinas Kesehatan	-
			Jumlah Usia Lanjut yang Mengikuti Peringatan Hari Lansia	Orang				0		77			77			77			7,700.00		Dinas Kesehatan	-
												Rata - rata kinerja (%)	145.00		45,747,550	317.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
3	Meningkatnya Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		Perbup/Perda Tentang Gerakan Masyarakat Sehat	buah	1			2		1			2			2			200.00		Dinas Kesehatan	-
3.19		**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**Prosentase PHBS di 5 Tatanan (RT, Sekolah, Institusi Kes, Tempat Kerja dan Tempat-Tempat Umum)**	**%**	**60**			**57**		**55**			**62.5**			**62.5**			**104.17**		**Dinas Kesehatan**	**-**
3.19.1		Pengembangan Media Promosi Kesehatan Dan Informasi Sadar Hidup sehat	jumlah media promosi kesehatan yang digunakan	jenis	3		8,200,312,468	3	199,835,500	3 jenis		273,170,000	3		266,810,875	3			100.00		Dinas Kesehatan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Jumlah masyarakat (tatanan) yang mendapat orientasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	tatanan				15		5 tatanan			5			20			2,000.00		Dinas Kesehatan	-
3.19.2		Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah Tatanan yang mendapat penyuluhan PHBS	Tatanan	5		522,468,966	5	47,770,625	5		65,120,000	5		62,025,125	5			100.00		Dinas Kesehatan	-
3.19.7		Pembinaan Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah	Persentasi UKS dan SBH dibina	%	100		586,143,100	300	83,844,875	100		84,150,000	100		71,779,875	400			400.00		Dinas Kesehatan	-
3.19.12		Pendataan PHBS	Jumlah petugas yang mendapat orientasi pendataan PHBS	orang	60		165,500,000	0	9	38		45,860,000	38		45,265,250	38			63.33		Dinas Kesehatan	-
3.19.13		Pembinaan Petugas Promkes dan Fungsional Penyuluh Kesehatan	Jumlah petugas promkes dan penyuluh kesehatan dibina	orang	100		174,299,900	0	9	38		9,420,000	38		7,806,125	38			38.00		Dinas Kesehatan	-
3.19.14		Pemanfaatan Sarana Kesehatan Masyarakat (UKBM)	Persentasi Posyandu Aktif dengan Strata Purnama dan Mandiri dibina	%	60		2,992,967,727	168	545,883,625	55		62,224,000	82		58,767,875	250			416.67		Dinas Kesehatan	-
3.19.15		Pembinaan Desa Siaga	Persentasi Desa Siaga Aktif dibina	%	60		816,470,000	52	9	40		230,500,000	54		141,089,875	54			90.00		Dinas Kesehatan	-
												Rata - rata kinerja (%)	89.57		653,545,000	255.57						
												Predikat Kinerja	Tinggi			Sangat tinggi						
3.21		**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**Prosentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan**	**%**	**60**			**188**		**50**			**65**			**253**			**421.67**		**Dinas Kesehatan**	**-**
			Prosentase desa/kel yang melaksanakan STBM	**%**	**80**			**112**		**70**			**71**			**183**			**228.75**		**Dinas Kesehatan**	**-**
			Prosentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	**%**	**62**			**290**		**58**			**95**			**385**			**620.97**		**Dinas Kesehatan**	**-**
			Prosentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	**%**	**36**			**198**		**32**			**67**			**265**			**736.11**		**Dinas Kesehatan**	**-**
			Prosentase Puskesmas yang melaksanakan pengolahan limbah medis padat dan cair	**%**	**45**			**42**		**35**			**100**			**142**			**315.56**		**Dinas Kesehatan**	**-**
			Prosentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga	**%**	**100**			**300**		**100**			**100**			**400**			**400.00**		**Dinas Kesehatan**	**-**
3.21.1		Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah Sarana Air Minum Komunal yang dilakukan pengawasan	buah	160		473,002,000	0	0	75		40,750,000	75		40,533,750	75			46.88		Dinas Kesehatan	-
3.21.3		Pengembangan kebijakan lingkungan sehat	Jumlah jamban keluarga percontohan yang dibangun	buah	35		1,248,038,700	0	0	75		173,750,000	75		162,177,375	75			214.29		Dinas Kesehatan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Jumlah peserta sosialisasi kawasan sehat	orang				0		850			850			850			85,000.00		Dinas Kesehatan	-
3.21.5		Pengawasan Tempat-tempat umum	Jumlah pengelola tempat tempat umum yang mendapat sosialisasi	orang	249		157,815,800	0	0	100		13,400,000	100		13,286,250	100			40.16		Dinas Kesehatan	-
3.21.6		Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Jumlah pemilik/pengelola tempat pengelolaan makanan yang mendapat sosialisasi	orang	884		296,150,300	0	0	255		31,130,000	255		30,668,625	255			28.85		Dinas Kesehatan	-
3.21.7		Pengelolaan limbah medis padat	Jumlah limbah medis padat yang dikelola dan dimusnahkan	kg	19		864,141,700	0	0	5000		187,120,000	3350		141,087,500	3350			17,631.58		Dinas Kesehatan	-
3.21.8		Fasilitasi penyelengaraan kesehatan kerja dan olahraga	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dan olahraga	buah	19		371,394,740	28	0	19		0	19		0	47			247.37		Dinas Kesehatan	-
3.21.9		Pelayanan Pemeriksaaan Kebugaran Jasmani	Jumlah Calon Jemaah	orang	350		55,655,000	0	0	350		0	350		0	350			100.00		Dinas Kesehatan	-
												Rata - rata kinerja (%)	2,594.14		387,753,500	130.57						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
3.37		**Program Bantuan Operasional Kesehatan**	**Prosentase realisasi pemanfaatan BOK**	**%**	**100**			**63**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Dinas Kesehatan**	**-**
3.37.1		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kasarangan	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Kasarangan	%	100		3,209,879,580	61	375,787,720	100		775,860,000	78		606,044,500	78			78.00		Dinas Kesehatan	-
3.37.2		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai buluh	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Sungai Buluh	%	100		186,292,000	72.88	390,409,955	100		625,228,000	76		513,543,825	76			76.00		Dinas Kesehatan	-
3.37.3		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pantai Hambawang	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Pantai Hambawang	%	100		743,341,000	74	428,565,550	100		743,771,000	100		569,168,275	100			100.00		Dinas Kesehatan	-
3.37.4		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Durian Gantang	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Durian Gantang	%	100		2,790,134,580	69	362,886,150	100		647,072,000	100		522,725,650	100			100.00		Dinas Kesehatan	-
3.37.5		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ilung	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Ilung	%	100		3,324,726,080	54.27	336,373,075	100		843,705,000	76.72		647,278,450	76.72			76.72		Dinas Kesehatan	-
3.37.6		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Limpasu	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Limpasu	%	100		2,981,841,560	69,69	389,487,450	100		708,165,000	68		491,086,400	68			68.00		Dinas Kesehatan	-
3.37.7		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Birayang	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Birayang	%	100		819,858,000	63.17	395,314,800	100		819,858,000	69.63		475,728,325	69.63			69.63		Dinas Kesehatan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.37.8		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Batu Tangga	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Batu Tangga	%	100		2,798,651,580	74.38	389,444,034	100		598,217,000	86		438,338,850	86			86.00		Dinas Kesehatan	-
3.37.9		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kubur Jawa	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Kubur Jawa	%	100		644,566,000	85	440,321,546	100		622,066,000	62		441,053,493	62			62.00		Dinas Kesehatan	-
3.37.10		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Haruyan	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Haruyan	%	100		3,266,192,580	61.3	381,133,500	100		815,529,000	79.58		649,005,009	79.58			79.58		Dinas Kesehatan	-
						data													0.00		Dinas Kesehatan	Karakter
3.37.11		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Barikin	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Barikin	%	100		2,678,645,580	67.73	349,096,611	100		590,051,000	77.2		455,508,141	77.2			77.20		Dinas Kesehatan	-
3.37.12		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Barabai	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Barabai	%	100		3,387,318,080	84.57	552,872,300	100		862,710,000	74.68		644,249,050	74.68			74.68		Dinas Kesehatan	-
3.37.13		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Awang Besar	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Awang Besar	%	100		571,970,000	90	447,585,000	100		571,970,000	100		466,217,566	100			100.00		Dinas Kesehatan	-
3.37.14		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pagat	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Pagat	%	100		642,483,000	73.52	384,562,212	100		642,483,000	70.44		452,682,467	70.44			70.44		Dinas Kesehatan	-
3.37.15		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Hantakan	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Hantakan	%	100		3,293,116,580	87.7	540,832,695	100		810,687,000	70.07		628,043,275	70.07			70.07		Dinas Kesehatan	-
3.37.16		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalibaru	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Kalibaru	%	100		628,399,000	57.3	523,961,895	100		628,399,000	76.52		480,644,350	76.52			76.52		Dinas Kesehatan	-
3.37.17		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandawan	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Pandawan	%	100		836,609,000	67.78	425,447,120	100		836,609,000	75.09		628,147,150	75.09			75.09		Dinas Kesehatan	-
						data													0.00		Dinas Kesehatan	Karakter
3.37.18		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kambat Utara	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Kambat Utara	%	100		2,932,253,580	227	421,758,700	100		675,495,000	84.04		567,666,664	311.04			311.04		Dinas Kesehatan	-
3.37.19		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tandilang	Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Tandilang	%	100		623,555,000	98.46	511,060,895	100		623,555,000	179.27		558,941,500	179.27			179.27		Dinas Kesehatan	-
3.37.20		Kegiatan Monitoring Bantuan Operasional Kesehatan	Terpenuhinya Manajemen BOK Kabupaten	%	100		4,168,417,000	31.73	241,981,425	100		1,124,000,000	63.1		549,680,775	63.1			63.10		Dinas Kesehatan	-
													Rata - rata kinerja (%)			83.10		10,785,753,715	94.45				

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
												Predikat Kinerja	Tinggi			Sangat tinggi						
4	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta peningkatan cakupan imunisasi		Persentasi desa/kelurahan yang mencapai UCI	%	94			255.64		93			93			348.64			370.89		Dinas Kesehatan	-
			Persentasi Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang ditanggulangi < 24 jam	%	95			300		85			85			385			405.26		Dinas Kesehatan	-
			Persentasi dea/keluarahan yang memilki Posbindu PTM aktif	%	70			0		50			50			50			71.43		Dinas Kesehatan	-
			Persentasi keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus	%	225			264		100			0			264			117.33		Dinas Kesehatan	-
			Case Fatality Rate DBD	%	100			300		100			25			325			325.00		Dinas Kesehatan	-
			Pengendalian Penyakit Menular	%	100			300		100			100			400			400.00		Dinas Kesehatan	-
4.22		**Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular**	**Prosentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular**	**%**	**100**			**300**		**100**			**50**			**350**			**350.00**		**Dinas Kesehatan**	**-**
						data								**data**					**0.00**		**Dinas Kesehatan**	**Karakter**
4.22.5		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah petugas yang terampil melaksanakan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Penyakit Endemik.Epidemik.	orang	100		9,455,564,112	90	104,779,000	100		147,600,000	190		130,330,250	190			190.00		Dinas Kesehatan	-
4.22.14		Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS	Jumlah Petugas Puskesmas yang terampil melaksanakan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Penyakit Endemik/ Epidemik	%	100		9,810,000		9,810,000	100		174,921,065	25		155,621,000	25			25.00		Dinas Kesehatan	-
4.22.15		Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis	Jumlah Petugas Puskesmas yang terampil melaksanakan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Penyakit Endemik/ Epidemik	orang	225		130,990,000	544	130,990,000	245		248,564,000	245		246,578,600	245			108.89		Dinas Kesehatan	-
4.22.16		Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik	Jumlah Petugas Puskesmas yang terampil melaksanakan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Penyakit Endemik/ Epidemik	orang	19		237,600,000	19	237,600,000	19		476,800,000	19		474,326,250	19			100.00		Dinas Kesehatan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
4.22.20		Penyemprotan / fogging sarang nyamuk	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	kali	500		58,080,000	230	0	700		204,200,000	700		188,328,000	700			140.00		Dinas Kesehatan	-
4.22.22		Penyebarluasan Informasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah Media Informasi dan Pencatan/ pelaporan Program P2 Menular yang di sediakan	Lembar	14950		0	628	0	14950		0	0		0	0			0.00		Dinas Kesehatan	-
4.22.23		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah Kegiatan Monev dan Peningkatan Kapasitas Petugas/ pengelola program P2 Menular (TB,HIV/AIDS, Kusta, ISPA, Diare, Hepatitis, DBD, Malaria, Filaria, Rabies,	orang	247		0	247	0	247		0	0		0	247			100.00		Dinas Kesehatan	-
													Rata - rata kinerja (%)	80.43		1,195,184,100	87.86					
													Predikat Kinerja	Tinggi			Tinggi					
4.39		**Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular**	**Prosentase peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa**	**%**	**100**			**100**		**100**			**65**			**165**			**165.00**		**Dinas Kesehatan**	**-**
4.39.1		Penanggulangan penyakit tidak menular	Jumlah Petugas Puskesmas yang terampil melaksanakan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	orang	70%		3,174,460,000	100	0	50%		16,697,000	100		16,633,000	200			285.71		Dinas Kesehatan	-
4.39.2		Pemeriksaan Kesehatan Bagi Wanita Usia Subur	Jumlah Petugas Puskesmas yang terampil melaksanakan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	orang	70%		3,189,765,000	100	0	50%		25,055,000	100		25,037,750	200			285.71		Dinas Kesehatan	-
4.39.3		Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Jumlah petugas PTM dan Kesehatan Jiwa yang dilatih	orang	56		1,054,000,000	100	0	36		8,720,000	100		8,555,000	200			357.14		Dinas Kesehatan	-
4.39.4		Pelayanan dan penanganan kesehatan jiwa	Jumlah Peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kesehatan jiwa	%	60		310,000,000	100	0	100		9,460,000	100		9,444,250	200			333.33		Dinas Kesehatan	-
4.39.5		Peningkatan Pos Pelayanan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM) di Puskesmas	Jumlah petugas Puskesmas yang terampil melaksanakan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	70%		3,660,000,000	100	0	50%		16,397,000	100		2,337,000	200			285.71		Dinas Kesehatan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
4.39.6		Peningkatan pencegahan dan penanggulangan NAPZA pada Remaja	Jumlah siswa/guru yang diberikan sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Napza di Sekolah Tingkat SLTP/SLTA sederajat	%	60		2,161,000,000	100	0	40		25,420,000	100		25,388,500	200			333.33		Dinas Kesehatan	-
4.39.7		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Petugas yang diberikan bimbingan teknis program	%	100%		54,000,000	100	0	100%		11,680,000	100		11,651,200	200			200.00		Dinas Kesehatan	-
												Rata - rata kinerja (%)	148.00		99,046,700	379.29						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
4.40		**Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi [PD3I]**	**Persentase angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan iminunisasi, akibat penyakit infeksi emergyng, peningkatan surveilans dan karantina kesehatan**	**%**	**100**			**300**		**100**			**0**			**300**			**300.00**		**Dinas Kesehatan**	**-**
4.40.1		Peningkatan Cakupan Imunisasi	Jumlah Balita dan Anak Sekolah yang dilakukan peningkatan imunisasi	%	94		0	263.29	0	93		8,000,000	92		8,000,000	355.29			377.97		Dinas Kesehatan	-
4.40.2		Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Jumlah Balita dan Anak Sekolah	%	94		136,378,800	255.47	136,378,800	93		45,770,000	92		44,965,000	347.47			369.65		Dinas Kesehatan	-
4.40.3		Kampanye Measles dan Rubella (MR) serta Penanggulangan KIPI	Jumlah Peserta Sosialisasi	%	94		0	0	0	100		65,600,000	100		65,559,350	100			106.38		Dinas Kesehatan	-
4.40.7		Pemeliharaan rutin/berkala sarana vaksinasi	Jumlah sarana tempat penyimpanan vaksin yang diadakan dan dipelihara	%	40		0	0	0	100		75,000,000	100		74,950,000	100			250.00		Dinas Kesehatan	-
4.40.8		Pelayanan kesehatan bagi Calon Jama'ah Haji/Umrah	Jumlah Calon jemaah haji/umrah yang dilayani kesehatannya (termasuk vaksinasinya)	orang	385		0	0	0	350		0	109,7		0	109			28.31		Dinas Kesehatan	-
4.40.9		Kegiatan Monev Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Haji	Jumlah kegiatan monev Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Haji	kali	10		0	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Kesehatan	-
												Rata - rata kinerja (%)	96.33		193,474,350	164.33						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
5	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan		Prosentasi Sarana dan Prasarana Puskesmas yang terstandarisasi	%	63			44		100			0			44			69.84		Dinas Kesehatan	-
			Prosentasi Puskesmas yang terakreditasi	%	63			0		100			7			7			11.11		Dinas Kesehatan	-
			Persentase pemenuhan kebutuhan ketersediaan obat dan vaksin di sarana kesehatan	persen	100			0		100			100			100			100.00		Dinas Kesehatan	-
			Jumlah peralatan kesehatan yang didistribusikan ke fasyankes sesuai kebutuhan	Set	1			0		1			0			0			0.00		Dinas Kesehatan	-
			Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi sesuai standar	Kegiatan	1			0		1			0			0			0.00		Dinas Kesehatan	-
			Jumlah alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga memiliki izin	Sertifikat	10			0		10			0			0			0.00		Dinas Kesehatan	-
			Tidak ada kasus keracunan karena makanan	kasus	1			0		0 kasus			0			0			200.00		Dinas Kesehatan	-
			Tidak ada kasus keracunan karena obat	kasus	1			0		0 kasus			0			0			200.00		Dinas Kesehatan	-
5.15		**Program Pengadaan dan Peningkatan Kefarmasian**	**Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat, BMHP dan Vaksin**	**persen**	**100**			**100**		**80%**			**100**			**100**			**100.00**		**Dinas Kesehatan**	**-**
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	**persen**	**80**			**60**					**65**			**65**			**81.25**		**Dinas Kesehatan**	**-**
5.15.2		Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang mendapatkan distribusi obat dan vaksin	buah	100%	19	939,561,000	19	0	100	100%	175,364,000	19	19	171,780,917	19	19		19.00		Dinas Kesehatan	Karakter
5.15.9		Penyediaan obat dan BMHP	Jumlah obat dan BMHP yang diadakan untuk di puskesmas dan jaringannya	jenis	100%		10,705,418,598	105	0	100%		1,938,105,638	35		1,913,237,681	140			140.00		Dinas Kesehatan	-
5.15.10		Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian	Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian	buah	80%		126,000,000	11	0	65%		142,960,000	13		140,410,000	13			16.25		Dinas Kesehatan	-
5.15.11		Peningkatan mutu penggunaan obat kesehatan	Jumlah peserta yang memahami penggunaan obat rasional	orang	75%		21,000,000	0	0	70%		3,660,000	30		3,654,600	30			40.00		Dinas Kesehatan	-
Rata - rata kinerja (%)													47.75		2,229,083,198	55.25						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah			Rendah						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
5.16		**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Prosentase Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**%**	**100**			**0**		**100%**			**91**			**91**			**91.00**		**Dinas Kesehatan**	**-**
5.16.12		Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Prosentasi jumlah kejadian kegawatdaruratan yang ditangani	%	100		210,000,000	100	305,790,000	100		268,500,000	25		243,785,000	25			25.00		Dinas Kesehatan	-
5.16.22		Puskesmas Kasarangan	Prosentase Pemanfaatan Biaya Operasional dan Pemanfaatan Dana JKN Puskesmas Kasarangan	%	100%		119,987,597	164	119,987,597	100%		829,592,656	65		0	229			229.00		Dinas Kesehatan	-
5.16.23		Puskesmas Sungai Buluh	Persentase Pemanfaatan Biaya Operasional Pemeliharaan (JKN) Puskesmas Sungai Buluh	%	100%		362,236,557	244.19	115,348,335	100%		809,726,739	92.01		0	336.2			336.20		Dinas Kesehatan	-
5.16.24		Puskesmas Pantai Hambawang	Prosentasi pemanfatan biaya operasional pemeliharaan (JKN Pantai Hambawang)	%	100%		1,083,442,898	225	295,813,890	100%		1,169,961,238	100		0	325			325.00		Dinas Kesehatan	-
5.16.25		Puskesmas Durian Gantang	Prosentasi Pemanfaatan biaya operasional pemeliharaan (JKN) Durian Gantang	%	100%		1,999,249,300	177	178,984,472	100%		583,426,630	87		0	264			264.00		Dinas Kesehatan	-
5.16.26		Puskesmas Ilung	Prosentasi Pemanfaatan Biaya operasional dan Pemeliharaan (JKN) Ilung	%	100		15,663,871,000	246.98	546,402,125	100		1,030,426,318	86		0	332.98			332.98		Dinas Kesehatan	-
5.16.27		Puskesmas Limpasu	Prosentase pemanfaatan biaya operasional dan pemeliharaan dana JKN Puskesmas Limpasu	%	100%		233,331	193	214,792,138	100%		531,865,854	87		0	280			280.00		Dinas Kesehatan	-
5.16.28		Puskesmas Birayang	Prosentasi Pemanfaatan Biaya OperasionalPemeliharaan (JKN) Birayang	%	100		2,676,780,000	281	265,584,097	100		1,077,276,435	99.9		0	380.9			380.90		Dinas Kesehatan	-
5.16.29		Puskesmas Batu Tangga	Prosentasi Pemanfaatan biaya Operasional dan pemeliharaan (JKN) Batu Tangga	%	100		2,543,738,860	228	0	100		496,302,933	99.98		0	327.98			327.98		Dinas Kesehatan	-
5.16.30		Puskesmas Kubur Jawa	prosentasi pemanfaatan biaya operasional pemeliharaan [JKN kubur jawa]	%	100%		631,942,371	192	229,891,796	100		631,942,371	76		0	268			268.00		Dinas Kesehatan	-
5.16.31		Puskesmas Haruyan	Prosentase Pemanfaatan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Dana JKN Puskesmas Haruyan	%			466,225,078	82.4	301,895,934	100		1,156,463,349	70		0	70			7,000.00		Dinas Kesehatan	-
5.16.32		Puskesmas Barikin	Prosentase Pemanfaatan Biaya Operasional Pemeliharaan (JKN Barikin)	%	100%		250,000,000	187.7	137,067,615	100%		395,301,260	77.71		0	265.41			265.41		Dinas Kesehatan	-
5.16.33		Puskesmas Barabai	porsentasi pemanfaatan biaya operasional pemeliharaan (JKN Barabai)	%	100		7,764,489,332	233	545,040,582	100		2,085,861,282	59.35		0	292.35			292.35		Dinas Kesehatan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
5.16.34		Puskesmas Awang Besar	Prosentasi Pemanfaatan Biaya Operasional pemeliharaan (JKN Awang Besar)	%	100		488,328,849	198	122,889,669	100		488,328,849	100		0	298			298.00		Dinas Kesehatan	-
5.16.35		Puskesmas Pagat	Prosentase Pemanfaatan biaya operasional dan pemeliharaan dana JKN Puskesmas Pagat	%	100%		617,620,680	250.7	390,022,714	100%		617,620,680	83.38		0	334.08			334.08		Dinas Kesehatan	-
5.16.36		Puskesmas Hantakan	Posentasi Pemanfaatan Biaya Operasional Pemeliharaan (JKN) Hantakan	%	100%		2,822,380,628	94.57	274,891,000	100%		922,671,525	88.34		0	88.34			88.34		Dinas Kesehatan	-
5.16.37		Puskesmas Kalibaru	Prosentase pemanfaatan biaya operasional dan pemeliharaan dana JKN Puskesmas Kalibaru	%	100%		505,453,236	242.7	152,348,029	100%		505,453,236	90.6		0	333.3			333.30		Dinas Kesehatan	-
5.16.38		Puskesmas Pandawan	Prosentasi Pemanfaatan Biaya operasional dan Pemeliharaan (JKN) Pandawan	%	100		1,263,173,256	273.4	389,964,775	100		1,263,173,256	60.38		0	333.78			333.78		Dinas Kesehatan	-
5.16.39		Puskesmas Kambat Utara	Prosentase Pemanfaatan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Dana JKN Puskesmas Kambat Utara	%	100%		0	254	302,307,588	100%		1,387,718,934	69.29		0	323.29			323.29		Dinas Kesehatan	-
5.16.40		Puskesmas Tandilang	prosentasi pemanfaatan biaya operasional dan pemeliharaan (JKN) Tandilang	%	100		215,202,925	248.4	73,203,000	100		215,202,925	83.2		0	331.6			331.60		Dinas Kesehatan	-
5.16.43		Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Prosentasi jasa pelayanan kesehatan yang dibayarkan	%	100		5,235,621,600		12,129,619,632	100		2,566,000,000	30		2,320,842,100	30			30.00		Dinas Kesehatan	-
													Rata - rata kinerja (%)		2,564,627,100	273.15						
													Predikat Kinerja	Tinggi		Sangat tinggi						
5.17		**Program Pengawasan Obat**	**Persentase produk obat yang memenuhi standar kesehatan**	**persen**	**95**			**0**		**85%**			**85**			**85**			**89.47**		**Dinas Kesehatan**	**-**
5.17.8		Pengawasan keamanan obat	Jumlah toko obat dan Apotek yang memiliki ijin	Buah	25		72,846,000	10	0	10		0	0		0	0			0.00		Dinas Kesehatan	-
			Jumlah Toko obat dan apotek yang diawasi	Buah	20			10		10			0			0			0.00		Dinas Kesehatan	-
													Rata - rata kinerja (%)	0.00	0	0.00						
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah		Sangat Rendah						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
5.23		**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	**Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi**	**PKM**	**19**			**6**		**7**			**7**			**7**			**36.84**		**Dinas Kesehatan**	**-**
5.23.9		Penyediaan Tenaga Kontrak Medis/Paramedis/Kesmas	Jumlah Tenaga Kesehatan dan non Kesehatan yang terkontrak	Orang	299		7,220,000,000	40	508,259,500	232		5,137,000,000	189		2,804,450,000	229			76.59		Dinas Kesehatan	-
5.23.10		Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan	Prosentasi SDMK yang bersertifikat	%	100		0	0	0	100		0	0		0	0			0.00		Dinas Kesehatan	-
5.23.11		Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Kesehatan	Jumlah Nakes Teladan	orang	27		300,000,000	18	59,109,500	27		56,700,000	24		46,800,000	24			88.89		Dinas Kesehatan	-
5.23.13		Operasional BLUD Akademi Keperawatan Murakata	Prosentase biaya Operasional BLUD	%	100		8,106,704,500	78	1,163,890,427	100		621,205,350	101		0	101			101.00		Dinas Kesehatan	-
													Rata - rata kinerja (%)	63.00		2,851,250,000	71.75					
													Predikat Kinerja	Rendah			Sedang					
5.24		**Program pelayanan kesehatan penduduk miskin**	**Prosentasi penduduk yang dilayani dari Jaminan Kesehatan**	**%**	**100**			**0**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Dinas Kesehatan**	**-**
5.24.11		Peningkatan Pemberian Jaminan Kesehatan penduduk	Prosentasi penduduk yang dilayani dari Jaminan kesehatan	%	100		17,000,000,000	117	10,505,646,287	100		28,289,482,000	302		28,247,743,395	419			419.00		Dinas Kesehatan	-
													Rata - rata kinerja (%)	302.00		28,247,743,395	419.00					
													Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi					
5.25		**Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya**	**Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar**	**%**	**100**			**65**		**100**			**65**			**65**			**65.00**		**Dinas Kesehatan**	**-**
5.25.1		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun/direlokasi	buah	2		7,329,614,575	2	2,712,006,116	2		7,329,614,575	2		3,947,526,172	2			100.00		Dinas Kesehatan	-
5.25.2		Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun	buah	5		0	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Kesehatan	-
			jumlah puskesmas yang dibangun	buah				0		0			0			0			0.00		Dinas Kesehatan	-
5.25.7		Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah Sarana dan Prasarana puskesmas yang diadakan	Puskesmas	3		296,163,000	9	0	9		296,163,000	9		287,930,330	9			300.00		Dinas Kesehatan	-
5.25.8		Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	Jumlah sarana dan prasarana puskesmas pembantu yang diadakan	paket	10		0	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Kesehatan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
5.25.10		Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	Jumlah Sarana dan prasarana puskesmas keliling yang diadakan	buah	4		0	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Kesehatan	-
5.25.21		Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang direhab	buah	5		0	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Kesehatan	-
5.25.24		Rehabilitasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhab	buah	4		12,885,714,000	2	0	3		1,287,857,000	3		754,938,658	3			75.00		Dinas Kesehatan	-
5.25.25		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	buah	5		60,846,359,200	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Kesehatan	-
5.25.32		Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang direhab	buah	5		10,453,473,000	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Kesehatan	-
													Rata - rata kinerja (%)	52.78		4,990,395,160	33.33					
													Predikat Kinerja	Rendah			Sangat Rendah					
5.41		**Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas**	**Prosentase penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas**	**%**	**100**			**64**		**100**			**36**			**100**			**100.00**		**Dinas Kesehatan**	**-**
5.41.1		Akreditasi di Puskesmas	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	buah	6		8,914,641,400	12	1,086,032,900	19		2,112,552,000	7		1,462,571,740	19			316.67		Dinas Kesehatan	-
													Rata - rata kinerja (%)	116.00		1,462,571,740	100.00					
													Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi					
5.42		**Program Pelayanan kesehatan Tradisional**	**Prosentase puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional**	**%**	**100**					**42**			**25**			**25**			**25.00**		**Dinas Kesehatan**	**-**
5.42.1		Upaya pelayanan kesehatan tradisional	Prosentase puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	%	100		0	15	0	42		0	25		0	40			40.00		Dinas Kesehatan	-
													Rata - rata kinerja (%)	25.00		0	95.00					
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi					
5.43		**Program Peningkatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**	**Prosentase ketersediaan alat kesehatan di Fasyankes sesuai standar**	**%**	**65**			**180**		**60**			**90**			**270**			**415.38**		**Dinas Kesehatan**	**-**
			Persentase peralatan kesehatan yang dikalibrasi di Fasyankes	**%**	**55**			**150**		**50**			**90**			**240**			**436.36**		**Dinas Kesehatan**	**-**
			Persentase alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memiliki izin	**%**	**65**			**180**		**50**			**90**			**270**			**415.38**		**Dinas Kesehatan**	**-**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
5.43.1		Pengadaan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Peralatan kesehatan yang di adakan	Unit	100		5,000,000,000	0	0	60		0	85		0	85			85.00		Dinas Kesehatan	-
5.43.2		Pemeliharaan alat kesehatan dan bimbingan penggunaan peralatan kesehatan sesuai prosedur	Prosentase alat kesehatan yang dikalibrasi sesuai standar	%	100		350,000,000	0	0	50		50,000,000	95		49,025,000	95			95.00		Dinas Kesehatan	-
5.43.4		Pengawasan mutu alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga	persentase alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga memiliki izin	persen	20		90,000,000	0	0	10		0	0		0	0			0.00		Dinas Kesehatan	-
Rata - rata kinerja (%)													60.00		49,025,000	110.33						
Predikat Kinerja													Rendah			Sangat tinggi						
5.46		**Program Peningkatan Mutu Keamanan Pangan**	**Persentase produk pangan yang memenuhi standar kesehatan**	**persen**	**100**			**80**		**85%**			**0**			**0**			**0.00**		**Dinas Kesehatan**	**-**
5.46.1		Pengawasan mutu keamanan pangan	Jumlah kader PIRT yang mendapat pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan / Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) dalam rangka Sertifikasi P IRT	orang	30		107,168,121	90	0	30		11,959,800	30		10,806,900	120			400.00		Dinas Kesehatan	-
			Jumlah sample makanan yang diuji	buah		data		2		2			2	2		2	8		200.00		Dinas Kesehatan	Karakter
Rata - rata kinerja (%)													100.00		10,806,900	500.00						
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan dan Jembatan untuk Kebutuhan Masyarakat		Prosentase aksesibiltas Jalan yang menghubungkan Pusatâ€"Pusat Kegiatan (PK) dalam wilayah kabupaten	persen (%)	100			100		100			100			100			100.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	persen (%)	69.63			67.88		68,76									0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
1.39		**Program Peningkatan Jalan dan Jembatan**	**Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan**	**Meter**	**313507**			**168149**		**205499**			**19705**			**187854**			**59.92**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**-**
			Jumlah jembatan yang dibangun/ ditingkatkan/ dipelihara	**Buah**	**585**			**301**		**291**			**82**			**383**			**65.47**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**-**
1.39.1		Kegiatan Peningkatan Jalan	Jumlah dokumen hasil perencanaan	Dokumen	31335		664,451,444,000	45	43,825,394,665	7		39,147,852,000	5		33,830,306,180	50			0.16		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen	26249			44		7			7			51			0.19		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah dokumen hasil evaluasi	Dokumen				44		7			7			51			5,100.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
1.39.2		Kegiatan Peningkatan Jembatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan	Dokumen	116		411,620,343,000	41	19,961,541,557	19		41,604,456,000	19		30,118,078,096	60			51.72		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen				153		11			11			164			16,400.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah dokumen hasil evaluasi	Dokumen				153		11			11			164			16,400.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
												Rata - rata kinerja (%)	5.33		63,948,384,276	1,821.67						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi						
1.40		**Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	**Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara**	**Meter**	**169446**			**5,8E+07**		**84831**			**28653.09**			**58128393.09**			**34,304.97**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**-**
			Jumlah jembatan yang dibangun/ ditingkatkan/ dipelihara	**Buah**	**119**			**301**		**73**			**3**			**304**			**255.46**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**-**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.40.1		Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah dokumen hasil perencanaan	Dokumen	25337,5		227,345,504,700	8	3,339,982,550	8		31,197,138,000	7		27,927,747,055	15			0.06		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen				11		9			8			19			1,900.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah dokumen hasil evaluasi	Dokumen				11		9			8			19			1,900.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
1.40.2		Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan	Dokumen	13		28,463,507,000	14	1,018,529,950	1		2,189,500,000	1		1,869,818,450	15			115.38		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen				71		2			2			73			7,300.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah dokumen hasil evaluasi	Dokumen				71		2			2			73			7,300.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
1.40.5		Kegiatan Rehabilitasi Jalan dalam kondisi darurat	Jumlah dokumen hasil perencanaan	Dokumen	2		410,899,000	1	185,255,050	1		255,160,000	0		212,331,350	1			50.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen				1		1			1			2			200.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah dokumen hasil evaluasi	Dokumen				1		1			1			2			200.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
1.40.6		Kegiatan Rehabilitasi Jembatan dalam kondisi darurat	Jumlah dokumen hasil perencanaan	Dokumen	2		410,899,000	0	0	1		191,370,000	0		141,275,350	0			0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen				0		1			1			1			100.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah dokumen hasil evaluasi	Dokumen				0		1			1			1			100.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
												Rata - rata kinerja (%)	1.75		30,151,172,205	2,527.25						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi						
2	Terwujudnya Infrastruktur kecipta-karyaan yang layak		Persentase cakupan layanan air minum	persen	86			78.97		80.85			80.58			80.58			93.70		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Persentase program nasional keciptakaryaan yang dilaksanakan di daerah	persen	100			95		100%			100			100			100.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Rasio infrastruktur pejalan kaki yang layak dengan panjang jalan di perkotaan	meter trotoar : meter Jalan Perkotaan	65			33,4		0			0			33,4			50.77		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah bangunan gedung negara dan prasarana publik yang layak	Buah/Unit	57			47		5			5			52			91.23		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Persentase rumah tangga bersanitasi yang layak	persen	70			61.01		3,94%			62.95			62.95			89.93		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Persentase berkurangnya luas genangan	Persen	65			46,111		48,33%			53			53			81.54		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Persentase Ruang Terbuka Hijau dari luas perkotaan	Persen	4			3,21		3,21			3,21			3,21			75.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
2.16		**Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong**	**Panjang saluran drainase yang terbangun, dipelihara dan berfungsi dengan baik**	**meter**	**31614**			**19671**		**1453**			**1453**			**21124**			**66.82**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**-**
2.16.7		Kegiatan Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Jumlah dokumen hasil perencanaan	dokumen	2000		65,551,226,685	9	0	5		6,390,678,334	5		5,805,739,524	14			0.70		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	dokumen				35		9			9			44			4,400.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah dokumen hasil evaluasi	dokumen				35		9			9			44			4,400.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
2.16.8		Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Jumlah dokumen hasil perencanaan	dokumen	1		1,483,545,000	3	0	1		298,250,000	1		274,732,000	4			400.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	dokumen				3		1			1			4			400.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah dokumen hasil evaluasi	dokumen				3		1			1			4			400.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
Rata - rata kinerja (%)													50.00		6,080,471,524	1,228.00						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.27		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum**	**Sarana dan Prasarana Air Minum yang terbangun**	**Meter**	**150899**			**99392**		**150899**			**29734**			**29734**			**19.70**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**-**
2.27.10		Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen Evaluasi	10000		58,928,923,000	2	0	5		11,750,159,000	5		7,123,588,900	5			0.05		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Dokumen				2		3			3			3			300.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring	Dokumen				2		5			5			5			500.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
2.27.11		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen Evaluasi	180		5,904,920,000	2	0	1		2,232,839,000	1		1,962,960,000	1			0.56		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Dokumen				2		2			1			1			100.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring	Dokumen				2					1			1			100.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
												Rata - rata kinerja (%)	0.00		9,086,548,900	225.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi						
2.29		**Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**	**Tingkat keberhasilan program nasional keciptakaryaan yang dilaksanakan di daerah**	**persen**	**100**	**100**					**100%**			**data**						**0.00**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**Karakter**
2.29.4		Optimalisasi Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab/Kota (Satker PIP Kab/Kota)	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Dokumen Perencanaan	100%		3,071,781,668	1	0	1		288,120,000			245,527,000				0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring	dokumen monitoring						0									0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah dokumen hasil evaluasi	Dokumen		1					1								0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	0.00		245,527,000	0.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat Rendah						
2.31		**Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan**	**Panjang trotoar yang dibangun/ditingkatkan dan yang dipelihara dengan baik**	**meter**	**27562**			**1010**		**0**			**0**			**1010**			**3.66**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**-**
2.31.7		Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar	Jumlah dokumen hasil perencanaan	dokumen	500		1,481,425,000	3	0	2		291,550,000	2		269,779,000	5			1.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Jumlah laporan hasil monitoring	dokumen				3		1			1			4			400.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah dokumen hasil evaluasi	dokumen				3		1			1			4			400.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
2.31.8		Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Trotoar	Jumlah dokumen hasil perencanaan	dokumen	625		22,090,251,646	5	0	1		75,316,667	1		73,447,000	6			0.96		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	dokumen				3		0			0			3			300.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah dokumen hasil evaluasi	dokumen				3		0			0			3			300.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
												Rata - rata kinerja (%)	0.00		343,226,000	825.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi						
2.34		**Program Peningkatan Sarana Prasarana Bangunan Gedung Negara dan Prasarana Publik**	**Persentase peningkatan Sarana Prasarana Bangunan Gedung Negara dan prasarana publik yang layak**	**Unit**	**57**			**47**		**5**			**5**			**52**			**91.23**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**-**
2.34.1		Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Negara dan Prasarana Publik	Jumlah laporan hasil monitoring	Laporan Monitoring	1		7,500,000,000	13	1,489,713,885	4		6,746,680,804	4		6,156,732,849	17			1,700.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Laporan hasil Perencananaan	Dokumen Perencanaan				5		5			5			10			1,000.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Laporan hasil Evaluasi	Laporan Evaluasi				13		4			4			17			1,700.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
2.34.2		Kegiatan Inspeksi Bangunan Gedung Negara dan Prasarana Publik	persentase Jumlah rekomendasi teknis yang terbitkan	Persen	100%		500,000,000	0	0	100%		254,480,000	0		39,335,350	0			0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Laporan hasil Evaluasi	Laporan Evaluasi				0		10			0			0			0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Laporan hasil Perencananaan	Dokumen Perencanaan				0					0			0			0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.34.6		Kegiatan Rehabilitasi Rumah Negara	Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen Hasil Monitoring	1		500,000,000	34	96,566,800	1		275,018,000	1		234,391,000	35			3,500.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Laporan hasil Perencananaan	Dokumen Perencanaan				34					1			35			3,500.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Laporan hasil Evaluasi	Dokumen evaluasi				34					1			35			3,500.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
Rata - rata kinerja (%)													166.67		6,430,459,199	1,516.67						
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi						
2.38		**Program Pengembangan Sarana dan Prasaran Air Limbah**	**Sarana dan Prasarana Air Limbah yang terbangun**	**Unit**	**1810**			**487**		**1810**			**1288**			**1288**			**71.16**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**-**
2.38.1		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Dokumen	10		28,255,411,668	11	0	11		5,058,809,000	11		4,948,449,399	11			110.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen				11		11			11			11			1,100.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Dokumen hasil evaluasi	Dokumen				11					11			11			1,100.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
Rata - rata kinerja (%)													110.00		4,948,449,399	200.00						
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi						
2.44		**Program Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**persentase penambahan luas Ruang Terbukan Hijau**	**persen**	**4**					**3,21**			**3,21**			**3,21**			**75.00**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**-**
2.44.1		Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Dokumen Perencanaan	0,5 hektar		2,000,000,000	0	0	1		102,240,000	1		99,995,000	1			100.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Dokumen hasil evaluasi	Dokumen Evaluasi				0		1			0			0			0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	Dokumen Monitoring				0		0			0			0			0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.44.2		Rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Dokumen Perencanaan	0,5Hektar		1,000,000,000	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
													Rata - rata kinerja (%)		99,995,000	inf						
													Predikat Kinerja			Sangat Rendah						
3	Meningkatnya penyediaan air untuk Irigasi pertanian		Prosentase Luas lahan pertanian yang terairi jaringan irigasi	persen (%)	46			58,37		39,43			66,75			66,75			143.48		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
3.24		**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi**	**Luas lahan pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi**	**Ha**	**11037**			**5632**		**1172**			**1172**			**6804**			**61.65**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**-**
3.24.15		Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Dokumen	5		1,149,916,000	1	5,293,243,698	5		1,149,916,000	5		956,085,150	5			100.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen				16		5			5			5			500.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Dokumen hasil evaluasi	Dokumen				16		5			5			5			500.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
3.24.19		Integrated Participatory Deplopment and Mangemen of Irigation (IPDMIP)	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Dokumen	-		4,717,670,000	0	121,384,100	0		4,717,670,000	0		624,545,375	0			0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen				0		2			0			0			0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Dokumen hasil evaluasi	Dokumen				0		2			0			0			0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
3.24.22		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Pintu Air	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Dokumen	1000 & 5		8,354,951,530	1	725,220,900	5		8,354,951,530	4		5,579,414,867	4			0.40		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen				3		15			13			13			1,300.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Dokumen hasil evaluasi	Dokumen				3		15			13			13			1,300.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.24.23		Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pintu Air	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Dokumen	5		1,008,640,000	1	530,601,151	1		1,008,640,000	0		608,270,976	0			0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen				2		3			2			2			200.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Dokumen hasil evaluasi	Dokumen				2		3			2			2			200.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
												Rata - rata kinerja (%)	33.33		7,768,316,368	228.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi						
4	Meningkatnya Pengendalian Banjir		Lamanya genangan banjir tidak lebih dari 5 hari	hari	1					3			3			3			-100.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
4.17		**Program Perlindungan Tebing Sungai**	**Panjang tebing sungai yang dilindungi**	**Meter**	**6000**			**2030**		**744**			**549**			**2579**			**42.98**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**-**
4.17.5		Pembangunan Konstruksi Perkuatan Tebing Sungai	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Dokumen	5000		3,588,140,000	3	1,458,846,305	2		4,164,322,871	2		3,693,404,645	2			0.04		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen				5		16			16			16			1,600.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Dokumen hasil evaluasi	Dokumen				5		16			16			16			1,600.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
4.17.7		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Konstruksi Perkuatan Tebing Sungai	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Dokumen	500		0	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen				0		0			0			0			0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Dokumen hasil evaluasi	Dokumen				0		0			0			0			0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
												Rata - rata kinerja (%)	0.00		3,693,404,645	150.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi						
4.28		**Program Pengendalian Banjir**	**Lamanya genangan banjir tidak lebih dari 5 hari**	**Hari**	**1**			**4**		**3**			**3**			**3**			**300.00**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**-**
4.28.7		Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Dokumen	5000		6,176,205,700	1	1,488,783,600	11		6,076,205,700	11		2,721,965,050	11			0.22		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen				4		11			10			10			1,000.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Dokumen hasil evaluasi	Dokumen				4		11			10			10			1,000.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
4.28.8		Pembangunan/rehabilitasi bangunan pengendali dan pengatur sungai	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Dokumen	4		1,244,395,000	0	0	3		944,395,000	2		599,214,450	2			50.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen				0		2			1			1			100.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Dokumen hasil evaluasi	Dokumen				0		2			1			1			100.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
Rata - rata kinerja (%)													25.00		3,321,179,500	223.00						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah			Sangat tinggi						
5	Meningkatnya akses angkutan produksi pertanian dan perkebunan		Luas areal pertanian dan perkebunan yang bisa diakses	Hektar	720			250		80			80			330			45.83		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
5.30		**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan**	**Jumlah jembatan pertanian dan perkebunan yang dibangun/direhab/dipelihara**	**Buah**	**72**			**25**		**8**			**8**			**33**			**45.83**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**-**
5.30.2		Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaanan Jembatan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Dokumen	250		2,514,548,000	1	1,266,828,700	1		2,514,548,000	1		2,210,560,400	1			0.40		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen	100			5		8			8			8			8.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Dokumen hasil evaluasi	Dokumen				5		8			8			8			800.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
Rata - rata kinerja (%)													4.00		2,210,560,400	150.00						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
6	Meningkatnya Kualitas SDM pelaku konstruksi (Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa)		Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	persen (%)	0			0		0						0			0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
6.32		**Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi**	**Persentase peningkatan pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat**	**Persen (%)**	**3**					**3**									**0.00**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**-**
6.32.2		Kegiatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Bimbingan Teknis dan Pelatihan	buah	3		3,415,800,000		0	3		79,200,000			56,700,000				0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
6.32.3		Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Layanan	Layanan	3		6,000,000,000	0	0	3		0			0	0			0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
Rata - rata kinerja (%)													0.00		56,700,000	0.00							
Predikat Kinerja													Sangat Rendah			Sangat Rendah							
7	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Rawa untuk Pertanian		Luas lahan rawa yang termanfaatkan untuk pertanian	Hektar	250			5		20			20			25			10.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
7.43		**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Daerah Rawa**	**Luas lahan rawa yang termanfaatkan untuk pertanian**	**Ha**	**250**			**5**		**20**			**20**			**25**			**10.00**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**-**
7.43.21		Pembangunan/Peningkatan /Rehabilitasi Jaringan Rawa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Dokumen	12		5,000,000,000	0	87,085,650	6		1,763,830,000	5		1,380,665,600	5			41.67		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen				1		4			4			4			400.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Jumlah Dokumen hasil evaluasi	Dokumen				1		4			4			4			400.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
Rata - rata kinerja (%)													41.00		1,380,665,600	283.00							
Predikat Kinerja													Sangat Rendah			Sangat tinggi							
8	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rekomendasi	persen	100					100			100			100			100.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
8.35		**Program Perencanaan Tata Ruang**	**Persentase peraturan Tata ruang Daerah yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundangan Tata Ruang**	**persen**	**33**			**8,33**		**16,67**			**16,67**			**16,67**			**48.48**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**-**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
8.35.16		Kegiatan Perencanaan Tata Ruang	Jumlah naskah perencanaan tata ruang yang disusun	Dokumen Perencanaan	1		2,679,435,000	1	433,738,500	3		347,760,000	3		304,844,250	3			300.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
Rata - rata kinerja (%)													300.00		304,844,250	100.00							
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi							
8.36		**Program Pemanfaatan Ruang**	**Meningkatnya kepuasan pelayanan pemanfaatan ruang**	**persen**	**100**					**100%**			**100**			**100**			**100.00**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**-**
8.36.10		Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen hasil evaluasi (Jumlah rekomendasi yang diterbitkan)	Dokumen evaluasi	20		1,582,205,000	10	162,880,000	20		482,220,000	20		225,465,800	20			100.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
Rata - rata kinerja (%)													100.00		225,465,800	100.00							
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi							
8.42		**Program Pengendalian Ruang**	**Persentase tingkat kepatuhan sesuai dengan rekomendasi pemanfaatan ruang**	**persen**	**100**	**data**		**0**			**100%**			**data**		**0**			**0.00**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**Karakter**
8.42.1		Kegiatan Pengendalian Ruang	Jumlah laporan pengawasan	Buah	12		900,000,000	0	0	12		0			0				0.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
Rata - rata kinerja (%)													0.00		0	0.00							
Predikat Kinerja													Sangat Rendah			Sangat Rendah							

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman																				
1	Terwujudnya infrastruktur rumah, perumahan dan permukiman yang layak		Persentase Sarana dan Prasarana Perumahan Yang Layak	%	100	100		69		75	74.53		76	75.85		76	75.85		76.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	%	0	0		78		57	56.60		60	60.24		60	60.24		6,000.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Persentase sarana dan prasarana permukiman yang layak	%	0	0		62		67	67,12		67	66,69		67	66,69		6,700.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh perkotaan	%	0.00	0.00		87			50.23		0	33.72		87	33.72		8,700.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
1.15		**Program Pengembangan Perumahan**	**Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan**	**Unit**	**7835**			**2597**		**803**			**800**			**3397**			**43.36**		**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	-
1.15.2		Optimalisasi Bidang Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penunjang Kebijakan Perumahan	Dokumen	2		3,942,760,000	0	16,000,000	4		753,460,000	4		689,862,000	4			200.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
			Jumlah Kebijakan dan Peraturan tentang Perumahan yang disusun pada Tahun Berjalan	Dokumen		6		2		2	2		2	2		4	2		400.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi PSU Perumahan pada Tahun Berjalan	Dokumen		3		1		1	1		1	1		1	1		100.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.15.4		Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah Rumah Bagi MBR yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	1701		88,140,000,000	1123	344,966,025	495		682,177,000	492		545,065,000	1615			94.94		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
			Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Dokumen		10		5		0	0		2	0		7	0		700.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Dokumen		10		3		1			1	1		4	1		400.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Dokumen		10		3		1			1	1		4	1		400.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
1.15.11		Kegiatan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah rumah bagi MBR yang terbangun pada tahun berjalan	Unit	100		10,350,000,000	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
			Jumlah Dokumen Pendataan MBR yang belum Memiliki Rumah (Backlog)	Dokumen		0		0		0	0		0	0		0	0		0.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Pembangunan Baru Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Dokumen		0		0		0	0		0	0		0	0		0.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Dokumen		0		0		0	0		0	0		0	0		0.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
1.15.12		Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang didampingi bersama Fasilitator untuk meningkatkan kualitas nya menjadi Layak Huni melalui Program APBN	MBR	500		1,000,000,000	1474	26,106,200	308		50,000,000	308		33,900,000	1782			356.40		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring rumah bagi MBR yang dtingkatkan kualitasnya melalui pendampingan program BSPS Dana APBN	Dokumen		5		3		1			1	1		4	1		400.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rumah bagi MBR yang dtingkatkan kualitasnya melalui pendampingan program BSPS Dana APBN	Dokumen		5		3		1			1	1		4	1		400.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	108.75		1,268,827,000	726.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
1.21		**Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Perumahan**	**Jumlah sarana dan prasarana kawasan perumahan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya**	**meter**	**92600**	**92600**		**63452**		**5902**	**5902**		**6785**	**6785**		**70237**	**70237**		**75.85**		**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**Karakter**
1.21.5		Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Perumahan	Panjang jalan lingkungan di kawasan perumahan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya (lebar di atas 3 m)	meter	3000		30,525,000,000	51846.08	744,904,601	5500		7,332,560,000	6383		6,475,341,000	58229.08			1,940.97		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
			Jumlah Dokumen perencanaan jalan lingkungan kawasan perumahan	Dokumen		5		2		1			1	1		3	3		300.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Jalan Lingkungan Kawasan Perumahan	Dokumen		5		2		1			1	1		3	3		300.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Jalan Lingkungan Kawasan Perumahan	Dokumen		5		2		1			1	1		3	3		300.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
1.21.6		Pembangunan dan peningkatan drainase lingkungan kawasan perumahan	Panjang drainase lingkungan di kawasan perumahan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya	meter	2500		18,750,000,000	11606.4	247,896,985	402		561,450,000	402		491,798,000	12008.4			480.34		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
			Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase Lingkungan Kawasan Perumahan	Dokumen		5		2		1			1	1		3	3		300.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Drainase Lingkungan Kawasan Perumahan	Dokumen		5		2		1			1	1		3	3		300.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Drainase Lingkungan Kawasan Perumahan	Dokumen		5		2		1			1	1		3	3		300.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	174.00		6,967,139,000	2,922.50						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
1.22		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman**	**Jumlah sarana dan prasarana kawasan permukiman yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya**	**meter**	**115525.47**			**72402.09**		**4423**			**3926.9**			**76328.99**			**66.07**		**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**-**
1.22.1		Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman	Panjang jalan lingkungan Kawasan Permukiman yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya	meter	5000		21,350,000,000	47982.74	776,694,326	4423		2,749,415,000	3926.9		2,690,760,800	51909.64			1,038.19		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
			Jumlah Dokumen Perencanaan jalan Lingkungan Kawasan Permukiman	dokumen		5		2		1			1	1		3	3		300.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman	dokumen		5		2		1			1	1		3	3		300.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman	dokumen		5		2		1			1	1		3	3		300.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	138.00		2,690,760,800	2,073.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
2	Terwujudnya infrastruktur permukiman yang layak di kawasan kumuh		Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh Perkotaan	%	0			58.29		50.23%			33,72			33,72			3,300.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.24		**Program Penanganan Kawasan Kumuh**	**Luas Kawasan Kumuh**	**Ha**	**0**			**82.45**		**26,51**			**47**			**47**			**4,700.00**		**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**-**
2.24.1		Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh	Panjang jalan lingkungan di kawasan kumuh yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya	meter	3500		319,935,000	1437,50	303,986,620	1586		1,429,820,000	2902.4		1,292,455,600	2902.4			82.93		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
			Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh	dokumen		5		2		1			1	1		3	3		300.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh	dokumen		5		2		1			1	1		3	3		300.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh	dokumen		5		2		1			1	1		3	3		300.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
2.24.2		Pembangunan dan Peningkatan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh	Panjang drainase lingkungan di kawasan kumuh yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya	meter	3500		21,000,000,000	1396	118,840,502	1118		1,376,310,000	1867		1,323,467,300	1867			53.34		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
			Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh	dokumen		5		2		1			1	1		3	3		300.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh	dokumen		4		1		1			1	1		2	2		200.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan dan Peningkatan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh	dokumen		8		1		5			5	5		6	6		600.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.24.9		Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Luas permukiman kumuh yang tertangani (pendampingan program APBN) dengan berbasis masyarakat	Ha	10		1,500,000,000	59.01	0	10		175,750,000	34.75		113,620,000	93.76			937.60		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	dokumen		5		2		1			1	1		3	3		300.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	dokumen		5		2		1			1	1		3	3		300.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	dokumen		5		2		1			1	1		3	3		300.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
2.24.15		Kegiatan Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Permukiman Kumuh	Luas permukiman kumuh yang tertangani perkawasan kumuh dengan penanganan 7 indikator	Ha	1		16,500,000,000	0	0	1		101,500,000	0		86,380,000	0			0.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
			Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Permukiman Kumuh	dokumen		4		1		1			1	1		2	2		200.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Permukiman Kumuh	dokumen		0		0		0			0	0		0	0		0.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
			Jumlah Laporan Evaluasi Kegiatan Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Permukiman Kumuh	dokumen		0		0		0			0	0		0	0		0.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
Rata - rata kinerja (%)													183.50		2,815,922,900	976.50							
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi							

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Pertanahan																				
3	Terpenuhinya kebutuhan tanah untuk kepentingan umum		Persentase tersedianya tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Persentase	100			13		43,37			79.7			92.7			92.70		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
3.16		**Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Luas lahan yg dibebaskan untuk kepentingan umum**	**Ha**	**100**			**16**		**4,5**			**0.7**			**16.7**			**16.70**		**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**-**
			Teranalisanya dokumen administrasi rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan tanah yang akan diterbitkan	**Rekomtek**	**2**			**18**		**10**			**7**			**25**			**1,250.00**		**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**-**
3.16.3		Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah	Dokumen	10		13,202,890,000	5.985	0	3		12,202,890,000	3		4,733,174,667	8.985			89.85		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
			Jumlah Rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan tanah yang ditata dan ditertibkan pengadministrasiannya	Rekomtek		data		0			10		0	14		0	14		0.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	30.00		4,733,174,667	549.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi						
4	Meningkatnya ketertiban Administrasi Pertanahan		Tersedianya rumusan kebijakan pendaftaran tanah berupa Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)	Raperbup /Sosialisasi	4			2		0			2			4			100.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
5	Meningkatnya Sistem Informasi Pertanahan yang komprehensif secara sistematis		Terwujudnya data Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang komprehensif secara sistematis	Sistem / Peta	1			0		0			0			0			0.00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																				
1	Meningkatnya peran koperasi dan UMK dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah		Persentasi koperasi yang tumbuh dan berkembang	%	60			70.13		56			54			54			90.00		Dinas Perdagangan	-
1.15		**Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil menengah yang Kondusif**	**Jumlah MoU dengan distributor yang dilaksanakan**	**MoU**	**280**			**30**		**50**			**4**			**4**			**1.43**		**Dinas Perdagangan**	**-**
1.15.8		Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pengusaha UKM yang mengikuti sosialisasi	UKM	50		119,192,000	70	0	50		14,858,500	50		14,838,500	120			240.00		Dinas Perdagangan	-
													Rata - rata kinerja (%)			100.00		14,838,500	240.00			
													Predikat Kinerja			Sangat tinggi			Sangat tinggi			
1.16		**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM**	**Persentase Pertumbuhan Omset (rata-rata)**	**%**	**4**			**3**		**3,24**			**3**			**3**			**75.00**		**Dinas Perdagangan**	**-**
1.16.6		Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah UKM yang dilatih	UKM	60		190,582,300	70	0	60		16,470,000	60		16,150,000	130			216.67		Dinas Perdagangan	-
1.16.10		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah UKM yang dimoniva	UKM	180		141,900,000	60	0	180		0	60		0	120			66.67		Dinas Perdagangan	-
													Rata - rata kinerja (%)			66.50		16,150,000	141.00			
													Predikat Kinerja			Sedang			Sangat tinggi			
1.17		**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	**% Pertumbuhan pelaku usaha UKM**	**%**	**76**			**73**		**74**			**23**			**23**			**30.26**		**Dinas Perdagangan**	**-**
1.17.2		Pengembangan klaster bisnis	Jumlah jalinan kerjasama dan penerapan teknologi tepat guna bagi UKM	UKM	4		421,050,000	0	0	4		0	0		0	0			0.00		Dinas Perdagangan	-
1.17.5		Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Evaluasi penggunaan dana pemerintah bagi UKM	UKM	50		75,220,000	50	0	50		0	0		0	50			100.00		Dinas Perdagangan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.17.12		Pengembangan pasar produk UKM	Jumlah produk UKM yang dibina	produk	9		297,650,000	0	0	7		49,980,000	7		49,980,000	7			77.78		Dinas Perdagangan	-
												Rata - rata kinerja (%)	25.67		49,980,000	66.67						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sedang						
1.18		**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan SDM Koperasi**	**Jumlah koperasi aktif**	**koperasi**	**68**			**54**		**63**			**54**			**54**			**79.41**		**Dinas Perdagangan**	**-**
1.18.4		Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah Pengurus koperasi yang memahami aturan perkoperasian	orang	60		300,000,000	75	0	60		0	0		0	75			125.00		Dinas Perdagangan	-
1.18.8		Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Jumlah Pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan	orang	60		300,000,000	30	0	60		25,614,800	60		25,613,900	90			150.00		Dinas Perdagangan	-
1.18.9		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah koperasi yang dilakukan Moniva dan pelaporan	koperasi	60		120,000,000	60	0	60		0	60		0	60			100.00		Dinas Perdagangan	-
1.18.12		Penumbuhan Koperasi Baru di Kab. HST	Jumlah Pra Koperasi yang terbentuk	koperasi	1		108,000,000	4	0	1		11,074,800	1		11,074,800	5			500.00		Dinas Perdagangan	-
1.18.16		Pengembangan wawasan bagi pengurus koperasi	Jumlah Pengurus yang mengikuti pengembangan wawasan	orang	5		170,000,000	0	0	5		0	0		0	0			0.00		Dinas Perdagangan	-
												Rata - rata kinerja (%)	60.00		36,688,700	175.00						
												Predikat Kinerja	Rendah			Sangat tinggi						
			Pertumbuhan UMK	UMK	9945			8390		8445			10362			10362			104.19		Dinas Perdagangan	-
1.15		**Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil menengah yang Kondusif**	**Jumlah MoU dengan distributor yang dilaksanakan**	**MoU**	**280**			**30**		**50**			**4**			**4**			**1.43**		**Dinas Perdagangan**	**-**
1.15.8		Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pengusaha UKM yang mengikuti sosialisasi	UKM	50		119,192,000	70	0	50		14,858,500	50		14,838,500	120			240.00		Dinas Perdagangan	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		14,838,500	240.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
1.16		**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM**	**Persentase Pertumbuhan Omset (rata-rata)**	**%**	**4**			**3**		**3,24**			**3**			**3**			**75.00**		**Dinas Perdagangan**	**-**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.16.6		Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah UKM yang dilatih	UKM	60		190,582,300	70	0	60		16,470,000	60		16,150,000	130			216.67		Dinas Perdagangan	-
1.16.10		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah UKM yang dimoniva	UKM	180		141,900,000	60	0	180		0	60		0	120			66.67		Dinas Perdagangan	-
													Rata - rata kinerja (%)	66.50		16,150,000	141.00					
													Predikat Kinerja	Sedang			Sangat tinggi					
1.17		**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	**% Pertumbuhan pelaku usaha UKM**	**%**	**76**			**73**		**74**			**23**			**23**			**30.26**		**Dinas Perdagangan**	**-**
1.17.2		Pengembangan klaster bisnis	Jumlah jalinan kerjasama dan penerapan teknologi tepat guna bagi UKM	UKM	4		421,050,000	0	0	4		0	0		0	0			0.00		Dinas Perdagangan	-
1.17.5		Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Evaluasi penggunaan dana pemerintah bagi UKM	UKM	50		75,220,000	50	0	50		0	0		0	50			100.00		Dinas Perdagangan	-
1.17.12		Pengembangan pasar produk UKM	Jumlah produk UKM yang dibina	produk	9		297,650,000	0	0	7		49,980,000	7		49,980,000	7			77.78		Dinas Perdagangan	-
													Rata - rata kinerja (%)	25.67		49,980,000	66.67					
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sedang					
1.18		**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan SDM Koperasi**	**Jumlah koperasi aktif**	**koperasi**	**68**			**54**		**63**			**54**			**54**			**79.41**		**Dinas Perdagangan**	**-**
1.18.4		Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah Pengurus koperasi yang memahami aturan perkoperasian	orang	60		300,000,000	75	0	60		0	0		0	75			125.00		Dinas Perdagangan	-
1.18.8		Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Jumlah Pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan	orang	60		300,000,000	30	0	60		25,614,800	60		25,613,900	90			150.00		Dinas Perdagangan	-
1.18.9		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah koperasi yang dilakukan Moniva dan pelaporan	koperasi	60		120,000,000	60	0	60		0	60		0	60			100.00		Dinas Perdagangan	-
1.18.12		Penumbuhan Koperasi Baru di Kab. HST	Jumlah Pra Koperasi yang terbentuk	koperasi	1		108,000,000	4	0	1		11,074,800	1		11,074,800	5			500.00		Dinas Perdagangan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.18.16		Pengembangan wawasan bagi pengurus koperasi	Jumlah Pengurus yang mengikuti pengembangan wawasan	orang	5		170,000,000	0	0	5		0	0		0	0			0.00		Dinas Perdagangan	-
													Rata - rata kinerja (%)		60.00			36,688,700	175.00			
													Predikat Kinerja		Rendah				Sangat tinggi			
		Perdagangan																					
2	Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah		% temuan barang yang mengandung bahan berbahaya dan kadaluarsa	%	20			40		40			0			40			0.00		Dinas Perdagangan	-
2.15		**Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**	**% Temuan UTTP yang tidak benar (barang aman)**	**%**	**20**			**40**		**40**			**40**			**40**			**0.00**		**Dinas Perdagangan**	**-**
2.15.3		Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah rekomendasi Tera ulang yang diterbitkan	rekomendasi	4		164,734,440	8	0	4		1,510,860,000	0		1,306,628,050	8			200.00		Dinas Perdagangan	-
2.15.5		Sosialisasi Pedagang Pengguna UTTP	Jumlah peserta sosialisasi pedagang pengguna UTTP	orang	250		523,600,000	0	0	250		10,720,000	0		0	0			0.00		Dinas Perdagangan	-
													Rata - rata kinerja (%)		0.00			1,306,628,050	100.00			
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah				Sangat tinggi			
2.17		**Program peningkatan dan pengembangan ekspor**	**Nilai omset produk yang diekspor**	**Rupiah**	**400**			**1E+12**		**3,5E+11**			**2,8E+11**			**1,3E+12**			**320,663,365,833.25**		**Dinas Perdagangan**	**-**
2.17.13		Pembangunan promosi perdagangan	Jumlah peserta yang mengikuti pameran	pelaku usaha	100		4,365,935,500	100	297,785,679	100		336,000,000	100		325,391,000	100			100.00		Dinas Perdagangan	-
													Rata - rata kinerja (%)		100.00			325,391,000	100.00			
													Predikat Kinerja		Sangat tinggi				Sangat tinggi			
2.18		**Program Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri**	**% kebutuhan pokok yang dikendalikan harganya**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Dinas Perdagangan**	**-**
2.18.3		Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah pelaksanaan Monitoring Harga barang/produk	kali	48		603,856,080	4	0	48		5,400,000	36		3,750,000	36			75.00		Dinas Perdagangan	-
													Rata - rata kinerja (%)		75.00			3,750,000	75.00			
													Predikat Kinerja		Sedang				Sedang			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.19		**Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan**	**% pedagang yang taat terhadap aturan**	**%**	**100**			**75**		**100**			**75**			**75**			**75.00**		**Dinas Perdagangan**	**-**
2.19.2		Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pedagang yang paham terhadap tata tertib pasar	pedagang	100		128,005,200	50	0	100		5,270,000	75		3,115,000	75			75.00		Dinas Perdagangan	-
2.19.7		Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Luas Pasar yang ditata sesuai zonasi	kawasan/ pasar	13		1,646,312,000	13	11,700,000	13		593,225,000	13		366,025,000	13			100.00		Dinas Perdagangan	-
												Rata - rata kinerja (%)	87.50		369,140,000	87.50						
												Predikat Kinerja	Tinggi			Tinggi						
2.20		**Program Pemberdayaan dan Revitalisasi Pasar**	**Persentase Pasar Sehat**	**%**	**100**			**75**		**90**			**75**			**75**			**75.00**		**Dinas Perdagangan**	**-**
			Persentasi pedagang yang tertampung	**%**	**100**			**75**					**75**			**75**			**75.00**		**Dinas Perdagangan**	**-**
2.20.1		Rehabilitasi Pasar	Jumlah pasar yang direhabiltasi	pasar	4		83,775,369,900	7	13,824,508,213	4		8,035,257,000	4		7,440,280,976	11			275.00		Dinas Perdagangan	-
2.20.4		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber retribusi daerah	Jumlah nominal retribusi pasar dan fasilitas umum yang terpungut	Rupiah	2E+09		3,389,595,300	2E+09	333,000,000	1,5E+09		333,000,000	2,9E+09		333,000,000	2,9E+09			181,544,074,766.36		Dinas Perdagangan	-
2.20.5		Pemeliharaan Pasar	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang terpelihara dengan baik	pasar	13		235,415,000	0	0	13		45,000,000	13		45,000,000	13			100.00		Dinas Perdagangan	-
												Rata - rata kinerja (%)	60,514,691,655.33		7,818,280,976	65,448,841,095.33						
												Predikat Kinerja										
			Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	400			1E+12		3,5E+11			3E+11			1,3E+12			325,325,711,354.25		Dinas Perdagangan	-
2.15		**Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**	**% Temuan UTTP yang tidak benar (barang aman)**	**%**	**20**			**40**		**40**			**40**			**40**			**0.00**		**Dinas Perdagangan**	**-**
2.15.3		Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah rekomendasi Tera ulang yang diterbitkan	rekomendasi	4		164,734,440	8	0	4		1,510,860,000	0		1,306,628,050	8			200.00		Dinas Perdagangan	-
2.15.5		Sosialisasi Pedagang Pengguna UTTP	Jumlah peserta sosialisasi pedagang pengguna UTTP	orang	250		523,600,000	0	0	250		10,720,000	0		0	0			0.00		Dinas Perdagangan	-
												Rata - rata kinerja (%)	0.00		1,306,628,050	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.17		**Program peningkatan dan pengembangan ekspor**	**Nilai omset produk yang diekspor**	**Rupiah**	**400**			**1E+12**		**3,5E+11**			**2,8E+11**			**1,3E+12**			**320,663,365,833.25**		**Dinas Perdagangan**	**-**
2.17.13		Pembangunan promosi perdagangan	Jumlah peserta yang mengikuti pameran	pelaku usaha	100		4,365,935,500	100	297,785,679	100		336,000,000	100		325,391,000	100			100.00		Dinas Perdagangan	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		325,391,000	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
2.18		**Program Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri**	**% kebutuhan pokok yang dikendalikan harganya**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Dinas Perdagangan**	**-**
2.18.3		Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah pelaksanaan Monitoring Harga barang/produk	kali	48		603,856,080	4	0	48		5,400,000	36		3,750,000	36			75.00		Dinas Perdagangan	-
												Rata - rata kinerja (%)	75.00		3,750,000	75.00						
												Predikat Kinerja	Sedang			Sedang						
2.19		**Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan**	**% pedagang yang taat terhadap aturan**	**%**	**100**			**75**		**100**			**75**			**75**			**75.00**		**Dinas Perdagangan**	**-**
2.19.2		Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pedagang yang paham terhadap tata tertib pasar	pedagang	100		128,005,200	50	0	100		5,270,000	75		3,115,000	75			75.00		Dinas Perdagangan	-
2.19.7		Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Luas Pasar yang ditata sesuai zonasi	kawasan/ pasar	13		1,646,312,000	13	11,700,000	13		593,225,000	13		366,025,000	13			100.00		Dinas Perdagangan	-
												Rata - rata kinerja (%)	87.50		369,140,000	87.50						
												Predikat Kinerja	Tinggi			Tinggi						
2.20		**Program Pemberdayaan dan Revitalisasi Pasar**	**Persentase Pasar Sehat**	**%**	**100**			**75**		**90**			**75**			**75**			**75.00**		**Dinas Perdagangan**	**-**
			Persentasi pedagang yang tertampung	**%**	**100**			**75**					**75**			**75**			**75.00**		**Dinas Perdagangan**	**-**
2.20.1		Rehabilitasi Pasar	Jumlah pasar yang direhabiltasi	pasar	4		83,775,369,900	7	13,824,508,213	4		8,035,257,000	4		7,440,280,976	11			275.00		Dinas Perdagangan	-
2.20.4		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber retribusi daerah	Jumlah nominal retribusi pasar dan fasilitas umum yang terpungut	Rupiah	2E+09		3,389,595,300	2E+09	333,000,000	1,5E+09		333,000,000	2,9E+09		333,000,000	2,9E+09			181,544,074,766.36		Dinas Perdagangan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.20.5		Pemeliharaan Pasar	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang terpelihara dengan baik	pasar	13		235,415,000	0	0	13		45,000,000	13		45,000,000	13			100.00		Dinas Perdagangan	-
													Rata - rata kinerja (%)		60,514,691,655.33			7,818,280,976	65,448,841,095.33			
													Predikat Kinerja									
		Perindustrian																				
3	Meningkatnya pertumbuhan IKM		Persentase Tingkat pertumbuhan IKM	%	11.93			15,89		9.51			9			9			75.44		Dinas Perdagangan	-
3.16		**Program pengembangan industri kecil dan menengah**	**Jumlah IKM baru**	**IKM**	**800**			**528**		**23.41**			**1000**			**1000**			**125.00**		**Dinas Perdagangan**	**-**
3.16.1		Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah pengrajin yang dilatih	IKM	40		1,278,878,000	40	0	40		70,784,000	40		70,484,000	80			200.00		Dinas Perdagangan	-
3.16.9		Pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan manajemen dan perluasan pasar	Jumlah IKM yang diberikan peningkatan kemampuan manajemen dan perluasan pasar	IKM	25		375,000,000	0	0	25		28,435,000	25		21,810,000	25			100.00		Dinas Perdagangan	-
3.16.10		Pembinaan IKM dalam memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah Peningkatan dan pengetahuan SDM IKM	IKM	40		927,492,000	40	91,894,800	40		86,475,000	40		84,890,000	80			200.00		Dinas Perdagangan	-
3.16.12		Pengembangan IKM melalui Fasilitasi Sertifikat Produk unggulan IKM	Jumlah IKM yang mendapat fasilitas sertifikat Produk unggulan IKM	IKM	9		250,000,000	0	0	9		19,380,000	4		15,076,000	4			44.44		Dinas Perdagangan	-
													Rata - rata kinerja (%)	86.00		192,260,000	136.00					
													Predikat Kinerja	Tinggi			Sangat tinggi					
3.17		**Program peningkatan kemampuan teknologi industri**	**Persentasi pertumbuhan jenis produk IKM**	**%**	**11.93**	**11,93**					**9.51**			**data**					**0.00**		**Dinas Perdagangan**	**Karakter**
3.17.2		Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah perajin yang dilatih	orang	40		875,000,000	0	0	40		38,045,000	20		37,945,000	20			50.00		Dinas Perdagangan	-
													Rata - rata kinerja (%)	50.00		37,945,000	50.00					
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat Rendah					
3.19		**Program Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial**	**% Sentra industri potensial**	**%**	**14.7**	**14,7**					**10.93**			**data**					**0.00**		**Dinas Perdagangan**	**Karakter**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.19.4		Bantuan sarana dan prasarana bagi IKM	Jumlah Bantuan sarana dan prasarana bagi IKM	Paket	1		400,000,000	0	0	1		1,533,920,000	1		1,137,033,561	1			100.00		Dinas Perdagangan	-
			Jumlah IKM yang dilatih	IKM				0					10			10			1,000.00		Dinas Perdagangan	-
3.19.5		Pembinaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan IKM	Jumlah IKM yang ditumbuhkan	IKM	6		750,000,000	621	0	1000		115,910,000	1000		68,263,000	1621			27,016.67		Dinas Perdagangan	-
3.19.6		Peningkatan produktivitas dan kreatifitas produk, kerajinan dan seni	Jumlah IKM yang dilatih	orang	40		1,241,458,000	60	0	40		99,541,000	40		98,641,000	100			250.00		Dinas Perdagangan	-
												Rata - rata kinerja (%)	5,622.00		1,303,937,561	170.67						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
3.20		**Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Industri Kecil Menengah**	**Persentase pertumbuhan volume produk IKM**	**%**	**46.05**	**46,05**					**32,89**			**data**					**0.00**		**Dinas Perdagangan**	**Karakter**
3.20.1		Penyertaan dan partisipasi dalam pameran Industri Kecil Menengah	Jumlah produk unggulan IKM yang dipromosikan	Produk	35		554,770,000	0	0	25		17,350,000	20		17,327,500	20			57.14		Dinas Perdagangan	-
												Rata - rata kinerja (%)	57.00		17,327,500	80.00						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Lingkungan Hidup																				
1	Terkendalinya Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan		Persentase Industri/Kegiatan Yang Memenuhi Ketentuan Pengelolaan LH	%	70			50		60			0			50			71.43		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.15		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**Persentase Sampah yang Tertangani dengan baik**	**%**	**70**			**161**		**65**			**16**			**177**			**252.86**		**Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan**	**-**
1.15.4		Kegiatan Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Prasarana & Sarana Persampahan	Jumlah sampah yang terangkut	Ton	18		4,131,552,000	100	3,725,115,060	48		4,493,752,000	48		4,485,725,000	148			822.22		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Jumlah Sarana dan prasarana Persampahan yang dipelihara	Unit	100			195		78			78			273			273.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Nilai pengoperasian TPA (Minimal)	Point	10000			73		74			74			74			0.74		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.15.13		Kegiatan Penyediaan Sarana & Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan prasarana Persampahan yang diadakan	unit	150		4,043,100,000	190	7,222,826,400	113		4,023,850,000	99		3,581,301,077	289			192.67		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.15.14		Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat yang Memahami Pengelolaan Sampah dari Sumbernya	orang	48444		31,400,000	200	0	200		162,050,000	800		157,090,100	800			1.65		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
													Rata - rata kinerja (%)	82.20		8,224,116,177	282.60					
													Predikat Kinerja	Tinggi			Sangat tinggi					
1.16		**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan**	**Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan**	**%**	**70**			**63**		**66**			**66**			**66**			**94.29**		**Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan**	**-**
1.16.1		Kegiatan Koordinasi Kota Bersih, Teduh dan Sehat	Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan	Buah	10		168,630,500	10	80,558,750	10		168,630,500	10		124,780,625	10			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.16.3		Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Parameter Pada Setiap Titik Pantau Air Sungai	Parameter	27		440,750,000	27	283,838,738	27		440,750,000	27		398,255,086	27			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Jumlah Parameter Pada Setiap Titik Pantau Udara	Parameter	11			11		11			11			11			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Jumlah Parameter Pada Setiap Titik Pantau air limbah	Parameter	10			8		8			8			8			80.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.16.14		Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah Adiwiyata (Akumulasi)	Buah	24		2,300,000,000	54	133,009,300	18		188,740,002	18		178,120,531	72			300.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Jumlah Kampung Iklim Terbentuk	Buah	1			0		1			1			1			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.16.17		Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Sarana & Prasana Pemantauan Kualitas Lingkungan yang diadakan	Jenis	90		222,042,000	2	0	2		222,042,000	4		209,955,667	4			4.44		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.16.18		Kegiatan Pemeliharaan RTH	Luas RTH Yang Terkelola dengan Baik	Ha	70500		277,795,000	24	697,655,000	24.9		907,045,000	6		892,622,000	6			0.01		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Jumlah PJU Perkotaan Barabai yang berfungsi dengan baik	unit	400			400		400			150			150			37.50		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
												Rata - rata kinerja (%)	66.22		1,803,733,909	129.00						
												Predikat Kinerja	Sedang			Sangat tinggi						
1.25		**Program Penataan Lingkungan Hidup**	**Persentase Peningkatan Pelaku Usaha/Masyarakat Yang Taat Terhadap Peraturan Perundangan**	**%**	**75**			**50**		**65**			**65**			**65**			**86.67**		**Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan**	**-**
1.25.1		Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Sengketa Akibat Dugaan Pencemaran Lingkungan	Jumlah pengaduan masyarakat yang dimediasi sesuai standar	buah	30		6,400,000	2	0	10		6,400,000	4		0	4			13.33		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.25.7		Kegiatan Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah perusahaan yang difasilitasi ijin lingkungannya	buah	5		16,180,000	2	0	5		16,180,000	5		15,962,000	5			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.25.8		Kegiatan Pengawasan Penaatan Peraturan Lingkungan	Jumlah Pelaku Usaha/Masyarakat yang Taat Terhadap Peraturan Perundangan	%	70		23,700,000	60	0	60		23,700,000	60		18,940,800	60			85.71		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan	Dokumen				1					1			1			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.25.9		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Jumlah Buku Informasi Lingkungan Hidup	buah	2		2,895,000	0	0	2		2,895,000	4		2,850,000	4			200.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
													Rata - rata kinerja (%)	99.50		37,752,800	110.00					
													Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi					
			Persentase Peningkatan IKLH	%	0	0,4					0,1		0						0.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Karakter
1.15		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**Persentase Sampah yang Tertangani dengan baik**	**%**	**70**			**161**		**65**			**16**			**177**			**252.86**		**Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan**	**-**
1.15.4		Kegiatan Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Prasarana & Sarana Persampahan	Jumlah sampah yang terangkut	Ton	18		4,131,552,000	100	3,725,115,060	48		4,493,752,000	48		4,485,725,000	148			822.22		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Jumlah Sarana dan prasarana Persampahan yang dipelihara	Unit	100			195		78			78			273			273.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Nilai pengoperasian TPA (Minimal)	Point	10000			73		74			74			74			0.74		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.15.13		Kegiatan Penyediaan Sarana & Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan prasarana Persampahan yang diadakan	unit	150		4,043,100,000	190	7,222,826,400	113		4,023,850,000	99		3,581,301,077	289			192.67		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.15.14		Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat yang Memahami Pengelolaan Sampah dari Sumbernya	orang	48444		31,400,000	200	0	200		162,050,000	800		157,090,100	800			1.65		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
													Rata - rata kinerja (%)	82.20		8,224,116,177	282.60					
													Predikat Kinerja	Tinggi			Sangat tinggi					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.16		**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan**	**Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan**	**%**	**70**			**63**		**66**			**66**			**66**			**94.29**		**Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan**	**-**
1.16.1		Kegiatan Koordinasi Kota Bersih, Teduh dan Sehat	Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan	Buah	10		168,630,500	10	80,558,750	10		168,630,500	10		124,780,625	10			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.16.3		Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Parameter Pada Setiap Titik Pantau Air Sungai	Parameter	27		440,750,000	27	283,838,738	27		440,750,000	27		398,255,086	27			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Jumlah Parameter Pada Setiap Titik Pantau Udara	Parameter	11			11		11			11			11			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Jumlah Parameter Pada Setiap Titik Pantau air limbah	Parameter	10			8		8			8			8			80.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.16.14		Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah Adiwiyata (Akumulasi)	Buah	24		2,300,000,000	54	133,009,300	18		188,740,002	18		178,120,531	72			300.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Jumlah Kampung Iklim Terbentuk	Buah	1			0		1			1			1			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.16.17		Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Sarana & Prasana Pemantauan Kualitas Lingkungan yang diadakan	Jenis	90		222,042,000	2	0	2		222,042,000	4		209,955,667	4			4.44		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.16.18		Kegiatan Pemeliharaan RTH	Luas RTH Yang Terkelola dengan Baik	Ha	70500		277,795,000	24	697,655,000	24.9		907,045,000	6		892,622,000	6			0.01		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Jumlah PJU Perkotaan Barabai yang berfungsi dengan baik	unit	400			400		400			150			150			37.50		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
Rata - rata kinerja (%)													66.22		1,803,733,909	129.00						
Predikat Kinerja													Sedang			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.25		**Program Penataan Lingkungan Hidup**	**Persentase Peningkatan Pelaku Usaha/Masyarakat Yang Taat Terhadap Peraturan Perundangan**	**%**	**75**			**50**		**65**			**65**			**65**			**86.67**		**Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan**	**-**
1.25.1		Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Sengketa Akibat Dugaan Pencemaran Lingkungan	Jumlah pengaduan masyarakat yang dimediasi sesuai standar	buah	30		6,400,000	2	0	10		6,400,000	4		0	4			13.33		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.25.7		Kegiatan Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah perusahaan yang difasilitasi ijin lingkungannya	buah	5		16,180,000	2	0	5		16,180,000	5		15,962,000	5			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.25.8		Kegiatan Pengawasan Penaatan Peraturan Lingkungan	Jumlah Pelaku Usaha/Masyarakat yang Taat Terhadap Peraturan Perundangan	%	70		23,700,000	60	0	60		23,700,000	60		18,940,800	60			85.71		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan	Dokumen				1					1			1			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.25.9		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Jumlah Buku Informasi Lingkungan Hidup	buah	2		2,895,000	0	0	2		2,895,000	4		2,850,000	4			200.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
													Rata - rata kinerja (%)	99.50		37,752,800	110.00					
													Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi					
			Persentase Cakupan Layanan Persampahan Kawasan Perkotaan	%	68			165		65			0			165			242.65		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.15		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**Persentase Sampah yang Tertangani dengan baik**	**%**	**70**			**161**		**65**			**16**			**177**			**252.86**		**Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan**	**-**
1.15.4		Kegiatan Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Prasarana & Sarana Persampahan	Jumlah sampah yang terangkut	Ton	18		4,131,552,000	100	3,725,115,060	48		4,493,752,000	48		4,485,725,000	148			822.22		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Jumlah Sarana dan prasarana Persampahan yang dipelihara	Unit	100			195		78			78			273			273.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Nilai pengoperasian TPA (Minimal)	Point	10000			73		74			74			74			0.74		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.15.13		Kegiatan Penyediaan Sarana & Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan prasarana Persampahan yang diadakan	unit	150		4,043,100,000	190	7,222,826,400	113		4,023,850,000	99		3,581,301,077	289			192.67		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.15.14		Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat yang Memahami Pengelolaan Sampah dari Sumbernya	orang	48444		31,400,000	200	0	200		162,050,000	800		157,090,100	800			1.65		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
												Rata - rata kinerja (%)	82.20		8,224,116,177	282.60						
												Predikat Kinerja	Tinggi			Sangat tinggi						
1.16		**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan**	**Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan**	**%**	**70**			**63**		**66**			**66**			**66**			**94.29**		**Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan**	**-**
1.16.1		Kegiatan Koordinasi Kota Bersih, Teduh dan Sehat	Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan	Buah	10		168,630,500	10	80,558,750	10		168,630,500	10		124,780,625	10			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.16.3		Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Parameter Pada Setiap Titik Pantau Air Sungai	Parameter	27		440,750,000	27	283,838,738	27		440,750,000	27		398,255,086	27			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Jumlah Parameter Pada Setiap Titik Pantau Udara	Parameter	11			11		11			11			11			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Jumlah Parameter Pada Setiap Titik Pantau air limbah	Parameter	10			8		8			8			8			80.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.16.14		Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah Adiwiyata (Akumulasi)	Buah	24		2,300,000,000	54	133,009,300	18		188,740,002	18		178,120,531	72			300.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Jumlah Kampung Iklim Terbentuk	Buah	1			0		1			1			1			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.16.17		Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Sarana & Prasana Pemantauan Kualitas Lingkungan yang diadakan	Jenis	90		222,042,000	2	0	2		222,042,000	4		209,955,667	4			4.44		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.16.18		Kegiatan Pemeliharaan RTH	Luas RTH Yang Terkelola dengan Baik	Ha	70500		277,795,000	24	697,655,000	24.9		907,045,000	6		892,622,000	6			0.01		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Jumlah PJU Perkotaan Barabai yang berfungsi dengan baik	unit	400			400		400			150			150			37.50		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
												Rata - rata kinerja (%)	66.22		1,803,733,909	129.00						
												Predikat Kinerja	Sedang			Sangat tinggi						
1.25		**Program Penataan Lingkungan Hidup**	**Persentase Peningkatan Pelaku Usaha/Masyarakat Yang Taat Terhadap Peraturan Perundangan**	**%**	**75**			**50**		**65**			**65**			**65**			**86.67**		**Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan**	**-**
1.25.1		Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Sengketa Akibat Dugaan Pencemaran Lingkungan	Jumlah pengaduan masyarakat yang dimediasi sesuai standar	buah	30		6,400,000	2	0	10		6,400,000	4		0	4			13.33		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.25.7		Kegiatan Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah perusahaan yang difasilitasi ijin lingkungannya	buah	5		16,180,000	2	0	5		16,180,000	5		15,962,000	5			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.25.8		Kegiatan Pengawasan Penaatan Peraturan Lingkungan	Jumlah Pelaku Usaha/Masyarakat yang Taat Terhadap Peraturan Perundangan	%	70		23,700,000	60	0	60		23,700,000	60		18,940,800	60			85.71		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan	Dokumen				1					1			1			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
1.25.9		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Jumlah Buku Informasi Lingkungan Hidup	buah	2		2,895,000	0	0	2		2,895,000	4		2,850,000	4			200.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
												Rata - rata kinerja (%)	99.50		37,752,800	110.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Perhubungan																				
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakan terhadap Pelayanan Perhubungan		Indeks Kepuasan Pelayanan Perhubungan	%	92			91		91,3			91			91			98.91		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
2.16		**Program pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**																	**0.00**		**Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan**	**Karakter**
2.17		**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**	**Persentase Meningkatnya Disiplin Awak Angkutan Umum**	**%**	**5**			**5**		**5**			**0**			**0**			**0.00**		**Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan**	**-**
2.17.5		Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya	Jumlah Pelanggaran Angkutan Orang dan Barang dijalan Raya	buah	85		151,930,000	70	71,053,500	75		230,200,000	0		225,679,000	0			0.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
													Rata - rata kinerja (%)	0.00		225,679,000	0.00					
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat Rendah					
2.20		**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	**Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan / Lulus Uji KIR**	**%**	**98**			**96**		**97**			**97**			**97**			**98.98**		**Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan**	**-**
2.20.4		Kegiatan Pengadaan Fasilitas Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian Yang Baik	Buah	12		1,950,000,000	0	0	12		1,600,000,000	12		1,569,126,162	12			100.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
2.20.5		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Tanda Lulus yang Ditertibkan Sesuai Standar	Buah	3682		912,000,000	2768	146,268,667	2346		121,010,000	2346		85,340,000	2346			63.72		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
2.20.6		Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Berfungsi Dengan Baik	Buah	12		453,500,000	5	91,985,900	5		57,000,000	5		49,065,560	5			41.67		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
													Rata - rata kinerja (%)	68.00		1,703,531,722	100.00					
													Predikat Kinerja	Sedang			Sangat tinggi					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.27		**Program Peningkatan Keselamatan LLAJ**	**Persentase Rekayasa Lalin yang Dilaksanakan**	**%**	**100**			**2**		**0**			**0**			**2**			**2.00**		**Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan**	**-**
2.27.1		Kegiatan FGD Lalu Lintas	Jumlah Rekomendasi forum	Rekomendasi	1		423,000,000	1	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-
Rata - rata kinerja (%)													0.00		0	0.00						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah			Sangat Rendah						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Administrasi Kependudukan dan Capil																				
1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	persen	98	98		93		96	96%		97	97		97	97		98.98		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Karakter
			Persentase Penduduk yang memiliki e-KTP	persen	98	98		90		96	96%		98	98		98	98		100.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Karakter
			Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	persen	61	61		34		47	47%		46	46		46	46		75.41		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Karakter
			Persentase Jumlah Orang Meninggal yang memiliki Akta Kematian	persen	5	5		1		4	4%		0	3		1	1,5		20.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Karakter
			Persentase anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	persen	35	34.96		0		32	31,70%		22	22		22	22		62.86		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Karakter
1.15		**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Rata-rata dokumen kependudukan yang diselesaikan tepat waktu**	**Hari kerja**	**1**			**2**		**1**			**1**			**1**			**100.00**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**-**
1.15.3		Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Jumlah KK, KTP-el & KIA yang diterbitkan	buah & keping	58 orang, 5.000 buah, 9.000 keping	9.000 Buah, 9.000 Keping, 22.554 Keping	5,947,530,500	27657	0	42450	12.000 Buah, 10.000 Keping, 20.450 Keping	1,724,927,300	46528	46528	1,656,175,806	46528	46528		-80,020.69		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Karakter

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.15.11		Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi yang memahami tentang peraturan kependudukan	orang	11 kali/tahun	440 Orang	327,737,750	440	0	440	440 Orang	69,194,000	440	440	53,475,750	440	440		4,000.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	258,538.50		1,709,651,556	104.50						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
1.16		**Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil**	**Rata-rata dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan tepat waktu**	**Hari kerja**	**1**			**2**		**1**			**1**			**1**			**100.00**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**-**
1.16.3		Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan & Akta Perceraian)	Berkas	7 jenis & 16.050 berkas	10.200 Berkas	2,942,650,560	8289	0	10072	10.000 Berkas, 20 Berkas, 50 Berkas, 2 Berkas	481,025,000	10836	10836	421,678,102	10836	10836		154,800.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Karakter
1.16.5		Pemutakhiran Data Pencatatan Sipil	Jumlah Data Akta Pencatatan Sipil yang di input dari Non SIAK ke SIAK	berkas	0 berkas & 8 orang	3.000 Berkas & 10 orang	1,160,613,500	3263	0	4000	4.000 Berkas & 8 Orang	198,875,000	7524	7524	190,503,500	7524	7524		752,400.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	178,517.50		612,181,602	147.50						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
1.19		**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Kecamatan yang terkoneksi dengan SIAK di Kabupaten**	**buah**	**11**	**11**		**11**		**11**	**11 Kecamatan**		**11**	**data**		**11**	**11**		**100.00**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Karakter**
1.19.1		Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah Kantor Kecamatan yang terkoneksi dengan SIAK di Kabupaten	Kecamatan	11 kecamatan	11 Kecamatan	4,659,444,750	11	0	11	11 kecamatan	1,126,592,700	11	11	878,944,890	11	11		100.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Karakter
1.19.2		Pengembangan data base kependudukan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan Database Kependudukan	desa dan kelurahan	161 Desa & 8 Kelurahan	161 Desa dan 8 Kelurahan	1,654,444,860	169	0	169	161 Desa & 8 Kelurahan	393,770,000	169	169	348,595,000	169	169		104.97		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	102.00		1,227,539,890	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.20		**Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**	**Data Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi/SKPD dan Inovasi Pelayanan Kependudukan yang diterapkan.**	**Jenis Dokumen**	**3**	**3 Jenis Dokumen**		**3**		**3**	**3 Jenis Dokumen**		**3**	**data**		**3**	**3**		**100.00**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Karakter**
1.20.1		Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah buku laporan informasi kependudukan yang disusun berupa Buku Profil Perkembangan Kependudukan, Buku Induk Kependudukan dan Buku Agregat Kependudukan	eksemplar	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	152,588,740	3	0	3	3 Jenis Dokumen	128,682,000	3	3	111,880,755	3	3		100.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Karakter
1.20.2		Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Website yang dikelola dan Jumlah inovasi pelayanan yang dilaksanakan	buah	1 buah	1 buah	523,688,200	0	0	1	1 buah	91,576,000	1	1	55,271,398	1	1		100.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		167,152,153	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Tenaga Kerja																				
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja		Persentase Angkatan Kerja yang Bersertifikat Terampil	%	500			200		100			113.33			313.33			62.67		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
1.16		**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**Jumlah pencari kerja yang ditempatkan**	**orang**	**1850**			**1027**		**400**			**585**			**1612**			**87.14**		**Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**	**-**
1.16.2		Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Kartu Tanda Pencari Kerja, Permintaan Tenaga Kerja, Pemanggilan Tenaga Kerja (AK1 - AK5) yang diterbitkan sesuai ketentuan	Orang	4000		710,000,000	10298	0	4000		105,500,000	2495		105,456,100	12793			319.83		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
												Rata - rata kinerja (%)	62.00		105,456,100	319.00						
												Predikat Kinerja	Rendah			Sangat tinggi						
1.18		**Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja**	**Jumlah pencari kerja terlatih yang bekerja**	**orang**	**640**			**396**		**120**			**136**			**532**			**83.13**		**Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**	**-**
1.18.2		Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya Produktif/Infrastruktur) dan Kewirausahaan	Jumlah perorangan/ Kelompok Usaha yang Dibina	Orang/Kelompok	3		295,000,000	3	0	3		27,275,000	3		22,000,000	3			100.00		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
			Jumlah perorangan/ kelompok usaha yg diberi modal	Orang/Kelompok	3			0		0			0			0			0.00		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
1.18.3		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlatih dan Terampil	Orang	200		2,900,000,000	396	0	120		449,978,600	136		427,209,602	532			266.00		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
												Rata - rata kinerja (%)	56.00		449,209,602	181.00						
												Predikat Kinerja	Rendah			Sangat tinggi						
2	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan Tentang Aturan Ketenagakerjaan		Persentase perusahaan yang menerapkan sistem aturan ketenagakerjaan	%	100			17.57		13.3			13.33			30.9			30.90		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.20		**Program Peningkatan Keselamatan Kerja**	**Persentase tenaga kerja penerima upah yang menjadi peserta BPJS**	**%**	**100**			**254.49**		**93.75**			**93.36**			**347.85**			**347.85**		**Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**	**-**
2.20.1		Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah kepesertaan tenaga Kerja penerima upah yang menjadi peserta Jamsostek (BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan)	Orang	3000		405,000,000	10179	0	3600		55,200,000	3361		51,440,000	13540			451.33		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
2.20.2		Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang ikuti sosialisasi dan faham terhadap sistem pengupahan berbasis struktur dan skala upah serta produktivitas	Perusahaan	165		560,000,000	0	0	60		15,100,000	60		15,100,000	60			36.36		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
													Rata - rata kinerja (%)	74.00		66,540,000	238.00					
													Predikat Kinerja	Sedang			Sangat tinggi					
3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Pekerja		Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial dengan perjanjian bersama yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	Kasus	1			5		1			0			5			-300.00		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
3.17		**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**Persentase Kasus perselisihan yang dimediasi**	**%**	**500**			**100**		**100**			**100**			**100**			**180.00**		**Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**	**-**
3.17.2		Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan Hubungai Industrial	Jumlah kasus perselisihan Perburuhan/HI (PHI/PHK) yang difasilitasi dan ditangani	Kasus	0		455,299,000	5	0	1		9,810,000	0		0	5			500.00		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
3.17.8		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah perusahaan yang membuat peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Perusahaan	165		520,000,000	29	0	22		5,800,000	22		5,800,000	51			30.91		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
													Rata - rata kinerja (%)	6.50		5,800,000	365.50					
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi					
		Penanaman Modal																				
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Pelayanan Perizinan		Rata-rata Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Pelayanan Perizinan	%	85	Nilai IKM		84		84	83,5		85	85.36		85	83,18		100.00		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Karakter

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
4.18		**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan**	**Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kinerja Pelayanan Perizinan**	**%**	**4.56**	**4.56%**		**2**		**1**	**0,91**		**1**	**0.52%**		**1**	**0,52**		**21.93**		**Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**	**Karakter**
4.18.2		Kegiatan Survei Pelayanan Perizinan	Jumlah Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat	Kali Kegiatan	2		572,500,000	11	0	2		85,422,500	2		88,817,500	13			650.00		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
4.18.10		Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Media Sosialisasi	Buah	30		470,000,000	0	0	15		98,130,000	15		97,125,000	15			50.00		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
4.18.11		Kegiatan Pelayanan Perizinan	Jumlah Perizinan yg diterbitkan sesuai standar	Izin	1000		833,000,000	5574	0	750		127,360,000	1094		126,284,800	6668			666.80		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
			Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dilayani dengan Menggunakan Aplikasi	Izin	15			15		15			15			30			200.00		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
4.18.12		Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah Pengaduan yg diselesaikan	Pengaduan	5		579,600,000	18	0	8		19,175,000	4		17,525,000	22			-240.00		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
4.18.13		Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan	Jumlah SDM Aparatur Pelayanan yang Mengikuti dan Lulus Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan	Orang Lintas SKPD	-		170,000,000	0	0	50		28,145,000	60		25,145,000	60			6,000.00		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
													Rata - rata kinerja (%)	73.17		354,897,300	372.33					
													Predikat Kinerja	Sedang			Sangat tinggi					
5	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah		Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)	Rupiah	3E+11			2E+11		7E+10			1,1E+11			2,9E+11			85.92		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
5.15		**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**Jumlah Investor yang berinvestasi**	**Investor**	**100**			**111**		**20**			**187**			**298**			**298.00**		**Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**	**-**
5.15.1		Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Jenis Promosi Investasi Daerah (Pariwisata, Perdagangan, Properti, Pertanian)	Kegiatan	2		235,000,000	1	0	2		47,100,000	1		47,100,000	2			100.00		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
5.15.2		Kegiatan Penyusunan Profil Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Profil Potensi Unggulan Daerah Kabupaten HST	Profil	1		56,800,000	1	0	1		13,505,000	1		13,505,000	2			200.00		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
5.15.3		Kegiatan Penyusunan RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal)	Jumlah Kajian Akademis sesuai standar teknis	Dokumen	0		128,000,000	0	0	1		120,500,000	1		101,750,000	1			100.00		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
			Jumlah Naskah Akademis RUPM sesuai standar teknis	Dokumen	0			0		1			1			1			100.00		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
			Jumlah Naskah RUPM sesuai standar teknis	Dokumen	0			0		1			1			1			100.00		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
5.15.4		Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Jumlah Investor yang dilayani melalui Sistem Pelayanan Perizinan Secara Elektronik	Investor	5		90,000,000	13	0	20		21,000,000	187		20,500,000	200			4,000.00		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
			Jumlah Investor Penanaman Modal yang terlayani	Investor	0			0		0			0			0			0.00		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-
Rata - rata kinerja (%)													648.33		182,855,000	266.67						
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Komunikasi dan Informatika																				
1	Meningkatnya layanan komunikasi dan informasi publik		Indek Kepuasan Pelayanan Masyarakat	Indek	95	sangat baik		75		75	75		75	cukup baik		75	cukup baik		78.95		Dinas Komunikasi dan Informatika	Karakter
1.15		**Pengembangan dan pengelolaan komunikasi publik**	**Persentase infrastruktur telekomunikasi desa yang terlayani**	**%**	**95**			**50**		**80**			**80**			**80**			**84.21**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**-**
1.15.2		Pengawasan dan Pengendalian Menara dan Postel	Jumlah Data dan Informasi Pos dan Telekomunikasi yang dikelola (Data Tower Telekomunikasi, Jasa Titipan, TV Kabel dan Warnet, Radio Komunitas)	Data	4		131,680,000	4	0	4		6,500,000	0		3,215,750	0			0.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
1.15.6		Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah dokumen / produk hukum dan kajian TIK	Dokumen	4		400,000,000	0	0	1		0	1		0	1			25.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
1.15.14		Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Publik	Kemitraan	4		112,225,000	0	0	4		0	3		0	3			75.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
													Rata - rata kinerja (%)		3,215,750	58.33						
													Predikat Kinerja			Rendah						
1.16		**Pengembangan dan pengelolaan informasi publik**	**Persentasi Media Informasi Publik yang di kelola**	**%**	**100**			**60**		**70**			**70**			**70**			**70.00**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**-**
1.16.10		Penyelenggaraan Siaran Radio Suara Murakata FM	Jumlah Jam Penyelenggaraan Siaran Radio Suara Murakata	Jam	15		1,210,610,000	15	0	15		192,500,000	15		142,019,510	15			100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
1.16.13		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media	Jumlah Media yang Dikelola dalam Penyebarluasan Informasi	Media	4		644,840,000	1	0	4		88,740,000	4		80,448,325	4			100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
1.16.14		Pengadaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Komunikasi dan Informasi	jenis	0		263,000,000	0	0	2		129,650,000	2		126,620,000	2			200.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
1.16.15		Peningkatan SDM Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM yang Paham Komunikasi dan Informasi Publik	Orang	35		188,000,000	0	0	25		0	20		0	20			57.14		Dinas Komunikasi dan Informatika	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
													Rata - rata kinerja (%)	64.25		349,087,835	95.00						
													Predikat Kinerja	Rendah			Sangat tinggi						
2	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK dan E-Goverment		Indek Pemeringkatan E-Government Indonesia (PEGI)	Indek	3	3		2		2	2,4		0	2		0	2,4		0.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	Karakter
			Indek Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indek	4	4		2		3	3,4		3	3,4		3	3,4		75.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	Karakter
2.20		**Pengembangan dan pengelolaan E-Government**	**Persentase Aplikasi yang dikembangkan**	**%**	**100**			**40**		**70**			**70**			**70**			**70.00**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**-**
2.20.3		Pengelolaan dan Pengembangan E Government	Jumlah Aplikasi dan Web yang Dibangun dan Dikembangkan	Aplikasi	55		1,002,500,000	40	0	35		180,500,000	35		112,278,187	35			63.64		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
			Jumlah kerjasama dengan instansi terkait tentang pengelolaan tata kelola E-Government	SKPD	40			9		20			20			20			50.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
2.20.5		Peningkatan Kapasitas SDM TIK	Jumlah SDM yang Terlatih Bidang TIK	Orang	50		323,500,000	0	0	0		0	0		0	0			0.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
													Rata - rata kinerja (%)	37.67		112,278,187	66.67						
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sedang						
2.22		**Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK**	**Persentase peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur TIK yang maksimal**	**%**	**95**			**60**		**70**			**70**			**70**			**73.68**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**-**
2.22.3		Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan dan Server	Jumlah SKPD yang terintegrasi dalam jaringan infrastruktur TIK	SKPD	70		3,942,270,000	35	0	37		920,000,000	37		775,228,872	37			52.86		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
			Persentase Peningkatan Pemenuhan Standar Infrastruktur TIK Sesuai Ketentuan	%	60			20		30			0			0			0.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
2.22.4		Pengadaan dan Pengembangan infrastrutur TIK	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Infrastruktur TIK	Jenis	3		1,161,750,000	10	0	3		233,750,000	3		211,004,490	3			100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
													Rata - rata kinerja (%)	50.67		986,233,362	66.67						
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sedang						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Statistik																				
3	Meningkatnya kualitas data statistik		Pesentase skpd yang menyampaikan kelengkapan data lengkap dan valid	%	95			70		80			0			0			0.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
3.15		**Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**	**Persentase item data statistik daerah yang disajikan**	**%**	**95**			**0**		**80**			**0**			**0**			**0.00**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**-**
3.15.1		Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah Dokumen/Buku Data dan Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	2		589,723,000	2	0	2		65,144,200	2		39,695,000	2			100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
3.15.2		Peningkatan Kapasitas SDM Statistik	Jumlah SDM yangTerlatih Tentang Statistik	Orang	30		74,000,000	0	0	0		0	10		0	10			33.33		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
													Rata - rata kinerja (%)		39,695,000	50.00						
													Predikat Kinerja	Sedang		Sangat Rendah						
		Persandian																				
4	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian		Persentase SKPD menerapkan standarisasi pengamanan informasi dan persandian	%	75			0		50			10			10			13.33		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
4.23		**Pengembangan Pengamanan Informasi dan Persandian**	**Persentase Sarana dan Prasarana infrastruktur yang terakreditasi**	**%**	**75**			**0**		**50**			**10**			**10**			**13.33**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**-**
4.23.2		Pengamanan Informasi dan Persandian	Jumlah SKPD Yang Paham Tentang Keamanan Informasi dan Persandian	SKPD	37		105,000,000	0	0	20		7,500,000	0		7,350,000	0			0.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
4.23.3		Peningkatan Kapasitas SDM keamanan informasi dan persandian	Jumlah SDM yang Terlatih Tentang Persandian	Orang	4		67,000,000	0	0	0		0	2		0	2			50.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
													Rata - rata kinerja (%)	25.00	7,350,000	0.00						
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah		Sangat Rendah						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Pertanian																				
1	Meningkatnya Produksi TPH		Jumlah Produksi Padi	Ton	284558	284.558		325354		273508	273.508		290129	290.129		290129	290.129		101.96		Dinas Pertanian	Karakter
			Jumlah Produksi Jagung	Ton	5092	5.092		4101		4992	4.992		11942	11.942		11942	11.942		234.52		Dinas Pertanian	Karakter
			Jumlah Produksi Kedelai	Ton	821			1037		804			223			223			27.16		Dinas Pertanian	-
			Jumlah Produksi Cabe Besar	Ton	1034			1626		982			1441			1441			139.36		Dinas Pertanian	-
			Jumlah Produksi Cabe Rawit	Ton	121			311		113			358			358			295.87		Dinas Pertanian	-
			Jumlah Produksi Bawang Merah	Ton	68			0		53			50,6			50,6			73.53		Dinas Pertanian	-
			Jumlah Produksi Jeruk	Ton	11249			10955		10.475			11142			11142			99.05		Dinas Pertanian	-
			Jumlah Produksi Kacang Tanah	Ton	887			853		870			610			610			68.77		Dinas Pertanian	-
			Jumlah Produksi Kacang Hijau	Ton	378			239		371			31			31			8.20		Dinas Pertanian	-
			Jumlah Produksi Ubi Kayu	Ton	4052	4.052		3826		3972	3.972		4195	4.195		4195	4.195		103.53		Dinas Pertanian	Karakter
			Jumlah Produksi Tomat	Ton	1096			880		1.017			986			986			89.96		Dinas Pertanian	-
			Jumlah Produksi Pisang	Ton	18013			15784		17.045			15778			15778			87.59		Dinas Pertanian	-
			Jumlah Produksi Durian	Ton	1032			1040		977			1.076,10			1.076,10			0.10		Dinas Pertanian	-
			Jumlah Produksi Rambutan	Ton	7543	7.543		6276		6702	6.702		6306	6.306,20		6306	6.306,20		83.60		Dinas Pertanian	Karakter
1.26		**Program Peningkatan Produksi TPH**	**Luas Panen Komoditas TPH Unggulan Nasional : Padi; Jagung; Kedelai; Cabe Besar; Cabe Rawit; Bawang Merah; Jeruk**	**Hektar**	**59474**			**62032**		**56061; 1303; 653; 116; 65; 7; 654**			**55421**			**55421**			**93.19**		**Dinas Pertanian**	**-**
			Produktivitas TPH Unggulan Nasional : Padi; Jagung; Kedelai; Cabe Besar; Cabe Rawit; Bawang Merah; Jeruk	**Ku/Ha**	**52**			**52.45**		**51,75; 40,00; 13,05; 84,65; 17,42; 75,30;**			**52.35;42.51;12.97;0;0;0;0**			**52.35;42.51;12.97;0;0;0;0**			**100.67**		**Dinas Pertanian**	**-**
1.26.1		Kegiatan Pengembangan TPH	Jumlah Bibit Jeruk	Batang	400,10,15,10	3.000	2,447,790,000	0	21,380,000	2250	2250	612,140,000	2250	2250	502,894,000	2250	2250		562.50		Dinas Pertanian	Karakter
			Jumlah Pupuk	Kg	3.000	3.000		0		2600	2600		2600	2600		2600	2600		86,666.67		Dinas Pertanian	Karakter
			Jumlah Bibit Durian	Batang		4.000		0		1000	1000		1000	1000		1000	1000		100,000.00		Dinas Pertanian	Karakter
			Benih Sayuran	Bungkus		400		64		100	100		100	100		100	100		10,000.00		Dinas Pertanian	Karakter
			Benih Padi	Kg		16.000		0		10000	10000		0	0		0	0		0.00		Dinas Pertanian	Karakter
1.26.6		Kegiatan Penyediaan Benih Bermutu TPH	Jumlah Bibit dan Benih Bersertifikat	Ton	25,65 ton	25.65 Ton	1,695,300,000	6	69,230,015	15	15 Ton	109,400,000	5	5	98,809,201	5	5		20.00		Dinas Pertanian	Karakter
1.26.7		Kegiatan Perlindungan TPH	Jumlah Pestisida	Botol/Liter/Kg	2500		6,150,000,000	2000	238,432,500	3104		392,221,800	3104		367,750,925	3104			124.16		Dinas Pertanian	-
1.26.8		Kegiatan Pengadaan Sarana Pra Panen	Jumlah Alat Mesin Pra Panen	Unit	200		12,050,240,000	300	0	0		0	0		0	300			150.00		Dinas Pertanian	-
1.26.9		Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Jumlah Serapan Pupuk Bersubsidi	Ton	10.000	41.160	3,151,927,200	30160	161,147,500	5000	5.000	252,500,000	8476	8.476	186,460,500	38636	38.636		386,360.00		Dinas Pertanian	Karakter

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.26.10		Kegiatan Fasilitasi AUTP	Jumlah Luas Usaha Tani yang Berasuransi	Ha	4.500	4.500	880,000,000	0	0	4000	4.000	18,000,000	286	286	17,910,000	286	286		6,355.56		Dinas Pertanian	Karakter
1.26.11		Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	Jumlah infrastruktur yang dibangun	Unit	14.000	48	19,505,622,180	6	2,339,498,717	13	13	3,216,650,000	12	12	2,728,110,445	12	12		85.71		Dinas Pertanian	Karakter
1.26.12		Kegiatan Penangkaran TPH	Jumlah Saprodi Penangkaran (Benih Padi Unggul dan Pestisida)	Kg/Botol	10		461,409,200	2250	0	189		38,332,500	189		37,542,500	189			1,890.00		Dinas Pertanian	-
												Rata - rata kinerja (%)	23,966.11		3,939,477,571	167.11						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
2	Meningkatnya Produktivitas TPH		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Padi)	Ku/Ha	52	52		52		52	51.75		52	52,35		52	52,35		100.00		Dinas Pertanian	Karakter
			Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Jagung)	Ku/Ha	40	40.00		42		40	40.00		42	41,51		42	41,51		105.00		Dinas Pertanian	Karakter
			Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Kedelai)	Ku/Ha	13	13		13		13	13.05		13	12,97		13	12,97		100.00		Dinas Pertanian	Karakter
			Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Cabe Besar)	Ku/Ha	84	84		86		84	84.65		84	84,79		84	84,79		100.00		Dinas Pertanian	Karakter
			Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Cabe Rawit)	Ku/Ha	17	17		17		17	17.42		17	17,48		17	14,48		100.00		Dinas Pertanian	Karakter
			Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Bawang Merah)	Ku/Ha	75	75		0		75	75.30		84	84,33		84	84,33		112.00		Dinas Pertanian	Karakter
			Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Jeruk)	Ku/Ha	148			146.6		149.80			145,75			145,75			97.97		Dinas Pertanian	-
			Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Kacang Tanah)	Ku/Ha	14	14		14		14	14.23		14	14,35		14	14,35		100.00		Dinas Pertanian	Karakter
			Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Kacang Hijau)	Ku/Ha	12	12		11		12	12.05		12	12,1		12	12,1		100.00		Dinas Pertanian	Karakter
			Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Ubi Kayu)	Ku/Ha	140	140		141		140	140.95		142	141,72		142	141,72		101.43		Dinas Pertanian	Karakter
			Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Tomat)	Ku/Ha	97	97		99		97	97.75		94	93,86		94	93,86		96.91		Dinas Pertanian	Karakter
			Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Pisang)	Ku/Ha	190			191.55		188.80			190,65			190,65			100.00		Dinas Pertanian	-
			Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Durian)	Ku/Ha	115	115		112		111	111.00		112	111,81		112	111,81		97.39		Dinas Pertanian	Karakter
			Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Rambutan)	Ku/Ha	68	68		66		67	67.00		66			66	66,52		97.06		Dinas Pertanian	Karakter
3	Meningkatnya Produksi Ternak		Jumlah Produksi Daging	Kg	2850000	2.850.000		0		2800000	2.800.000		2822040	2.822.040		2822040	2.822.040		99.02		Dinas Pertanian	Karakter
			Jumlah Produksi Telur	Butir	4797068	4.797.068		5204946		4672576	4.672.576		5371398	5.371.398		5371398	5.371.398		111.97		Dinas Pertanian	Karakter

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.21		**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**	**Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak**	**%**	**4**	**4**		**0**		**6**	**3;7.5;8.5**		**4**	**3;6;4**		**4**	**3;6;4**		**100.00**		**Dinas Pertanian**	**Karakter**
3.21.3		Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	Jumlah Penanganan Kasus Endemik	Ekor HPR/Unggas	3/500	8.500	595,000,000	0	78,867,200	1165	1165/10000	40,000,000	40	20/20	23,982,500	40	20/20		-1,133.33		Dinas Pertanian	Karakter
3.21.7		Pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah Pengendalian Penyakit Hewan Menular	Jenis PHM	7		315,000,000	0	49,978,400	25		89,605,000	25		87,795,000	25			357.14		Dinas Pertanian	-
3.21.8		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan	Dokumen	3		455,000,000	0	0	1		29,200,000	1		28,246,667	1			33.33		Dinas Pertanian	-
												Rata - rata kinerja (%)	286.67		140,024,167	67.67						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sedang						
3.24		**Program Peningkatan Produktivitas Ternak**	**Persentase Produktivitas Ternak**	**%**	**30**	**30**		**0**		**10**	**10.0**		**10**	**10,2**		**10**	**10,2**		**33.33**		**Dinas Pertanian**	**Karakter**
3.24.7		Peningkatan Kualitas Pakan Ternak	Jumlah Pakan Ternak	Stek	100.000	100.000	625,000,000	0	0	22215	22215	44,275,000	22215	22215	43,757,000	22215	22215		22,215.00		Dinas Pertanian	Karakter
3.24.10		Kegiatan Pengadaan Sarana dan PrasaranaTeknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah Strow dan N2 Cair Yang Tersedia	Dosis/Liter	3.500	3.500	548,694,500	0	13,080,000	450	450	67,330,000	450	450	67,092,967	450	450		12,857.14		Dinas Pertanian	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	17,536.00		110,849,967	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
3.38		**Program Peningkatan Populasi Ternak**	**Persentase Peningkatan Populasi Ternak (Sapi;Kerbau;Kambing;Domba;Itik; Ayam Buras)**	**%**	**2**	**2**				**2**	**2,5;2;2,5;2,5;3;3**		**4**	**4,02;4,43;4,07;38,21;12,13;2,56**		**4**	**4,02;4,43;4,07;38,21;12,13;2,56**		**200.00**		**Dinas Pertanian**	**Karakter**
3.38.1		Kegiatan Pembibitan Ternak	Jumlah Bibit Ternak (Kambing, Domba, Itik, Ayam Buras)	Ekor	5.000,6.000,40,45,45	2.447	6,060,000,000	30	0	6040	20;20;4.000;2.000	752,200,000	6040	20;20;4.000;2.000	706,332,300	6040	20;20;4.000;2.000		120,800.00		Dinas Pertanian	Karakter
3.38.2		Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengadaan Sarana Produksi Peternakan	Jumlah Pembangunan/Pemeliharaan/Pengadaan Sarana Produksi Peternakan	Buah	2		1,674,445,000	0	0	1		25,600,000	1		24,750,000	1			50.00		Dinas Pertanian	-
3.38.3		Kegiatan Pengawasan Ternak Produktif	Jumlah Pemotongan Ternak yang Terawasi (Ternak Besar)	Ekor Ternak Besar	Ternak Besar 850 ekr	850	315,500,000	0	0	800	Ternak Besar 800 ekr	64,000,000	868	868	62,388,750	868	868		86,800.00		Dinas Pertanian	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	123,492.00		793,471,050	154.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
4	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Karet;Kelapa;Aren;Kakao;Kopi;Sagu;Lada)	Ton	20712	20.712		20064		20267	20.267;4.512;921;126;235;0		20083	20.083;4.425;783;0;292;4		20083	20.083;4.425;783;0;292;4		96.96		Dinas Pertanian	Karakter
4.19		**Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan**	**Persentase Produktivitas perkebunan : karet, kelapa, aren, kakao, kopi, sagu, lada**	**%**	**1**	**1**		**0**		**1**	**1,05;1,01;1,05;0;1,02;1,01;0**		**1**	**0,1;0,22;0,06;0;0,22;0,28;11,17**		**1**	**0,1;0,22;0,06;0;0,22;0,28;11,17**		**100.00**		**Dinas Pertanian**	**Karakter**
4.19.13		Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Jumlah Alat Mesin Perkebunan,Jumlah Pembeku Latekx dan Panjang Jalan Produksi Perkebunan	Buah/Liter	75.200/1000/2	76.202	2,580,631,667	1	243,440,250	76201	75.200/1000/1	371,200,000	76201	75.200 buah/1.000 liter/1 km	268,744,500	76201	75.200 buah/1.000 liter/1 km		101,331.12		Dinas Pertanian	Karakter
4.19.14		Penanganan OPT	Jumlah Luas Areal Penanganan OPT	Ha	100		233,032,799	0	0	100		45,820,000	100		45,191,075	100			100.00		Dinas Pertanian	-
4.19.18		Kegiatan Pengadaan Pupuk	Jumlah Pupuk Yang Digunakan	Kg	21.000	21.000	1,174,369,000	0	0	12000	12000	220,480,000	12000	12000	219,472,000	12000	12.000		57,142.86		Dinas Pertanian	Karakter
4.19.19		Kegiatan Pengadaan Pestisida	Jumlah Pestisida	Liter	1.096	3.272	505,690,000	0	0	763	763	103,530,000	763	763	102,721,584	763	763		69,616.79		Dinas Pertanian	Karakter
													Rata - rata kinerja (%)		45,139.75			636,129,159	100.00			
													Predikat Kinerja		Sangat tinggi				Sangat tinggi			
4.35		**Program Pengembangan Komoditas Perkebunan**	**Luas Tanaman yang menghasilkan (Karet;Kelapa;Aren;Kakao;Kopi;Sagu;Lada)**	**Ha**	**17260**	**17.260**				**17060**	**17.060;4.490;550;50;260;355;15**		**16956**	**16.956;4.471;488;0;247;415;6**		**16956**	**16.956;4.471;488;0;247;415;6**		**98.24**		**Dinas Pertanian**	**Karakter**
4.35.7		Kegiatan Pengadaan Bibit Perkebunan	Jumlah Bibit Perkebunan yang ditanam (Kelapa;Aren;Kakao;Kopi;Sagu;Lada)	Batang	2.250;1.500;25.000;5.000;1.500;10.500	28.625	5,456,725,000	2000	0	2250	2.250;1.500;25.000;5.000;1.500;10.500	733,509,000	28625	3.125;500;0;0;0;25.000	700,432,000	28625	3.125;500;0;0;0;25.000		1,272,222.22		Dinas Pertanian	Karakter
						data		0						0			0		0.00		Dinas Pertanian	Karakter
													Rata - rata kinerja (%)		100,000.00			700,432,000	1,272.00			
													Predikat Kinerja		Sangat tinggi				Sangat tinggi			
5	Meningkatkan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Beras Kemasan)	Kelompok	3			2		1			3			3			100.00		Dinas Pertanian	-
			Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Keripik Pisang)	Rumah Tangga	5			2		3			2			2			40.00		Dinas Pertanian	-
			Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Keripik Singkong)	Rumah Tangga	5			2		3			2			2			40.00		Dinas Pertanian	-
			Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Sirup Jeruk)	Rumah Tangga	3			1		2			2			2			66.67		Dinas Pertanian	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Tempe)	Kelompok	3			0		1			2			2			66.67		Dinas Pertanian	-
			Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Telur Asin)	Rumah Tangga	5			2		3			2			2			40.00		Dinas Pertanian	-
			Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Gula Semut)	Rumah Tangga	5			0		5			1			1			20.00		Dinas Pertanian	-
			Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Bokar)	Kelompok	11			4		6			14			14			127.27		Dinas Pertanian	-
5.32		**Program Peningkatan Sarana Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran**	**Persentase Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian**	**%**	**100**			**0**		**48,8**			**129,16**			**129,16**			**129.00**		**Dinas Pertanian**	**-**
5.32.1		Penanganan Pasca Produk Pertanian	Jumlah Alat Mesin Pasca Panen	Unit	83		7,132,592,002	300	9,416,514,000	10		2,906,197,334	10		2,718,773,572	10			187.95		Dinas Pertanian	-
5.32.2		Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian	Jumlah Peserta yang dilatih dan Jumlah Produk Olahan yang di Promosikan	Orang/Produk	0		645,852,000	0	33,000,000	240		140,184,000	240		133,044,000	240			24,000.00		Dinas Pertanian	-
												Rata - rata kinerja (%)	12.00		2,851,817,572	200.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi						
6	Peningkatan Kualitas SDM Pertanian		% Kelompok yang Meningkat Skornya	%	35			33		30			42,2			42,2			120.00		Dinas Pertanian	-
			% Peningkatan Skor Kinerja Penyuluhan Pertanian	%	5			5		5			5			5			100.00		Dinas Pertanian	-
6.39		**Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian**	**% Kelompok yang Meningkat Skornya**	**%**	**35**			**33**		**30**			**42,2**			**42,2**			**120.00**		**Dinas Pertanian**	**-**
			% Peningkatan Skor Kinerja Penyuluh Pertanian	**%**	**5**			**5**		**5**			**5**			**5**			**100.00**		**Dinas Pertanian**	**-**
6.39.1		Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kelembagaan Petani	Jumlah Kelembagaan Kelompok Tani yang difasilitasi	Kelompok	35		636,724,000	0	0	35		145,459,000	35		117,345,925	35			100.00		Dinas Pertanian	-
6.39.2		Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Ketenagaan Penyuluh Pertanian	Jumlah RKP dan Programa yang Tersusun	RKP	150		898,440,000	155	0	150		1,560,563,000	144		1,381,453,898	144			96.00		Dinas Pertanian	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
6.39.3		Integrated Participatory Development adn Management of Irrigation Project (IPDMIP)	Terekrutnya Staf Lapangan	Orang	-		0	0	0	6		1,089,337,000	0		272,232,000	0			0.00		Dinas Pertanian	-
			Terlaksananya pelatihan penyuluh swadaya	Kali	-			0		1			1			1			100.00		Dinas Pertanian	-
			Terlaksananya Sekolah Lapang (SL)	Lokasi	-			0		9			9			9			900.00		Dinas Pertanian	-
			Terfasilitasinya buku pencatatan petani	Buah	-			0		800			0			0			0.00		Dinas Pertanian	-
			Terlaksananya form berbagi pengalaman petani	Kali	-			0		12			0			0			0.00		Dinas Pertanian	-
			Terlaksananya kunjungan antar daerah	Kali	-			0		5			0			0			0.00		Dinas Pertanian	-
			Terlaksananya pertemuan bulanan mereview pelaksanaan penyuluhan	Paket	-			0		10			6			6			600.00		Dinas Pertanian	-
			Pemberian penghargaan penyuluh	Orang	-			0		6			0			0			0.00		Dinas Pertanian	-
			Pemberian penghargaan petani	Paket	-			0		32			0			0			0.00		Dinas Pertanian	-
			Tersedianya tempat penyimpanan benih di lapangan	Buah	-			0		199			0			0			0.00		Dinas Pertanian	-
			Terlaksananya demonstrasi alsintan	Paket	-			0		32			9			9			900.00		Dinas Pertanian	-
			Terlaksananya demonstrasi	Paket	-			0		2			0			0			0.00		Dinas Pertanian	-
			Terlaksananya Pemetaan awal value chain	Paket	-			0		1			0			0			0.00		Dinas Pertanian	-
			Terlaksananya validasi value chain	Paket	-			0		1			0			0			0.00		Dinas Pertanian	-
			Terfasilitasinya value chain	Paket	-			0		1			0			0			0.00		Dinas Pertanian	-
Rata - rata kinerja (%)													11.53		1,771,031,823	28.47						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah			Sangat Rendah						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Pemberdayaan Masyarakat Desa																				
1	Meningkatnya Kemandirian Desa		Desa dengan nilai IDM di atas 0,599	persen	78	78		68		66	65.84		87	86.95		87	87		111.54		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Karakter
1.15		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	**persentasi petugas pendamping desa yang aktif dan persentasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang aktif**	**%**	**85**			**66**		**55**			**85**			**85**			**100.00**		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**	-
			KPMD yang aktif	**%**	**85**	**85**		**66**		**55**	**55**		**85**	**85**		**85**	**85**		**100.00**		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**	**Karakter**
1.15.2		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah dibina	orang	322		832,537,495	388	9,231,300	322		53,160,000	322		53,160,000	710			220.50		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
1.15.5		Pendampingan Masyarakat Desa	Jumlah rapat koordinasi	rakor	12		5,657,291,023	24	28,845,000	12		51,400,000	12		49,795,000	36			300.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		102,955,000	260.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
1.16		**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	**Persentase desa yang memiliki BUMDesa yang aktif**	**persen**	**6**			**0**		**2**			**2**			**2**			**33.33**		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**	-
1.16.2		Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Jumlah Pengelola BUMDesa yang punya keterampilan manajemen BUMDesa	orang	30	30	174,832,200	0	0	30	30	7,840,000	30	30	7,840,000	30	30		100.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Karakter

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.16.12		Sosialisasi Pasar Desa	Jumlah Pengelola Pasar Desa yang terbentuk	Pasar Desa	1		712,800,001	0	0	0		8,335,000	1		8,335,000	1			100.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
1.16.13		Fasilitasi Lembaga Ekonomi Lokal Desa	Jumlah Lembaga Ekonomi Lokal yang difasilitasi	Lembaga Ekonomi Lokal	4		266,828,300	0	0	4		8,600,000	4		8,600,000	4			100.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
1.16.15		Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah BUMdesa yang terbentuk	BUMDesa	20		535,277,261	19	35,534,900	20		13,715,000	20		13,705,000	39			195.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
				Rata - rata kinerja (%)									100.00		38,480,000	98.75						
				Predikat Kinerja									Sangat tinggi			Sangat tinggi						
1.17		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Rasio Nilai swadaya masyarakat terhadap APBDes dan persentasi kelembagaan desa yang aktif dan persentasi jumlah lembaga adat/budaya yang aktif berpartisipasi dalam pelestarian budaya**	**%**	**80**			**80**		**80**			**80**			**80**			**100.00**		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**	**-**
1.17.1		Pemberdayaan Lembaga Adat	Melaksanakan Pembinaaan Kelembagaan adat/Budaya Desa	jumlah lembaga	3		1,621,650,475	3	2,350,000	3		27,087,500	3		22,637,500	3			100.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
1.17.4		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM)	orang	322		1,003,117,500	644	0	322		56,130,300	322		44,005,000	966			300.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
1.17.14		Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang dibina dalam pelaksanaan gotong royong	desa	55		1,069,440,000	2	0	2		22,950,000	1		9,480,000	3			5.45		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
1.17.19		Revitalisasi Posyandu Melalui Pokjanal	jumlah Kader Posyandu yang telah dibina	Orang	550		1,091,680,438	620	9,550,000	550		75,165,000	70		59,551,000	690			125.45		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.17.21		Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah PKK yang telah dibina	PKK	7		4,015,760,210	181	69,579,900	181		324,261,000	181		323,058,764	181			2,585.71		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
1.17.22		Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Desa yang melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) sesuai Pedoman	Desa	4		1,030,431,000	161	4,600,000	161		11,305,000	161		11,195,000	161			4,025.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
Rata - rata kinerja (%)													1,137.17		469,927,264	145.83							
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi							
1.18		**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase desa dengan pengadministrasian yang lengkap**	**persen**	**100**	**100**		**77**		**8**	**8**		**8**	**data**		**85**	**85**		**85.00**		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**	**Karakter**
1.18.3		Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang terampil	orang	190		930,208,423	570	15,952,500	190		64,015,000	483		56,745,000	1053			554.21		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
1.18.10		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa sesuai pedoman	desa	161		1,712,251,405	161	0	0		0	0		0	161			100.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
1.18.12		Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Keuangan Desa	Jumlah desa yang dapat menyusun APBDesa dan Lap. Keuangan	desa	190		815,238,423	161	0	161		48,200,000	161		46,777,500	161			84.74		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
1.18.13		Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Jumlah desa yang berprestasi	desa	11 desa 3 kelurahan	75	904,842,366	39	38,331,000	14	14	45,292,000	11	11	37,190,000	50	50		454.55		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Karakter
Rata - rata kinerja (%)													88.00		140,712,500	252.75							
Predikat Kinerja													Tinggi			Sangat tinggi							

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.20		**Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa**	**persentasi aparatur pemerintahan desa terampil**	**persen**	**100**	**100**		**77**		**8**	**8**		**8**	**data**		**85**	**85**		**85.00**		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**	**Karakter**
1.20.1		Fasilitasi Peningkatan Wawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang menyusun profil desa	desa	161		520,000,000		0	161		20,845,000	161		16,124,900	161			100.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
1.20.2		Fasilitasi Pelantikan Kepala Desa	jumlah desa yang kepala desa terpilih	desa	7		540,970,000	11	0	0		0	0		0	11			157.14		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
1.20.3		Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Pembakal	Jumlah desa yang kepala desanya terpilih	desa	7		814,240,000	11	0	0		0	0		0	11			157.14		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
1.20.5		Fasilitasi Pelantikan BPD	Jumlah desa yang Anggota BPDnya terpilih	desa	0		350,000,000	1	0	4		37,350,000	3		18,871,400	4			400.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
1.20.6		Monitoring dan Evaluasi Pemilihan BPD	Jumlah desa yang Anggota BPDnya terpilih	desa	0		304,750,000	1	0	4		36,300,000	3		34,500,000	4			400.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
												Rata - rata kinerja (%)	33.33		69,496,300	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi						
1.22		**Program Pengembangan Sumber daya alam dan teknologi tepat guna**	**Posyantek yang aktif**	**persen**	**1**			**0**		**1**			**1**			**1**			**100.00**		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**	**-**
			Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	**persen**	**1**			**0**		**1**			**1**			**1**			**100.00**		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**	**-**
1.22.2		Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah lomba inovasi desa yang dilaksanakan dan diikuti	kali	2		530,923,792	6	34,614,800	2		32,610,000	2		31,805,000	8			400.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.22.3		Gelar teknologi Tepat Guna	Jumlah TTG yang masuk kriteria yang diikutsertakan dalam TTG	buah	1		375,995,700	1	0	1		11,500,000	1		9,247,000	1			100.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
			Jumlah desa/masyarakat yang mengikuti gelar TTG	desa		0		0		0	0		0	0		0	0		0.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Karakter
1.22.4		Sosialisasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek yang terbentuk	buah	1		326,058,840	1	0	1		15,910,000	1		14,910,000	1			100.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
1.22.7		Sosialisasi Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	buah	2		186,298,000	0	0	0		2,750,000	0		2,750,000	0			0.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
1.22.8		Sosialisasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah kerjasama antar desa yang terbentuk	buah	1		270,620,000	0	0	0		3,900,000	0		3,890,000	0			0.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-
Rata - rata kinerja (%)													60.00		62,602,000	120.00						
Predikat Kinerja													Rendah			Sangat tinggi						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Sosial																				
1	Menurunkan angka PMKS		Jumlah PMKS	%	100			100		100			100			100			100.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
1.15		**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	**Prevalensi PMKS yang terayomi**	**%**	**90**	**90**		**50**		**87**	**87,13**		**54**	**data**		**54**	**53,85**		**60.00**		**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Karakter**
1.15.9		Penjajakan Awal dan Pelaksanaan Program KAT	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	KK-	10		4,271,246,817	10	77,000,000	10		577,000,000	10		540,112,000	10			100.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
1.15.12		Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah keluarga miskin yang memiliki keterampilan	KK	120		812,242,230	100	0	75		179,700,000	200		178,157,500	200			166.67		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.15.17		Koordinasi Pembinaan Program Rastra dan PKH	Jumlah RASTRA dan PKH yang di salurkan	thn	1		668,725,392	1	0	1		48,000,000	1		31,130,400	1			100.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
													Rata - rata kinerja (%)	122.00		749,399,900	155.33					
													Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi					
1.25		**Penanganan Fakir Miskin**	**Persentasi data BDT yang valid dan akurat**	**Dokumen**	**75**			**75**		**75**			**75**			**75**			**100.00**		**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	-
1.25.1		Pengumpulan Data Sosial	Jumlah data yang dimutahirkan	%	100		287,400,000	0	0	75		287,400,000	75		251,457,500	75			75.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
													Rata - rata kinerja (%)	75.00		251,457,500	100.00					
													Predikat Kinerja	Sedang			Sangat tinggi					
2	Meningkatkan pelayanan panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi		Tingkat Kepuasan pelayanan panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	PA	14			14		14			14			14			100.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.19		**Program pembinaan panti asuhan /panti jompo**	**Pelayanan sarana dan prasaranaRehab. Kessos bagi PMKS**	**LKS**	**14**			**14**		**14**			**14**			**14**			**100.00**		**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**-**
2.19.4		Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti dan jompo	Pelayanan sarana dan prasarana rehab. Kessos bagi PMKS	PA	14		1,210,084,450	17	0	17		48,350,000	14		46,500,000	14			100.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
2.19.5		Peningfkatan kualitas SDM Sosial Masyarakat	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terampil	%	100		1,053,792,688	4	100	100		148,400,000	4		114,663,950	4			4.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
												Rata - rata kinerja (%)	52.00		161,163,950	43.00						
												Predikat Kinerja	Rendah			Sangat Rendah						
3	Tingkat pelayanan terhadap korban bencana alam sosial		Tingkat pelayanan terhadap korban bencana alam sosial	%	100			100		100			100			100			100.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
3.16		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Persentasi PMKS yang menerima pelayanan Kessos**	**%**	**100**			**100**		**100**			**40**			**40**			**40.00**		**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**-**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.16.17		Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	Jumlah korban yang ditangani	%	100		3,293,228,980	100	822,909,000	100		339,000,000	100		229,068,600	100			100.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
Rata - rata kinerja (%)													100.00		229,068,600	100.00							
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi							
4	Menurunkan angka penyandang masalah sosial		Jumlah PMKS	%	100			100		100			25			25			25.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
5	Menurunkan angka penyandang masalah sosial		Jumlah PMKS	%	100			100		100			25			25			25.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																					
6	Indeks Pembanguna Gender (IPG) Indeks pemberdayaan Gender (IDG)		Persentasi Kelompok usaha perempuan / keluarga masyarakat yang dapat meningkatkan ekonomi dan Persentasi SKPD yang menerapkan PPRG	%.	100			97%		98%			0			97%			97.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
6.18		**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**Persentasi Peran serta Perempuan**	**%**	**100**			**97%**		**98%**			**0**			**97%**			**97.00**		**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**-**
6.18.12		Pembinaan Monitoring dan evaluasi GSI dan P2W-KSS	Jumlah Desa P2WKSS dan Kecamatan GSI	Desa, kecamatan	7		151,500,000	6	1	2		151,500,000	2		147,903,609	8			114.29		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
6.18.14		Pengembangan pemberdayaan perempuan	Jumlah Perempuan yang berpartisipasi dalam pemerintahan dan swasta	%	35		724,256,775	146	0	49,95%		56,820,000	49,95%		51,848,000	195			557.14		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
			Jumlah SKPD yang menerapkan PPRG	%	55			0		45			45			45			81.82		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
													Rata - rata kinerja (%)	83.00		199,751,609	299.00					
													Predikat Kinerja	Tinggi			Sangat tinggi					
7	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) dan menurunnya angka kekerasan Perempuan dan Anak		Meningkatkan Pemenuhan hak anak dan partisifasi anak	%	100			100		100			100			100			100.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
7.21		**Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak**	**Angka klasifikasi kabupaten layak anak**	**Katagori Pratama**	**100**			**600**		**600**			**591**			**591**			**591.00**		**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**-**
7.21.1		Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak dan Partisipasi Anak	Jumlah Sosialisai KLA	Kali	100		0	2	0	7		90,760,000	13		57,868,650	13			13.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
7.21.3		Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Anak	Jumlah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	kali	100		221,768,000	6	0	3		13,500,000	13		12,573,000	13			13.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
7.21.5		Pendataan Data Gender dan Anak	Jumlah Data KLA yang di evaluasi	%	100		156,631,130	100	0	100		16,952,000	100		1,757,500	100			100.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
7.21.6		Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan	Jumlah kasus yang ditangani	%	100		110,884,000	100	0	100		34,200,000	100		8,937,600	100			100.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
Rata - rata kinerja (%)													56.50		81,136,750	204.50						
Predikat Kinerja													Rendah			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																				
8	Persentasi pasangan usia subur yang ber KB		Persentasi pasangan usia subur yang ber KB	%	100			80		80			80			80			80.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
8.15		**Program Pelayanan Keluarga Berencana**	**Persentasi peserta KB aktif dengan semua alat kontrasepsi**	**%**	**35973**			**100**		**100**			**100**			**100**			**0.28**		**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	-
8.15.9		Kegiatan bakti sosial TNI KB KES, Kesatuan gerak PKK KB KES dan KIE	% Terpenuhinya kebutuhan alat dan kontrasepsi	%	100		364,503,250	100	0	100		301,915,000	100		210,237,000	100			100.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
8.15.10		Pembinaan KB	Jumlah peserta KB aktif meningkat	buah	204		3,182,526,183	80	0	100		453,545,000	100		358,716,600	100			49.02		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
Rata - rata kinerja (%)													74.50		568,953,600	100.00						
Predikat Kinerja													Sedang			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
8.18		**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	**Persetase Data Dukung yang Akurat**	**%**	**12**			**12**		**12**			**12**			**12**			**100.00**		**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	-
8.18.3		Pengolahan Data dan Informasi Program KKBPK	Jumlah Dokumen pelaporan bulanan	Dokumen	132		0	132	0	132		168,067,500	132		117,614,200	132			100.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		117,614,200	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
8.27		**Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga**	**Persentasi masyarakat yang berperan terhadap ketahanan keluarga**	**%**	**100**			**100**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	-
8.27.1		Pembinaan Kesejahteraan keluarga	Jumlah kelompok Tri Bina meningkat dengan klasifikasinya (Dasar, berkembang, paripurna)	%	100		0	3	0	100		240,528,000	100		232,500,000	100			100.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		232,500,000	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
8.28		**Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana**	**Terbinanya ketahanan keluarga melalui kelompok tribina**	**buah-**	**233**			**233**		**-**			**233**			**233**			**100.00**		**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**-**
8.28.1		Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Jumlah kampung KB yang terbentuk	buah	-		0	8	0	-		3,274,250,000	19		2,766,370,675	19			1,900.00		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
Rata - rata kinerja (%)													nan		2,766,370,675	nan						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah			Sangat Rendah						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Pangan																				
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		persentase berkurangnya Penduduk rawan pangan	%	41			36.9		37			0			0			0.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
			Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	82	82		77		75	74,64		0	0		77	63.168		93.90		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Karakter
			Tingkat Keamanan Pangan Segar	sample	21	21		15		17	17		0	0		0	0		0.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Karakter
			Persentase Ketersediaan Lumbung Pangan Masyarakat yang terisi Bahan Pangan Utama	%	100			100		100			0			100			100.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
			Persentase Pemberdayaan Kelompok distribusi Pangan Masyarakat yang berpartisipasi untuk menjaga stabilisasi Harga Pangan	%	83			300		83			83			383			461.45		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
			Persentase Tingkat Konsumsi Pangan	%	92	92		278		93	92,5		0	93,91		278	0		302.17		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Karakter
1.18		**Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Persentase Ketersediaan Lumbung Pangan Masyarakat yang Terisi Bahan Pangan Utama**	**%**	**100**			**100**		**100**			**0**			**100**			**100.00**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**-**
			Meningkatkan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar	**Laporan**	**1**			**0**		**1**			**1**			**1**			**100.00**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**-**
			Persentase pemberdayaan kelompok distribusi pangan masyarakat yang berpartisipasi untuk menjaga stabilisasi harga pangan	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**			**0**	**0**		**100**	**100**		**100.00**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**Karakter**
1.18.2		Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan	desa	20		2,560,536,000	20	0	20		112,553,000	0		59,775,000	20			100.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
1.18.3		Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang terbentuk	Kelompok	1		2,341,696,000	1	0	1		813,000,000	0		756,769,167	1			100.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
1.18.8		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Kelompok Yang Paham Tentang Keamanan Pangan	Sample	25		1,849,554,000	17	0	20		16,375,000	0		13,567,498	17			68.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.18.10		Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah Kelompok Wanita Yang Memanfaatkan Pekarangan Untuk Menghasilkan Produk dan Jumlah Promosi dan Lomba Yang Dilaksanakan B2SA	Kali dan Kelompok	1, 35	11	1,034,627,000	11	0	11	1, 25	59,550,000	0	0	56,140,000	11	11		1,100.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Karakter
1.18.16		Pengembangan Cadangan Pangan	Persentasi Ketersediaan Lumbung Pangan Masyarakat yang Terisi Bahan Pangan Utama	kg	10000		1,069,411,000	0	0	10000		9,625,000	10000		0	10000			100.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	kg		10000		13458		10000			13458	13458		13458	13458		1,345,800.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Karakter
1.18.18		Pemantauan dan Analisis Harga Pangan	Persentasi Pemberdayaan Kelompok Distribusi Pangan Masyarakat yang Berpartisifasi Untuk Menjaga Stabilisasi Harga Pangan	Laporan	12		781,733,000	12	0	12		79,735,400	0		42,200,000	12			100.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
1.18.22		Pengembangan Model Distribusi Pangan	Jumlah kelompok P-LDPM dan PUPM yang terbina	Buah	12		886,693,500	2	0	10		14,165,000	10		10,412,500	10			83.33		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
			Persentase pemberdayaan kelompok distribusi pangan masyarakat yang berpartisipasi untuk menjaga stabilisasi harga pangan	%		0		100		100			100	100		100	100		10,000.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	45.29		938,864,165	131.29						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi						
		Kelautan dan Perikanan																				
2	Meningkatnya Produksi Perikanan		Jumlah Konsumsi Ikan	perkapita /tahun	50	50		50		50	50,45		51	51		51	51,4		102.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Karakter
			Persentase hasil Perikanan yang Memproduksi Hasil Olahan Perikanan	%	40			0		30			2			2			5.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
2.30		**Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Jumlah Kelompok Usaha yang Meningkat omzetnya**	**kelompok**	**10**			**0**		**8**			**4**			**4**			**40.00**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**-**
2.30.1		Pengadaan/pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Sarana Prasarana yang diadakan/dibangun/direhabilitasi	Kegiatan	1		2,984,472,000	0	0	1		65,250,000	1		32,586,334	1			100.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.30.2		Pendampingan Kelompok Tani Pengolah dan Pemasar Hasil	Jumlah hasil olahan produk perikanan yang diproduksi/dipasarkan	Kelompok	11		245,000,000	7	0	9		63,000,000	5		49,115,000	5			45.45		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
2.30.6		Peningkatan Gemar Makan Ikan	Jumlah peserta anak-anak yang gemar makan ikan	orang	1		450,000,000	0	0	100		74,200,000	0		69,813,334	0			0.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
			Jumlah peserta yang mengikuti lomba masak serba ikan	kali		11		11		11			0	0		11	11		1,100.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	48.33		151,514,668	85.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Tinggi						
3	Meningkatnya Produksi Perikanan		Jumlah Produksi ikan tangkap	ton	8053			7829.9		7894			7907			7907			98.19		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
			Jumlah Laporan Yang di tindak lanjuti	laporan	12			62		8			10			72			600.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
3.21		**Program pengembangan perikanan tangkap**	**Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dibina**	**Kelompok**	**13**			**13**		**3**			**12**			**12**			**92.31**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**-**
			Jumlah Jenis Populasi ikan di Perairan yang ditebar	**Jenis**	**6**			**0**		**2**			**0**			**0**			**0.00**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**-**
			Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB)	**Kelompok**	**34**	**34**		**92**		**92**			**92**	**92**		**92**	**92**		**270.59**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**Karakter**
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum	**Ton**	**8053**	**8053**		**7828**		**7750**			**7907**	**7907**		**7907**	**7828**		**98.19**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**Karakter**
3.21.7		Pengembangan Prasarana Penangkapan	- Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang aktif	kelompok	12		2,236,000,000	47	0	8		395,550,000	24		283,496,667	24			200.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
			Jumlah Alat Tangkap Yang Ramah Lingkungan	Jenis		6		6		6			6	6		6	6		600.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Karakter
3.21.8		Pengkayaan Sumber Daya Ikan	Jumlah Bibit Lokal Yang ditebar di Perairan	ekor	40000		1,035,000,000	0	0	40000		180,090,000	0		134,730,000	0			0.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
												Rata - rata kinerja (%)	150.00		418,226,667	200.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.29		**Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan**	**Jumlah Kasus pelanggaran yang ditindaklanjuti**	**Lap.**	**24**			**18**		**2**			**0**			**18**			**75.00**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**-**
			Jumlah Pengaduan Masyarakat Tentang Adanya Penangkapan Ikan dengan Bahan dan Alat Terlarang	**Lap.**	**4**	**4**		**20**		**20**			**0**	**0**		**20**	**20**		**500.00**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**Karakter**
3.29.1		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Jumlah Laporan Masyarakat terhadap Pelanggaran yang diterima dan dimediasi	Lap.	4		9,420,000,000	18	0	4		774,000,000	4		593,698,500	4			100.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
Rata - rata kinerja (%)													100.00		593,698,500	100.00							
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi							
4	Meningkatnya Produksi Perikanan		Jumlah Produksi Ikan Budidaya	ton	2255			2782		2245			2558,2			2558,2			113.44		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
4.20		**Program pengembangan budidaya perikanan**	**Luas Budidaya Perikanan (ha)**	**Hektar**	**103**	**103**		**105**		**102**	**101,98**		**102**	**0**		**102**	**102**		**99.03**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**Karakter**
4.20.7		Pengembangn usaha perikanan	Jumlah Kolam Yang Dibangun	buah	3		7,164,000,000	16	0	3		501,560,000	10		384,985,491	10			333.33		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
			Luasan mina padi	hektar		1		0		1			1	1		1	1		100.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Karakter
4.20.15		Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan	Jumlah Benih Ikan Unggul yang di Hasilkan	ekor	290		7,489,899,000	24961	0	270000		264,010,001	284780		215,494,566	284780			98,200.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
4.20.18		Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat	Jumlah Kelompok UPR yang Aktif	Kelompok	2		1,650,000,000	0	0	2		7,392,000	7		5,254,250	7			350.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
Rata - rata kinerja (%)													32,994.33		605,734,307	296.00							
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi							

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Kepemudaan dan Olah Raga																				
1	Meningkatnya Kemandirian pemuda dalam pembangunan daerah		Persentase organisasi kepemudaan dan pemuda yang mandiri	%	100			56		70			70			70			70.00		Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	-
1.16		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	**Persentase organisasi kepemudaan yang aktif**	**%**	**100**			**52**		**70**			**70**			**70**			**70.00**		**Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata**	**-**
1.16.1		Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah OKP yang aktif	OKP	6		1,120,000,000	12	0	4		44,885,000	4		39,790,000	16			266.67		Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	-
1.16.3		Fasilitasi Akshi Bakhti Sosisal Kepemudaan	Jumlah peserta paskibraka yang terampil	orang	45		3,805,000,000	35	276,790,000	45		528,590,000	45		504,451,900	45			100.00		Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	-
												Rata - rata kinerja (%)	83.00		544,241,900	250.00						
												Predikat Kinerja	Tinggi			Sangat tinggi						
2	Meningkatnya prestasi olahraga pelajar		Peringkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	peringkat	7			9		7			3			3			42.86		Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	-
2.20		**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga**	**%**	**40**			**20**		**40**			**40**			**40**			**100.00**		**Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata**	**-**
			Persentase kompetisi olahraga yang dilaksanakan/diikuti secara teratur	**%**	**70**	**70**		**40**		**70**	**70**		**70**	**70**		**70**	**70**		**100.00**		**Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata**	**Karakter**
2.20.3		Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah atlet yang terbina untuk mengikuti kompetisi olahraga	orang	120		5,476,410,000	110	610,495,000	120		848,480,000	114		814,468,200	114			95.00		Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	-
2.20.6		Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah kompetisi yang dilaksanakan	event	84		4,206,180,000	16	99,820,000	20		274,500,000	20		269,479,500	20			23.81		Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	-
			Jumlah Kompetisi yang diikuti	event		2		6		2	2		2	2		2	2		200.00		Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	109.00		1,083,947,700	147.50						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.21		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**	**Persentase Prasarana dan Sarana Olahraga Pada semua Cabang Olahraga**	**%**	**100**			**20**		**45**			**40**			**40**			**40.00**		**Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata**	**-**
2.21.2		Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Prasarana dan Sarana / fasilitas pendukung lainnya yang dibangun / direhabilitasi sesuai standar	buah	2		65,900,000,000	1	3,134,138,700	1		16,322,550,000	1		12,699,138,117	1			50.00		Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	-
2.21.7		Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Prasarana dan Sarana olahraga yang dipelihara sesuai standar	buah	14		2,070,000,000	9	26,874,999	10		65,690,000	10		34,239,500	10			71.43		Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	-
													Rata - rata kinerja (%)		12,733,377,617	100.00						
													Predikat Kinerja	Rendah		Sangat tinggi						
		Pariwisata																				
3	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan																		0.00		Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Karakter
3.15		**Program pengembangan pemasaran pariwisata**	**Persentase Destinasi Pariwisata yang dipasarkan**	**%**	**35**			**12**		**35**			**14**			**26**			**74.29**		**Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata**	**-**
3.15.9		pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	Jumlah Event Promosi Pariwisata yang dilaksanakan	event	11		7,058,990,000	0	41,450,000	1		690,150,000	1		645,134,000	1			9.09		Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	-
			Jumlah Event Promosi Pariwisata yang diikuti	event		3		4		3	3		3	3		3	3		300.00		Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Karakter
													Rata - rata kinerja (%)	109.00	645,134,000	200.00						
													Predikat Kinerja	Sangat tinggi		Sangat tinggi						
3.16		**Program pengembangan destinasi pariwisata**	**Persentase Obyek Wisata yang memenuhi Sapta Pesona**	**%**	**85**			**30**		**40**			**40**			**70**			**82.35**		**Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata**	**-**
3.16.2		Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Prasarana dan Sarana yang sesuai Sapta Pesona	buah	4		2,029,673,740	1	4,355,000	9		2,100,000,000	1		0	1			25.00		Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	-
													Rata - rata kinerja (%)	25.00	0	11.00						
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah		Sangat Rendah						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.17		**Program pengembangan Kemitraan**	**Persentase Mitra Jasa Usaha Pariwisata yang Aktiv dan bekerjasama**	**%**	**50**			**30**		**50**			**10**			**40**			**80.00**		**Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata**	**-**
3.17.3		Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah Peserta yang dapat Memahami Min 75% di Bidang Jasa Usaha Kepariwisataan	orang	80		9,800,000	0	0	40		35,040,000	40		20,290,000	40			50.00		Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	-
3.17.8		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Pokdarwis/HPI yang aktif	Kelompok	80		664,457,864	0	0	5		9,800,000	5		6,600,000	5			6.25		Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	-
Rata - rata kinerja (%)													28.00		26,890,000	100.00						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah			Sangat tinggi						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Perpustakaan																				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Perpustakaan	%	80			76		75			81			157			196.25		Dinas Perpustakaan	-
1.15		**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase pengunjung yang menjadi anggota**	**%**	**25**			**27**		**23**			**30**			**30**			**120.00**		**Dinas Perpustakaan**	**-**
			Persentase peningkatan jumlah kunjungan	**%**	**6**			**6**		**6**			**6**			**6**			**100.00**		**Dinas Perpustakaan**	**-**
			Persentase sekolah yang memiliki perpustakaan sesuai standar	**%**	**20**			**9**		**10**			**10**			**10**			**50.00**		**Dinas Perpustakaan**	**-**
			Persentase perpustakaan desa yang aktif	**%**	**60**			**7**		**20**			**18**			**18**			**30.00**		**Dinas Perpustakaan**	**-**
			Persentase pemenuhan jenis bahan perpustakaan	**%**	**28**			**7**		**7**			**7**			**7**			**25.00**		**Dinas Perpustakaan**	**-**
1.15.1		Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untutk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah jenis layanan perpustakaan	Jenis	8		619,181,685	6	35,667,500	8		119,980,000	8		104,796,000	8			100.00		Dinas Perpustakaan	-
1.15.2		Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah peserta yang mengikuti lomba pertahun	Orang	25		304,887,000	14	26,630,000	56		78,919,300	93		68,650,900	107			428.00		Dinas Perpustakaan	-
1.15.3		Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Masyarakat	Jumlah Perpustakaan Desa yang baik tiap tahun	Buah	36		690,355,000	8	0	12		6,550,000	31		6,520,000	39			108.33		Dinas Perpustakaan	-
1.15.8		Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Jumlah jenis promosi perpustakaan	Jenis	3		269,711,000	4	0	3		8,390,000	3		8,294,000	7			233.33		Dinas Perpustakaan	-
1.15.9		Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah judul buku yang dipenuhi	Judul	700		1,781,836,750	732	0	700		200,000,000	700		193,125,441	700			100.00		Dinas Perpustakaan	-
1.15.10		Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Sekolah	Jumlah peserta yang lulus bimtek	Orang	25		120,136,200	0	0	25		9,000,000	50		8,974,200	50			200.00		Dinas Perpustakaan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
1.15.11		Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan	Jumlah jenis sarana prasarana pendukung yang dipenuhi	Jenis	5		420,000,000	5	0	1		0	1		0	1			20.00		Dinas Perpustakaan	-
													Rata - rata kinerja (%)		390,360,541	178.43						
													Predikat Kinerja			Sangat tinggi						
		Kearsipan																				
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pengelolaaan Kearsipan		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar	%	41	41		0		32	0		0			0			0.00		Dinas Perpustakaan	Karakter
2.16		**Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah**	**Presentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan arsip inaktif**	**%**	**41**	**41**				**27**	**0**			**data**					**0.00**		**Dinas Perpustakaan**	**Karakter**
2.16.1		Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah jenis sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang terpenuhi	Jenis	5		350,000,000	0	0	3		0	0		0	0			0.00		Dinas Perpustakaan	-
2.16.2		Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip	Jumlah PD yang melakukan pendataan dan penataan arsip	PD	36		0	0	0	32		57,030,000	32		56,955,000	32			88.89		Dinas Perpustakaan	-
			Jumlah PD yang menyerahkan Arsip statis ke LKD	PD	10			0		7			7			7			70.00		Dinas Perpustakaan	-
2.16.3		Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah Khasanah Arsip bersejarah di LKD	PD	100		0	7	0	85		0	7		0	7			7.00		Dinas Perpustakaan	-
													Rata - rata kinerja (%)		56,955,000	52.00						
													Predikat Kinerja			Rendah						
3	Meningkatnya PD yang melaksanakan pemeliharaan arsip dan sarana prasarananya		Persentase PD yang melaksanakan pemeliharaan arsip dan sarana prasarananya	%	100	100					88,8			0			0		0.00		Dinas Perpustakaan	Karakter
3.17		**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan**	**Persentase PD yang melaksanakan pemeliharaan arsip dan sarana prasarananya**	**%**	**100**	**100**		**0**			**88,8**			**data**		**0**			**0.00**		**Dinas Perpustakaan**	**Karakter**
					0	**data**								**data**					**0.00**		**Dinas Perpustakaan**	**Karakter**
3.17.1		Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah PD yang melaksanakan pemeliharaan arsip dan sarana prasarananya	PD	36		0	0	0	27		0	0		0	0			0.00		Dinas Perpustakaan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.17.3		Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah peserta monev	Org	40		35,558,000	0	0	80		4,800,000	40		4,788,000	40			100.00		Dinas Perpustakaan	-
													Rata - rata kinerja (%)	50.00		4,788,000	25.00					
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat Rendah					
4	Meningkatnya jenis layanan informasi arsip yang terpenuhi		Persentase jenis layanan informasi arsip yang terpenuhi	%	100			0		60			0			0			0.00		Dinas Perpustakaan	-
5	Meningkatnya SDM Kearsipan		Persentase Meningkatnya SDM Kearsipan	%	100			0		100			0			0			0.00		Dinas Perpustakaan	-
5.18		**Program peningkatan kualitas pelayanan informasi**	**Persentase Meningkatnya SDM Kearsipan**	**%**	**100**			**300**		**100**			**0**			**300**			**300.00**		**Dinas Perpustakaan**	**-**
5.18.3		Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipn di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Jumlah Peserta	Org	40		41,250,000	40	0	40		0	0		0	40			100.00		Dinas Perpustakaan	-
5.18.4		Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip	Jumlah peserta Bimtek yang lulus dan memperoleh sertifikat	Org	40		128,898,000	50	0	100		16,500,000	50		13,398,750	50			125.00		Dinas Perpustakaan	-
													Rata - rata kinerja (%)	62.50		13,398,750	75.00					
													Predikat Kinerja	Rendah			Sedang					

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan																				
1	Meningkatnya ketertiban dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat		Indeks ketertiban umum	%	80			65		20			15			15			18.75		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
			Indeks ketenteraman masyarakat	%	100	data					25								0.00		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Karakter
1.15		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**Persentase linmas yang aktif menjaga kamtibmas di wilayahnya**	**%**	**100**			**300**		**100**			**25**			**325**			**325.00**		**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**-**
1.15.5		Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah operasi dan patroli sesuai SOP	Kali	540		3,240,000,000	360	0	540		70,000,000	0		57,400,000	360			66.67		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
1.15.7		Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah satlinmas yang terlatih	Orang	350		875,000,000	200	0	700		1,087,533,400	700		1,084,368,025	700			200.00		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		1,141,768,025	83.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Tinggi						
1.16		**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, ketenteraman, ketertiban)**	**%**	**80**			**180**		**70**			**15**			**195**			**243.75**		**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**-**
1.16.6		Operasional Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah operasi dan patroli sesuai SOP	Kali	600		30,000,000,000	360	0	600		3,296,987,500	144		3,181,507,500	144			24.00		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
												Rata - rata kinerja (%)	24.00		3,181,507,500	24.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat Rendah						
2	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat		Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	80			65		20			15			15			18.75		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.18		**Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan**	**Persentase menurunnya pelanggaran terhadap Perda**	**%**	**80**			**180**		**70**			**15**			**195**			**243.75**		**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**-**
2.18.9		Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah dokumen berita acara kesepakatan	Dokumen	12		225,000,000	0	0	12		16,650,000	3		16,650,000	3			25.00		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
2.18.13		Penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah operasi dan patroli sesuai SOP	Kali	300		1,950,000,000	24	0	300		146,600,000	1		105,080,000	1			0.33		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
			Jumlah pemeriksaan sesuai SOP	Berkas	45			60		70			5			5			11.11		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
2.18.14		Penyuluhan pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah	Persentase peserta penyuluhan yang sadar hukum	%	90		750,000,000	0	0	80		20,400,000	0		2,374,800	0			0.00		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
2.18.15		Pendidikan dan pelatihan polisi pamong praja	Jumlah peserta diklat yang terlatih sesuai kompetensi	Orang	150		1,350,000,000	144	0	150		58,200,000	35		44,895,000	35			23.33		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
												Rata - rata kinerja (%)	11.80		168,999,800	11.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat Rendah						
3	Meningkatnya Waktu Tanggap Respon (Time Respon Rate)		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	100			100		100			25			25			25.00		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
3.27		**Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**	**Persentase kebakaran yang ditangani**	**%**	**100**			**100**		**100**			**25**			**25**			**25.00**		**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**-**
3.27.4		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana sesuai standar	Jenis	5		2,300,000,000	1	0	5		121,070,000	0		88,295,600	1			20.00		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
3.27.5		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	%	100		2,250,000,000	100	0	100		398,280,000	25		345,206,576	25			25.00		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
												Rata - rata kinerja (%)	12.50		433,502,176	22.50						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
Predikat Kinerja													Sangat Rendah			Sangat Rendah						
4	Meningkatnya Waktu Tanggap Respon (Time Respon Rate)		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Menit	5			5		5			1			1			180.00		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
4.29		**Program Peningkatan kemampuan petugas**	**Persentase kecelakaan dalam melaksanakan tugas**	**%**	**1**			**0**		**1**			**0**			**0**			**200.00**		**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**-**
4.29.2		Pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran	Jumlah peserta diklat yang terlatih sesuai kompetensi	Orang	150		900,000,000	0	0	150		26,100,000	0		12,500,000	0			0.00		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
Rata - rata kinerja (%)													0.00		12,500,000	0.00						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah			Sangat Rendah						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan																				
1	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat dan politik		Masyarakat yang di bina	Kegiatan	2			1		2			0			1			50.00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
			Angka partisipasi pemilu	%	71			71		71			95			95			133.80		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
2	Menurunkan tingkat konflik sosial di masyarakat		Jumlah Potensi konflik sosial yang dapat di atasi	Kasus/Kejadian	1			0		0			0			0			200.00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
2.19		**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	**Jumlah potensi konflik yg mengganggu kamtibmas**	**kasus**	**1**			**0**		**0**			**0**			**0**			**0.00**		**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**	**-**
2.19.3		Komunitas intelejen daerah (KOMINDA)	Jumlah Rekomendaasi permasalahan konflik yang dibicarakan	Rekomendasi	11		1,259,689,067	1	24,250,000	11		43,150,000	0		0	1			9.09		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
2.19.10		Fasilitasi Tim Terpadu Peanganan Gangguan Keamanan	Jumlah rekomendasi atau langkah-langkah Tim Terpadu yang diberikan	Rekomendasi	300		1,151,085,005	1	700	2		62,850,000	0		15,000,000	1			0.33		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
												Rata - rata kinerja (%)	0.00		15,000,000	29.50						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat Rendah						
2.20		**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	**Jumlah kasus narkoba yang terjadi di ASN, Esikutif dan Legeslatif di lingkungan Pemerintah Kab HST**	**kasus**	**0**	**kasus**		**0**			**0 kasus**		**0**	**data**		**0**	**0**		**0.00**		**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Karakter**
2.20.1		Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	jumlah peserta penyuluhan penyalahgunaan narkoba	org	0		1,157,341,500	0	0	150		151,800,000	0		355	0			0.00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
												Rata - rata kinerja (%)	nan		355	nan						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat Rendah						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.21		**Program Pendidikan Politik Masyarakat**	**Persentase Partisipasi peserta pemilu**	**%**	**75**	**%**					**71%**			**data**							**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Karakter**
2.21.4		Penyusunan data base partai politik	Laporan Partai Politik	parpol	12		104,235,820	10	0	10		0	0		0	10			83.33		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
2.21.5		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah moniv 12 kali	kali	12		953,086,227	12	0	12		0	2		0	2			16.67		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
2.21.6		Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	jumlah parpol yg difasilitasi untuk mendapatkan bantuan keuangan	Parpol	12		279,613,706	10	0	10		15,750,000	10		7,520,000	10			83.33		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
2.21.9		Gladi Posko Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu)	Jumlah peserta pelatihan gladi posko yang terlatih	org	0		275,000,000	0	0	450		0	0		0	0			0.00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
2.21.14		Fasilitasi Penyelenggaran Pemilu Legeslatif dan Pelpres	Jumlah peserta sosialisasi pemilu	org	0		350,000,000	0	0	0		76,000,000	1		23,550,000	1			100.00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
2.21.15		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu KADA	Jumlah Peserta Yang Memahami Pendidikan Politik	org	0		554,924,400	0	0	1000		0	0		0	0			0.00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
2.21.16		Latihan Dasar Kepimpinan siswa	Jumlah Peserta Yang Memahami Pendidikan Politik	org	150		633,346,648	300	46,113,000	150		66,580,000	160		50,778,667	460			306.67		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
													Rata - rata kinerja (%)	34.17		81,848,667	87.00					
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Tinggi						
3	Meningkatnya partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program pemerintah		Fasilitasi ormas yang aktif	Kegaiatan	2			1		2			0			1			50.00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
3.17		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Jumlah organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program pemerintah**	**ormas**	**8**			**37**		**8**			**0**			**37**			**462.50**		**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**	**-**
3.17.6		Seminar, talk shwo diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	jumlah kegiatan	Kegiatan	1		156,974,086	0	0	2		0	0		0	0			0.00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.17.6		Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Yang Memahami Pendidikan wawasan Kebangsaan	org	250		452,744,279	100	0	250		0	0		0	100			40.00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
3.17.7		Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasn kebangsaan	Jumlah Peserta Yang Memahami Pendidikan Wawasan Kebangsaan	kegiatan	2		270,046,350	0	0	2		0	0		0	0			0.00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
3.17.7		Monitoring dan evaluasi hasil penerbitan rekomendasi penelitian	Jumlah Rekomindasi Izin Penelitian	kali	11		115,850,000	0	0	11		0	57		0	57			518.18		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
3.17.8		Peningkatan peran serta ulama dalam peran peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Peserta Yang Memahami Peningkatan wawasan kebangsaan	pertemuan/koordinasi	6		879,134,400	0	0	6		0	0		0	0			0.00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
3.17.9		Fasilitasi Verifikasi dan Pendataan Ormas / LSM	Persentase Ormas dan LSM yang terdaftar	%	10		375,306,000	134	0	50		4,300,000	2		4,300,000	2			20.00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
Rata - rata kinerja (%)													89.67		4,300,000	93.67						
Predikat Kinerja													Tinggi			Sangat tinggi						
3.26		**Program Koordinasi Pembinaan Lembaga Sosial dan Keagamaan**	**Persentase lembaga sosial dan keagamaan yang aktif**	**%**	**60**			**0**		**60**			**0**			**0**			**0.00**		**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**	**-**
3.26.3		Peningkatan Pembinaan kepada Ormas	Jumlah Partisipasi Lembaga Sosial dan Keagamaan yang aktif dalam mendukung program-program pemerintah	ormas	25		115,850,000	0	0	8		0	0		0	0			0.00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
Rata - rata kinerja (%)													0.00		0	0.00						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah			Sangat Rendah						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)																				
1	Rata-rata Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat		Rasio Rata-rata Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	-	80			75		80			75			75			93.75		Kecamatan Barabai	-
1.15		**Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat**	**Prosentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintahan kecamatan**	**%**	**90**			**B**		**B**			**80**			**80**			**88.89**		**Kecamatan Barabai**	**-**
1.15.1		Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	--	16025		891,582,254	14525	0	15049		19,000,000	17365		13,620,000	17365			108.36		Kecamatan Barabai	-
			Jumlah Kelurahan /desa yang dilakukan Pembinaan	kelurahan /desa	18 Desa/Kelurahan			18		18 Desa/Kelurahan			18			18			100.00		Kecamatan Barabai	-
			JUmlah Objek Yang Membayar PBB	--	8086			6840		7934			0			6840			84.59		Kecamatan Barabai	-
			Jumlah Ketersediaan Konsumsi Pertemuan Forum Koordinasi Kecamatan dan Lintas Sektor di Kecamatan	Kotak	12 kali			480		160			250			730			6,083.33		Kecamatan Barabai	-
1.15.2		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Prosentase Pelayanan Pembuatan Dokumen yg sesuai Standar	%	80%		320,010,000		60	80		3,040,000	82		2,565,000	82			102.50		Kecamatan Barabai	-
			Jumlah Ketersedian Konsumsi Rapat Penyelesaian Masalah Pelayanan Dokumen sesuai Standar	Kotak				100		100			100			100			10,000.00		Kecamatan Barabai	-
1.15.8		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (bencana, pekat, konflik sosial)	Jumlah dokumen Pelayanan Perizinan /Rekomendasi Bidang Trantib yg terlayani sesuai Standar	--	0		65,000,000	120	0	60		16,310,000	92		11,785,000	212			21,200.00		Kecamatan Barabai	-
			Jumlah pembinaan ttg Bidang Trantib	Jumlah	0			12		4			4			16			1,600.00		Kecamatan Barabai	-
			Jumlah koordinasi ganguan keamanan dan Ketertiban yg di tangani	Jumlah Koordinasi	0			12		4			4			16			1,600.00		Kecamatan Barabai	-
			Jumlah koordinasi Kejadian Bencana dan Konflik Sosial yg dapat di tangani	--	0			4		4			8			8			800.00		Kecamatan Barabai	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Jumlah data trantib Desa/kelurahan wilayah Kecamatan	--	0			54		18			22			76			7,600.00		Kecamatan Barabai	-
												Rata - rata kinerja (%)	478.60		27,970,000	546.80						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
2	Jumlah Desa/Kelurahan dengan Tertib Administrasi		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	--	18			17		18			16			16			88.89		Kecamatan Barabai	-
2.17		**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa**	**Rasio Realisasi Keuangan Desa pada APBDesa 80%**	**%**	**80**			**10**		**80**			**70%**			**70%**			**87.50**		**Kecamatan Barabai**	**-**
2.17.2		Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Desa yg dapat mengelola Keuangan Desa dengan Tertib Administrasi	Desa	12 Desa		397,720,000	12	0	12 Desa		5,630,000	12		5,580,000	12			100.00		Kecamatan Barabai	-
2.17.3		Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes	Jumlah evaluasi RAPBDesa	desa	12 Desa		276,325,000	12	0	12 Desa		9,450,000	12		9,345,000	12			100.00		Kecamatan Barabai	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		14,925,000	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
2.18		**Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa/kel. Tertib administrasi**	**Jumlah desa**	**18**			**18**		**18**			**17**			**17**			**94.44**		**Kecamatan Barabai**	**-**
2.18.4		Pembinaan penyelenggaraan Administrasi Desa	Jumlah kelurahan/desa yg dapat melaksanakan Pengelolaan Administrasi Berdasarkan Tupoksi	--	0		0	12	0	18		9,000,000	17		9,000,000	17			1,700.00		Kecamatan Barabai	-
2.18.6		Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan	Jumlah pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan di Kelurahan	--	0		0	6	0	6		0	6		0	6			600.00		Kecamatan Barabai	-
2.18.7		Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Barabai Darat	Jumlah Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	.	1 kelurahan		1,596,388,506	1	0	1		1,126,605,700	1		1,021,807,968	1			100.00		Kecamatan Barabai	-
2.18.8		Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Barabai Barat	Jumlah pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan di Kelurahan	-	1 Kelurahan		2,567,849,012	1	0	1 Kelurahan		1,054,340,700	1		838,770,643	1			100.00		Kecamatan Barabai	-
2.18.9		Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Barabai Utara	Jumlah pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan di Kelurahan	0	1 kelurahan		3,005,447,012	1	0	1 kelurahan		1,148,359,400	1		735,159,120	1			100.00		Kecamatan Barabai	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.18.10		Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Barabai Timur	Jumlah pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan di Kelurahan	0	1 Kelurahan		1,518,934,506	1	0	1 Kelurahan		1,137,856,700	1		816,597,493	1			100.00		Kecamatan Barabai	-
2.18.11		Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Barabai Selatan	Jumlah pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan di Kelurahan	0	1 Kelurahan		1,442,473,506	1	0	1 Kelurahan		1,109,153,300	1		953,143,167	1			100.00		Kecamatan Barabai	-
2.18.12		Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Bukat	Jumlah pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan di Kelurahan	0	1 Kelurahan		1,283,924,506	1	0	1 Kelurahan		1,076,545,700	1		731,938,481	1			100.00		Kecamatan Barabai	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		5,106,416,872	132.33						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
3	Jumlah desa yg dilakukan evaluasi Kinerja Perkembangan Pembangunan Desa		Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Pemerintahan Desa/kelurahan	--	60			18		18			18			18			30.00		Kecamatan Barabai	-
3.16		**Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Jumlah Desa yang dilakukan Evaluasi Kinerja Perkembangan Pembangunan Desa**	**Desa/kel**	**12**			**12**		**12 Desa**			**12**			**12**			**100.00**		**Kecamatan Barabai**	**-**
3.16.1		Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah Desa/kel. Yg berkembang statusnya dan pelaksanaan Pembangunannya	Desa/kel	6		166,325,000	8	0	4		9,870,000	10		4,935,000	10			166.67		Kecamatan Barabai	-
			Jumlah Desa yang memiliki BUMDes dan Melakasanakan Pemangunan Program Kementrian/lembaga	Desa	0			0		2			2			2			200.00		Kecamatan Barabai	-
3.16.2		Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah orgnisasi PKK yg Aktif	Kelompok	19		356,800,000	19	0	19		33,540,000	19		32,380,500	19			100.00		Kecamatan Barabai	-
3.16.3		Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perizinan dan Perizinan yg sesuai Standar	--	0		100,675,000	245	0	30		12,017,500	128		12,017,500	128			12,800.00		Kecamatan Barabai	-
			Jumlah Usulan Pembangunan yg dapat di Akomodir	usulan	362 usulan					402			290			290			80.11		Kecamatan Barabai	-
			Jumlah (Masyarakat /Perangkat dan Desa) Peserta Sosialisasi yg Mengikuti	peserta	0			60		60			60			60			6,000.00		Kecamatan Barabai	-
			Jumlah masyarakat membayar PBB/IMB	Jumlah	0					0			0						0.00		Kecamatan Barabai	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.16.5		Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen Pelayanan yg Sesuai Standar bidang Kesejahteraan Sosial	--	0		440,000,000	106	0	75		96,060,000	72		80,522,600	178			17,800.00		Kecamatan Barabai	-
			Jumlah Bantuan yg tersalurkan Tepat Sasaran	--	100%			10116		15000			204			10320			10,320.00		Kecamatan Barabai	-
			Jumlah pembinaan kelompok /Lembaga Pemuda, Olahraga dan Agama	Jumlah	100%			12		12			8			8			8.00		Kecamatan Barabai	-
			Jumlah data bidang Sosial yg dapat di Validasi	Jumlah	0			25		90			72			72			7,200.00		Kecamatan Barabai	-
Rata - rata kinerja (%)													111.60		129,855,600	299.80						
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)																				
1	Index kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85	B		80		85	85		0	B		0	B		0.00		Kecamatan Pandawan	Karakter
1.15		**Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan**	**%**	**85**	**B**		**80**		**85**	**85**		**0**	**B**		**0**	**B**		**0.00**		**Kecamatan Pandawan**	**Karakter**
1.15.1		Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Peserta (Masyarakat/ Perangkat dan Lembaga Desa) yg mengikuti Sosialisasi Bidang Pemerintahan	Orang	1000		397,750,540	700	39,690,000	1000 orang		75,620,000	1500		74,960,000	1500			150.00		Kecamatan Pandawan	-
			Jumlah Permasalahan Pemerintahan umum yang diselesaikan	masalah		25		5		11	11		11	11		11	11		1,100.00		Kecamatan Pandawan	Karakter
			Jumlah penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Kegiatan		1		1		1	1		1	1		1	1		100.00		Kecamatan Pandawan	Karakter
1.15.2		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen pelayanan yang sesuai standar	dokumen	850		261,430,500	2600	18,000,000	1500 Dokumen		99,910,000	1500		18,000,000	4100			482.35		Kecamatan Pandawan	-
			Jumlah ruang PATEN yang representatif	unit		1		0		1	1		0	0		0	0		0.00		Kecamatan Pandawan	Karakter
1.15.4		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah Koordinasi, Pembinaan, dan Penanganan Bidang Trantib.	kali	28		419,602,538	41	25,600,000	41 kali		54,245,000	26		54,245,000	26			92.86		Kecamatan Pandawan	-
			Jumlah peserta Sosialisasi Bidang Trantib	Orang		758		635		635	635		635	635		635	635		63,500.00		Kecamatan Pandawan	Karakter
Rata - rata kinerja (%)													215.00		147,205,000	262.00						
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2	Jumlah Desa dengan tertib administrasi		Jumlah desa dengan tertib administrasi	desa	21			21		21			20			20			95.24		Kecamatan Pandawan	-
2.17		**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa**	**Persentase Desa/Kelurahan tertib administrasi Keuangan**	**%**	**100**			**100**		**100**			**95**			**95**			**95.00**		**Kecamatan Pandawan**	**-**
2.17.2		Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Desa dapat mengelola Administrasi Keu dengan tertib	Desa	21		127,658,200	21	0	21		22,300,000	21		22,300,000	21			100.00		Kecamatan Pandawan	-
2.17.3		Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes	Jumlah desa yg di evaluasi RAPBDes	Desa	21		59,948,700	21	10,620,000	21		14,850,000	21		14,850,000	21			100.00		Kecamatan Pandawan	-
2.17.4		Pembinaan dan Pemantauan Pengeleloaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang dibina dan dipantau pengelolaan keu. Desa	Desa	21		152,756,500	21	0	21		5,400,000	21		5,400,000	21			100.00		Kecamatan Pandawan	-
													Rata - rata kinerja (%)		42,550,000	100.00						
													Predikat Kinerja			Sangat tinggi						
2.18		**Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang tertib administrasi Pemerintahan Desa**	**%**	**100**			**60**		**100**			**85**			**85**			**85.00**		**Kecamatan Pandawan**	**-**
2.18.3		Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa	Jumlah Desa yang dapat melaksanakan Pengelolaan Administrasi Berdasarkan Tupoksi	desa	21		88,164,700	21	10,770,000	21		7,250,000	20		7,250,000	20			95.24		Kecamatan Pandawan	-
													Rata - rata kinerja (%)	95.00		7,250,000	95.00					
													Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi					
3	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pemerintahan desa		Jumlah Desa yang dibina dan dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunan Desa.	Desa	21			21		21			19			19			90.48		Kecamatan Pandawan	-
3.16		**Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Prosentase Desa hasil evaluasi minimal kategori berkembang**	**%**	**100**			**100**		**100**			**80**			**80**			**80.00**		**Kecamatan Pandawan**	**-**
3.16.1		Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah desa yang dinilai perkembangannya	desa	21		123,452,800	21	0	21		11,605,000	19		9,205,000	19			90.48		Kecamatan Pandawan	-
3.16.2		Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah orgnisasi PKK yang aktif	organisasi	22		135,256,200	22	15,200,000	22		24,820,000	22		24,820,000	22			100.00		Kecamatan Pandawan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.16.3		Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah usulan pembangunan yg dapat di akomodir	usulan	21		137,718,770	63	9,730,000	29		23,540,000	29		23,379,000	92			438.10		Kecamatan Pandawan	-
			Jumlah Peserta (Masyarakat/ Perangkat dan Lembaga Desa) yang mengikuti Sosialisasi Bidang Ekobang	Orang		720		102		300	300		300	300		300	300		30,000.00		Kecamatan Pandawan	Karakter
3.16.5		Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah jenis kegiatan/event yang difasilitasi (keagamaan, olahraga, dan kepemudaan)	jenis keg	3		960,318,200	3	24,970,000	6		85,990,000	5		85,090,000	5			166.67		Kecamatan Pandawan	-
			Jumlah koordinasi Pembinaan kesejahteraan rakyat	kali		6		8		6	6		6	6		6	6		600.00		Kecamatan Pandawan	Karakter
Rata - rata kinerja (%)													158.75		142,494,000	197.50							
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi							

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)																				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat		Index Kepuasan Masyarakat	%	90			70		70%			30			30			33.33		Kecamatan Limpasu	-
1.15		**Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan**	**indeks**	**60**			**C**		**C**			**C**			**C**			**0.00**		**Kecamatan Limpasu**	**-**
1.15.1		Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Permasalahan Pemerintahan umum Yang diselesaikan	persen	4		37,200,000	70	0	70		37,200,000	25		23,415,000	25			625.00		Kecamatan Limpasu	-
			Jumlah data pertanahan dan kependudukan yang tersedia	data				0		0			0			0			0.00		Kecamatan Limpasu	-
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (Masyarakat)	Orang				0		0			0			0			0.00		Kecamatan Limpasu	-
1.15.2		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Dokumen pelayanan yang sesuai standar	jenis	17		15,000,000	17	0	17		22,159,000	17		20,442,600	17			100.00		Kecamatan Limpasu	-
1.15.4		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah Koordinasi gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	persen	3		8,300,000	60	0	60		8,300,000	60		7,720,000	60			2,000.00		Kecamatan Limpasu	-
			Jumlah dokumen pelayanan perizinan/ rekomendasi tramtib yang terlayani sesuai standart	persen				100		100			100			100			10,000.00		Kecamatan Limpasu	-
			Jumlah pembinaan tentang bidang tramtib	kegiatan				9		3			6			15			1,500.00		Kecamatan Limpasu	-
			Jumlah koordinasi kejadian bencana dan konflik sosial yang dapat ditangani	persen				60		60			60			60			6,000.00		Kecamatan Limpasu	-
			Jumlah data tramtib desa di wilayah kecamatan	data				9					5			5			500.00		Kecamatan Limpasu	-
												Rata - rata kinerja (%)	908.33		51,577,600	311.67						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Jumlah Desa YAng Tertib Administrasi	desa	9			9		9			9			9			100.00		Kecamatan Limpasu	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.17		**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa**	**Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik,sedang,kurang)**	**persen**	**80**			**100**		**80**			**100**			**100**			**125.00**		**Kecamatan Limpasu**	**-**
2.17.1		Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah dokumen pelayanan yang sesuai standar	dokumen	9		9,800,000	5	0	5		9,800,000	5		9,800,000	5			55.56		Kecamatan Limpasu	-
2.17.2		Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Desa yang dapat mengelola keuangan desa dengan tertib administrasi	Desa	9		9,650,000	9	0	9		9,650,000	9		9,650,000	9			100.00		Kecamatan Limpasu	-
													Rata - rata kinerja (%)	77.50		19,450,000	100.00					
													Predikat Kinerja	Tinggi			Sangat tinggi					
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Pemerintahan Desa		Desa yang dilakukan Evaluasi Kinerja Perkembangan pembangunan Desa	Desa	9			9		9			9			9			100.00		Kecamatan Limpasu	-
3.16		**Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Persentase Desa dengan hasil evaluasi minimum dengan nilai 301**	**persen**	**100**			**100**		**100**			**80**			**80**			**80.00**		**Kecamatan Limpasu**	**-**
3.16.1		Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah Desa yang berkembang statusnya dan pelaksanaan pembangunannya	Desa	9		79,625,000	9	0	9		0	9		0	9			100.00		Kecamatan Limpasu	-
3.16.2		Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi PKK yang aktif	organisasi	10		197,070,000	10	0	10		21,500,000	10		16,500,000	10			100.00		Kecamatan Limpasu	-
3.16.3		Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	jumlah usulan pembangunan yang dapat di akomodir	persen	9		64,480,000	0	0	60		10,050,000	0		8,375,000	0			0.00		Kecamatan Limpasu	-
			Jumlah (masyarakat) peserta sosialiasi yang mengikuti	Org				150		150			150			150			15,000.00		Kecamatan Limpasu	-
3.16.5		Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	jumlah pembinaan kelompok /lembaga pemuda ,olahraga dan agama	kelompok	9		366,040,000	3	0	3		78,650,000	3		73,550,000	3			33.33		Kecamatan Limpasu	-
													Rata - rata kinerja (%)	58.25		98,425,000	100.00					
													Predikat Kinerja	Rendah			Sangat tinggi					

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)																				
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	85	85		85		85	B		85	85		85	85		100.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	Karakter
1.15		**Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan**	**indeks**	**85**	**85**		**0**		**85**	**B**		**0**	**data**		**0**	**85**		**200.00**		**Kecamatan Batang Alai Selatan**	**Karakter**
1.15.1		Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahan umum yang diselesaikan	Desa/Kelurahan	19		677,666,100	57	0	19		66,980,000	19		63,976,159	76			400.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	-
			Jumlah data pertanahan dan kependudukan yang terdata	Desa/Kelurahan		228		623		228			228	228		851	228		85,100.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	Karakter
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (Masyarakat/Perangkat/Lembaga)	Orang		200		400		200			192	200		592	200		59,200.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	Karakter
			Indeks Kepuasan Masyrakat terhadap pelayanan Pememerintahan Umum	Kegiatan		85		255		85			85	85		340	85		34,000.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	Karakter
1.15.2		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen Pelayanan yg sesuai standar	Desa/Kelurahan	19		427,357,000	5204	0	1800		49,950,000	1800		49,061,667	7004			36,863.16		Kecamatan Batang Alai Selatan	-
1.15.4		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah dokumen Pelayanan Perizinan /Rekomendasi Bidang Trantib yg terlayani sesuai Standar.	Desa/Kelurahan	19		192,310,650	137	0	50		16,720,000	50		16,585,000	187			984.21		Kecamatan Batang Alai Selatan	-
			Jumlah pembinaan tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat	Desa/Kelurahan		4		12		4			4	4		16	4		1,600.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	Karakter
			Jumlah koordinasi gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Desa/Kelurahan		4		12		4			4	4		16	4		1,600.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	Karakter
			Jumlah koordinasi Kejadian Bencana dan Konflik sosial yg dpt di tangani	Desa/Kelurahan		4		12		4			4	4		16	4		1,600.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	Karakter

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Jumlah data trantib desa/kel. wilayah kecamatan	Desa/Kelurahan		19		57		19			19	19		76	19		7,600.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	Karakter
			Indeks Kepuasan Masyrakat terhadap pelayanan Trantib	Kegiatan		85		255		85			0	85		255	85		25,500.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	3,510.67		129,622,826	1,377.33						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa/Kelurahan dengan tertib administrasi	Desa/Kelurahan	19			19		19			19			19			100.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	-
2.17		**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa**	**Persentasi desa/kelurahan dengan administrasi yang tertib (Baik, Sedang, Kurang)**	**Desa**	**18**			**54**		**18**			**29**			**83**			**461.11**		**Kecamatan Batang Alai Selatan**	**-**
2.17.1		Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah evaluasi RAPB Desa Yang dilaksanakan	Desa	18		175,808,750	18	0	18		11,720,000	36		11,269,125	36			200.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	-
2.17.2		Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Desa Yang Dapat Mengelola Keuangan Desa Dengan Tertib Administrasi	Desa	18		363,577,020	18	0	18		13,620,000	18		13,486,500	18			100.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	-
												Rata - rata kinerja (%)	150.00		24,755,625	150.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
2.18		**Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Persentasi desa/kelurahan dengan administrasi yang tertib (Baik, Sedang, Kurang)**	**Desa/Kelurahan**	**19**			**19**		**19**			**19**			**19**			**100.00**		**Kecamatan Batang Alai Selatan**	**-**
2.18.3		Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa	Jumlah desa/kelurahan yang dapat melaksanakan pengeloaan administasi berdasarkan tupoksi	Desa	18		137,486,852	19	0	19		4,500,000	19		4,488,750	19			105.56		Kecamatan Batang Alai Selatan	-
2.18.6		Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang dapat melaksanakan pengeloaan administasi berdasarkan tupoksi.	Bulan	12		2,760,292,393	36	0	12		1,020,751,700	12		810,486,661	48			400.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	-
												Rata - rata kinerja (%)	102.50		814,975,411	250.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Pemerintahan Desa/Kelurahan		Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunan Desa.	Desa/Kelurahan	1			1		19			1			1			100.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.16		**Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Persentasi Desa/Kelurahan dengan hasil evaluasi minimum dengan nilai 301**	**Desa/Kelurahan**	**19**			**57**		**19**			**19**			**76**			**400.00**		**Kecamatan Batang Alai Selatan**	-
3.16.1		Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah Desa/kel. yg berkembang statusnya dan Pelaksanaan Pembangunannya	Desa/Kelurahan	19		135,438,012	54	0	18		7,855,000	18		7,208,250	72			378.95		Kecamatan Batang Alai Selatan	-
3.16.2		Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah orgnisasi PKK yg aktif.	Desa/Kelurahan	19		421,746,413	57	0	19		18,690,000	12		18,412,500	69			363.16		Kecamatan Batang Alai Selatan	-
3.16.3		Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen pelayan non perizinan dan perizinan yang sesuai Standar	Desa/Kelurahan	19		114,928,508	217	0	30		21,840,000	30		21,559,400	247			1,300.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	-
			Jumlah Usulan Pembangunan hasil musrenbang yg dapat di akomodir	Desa/Kelurahan		115		177		116			3	116		180	116		18,000.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	Karakter
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (Masyarakat/Perangkat/Lembaga)	Orang		570		1213		570			570	570		1783	570		178,300.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	Karakter
			Jumlah masyarakat membayar PBB/IMB	Desa/Kelurahan		9132		11475		9132			2622	9132		14097	9132		1,409,700.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	Karakter
			Jumlah Desa yang memiliki BUMDes dan melaksanakan pembangunan program Kementrian/Lembaga	Desa/Kelurahan		18		54		18			16	18		70	16		7,000.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	Karakter
			Indeks Kepuasan Masyrakat terhadap pelayanan Ekonomi dan Pembangunan	Kegiatan		85		255		85			85	85		340	85		34,000.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	Karakter
3.16.5		Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen Pelayanan yg sesuai standar	Desa/Kelurahan	19		611,425,765	346	0	100		88,140,000	100		76,801,300	446			2,347.37		Kecamatan Batang Alai Selatan	-
			Jumlah Bantuan Sosial yang tersalurakan Tepat Sasaran	Desa/Kelurahan		21600		67440		21600			30228	21600		97668	21600		9,766,800.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	Karakter
			Jumlah pembinaan Kelompok/lembaga pemuda, olahraga dan agama	Desa/Kelurahan		12		23		12			12	12		35	12		3,500.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	Karakter
			Jumlah data bidang sosial yg dapat di validasi.	Desa/Kelurahan		1800		0		1800			1800	1800		1800	1800		180,000.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	Karakter

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Indeks Kepuasan Masyrakat terhadap pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan		85		255		85			85	85		340	85		34,000.00		Kecamatan Batang Alai Selatan	Karakter
Rata - rata kinerja (%)													399.25		123,981,450	1,171.00							
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi							

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)																				
1	Rata-rata pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	65			0		B			C			C			0.00		Kecamatan Batang Alai Utara	-
1.15		**Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan**	**indeks**	**65**			**70**		**B**			**C**			**C**			**0.00**		**Kecamatan Batang Alai Utara**	**-**
1.15.1		Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Permasalahan Pemerintahan umum yang diselesaikan	masalah	6		150,000,000	4	0	4		30,690,000	4		28,533,550	4			133.33		Kecamatan Batang Alai Utara	-
			Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional	Kali		1													0.00		Kecamatan Batang Alai Utara	Karakter
1.15.2		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Dokumen Pelayanan yang sesuai standar	Dokumen	800		36,000,000	650	0	700		3,550,000	1391		2,561,850	1391			173.88		Kecamatan Batang Alai Utara	-
1.15.4		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah Koordinasi, Pembinaan, dan Penanganan Bidang Trantib.	kali	8		67,000,000	4	0	4		12,820,000	4		12,729,550	4			50.00		Kecamatan Batang Alai Utara	-
												Rata - rata kinerja (%)	96.33		43,824,950	132.67						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Jumlah Desa/Kelurahan dengan tertib administrasi	Desa	14					7			11			11			78.57		Kecamatan Batang Alai Utara	-
2.17		**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa**	**Persentase Desa/Kelurahan tertib administrasi Keuangan**	**Persentase**	**100**			**50**		**70**			**57**			**57**			**57.00**		**Kecamatan Batang Alai Utara**	**-**
2.17.2		Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Desa yang dapat mengelola administrasi keuangan dengan tertib.	desa	14		43,000,000	7	0	10		5,750,000	14		4,077,000	14			100.00		Kecamatan Batang Alai Utara	-
2.17.3		Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes	Jumlah Desa yang di Evaluasi RAPB Desa	Desa	14		43,000,000	14	0	14		5,900,000	14		6,540,000	14			100.00		Kecamatan Batang Alai Utara	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		10,617,000	120.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.18		**Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa/kelurahan dengan tertib administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan**	**Persentase**	**100**			**50**		**70**			**65**			**65**			**65.00**		**Kecamatan Batang Alai Utara**	**-**
2.18.4		Pembinaan penyelenggaraan Administrasi Desa	Jumlah Kelurahan /Desa yang dapat melaksanakan Pengelolaan Administrasi berdasarkan tupoksi	Desa	14		46,000,000	7	0	10		5,600,000	12		5,094,300	12			85.71		Kecamatan Batang Alai Utara	-
													Rata - rata kinerja (%)			85.00		5,094,300	120.00			
													Predikat Kinerja			Tinggi			Sangat tinggi			
3	Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembangunan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		Jumlah Desa / Kelurahan yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunan desa	desa	14			14		14			18			18			128.57		Kecamatan Batang Alai Utara	-
3.16		**Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Persentase Desa/Kelurahan hasil evaluasi minimal Kategori Berkembang/cepat berkembang.**	**Persentase**	**100**			**80**		**100**			**100**			**100**			**100.00**		**Kecamatan Batang Alai Utara**	**-**
3.16.1		Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang di nilai Perkembangannya	Desa	14		37,500,000	10	0	14		10,120,000	12		9,880,000	12			85.71		Kecamatan Batang Alai Utara	-
3.16.2		Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi PKK yang aktif	Organisasi	15		37,500,000	15	0	15		9,050,000	15		8,835,000	15			100.00		Kecamatan Batang Alai Utara	-
3.16.3		Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah Usulan pembangunan yang dapat diakomodir	Usulan	265		48,000,000	200	0	215		13,220,000	215		13,039,000	215			81.13		Kecamatan Batang Alai Utara	-
3.16.5		Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi dan Penyelenggaraan Bidang kesra	kali	140		251,000,000	3	0	3		62,960,000	4		49,619,000	4			2.86		Kecamatan Batang Alai Utara	-
													Rata - rata kinerja (%)			67.00		81,373,000	104.50			
													Predikat Kinerja			Sedang			Sangat tinggi			

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)																				
1	Optimalnya pelaksanaan tugas Camat		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100			130		80			80			210			210.00		Kecamatan Batang Alai Timur	-
1.15		**Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan**	**indeks**	**90**	**B**		**195**		**75**	**C**		**75**	**C**		**270**	**C**		**-100.00**		**Kecamatan Batang Alai Timur**	**Karakter**
1.15.1		Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah permasalahan yang diselesaikan, data pertanahan dan kependudukan yang terdata dan (Masyarakat/Perangkat dan Lembaga Desa) Peserta Sosialisasi yg mengikuti.	kegiatan	85		303,751,000	75	19,905,650	65		23,880,000	65		22,579,700	140			164.71		Kecamatan Batang Alai Timur	-
1.15.2		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen Pelayanan yang sesuai standar	Dokumen	100		624,897,000	4	18,000,000	4		20,150,000	4		19,386,000	8			8.00		Kecamatan Batang Alai Timur	-
1.15.8		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (bencana, pekat, konflik sosial)	Jumlah pembinaan ttg bidang Trantib	kali	6		419,560,000	4	0	2		4,800,000	2		4,788,000	6			100.00		Kecamatan Batang Alai Timur	-
			Jumlah dokumen Pelayanan Perizinan /Rekomendasi Bidang Trantib yg terlayani sesuai Standa	kali		8		4		1	1		1	1		5	5		500.00		Kecamatan Batang Alai Timur	Karakter
			Jumlah koordinasi gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	kali		4		2		1	1		1	1		3	3		300.00		Kecamatan Batang Alai Timur	Karakter
			Jumlah koordinasi Kejadian Bencana dan Konflik sosial yg dpt di tangani	kali		4		2		1	1		1	1		3	3		300.00		Kecamatan Batang Alai Timur	Karakter
			Jumlah data trantib desa/kel. wilayah kecamatan	kali		4		2		1	1		1	1		3	3		300.00		Kecamatan Batang Alai Timur	Karakter
Rata - rata kinerja (%)													66.67		46,753,700	705.00						
Predikat Kinerja													Sedang			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa dengan tertib administrasi	Desa	11					11			11			11			100.00		Kecamatan Batang Alai Timur	-
2.16		**Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Persentase Desa yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunan Desa**	**%**	**100**			**150**		**80**			**80**			**230**			**230.00**		**Kecamatan Batang Alai Timur**	**-**
2.16.1		Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah Desa yang berkembang statusnya dan Pelaksanaan Pembangunannya	Desa	11		104,810,000	33	1,212,750	9		8,960,000	9		6,470,000	42			381.82		Kecamatan Batang Alai Timur	-
2.16.2		Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi PKK yang aktif	organisasi	22		326,975,000	22	5,234,250	11		16,440,000	11		15,253,100	33			150.00		Kecamatan Batang Alai Timur	-
2.16.3		Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah usulan dari masyarakat	Item	33		222,209,298	387	0	428		9,758,000	428		6,930,000	428			1,296.97		Kecamatan Batang Alai Timur	-
			Jumlah penerimaan IMB	dokumen	5			5		5			5			5			100.00		Kecamatan Batang Alai Timur	-
			Jumlah masyarakat membayar PBB	OP	1E+07			1E+07		1E+07			1,2E+07			2,3E+07			200.00		Kecamatan Batang Alai Timur	-
2.16.5		Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah organisasi/kelompok keagamaan	kelompok	200		218,475,000	300	23,150,000	49		59,040,000	49		53,104,700	349			174.50		Kecamatan Batang Alai Timur	-
			Jumlah organisasi/kelompok Kepemudaan	Kelompok		55		22		11	11		11	11		33	33		3,300.00		Kecamatan Batang Alai Timur	Karakter
													Rata - rata kinerja (%)	278.50	81,757,800	363.00						
													Predikat Kinerja	Sangat tinggi		Sangat tinggi						
2.17		**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa**	**Persentase Desa dengan tertib administrasi**	**%**	**100**					**80**			**80**			**80**			**80.00**		**Kecamatan Batang Alai Timur**	**-**
2.17.1		Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Persentasi desa/kelurahan dengan hasil evaluasi minimum dengan nilai 301	%	11		540,850,000	80	0	80		5,249,900	80		5,114,700	160			1,454.55		Kecamatan Batang Alai Timur	-
2.17.2		Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Desa yang dapat mengelola Keuangan Desa dengan tertib administrasi	Desa	11		540,850,000	33	714	9		2,761,900	9		2,751,900	42			381.82		Kecamatan Batang Alai Timur	-
													Rata - rata kinerja (%)	404.00	7,866,600	333.00						
													Predikat Kinerja	Sangat tinggi		Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.18		**Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa dengan tertib administrasi**	**%**	**100**			**73**		**73**			**73**			**73**			**73.00**		**Kecamatan Batang Alai Timur**	-
2.18.2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang memiliki BUMDes dan melaksanakan pembangunan program Kementrian/Lembaga	Desa	11		305,040,000	0	0	8		8,249,900	8		7,732,200	8			72.73		Kecamatan Batang Alai Timur	-
			Jumlah Desa yg berkembang statusnya dan Pelaksanaan Pembangunannya	Desa		11		16		8	8		8	8		24	24		2,400.00		Kecamatan Batang Alai Timur	Karakter
Rata - rata kinerja (%)													144.00		7,732,200	400.00						
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)																				
1	Meningkatnya Kepuasan masyarakat		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	nilai kategori	100			0		c			100			100			100.00		Kecamatan Hantakan	-
1.15		**Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan**	**indeks**	**45**			**80**		**B**			**90**			**90**			**200.00**		**Kecamatan Hantakan**	**-**
1.15.1		Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	1. Jumlah keluarga yang memiliki kartu keluarga	%	12		180,840,000	180	0	12		42,900,000	24		36,626,250	204			1,700.00		Kecamatan Hantakan	-
			2.Jumlah desa yang dilakukan pembinaan	desa				12					24			36			3,600.00		Kecamatan Hantakan	-
			3.jumlah Objek pajak yg membayar PBB	%				170					270			440			44,000.00		Kecamatan Hantakan	-
			4.Jumlah kelurahan / desa yang dapat melaksanakan pengelolaan administrasi berdasarkan tupoksi	desa				32					24			56			5,600.00		Kecamatan Hantakan	-
			5.Jumlah desa yang dapat menglola keuangan desa dengan tertib administrasi	desa				36		10			12			48			4,800.00		Kecamatan Hantakan	-
			6.Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pemerintahan umum	orang				90					90			180			18,000.00		Kecamatan Hantakan	-
1.15.2		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Penambahan ruang pelayanan Paten Kec Hantakan	Ruang	17		636,000,000	0	0	1		301,055,000	1		255,023,301	1			5.88		Kecamatan Hantakan	-
1.15.4		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	1.Ketiadaan kejadian gangguan kantrantibmas	N/A	12		313,000,000	1	0	1		21,820,000	1		11,510,000	2			16.67		Kecamatan Hantakan	-
			2.Jumlah kunjungan/patroli pengendalian keamanan lingkungan	desa				14		12			6			20			2,000.00		Kecamatan Hantakan	-
			3.Ketiadaan korban jiwa akibat bencana alam	N/A				0		6			0			0			0.00		Kecamatan Hantakan	-
												Rata - rata kinerja (%)	71.00		303,159,551	882.00						
												Predikat Kinerja	Sedang			Sangat tinggi						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan desa		Jumlah Desa dengan tertib administrasi	desa	12			12		6			12			12			100.00		Kecamatan Hantakan	-
2.17		**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa**	**jumlah desa menyusun APB Desa**	**desa**	**12**			**36**		**12**			**24**			**60**			**500.00**		**Kecamatan Hantakan**	**-**
			Jumlah desa menyelesaikan laporan realisasi semester	**desa**	**12**			**12**		**12**			**12**			**12**			**100.00**		**Kecamatan Hantakan**	**-**
2.17.1		Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah Desa Yang Dapat Mengelola Keu Desa Dengan Tertib Administrasi	desa	100		49,400,000	34	0	12		5,900,000	24		3,237,500	58			58.00		Kecamatan Hantakan	-
2.17.2		Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah desa yg dapat mengelola keuangan desa dengan tertib Administrasi	%	100		49,810,000	12	0	100		7,195,000	24		6,955,000	24			24.00		Kecamatan Hantakan	-
												Rata - rata kinerja (%)	24.00		10,192,500	253.50						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi						
2.18		**Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**jumlah desa mengisi buku administrasi dengan tertib**	**desa**	**12**			**12**		**12**			**24**			**24**			**200.00**		**Kecamatan Hantakan**	**-**
2.18.4		Pembinaan penyelenggaraan Administrasi Desa	Persentase desa/kelurahan dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	desa	100		47,800,000	36	0	12		6,100,000	24		2,000,000	60			60.00		Kecamatan Hantakan	-
												Rata - rata kinerja (%)	24.00		2,000,000	500.00						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi						
3	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pemerintahan desa		Desa yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunan Desa	desa	12			12		5			12			12			100.00		Kecamatan Hantakan	-
3.16		**Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Jumlah Desa yang di evaluasi kinerja perkembangan pembangunan Desa**	**desa**	**12**			**12**		**12**			**24**			**24**			**200.00**		**Kecamatan Hantakan**	**-**
3.16.1		Pemberian stimulan pembangunan desa	1.Persentase desa /Kelurahan dengan Hasil evaluasi minimum dengan nilai 301	desa	12		95,000,000	24	0	12		17,650,000	24		15,080,000	48			400.00		Kecamatan Hantakan	-
3.16.2		Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi PKK yang aktif	organisasi	12		74,940,000	39	0	12		30,000,000	13		28,501,250	52			433.33		Kecamatan Hantakan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.16.3		Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	1.Jumlah dokomen pelayan non perizinan dan perizinan yang sesuai standar	desa	12		83,955,000	18	0	12		18,760,000	0		17,660,000	18			150.00		Kecamatan Hantakan	-
			2.Jumlah usulan pembangunan yang dapat di akomodir	desa				18		12			20			38			3,800.00		Kecamatan Hantakan	-
			3.Jumlah (masyarakat/perangkat dan lembaga desa) peserta sosialisasi yang mengikuti	desa				44		12			322			366			36,600.00		Kecamatan Hantakan	-
			4.Jumlah desa yang memiliki Bumdes dan melaksanakan pembangunan program kementerin / Lembaga	desa				6		12			18			24			2,400.00		Kecamatan Hantakan	-
			5.Jumlah desa yang berkembang statusnya dan pelaksanaan pembangunannya	desa				28		12			12			40			4,000.00		Kecamatan Hantakan	-
			6.Jumlah Masyarakat membayar PBB/IMB	desa				850		800			900			1750			175,000.00		Kecamatan Hantakan	-
			7.Indek kepuasan Masyarakat	B.Indeks				0		12			B			0			0.00		Kecamatan Hantakan	-
3.16.5		Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	1.jumlah dokomen pelayanan yang sesuai standar,	desa	12		378,300,000	36	0	12		52,200,000	12		51,542,500	48			400.00		Kecamatan Hantakan	-
			2.Jumlah bantuan yang tersalurkan tepat sasaran,	desa				36		12			10			46			4,600.00		Kecamatan Hantakan	-
			3. jumlah pembinaan kelompok pemuda, olahraga dan agama	desa				6		12			30			36			3,600.00		Kecamatan Hantakan	-
Rata - rata kinerja (%)													102.00		112,783,750	1,545.75						
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi						

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)																				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dikecamatan	Indeks	95	B		75		85	B		90	B		90	B		94.74		Kecamatan Haruyan	Karakter
1.15		**Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan**	**indeks**	**85**	**B**		**75**		**85**	**B**		**8849**	**data**		**8849**	**B**		**10,410.59**		**Kecamatan Haruyan**	**Karakter**
1.15.1		Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Permasalahan Pemerintahan Umum Yang Diselesaikan	Masalah	6		364,279,000	4	42,924,000	4		60,625,000	4		60,070,100	4			66.67		Kecamatan Haruyan	-
			Jumlah data pertanahan dan kependudukan yang tersedia	Dokumen		4		4		4	4		4	4		4	4		400.00		Kecamatan Haruyan	Karakter
			Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi (Masyarakat /Perangkat dan Lembaga Desa).	Orang		900				120	120		160	120		160	120		16,000.00		Kecamatan Haruyan	Karakter
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pemerintahan Umum	Indek		B		80		85	B		85	85		85	85		8,500.00		Kecamatan Haruyan	Karakter
1.15.2		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Dokumen Pelayanan Yang Sesuai Standar	Dokumen	700		120,000,000	70	0	65		40,950,000	170		33,960,000	240			34.29		Kecamatan Haruyan	-
1.15.4		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah Pembinaan Tentang Bidang Trantib	Kali	4		124,000,000	17	46,590,000	17		18,720,000	17		12,416,000	17			425.00		Kecamatan Haruyan	-
			Jumlah dokumen Pelayanan Perizinan /Rekomendasi Bidang Trantib yg terlayani sesuai Standar	Dokomen		50		10		18	18		24	18		34	34		3,400.00		Kecamatan Haruyan	Karakter
			Jumlah koordinasi gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Kali		24		7		4	4		5	5		12	12		1,200.00		Kecamatan Haruyan	Karakter
			Jumlah koordinasi Kejadian Bencana dan Konflik sosial yg dpt ditangani	Kali		25		4		8	8		5	0		5	5		500.00		Kecamatan Haruyan	Karakter
			Jumlah data trantib desa wilayah kecamatan	Dokumen		17		17		17	17		17	17		17	17		1,700.00		Kecamatan Haruyan	Karakter

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Trantib	%		B		25		75	75		75	80		75	75		7,500.00		Kecamatan Haruyan	Karakter
													Rata - rata kinerja (%)	273.33		106,446,100	550.67					
													Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi					
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa Dengan Tertib Administrasi	Desa	17			17		17			17			17			100.00		Kecamatan Haruyan	-
2.17		**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa**	**Persentase Desa dengan dengan administrasi yang tertib (Baik, Sedang, Kurang)**	**%**	**95**			**50**		**95**			**95**			**95**			**100.00**		**Kecamatan Haruyan**	**-**
2.17.2		Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Desa Yang Dapat Mengelola Keu Desa Dengan Tertib Administrasi	Desa	17		98,890,000	15	8,890,000	17		6,650,000	16		6,068,000	16			94.12		Kecamatan Haruyan	-
2.17.3		Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes	Jumlah Desa yg dapat mengelola Keu Desa dengan tertib administrasi	Desa	17		82,290,000	17	8,890,000	17		15,150,000	16		15,137,000	16			94.12		Kecamatan Haruyan	-
													Rata - rata kinerja (%)	94.00		21,205,000	94.00					
													Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi					
2.18		**Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa dengan dengan administrasi yang tertib (Baik, Sedang, Kurang)**	**%**	**95**			**17**		**17**			**85**			**85**			**89.47**		**Kecamatan Haruyan**	**-**
2.18.4		Pembinaan penyelenggaraan Administrasi Desa	Jumlah Desa Yang Dapat Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Berdasarkan Tupoksi	Desa	17		113,850,000		8,890,000	17		6,650,000	17		6,621,500	17			100.00		Kecamatan Haruyan	-
													Rata - rata kinerja (%)	100.00		6,621,500	100.00					
													Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi					
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa Yang Dilakukan Evaluasi Kinerja Perkembangan Pembangunan Desa	Desa	17			17		17			17			17			100.00		Kecamatan Haruyan	-
3.16		**Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Persentase desa dengan hasil evaluasi minimum dengan nilai 301**	**%**	**17**			**C**		**17**			**16**			**16**			**94.12**		**Kecamatan Haruyan**	**-**
3.16.1		Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah Desa Yang Berkembang Statusnya Dan Pelaksanaan Pembangunannya	Desa	17		72,790,000	3	9,540,000	3		11,160,000	12		11,126,000	12			70.59		Kecamatan Haruyan	-
3.16.2		Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi PKK Yang Aktif	Orang	18		158,040,000		13,040,000	275		25,035,000	275		24,735,000	275			1,527.78		Kecamatan Haruyan	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.16.3		Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah Usulan PembangunanYang Dapat Diakomodir	Kegiatan	136		110,305,000	119	11,030,000	136		11,600,000	57		11,417,500	57			41.91		Kecamatan Haruyan	-
			Jumlah dokumen pelayanan non perizinan dan perizinan yang sesuai Standar	Dokumen		150		15		30	30		135	150		135	135		13,500.00		Kecamatan Haruyan	Karakter
			Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi (Masyarakat /Perangkat dan Lembaga Desa)	Orang		250		60		150	150		210	750		210	180		21,000.00		Kecamatan Haruyan	Karakter
			Jumlah masyarakat membayar PBB/IMB	KK		38070		15906		7614	7614		17763	17762		33669	33613		3,366,900.00		Kecamatan Haruyan	Karakter
			Jumlah desa yang memiliki BUMDes dan melaksanakan pembangunan program kementerian/ Lembaga	Desa		17		3		17	17		12	12		12	12		1,200.00		Kecamatan Haruyan	Karakter
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Ekobang	Indeks		B		70		80	B		85	85		85	85		8,500.00		Kecamatan Haruyan	Karakter
3.16.5		Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pembinaan Kelompok/Lembaga Pemuda,Olahraga dan Agama	Kegiatan	3		366,000,000	2	84,290,000	18		96,805,000	17		85,581,000	17			566.67		Kecamatan Haruyan	-
			Jumlah dokumen Pelayanan yg sesuai standar	Dokumen		80		129		16	16		78	78		207	207		20,700.00		Kecamatan Haruyan	Karakter
			Jumlah Bantuan yg tersalurakan Tepat Sasaran	KK		1340		1311		1340	1340		1340	1340		1340	1340		134,000.00		Kecamatan Haruyan	Karakter
			Jumlah data bidang sosial yg dapat di validasi	Dokumen		42		4		14	14		17	17		17	17		1,700.00		Kecamatan Haruyan	Karakter
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesra	Indeks		B		75		85	B		95	B		95	95		9,500.00		Kecamatan Haruyan	Karakter
Rata - rata kinerja (%)													682.75		132,859,500	867.00							
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi							

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)																				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks kepuasan masyarakat	nilai	85			73,06		IKM 83,50			83,6			83,6			97.65		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
1.15		**Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan**	**Nilai IKM**	**85**			**73,06**		**IKM 83,50**			**83,6**			**83,6**			**97.65**		**Kecamatan Labuan Amas Selatan**	**-**
1.15.-2		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Nilai IKM			85	73,06	1,984,500	83.50		17,300,000	83,6		14,364,375	83,6			8,300.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (masyarakat/perangkat dan lembaga desa)	orang				0		50			50			50			5,000.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
			Jumlah dokumen pelayanan sesuai standar	dokumen				0		500			2301			2301			230,100.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
1.15.1		Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase jumlah permasalahan pemerintahan umum yang diselesaikan	%	100		509,081,000	0	38,778,900	100%		109,125,200	100		103,806,400	100			100.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
			Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan kecamatan	kali				0		6 kali			3			3			300.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
			Jumlah data pertanahan dan kependudukan yang tersedia	dokumen				0		18 dokumen desa/kelurahan			0			0			0.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
1.15.4		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase jumlah koordinasi gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	%	100		442,930,000	0	22,110,000	100%		25,900,000	100		23,325,750	100			100.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
			Jumlah peserta pembinaan tentang ketenteraman dan ketertiban	orang				0		135 orang			135			135			13,500.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
			Persentase jumlah koordinasi kejadian bencana dan konflik sosial yang dapat ditangani	%				0		100%			100			100			10,000.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
													Rata - rata kinerja (%)			100.00		141,496,525	554.50			
													Predikat Kinerja			Sangat tinggi			Sangat tinggi			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan		Jumlah desa/kelurahan dengan tertib administrasi	desa/kelurahan	18			0		5			5			5			27.78		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
2.17		**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa**	**Persentase desa/kelurahan dengan administrasi yang tertib bidang keuangan (kriteria sedang)**	**%**	**134**			**0**		**5 desa/kelurahan**			**5**			**5**			**3.73**		**Kecamatan Labuan Amas Selatan**	**-**
2.17.1		Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah evaluasi RAPB Desa	dokumen	17		124,862,500	34	8,744,775	34 dokumen		23,521,000	34		23,418,000	34			200.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
2.17.2		Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah desa yang dapat mengelola keuangan desa dengan tertib administrasi	desa	17		159,988,000	0	0	5		18,630,000	5		18,363,000	5			29.41		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
													Rata - rata kinerja (%)	114.50		41,781,000	100.00					
													Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi					
2.18		**Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa/kelurahan dengan administrasi yang tertib bidang administrasi tata pemerintahan (kriteria sedang)**	**%**	**100**			**0**		**28%**			**28%**			**28%**			**28.00**		**Kecamatan Labuan Amas Selatan**	**-**
2.18.2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pengelolaan administrasi berdasarkan tupoksi	desa/kelurahan	15		100,127,000	0	8,400,000	5 desa/kelurahan		13,590,000	5		13,270,550	5			33.33		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
2.18.6		Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan	Jumlah pelayanan pemerintahan dan pembangunan di kelurahan	bulan	12		3,453,682,470	12	685,541,025	12 bulan		1,080,920,000	12		918,825,076	12			100.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
													Rata - rata kinerja (%)	66.50		932,095,626	100.00					
													Predikat Kinerja	Sedang			Sangat tinggi					
3	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pemerintahan desa/kelurahan		Jumlah desa/kelurahan yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunannya.	desa/kelurahan	108			18		18			18			18			16.67		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
3.16		**Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Persentase desa/kelurahan dengan hasil evaluasi minimal dengan nilai 301**	**%**	**108**			**18**		**100**			**18**			**18**			**16.67**		**Kecamatan Labuan Amas Selatan**	**-**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.16.1		Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah desa/kelurahan yang berkembang statusnya dan pelaksanaan pembangunannya	desa/kelurahan	18		107,140,000	18	0	18		17,950,000	18		11,088,375	18			100.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
			Jumlah desa yang memiliki BUMDesa dan melaksanakan pembangunan program kementerian/lembaga	desa/kelurahan						7			7			7			700.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
			Jumlah desa/kelurahan yang berkembang statusnya	desa/kelurahan				18		18			18			18			1,800.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
3.16.2		Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi PKK yang aktif	TP-PKK	19		181,119,000	19	10,904,900	19		32,764,000	19		31,637,500	19			100.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
3.16.3		Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah usulan pembangunan yang diakomodir	usulan	360		102,365,000	202	9,897,000	360 usulan		16,110,000	226		15,038,750	226			62.78		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
			Persentase jumlah masyarakat yang membayar PBB	%				40		50%			50%			50%			5,000.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
			Jumlah (masyarakat/perangkat dan lembaga desa) peserta yang mengikuti sosialisasi	orang				0		80 orang			80			80			8,000.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
3.16.5		Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bantuan yang tersalurkan tepat sasaran	%	200		512,842,000	100	22,571,250	100%		118,250,000	100		92,878,500	100			50.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
			Jumlah pembinaan kelompok/lembaga pemuda, olahraga, dan agama	kali						7 kali			7			7			700.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
			Jumlah data bidang sosial yang dapat divalidasi	dokumen				0		2 dokumen			2			2			200.00		Kecamatan Labuan Amas Selatan	-
Rata - rata kinerja (%)													78.00		150,643,125	240.50							
Predikat Kinerja													Tinggi			Sangat tinggi							

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)																				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	85	85		84		83	83		85	85		85	85		100.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	Karakter
1.15		**Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan**	**indeks**	**83**	**B**		**80**		**83**	**B**		**83**	**B**		**83**	**B**		**100.00**		**Kecamatan Labuan Amas Utara**	**Karakter**
1.15.1		Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah permasalahan yang diselesaikan	%	100		509,081,000	85%	0	100		46,760,000	95%		46,061,625	95%			95.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	-
			Jumlah data pertanahan dan kependudukan yang tersedia	dokumen		1 dokumen		1		1	1		1	1 dokumen		1	1 dokumen		100.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	Karakter
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (masyarakat/aparatur desa/lembaga desa)	Orang		100 Orang		40		100	100		75	75 Orang		75	75 Orang		7,500.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	Karakter
1.15.2		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Indeks	180		162,650,000	83	0	85		47,700,000	85		47,696,000	85			47.22		Kecamatan Labuan Amas Utara	-
			Jumlah dokumen pelayanan yang sesuai standart	dokumen		200 dokumen		220		200	200		1820	1820 dokumen		2040	2040 dokumen		204,000.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	Karakter
1.15.8		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (bencana, pekat, konflik sosial)	Jumlah koordinasi gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	%	100		519,070,000	50%	0	80		22,640,000	80%		22,537,650	80%			80.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	-
			Jumlah koordinasi kejadian bencana dan konflik sosial yang dapat ditangani	Desa		3 Desa		3		3	3		3	3 Desa		3	3 Desa		300.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	Karakter
			Jumlah pembinaan bidang trantibmas	Desa		16 Desa		16		16	16		16	16 Desa		16	16 Desa		1,600.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	Karakter
			Jumlah data tratib desa wilayah kecamatan	Desa		16 Desa		16		16	16		16	16 Desa		16	16 Desa		1,600.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	Karakter
			Jumlah dokumen pelayanan perizinan/rekomendasi bidang trantib yang terlayani sesuai standar	Desa		16 Desa		16		16	16		16	16 Desa		16	16 Desa		1,600.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	Karakter

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
			Indeks kepuasan masyarakat pelayanan trantib	indeks		C		80		83	B		83	B		83	B		8,300.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	569.00		116,295,275	663.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa		Jumlah desa dengan tertib administrasi	Desa	16			16 Desa		16			16 Desa			16 Desa			100.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	-
2.17		**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa**	**Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)**	**Desa**	**16**			**16 Desa**		**16**			**12 Desa**			**12 Desa**			**75.00**		**Kecamatan Labuan Amas Utara**	**-**
			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	**%**	**50**	**50%**		**50**		**50**	**50**		**75**	**75%**		**75**	**75%**		**150.00**		**Kecamatan Labuan Amas Utara**	**Karakter**
2.17.1		Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah evaluasi RAPB Desa	Dokumen	16		124,862,500	16 dokumen	0	16		16,760,000	16 dokumen		16,730,500	16 dokumen			100.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	-
2.17.2		Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Persentase Desa/Kelurahan dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	%	16		159,988,000	40%	0	50		5,140,000	80%		5,080,300	80%			500.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	-
												Rata - rata kinerja (%)	300.00		21,810,800	130.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
2.18		**Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Persenase desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)**	**%**	**50**			**35%**		**50**			**75%**			**75%**			**150.00**		**Kecamatan Labuan Amas Utara**	**-**
2.18.2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan pengelolaan administrasi berdasarkan tupoksi	Desa	16		100,127,000	16 Desa	0	16		5,140,000	16 Desa		4,891,600	16 Desa			100.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	-
												Rata - rata kinerja (%)	100.00		4,891,600	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
3	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pemerintah desa		Jumlah desa yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunannya	Desa	16			16 Desa		16			16 Desa			16 Desa			100.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	-
3.16		**Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Persentase desa dengan hasil evaluasi minimum dengan nilai 301**	**Desa**	**5**			**3 Desa**		**5**			**6 Desa**			**6 Desa**			**120.00**		**Kecamatan Labuan Amas Utara**	**-**
3.16.1		Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah desa yang berkembang statusnya dan pelaksanaan pembangunannya	Desa	16		107,140,000	3 Desa	0	5		13,225,000	6		13,170,750	6			37.50		Kecamatan Labuan Amas Utara	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
3.16.2		Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi PKK yang aktif	TP PKK	16		181,119,000	17 TP PKK	0	17		20,199,800	17 TP PKK		20,180,100	17 TP PKK			106.25		Kecamatan Labuan Amas Utara	-
3.16.3		Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah usulan pembangunan yang diakomodir/disampaikan	Dokumen	360		102,366,000	2 dokumen	0	2		22,625,000	2 dokumen		22,370,500	2 dokumen			0.56		Kecamatan Labuan Amas Utara	-
			Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang sesuai standar	dokumen		40 dokumen		75		40	40		39	39 dokumen		114	144 dokumen		11,400.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	Karakter
			Jumlah (masyarakat/perangkat dan lembaga desa) peserta sosialisasi yang mengikuti..	Orang		96 Orang		40		96	96		117	117 Orang		117	117 Orang		11,700.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	Karakter
			Jumlah masyarakat membayar PBB/IMB	%		60%		60		60	60		85	85%		85	85%		8,500.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	Karakter
			Jumlah desa yang memiliki BUMDes dan melaksanakan pembangunan program kementrian/lembaga	Organisasi		10 Organisasi		8		10	10		12	12 Organisasi		12	12 Organisasi		1,200.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	Karakter
			Indeks kepuasan masyarakat pelayanan ekobang	Indeks		B		80		80	C		83	B		83	B		8,300.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	Karakter
3.16.5		Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen pelayanan yang sesuai standar	Dokumen	200		512,358,000	322	0	150		85,680,000	120		85,504,350	442			221.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	-
			Jumlah bantuan yang tersalurkan dengan tepat	KK		20 KK		45		20	20		7	7 KK		52	52 KK		5,200.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	Karakter
			Jumlah pembinaan kelompok/lembaga pemuda, olahraga dan agama	Kelompok/Lembaga		16 Kelompok		16		16	16		10	10 Kelompok		10	10 Kelompok		1,000.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	Karakter
			Jumlah data bidang sosial yang dapat divalidasi	dokumen		2 dokumen		2		2	2		2	2 dokumen		2	2 dokumen		200.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	Karakter
			Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesra	indeks		B		80		83	B		83	B		83	B		8,300.00		Kecamatan Labuan Amas Utara	Karakter
Rata - rata kinerja (%)													219.75		141,225,700	476.50							
Predikat Kinerja													Sangat tinggi			Sangat tinggi							

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Periode Pelaksanaan 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)																				
1	Meningkatnya kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Katagori	76	B		67		76	B		76	B		76	B		100.00		Kecamatan Batu Benawa	Karakter
1.15		**Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan**	**indeks**	**76**	**B**		**67**		**76**	**B**		**76**	**B**		**76**	**B**		**100.00**		**Kecamatan Batu Benawa**	**Karakter**
1.15.1		Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahan umum yang diselesaikan	Permasalahan	560		2,160,000,000	15	30,410,000	20		45,050,000	10		41,885,000	10			198.21		Kecamatan Batu Benawa	-
			Jumlah penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	Hari Besar		Hari		1		1	1		1	Hari		1	Hari		100.00		Kecamatan Batu Benawa	Karakter
1.15.2		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen pelayanan sesuai standar	Dokumen	1500		300,000,000	1433	0	500		30,500,000	545		28,352,000	545			36.33		Kecamatan Batu Benawa	-
			Jumlah ruang pelayanan PATEN yang refresentatif	Ruangan		Ruang		1		1			1	Ruang		1	Ruang		100.00		Kecamatan Batu Benawa	Karakter
1.15.4		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi bidang trantib	Orang	560		900,000,000	90	13,735,000	200		29,800,000	200		27,595,000	200			35.71		Kecamatan Batu Benawa	-
			Jumlah permasalahan bidang trantib yang diselesaikan	Masalah		Masalah		4		4	4		4	Masalah		4	Masalah		400.00		Kecamatan Batu Benawa	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	24.00		97,832,000	186.33						
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah			Sangat tinggi						
2	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa tertib administrasi	Jumlah Desa	14			10		12			12			12			85.71		Kecamatan Batu Benawa	-
2.17		**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa**	**Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan**	**%**	**100**			**57**		**71**			**71**			**71**			**71.00**		**Kecamatan Batu Benawa**	**-**
2.17.1		Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah Desa yang dievaluasi RAPB Desa	Desa	14		115,500,000	14	4,725,000	14		14,000,000	14		13,347,500	14			100.00		Kecamatan Batu Benawa	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2019)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Tipe Data
1	2	3	4	5	6			7		8			9			10			11		12	13
					K	K2	Rp	K	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	K2	Rp	K	Rp		
2.17.2		Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Persentase Desa tertib administrasi Keuangan	%	14		90,000,000	57	1,650,000	71		6,600,000	71		5,250,000	71			507.14		Kecamatan Batu Benawa	-
												Rata - rata kinerja (%)	303.50		18,597,500	100.00						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						
2.18		**Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa dengan tertib administrasi Pemerintahan Desa**	**%**	**100**			**71**		**86**			**86**			**86**			**86.00**		**Kecamatan Batu Benawa**	**-**
2.18.4		Pembinaan penyelenggaraan Administrasi Desa	Jumlah Desa yang dapat melaksanakan pengelolaan adminstrasi berdasarkan tupoksi	Desa	14		180,000,000	9	10	11		9,000,000	12		8,400,000	12			85.71		Kecamatan Batu Benawa	-
												Rata - rata kinerja (%)	85.00		8,400,000	109.00						
												Predikat Kinerja	Tinggi			Sangat tinggi						
3	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan desa		Jumlah Desa yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunan desa	Desa	14			14		14			14			14			100.00		Kecamatan Batu Benawa	-
3.16		**Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Persentase Desa hasil evaluasi minimal katagore berkembang**	**%**	**100**			**64**		**71**			**86**			**86**			**86.00**		**Kecamatan Batu Benawa**	**-**
3.16.1		Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah peserta sosialisasi pembangunan desa	Peserta	14		360,000,000	105	0	147		7,945,000	98		4,827,500	98			700.00		Kecamatan Batu Benawa	-
3.16.2		Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi PKK yang aktif	Organisasi	15		300,000,000	15	10,902,000	15		14,100,000	15		13,810,000	15			100.00		Kecamatan Batu Benawa	-
3.16.3		Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah usulan pembangunan yang dapat diakomodir	Usulan	42		240,000,000	31	7,800,000	42		8,000,000	40		7,793,181	40			95.24		Kecamatan Batu Benawa	-
3.16.5		Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah jenis kegiatan/event keagamaan, olahraga, dan kepemudaan yang difasilitasi	Kegiatan	140		480,000,000	4	22,740,000	4		86,900,000	4		83,652,000	4			2.86		Kecamatan Batu Benawa	-
			Jumlah rekomendasi tim koordinasi kesejahteraan rakyat	Rekomendasi		Rekom		4		4	4		6	Rekom		6	Rekom		600.00		Kecamatan Batu Benawa	Karakter
												Rata - rata kinerja (%)	224.25		110,082,681	127.75						
												Predikat Kinerja	Sangat tinggi			Sangat tinggi						

L A M P I R A N

TABEL 5. 3.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PENDANAAN TAHUN 2021

37 SKPD

SE- KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

RKPD TAHUN 2021

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**342,833,151,996**					**0**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**298,325,841,596**					**0**
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**146,000,000**					**0**
1	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD			100 %	0		6,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Sekolah yang Harus Mengisi Pada Dapodik			100 %	0		140,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**296,839,650,696**					**0**
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan Jasa Transaksi Keuangan			100 %	0		296,833,650,696			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Laporan Keuangan			100 %	0		6,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**1,340,190,900**					**0**
1	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah benda pos yang disediakan			100 %	0		2,800,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet			100 %	0		125,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan Jasa Transaksi Keuangan			100 %	0		79,152,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Bulan Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan			100 %	0		69,364,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Atk yang disediakan			100 %	0		100,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan			100 %	0		25,460,900			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah komponen listrik			100 %	0		5,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor			100 %	0		100,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bahan bacaan yang tersedia			100 %	0		4,380,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		55,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar Prov.			100 %	0		599,420,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Gedung yang dipelihara			100 %	0		54,576,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional			100 %	0		100,038,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan kerja			100 %	0		20,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**44,326,510,400**					**0**
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**								**19,908,768,400**					**0**
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase SMP berprestasi	Jumlah ruang kelas yg dibangun			100 %	0		2,136,174,500			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase SMP berprestasi	Jumlah Luas Halaman dan Pagar Yang Dibangun Jumlah Ruang Ibadah Yang dibangun Jumlah WC yang di bangun			100 %	0 0 0		1,445,227,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Persentase SMP berprestasi	Jumlah Ruang kelas yang di rehab			100 %	0		4,453,836,250			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase SMP berprestasi	Jumlah ruang guru yang direhab sesuai dengan standar			100 %	0		650,597,700			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase SMP berprestasi	Jumlah ruang perpustakaan yang direhabilitasi			100 %	0		376,827,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase SMP berprestasi	Jumlah WC yang direhab			100 %	0		129,701,750			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase SMP berprestasi	Jumlah alat peraga yang dibantu Jumlah Buku-buku sekolah SD			100 %	0 0		1,163,195,800			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase SMP berprestasi	Jumlah Sekolah yang di fasilitasi BOS			100 %	0		358,958,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase SMP berprestasi	Jumlah Siswa yang difasilitasi ikut ujian			100 %	0		855,484,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Persentase SMP berprestasi	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter Jumlah sekolah yang siap diakreditas			100 %	0 0		272,945,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase SMP berprestasi	Jumlah siswa yang mengikuti lomba			100 %	0		404,903,400			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SMP berprestasi	Jumlah Guru/Ustadz yang dibantu			100 %	0		7,536,488,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SMP berprestasi	Jumlah Guru yang difasilitasi untuk Mengikuti Sertifikasi			100 %	0		124,430,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**7,598,359,000**					**0**
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase SMP berprestasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun			100 %	0		343,400,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase SMP berprestasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Diperbaiki			100 %	0		813,300,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase SMP berprestasi	Jumlah Peralatan Peraga Belajar yang Dibeli			100 %	0		3,249,440,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP berprestasi	jumlah siswa yg mendapat bantuan			100 %	0		112,400,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase SMP berprestasi	Jumlah siswa yang difasilitasi ikut ujian			100 %	0		345,508,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP berprestasi	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter Jumlah sekolah yang siap diakreditasi			100 %	0 0		124,148,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase SMP berprestasi	Jumlah siswa yang mengikuti lomba			100 %	0		322,875,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP berprestasi	Jumlah Guru / Ustadz yang Dibantu			100 %	0		2,237,288,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP berprestasi	Jumlah Guru yang difasilitasi untuk Mengikuti Sertifiaksi			100 %	0		50,000,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**								**12,824,773,000**					**0**
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Persentase SMP berprestasi	Jumlah PAUD yg Menerima BOP			100 %	0		416,688,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Persentase SMP berprestasi	Jumlah Guru/Ustadz yang dibantu			100 %	0		11,984,600,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Persentase SMP berprestasi	Jumlah PTK PAUD Dikmas yang Mengikuti Lomba			100 %	0		244,285,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase SMP berprestasi	Jumlah Guru Yang Meningkat Kompetensinya Jumlah PAUD HI per Kecamatan			100 %	0 0		179,200,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**								**3,994,610,000**					**0**
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase SMP berprestasi	Jumlah Prasarana yang Dibangun			100 %	0		513,060,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase SMP berprestasi	Jumlah Prasarana yang Direhab			100 %	0		616,800,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase SMP berprestasi	Jumlah Peralatan Peraga/Praktik yang Dibeli			100 %	0		360,000,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Persentase SMP berprestasi	Jumlah Siswa yang Bisa Baca Tulis			100 %	0		397,150,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase SMP berprestasi	Jumlah Kelompok Paket C			100 %	0		2,107,600,000			Persentase SMP berprestasi	100 %	0
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**								**180,800,000**					**0**
1	**01**	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**								**59,150,000**					**0**
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase siswa putus sekolah yg tertampung	Jumlah kurikulum muatan lokal yang diterapkan			100 %	0		59,150,000			Persentase siswa putus sekolah yg tertampung	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**								**121,650,000**					**0**
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase siswa putus sekolah yg tertampung	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal PAUD yang dihasilkan			100 %	0		60,900,000			Persentase siswa putus sekolah yg tertampung	100 %	0
1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase siswa putus sekolah yg tertampung	Jumlah PTK PAUD yang Bersertifikat			100 %	0		60,750,000			Persentase siswa putus sekolah yg tertampung	100 %	0
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**467,865,000**					**0**
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**								**353,865,000**					**0**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**353,865,000**					**0**
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase grup seni budaya yang aktif	Jumlah grup kesenian yang aktif			100 %	0		353,865,000			Persentase grup seni budaya yang aktif	100 %	0
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**								**114,000,000**					**0**
2	**22**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**								**114,000,000**					**0**
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Grup Seni Budaya yang Aktif	Jumlah Benda, situs dan kwasan cagar budaya yang baik dan terlindungi			100 %	0		114,000,000			Persentase Grup Seni Budaya yang Aktif	100 %	0
												TOTAL	**343,301,016,996**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**165,888,447,636**					**0**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**66,028,477,155**					**0**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**226,365,000**					**0**
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		34,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0
1	02	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		17,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0
1	02	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		156,865,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0
1	02	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		5,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**61,882,888,195**					**0**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		61,882,888,195	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0
1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**3,919,223,960**					**0**
1	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Tersedianya Jasa Surat Menyurat		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		2,546,432,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0
1	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah periode penyediaan jasa rekening air, listrik dan telpon/internet		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		358,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0
1	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentasi Jasa Kebersihan Kantor		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		11,157,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0
1	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentasi Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		68,236,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0
1	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentasi Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		36,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0
1	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor			100 %	0		3,150,000			Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0
1	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Bahan Bacaan yang di adakan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0
1	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah HOK Makanan dan Minuman		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		136,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0
1	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Perjalanan Dinas		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		534,723,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0
1	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentasi Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0
1	02	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		146,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah perlengkapan yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**93,230,205,481**					**0**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**								**17,068,366,449**					**0**
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah Puskesmas / pustu yang direhabilitasi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Haruyan, Haruyan	100 %	0		9,143,897,364	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga memiliki izin		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		2,004,738,081	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Prosentase alat kesehatan yang dikalibrasi sesuai standar		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah obat dan BMHP yang diadakan untuk di puskesmas dan jaringannya Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang mendapatkan distribusi obat dan vaksin		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	100 %	0 0		5,819,731,004	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**76,161,839,032**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah Bidan yang Mendapatkan Sosialisasi Pengenalan Tanda Bahaya Kehamilan, Persalinan dan Nifas Jumlah Bidan yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Motivator KP Ibu Jumlah Ibu Hamil/Bersalin/Nifas dan Bayi Baru Lahir dari Keluarga Tidak Mampu yg Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan Mendapat Pelayanan Jampersal Jumlah Ibu Hamil/Keluarga yang mendapat penyuluhan P4K dan KP Ibu		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0 0 0		1,091,549,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah Bidan yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pertolongan Persalinan dengan Partograf Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Bayi yang dilaksanakan AMP Jumlah Kemitraan dengan Dukun Kampung		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0 0		68,530,000			Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah Balita dan Anak Sekolah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		16,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah Petugas yang Mendapatkan Orientasi Kesehatan Reproduksi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		203,018,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah petugas Puskesmas yang terampil melaksanakan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		217,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah Kegiatan Monev dan Peningkatan Kapasitas Petugas/ pengelola program P2 Menular (TB,HIV/AIDS, Kusta, ISPA, Diare, Hepatitis, DBD, Malaria, Filaria, Rabies,		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		133,284,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah Kegiatan Monev dan Peningkatan Kapasitas Petugas/ pengelola program P2 Menular (TB,HIV/AIDS, Kusta, ISPA, Diare, Hepatitis, DBD, Malaria, Filaria, Rabies,		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		109,716,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Persentasi potensial KLB, Penyakit Emerging yang ditangani		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		71,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah Penderita Gizi Buruk dan Gizi Kurang yang mendapat PMT Jumlah peserta yang mendapatkan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi Jumlah Puskesmas yang memiliki data informasi gizi (peta) Jumlah Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0 0 0		83,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah petugas yang mendapatkan orientasi pelayanan kesehatan kerja		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		9,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah desa/kel melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) Jumlah puskesmas yang dikelola limbah medis padatnya Jumlah Sarana Air Minum Komunal yang dilakukan pengawasan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0 0		290,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah Petugas dan Tatanan yang mendapat penyuluhan PHBS Persentasi Posyandu Aktif dengan Strata Purnama dan Mandiri dibina		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0 0		103,900,000			Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Prosentase puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah kegiatan monev Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Haji		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		137,912,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah petugas Puskesmas yang terampil melaksanakan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		15,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah siswa/guru yang diberikan sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Napza di Sekolah Tingkat SLTP/SLTA sederajat		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		15,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah Petugas Puskesmas yang terampil melaksanakan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Penyakit Endemik/ Epidemik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		906,851,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah penduduk yang didaftarkan pada BPJS Kesehatan dari Alokasi APBD Persentase Pemanfaatan Biaya Operasional Pemeliharaan (JKN) Puskesmas Sungai Buluh porsentasi pemanfaatan biaya operasional pemeliharaan (JKN Barabai) Posentasi Pemanfaatan Biaya Operasional Pemeliharaan (JKN) Hantakan Prosentase Pemanfaatan Biaya Operasional dan Pemanfaatan Dana JKN Puskesmas Kasarangan Prosentase Pemanfaatan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Dana JKN Puskesmas Haruyan Prosentase pemanfaatan biaya operasional dan pemeliharaan dana JKN Puskesmas Kalibaru Prosentase Pemanfaatan Biaya Operasional Pemeliharaan (JKN Barikin) Prosentasi Pemanfaatan Biaya Operasianal dan Pemeliharaan (JKN) Batu Tangga Prosentasi Pemanfaatan Biaya operasional dan Pemeliharaan (JKN) Ilung Prosentasi pemanfaatan biaya operasional dan pemeliharaan (JKN) Limpasu Prosentasi Pemanfaatan Biaya operasional dan Pemeliharaan (JKN) Pandawan Prosentasi pemanfaatan biaya operasional dan pemeliharaan (JKN) Puskesmas Kambat Utara Prosentasi pemanfaatan biaya operasional dan pemeliharaan (JKN) Tandilang Prosentasi Pemanfaatan Biaya Operasional Pemeliharaan (JKN) Birayang		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		55,563,635,032	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Prosentasi Pemanfaatan biaya operasional pemeliharaan (JKN) Durian Gantang prosentasi pemanfaatan biaya operasional pemeliharaan [JKN kubur jawa] Prosentasi Pemanfaatan Biaya Operasional Pemeliharaan (JKN) Pagat Prosentasi Pemanfataan Biaya Operasional Pemeliharaan (JKN Awang Besar) Prosentasi pemanfatan biaya operasional pemeliharaan (JKN Pantai Hambawang)											
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah siswa/guru yang diberikan sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Napza di sekolah Tingkat SLTP/SLTA sederajat		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		16,680,000			Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Prosentasi jasa pelayanan kesehatan yang dibayarkan Prosentasi jumlah kejadian kegawatdaruratan yang ditangani Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Awang Besar Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Barabai Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Barikin Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Batu Tangga Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Birayang Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Durian Gantang Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Hantakan Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Haruyan Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Ilung Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Kalibaru Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		14,735,907,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Promotif Puskesmas Kambat Utara Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Kasarangan Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Kubur Jawa Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Limpasu Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Pagat Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Pandawan Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Pantai Hambawang Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Sungai Buluh Terpenuhinya Manajemen dan program Preventif dan Promotif Puskesmas Tandilang											
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Terpenuhinya Manajemen BOK Kabupaten		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		810,180,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah puskesmas yang terakreditasi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		1,336,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah Balita dan Anak Sekolah yang dilakukan peningkatan imunisasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		199,976,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**6,395,454,000**					**0**
1	**02**	**03**	**2.03**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota**								**6,395,454,000**					**0**
1	02	03	2.03	01	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase SDM Kesehatan yang ber Sertifikat	Jumlah Tenaga Kesehatan dan non Kesehatan yang terkontrak		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		6,395,454,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase SDM Kesehatan yang ber Sertifikat	100 %	0
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**								**234,311,000**					**0**
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**								**55,839,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	Jumlah Toko obat dan apotek yang diawasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0		16,320,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	0 %	0
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	Jumlah toko obat dan Apotek yang memiliki ijin		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0		11,779,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	0 %	0
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	Jumlah toko obat dan Apotek yang memiliki ijin		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0		27,740,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	0 %	0
1	**02**	**04**	**2.02**		**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga**								**10,400,000**					**0**
1	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	Jumlah alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga memiliki izin		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0		10,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	0 %	0
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**								**158,072,000**					**0**
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	Jumlah kader PIRT yang mendapat pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan / Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) dalam rangka Sertifikasi P IRT		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0		158,072,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	0 %	0
1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**								**10,000,000**					**0**
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	Jumlah pemilik/pengelola tempat pengelolaan makanan (TPM) mendapat sosialisasi			0 %	0		10,000,000			Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	0 %	0
												TOTAL	**165,888,447,636**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.01 RSUD H Damanhuri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**153,174,059,912**					**0**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**26,412,836,912**					**0**
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**26,412,836,912**					**0**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentasi Penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu			100 %	0		26,412,836,912			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**126,761,223,000**					**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**126,761,223,000**					**0**
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah alkes/kedokteran yang dibeli Jumlah unit fasilitas RS yang dibangun persentasi SDM keperawatan yang bersertifikasi			100 % 	0 0 0		126,761,223,000			Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	0
												TOTAL	**153,174,059,912**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**130,066,316,986**					**0**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**7,524,839,243**					**0**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**22,500,000**					**0**
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerj SKPD yang dibuat		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**5,220,921,243**					**0**
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		5,220,921,243	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**2,281,418,000**					**0**
1	03	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	03	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah periode penyediaan jasa rekening air, listrik, telpon		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		287,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	03	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terlayani dengan baik		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	03	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		14,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	03	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah tenaga teknis/administrasi yang tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		190,728,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	03	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase penyediaan jasa kebersihan kantor		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		94,685,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	03	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase ATK yang disediakan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		61,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	03	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		31,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	03	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan Bangunan kantor		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		19,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	03	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terlayani dengan baik		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	03	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		5,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	03	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK Makanan Harian,Rapat dan Tamu		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		165,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	03	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		852,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	03	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah perlengkapan yang dibeli		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		74,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	03	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Kantor yang Dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	03	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Kendaraan Dinas R4 / R2 yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		109,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	03	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		24,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	03	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Gedung Kantor/Fasilitas Gedung Kantor yang direhab		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		237,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**								**30,240,406,763**					**0**
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**7,446,650,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase P3A yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		2,919,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase P3A yang Aktif	100 %	0
1	03	02	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase P3A yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase P3A yang Aktif	100 %	0
1	03	02	2.01	36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase P3A yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		1,115,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase P3A yang Aktif	100 %	0
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Persentase P3A yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		3,137,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase P3A yang Aktif	100 %	0
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase P3A yang Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		165,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase P3A yang Aktif	100 %	0
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**22,793,756,763**					**0**
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase P3A yang Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		843,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase P3A yang Aktif	100 %	0
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase P3A yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		17,106,044,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan		Persentase P3A yang Aktif	100 %	0
1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Persentase P3A yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		1,925,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan		Persentase P3A yang Aktif	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase P3A yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		838,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase P3A yang Aktif	100 %	0
1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Persentase P3A yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		679,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase P3A yang Aktif	100 %	0
1	03	02	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Persentase P3A yang Aktif	Jumlah P3A yang dibina		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		1,400,682,763	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		Persentase P3A yang Aktif	100 %	0
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**								**28,773,668,480**					**0**
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**								**28,773,668,480**					**0**
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	Sarana dan Prasarana Air Minum yang terbangun	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi			100 %	0		20,212,904,480			Sarana dan Prasarana Air Minum yang terbangun	100 %	0
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Sarana dan Prasarana Air Minum yang terbangun	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi			100 %	0		8,560,764,000			Sarana dan Prasarana Air Minum yang terbangun	100 %	0
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**								**4,380,525,000**					**0**
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**4,380,525,000**					**0**
1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sarana dan Prasarana Air Limbah yang terbangun	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi			100 %	0		4,380,525,000			Sarana dan Prasarana Air Limbah yang terbangun	100 %	0
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**								**2,715,800,000**					**0**
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**2,715,800,000**					**0**
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Panjang saluran drainase yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara dan berfungsi dengan baik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Timur	100 %	0		2,140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang saluran drainase yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	0
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara dan berfungsi dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		575,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang saluran drainase yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	0
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**								**14,733,935,000**					**0**
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**								**14,733,935,000**					**0**
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah gedung negara dan prasarana publik yang dibangun/dipelihara	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan sesuai standar		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		797,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah gedung negara dan prasarana publik yang dibangun/dipelihara	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung negara dan prasarana publik yang dibangun/dipelihara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		13,936,685,000			Jumlah gedung negara dan prasarana publik yang dibangun/dipelihara	100 %	0
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**								**2,981,935,000**					**0**
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**								**2,981,935,000**					**0**
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Luasan RTH yang Dibangun di Wilayah Perkotaan Barabai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		2,981,935,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Luasan RTH yang Dibangun di Wilayah Perkotaan Barabai	100 %	0
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**								**37,504,557,500**					**0**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**								**37,504,557,500**					**0**
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan			100 %	0		560,465,000			Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	100 %	0
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring			100 %	0		1,880,000,000			Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	100 %	0
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring			100 %	0		5,760,610,000			Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	100 %	0
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring			100 %	0		8,289,750,000			Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	100 %	0
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring			100 %	0		5,515,895,000			Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	100 %	0
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring			100 %	0		2,430,675,000			Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	100 %	0
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring			100 %	0		1,712,500,000			Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	100 %	0
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring			100 %	0		8,786,000,000			Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	100 %	0
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring			100 %	0		442,380,000			Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	100 %	0
1	03	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring			100 %	0		1,255,030,000			Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	100 %	0
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring			100 %	0		871,252,500			Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	100 %	0
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**								**374,100,000**					**0**
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**								**60,000,000**					**0**
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase peningkatan pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	100 %	0
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**143,500,000**					**0**
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	03	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah unit peralatan yang dibeli		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		139,000,000			Persentase peningkatan pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	100 %	0
1	**03**	**11**	**2.03**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**								**73,600,000**					**0**
1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Persentase peningkatan pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan sesuai standar		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		73,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	100 %	0
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**								**97,000,000**					**0**
1	03	11	2.04	01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah Dokumen hasil evaluasi (Jumlah rekomendasi yang diterbitkan)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		7,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	100 %	0
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah Dokumen hasil evaluasi (Jumlah rekomendasi yang diterbitkan)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		42,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	100 %	0
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah Dokumen hasil evaluasi (Jumlah rekomendasi yang diterbitkan)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Selatan	100 %	0		46,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	100 %	0
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**								**836,550,000**					**0**
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**514,000,000**					**0**
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah naskah perencanaan tata ruang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Tata Ruang			100 %	0		514,000,000			Jumlah naskah perencanaan tata ruang	100 %	0
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**322,550,000**					**0**
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah naskah perencanaan tata ruang	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan sesuai standar			100 %	0		322,550,000			Jumlah naskah perencanaan tata ruang	100 %	0
												TOTAL	**130,066,316,986**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								**19,894,299,480**					**0**
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**3,520,859,480**					**0**
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**51,400,000**					**0**
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		25,150,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	04	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		26,250,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**2,791,628,480**					**0**
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		2,737,028,480			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	04	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		30,900,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	04	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		525,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	04	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		23,175,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**04**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**677,831,000**					**0**
1	04	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah jasa pengiriman surat			100 %	0		21,975,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	04	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet			100 %	0		2,400,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	04	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi			100 %	0		25,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	04	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan yang dipelihara			100 %	0		6,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	04	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan ATK			100 %	0		19,830,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	04	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan			100 %	0		9,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	04	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan yang dipelihara			100 %	0		25,200,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	04	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli			100 %	0		4,800,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	04	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		24,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	04	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah OH Perjalanan Dinas			100 %	0		473,850,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	04	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah unit peralatan yang dibeli			100 %	0		34,776,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	04	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara			100 %	0		19,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	04	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara			100 %	0		11,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**								**2,409,200,000**					**0**
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**								**550,000,000**					**0**
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	Jumlah NSPK Daerah tentang Perumahan dan Permukiman yang disusun pada Tahun Berjalan			100 %	0		135,000,000			Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	100 %	0
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	Jumlah NSPK Daerah tentang Perumahan dan Permukiman yang disusun pada Tahun Berjalan			100 %	0		102,500,000			Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	100 %	0
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	Jumlah NSPK Daerah tentang Perumahan dan Permukiman yang disusun pada Tahun Berjalan			100 %	0		102,500,000			Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	100 %	0
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	Jumlah NSPK Daerah tentang Perumahan dan Permukiman yang disusun pada Tahun Berjalan			100 %	0		102,500,000			Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	100 %	0
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	Jumlah NSPK Daerah tentang Perumahan dan Permukiman yang disusun pada Tahun Berjalan			100 %	0		107,500,000			Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	100 %	0
1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**								**81,250,000**					**0**
1	04	02	2.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	Jumlah rumah bagi MBR yang terbangun			100 %	0		81,250,000			Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	100 %	0
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**								**1,680,450,000**					**0**
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	Jumlah Rumah Bagi MBR yang ditingkatkan Kualitasnya			100 %	0		1,576,700,000			Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	100 %	0
1	04	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Tidak Layak Huni			100 %	0		103,750,000			Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	100 %	0
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**								**65,000,000**					**0**
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	Jumlah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang didampingi bersama Fasilitator untuk meningkatkan kualitas nya menjadi Layak Huni melalui Program APBN			100 %	0		32,500,000			Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	100 %	0
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	Jumlah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang didampingi bersama Fasilitator untuk meningkatkan kualitas nya menjadi Layak Huni melalui Program APBN			100 %	0		32,500,000			Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	100 %	0
1	**04**	**02**	**2.07**		**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**								**32,500,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	Jumlah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang didampingi bersama Fasilitator untuk meningkatkan kualitas nya menjadi Layak Huni melalui Program APBN			100 %	0		32,500,000			Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan	100 %	0
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH**								**8,227,950,000**					**0**
1	**04**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**								**178,000,000**					**0**
1	04	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh			100 %	0		10,000,000			Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	100 %	0
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh			100 %	0		79,500,000			Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	100 %	0
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh			100 %	0		88,500,000			Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	100 %	0
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**								**845,950,000**					**0**
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)			100 %	0		121,350,000			Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	100 %	0
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh			100 %	0		190,900,000			Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	100 %	0
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	Luas permukiman kumuh yang tertangani (pendampingan program APBN) dengan berbasis masyarakat			100 %	0		391,800,000			Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	100 %	0
1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh			100 %	0		141,900,000			Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	100 %	0
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**								**7,204,000,000**					**0**
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh			100 %	0		161,350,000			Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	100 %	0
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	Jumlah rumah bagi MBR yang dtingkatkan kualitasnya			100 %	0		6,646,000,000			Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	100 %	0
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	Jumlah rumah yang ditata di kawasan kumuh			100 %	0		295,900,000			Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh			100 %	0		100,750,000			Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan	100 %	0
1	**04**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**								**5,679,990,000**					**0**
1	**04**	**04**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**								**5,679,990,000**					**0**
1	04	04	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah sarana dan prasarana kawasan perumahan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya pada tahun berjalan	Jumlah Dokumen perencanaan jalan dan drainase lingkungan kawasan perumahan			100 %	0		54,280,000			Jumlah sarana dan prasarana kawasan perumahan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya pada tahun berjalan	100 %	0
1	04	04	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah sarana dan prasarana kawasan perumahan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya pada tahun berjalan	Panjang jalan lingkungan di kawasan perumahan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya (lebar di atas 3 m)			100 %	0		5,564,720,000			Jumlah sarana dan prasarana kawasan perumahan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya pada tahun berjalan	100 %	0
1	04	04	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah sarana dan prasarana kawasan perumahan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya pada tahun berjalan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Jalan dan drainase Lingkungan Kawasan Perumahan			100 %	0		60,990,000			Jumlah sarana dan prasarana kawasan perumahan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya pada tahun berjalan	100 %	0
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								**56,300,000**					**0**
1	**04**	**05**	**2.01**		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**								**56,300,000**					**0**
1	04	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Jalan dan drainase Lingkungan Kawasan Perumahan			100 %	0		56,300,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	0
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**								**9,442,530,000**					**0**
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**								**82,540,000**					**0**
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.**								**82,540,000**					**0**
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Luas lahan yang dibebaskan untuk kepentingan umum			100 %	0		82,540,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	0
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**								**9,159,990,000**					**0**
2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**9,159,990,000**					**0**
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas lahan yang dibebaskan untuk kepentingan umum	Luas lahan yang dibebaskan untuk kepentingan umum			100 %	0		9,159,990,000			Rasio Luas lahan yang dibebaskan untuk kepentingan umum	100 %	0
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**								**200,000,000**					**0**
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**								**200,000,000**					**0**
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Luas lahan yang dibebaskan untuk kepentingan umum			100 %	0		200,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	0
												TOTAL	**29,336,829,480**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**8,000,954,445**					**0**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**2,942,424,445**					**0**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,750,000**					**0**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)			100 %	0		4,750,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen (RKA, DPA dan Lap. Keu)			100 %	0		6,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**2,170,659,445**					**0**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen (RKA, DPA dan Lap. Keu)			100 %	0		2,146,659,445			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi			100 %	0		18,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)			100 %	0		6,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**531,535,000**					**0**
1	05	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah jasa pengiriman surat			100 %	0		8,275,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan Internet			100 %	0		44,700,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan			100 %	0		18,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan ATK			100 %	0		20,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan			100 %	0		17,550,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan kompenen instalasi listrik / penerangan dan bangunan kantor			100 %	0		6,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan yang dipelihara			100 %	0		13,400,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		24,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah perjalanan dinas			100 %	0		173,750,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase pemeliharaan gedung kantor			100 %	0		38,600,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah mobil/R2 yang dipelihara			100 %	0		167,260,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**05**	**01**	**2.04**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**								**229,480,000**					**0**
1	05	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah pakaian dinas			100 %	0		200,830,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah pakaian khusus			100 %	0		28,650,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**3,868,830,000**					**0**
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**3,621,830,000**					**0**
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman, ketertiban)	Jumlah operasi dan patroli sesuai SOP			80 %	0		3,599,830,000			Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman, ketertiban)	80 %	0
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman, ketertiban)	Jumlah peserta diklat yang terlatih sesuai kompetensi			80 %	0		22,000,000			Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman, ketertiban)	80 %	0
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**								**247,000,000**					**0**
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman, ketertiban)	Jumlah operasi dan patroli sesuai SOP Persentase peserta penyuluhan yang sadar hukum			80 %	0 0		247,000,000			Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman, ketertiban)	80 %	0
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN**								**1,189,700,000**					**0**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**1,189,700,000**					**0**
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebakaran yang ditangani	Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran			100 %	0		1,008,250,000			Persentase kebakaran yang ditangani	100 %	0
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebakaran yang ditangani	Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran			100 %	0		181,450,000			Persentase kebakaran yang ditangani	100 %	0
												TOTAL	**8,000,954,445**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**1,521,355,765**					**0**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**1,521,355,765**					**0**
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**1,128,755,765**					**0**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD			100 %	0		1,121,355,765			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		7,400,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**392,600,000**					**0**
1	05	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan jasa surat menyurat			100 %	0		23,900,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi,listrik dan air yang terpakai			100 %	0		24,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah kendaraan oprasional yang berfungsi			100 %	0		38,149,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	persentase penyediaan jasa kebersihan kantor			100 %	0		47,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase jasa perbaikan peralatan kerja			100 %	0		7,470,598			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	terpenuhinya keperluan alat tulis kantor			100 %	0		8,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase terpenuhinya bahan cetak dan penggandaan			100 %	0		5,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan kantor di sediakan			100 %	0		59,020,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah bahan bacaan dan informasi yang disediakan			100 %	0		4,440,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		8,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah perjalanan dinas			100 %	0		101,500,002			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		16,740,400			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		3,380,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	05	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		45,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**1,196,250,600**					**0**
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**								**34,180,000**					**0**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**								**34,180,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Meningkatnya wawasan kebangsaan	jumlah permasalahan yg direkomendasikan penyelesaiannya oleh Tim FPK		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		34,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Meningkatnya wawasan kebangsaan	100 %	0
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**								**791,870,600**					**0**
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**								**791,870,600**					**0**
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Partisipasi peserta pemilu	Jumlah Peserta Yang Memahami Pendidikan Politik			100 %	0		31,620,000			Persentase Partisipasi peserta pemilu	100 %	0
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Partisipasi peserta pemilu	jumlah moniv 12 kali jumlah parpol yg difasilitasi untuk mendapatkan bantuan keuangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 	0 0		760,250,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Partisipasi peserta pemilu	100 %	0
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**								**21,980,000**					**0**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**								**21,980,000**					**0**
8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase ormas yang aktif dalam mendukung program-program pemerintah	Jumlah kegiatan Ormas yang mendukung program pemerintah.		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		21,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ormas yang aktif dalam mendukung program-program pemerintah	100 %	0
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**								**254,940,000**					**0**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**								**254,940,000**					**0**
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase ormas yang aktif dalam mendukung program-program pemerintah	Jumlah permasalahan yg direkomendasikan penyelesaiannya oleh FKUB Jumlah peserta yang memahami akan bahaya Narkoba			100 %	0 0		254,940,000			Persentase ormas yang aktif dalam mendukung program-program pemerintah	100 %	0
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**								**93,280,000**					**0**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**								**93,280,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah permasalahan yg direkomendasikan penyelesaiannya oleh FKDM		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		47,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	0
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah rekomendasi atau langkah2 Tim Terpadu yang disepakati		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		46,150,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	0
												TOTAL	**2,717,606,365**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.2.14.2.08.01.00 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.14.2.08.01.00 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								**14,225,500,631**					**0**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**4,766,216,131**					**0**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**35,050,000**					**0**
1	06	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentasi Nilai Evaluasi SAKIP			100 %	0		6,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokomen yang disusun			100 %	0		28,550,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**3,170,063,031**					**0**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokomen yang disusun			100 %	0		3,165,863,031			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokomen yang disusun			100 %	0		4,200,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**1,561,103,100**					**0**
1	06	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah penyediaan jasa pengiriman surat			100 %	0		4,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah pembayaran rekening Listrik, air, telepon dan internet			100 %	0		164,700,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah penyediaan pengadaan perlengkapan gedung kantor			100 %	0		128,440,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas			100 %	0		85,350,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi			100 %	0		490,092,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan pembersih			100 %	0		9,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan ATK			100 %	0		67,626,100			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan			100 %	0		33,520,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlaj bahan bacaan dan buku yang dibeli			100 %	0		3,600,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		44,375,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah OH perjalanan Dinas Dalam daerah dan luar daerah			100 %	0		510,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan yang dipelihara			100 %	0		20,400,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**								**2,887,420,000**					**0**
1	**06**	**02**	**2.01**		**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**								**1,065,300,000**					**0**
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Persentasi PMKS	Jumlah rumah layak huni yang terbangun			100 %	0		1,065,300,000			Persentasi PMKS	100 %	0
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**								**1,822,120,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.2.14.2.08.01.00 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.14.2.08.01.00 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasi PMKS	Jumlah tenaga yang dilatih dan dibina			100 %	0		585,820,000			Persentasi PMKS	100 %	0
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasi PMKS	Jumlah PMKS yang dilatih			100 %	0		742,600,000			Persentasi PMKS	100 %	0
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentasi PMKS	Jumlah orang yang menerima bantuan			100 %	0		493,700,000			Persentasi PMKS	100 %	0
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**4,872,403,000**					**0**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**								**416,600,000**					**0**
1	06	04	2.01	13	Pemberian Layanan Rujukan	% PMKS yang mendapat rehabilitasi	Jumlah masyarakat terlantar yang dibantu			100 %	0		416,600,000			% PMKS yang mendapat rehabilitasi	100 %	0
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**								**4,455,803,000**					**0**
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	% PMKS yang mendapat rehabilitasi	Jumlah orang yang menerima bantuan			100 %	0		4,297,303,000			% PMKS yang mendapat rehabilitasi	100 %	0
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	% PMKS yang mendapat rehabilitasi	Jumlah orang yang menerima bantuan			100 %	0		158,500,000			% PMKS yang mendapat rehabilitasi	100 %	0
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**								**716,451,500**					**0**
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**								**18,000,000**					**0**
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Persentasi PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah kasus yang ditangani			100 %	0		18,000,000			Persentasi PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100 %	0
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**698,451,500**					**0**
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah RT yang terdata			100 %	0		121,863,500			Persentasi PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100 %	0
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah RT yang terdata			100 %	0		576,588,000			Persentasi PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100 %	0
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**								**963,510,000**					**0**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**								**918,710,000**					**0**
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Persen orang yang menerima bantuan	Jumlah orang yang menerima bantuan			100 %	0		175,500,000			Persen orang yang menerima bantuan	100 %	0
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persen orang yang menerima bantuan	Jumlah orang yang menerima bantuan			100 %	0		262,750,000			Persen orang yang menerima bantuan	100 %	0
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Persen orang yang menerima bantuan	Jumlah kasus yang ditangani			100 %	0		480,460,000			Persen orang yang menerima bantuan	100 %	0
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**								**44,800,000**					**0**
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persen orang yang menerima bantuan	Persentasi sarana prasarana yang memadai			100 %	0		44,800,000			Persen orang yang menerima bantuan	100 %	0
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**								**19,500,000**					**0**
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**								**19,500,000**					**0**
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	% Terpeliharanya nilai nilai perjuangan dan makam	Pelayanan sarana dan prasarana rehab. Kessos bagi PMKS			100 %	0		19,500,000			% Terpeliharanya nilai nilai perjuangan dan makam	100 %	0
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								**485,861,400**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.2.14.2.08.01.00 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.14.2.08.01.00 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**								**260,125,000**					**0**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**								**93,920,000**					**0**
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentasi masyarakat yang berperan terhadap ketahanan keluarga	Jumlah SKPD yang menerapkan PPRG			100 %	0		36,370,000			Persentasi masyarakat yang berperan terhadap ketahanan keluarga	100 %	0
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG	Persentasi masyarakat yang berperan terhadap ketahanan keluarga	Jumlah SKPD yang menerapkan PPRG			100 %	0		57,550,000			Persentasi masyarakat yang berperan terhadap ketahanan keluarga	100 %	0
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**159,130,000**					**0**
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentasi masyarakat yang berperan terhadap ketahanan keluarga	Jumlah Desa P2WKSS dan Kecamatan GSI Jumlah pembinaan desa Prima			100 %	0 0		159,130,000			Persentasi masyarakat yang berperan terhadap ketahanan keluarga	100 %	0
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**7,075,000**					**0**
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasi masyarakat yang berperan terhadap ketahanan keluarga	Jumlah perempuan di parlemen, pemerintahan, dan swasta			100 %	0		7,075,000			Persentasi masyarakat yang berperan terhadap ketahanan keluarga	100 %	0
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**								**52,433,900**					**0**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**52,433,900**					**0**
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	% Perempuan yang berperan aktif dalam pembangunan	Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani			100 %	0		52,433,900			% Perempuan yang berperan aktif dalam pembangunan	100 %	0
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**								**27,250,000**					**0**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**								**27,250,000**					**0**
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasi data akurat dan valid	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan			100 %	0		27,250,000			Persentasi data akurat dan valid	100 %	0
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**								**146,052,500**					**0**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**								**107,502,500**					**0**
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang mendukung KLA	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan yang memahami pemenuhan hak anak			100 %	0		47,612,500			Persentase Kecamatan yang mendukung KLA	100 %	0
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang mendukung KLA	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan yang memahami pemenuhan hak anak			100 %	0		59,890,000			Persentase Kecamatan yang mendukung KLA	100 %	0
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**								**38,550,000**					**0**
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang mendukung KLA	Jumlah desa/kelurahan yang mendukung KLA			100 %	0		38,550,000			Persentase Kecamatan yang mendukung KLA	100 %	0
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								**4,802,701,000**					**0**
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**								**919,331,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.2.14.2.08.01.00 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.14.2.08.01.00 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**								**919,331,000**					**0**
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen yang disusun	Jumlah Dokumen pelaporan bulanan			100 %	0		112,620,000			Jumlah Dokumen yang disusun	100 %	0
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Dokumen yang disusun	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan,Jumlah tenaga kontrak PPLKB, Jumlah alkon yang dibeliJumlah sarana prasarana KB yang terbentuk			100 %	0		806,711,000			Jumlah Dokumen yang disusun	100 %	0
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**								**3,628,054,000**					**0**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**								**3,628,054,000**					**0**
2	14	03	2.01	08	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah peningkatan peserta KB aktif	Jumlah Kampung KB yang terbentuk			100 %	0		3,628,054,000			Jumlah peningkatan peserta KB aktif	100 %	0
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**								**255,316,000**					**0**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								**255,316,000**					**0**
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentasi masyarakat yang berperan terhadap ketahanan keluarga	Jumlah kelompok Tri Bina meningkat dengan klasifikasinya (Dasar, berkembang, paripurna)			100 %	0		255,316,000			Persentasi masyarakat yang berperan terhadap ketahanan keluarga	100 %	0
												TOTAL	**19,514,063,031**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**1,502,500,000**					**0**
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**								**1,502,500,000**					**0**
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**								**10,500,000**					**0**
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah korban yang ditangani	Jumlah desa tangguh bencana			100 %	0		10,500,000			Persentase jumlah korban yang ditangani	100 %	0
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**								**1,035,000,000**					**0**
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban yang ditangani	Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki pasca bencana			100 %	0		1,035,000,000			Persentase jumlah korban yang ditangani	100 %	0
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**								**457,000,000**					**0**
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban yang ditangani	Jumlah logitik yang disalurkan			100 %	0		457,000,000			Persentase jumlah korban yang ditangani	100 %	0
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								**1,711,578,456**					**0**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**1,711,578,456**					**0**
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**1,121,328,456**					**0**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 Tahun			100 %	0		1,114,078,456			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen(Renstra, Renja, LKIP, LKPj dan LPPD)			100 %	0		7,250,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**573,750,000**					**0**
1	06	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan jasa surat menyurat			100 %	0		2,130,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			100 %	0		60,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan			100 %	0		22,414,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase penyediaan perbaikan peralatan kerja			100 %	0		8,200,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan Alat Tulis Kantor			100 %	0		66,041,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan barang cetakan dan Penggandaan			100 %	0		17,450,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase komponen listrik yang tersedia			100 %	0		5,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			100 %	0		37,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Surat Kabar dan Buku			100 %	0		2,928,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	06	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah penyediaan makanan dan minuman			100 %	0		51,600,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah konsultasi dan koordinasi			100 %	0		139,387,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah unit yang dipelihara			100 %	0		7,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	06	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Kenderaan dinas/operasional berfungsi dengan baik			100 %	0		153,100,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
1	**06**	**01**	**2.04**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**								**16,500,000**					**0**
1	06	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya			100 %	0		16,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
												TOTAL	**3,214,078,456**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								**3,758,121,931**					**0**
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**3,154,692,864**					**0**
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**56,290,000**					**0**
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, LPPD,LKIP,			100 %	0		46,840,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	09	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen RKA, DPA dan Laporan Keuangan			100 %	0		9,450,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**2,278,549,182**					**0**
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen RKA, DPA dan Laporan Keuangan			100 %	0		2,276,259,182			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	09	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100 %	0		2,290,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**09**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**819,853,682**					**0**
2	09	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah materai, Jumlah Pengiriman, Jumlah Tenaga Administrasi			100 %	0		51,040,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	09	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Pembayaran Rekenng Listrik, Air dan Telepon			100 %	0		78,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	09	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara			100 %	0		150,450,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	09	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Bahan Kebersihan,Petugas Kebersihan dan Retribusi Sampah			100 %	0		98,160,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	09	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Jenis ATK			100 %	0		36,700,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	09	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Cetakan dan Penggandaan			100 %	0		2,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	09	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Komponen Listrik			100 %	0		4,300,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	09	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Penyediaan Peralatan Gedung kantor			100 %	0		40,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	09	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Surat Kabar dan majalah			100 %	0		5,040,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	09	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		18,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	09	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah OH Perjalanan Dinas			100 %	0		185,020,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	09	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah perlengkapan yang dibeli			100 %	0		45,143,682			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	09	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang di pelihara			100 %	0		105,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**								**264,658,400**					**0**
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**								**178,483,400**					**0**
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan kelompok distribusi pangan masyarakat yang berpartisifasi untuk menjaga stabilitas harga pangan	Jumlah kelompok P-LDPM dan PUPM yang terbina			100 %	0		102,650,000			Persentase Pemberdayaan kelompok distribusi pangan masyarakat yang berpartisifasi untuk menjaga stabilitas harga pangan	100 %	0
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan kelompok distribusi pangan masyarakat yang berpartisifasi untuk menjaga stabilitas harga pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat			100 %	0		75,833,400			Persentase Pemberdayaan kelompok distribusi pangan masyarakat yang berpartisifasi untuk menjaga stabilitas harga pangan	100 %	0
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**								**86,175,000**					**0**
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Pemberdayaan kelompok distribusi pangan masyarakat yang berpartisifasi untuk menjaga stabilitas harga pangan	Jumlah Promosi dan Lomba Yang Dilaksanakan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)			100 %	0		86,175,000			Persentase Pemberdayaan kelompok distribusi pangan masyarakat yang berpartisifasi untuk menjaga stabilitas harga pangan	100 %	0
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**								**320,220,667**					**0**
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**320,220,667**					**0**
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Lumbung Pangan Masyarakat yang Terisi Bahan Pangan Utama	Jumlah Desa rawan Pangan yang di bina			100 %	0		320,220,667			Persentase Ketersediaan Lumbung Pangan Masyarakat yang Terisi Bahan Pangan Utama	100 %	0
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**								**18,550,000**					**0**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**								**18,550,000**					**0**
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Paham Tentang Keamanan Pangan Segar	Jumlah Kelompok Yang Paham Tentang Keamanan Pangan			100 %	0		18,550,000			Jumlah Peserta yang Paham Tentang Keamanan Pangan Segar	100 %	0
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**2,561,582,100**					**0**
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**132,340,000**					**0**
3	**25**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**								**132,340,000**					**0**
3	25	02	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dibina	Jumlah Bibit Lokal Yang ditebar di Perairan			100 %	0		132,340,000			Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dibina	100 %	0
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**1,545,212,000**					**0**
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**								**1,097,097,000**					**0**
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Luas Budidaya Perikanan (ha)	Jumlah Kolam Yang Dibangun			103.9 Hektar	0		1,082,000,000			Luas Budidaya Perikanan (ha)	103.9 Hektar	0
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Luas Budidaya Perikanan (ha)	Jumlah Kelompok UPR yang Aktif			103.9 Hektar	0		15,097,000			Luas Budidaya Perikanan (ha)	103.9 Hektar	0
3	**25**	**03**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**								**448,115,000**					**0**
3	25	03	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Budidaya Perikanan (ha)	Jumlah Benih Ikan Unggul yang di Hasilkan			103.9 Hektar	0		448,115,000			Luas Budidaya Perikanan (ha)	103.9 Hektar	0
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**694,960,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	**25**	**04**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**								**694,960,000**					**0**
3	25	04	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus pelanggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Masyarakat terhadap Pelanggaran yang diterima dan dimediasi			100 %	0		694,960,000			Jumlah Kasus pelanggaran yang ditindaklanjuti	100 %	0
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**189,070,100**					**0**
3	**25**	**05**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**								**189,070,100**					**0**
3	25	05	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Jenis dan mutu produk olahan perikanan yang dihasilkan	Jumlah hasil olahan produk perikanan yang diproduksi/dipasarkan			100 %	0		189,070,100			Jumlah Jenis dan mutu produk olahan perikanan yang dihasilkan	100 %	0
												TOTAL	**6,319,704,031**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								**19,173,798,716**					**0**
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**6,936,149,960**					**0**
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**18,000,000**					**0**
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		9,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	11	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Kinerja yang sesuai standard dan tepat waktu			100 %	0		9,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**5,329,516,396**					**0**
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Buku Laporan			100 %	0		5,321,676,396			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	11	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran			100 %	0		800,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	11	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran			100 %	0		800,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	11	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			100 %	0		6,240,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**11**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**1,588,633,564**					**0**
2	11	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah jasa pengiriman surat			100 %	0		50,160,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	11	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet			100 %	0		603,432,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	11	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan			100 %	0		84,366,960			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	11	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan ATK			100 %	0		32,862,604			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	11	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan			100 %	0		17,200,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	11	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah perlengkapan yang dibeli			100 %	0		4,800,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	11	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli			100 %	0		4,608,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	11	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		33,600,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	11	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah OH Perjalanan Dinas			100 %	0		208,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	11	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah unit peralatan yang dibeli			100 %	0		24,300,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	11	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah unit yang dipelihara			100 %	0		486,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	11	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara			100 %	0		31,304,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan yang dipelihara			100 %	0		8,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**								**33,997,038**					**0**
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**								**33,997,038**					**0**
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha/Masyarakat Yang Taat Terhadap Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah			100 %	0		33,997,038			Persentase Peningkatan Pelaku Usaha/Masyarakat Yang Taat Terhadap Peraturan Perundangan	100 %	0
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								**979,795,400**					**0**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								**858,515,400**					**0**
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan	Jumlah Sarana & Prasana Pemantauan Kualitas Lingkungan yang diadakan			100 %	0		779,756,600			Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan	100 %	0
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan	Jumlah tanaman yang ditanam			100 %	0		78,758,800			Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan	100 %	0
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								**121,280,000**					**0**
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan	Jumlah Kampung Iklim Terbentuk			100 %	0		121,280,000			Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan	100 %	0
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**								**229,898,000**					**0**
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**								**229,898,000**					**0**
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan	Luas RTH Yang Terkelola dengan Baik			100 %	0		229,898,000			Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan	100 %	0
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**								**7,800,000**					**0**
2	**11**	**07**	**2.01**		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**								**7,800,000**					**0**
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Pesertase tutupan lahan hutan	Jumlah pertemuan MHA/kearifan lokal yang difasilitasi			100 %	0		7,800,000			Pesertase tutupan lahan hutan	100 %	0
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								**75,200,000**					**0**
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**75,200,000**					**0**
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sekolah Adiwiyata (Akumulasi)			100 %	0		75,200,000			Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	0
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								**97,360,000**					**0**
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**97,360,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan	Jumlah Sekolah Adiwiyata (Akumulasi)			100 %	0		97,360,000			Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan	100 %	0
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**								**58,084,318**					**0**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**								**58,084,318**					**0**
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha/Masyarakat Yang Taat Terhadap Peraturan Perundangan	Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Dimediasi Sesuai Standar			100 %	0		24,160,000			Persentase Peningkatan Pelaku Usaha/Masyarakat Yang Taat Terhadap Peraturan Perundangan	100 %	0
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha/Masyarakat Yang Taat Terhadap Peraturan Perundangan	Jumlah Pelaku Usaha/Masyarakat Yang Taat Terhadap Peraturan Perundangan			100 %	0		33,924,318			Persentase Peningkatan Pelaku Usaha/Masyarakat Yang Taat Terhadap Peraturan Perundangan	100 %	0
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**								**10,755,514,000**					**0**
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**								**10,755,514,000**					**0**
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase Sampah yang Tertangani dengan baik	Jumlah Sampah yang terangkut		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		5,286,496,000			Persentase Sampah yang Tertangani dengan baik	100 %	0
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Sampah yang Tertangani dengan baik	Nilai pengoperasian TPA (minimal)			100 %	0		331,740,000			Persentase Sampah yang Tertangani dengan baik	100 %	0
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang Tertangani dengan baik	Jumlah Sarana dan prasarana Persampahan yang diadakan			100 %	0		5,137,278,000			Persentase Sampah yang Tertangani dengan baik	100 %	0
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								**4,672,152,000**					**0**
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**								**4,672,152,000**					**0**
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**								**1,031,856,000**					**0**
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Standar	Jumlah Gedung Terminal Yang Terintegrasi			100 %	0		850,832,000			Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Standar	100 %	0
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Standar	Jumlah Terminal Yang Direhabilitasi/ dipelihara			100 %	0		181,024,000			Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Standar	100 %	0
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**								**2,580,746,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Standar	Jumlah Kawasan Parkir Yang Terkelola dengan Baik			100 %	0		2,580,746,000			Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Standar	100 %	0
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**								**254,552,000**					**0**
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Standar	Jumlah Bukti Tanda Lulus yang Ditertibkan Sesuai Standar			100 %	0		30,000,000			Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Standar	100 %	0
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Standar	Jumlah Alat Pengujian Yang Baik			100 %	0		224,552,000			Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Standar	100 %	0
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**								**512,198,000**					**0**
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Standar	Jumlah Rambu & Fasilitas Perlengkapan Jalan Yang diadakah Jumlah Rambu & Fasilitas Perlengkapan Jalan Yang Dipelihara dengan Baik			100 %	0 0		512,198,000			Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Standar	100 %	0
2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**								**292,800,000**					**0**
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Standar	Jumlah Penertiban & Keamanan Lalu Lintas			100 %	0		292,800,000			Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Standar	100 %	0
												TOTAL	**23,845,950,716**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								**8,441,887,843**					**0**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**4,162,423,743**					**0**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**3,550,000**					**0**
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, RENJA, IKU, LPPD/LKPj & RENSTRA) yang dibuat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		3,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**2,599,106,743**					**0**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		2,595,556,743	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	12	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Keuangan SKPD (RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan dan Laporan Keuangan) yang dibuat		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		3,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**12**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**1,559,767,000**					**0**
2	12	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		1,934,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	12	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Jasa Layanan Telpon, Listrik dan Air yang dibayar		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		115,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	12	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jenis bahan pembersih/peralatan kebersihan kantor yang dibeli serta jumlah petugas/tenaga kebersihan kantor yang tersedia		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		55,219,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	12	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		126,266,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jenis barang cetakan yang tersedia dan jumlah bahan yang digandakan/diphotocopy		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		12,791,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	12	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah SKH/Majalah yang tersedia		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		3,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	12	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		15,855,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	12	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah OH perjalanan dinas yang dilakukan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		200,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	12	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		31,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	12	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		947,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	12	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Mobil dan R2 yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		50,091,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**								**1,779,521,000**					**0**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**								**1,779,521,000**					**0**
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Rata-rata dokumen kependudukan yang diselesaikan tepat waktu (pendaftaran)	Jumlah KTP-el yang diterbitkan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Hari kerja	0		1,779,521,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata dokumen kependudukan yang diselesaikan tepat waktu (pendaftaran)	1 Hari kerja	0
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**								**826,959,700**					**0**
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**								**826,959,700**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Rata-rata dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Data Akta Pencatatan Sipil yang di input dari Non SIAK ke SIAK		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		246,429,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan tepat waktu	100 %	0
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Rata-rata dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan & Akta Perceraian)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		580,530,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rata-rata dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan tepat waktu	100 %	0
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**								**1,531,697,400**					**0**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**								**401,629,900**					**0**
2	12	04	2.01	05	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Data Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi/SKPD	Jumlah Website yang dikelola dan Jumlah inovasi pelayanan yang dilaksanakan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		401,629,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Data Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi/SKPD	100 %	0
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan**								**1,102,627,500**					**0**
2	12	04	2.03	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting	Data Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi/SKPD	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		509,870,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Data Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi/SKPD	100 %	0
2	12	04	2.03	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Data Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi/SKPD	Jumlah Kantor Kecamatan yang terkoneksi dengan SIAK di Kabupaten		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		541,321,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Data Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi/SKPD	100 %	0
2	12	04	2.03	08	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Data Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi/SKPD	Jumlah peserta sosialisasi yang memahami tentang peraturan kependudukan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		51,436,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Data Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi/SKPD	100 %	0
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan**								**27,440,000**					**0**
2	12	04	2.04	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Data Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi/SKPD	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan Database Kependudukan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		27,440,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Data Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi/SKPD	100 %	0
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**								**141,286,000**					**0**
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**								**141,286,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Data Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi/SKPD	Jumlah laporan informasi kependudukan yang disusun berupa Buku Profil Perkembangan Kependudukan, Buku Induk Kependudukan dan Buku Agregat Kependudukan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		141,286,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Data Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi/SKPD	100 %	0
TOTAL													**8,441,887,843**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								**209,109,000,610**					**0**
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**3,075,030,426**					**0**
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**53,200,000**					**0**
2	13	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	% Dokumen laporan kinerja dan keuangan Jumlah Dokumen Renstra, renja, LAKIP,LKPJ/LPPD		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0		53,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**2,328,205,026**					**0**
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	% Dokumen laporan kinerja dan keuangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		2,328,205,026	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**13**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**693,625,400**					**0**
2	13	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Jasa Pengiriman Surat		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		47,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	13	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah rekening jasa komunikasi, air, listrik dan Internet		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		38,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	13	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		57,807,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	13	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	13	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bahan kebersihan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		22,453,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	13	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	13	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah alat tulis kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		32,652,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		30,122,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	13	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Komponen Listrik		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		2,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	13	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja aparatur			100 %	0		35,060,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	13	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Surat Kabar		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		2,880,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	13	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rutin dan insidentil non Program		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		44,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	13	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah OH Perjalanan Dinas		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		301,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	13	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		33,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**								**38,320,000**					**0**
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**								**38,320,000**					**0**
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk Jumlah kerjasama antar desa yang terbentuk		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0		38,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	100 %	0
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**								**205,127,694,184**					**0**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa**								**205,127,694,184**					**0**
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Persentasi Desa yang memiliki BUMDes yang aktif	Jumlah desa yang menyusun APBDes dan laporan keuangan Jumlah desa yang menyusun laporan aset desa		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0		201,250,737,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi Desa yang memiliki BUMDes yang aktif	100 %	0
2	13	04	2.01	05	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Persentasi Desa yang memiliki BUMDes yang aktif	Jumlah aparatur pemerintah desa yang terampil Jumlah desa yang difasilitasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0		266,055,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi Desa yang memiliki BUMDes yang aktif	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Persentasi Desa yang memiliki BUMDes yang aktif	Jumlah Pengelola BUMDesa yang punya keterampilan manajemen BUMDesa		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		44,656,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi Desa yang memiliki BUMDes yang aktif	100 %	0
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentasi Desa yang memiliki BUMDes yang aktif	Jumlah desa yang difasilitasi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		3,460,165,384	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi Desa yang memiliki BUMDes yang aktif	100 %	0
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Persentasi Desa yang memiliki BUMDes yang aktif	Jumlah desa yang berprestasi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		106,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi Desa yang memiliki BUMDes yang aktif	100 %	0
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**								**867,956,000**					**0**
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**867,956,000**					**0**
2	13	05	2.01	02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	% Posyantek yang Aktif	jumlah Kader Posyandu yang telah dibina Jumlah lembaga adat/ budaya desa yang telah dibina Jumlah pertemuan Pokjanal		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0 0		117,142,000			% Posyantek yang Aktif	100 %	0
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	% Posyantek yang Aktif	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah dibina Jumlah LPM yang telah dibina Jumlah PKK yang telah dibina Jumlah rapat koordinasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0 0 0		592,360,000			% Posyantek yang Aktif	100 %	0
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	% Posyantek yang Aktif	Jumlah BUMdesa yang terbentuk Jumlah Pengelola Pasar Desa yang terbentuk		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0		74,724,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% Posyantek yang Aktif	100 %	0
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	% Posyantek yang Aktif	Jumlah Lomba Inovasi Tepat Guna yang dilaksanakan dan diikuti Jumlah TTG yang masuk kriteria yang diikutsertakan dalam Gelar TTG Nasional		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0		83,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% Posyantek yang Aktif	100 %	0
												TOTAL	**209,109,000,610**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**7,341,728,691**					**0**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**3,126,393,955**					**0**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**41,067,500**					**0**
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ - LPPD)			100 %	0		27,217,500			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	16	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen (RKA, DPA dan Lap. Keu)			100 %	0		13,850,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**2,321,063,530**					**0**
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Publik			100 %	0		2,321,063,530			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**16**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**764,262,925**					**0**
2	16	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat			100 %	0		3,625,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	16	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah periode penyediaan jasa rekening air, listrik, telpon			100 %	0		145,200,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	16	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah perlengkapan yang dibeli			100 %	0		750,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	16	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan jasa kebersihan			100 %	0		45,043,125			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	16	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan yang dipelihara			100 %	0		18,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	16	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan ATK			100 %	0		34,929,600			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	16	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan			100 %	0		17,346,200			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	16	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.			100 %	0		4,179,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	16	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli			100 %	0		3,240,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	16	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		36,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	16	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah perjalanan dinas			100 %	0		387,850,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	16	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara			100 %	0		67,600,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								**2,512,100,736**					**0**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**2,512,100,736**					**0**
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase media informasi publik yang dikelola	Jumlah Data dan Informasi Pos dan Telekomunikasi yang dikelola (Data Tower Telekomunikasi, Jasa Titipan, TV Kabel dan Warnet, Radio Komunitas)			100 %	0		8,540,000			Persentase media informasi publik yang dikelola	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase media informasi publik yang dikelola	Jumlah Media yang Dikelola dalam Penyebarluasan Informasi (Radio dan Videotron)			100 %	0		98,500,000			Persentase media informasi publik yang dikelola	100 %	0
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Persentase media informasi publik yang dikelola	Jumlah berita daerah yang disusun sesuai standar			100 %	0		2,240,399,000			Persentase media informasi publik yang dikelola	100 %	0
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase media informasi publik yang dikelola	Jumlah SDM yang Paham Komunikasi dan Informasi Publik			100 %	0		14,012,500			Persentase media informasi publik yang dikelola	100 %	0
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase media informasi publik yang dikelola	Jumlah Jam Penyelenggaraan Siaran Radio Suara Murakata			100 %	0		150,649,236			Persentase media informasi publik yang dikelola	100 %	0
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**								**1,703,234,000**					**0**
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**1,703,234,000**					**0**
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Aplikasi yang dikembangkan	Jumlah kerjasama dengan instansi terkait tentang pengelolaan tata kelola E-Government			100 %	0		1,496,120,000			Persentase Aplikasi yang dikembangkan	100 %	0
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Aplikasi yang dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Web yang Dibangun dan Dikembangkan			100 %	0		141,114,000			Persentase Aplikasi yang dikembangkan	100 %	0
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Aplikasi yang dikembangkan	Jumlah SDM yang Terlatih Bidang TIK			100 %	0		66,000,000			Persentase Aplikasi yang dikembangkan	100 %	0
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								**58,900,000**					**0**
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**								**58,900,000**					**0**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**58,900,000**					**0**
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Item data statistik daerah yang disajikan	Jumlah Dokumen/Buku Data dan Statistik Sektoral Daerah			100 %	0		58,900,000			Persentase Item data statistik daerah yang disajikan	100 %	0
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								**76,872,000**					**0**
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								**76,872,000**					**0**
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**76,872,000**					**0**
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana infrastruktur yang standard	Jumlah SDM yang Terlatih Tentang Persandian			100 %	0		24,000,000			Persentase Sarana dan Prasarana infrastruktur yang standard	100 %	0
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Sarana dan Prasarana infrastruktur yang standard	Jumlah SOPD yang Yang Paham Tentang Keamanan Informasi dan Persandian			100 %	0		11,500,000			Persentase Sarana dan Prasarana infrastruktur yang standard	100 %	0
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana infrastruktur yang standard	Jumlah SOPD yang Yang Paham Tentang Keamanan Informasi dan Persandian			100 %	0		41,372,000			Persentase Sarana dan Prasarana infrastruktur yang standard	100 %	0
												TOTAL	**7,477,500,691**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.2.07.3.32.01.00 Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.3.32.01.00 Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								**779,786,000**					**0**
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**								**453,380,000**					**0**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**								**450,000,000**					**0**
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja terlatih yang bekerja/membuka lapangan usaha	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlatih dan Terampil			120 orang	0		450,000,000			Jumlah pencari kerja terlatih yang bekerja/membuka lapangan usaha	120 orang	0
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**								**3,380,000**					**0**
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah pencari kerja terlatih yang bekerja/membuka lapangan usaha	Jumlah perorangan/ Kelompok Usaha yang Dibina			120 orang	0		3,380,000			Jumlah pencari kerja terlatih yang bekerja/membuka lapangan usaha	120 orang	0
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**								**152,821,000**					**0**
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**								**152,821,000**					**0**
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah Kartu Tanda Pencari Kerja, Permintaan Tenaga Kerja, Pemanggilan Tenaga Kerja (AK1 - AK5) yang diterbitkan sesuai ketentuan			400 orang	0		152,821,000			Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	400 orang	0
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**								**173,585,000**					**0**
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**120,270,000**					**0**
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase tenaga kerja penerima upah yang menjadi peserta BPJS	Jumlah perusahaan yang membuat peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian Kerja Bersama (PKB)			100 %	0		15,800,000			Persentase tenaga kerja penerima upah yang menjadi peserta BPJS	100 %	0
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Persentase tenaga kerja penerima upah yang menjadi peserta BPJS	Jumlah perusahaan yang membuat peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian Kerja Bersama (PKB)			100 %	0		20,875,000			Persentase tenaga kerja penerima upah yang menjadi peserta BPJS	100 %	0
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja penerima upah yang menjadi peserta BPJS	Jumlah kepesertaan tenaga Kerja penerima upah yang menjadi peserta Jamsostek (BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan)			100 %	0		83,595,000			Persentase tenaga kerja penerima upah yang menjadi peserta BPJS	100 %	0
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**								**53,315,000**					**0**
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja penerima upah yang menjadi peserta BPJS	Jumlah kasus perselisihan Perburuhan/HI (PHI/PHK) yang difasilitasi dan ditangani			100 %	0		15,575,000			Persentase tenaga kerja penerima upah yang menjadi peserta BPJS	100 %	0
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja penerima upah yang menjadi peserta BPJS	Jumlah kasus perselisihan Perburuhan/HI (PHI/PHK) yang difasilitasi dan ditangani			100 %	0		37,740,000			Persentase tenaga kerja penerima upah yang menjadi peserta BPJS	100 %	0
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								**4,234,745,302**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.2.07.3.32.01.00 Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.3.32.01.00 Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**3,744,516,302**					**0**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**4,500,000**					**0**
2	18	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		4,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**2,923,688,102**					**0**
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		2,914,938,102			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	18	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		4,250,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	18	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		4,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**18**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**816,328,200**					**0**
2	18	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah jasa pengiriman surat			100 %	0		61,724,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	18	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Listrik,Air, Telepon dan Jaringan Internet			100 %	0		99,600,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	18	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan			100 %	0		60,814,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	18	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Bulan Penyedian ATK			100 %	0		67,069,300			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	18	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan			100 %	0		25,098,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	18	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.			100 %	0		5,304,400			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	18	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli			100 %	0		2,880,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	18	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		38,245,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	18	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah OH Perjalanan Dinas			100 %	0		133,340,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	18	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor			100 %	0		84,053,500			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	18	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase gedung kantor yang dipelihara			100 %	0		186,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	18	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Kendaraan Operasional			100 %	0		40,200,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	18	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan yang dipelihara			100 %	0		12,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**								**14,170,000**					**0**
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**								**14,170,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.2.07.3.32.01.00 Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.3.32.01.00 Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang berinvestasi	Jumlah Profil Potensi Unggulan Daerah Kabupaten HST			100 %	0		14,170,000			Jumlah Investor yang berinvestasi	100 %	0
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**								**84,343,000**					**0**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**								**84,343,000**					**0**
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berinvestasi	Jumlah Jenis Promosi Investasi Daerah (Pariwisata, Perdagangan, Properti, Pertanian)			100 %	0		50,255,000			Jumlah Investor yang berinvestasi	100 %	0
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang berinvestasi	Jumlah Investor yang dilayani melalui Sistem Pelayanan Perizinan Secara Elektronik			100 %	0		34,088,000			Jumlah Investor yang berinvestasi	100 %	0
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**								**285,464,000**					**0**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**								**285,464,000**					**0**
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kinerja Pelayanan Perizinan	Jumlah Perizinan yg diterbitkan sesuai standar			100 %	0		153,326,000			Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kinerja Pelayanan Perizinan	100 %	0
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kinerja Pelayanan Perizinan	Jumlah Pengaduan yg diselesaikan			100 %	0		132,138,000			Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kinerja Pelayanan Perizinan	100 %	0
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**								**106,252,000**					**0**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**106,252,000**					**0**
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kinerja Pelayanan Perizinan	Jumlah Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat			100 %	0		106,252,000			Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kinerja Pelayanan Perizinan	100 %	0
												TOTAL	**5,014,531,302**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								**7,583,946,039**					**0**
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**4,058,909,539**					**0**
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**19,625,000**					**0**
2	19	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Timur	100 %	0		13,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	19	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Timur	100 %	0		5,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**2,238,250,039**					**0**
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Timur	100 %	0		2,232,750,039	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	19	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Timur	100 %	0		5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**19**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**1,801,034,500**					**0**
2	19	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah jasa pengiriman surat		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Timur	100 %	0		55,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	19	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Timur	100 %	0		112,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	19	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Timur	100 %	0		350,977,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	19	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan ATK		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Timur	100 %	0		31,678,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	19	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Timur	100 %	0		27,440,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	19	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Timur	100 %	0		3,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	19	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Timur	100 %	0		2,880,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	19	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Timur	100 %	0		23,450,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	19	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah OH Perjalanan Dinas		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Timur	100 %	0		1,082,420,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	19	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Timur	100 %	0		67,750,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	19	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah mobil/R2 yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Timur	100 %	0		36,599,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	19	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Barabai Timur	100 %	0		7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**								**872,986,500**					**0**
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**								**163,761,500**					**0**
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		163,761,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase organisasi pemuda yang aktif	100 %	0
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**709,225,000**					**0**
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Jumlah peserta paskibraka yang terampil Jumlah peserta pemuda yang terampil		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0		709,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase organisasi pemuda yang aktif	100 %	0
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**								**2,527,050,000**					**0**
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**78,220,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase nomor cabang olahraga pelajar dan Olahraga Masyarakat yang meraih medali pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Prasarana dan Sarana olahraga yang dipelihara sesuai standar		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		78,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase nomor cabang olahraga pelajar dan Olahraga Masyarakat yang meraih medali pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	0
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**317,475,000**					**0**
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase nomor cabang olahraga pelajar dan Olahraga Masyarakat yang meraih medali pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah kompetisi yang dilaksanakan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		317,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase nomor cabang olahraga pelajar dan Olahraga Masyarakat yang meraih medali pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	0
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**								**1,006,355,000**					**0**
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Persentase nomor cabang olahraga pelajar dan Olahraga Masyarakat yang meraih medali pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah atlet yang terbina untuk mengikuti kompetisi olahraga		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		939,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase nomor cabang olahraga pelajar dan Olahraga Masyarakat yang meraih medali pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	0
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Persentase nomor cabang olahraga pelajar dan Olahraga Masyarakat yang meraih medali pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah atlet yang terbina untuk mengikuti kompetisi olahraga		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		42,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase nomor cabang olahraga pelajar dan Olahraga Masyarakat yang meraih medali pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	0
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase nomor cabang olahraga pelajar dan Olahraga Masyarakat yang meraih medali pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah atlet yang terbina untuk mengikuti kompetisi olahraga		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase nomor cabang olahraga pelajar dan Olahraga Masyarakat yang meraih medali pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	0
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**								**1,125,000,000**					**0**
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Persentase nomor cabang olahraga pelajar dan Olahraga Masyarakat yang meraih medali pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah atlet yang terbina untuk mengikuti kompetisi olahraga		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		1,125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase nomor cabang olahraga pelajar dan Olahraga Masyarakat yang meraih medali pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	0
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**								**125,000,000**					**0**
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**								**125,000,000**					**0**
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase organisasi pemuda yang aktif	100 %	0
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								**1,548,804,000**					**0**
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**								**93,800,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**								**93,800,000**					**0**
3	26	02	2.03	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang dipasarkan	Jumlah Prasarana dan Sarana yang sesuai Sapta Pesona		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		93,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Destinasi Pariwisata yang dipasarkan	100 %	0
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**								**645,000,000**					**0**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**								**645,000,000**					**0**
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang dipasarkan	Jumlah Event Promosi Pariwisata yang diikuti Jumlah Event Promosi Pariwisata yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0		645,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Destinasi Pariwisata yang dipasarkan	100 %	0
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**								**810,004,000**					**0**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**								**810,004,000**					**0**
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Prosentase Percepatan Pembangunan Pariwisata berbasis masyarakat	Jumlah Event Promosi Pariwisata yang dilaksanakan Jumlah Peserta yang dapat Memahami Min 75% di Bidang Jasa Usaha Kepariwisataan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0		810,004,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - Dana Yanpar		Prosentase Percepatan Pembangunan Pariwisata berbasis masyarakat	100 %	0
												TOTAL	**9,132,750,039**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								**2,855,175,448**					**0**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**2,559,698,948**					**0**
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6,650,000**					**0**
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja			100 %	0		6,650,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**2,249,306,148**					**0**
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja			100 %	0		2,238,116,148			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	23	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Terlaksananya penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan			100 %	0		11,190,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**23**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**303,742,800**					**0**
2	23	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat			100 %	0		210,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	23	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Penyediaan jasa telepon, air, listrik dan internet			100 %	0		2,100,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	23	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Penyediaan jasa kebersihan			100 %	0		42,153,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	23	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Terpeliharanya peralatan kantor			100 %	0		6,200,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	23	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Penyediaan alat tulis kantor			100 %	0		5,837,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	23	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			100 %	0		7,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	23	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			100 %	0		5,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	23	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor			100 %	0		47,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	23	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Kehadiran rapat koordinasi dan konsultasi			100 %	0		6,230,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	23	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Kehadiran rapat koordinasi dan konsultasi			100 %	0		84,142,800			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	23	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara			100 %	0		46,270,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	23	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Gedung kantor yang dipelihara			100 %	0		51,600,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**								**295,476,500**					**0**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**75,624,000**					**0**
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Peningkatan Pengunjung Menjadi anggota	Jumlah perpustakaan yang aktif			100 %	0		55,139,000			Persentasi Peningkatan Pengunjung Menjadi anggota	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Persentasi Peningkatan Pengunjung Menjadi anggota	Jumlah Perpustakaan Desa yang baik tiap tahun			100 %	0		20,485,000			Persentasi Peningkatan Pengunjung Menjadi anggota	100 %	0
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**219,852,500**					**0**
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Peningkatan Pengunjung Menjadi anggota	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka Jumlah koleksi yang siap dilayankan			100 %	0 0		63,422,500			Persentasi Peningkatan Pengunjung Menjadi anggota	100 %	0
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Persentasi Peningkatan Pengunjung Menjadi anggota	Jenis Publikasi dan Sosialisasi Jumlah Layanan perpustakaan			100 %	0 0		156,430,000			Persentasi Peningkatan Pengunjung Menjadi anggota	100 %	0
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								**96,380,000**					**0**
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**								**96,380,000**					**0**
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**								**5,000,000**					**0**
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase peningkatan khasanah arsip statis di LKD	Jumlah PD yang melakukan pendataan dan penataan arsip			100 %	0		5,000,000			Persentase peningkatan khasanah arsip statis di LKD	100 %	0
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**								**91,380,000**					**0**
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Persentase peningkatan khasanah arsip statis di LKD	Jumlah PD yang melakukan pengelolaan arsip dinamis			100 %	0		91,380,000			Persentase peningkatan khasanah arsip statis di LKD	100 %	0
												TOTAL	**2,951,555,448**					**0**

| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **2,951,555,448** | | | | | **0** |

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**29,869,342,649**					**0**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**18,698,236,948**					**0**
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**20,450,000**					**0**
3	27	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen yang Disusun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		20,450,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**16,442,224,648**					**0**
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen yang Disusun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		16,431,774,648			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	27	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen (RKA, DPA dan Laporan Keungan)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		10,450,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	**27**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**2,235,562,300**					**0**
3	27	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Jasa Pengiriman Surat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		273,540,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	27	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		122,100,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	27	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase Penyediaan Jasa Kebersihan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		660,286,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	27	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Bulan Penyediaan ATK		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		117,224,300			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	27	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		43,230,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	27	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Lintrik/Penerangan dan Bangunan Kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		22,422,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Bahan Bacaan dan Buku yang Dibeli		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		10,980,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	27	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang Disediakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		110,980,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	27	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah OH Perjalanan Dinas		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		683,600,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	27	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Unit yang Dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		48,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	27	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		105,200,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	27	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		38,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**2,327,487,834**					**0**
3	**27**	**02**	**2.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**2,327,487,834**					**0**
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Produktivitas TPH	Jumlah Bantuan Benih TPH yang Disalurkan (Benih Sayuran) Jumlah Bibit Perkebunan yang Disalurkan Jumlah Bibit Ternak yang Disalurkan Jumlah Pakan Ternak dan Pengolahan Pakan Ternak		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0 0 0		1,956,448,500			Produktivitas TPH	100 %	0
3	27	02	2.05	02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Produktivitas TPH	Jumlah Bantuan Saprodi yang Disalurkan Kepada Penangkar Jumlah Bibit dan Benih Bersertifikat yang Dihasilkan dari UPTD		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0		371,039,334			Produktivitas TPH	100 %	0
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**4,313,304,501**					**0**
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**								**708,135,000**					**0**
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	% Produktivitas Perkebunan	Jumlah luas lahan sawah yang dioptimalkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		708,135,000			% Produktivitas Perkebunan	100 %	0
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**								**3,605,169,501**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	% Produktivitas Perkebunan	Jumlah Alat Mesin Perkebunan Jumlah Alat Mesin TPH yang disalurkan Jumlah Alat Pengolahan dan Pengemasan Produk Pertanian Jumlah Infrastruktur TPH yang Dibangun / Direhabilitasi Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi / Pengadaan Sarana Produksi Peternakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0 0 0 0		3,605,169,501			% Produktivitas Perkebunan	100 %	0
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**								**300,345,600**					**0**
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**300,345,600**					**0**
3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	% Penurunan Angka Kematian Ternak	Jumlah Pengendalian Penyakit Hewan Menular		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		300,345,600			% Penurunan Angka Kematian Ternak	100 %	0
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**775,806,667**					**0**
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**								**775,806,667**					**0**
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Produktivitas TPH	Jumlah Luas Areal Penanganan OPT Jumlah Luas Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0		687,230,000			Produktivitas TPH	100 %	0
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Produktivitas TPH	Jumlah Usaha Tani yang Berasuransi			100 %	0		88,576,667			Produktivitas TPH	100 %	0
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**								**317,900,000**					**0**
3	**27**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**317,900,000**					**0**
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Produktivitas TPH	Jumlah Serapan Pupuk Bersubsidi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		317,900,000			Produktivitas TPH	100 %	0
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**								**3,136,261,099**					**0**
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**								**3,136,261,099**					**0**
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	% Peningkatan Skor Kinerja Penyuluh Pertanian	Jumlah Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh yang Difasilitasi Terlaksananya Sekolah Lapang (SL)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0		2,983,096,099			% Peningkatan Skor Kinerja Penyuluh Pertanian	100 %	0
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	% Peningkatan Skor Kinerja Penyuluh Pertanian	Jumlah Kelompok yang Dilatih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		153,165,000			% Peningkatan Skor Kinerja Penyuluh Pertanian	100 %	0
												TOTAL	**29,869,342,649**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**330,980,000**					**0**
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**								**64,190,000**					**0**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**64,190,000**					**0**
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi aktif	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		64,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah koperasi aktif	100 %	0
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**								**208,790,000**					**0**
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**208,790,000**					**0**
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah koperasi aktif	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		208,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah koperasi aktif	100 %	0
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**								**58,000,000**					**0**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**								**58,000,000**					**0**
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah MoU dengan distributor yang dilaksanakan	Jumlah pengusaha UKM yang mengikuti sosialisasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		58,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah MoU dengan distributor yang dilaksanakan	100 %	0
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**8,069,836,360**					**0**
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**5,962,726,360**					**0**
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**3,993,389,460**					**0**
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		3,976,222,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	30	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		9,916,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	30	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		7,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	**30**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**1,969,336,900**					**0**
3	30	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentasi penyediaan jasa surat menyurat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		952,352,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	30	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan pembayaran rekening air, listrik, telpon dan internit		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		152,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	30	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		94,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	30	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentasi penyediaan jasa kebersihan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		28,598,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	30	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan ATK		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		41,999,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	30	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		20,783,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	30	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		7,561,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	30	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		51,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	30	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	30	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK makan minum harian, Jumlah HOK Rapat dan Tamu		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		47,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	30	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah perjalanan dinas		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		437,054,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	30	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		99,788,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	30	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**								**1,542,350,000**					**0**
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**								**1,250,000,000**					**0**
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Sehat	Jumlah pasar yang dibangun dan direhabilitasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		1,250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pasar Sehat	100 %	0
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**								**292,350,000**					**0**
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Sehat	Jumlah pedagang yang paham terhadap tata tertib pasar		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		292,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pasar Sehat	100 %	0
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**								**49,500,000**					**0**
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**								**49,500,000**					**0**
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentasi kebutuhan pokok dengan harga yang stabil	Jumlah pelaksanaan Monitoring Harga barang/produk		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		49,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi kebutuhan pokok dengan harga yang stabil	100 %	0
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**42,190,000**					**0**
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**								**42,190,000**					**0**
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	% pedagang yang taat terhadap aturan	Jumlah rekomendasi Tera ulang yang diterbitkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		7,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% pedagang yang taat terhadap aturan	100 %	0
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	% pedagang yang taat terhadap aturan	Jumlah peserta sosialisasi pedagang pengguna UTTP		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		34,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% pedagang yang taat terhadap aturan	100 %	0
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**								**473,070,000**					**0**
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**								**473,070,000**					**0**
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah omset pameran	Jumlah pelaksanaan Monitoring Harga barang/produk		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		473,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah omset pameran	100 %	0
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								**1,720,301,000**					**0**
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**								**1,639,696,000**					**0**
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**								**1,639,696,000**					**0**
3	31	02	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM baru	Pengrajin yang dilatih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		120,929,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah IKM baru	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM baru	Pengrajin yang dilatih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		1,518,766,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah IKM baru	100 %	0
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**								**80,605,000**					**0**
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah**								**80,605,000**					**0**
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pertumbuhan volume produk IKM	Pengrajin yang dilatih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		22,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan volume produk IKM	100 %	0
3	31	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Persentase pertumbuhan volume produk IKM	Jumlah produk yang mendapat sertifikat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		58,335,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan volume produk IKM	100 %	0
												TOTAL	**10,121,117,360**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**47,483,870,520**					**0**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**30,777,862,002**					**0**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**84,614,000**					**0**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		34,338,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		50,276,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**11,718,581,228**					**0**
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan			100 %	0		11,707,881,228			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		10,700,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**18,703,166,774**					**0**
4	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan layanan jasa surat menyurat			100 %	0		138,778,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet			100 %	0		8,726,550,674			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa			100 %	0		680,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan jasa, alat dan bahan kebersihan			100 %	0		625,347,600			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan ATK			100 %	0		217,800,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan			100 %	0		73,945,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan yang dibeli			100 %	0		487,850,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman			100 %	0		104,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan layanan perjalanan dinas			100 %	0		1,811,414,500			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah rumjab/dinas yang tersedia perlengkapannya			100 %	0		1,234,100,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah gedung kantor yang diadakan peralatannya			100 %	0		251,700,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	01	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah unit yang dipelihara			100 %	0		311,300,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun			100 %	0		2,373,850,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah mobil yang dipelihara			100 %	0		788,700,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah mobil/kendaraan roda 2 (dua) yang dipelihara			100 %	0		854,331,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	01	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan yang dipelihara			100 %	0		23,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	**01**	**01**	**2.04**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**								**271,500,000**					**0**
4	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan sesuai ketentuan			100 %	0		26,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bahan kain untuk pakaian khusus			100 %	0		245,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**6,772,492,000**					**0**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**								**527,508,000**					**0**
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	Jumlah koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan hari besar nasional dan daerah			100 %	0		85,000,000			Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	100 %	0
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran monev penyelenggaraan PATEN sesusi standard Jumlah segmen batas desa yang dilacak			100 %	0 0		297,068,000			Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	100 %	0
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi data LKPJ			100 %	0		145,440,000			Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	100 %	0
4	**01**	**02**	**2.02**		**Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**								**5,877,066,000**					**0**
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	Jumlah kegiatan syiar-syiar keagamaan yang dilaksanakan Jumlah penerima bantuan hibah yang dimonitoring Jumlah pertemuan bina mental keagamaan yang dilaksanakan			100 %	0 0 0		4,571,536,000			Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	100 %	0
4	01	02	2.02	03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	Jumlah koordinasi kesehatan dan olahraga yang difasilitasi dengan baik Jumlah mahasiswa/santri yang menerima bantuan beasiswa			100 %	0 0		1,305,530,000			Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	100 %	0
4	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah**								**287,398,000**					**0**
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	Jumlah Laporan RANHAM yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Jumlah pelayanan telaahan hukum yang diberikan sesuai standar			100 %	0 0		85,063,000			Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	100 %	0
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	Jumlah kasus/sengketa/perkara hukum yang ditangani			100 %	0		153,495,000			Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	100 %	0
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	Jumlah dokumentasi dan informasi produk hukum daerah yang tersedia secara elektronik			100 %	0		48,840,000			Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	100 %	0
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**								**80,520,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	Persentase dokumen kerjasama daerah yang diveryfikasi			100 %	0		80,520,000			Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	100 %	0
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**1,666,613,750**					**0**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**								**614,690,000**					**0**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase regulasi BUMD yang dibuat	Jumlah draft regulasi BUMD			100 %	0		151,200,000			Persentase regulasi BUMD yang dibuat	100 %	0
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase regulasi BUMD yang dibuat	Frekuensi rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan bidang ekonomi Jumlah SKPD yang mengumpulkan bahan penyusunan standar satuan harga Kab.HST sesuai kebutuhan SKPD			100 %	0 0		463,490,000			Persentase regulasi BUMD yang dibuat	100 %	0
4	**01**	**03**	**2.02**		**Administrasi Pembangunan**								**287,910,000**					**0**
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase regulasi BUMD yang dibuat	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi			100 %	0		287,910,000			Persentase regulasi BUMD yang dibuat	100 %	0
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengadaan Barang dan Jasa**								**594,560,000**					**0**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase regulasi BUMD yang dibuat	Jumlah Perangkat Daerah yang didukung pada pengelolaan pengadaan barang/jasa			100 %	0		34,060,000			Persentase regulasi BUMD yang dibuat	100 %	0
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase regulasi BUMD yang dibuat	Jumlah bulan kerja berfungsinya SPSE dan layanannya			100 %	0		402,485,000			Persentase regulasi BUMD yang dibuat	100 %	0
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase regulasi BUMD yang dibuat	Jumlah peserta sosialisasi/workshop sistem pengadaan barang/jasa			100 %	0		158,015,000			Persentase regulasi BUMD yang dibuat	100 %	0
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam**								**169,453,750**					**0**
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase regulasi BUMD yang dibuat	Jumlah pelaku usaha di bidang pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C) yang menjadi peserta sosialisasi			100 %	0		169,453,750			Persentase regulasi BUMD yang dibuat	100 %	0
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM**								**8,266,902,768**					**0**
4	**01**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Administrasi Umum**								**4,128,476,768**					**0**
4	01	04	2.01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Perangkat daerah yang memiliki dokumen Standar Pelayanan Publik	Jumlah cakupan pelayanan administrasi pimpinan sesuai aturan			100 %	0		578,668,968			Persentase Perangkat daerah yang memiliki dokumen Standar Pelayanan Publik	100 %	0
4	01	04	2.01	02	Pengelolaan Perlengkapan	Persentase Perangkat daerah yang memiliki dokumen Standar Pelayanan Publik	Jumlah sarana dan prasarana rumah tangga pimpinan yang dipelihara dengan baik			100 %	0		406,560,000			Persentase Perangkat daerah yang memiliki dokumen Standar Pelayanan Publik	100 %	0
4	01	04	2.01	03	Pengelolaan Rumah Tangga	Persentase Perangkat daerah yang memiliki dokumen Standar Pelayanan Publik	Jumlah cakupan pelayanan rumah tangga pimpinan dan perangkat daerah yang dilayani dengan baik			100 %	0		3,143,247,800			Persentase Perangkat daerah yang memiliki dokumen Standar Pelayanan Publik	100 %	0
4	**01**	**04**	**2.02**		**Penataan Organisasi**								**771,931,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	04	2.02	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat daerah yang memiliki dokumen Standar Pelayanan Publik	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi penerapan analisis jabatan Jumlah produk hukum daerah tentang kelembagaan			100 %	0 0		281,801,000			Persentase Perangkat daerah yang memiliki dokumen Standar Pelayanan Publik	100 %	0
4	01	04	2.02	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Perangkat daerah yang memiliki dokumen Standar Pelayanan Publik	Jumlah Perangkat daerah yang dibina dalam penerapan Standar Pelayanan Publik			100 %	0		154,570,000			Persentase Perangkat daerah yang memiliki dokumen Standar Pelayanan Publik	100 %	0
4	01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat daerah yang memiliki dokumen Standar Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Kinerja Pemda yang sesuai aturan			100 %	0		335,560,000			Persentase Perangkat daerah yang memiliki dokumen Standar Pelayanan Publik	100 %	0
4	**01**	**04**	**2.03**		**Protokol dan Komunikasi Pimpinan**								**3,366,495,000**					**0**
4	01	04	2.03	01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Perangkat daerah yang memiliki dokumen Standar Pelayanan Publik	Jumlah cakupan pelayan keprotokolan sesuai aturan			100 %	0		2,685,140,000			Persentase Perangkat daerah yang memiliki dokumen Standar Pelayanan Publik	100 %	0
4	01	04	2.03	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Perangkat daerah yang memiliki dokumen Standar Pelayanan Publik	Jumlah cakupan pelayanan administrasi pimpinan sesuai aturan			100 %	0		681,355,000			Persentase Perangkat daerah yang memiliki dokumen Standar Pelayanan Publik	100 %	0
												TOTAL	**47,483,870,520**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**								**37,637,985,641**					**0**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**6,068,754,374**					**0**
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**2,710,218,807**					**0**
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Yang Disusun			100 %	0		2,663,892,207			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	02	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Yang Disusun			100 %	0		28,926,600			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	02	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Yang Disusun			100 %	0		8,700,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	02	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Yang Disusun			100 %	0		8,700,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**3,223,735,567**					**0**
4	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah jasa pengiriman surat			100 %	0		62,458,400			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Periode bulan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik			100 %	0		156,600,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia			100 %	0		61,328,400			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan			100 %	0		56,039,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan ATK			100 %	0		50,963,900			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah barang cetakan/penggandaan			100 %	0		96,814,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan			100 %	0		13,721,667			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	02	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah unit peralatan yang dibeli			100 %	0		74,550,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli			100 %	0		46,610,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang tersedia			100 %	0		98,540,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah OH Perjalanan Dinas			100 %	0		1,907,201,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah unit yang dipelihara			100 %	0		101,488,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	02	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Mobil yang dipelihara			100 %	0		354,278,400			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Mobil/R2 yang dipelihara			100 %	0		112,142,800			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan yang dipelihara			100 %	0		31,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	**02**	**01**	**2.04**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**								**134,800,000**					**0**
4	02	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase pemenuhan penunjang disiplin aparatur			100 %	0		89,800,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	02	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase pemenuhan penunjang disiplin aparatur			100 %	0		45,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
4	**02**	**02**			**PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN**								**14,701,434,267**					**0**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Layanan Administrasi DPRD**								**782,394,267**					**0**
4	02	02	2.01	01	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum dan Kehumasan	Jumlah Tenaga Kontrak Teknis dan Administrasi			100 %	0		94,464,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Umum dan Kehumasan	100 %	0
4	02	02	2.01	02	Fasilitasi Rapat DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum dan Kehumasan	Jumlah Rapat Paripurna dan Alat Kelengkapan DPRD yang dilayani Jumlah Rapat-Rapat Raperda yang dilayani			100 %	0 0		199,920,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Umum dan Kehumasan	100 %	0
4	02	02	2.01	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum dan Kehumasan	Jumlah Peralatan yang dipelihara Jumlah perlengkapan yang dibeli Jumlah rumah jabatan yang terpelihara Jumlah unit peralatan yang dibeli			100 %	0 0 0 0		488,010,267			Indeks Kepuasan Pelayanan Umum dan Kehumasan	100 %	0
4	**02**	**02**	**2.02**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**								**13,919,040,000**					**0**
4	02	02	2.02	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum dan Kehumasan	Jumlah Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani			100 %	0		13,424,794,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Umum dan Kehumasan	100 %	0
4	02	02	2.02	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum dan Kehumasan	Prosentase pemenuhan penunjang disiplin aparatur			100 %	0		231,860,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Umum dan Kehumasan	100 %	0
4	02	02	2.02	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum dan Kehumasan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani pemeriksaan kesehatan			100 %	0		262,386,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Umum dan Kehumasan	100 %	0
4	**02**	**03**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**								**16,867,797,000**					**0**
4	**02**	**03**	**2.01**		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**								**4,599,941,000**					**0**
4	02	03	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	Jumlah Rancangan Keputusan Yang Difasilitasi			100 %	0		3,265,441,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	100 %	0
4	02	03	2.01	04	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	Jumlah Naskah Akademis/rancangan Perda Inisiatif DPRD			100 %	0		1,334,500,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	100 %	0
4	**02**	**03**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**								**201,070,000**					**0**
4	02	03	2.02	01	pembahasan KUA dan PPAS	Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	Jumlah Rapat Paripurna dan Alat Kelengkapan DPRD yang dilayani			100 %	0		34,840,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	100 %	0
4	02	03	2.02	02	pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	Jumlah Rapat Paripurna dan Alat Kelengkapan DPRD yang dilayani			100 %	0		34,470,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	100 %	0
4	02	03	2.02	03	Pembahasan APBD	Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	Jumlah Rapat Paripurna dan Alat Kelengkapan DPRD yang dilayani			100 %	0		42,520,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	100 %	0
4	02	03	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	Jumlah Rapat Paripurna dan Alat Kelengkapan DPRD yang dilayani			100 %	0		42,120,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4	02	03	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	Jumlah Rapat Paripurna dan Alat Kelengkapan DPRD yang dilayani			100 %	0		47,120,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	100 %	0
4	**02**	**03**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**								**1,920,613,000**					**0**
4	02	03	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani			100 %	0		1,714,365,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	100 %	0
4	02	03	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	Jumlah Tenaga Kontrak Teknis dan Administrasi			100 %	0		188,928,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	100 %	0
4	02	03	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	Jumlah hearing DPRD yang dilayani			100 %	0		17,320,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	100 %	0
4	**02**	**03**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**								**2,557,080,000**					**0**
4	02	03	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani			100 %	0		960,000,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	100 %	0
4	02	03	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	Jumlah Reses DPRD yang dilayani			100 %	0		1,597,080,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	100 %	0
4	**02**	**03**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**								**1,094,600,000**					**0**
4	02	03	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	Jumlah Materi informasi dan publikasi yang disebarkan			100 %	0		1,094,600,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	100 %	0
4	**02**	**03**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**								**6,494,493,000**					**0**
4	02	03	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	Jumlah Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani			100 %	0		5,112,825,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	100 %	0
4	02	03	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani			100 %	0		28,200,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	100 %	0
4	02	03	2.08	03	Pelaksanaan Undangan DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani			100 %	0		1,353,468,000			Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	100 %	0
												TOTAL	**37,637,985,641**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Barabai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Barabai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**14,263,395,571**					**0**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**6,144,205,071**					**0**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**14,450,000**					**0**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		2,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen (RKA, DPA dan Laporan Keuangan)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		12,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**5,456,189,339**					**0**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen (RKA, DPA dan Laporan Keuangan)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		5,436,439,339	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		18,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen (RKA, DPA dan Laporan Keuangan)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		1,075,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		475,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**673,565,732**					**0**
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Buku Cek Jumlah Materai, Perangko		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0 0		400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		36,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Kendaraan Roda 4 Jabatan Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0 0		24,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Barabai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Barabai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan Jumlah tenaga Kebersihan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0 0		21,243,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Macam Alat Tulis Kantor		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		19,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah barang Cetakan Jumlah Lembar Fotocopy		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0 0		9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Komponen Listrik		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		2,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		273,257,732	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Surat Kabar		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		1,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat Internal dan Pihak Luar		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah perlengkapan yang dibeli		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		111,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yg di pelihara Jumlah Tenaga Keamanan Kantor		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0 0		23,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**132,130,000**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**132,130,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Barabai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Barabai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	B indeks	0		132,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	B indeks	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**7,870,395,500**					**0**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**58,887,000**					**0**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		58,887,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**7,811,508,500**					**0**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah Pembangunn/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kelurahan Barabai Barat Jumlah Pembangunn/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kelurahan Barabai Darat Jumlah Pembangunn/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kelurahan Barabai Selatan Jumlah Pembangunn/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kelurahan Barabai Timur Jumlah Pembangunn/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kelurahan Barabai Utara Jumlah Pembangunn/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kelurahan Bukat			100 %	0 0 0 0 0 0		5,495,976,300			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Barabai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Barabai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang di Fasilitasi Kelurahan Barabai Barat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang di Fasilitasi Kelurahan Barabai Darat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang di Fasilitasi Kelurahan Barabai Selatan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang di Fasilitasi Kelurahan Barabai Timur Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang di Fasilitasi Kelurahan Barabai Utara Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang di Fasilitasi Kelurahan Bukat			100 %	0 0 0 0 0 0		2,315,532,200			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**22,800,000**					**0**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**22,800,000**					**0**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah pembinaan ttg Bidang Trantib		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		22,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**32,280,000**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**32,280,000**					**0**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahan umum yang diselesaikan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		32,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**61,585,000**					**0**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**61,585,000**					**0**
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah desa yg dapat melaksanakan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		61,585,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
												TOTAL	**14,263,395,571**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Barabai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Barabai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**14,263,395,571**					**0**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**6,144,205,071**					**0**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**14,450,000**					**0**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		2,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen (RKA, DPA dan Laporan Keuangan)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		12,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**5,456,189,339**					**0**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen (RKA, DPA dan Laporan Keuangan)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		5,436,439,339	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		18,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen (RKA, DPA dan Laporan Keuangan)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		1,075,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		475,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**673,565,732**					**0**
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Buku Cek Jumlah Materai, Perangko		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0 0		400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		36,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Kendaraan Roda 4 Jabatan Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0 0		24,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Barabai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Barabai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan Jumlah tenaga Kebersihan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0 0		21,243,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Macam Alat Tulis Kantor		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		19,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah barang Cetakan Jumlah Lembar Fotocopy		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0 0		9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Komponen Listrik		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		2,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		273,257,732	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Surat Kabar		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		1,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat Internal dan Pihak Luar		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah perlengkapan yang dibeli		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		111,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yg di pelihara Jumlah Tenaga Keamanan Kantor		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0 0		23,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**132,130,000**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**132,130,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Barabai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Barabai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	B indeks	0		132,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	B indeks	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**7,870,395,500**					**0**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**58,887,000**					**0**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		58,887,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**7,811,508,500**					**0**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah Pembangunn/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kelurahan Barabai Barat Jumlah Pembangunn/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kelurahan Barabai Darat Jumlah Pembangunn/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kelurahan Barabai Selatan Jumlah Pembangunn/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kelurahan Barabai Timur Jumlah Pembangunn/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kelurahan Barabai Utara Jumlah Pembangunn/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kelurahan Bukat			100 %	0 0 0 0 0 0		5,495,976,300			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Barabai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Barabai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang di Fasilitasi Kelurahan Barabai Barat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang di Fasilitasi Kelurahan Barabai Darat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang di Fasilitasi Kelurahan Barabai Selatan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang di Fasilitasi Kelurahan Barabai Timur Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang di Fasilitasi Kelurahan Barabai Utara Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang di Fasilitasi Kelurahan Bukat			100 %	0 0 0 0 0 0		2,315,532,200			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**22,800,000**					**0**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**22,800,000**					**0**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah pembinaan ttg Bidang Trantib		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		22,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**32,280,000**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**32,280,000**					**0**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahan umum yang diselesaikan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		32,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**61,585,000**					**0**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**61,585,000**					**0**
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah desa yg dapat melaksanakan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		61,585,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
												TOTAL	**14,263,395,571**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Pandawan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Pandawan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,797,354,090**					**0**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**2,232,234,090**					**0**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**20,050,000**					**0**
7	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD) Jumlah dokumen (RKA, DPA dan Lap. Keu)			100 %	0 0		20,050,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**1,947,354,090**					**0**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah aparatur			100 %	0		1,947,354,090			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**264,830,000**					**0**
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik dan air			100 %	0		28,800,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Jenis Sewa Sarana Prasarana Kegiatan Perkantoran			100 %	0		5,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			100 %	0		22,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan jasa kebersihan			100 %	0		23,330,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan ATK			100 %	0		8,673,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan			100 %	0		7,777,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor			100 %	0		3,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah surat kabar			100 %	0		3,600,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		21,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah OH Perjalanan Dinas			100 %	0		112,600,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara			100 %	0		20,050,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah perlengkapan yang dipelihara			100 %	0		1,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor			100 %	0		3,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah unit yang dipelihara			100 %	0		3,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**119,910,000**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**119,910,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Pandawan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Pandawan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan yang sesuai standar			B indeks	0		119,910,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	B indeks	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**97,720,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**97,720,000**					**0**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah jenis kegiatan/event keagamaan, olahraga, dan kepemudaan yang difasilitasi Jumlah organisasi PKK yang aktif			100 %	0 0		97,720,000			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**70,880,000**					**0**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**70,880,000**					**0**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahan trantib yang diselesaikan Jumlah peserta Sosialisasi Bidang Trantib			100 %	0 0		70,880,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**160,195,000**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**160,195,000**					**0**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Jumlah Permasalahan Pemerintahan umum yang diselesaikan Jumlah Peserta (Masyarakat/ Perangkat dan Lembaga Desa) yg mengikuti Sosialisasi Bidang Pemerintahan			100 %	0 0 0		160,195,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**116,415,000**					**0**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**116,415,000**					**0**
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah desa yang dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa			100 %	0		116,415,000			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
												TOTAL	**2,797,354,090**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Labuan Amas Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Labuan Amas Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**4,595,958,694**					**0**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**2,637,688,026**					**0**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**2,230,638,689**					**0**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN			100 %	0		2,222,238,689			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja			100 %	0		8,400,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**407,049,337**					**0**
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat			100 %	0		41,196,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, listrik, dan internet			100 %	0		18,300,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah perlengkapan yang dipelihara			100 %	0		8,503,334			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		800,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan jasa kebersihan			100 %	0		29,788,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan yang dipelihara			100 %	0		9,816,667			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan alat tulis kantor			100 %	0		15,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan			100 %	0		16,153,334			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			100 %	0		6,350,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bahan bacaan dan buku			100 %	0		2,920,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		41,303,334			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah penyediaan perjalanan dinas sesuai keperluan			100 %	0		85,100,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah unit peralatan yang dibeli			100 %	0		29,363,334			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Unit yang dipelihara			100 %	0		16,373,334			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah unit yang dipelihara			100 %	0		36,562,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara			100 %	0		49,520,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**249,854,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Labuan Amas Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Labuan Amas Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**249,854,000**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan yang diterbitkan sesuai standar			B indeks	0		249,854,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	B indeks	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,466,320,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**136,320,000**					**0**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi			100 %	0		136,320,000			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,330,000,000**					**0**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan sarana kelurahan			100 %	0		989,680,000			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi			100 %	0		340,320,000			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**55,046,668**					**0**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**55,046,668**					**0**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi bidang trantib			100 %	0		55,046,668			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**93,590,000**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**93,590,000**					**0**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan kecamatan			100 %	0		93,590,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**93,460,000**					**0**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**93,460,000**					**0**
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah desa yang dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa			100 %	0		93,460,000			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
												TOTAL	**4,595,958,694**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Labuan Amas Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Labuan Amas Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,614,045,670**					**0**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**2,007,930,670**					**0**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**1,627,150,670**					**0**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen (RKA, DPA, dan Laporan Keuangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		1,614,045,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan dan kinerja SKPD		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		13,105,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**360,080,000**					**0**
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase ketersediaan benda dan tenaga surat menyurat			100 %	0		44,400,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase ketersediaan air, listrik dan internet			100 %	0		26,760,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase terpeliharanya kebersihan kantor			100 %	0		26,450,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan jasa perbaikan peralatan/perlengkapan kerja			100 %	0		9,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase ketersediaan alat tulis kantor			100 %	0		15,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan			100 %	0		10,580,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase ketersediaan instalasi listrik dan penerangan kantor			100 %	0		7,390,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			100 %	0		3,650,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase ketersediaan makanan dan minuman kantor			100 %	0		22,620,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			100 %	0		91,230,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Terlaksananya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan rumah jabatan			100 %	0		29,250,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Terlaksananya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan kantor			100 %	0		42,850,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			100 %	0		30,900,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Labuan Amas Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Labuan Amas Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	**01**	**01**	**2.04**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**								**20,700,000**					**0**
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah pakaian dinas			100 %	0		20,700,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**250,000,000**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**250,000,000**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar			B indeks	0		250,000,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	B indeks	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**103,400,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**103,400,000**					**0**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah jenis kegiatan/event keagamaan, olahraga, dan kepemudaan yang difasilitasi			100 %	0		103,400,000			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**34,550,000**					**0**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**34,550,000**					**0**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahan trantib yang diselesaikan (konflik perikanan (setrum, dll), konflik proses pembangunan (premanisme), konflik keagamaan (aliran menyimpang), konflik sosial (penyahagunaan napza), potensi bencana)			100 %	0		34,550,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**100,415,000**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**100,415,000**					**0**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahan umum yang diselesaikan			100 %	0		100,415,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**117,750,000**					**0**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**117,750,000**					**0**
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah desa yang dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa			100 %	0		117,750,000			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
												TOTAL	**2,614,045,670**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Haruyan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Haruyan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,389,014,335**					**0**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**2,073,144,335**					**0**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**1,595,701,839**					**0**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK Yang Disediakan			100 %	0		1,587,801,839			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Laporan Keuangan dan Kinerja			100 %	0		7,900,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**477,442,496**					**0**
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Materai			100 %	0		1,400,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jasa Listrik, Air dan Internet Yang Disediakan			100 %	0		21,255,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi			100 %	0		130,728,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor			100 %	0		25,267,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan			100 %	0		9,030,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK Yang Disediakan			100 %	0		36,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah OH Perjalanan Dinas			100 %	0		114,556,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Perlengkapan Yang Dibeli			100 %	0		7,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Unit Peralatan Yang Dibeli			100 %	0		46,431,496			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Unit Yang Dipelihara			100 %	0		11,200,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			100 %	0		26,400,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			100 %	0		32,675,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Peralatan Yang Dipelihara			100 %	0		15,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**128,020,000**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**128,020,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Haruyan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Haruyan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan non perizinan dan perizinan yang sesuai Standar Jumlah jenis kegiatan/event keagamaan, olahraga, dan kepemudaan yang difasilitasi Jumlah Usulan PembangunanYang Dapat Diakomodir			B indeks	0 0 0		128,020,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	B indeks	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**19,100,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**19,100,000**					**0**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah kelurahan/desa yang di nilai perkembangannya			100 %	0		19,100,000			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**21,400,000**					**0**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**21,400,000**					**0**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahan trantib yang diselesaikan			100 %	0		21,400,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**92,550,000**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**92,550,000**					**0**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah Permasalahan Pemerintahan Umum Yang Diselesaikan			100 %	0		92,550,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**54,800,000**					**0**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**54,800,000**					**0**
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah Desa Yang Dapat Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Berdasarkan Tupoksi			100 %	0		54,800,000			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
												TOTAL	**2,389,014,335**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Batu Benawa
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Batu Benawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,455,204,032**					**0**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**2,017,804,032**					**0**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**1,634,004,032**					**0**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		1,625,204,032	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen (RKA, DPA dan Lap. Keu)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		3,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		4,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**383,800,000**					**0**
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Materai		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		14,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Periode Bulan Jasa listrik dan air		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		26,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		6,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah unit Mobil / R2 yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		31,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		39,576,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		22,695,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan ATK		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		35,969,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah item alat listrik yang dibeli		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		22,270,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah SKH berlangganan 12 bulan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		1,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Batu Benawa
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Batu Benawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		28,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah perjalanan dinas yang terfasilitasi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		56,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bangunan yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		18,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bangunan yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		63,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah unit peralatan yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**182,600,000**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**182,600,000**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan sesuai standar		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	B indeks	0		182,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	B indeks	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**68,400,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**68,400,000**					**0**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah jenis kegiatan/event keagamaan, olahraga, dan kepemudaan yang difasilitasi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		68,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**35,750,000**					**0**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**35,750,000**					**0**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah permasalahan bidang trantib yang diselesaikan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		35,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**67,550,000**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**67,550,000**					**0**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahan umum yang diselesaikan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		67,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**83,100,000**					**0**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**83,100,000**					**0**
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah desa yang dievaluasi RAPB Desa		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batu Benawa, Pagat	100 %	0		83,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
												TOTAL	**2,455,204,032**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Hantakan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Hantakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,096,165,936**					**0**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**1,960,330,936**					**0**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**98,585,000**					**0**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah dokomen yang disusun			100 %	0		3,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar			100 %	0		95,085,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**1,481,165,936**					**0**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah dokomen yang disusun			100 %	0		1,481,165,936			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**360,780,000**					**0**
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Materai dan buku cek			100 %	0		18,860,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jenis Rekening terbayar (Listrik,Air,Internet)			100 %	0		16,200,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Petugas kebersihan serta 21 jenis peralatan dan bahan pembersih			100 %	0		27,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor yang memadai			100 %	0		8,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan			100 %	0		10,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan			100 %	0		6,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Alat kelistrikan			100 %	0		4,450,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Sewa tenda dan kursi			100 %	0		1,400,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Koran			100 %	0		5,400,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		20,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah OH Perjalanan dinas yang dilaksanakan			100 %	0		120,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100 %	0		18,200,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			100 %	0		34,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			100 %	0		70,770,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.04**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**								**19,800,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Hantakan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Hantakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			100 %	0		19,800,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**3,500,000**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**3,500,000**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar			B indeks	0		3,500,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	B indeks	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**52,890,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**52,890,000**					**0**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah usulan pembangunan yang dapat diakomodir			100 %	0		52,890,000			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**15,780,000**					**0**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**15,780,000**					**0**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi bidang trantib			100 %	0		15,780,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**58,415,000**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**58,415,000**					**0**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	2.Jumlah penyelenggaraan peringatan hari besar nasional			100 %	0		58,415,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**5,250,000**					**0**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**5,250,000**					**0**
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah/Desa yang dapat melaksanakan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa			100 %	0		5,250,000			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
												TOTAL	**2,096,165,936**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Batang Alai Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Batang Alai Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**4,707,921,936**					**0**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**2,776,786,936**					**0**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**38,495,000**					**0**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Perencanaan penganggaran, penatausahaan keuangan sesuai standar (Renstra, Renja, RKA, DPA, Lap. Keuangan)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		29,915,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen Laporan realisasi kinerja yang dibuat (Perjanjian Kinerja, LPPD/LKPJ dan SAKIP)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		8,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**2,297,921,936**					**0**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		2,297,921,936	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**440,370,000**					**0**
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah jasa pengiriman surat		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		20,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		39,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		21,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah ketersediaan ATK		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		22,480,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		7,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Batang Alai Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Batang Alai Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah ketersediaan bahan bacaan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		1,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		44,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah OH Perjalanan Dinas		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		160,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		28,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah pemeliharaan Rumah Dinas Camat		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		13,929,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		36,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Mobil/R2 yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		35,370,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**250,000,000**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**250,000,000**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah dokumen Pelayanan yg sesuai standar		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	B indeks	0		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	B indeks	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,367,510,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**103,200,000**					**0**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		103,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,264,310,000**					**0**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan sarana kelurahan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		757,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Batang Alai Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Batang Alai Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi di Kelurahan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		507,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**90,300,000**					**0**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**90,300,000**					**0**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (Masyarakat/Perangkat/Lembaga)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		90,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**117,825,000**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**117,825,000**					**0**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi pemerintahan umum dan Pembinaan Wilayah		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		117,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**105,500,000**					**0**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**105,500,000**					**0**
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah desa yang dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Selatan, Birayang	100 %	0		105,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
												TOTAL	**4,707,921,936**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Batang Alai Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Batang Alai Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,142,370,994**					**0**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**1,664,195,994**					**0**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**1,362,370,994**					**0**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Utara, Semua Kelurahan	100 %	0		1,362,370,994	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**301,825,000**					**0**
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase Jasa Surat Menyurat dan Tenaga Administrasi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Utara, Semua Kelurahan	100 %	0		54,951,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan Tagihan Rekening Listrik Air dan Telpon/Internet		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Utara, Semua Kelurahan	100 %	0		23,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disewa		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Utara, Semua Kelurahan	100 %	0		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase Pembelian Bahan Kebersihan Kantor dan Jumlah Tenaga Kebersihan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Utara, Semua Kelurahan	100 %	0		20,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Unit yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Utara, Semua Kelurahan	100 %	0		14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Utara, Semua Kelurahan	100 %	0		10,149,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Utara, Semua Kelurahan	100 %	0		8,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		6,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Utara, Semua Kelurahan	100 %	0		1,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Batang Alai Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Batang Alai Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Utara, Semua Kelurahan	100 %	0		33,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Kabupaten dan Luar Kabupaten		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Utara, Semua Kelurahan	100 %	0		53,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas/Jabatan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Utara, Semua Kelurahan	100 %	0		15,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Utara, Semua Kelurahan	100 %	0		22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Unit yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Utara, Semua Kelurahan	100 %	0		34,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**172,400,000**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**172,400,000**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah Dokumen Pelayanan yang sesuai standar		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Utara, Semua Kelurahan	B indeks	0		172,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	B indeks	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**71,720,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**71,720,000**					**0**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di Fasilitasi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Utara, Semua Kelurahan	100 %	0		71,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**54,500,000**					**0**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**54,500,000**					**0**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah Peserta Sosialisasi Trantib			100 %	0		54,500,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**95,225,000**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**95,225,000**					**0**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan kecamatan			100 %	0		95,225,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**84,330,000**					**0**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**84,330,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Batang Alai Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Batang Alai Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa		Kab. Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Utara, Semua Kelurahan	100 %	0		84,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
												TOTAL	**2,142,370,994**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Batang Alai Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Batang Alai Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,209,385,471**					**0**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**2,031,215,471**					**0**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,632,000**					**0**
7	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD (RKA SKPD, DPA SKPD, dan Laporan Keuangan SKPD)			100 %	0		1,782,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD (Renstra SKPD, Renja SKPD, LKIP SKPD, dan LKPJ/LPPD)			100 %	0		850,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**1,564,385,471**					**0**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		1,564,385,471			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**464,198,000**					**0**
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentase jasa surat menyurat			100 %	0		19,250,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet			100 %	0		8,400,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan			100 %	0		25,210,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan ATK			100 %	0		12,102,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan			100 %	0		9,150,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.			100 %	0		3,250,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah surat kabar			100 %	0		7,200,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		29,250,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah OH Perjalanan Dinas			100 %	0		132,186,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah perlengkapan yang dibeli			100 %	0		28,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah unit yang dipelihara			100 %	0		19,700,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara			100 %	0		63,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan			100 %	0		107,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**46,000,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Batang Alai Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Batang Alai Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**46,000,000**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar Jumlah permasalahan pemerintahan umum yang diselesaikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	0 0		46,000,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	B indeks	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**56,550,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**56,550,000**					**0**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah jenis kegiatan/event keagamaan, olahraga, dan kepemudaan yang difasilitasi Jumlah peserta sosialisasi pembangunan desa Jumlah usulan pembangunan yang dapat diakomodir			100 %	0 0 0		56,550,000			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**18,600,000**					**0**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**18,600,000**					**0**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi bidang trantib			100 %	0		18,600,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**33,020,000**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**33,020,000**					**0**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahan umum yang diselesaikan			100 %	0		33,020,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**24,000,000**					**0**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**24,000,000**					**0**
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah desa yang dievaluasi RAPB Desa			100 %	0		24,000,000			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
												TOTAL	**2,209,385,471**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Limpasu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Limpasu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,529,403,799**					**0**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**2,226,458,599**					**0**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**4,000,000**					**0**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Dokumen Renja, LKIP,LKPJ dan LPPD			100 %	0		2,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Dokumen Renja, LKIP,LKPJ dan LPPD			100 %	0		2,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**1,974,203,799**					**0**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		1,974,203,799			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**238,904,800**					**0**
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Tersedianya materai dan buku cek			100 %	0		575,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Ketersedian Listrik untuk mendukung administrasi perkantoran serta layanan masyarakat			100 %	0		9,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa			100 %	0		1,400,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor			100 %	0		17,285,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Tersedianya alat tulis untuk kebutuhan administrasi dan pelayanan masyarakat			100 %	0		8,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Tersediannya Barang cetakan dan penggandaan/foto cofy			100 %	0		3,690,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Tersediannya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			100 %	0		1,576,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	pengadaan peralatan kantor			100 %	0		25,300,800			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli			100 %	0		1,460,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		6,400,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Terlaksananya perjalanan dinas sesuai keperluan			100 %	0		88,368,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	pengadaan perlengkapan kantor			100 %	0		2,650,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Unit Fasilitas yang ditingkatkan			100 %	0		14,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Bangunan Kantor yang dipelihara			100 %	0		17,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Limpasu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Limpasu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan ketersediaan BBM			100 %	0		40,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Kelancaran kegiatan & layanan administrasi perkantoran			100 %	0		2,200,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.04**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**								**9,350,000**					**0**
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Unit Fasilitas yang ditingkatkan			100 %	0		9,350,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**94,985,200**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**94,985,200**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah Dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar			B indeks	0		94,985,200			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	B indeks	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**75,500,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**75,500,000**					**0**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah Jenis kegiatan/ Event Keagamaan, Olah Raga dan Kepemudaan yang di fasilitasi Jumlah Organisasi PKK yang aktif			100 %	0 0		75,500,000			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**12,850,000**					**0**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**12,850,000**					**0**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahan trantib yang diselessaikan ,			100 %	0		12,850,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**75,050,000**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**75,050,000**					**0**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah Permasalahan Pemerintahan umum Yang diselesaikan			100 %	0		75,050,000			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**44,560,000**					**0**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**44,560,000**					**0**
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	Jumlah desa yang pertanggungjawaban administrasi keuangan tertib dan tepat waktu			100 %	0		44,560,000			Persentasi desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)	100 %	0
												TOTAL	**2,529,403,799**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**								**9,250,000,000**					**0**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**7,310,280,000**					**0**
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**5,288,676,854**					**0**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		5,263,401,854			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen (Renstra,Renja,LKIP,LKPJ, LPPD)			100 %	0		10,920,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen (RKA,DPA dan Lap.Keu)			100 %	0		14,355,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**2,005,853,146**					**0**
6	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Prosentasi penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat			100 %	0		4,075,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah periode penyediaan jasa rekenig air, listrik, telpon			100 %	0		8,400,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor			100 %	0		3,050,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		19,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi			100 %	0		118,728,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Presentasi penyediaan jasa kebersihan			100 %	0		9,616,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase Penyediaan ATK			100 %	0		34,748,146			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan			100 %	0		19,546,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor			100 %	0		4,850,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah unit peralatan yang dibeli			100 %	0		12,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli			100 %	0		4,440,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		69,400,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah perjalanan dinas keluar kabupaten			100 %	0		1,016,550,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah mobil/R2 yang dibeli			100 %	0		381,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah unit peralatan yang dibeli			100 %	0		95,400,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
6	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara			100 %	0		45,800,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional			100 %	0		139,750,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan yang dipelihara			100 %	0		18,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	**01**	**01**	**2.04**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**								**15,750,000**					**0**
6	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Pakaian Dinas			100 %	0		15,750,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**290,330,000**					**0**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**290,330,000**					**0**
6	01	02	2.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan	Persentase SKPD/Obrik yang telah selesai menindaklanjuti temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan	Jumlah kasus yang ditangani Jumlah obrik yang diperiksa			100 %	0 0		38,650,000			Persentase SKPD/Obrik yang telah selesai menindaklanjuti temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan	100 %	0
6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan	Persentase SKPD/Obrik yang telah selesai menindaklanjuti temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan	Jumlah LHP hasil direviu tepat waktu			100 %	0		67,700,000			Persentase SKPD/Obrik yang telah selesai menindaklanjuti temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan	100 %	0
6	01	02	2.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Persentase SKPD/Obrik yang telah selesai menindaklanjuti temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti			100 %	0		136,190,000			Persentase SKPD/Obrik yang telah selesai menindaklanjuti temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan	100 %	0
6	01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Persentase SKPD/Obrik yang telah selesai menindaklanjuti temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan	Jumlah LHE LKIP Jumlah obrik yang diperiksa			100 %	0 0		47,790,000			Persentase SKPD/Obrik yang telah selesai menindaklanjuti temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan	100 %	0
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								**1,649,390,000**					**0**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan**								**66,320,000**					**0**
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase SKPD yang memenuhi Level Maturitas SPIP	Jumlah ASN yang melaporkan kekayaan Jumlah pedoman pengawasan (SOP			100 %	0 0		66,320,000			Persentase SKPD yang memenuhi Level Maturitas SPIP	100 %	0
6	**01**	**03**	**2.02**		**Asistensi dan Pendampingan**								**1,583,070,000**					**0**
6	01	03	2.02	02	Asistensi dan Pendampingan	Persentase SKPD yang memenuhi Level Maturitas SPIP	Jumlah kegiatan sosialisasi & Implementasi GG Jumlah SKPD yang menerapkan maturitas SPIP secara efektif			100 %	0 0		1,583,070,000			Persentase SKPD yang memenuhi Level Maturitas SPIP	100 %	0
												TOTAL	**9,250,000,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**01**				**PERENCANAAN**								**8,575,863,527**					**0**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**5,304,159,133**					**0**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**16,600,000**					**0**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		3,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**4,069,577,033**					**0**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen (RKA, DPA dan Lap. Keu)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		4,069,577,033	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**1,217,982,100**					**0**
5	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah periode penyediaan jasa rekening air, listrik dan telpon		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		105,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan jasa kebersihan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		45,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan ATK		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		101,732,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		15,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		5,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		70,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		2,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK makan minum harian, Jumlah HOK Rapat dan Tamu		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		57,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah OH Perjalanan Dinas		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		646,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah unit yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		48,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		88,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah perlengkapan yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**								**1,882,408,000**					**0**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah**								**1,695,158,000**					**0**
5	01	02	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	Jumlah rancangan Perkada RKPD yg diproses sesuai jadwal (murni dan perubahan) dengan substansi dan proses sesuai dengan Permendagri No.86 tahun 2017		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		970,328,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	100 %	0
5	01	02	2.01	03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		216,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	Jumlah rancangan Perkada RKPD yg diproses sesuai jadwal (murni dan perubahan) dengan substansi dan proses sesuai dengan Permendagri No.86 tahun 2017		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	100 %	0
5	01	02	2.01	07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	Persentase Jumlah data yang terkumpul dan disusun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		63,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	100 %	0
5	01	02	2.01	09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	Jumlah buku profil daerah yang disusun jumlah laporan hasil survey persepsi publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 	0 0		430,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	100 %	0
5	**01**	**02**	**2.02**		**Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah**								**131,250,000**					**0**
5	01	02	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	Jumlah dokumen rancangan dan kesepakatan KUA , KUPA , PPAS dan PPAS-P Jumlah SKPD yang RKA/RKAP sudah diverifikasi yang sesuai dengan RKPD, KUA dan PPAS		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0		121,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	100 %	0
5	01	02	2.02	03	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	Jumlah usulan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan (APBN, APBD Prov dan DAK)		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		10,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	100 %	0
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**								**56,000,000**					**0**
5	01	02	2.03	01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	Jumlah monitoring, pengendalian dan evaluasi RPJMD dan atau RKPD yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	100 %	0
5	01	02	2.03	03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	Jumlah monitoring, pengendalian dan evaluasi RPJMD dan atau RKPD yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		17,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	100 %	0
5	01	02	2.03	04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	Jumlah monitoring, pengendalian dan evaluasi RPJMD dan atau RKPD yang dilaksanakan Jumlah SKPD yang diasistensi penyusunan dokumen perjanjian kinerja (murni dan perubahan)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0		27,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD	100 %	0
5	**01**	**03**			**PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**								**265,900,000**					**0**
5	**01**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan**								**84,080,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	% program dan kegiatan RKPD yang dituangkan ke Renja SKPD bidang Sosial Budaya	Jumlah SKPD yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi Renja		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		84,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% program dan kegiatan RKPD yang dituangkan ke Renja SKPD bidang Sosial Budaya	100 %	0
5	**01**	**03**	**2.02**		**Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia**								**181,820,000**					**0**
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	% program dan kegiatan RKPD yang dituangkan ke Renja SKPD bidang Sosial Budaya	Jumlah SKPD yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi Renja		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		181,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% program dan kegiatan RKPD yang dituangkan ke Renja SKPD bidang Sosial Budaya	100 %	0
5	**01**	**04**			**PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**								**705,916,394**					**0**
5	**01**	**04**	**2.01**		**Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian**								**705,916,394**					**0**
5	01	04	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	% program dan kegiatan RKPD yang dituangkan ke Renja SKPD bidang Ekonomi	Indeks kinerja komisi irigasi kabupaten Hulu Sungai Tengah Jumlah rencana induk/rencana aksi perencanaan sektoral bidang ekonomi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0		620,056,394	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		% program dan kegiatan RKPD yang dituangkan ke Renja SKPD bidang Ekonomi	100 %	0
5	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	% program dan kegiatan RKPD yang dituangkan ke Renja SKPD bidang Ekonomi	Jumlah SKPD yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi Renja		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		85,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% program dan kegiatan RKPD yang dituangkan ke Renja SKPD bidang Ekonomi	100 %	0
5	**01**	**05**			**PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**								**417,480,000**					**0**
5	**01**	**05**	**2.03**		**Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan**								**417,480,000**					**0**
5	01	05	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	% program dan kegiatan RKPD yang dituangkan ke Renja SKPD bidang infrastruktur	Jumlah masalah/keputusan pokja yang diselesaikan sesuai pedoman/juknis		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		345,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% program dan kegiatan RKPD yang dituangkan ke Renja SKPD bidang infrastruktur	100 %	0
5	01	05	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan	% program dan kegiatan RKPD yang dituangkan ke Renja SKPD bidang infrastruktur	Jumlah SKPD yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi Renja		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		72,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% program dan kegiatan RKPD yang dituangkan ke Renja SKPD bidang infrastruktur	100 %	0
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								**947,350,000**					**0**
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**								**947,350,000**					**0**
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**								**947,350,000**					**0**
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah topik kajian penelitian dan pengembangan yang dihasilkan	Jumlah Judul Permasalahan/Topik yang dikaji		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		937,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah topik kajian penelitian dan pengembangan yang dihasilkan	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah topik kajian penelitian dan pengembangan yang dihasilkan	Jumlah orang yang mendapat desiminasi hasil litbang		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		10,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah topik kajian penelitian dan pengembangan yang dihasilkan	100 %	0
												TOTAL	**9,523,213,527**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**02**				**KEUANGAN**								**8,405,960,680**					**0**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**6,538,976,680**					**0**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**3,700,000**					**0**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun		Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Semua Kelurahan	100 %	0		3,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**5,510,617,280**					**0**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah daftar gaji SKPD telah disesuaikan dan dicetak		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		5,486,467,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		24,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**1,024,659,400**					**0**
5	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase penyediaan jasa surat menyurat		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		2,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Cek untuk Bendahara Pengeluaran		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		27,773,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan ATK		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		98,426,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		7,035,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		2,230,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah unit peralatan yang dibeli		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		97,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah OH Perjalanan Dinas		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		640,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah unit yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		35,469,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah kendaraan R4 yang dipelihara, jumlah PKB yang dibayar		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		60,040,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah perlengkapan yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		10,250,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		7,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**								**1,177,409,000**					**0**
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**								**332,911,000**					**0**
5	02	02	2.01	05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	Jumlah SKPD yang diverifikasi RKA, Rancangan DPA dan DPA		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		139,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	02	2.01	06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	Jumlah SKPD yang diverifikasi RKA Perubahan, Rancangan DPA dan DPPA		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		114,426,000			Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	100 %	0
5	02	02	2.01	07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	Jumlah dokumen yang disusun		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		78,885,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	100 %	0
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**								**565,393,000**					**0**
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	Jumlah laporan dana transfer yang disampaikan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		325,355,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	100 %	0
5	02	02	2.02	04	Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	Jumlah SP2D yang dikeluarkan dengan Sumber Dana dan Kode Rekening		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		109,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	100 %	0
5	02	02	2.02	05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	Jumlah daftar gaji SKPD telah disesuaikan dan dicetak		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		131,038,000			Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	100 %	0
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**								**279,105,000**					**0**
5	02	02	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	Jumlah laporan keuangan SKPD yang diverifikasi, Jumlah Ranperda/Ranperbup		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		177,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	100 %	0
5	02	02	2.03	05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		83,000,000			Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	100 %	0
5	02	02	2.03	07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	Jumlah dokumen yang disusun		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	Jumlah Draft Perkada tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		6,805,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu	100 %	0
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**								**689,575,000**					**0**
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**								**689,575,000**					**0**
5	02	03	2.01	07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Persentase KIB SKPD yang sesuai dengan neraca LKPD	Jumlah BMD (tanah) yang disertifikasi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		564,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase KIB SKPD yang sesuai dengan neraca LKPD	100 %	0
5	02	03	2.01	09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase KIB SKPD yang sesuai dengan neraca LKPD	Persentase Usulan Penghapusan BMD SKPD yang terealisasi		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		66,075,000			Persentase KIB SKPD yang sesuai dengan neraca LKPD	100 %	0
5	02	03	2.01	11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase KIB SKPD yang sesuai dengan neraca LKPD	Persentase Jumlah SKPD yang dilakukan rekonsiliasi BMD		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		58,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase KIB SKPD yang sesuai dengan neraca LKPD	100 %	0
												TOTAL	**8,405,960,680**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**02**				**KEUANGAN**								**6,545,447,607**					**0**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**4,836,268,207**					**0**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**15,040,200**					**0**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		9,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD.		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		5,790,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**3,595,447,807**					**0**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Memenuhi kebutuhan sumbedaya manusia yang handal dan berkompeten		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		3,595,447,807	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**1,225,780,200**					**0**
5	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah jasa pengiriman surat			100 %	0		3,240,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Rekening Telpon dan Internet			100 %	0		37,200,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jumlah unit yang dipelihara		Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		57,600,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah tenaga kebersihan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		19,500,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan yang dipelihara			100 %	0		20,800,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah alat tulis kantor			100 %	0		148,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah lembar fotocopy			100 %	0		13,570,200			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah komponen listrik			100 %	0		4,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia			100 %	0		36,670,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah surat kabar			100 %	0		3,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		27,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah koordinasi dan konsultasi Luar Daerah			100 %	0		250,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli			100 %	0		366,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia			100 %	0		86,200,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Terpeliharanya peralatan gedung kantor			100 %	0		153,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**1,709,179,400**					**0**
5	**02**	**04**	**2.02**		**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**								**1,709,179,400**					**0**
5	02	04	2.02	02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	% peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah	Prosentase Realisasi Pemungutan PBB sesuai dengan Pokok Ketetapan / Target		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		539,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah	100 %	0
5	02	04	2.02	04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	% peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Regulasi Pajak Daerah Yang Diciptakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		91,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah	100 %	0
5	02	04	2.02	05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	% peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah	Jumlah media sosialisasi yang direspon masyarakat.		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0		23,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah	100 %	0
5	02	04	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	% peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Aplikasi Sistem Yang Dikembangkan dan Terpelihara Jumlah SPPT, DHKP dan SSPD Sesuai Pokok Ketetapan PBB dan BPHTB yang tercetak. Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang ditetapkan sesuai penilaian		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0 0		721,225,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah	100 %	0
5	02	04	2.02	09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	% peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah	Jumlah media pungut pajak yang dicetak Jumlah Wajib Pajak PBB Baru dan BPHTB yang Terdata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0		224,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah	100 %	0
5	02	04	2.02	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	% peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Laporan bulanan penerimaan pajak dan Retribusi Jumlah Rumusan Hasil Rekonsiliasi Pajak dan Retribusi Daerah Yang Dihasilkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0		109,154,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah	100 %	0
												TOTAL	**6,545,447,607**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**								**25,526,878,547**					**0**
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**16,497,588,547**					**0**
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								**14,367,763,523**					**0**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		14,337,783,523			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	03	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	0		29,980,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								**2,109,725,024**					**0**
5	03	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah jasa pengiriman surat			100 %	0		55,438,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	03	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100 %	0		192,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	03	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan			100 %	0		43,200,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	03	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan ATK			100 %	0		60,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	03	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan			100 %	0		35,860,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	03	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100 %	0		24,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	03	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah surat kabar; Jumlah buku peraturan			100 %	0		2,976,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	03	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah HOK yang disediakan			100 %	0		46,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	03	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Perjalanan Dinas			100 %	0		996,451,024			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	03	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor			100 %	0		160,950,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	03	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor			100 %	0		38,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	03	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			100 %	0		96,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	03	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dipelihara			100 %	0		84,850,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	03	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			100 %	0		90,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	03	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah gedung kantor yang di rehab			100 %	0		184,000,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	**03**	**01**	**2.04**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**								**20,100,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan faham			100 %	0		20,100,000			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	0
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**9,029,290,000**					**0**
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi ASN**								**60,170,000**					**0**
5	03	02	2.01	04	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	Jumlah ASN yang datanya akurat			100 %	0		60,170,000			Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	100 %	0
5	**03**	**02**	**2.02**		**Administrasi Kepegawaian**								**3,645,310,000**					**0**
5	03	02	2.02	01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	Jumlah peserta seleksi CPNS/ASN yang telah diverifikasi			100 %	0		2,682,910,000			Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	100 %	0
5	03	02	2.02	02	Penataan dan Mutasi Jabatan	Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	Jumlah SK Mutasi PNS Di Dalam Kabupaten, Surat Rekomendasi Mutasi Keluar/Masuk, dan SK Dalam Jabatan Fungsional PNS akurat dan selesai tepat waktu			100 %	0		193,600,000			Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	100 %	0
5	03	02	2.02	05	Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai	Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	Jumlah administrasi kepegawaian (Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, SK Pensiun dll) yang diproses akurat dan selesai tepat waktu			100 %	0		69,600,000			Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	100 %	0
5	03	02	2.02	08	Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN	Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	Jumlah calon JPT yang lulus seleksi sesuai prosedur			100 %	0		607,400,000			Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	100 %	0
5	03	02	2.02	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS, SK Penambahan Masa Kerja, dan SK Pengangkatan menjadi PNS yang diproses akurat dan selesai tepat waktu			100 %	0		91,800,000			Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	100 %	0
5	**03**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Kapastitas ASN**								**4,771,420,000**					**0**
5	03	02	2.03	08	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat prajabatan, PIM, Fungsional/Tupoksi dengan hasil baik			100 %	0		4,771,420,000			Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	100 %	0
5	**03**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Karir ASN**								**340,000,000**					**0**
5	03	02	2.04	01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi, Ujian Dinas/UKPPI, tugas belajar. Ijin belajar dan pencantuman gelar akademik			100 %	0		340,000,000			Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	100 %	0
5	**03**	**02**	**2.05**		**Pembinaan ASN**								**212,390,000**					**0**
5	03	02	2.05	01	Pembinaan Disiplin ASN	Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	Jumlah proses pemberian izin perkawinan/perceraianyang sesuai prosedur dan tepat waktu.			100 %	0		53,190,000			Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	100 %	0
5	03	02	2.05	02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	Jumlah pelanggaran disiplin PNS yang selesai diproses tindakan hukumnya.			100 %	0		104,200,000			Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.05	03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	Jumlah PNS/ASN yang diusulkan untuk mendapatkan Piagam Penghargaan			100 %	0		55,000,000			Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai	100 %	0
												TOTAL	**25,526,878,547**					**0**



L A M P I R A N

HASIL PEMETAAN (MAPPING)
RENSTRA SKPD TAHUN 2016-2021
D E N G A N
NOMENKLATUR
PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

= KEGIATAN RUTIN =

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

RKPD TAHUN 2021

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (RUTIN) - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

KAB/KOTA = **KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006) -- KEGIATAN RUTIN						
Kode Urusan	**Kode Bidang**	**Kode Program**	**Kode Kegiatan**	**Urusan**	**Program**	**Kegiatan**
1	2	3	4	5	8	9
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan makanan dan minuman
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Administrasi Perkantoran
						Penyediaan Administrasi Perkantoran
						Penyediaan Administrasi Perkantoran
						Penyediaan Administrasi Perkantoran
						Penyediaan Administrasi Perkantoran
						Penyediaan Administrasi Perkantoran
						Penyediaan Administrasi Perkantoran
						Penyediaan Administrasi Perkantoran
						Penyediaan Administrasi Perkantoran
						Penyediaan Administrasi Perkantoran
						Penyediaan Administrasi Perkantoran
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan jasa administrasi keuangan
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyelenggaraan Dokumentasi Berbasis Foto Cetak dan Digital
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor
						Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Dinas
						Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Dinas
						Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Dinas
						Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Dinas
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Rumah Dinas

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	**Urusan**	**Bidang**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.17	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman
X.XX.01.2.02.02	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X.XX.01.2.03.01	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X.XX.01.2.03.02	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X.XX.01.2.03.08	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
X.XX.01.2.03.10	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor
X.XX.01.2.03.11	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
X.XX.01.2.03.15	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
X.XX.01.2.03.16	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X.XX.01.2.03.12	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X.XX.01.2.03.14	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
X.XX.01.2.03.13	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X.XX.01.2.03.18	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0	0	0	0	0	TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI
X.XX.01.2.03.03	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X.XX.01.2.03.07	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0	0	0	0	0	TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI
X.XX.01.2.03.21	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
X.XX.01.2.03.28	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
X.XX.01.2.03.38	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
X.XX.01.2.03.24	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
X.XX.01.2.03.22	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
X.XX.01.2.03.34	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
X.XX.01.2.03.32	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
X.XX.01.2.04.01	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
X.XX.01.2.03.25	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Mebeleur
X.XX.01.2.03.35	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
X.XX.01.2.03.27	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
X.XX.01.2.03.37	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
X.XX.01.2.03.26	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
X.XX.01.2.03.36	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
X.XX.01.2.03.33	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006) -- KEGIATAN RUTIN						
Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	8	9
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Rumah Dinas
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Rumah Dinas
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Rumah Dinas
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Rumah Dinas
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
						Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
						Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
						Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan dan Pemeliharaan Mobil Jabatan
						Pengadaan dan Pemeliharaan Mobil Jabatan
						Pengadaan dan Pemeliharaan Mobil Jabatan
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
						Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
						Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
						Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD
						Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD
						Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD
						Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD
						Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD
						Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD
						Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD
						Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD
						Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD
						Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Dokumen Perencanaaan dan Laporan Kinerja SKPD
						Penyusunan Dokumen Perencanaaan dan Laporan Kinerja SKPD

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.31	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
X.XX.01.2.03.23	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
X.XX.01.2.03.21	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
X.XX.01.2.03.14	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
X.XX.01.2.03.30	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
X.XX.01.2.03.20	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
X.XX.01.2.03.06	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
X.XX.01.2.03.40	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
X.XX.01.2.03.29	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
X.XX.01.2.03.19	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Mobil Jabatan
X.XX.01.2.03.39	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
X.XX.01.2.03.36	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
X.XX.01.2.03.37	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
X.XX.01.2.04.02	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
X.XX.01.2.04.03	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
X.XX.01.2.04.05	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
X.XX.01.2.04.04	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Korpri
X.XX.01.2.01.02	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
X.XX.01.2.01.03	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02.04	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
X.XX.01.2.02.08	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
X.XX.01.2.02.07	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
X.XX.01.2.02.09	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
X.XX.01.2.02.06	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X.XX.01.2.01.01	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02.05	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
X.XX.01.2.01.05	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.02	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
X.XX.01.2.02.06	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006) -- KEGIATAN RUTIN						
Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	8	9
						Penyusunan Dokumen Perencanaaan dan Laporan Kinerja SKPD
						Penyusunan Dokumen Perencanaaan dan Laporan Kinerja SKPD
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD
						Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD
						Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD
						Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD
						Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD
X	X	X	X	RUTIN	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Sistem Informasi Kesehatan
1	2	44	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Penyediaan Administrasi BLUD RSUD
						Penyediaan Administrasi BLUD RSUD
						Penyediaan Administrasi BLUD RSUD
						Penyediaan Administrasi BLUD RSUD
						Penyediaan Administrasi BLUD RSUD
						Penyediaan Administrasi BLUD RSUD
						Penyediaan Administrasi BLUD RSUD
						Penyediaan Administrasi BLUD RSUD
						Penyediaan Administrasi BLUD RSUD
						Penyediaan Administrasi BLUD RSUD
						Penyediaan Administrasi BLUD RSUD
						Penyediaan Administrasi BLUD RSUD
						Penyediaan Administrasi BLUD RSUD
						Penyediaan Administrasi BLUD RSUD
						Penyediaan Administrasi BLUD RSUD
						Penyediaan Administrasi BLUD RSUD
						Penyediaan Administrasi BLUD RSUD
1	2	44	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Mutu Pelayanan Medik dan Penunjang
1	2	44	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Pemeliharaaan Lingkungan RS
						Pemeliharaaan Lingkungan RS
						Pemeliharaaan Lingkungan RS
						Pemeliharaaan Lingkungan RS

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.01	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02.05	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
X.XX.01.2.02.08	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
X.XX.01.2.02.04	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
X.XX.01.2.02.07	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
X.XX.01.2.02.09	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
X.XX.01.2.02.05	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
0	0	0	0	0	TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI
X.XX.01.2.03.17	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman
X.XX.01.2.02.01	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X.XX.01.2.03.01	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X.XX.01.2.03.15	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
X.XX.01.2.03.18	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
X.XX.01.2.03.06	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
X.XX.01.2.03.10	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor
X.XX.01.2.03.08	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
X.XX.01.2.03.12	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X.XX.01.2.03.34	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
X.XX.01.2.03.27	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
X.XX.01.2.03.30	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
X.XX.01.2.03.11	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
X.XX.01.2.04.11	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
X.XX.01.2.03.14	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
X.XX.01.2.03.25	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Mebeleur
X.XX.01.2.03.20	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
X.XX.01.2.03.17	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman
X.XX.01.2.03.28	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
X.XX.01.2.03.30	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
X.XX.01.2.03.33	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
X.XX.01.2.03.34	Semua Urusan	Semua Bidang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

L A M P I R A N

HASIL PEMETAAN (MAPPING)
RENSTRA SKPD TAHUN 2016-2021
D E N G A N
NOMENKLATUR
PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

= KEGIATAN NON RUTIN =

37 SKPD

SE- KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

RKPD TAHUN 2021

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DAFTAR SKPD SE-KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

REKAPITULASI NOMENKLATUR (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)
MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
HASIL PEMETAAN (MAPPING) KEGIATAN NON-RUTIN (RENSTRA) SESUAI PILIHAN SKPD

NO	PERANGKAT DAERAH KAB. HST
1	SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DPRD
3	RSUD H. DAMANHURI BARABAI
4	INSPEKTORAT
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
10	DINAS PENDIDIKAN
11	DINAS KESEHATAN
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
14	DINAS PERDAGANGAN
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
17	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
19	DINAS PERTANIAN
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
21	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
22	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
23	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
24	DINAS PERPUSTAKAAN
25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
26	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
27 .a	KECAMATAN (8 KECAMATAN)
27 .b/c/d	KECAMATAN (3 KECAMATAN)

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	
SEKRETARIAT DAERAH		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
SEKRETARIAT DAERAH		Administrasi Tata Pemerintahan	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
SEKRETARIAT DAERAH		Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Bantuan Hukum	
SEKRETARIAT DAERAH		Pelaksanaan Administrasi Umum	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
SEKRETARIAT DAERAH		Administrasi Pembangunan	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	
SEKRETARIAT DAERAH		Pengadaan Barang dan Jasa	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
SEKRETARIAT DAERAH		Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
SEKRETARIAT DAERAH		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
SEKRETARIAT DAERAH			Fasilitasi Keprotokolan	
SEKRETARIAT DAERAH			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
SEKRETARIAT DAERAH			Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	
SEKRETARIAT DAERAH			Pengelolaan Rumah Tangga	
SEKRETARIAT DAERAH			Pengelolaan Perlengkapan	
SEKRETARIAT DAERAH			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
SEKRETARIAT DAERAH			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
SEKRETARIAT DAERAH			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
SEKRETARIAT DAERAH			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
SEKRETARIAT DAERAH			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
SEKRETARIAT DAERAH			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
SEKRETARIAT DAERAH			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
SEKRETARIAT DAERAH			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
SEKRETARIAT DAERAH			Penataan Administrasi Pemerintahan	
SEKRETARIAT DAERAH			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
SEKRETARIAT DAERAH			Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
SEKRETARIAT DAERAH			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
SEKRETARIAT DAERAH			TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI	

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat DPRD	2
SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
SEKRETARIAT DPRD		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
SEKRETARIAT DPRD		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
SEKRETARIAT DPRD		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pelaksanaan Reses	
SEKRETARIAT DPRD		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kunjungan Kerja dalam Daerah	
SEKRETARIAT DPRD		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
SEKRETARIAT DPRD		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Orientasi DPRD	
SEKRETARIAT DPRD		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Bimbingan Teknis DPRD	
SEKRETARIAT DPRD			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	
SEKRETARIAT DPRD			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
SEKRETARIAT DPRD			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
SEKRETARIAT DPRD			Penyusunan Program Kerja DPRD	
SEKRETARIAT DPRD			Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	
SEKRETARIAT DPRD			Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	
SEKRETARIAT DPRD			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
SEKRETARIAT DPRD			Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	
SEKRETARIAT DPRD			Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
SEKRETARIAT DPRD			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
SEKRETARIAT DPRD			Pembahasan Rancangan Perda	
SEKRETARIAT DPRD			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
SEKRETARIAT DPRD			Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	
SEKRETARIAT DPRD			Penyusunan Tata Tertib DPRD	
SEKRETARIAT DPRD			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
SEKRETARIAT DPRD			Pelaksanaan Undangan DPRD	
SEKRETARIAT DPRD			Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	
SEKRETARIAT DPRD			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	
SEKRETARIAT DPRD			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
SEKRETARIAT DPRD			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
SEKRETARIAT DPRD			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
SEKRETARIAT DPRD			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
SEKRETARIAT DPRD			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
SEKRETARIAT DPRD			Pengawasan Penggunaan Anggaran	
SEKRETARIAT DPRD			pembahasan KUA dan PPAS	
SEKRETARIAT DPRD			pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	
SEKRETARIAT DPRD			Pembahasan APBD	
SEKRETARIAT DPRD			Pembahasan APBD Perubahan	
SEKRETARIAT DPRD			Pembahasan Laporan Semester	
SEKRETARIAT DPRD			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
SEKRETARIAT DPRD			Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD	

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
RSUD H. DAMANHURI BARABAI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Audit Kinerja dan Keuangan	**4**
INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Review Kinerja dan Keuangan	
INSPEKTORAT	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Asistensi dan Pendampingan	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	
INSPEKTORAT		Pengembangan Kompetensi Teknis	Audit Kinerja dan Keuangan 1	
INSPEKTORAT		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Review Kinerja dan Keuangan 1	
INSPEKTORAT			Pemantauan Kinerja dan Keuangan 1	
INSPEKTORAT			Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	
INSPEKTORAT			Asistensi dan Pendampingan	
INSPEKTORAT			Evaluasi Kinerja dan Keuangan	
INSPEKTORAT			Evaluasi Kinerja dan Keuangan 1	
INSPEKTORAT			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	
INSPEKTORAT			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
INSPEKTORAT			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
INSPEKTORAT			TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI	

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	5
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	6
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			Pemeriksanaan Pajak Daerah	
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	7
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Penatausahaan Barang Milik Daerah	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Inventarisasi Barang Milik Daerah	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Kapastitas ASN	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	8
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Administrasi Kepegawaian	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		Pembinaan ASN	Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian.	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Pembinaan Disiplin ASN	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		Pengembangan Kompetensi Teknis	Fasilitasi Profesi ASN	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		Pengembangan Karir ASN	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Penataan dan Mutasi Jabatan	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pengembangan Assessment Center	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pengelolaan Mutasi ASN	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pembuatan Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pengelolaan Data Kepegawaian	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fu	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabata	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umu	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Peningkatan Kapasitas ASN	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pengembangan Karir dan Promosi ASN	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
Nama SKPD	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	**9**
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	10
DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Fasilitas Parkir	
DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
DINAS PENDIDIKAN		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	
DINAS PENDIDIKAN		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan Ruang Kelas Baru	
DINAS PENDIDIKAN		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Mebeluer Sekolah	
DINAS PENDIDIKAN		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	
DINAS PENDIDIKAN		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	
DINAS PENDIDIKAN		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
DINAS PENDIDIKAN			Pembangunan Kantin Sekolah	
DINAS PENDIDIKAN			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
DINAS PENDIDIKAN			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
DINAS PENDIDIKAN			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
DINAS PENDIDIKAN			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
DINAS PENDIDIKAN			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
DINAS PENDIDIKAN			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
DINAS PENDIDIKAN			Pembangunan Laboratorium	
DINAS PENDIDIKAN			Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	
DINAS PENDIDIKAN			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
DINAS PENDIDIKAN			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
DINAS PENDIDIKAN			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
DINAS PENDIDIKAN			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
DINAS PENDIDIKAN			Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
DINAS PENDIDIKAN			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	
DINAS PENDIDIKAN			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1	
DINAS PENDIDIKAN			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
DINAS PENDIDIKAN			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
DINAS PENDIDIKAN			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
DINAS PENDIDIKAN			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
DINAS PENDIDIKAN			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	
DINAS PENDIDIKAN			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	
DINAS PENDIDIKAN			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
DINAS PENDIDIKAN			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
DINAS PENDIDIKAN			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
DINAS PENDIDIKAN			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	
DINAS PENDIDIKAN			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	
DINAS PENDIDIKAN			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN			Pengadaan Perlengkapan PAUD
DINAS PENDIDIKAN			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
DINAS PENDIDIKAN			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
DINAS PENDIDIKAN			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
DINAS PENDIDIKAN			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
DINAS PENDIDIKAN			Pengadaan Mebeluer PAUD
DINAS PENDIDIKAN			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
DINAS PENDIDIKAN			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
DINAS PENDIDIKAN			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
DINAS PENDIDIKAN			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
DINAS PENDIDIKAN			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
DINAS PENDIDIKAN			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
DINAS PENDIDIKAN			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
DINAS PENDIDIKAN			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
DINAS PENDIDIKAN			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
DINAS PENDIDIKAN			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
DINAS PENDIDIKAN			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
DINAS PENDIDIKAN			Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
DINAS PENDIDIKAN			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
DINAS PENDIDIKAN			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
DINAS PENDIDIKAN			Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
DINAS PENDIDIKAN			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
DINAS PENDIDIKAN			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
DINAS PENDIDIKAN			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN			Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN			Pendayagunaan Cagar Budaya
DINAS PENDIDIKAN			Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
DINAS PENDIDIKAN			Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
DINAS PENDIDIKAN			TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	11
DINAS KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengadaan Bahan Habis Pakai	
DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	
DINAS KESEHATAN		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
DINAS KESEHATAN		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
DINAS KESEHATAN		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
DINAS KESEHATAN		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
DINAS KESEHATAN		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
DINAS KESEHATAN		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
DINAS KESEHATAN		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
DINAS KESEHATAN		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
DINAS KESEHATAN		Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
DINAS KESEHATAN		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
DINAS KESEHATAN		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
DINAS KESEHATAN		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	
DINAS KESEHATAN		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	
DINAS KESEHATAN			Pengembangan Puskesmas	
DINAS KESEHATAN			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
DINAS KESEHATAN			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
DINAS KESEHATAN			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
DINAS KESEHATAN			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
DINAS KESEHATAN			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
DINAS KESEHATAN			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
DINAS KESEHATAN			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
DINAS KESEHATAN			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
DINAS KESEHATAN			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	
DINAS KESEHATAN			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
DINAS KESEHATAN			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
DINAS KESEHATAN			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
DINAS KESEHATAN			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
DINAS KESEHATAN			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
DINAS KESEHATAN			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	
DINAS KESEHATAN			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
DINAS KESEHATAN			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
DINAS KESEHATAN			Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
DINAS KESEHATAN			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
DINAS KESEHATAN			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
DINAS KESEHATAN			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
DINAS KESEHATAN			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
DINAS KESEHATAN			Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	
DINAS KESEHATAN			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
DINAS KESEHATAN			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Surveilans Kesehatan
DINAS KESEHATAN			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
DINAS KESEHATAN			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
DINAS KESEHATAN			Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
DINAS KESEHATAN			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
DINAS KESEHATAN			Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
DINAS KESEHATAN			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
DINAS KESEHATAN			Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
DINAS KESEHATAN			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
DINAS KESEHATAN			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
DINAS KESEHATAN			Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
DINAS KESEHATAN			Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
DINAS KESEHATAN			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	12
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Rehabilitasi Tanggul Sungai	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tanggul Sungai	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Operasional Unit Pengelola Irigasi	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaika n SPAM	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pembangunan Kanal Banjir	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Peningkatan Kanal Banjir	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Rehabilitasi Kanal Banjir	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pembangunan Jembatan	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Rehabilitasi Jembatan	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan , dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Survey Kondisi Jalan/Jembatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pembangunan Jalan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pelebaran Jalan Menuju Standar
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Rekonstruksi Jalan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pemeliharaan Rutin Jalan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pemeliharaan Berkala Jalan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Rehabilitasi Jalan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Penggantian Jembatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pemeliharaan Rutin Jembatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pemeliharaan Berkala Jembatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Penataan Bangunan dan Lingkungan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/kota
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Pemanfataan Tanah Kosong
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
DINAS PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	14
DINAS PERDAGANGAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
DINAS PERDAGANGAN	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
DINAS PERDAGANGAN	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
DINAS PERDAGANGAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
DINAS PERDAGANGAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
DINAS PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
DINAS PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	
DINAS PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
DINAS PERDAGANGAN	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
DINAS PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Penyidikan Metrologi Legal	
DINAS PERDAGANGAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
DINAS PERDAGANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
DINAS PERDAGANGAN	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
DINAS PERDAGANGAN		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	
DINAS PERDAGANGAN		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
DINAS PERDAGANGAN			Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
DINAS PERDAGANGAN			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	
DINAS PERDAGANGAN			Pameran Dagang Lokal	
DINAS PERDAGANGAN			Pameran Dagang Nasional	
DINAS PERDAGANGAN			Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	
DINAS PERDAGANGAN			Peningkatan Citra Produk Ekspor	
DINAS PERDAGANGAN			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	
DINAS PERDAGANGAN			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	
DINAS PERDAGANGAN			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	
DINAS PERDAGANGAN			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	
DINAS PERDAGANGAN			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
DINAS PERDAGANGAN			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
DINAS PERDAGANGAN			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
DINAS PERDAGANGAN			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
DINAS PERDAGANGAN			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
DINAS PERDAGANGAN			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	
DINAS PERDAGANGAN			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	
DINAS PERDAGANGAN			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	
DINAS PERDAGANGAN			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	
DINAS PERDAGANGAN			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
DINAS PERDAGANGAN			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Persampahan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN			Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN			Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN			Pembangunan Fasilitas Parkir
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN			Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN			Pembangunan Gedung Terminal
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN			Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Penataan Administrasi Kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Penyusunan Profil Kependudukan	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Penerimaan Dan Permintaan Data Kependudukan Dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota, termasuk Meminta Laporan Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang Berkaitan dengan Pelay
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Penugasan kepada Desa atau yang Disebut dengan Nama Lain
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam Rangka Pembangun
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pendaftaran Penduduk
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Perkembangan Penduduk
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Job Fair/Bursa Kerja
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Manajemen Komunikasi Krisis
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Pengelolaan Media Komunikasi Publik
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Pelayanan Informasi Publik
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Layanan Hubungan Media
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Membangun Metadata Statistik Sektoral
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Pengembangan Infrastruktur
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	19
DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
DINAS PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	
DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
DINAS PERTANIAN		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
DINAS PERTANIAN		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
DINAS PERTANIAN		Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
DINAS PERTANIAN		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	
DINAS PERTANIAN		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
DINAS PERTANIAN		Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengujian Laboratorium Kesehatan Mayarakat Veteriner	
DINAS PERTANIAN		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	
DINAS PERTANIAN		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
DINAS PERTANIAN		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
DINAS PERTANIAN		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
DINAS PERTANIAN		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	
DINAS PERTANIAN			Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	
DINAS PERTANIAN			Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	
DINAS PERTANIAN			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	
DINAS PERTANIAN			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
DINAS PERTANIAN			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	
DINAS PERTANIAN			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	
DINAS PERTANIAN			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	
DINAS PERTANIAN			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
DINAS PERTANIAN			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
DINAS PERTANIAN			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
DINAS PERTANIAN			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
DINAS PERTANIAN			Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
DINAS PERTANIAN			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
DINAS PERTANIAN			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
DINAS PERTANIAN			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	
DINAS PERTANIAN			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
DINAS PERTANIAN			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
DINAS PERTANIAN			Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	
DINAS PERTANIAN			Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
DINAS PERTANIAN			Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
DINAS PERTANIAN			Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	
DINAS PERTANIAN			Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	
DINAS PERTANIAN			Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	
DINAS PERTANIAN			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	
DINAS PERTANIAN			TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI	

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	**20**
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rujukan Anak-Anak Terlantar
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Advokasi Kabijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Advokasi Kabijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Peningkatan Kesertaan KB Pria
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Mengguna
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Inten
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Seleksi Atlet Daerah
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
DINAS PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	24
DINAS PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	
DINAS PERPUSTAKAAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
DINAS PERPUSTAKAAN		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
DINAS PERPUSTAKAAN		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	
DINAS PERPUSTAKAAN		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
DINAS PERPUSTAKAAN		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	
DINAS PERPUSTAKAAN		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	
DINAS PERPUSTAKAAN		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pengembangan Bahan Pustaka	
DINAS PERPUSTAKAAN			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	
DINAS PERPUSTAKAAN			Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
DINAS PERPUSTAKAAN			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
DINAS PERPUSTAKAAN			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
DINAS PERPUSTAKAAN			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
DINAS PERPUSTAKAAN			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	
DINAS PERPUSTAKAAN			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	
DINAS PERPUSTAKAAN			Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
DINAS PERPUSTAKAAN			Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
DINAS PERPUSTAKAAN			Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	
DINAS PERPUSTAKAAN			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	
DINAS PERPUSTAKAAN			Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	
DINAS PERPUSTAKAAN			Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	
DINAS PERPUSTAKAAN			Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	
DINAS PERPUSTAKAAN			Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	
DINAS PERPUSTAKAAN			penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
DINAS PERPUSTAKAAN			Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	
DINAS PERPUSTAKAAN			Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	
DINAS PERPUSTAKAAN			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	
DINAS PERPUSTAKAAN			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		Investigasi Kejadian Kebakaran	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	26
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Sit
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Polit
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27. a
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
8 KECAMATAN (Selain Barabai,LAS,BAS)			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

REKAP DAFTAR NAMA NOMENKLATUR (PMDN 90/2019) SESUAI HASIL MAPPING SKPD ATAS RENSTRA SKPD (2016-2021)

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27. b/c/d
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Evaluasi Kelurahan	
3 KECAMATAN (BARABAI - LAS - BAS)			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **SEKRETARIAT DAERAH**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	27	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pembinaan dan Pengaturan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Penyusunan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	RENSTRA 2020	4.01.04.2.02.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	27	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pembinaan dan Pengaturan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Penerapan Manajemen Jabatan	RENSTRA 2020	4.01.04.2.02.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	29	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program koordinasi Penyusunan Kebijakan Perekonomian	Penyusunan Kebijakan Tentang Perekonomian Daerah	RENSTRA 2020	4.01.03.2.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)							Penyusunan Kebijakan Tentang Perekonomian Daerah	RENSTRA 2020	4.01.03.2.01.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	29	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program koordinasi Penyusunan Kebijakan Perekonomian	Penyusunan Standar Satuan Harga	RENSTRA 2020	5.02.03.2.01.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	30	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	RENSTRA 2020	4.01.02.2.03.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	30	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan	USULAN RENSTRA 2021	4.01.02.2.03.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	30	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan	RENSTRA 2020	4.01.02.2.03.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	31	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Bantuan Hukum	Konsultasi dan Advokasi Hukum	RENSTRA 2020	4.01.02.2.03.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Fasilitasi Bantuan Hukum
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	32	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Bina Mental Keagamaan	RENSTRA 2020	4.01.02.2.02.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	32	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan	RENSTRA 2020	4.01.02.2.02.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	32	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Pengetahuan, Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama serta Pengembangan Syiar-Syiar Agama.	RENSTRA 2020	4.01.02.2.02.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	35	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan dan Pengembangan SDM	Pemberian Bantuan dan Beasiswa Pendidikan Tinggi	RENSTRA 2020	4.01.02.2.02.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	36	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Kelembagaan Ekonomi Daerah	Pengembangan BUMD	RENSTRA 2020	4.01.03.2.01.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	40	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Pemetaan dan Penegasan Batas Wilayah	RENSTRA 2020	4.01.02.2.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	43	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	RENSTRA 2020	4.01.04.2.02.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	46	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program pelayanan Keprotokolan	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	RENSTRA 2020	4.01.04.2.03.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	46	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program pelayanan Keprotokolan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pimpinan	RENSTRA 2020	4.01.04.2.03.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)							Peningkatan Pelayanan Administrasi Pimpinan	RENSTRA 2020	4.01.04.2.01.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Pelaksanaan Administrasi Umum	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	47	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Peningkatan Pelayanan Rumah tangga Pimpinan dan perangkat daerah	RENSTRA 2020	4.01.04.2.01.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Pelaksanaan Administrasi Umum	Pengelolaan Rumah Tangga
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	47	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah tangga pimpinan	RENSTRA 2020	4.01.04.2.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Pelaksanaan Administrasi Umum	Pengelolaan Perlengkapan
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	48	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Koordinasi RANHAM	RENSTRA 2020	4.01.02.2.03.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	50	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pengendalian Administrasi Pembangunan	Pengendalian Administrasi Pembangunan	RENSTRA 2020	4.01.03.2.02.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)							Pengendalian Administrasi Pembangunan	RENSTRA 2020	4.01.03.2.02.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Administrasi Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	51	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	RENSTRA 2020	4.01.03.2.03.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	51	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	RENSTRA 2020	4.01.03.2.03.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	51	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	RENSTRA 2020	4.01.03.2.03.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	52	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Koordinasi Kesehatan dan Olahraga	Koordinasi Pembinaan Kesehatan dan Olahraga	RENSTRA 2020	0	0	0	0	0	TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	53	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pelayanan Pendidikan tinggi	Pembangunan /Rehabilitasi Asrama Mahasiswa di Luar Daerah	RENSTRA 2020	0	0	0	0	0	TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	54	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pembinaan Bidang Pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C)	Pembinaan Bidang Pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C)	RENSTRA 2020	4.01.03.2.04.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	55	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Penerapan SAKIP	Peningkatan Implementasi SAKIP	RENSTRA 2020	4.01.04.2.02.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	56	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	RENSTRA 2020	4.01.02.2.01.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	56	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Monitoring dan pelaporan atas penyelenggaraan PATEN	RENSTRA 2020	4.01.02.2.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	56	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	RENSTRA 2020	4.01.02.2.01.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	56	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Koordinasi kerjasama daerah	RENSTRA 2020	4.01.02.2.04.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)							Koordinasi kerjasama daerah	RENSTRA 2020	4.01.02.2.04.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)							Koordinasi kerjasama daerah	RENSTRA 2020	4.01.02.2.04.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	4	1	56	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Monitoring dan pelaporan atas penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan	RENSTRA 2020	4.01.02.2.01.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **SEKRETARIAT DPRD**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	4	8	19	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program peningkatan pelayanan Pimpinan dan anggota DPRD	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	X	4.02.02.2.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama		4.02.03.2.04.06	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama		4.02.03.2.07.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama		4.02.03.2.05.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama		4.02.03.2.05.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama		4.02.03.2.05.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	4	8	19	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program peningkatan pelayanan Pimpinan dan anggota DPRD	Kegiatan Reses	X	4.02.02.2.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Kegiatan Reses		4.02.03.2.04.06	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Kegiatan Reses		4.02.03.2.07.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Kegiatan Reses		4.02.03.2.05.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Kegiatan Reses		4.02.03.2.05.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Kegiatan Reses		4.02.03.2.05.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	4	8	19	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program peningkatan pelayanan Pimpinan dan anggota DPRD	Reses/Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Masyarakat	X	4.02.02.2.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Reses/Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Masyarakat		4.02.03.2.04.06	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Reses/Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Masyarakat		4.02.03.2.07.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Reses/Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Masyarakat		4.02.03.2.05.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Reses/Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Masyarakat		4.02.03.2.05.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Reses/Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Masyarakat		4.02.03.2.05.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	4	8	19	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program peningkatan pelayanan Pimpinan dan anggota DPRD	Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Anggota DPRD	X	4.02.02.2.02.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	4	8	19	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program peningkatan pelayanan Pimpinan dan anggota DPRD	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd	X	4.02.03.2.04.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd		4.02.03.2.04.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Bimbingan Teknis DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd		4.02.03.2.04.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd		4.02.03.2.04.04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd		4.02.03.2.04.05	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd		4.02.03.2.04.06	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd		4.02.03.2.04.07	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd		4.02.02.2.01.04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Administrasi DPRD	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd		4.02.03.2.08.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd		4.02.02.2.02.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd		4.02.02.2.02.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	4	8	19	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program peningkatan pelayanan Pimpinan dan anggota DPRD	Reses/Hearing/Dialog dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat	X	4.02.02.2.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Reses/Hearing/Dialog dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat		4.02.03.2.04.06	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Reses/Hearing/Dialog dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat		4.02.03.2.07.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Reses/Hearing/Dialog dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat		4.02.03.2.05.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
								Reses/Hearing/Dialog dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat		4.02.03.2.05.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses
								Reses/Hearing/Dialog dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat		4.02.03.2.05.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	4	8	19	19	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program peningkatan pelayanan Pimpinan dan anggota DPRD	Publikasi dan penyebaran informasi	X	4.02.03.2.04.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Publikasi dan penyebaran informasi		4.02.03.2.07.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Publikasi dan penyebaran informasi		4.02.02.2.01.06	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Administrasi DPRD	Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	4	8	20	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Publikasi dan penyebaran informasi	X	4.02.03.2.04.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Publikasi dan penyebaran informasi		4.02.03.2.07.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Publikasi dan penyebaran informasi		4.02.02.2.01.06	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Administrasi DPRD	Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	4	8	24	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	X	4.02.03.2.01.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		4.02.03.2.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Perda
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		4.02.03.2.01.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		4.02.03.2.01.04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		4.02.03.2.01.05	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Penyusunan Tata Tertib DPRD
								Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		4.02.02.2.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	4	8	24	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	X	4.02.03.2.05.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	4.02.03.2.08.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	4.02.03.2.08.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Pelaksanaan Undangan DPRD
								Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	4.02.03.2.08.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	4.02.03.2.07.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	4.02.03.2.03.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	4.02.03.2.03.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	4.02.03.2.03.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	4.02.03.2.03.04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	4.02.03.2.03.05	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	4.02.03.2.03.06	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	4.02.03.2.03.07	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penggunaan Anggaran
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	4	8	24	14	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Rapat-rapat paripurna dan Alat Kelengkapan Dewan	4.02.02.2.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Rapat-rapat paripurna dan Alat Kelengkapan Dewan	4.02.03.2.02.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	pembahasan KUA dan PPAS
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Rapat-rapat paripurna dan Alat Kelengkapan Dewan	4.02.03.2.02.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Rapat-rapat paripurna dan Alat Kelengkapan Dewan	4.02.03.2.02.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan APBD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Rapat-rapat paripurna dan Alat Kelengkapan Dewan	4.02.03.2.02.04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan APBD Perubahan
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Rapat-rapat paripurna dan Alat Kelengkapan Dewan	4.02.03.2.02.05	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Laporan Semester
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Rapat-rapat paripurna dan Alat Kelengkapan Dewan	4.02.03.2.02.06	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Rapat-rapat paripurna dan Alat Kelengkapan Dewan	4.02.03.2.07.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Rapat-rapat paripurna dan Alat Kelengkapan Dewan	4.02.03.2.07.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Rapat-rapat paripurna dan Alat Kelengkapan Dewan	4.02.02.2.01.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Administrasi DPRD	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	4	8	24	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Peningkatan Pelayanan Pembentukan Peraturan Perundangan	4.02.02.2.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Peningkatan Pelayanan Pembentukan Peraturan Perundangan	4.02.03.2.01.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Peningkatan Pelayanan Pembentukan Peraturan Perundangan	4.02.03.2.07.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Peningkatan Pelayanan Pembentukan Peraturan Perundangan	4.02.03.2.07.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	x	x	x	x	RUTIN	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa tenaga teknis/ administrasi perkantoran	X	4.02.02.2.01.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Administrasi DPRD	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)							Penyediaan jasa tenaga teknis/ administrasi perkantoran		4.02.03.2.04.05	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	x	x	x	x	RUTIN	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	X	4.02.02.2.01.04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Administrasi DPRD	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	x	x	x	x	RUTIN	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi Perkantoran	X	4.02.02.2.01.04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Administrasi DPRD	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	x	x	x	x	RUTIN	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan dan pemeliharaan sarana kantor	X	4.02.02.2.01.04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Administrasi DPRD	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	x	x	x	x	RUTIN	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan , peningkatan dan pemeliharaan rumah dinas	X	4.02.02.2.01.04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Administrasi DPRD	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	x	x	x	x	RUTIN	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya	X	4.02.02.2.02.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	x	x	x	x	RUTIN	--- BTL ---	Pembayaran Gaji, Tunjangan dan lainnya (Anggota Dewan)	X	4.02.02.2.02.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **RSUD H. DAMANHURI BARABAI**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
RSUD H. Damanhuri	Kesehatan	1	2	26	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran	RENSTRA 2021	1.02.02.2.02.32	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
RSUD H. Damanhuri	Kesehatan	1	2	26	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit	RENSTRA 2021	1.02.02.2.02.32	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
RSUD H. Damanhuri	Kesehatan	1	2	44	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	RENSTRA 2021	1.02.02.2.02.32	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **INSPEKTORAT**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Inspektorat	Pengawasan	4	2	10	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
Inspektorat	Pengawasan							Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
Inspektorat	Pengawasan							Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
Inspektorat	Pengawasan	4	2	10	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Penanganan kasus-kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah.
Inspektorat	Pengawasan							Penanganan kasus-kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah.
Inspektorat	Pengawasan							Penanganan kasus-kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah.
Inspektorat	Pengawasan	4	2	10	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tindak lanjut temuan hasil pengawasan APIP
Inspektorat	Pengawasan	4	2	10	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Sosialisasi dan Koordinasi Implementasi Pelaksanaan Good Governance Pemerintah Kabupaten HST
Inspektorat	Pengawasan							Sosialisasi dan Koordinasi Implementasi Pelaksanaan Good Governance Pemerintah Kabupaten HST
Inspektorat	Pengawasan	4	2	10	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Evaluasi tindaklanjut temuan hasil pengawasan
Inspektorat	Pengawasan							Evaluasi tindaklanjut temuan hasil pengawasan
Inspektorat	Pengawasan	4	2	11	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas (APIP)	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
Inspektorat	Pengawasan	4	2	11	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas (APIP)	Bimbingan teknis Pemeriksaan dan Pengawasan
Inspektorat	Pengawasan	4	2	11	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas (APIP)	Pendidikan dan Pelatihan Penunjang tugas pokok pengawasan
Inspektorat	Pengawasan	4	2	12	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Kegiatan Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Inspektorat	Pengawasan							Kegiatan Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Inspektorat	Pengawasan	4	2	12	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Kegiatan Pelaksanaan penanganan laporan hasil kekayaan ASN
Inspektorat	Pengawasan	4	2	13	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kegiatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Inspektorat	Pengawasan	4	2	13	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kegiatan Pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
6.01.02.2.01.01	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Audit Kinerja dan Keuangan
6.01.02.2.01.02	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Review Kinerja dan Keuangan
6.01.02.2.01.03	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pemantauan Kinerja dan Keuangan
6.01.02.2.02.01	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Kinerja dan Keuangan 1
6.01.02.2.02.02	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Review Kinerja dan Keuangan 1
6.01.02.2.02.03	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemantauan Kinerja dan Keuangan 1
0	0	0	0	0	TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI
6.01.03.2.02.01	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Asistensi dan Pendampingan	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
6.01.03.2.02.02	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Asistensi dan Pendampingan	Asistensi dan Pendampingan
6.01.02.2.01.04	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
6.01.02.2.02.04	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Evaluasi Kinerja dan Keuangan 1
5.04.02.2.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5.04.02.2.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5.04.02.2.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
6.01.03.2.01.01	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
6.01.03.2.01.02	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
0	0	0	0	0	TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI
6.01.03.2.02.02	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Asistensi dan Pendampingan	Asistensi dan Pendampingan
6.01.03.2.02.02	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Asistensi dan Pendampingan	Asistensi dan Pendampingan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	**Bidang**	**Kode Urusan**	**Kode Bidang**	**Kode Program**	**Kode Kegiatan**	**Urusan**	**Program**	**Kegiatan**
Inspektorat	Pengawasan	4	2	14	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	Reviu Rencana Kegiatan
Inspektorat	Pengawasan	4	2	14	13	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan
Inspektorat	Pengawasan	4	2	14	14	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	Reviu Rencana Kegiatan dan Laporan Keuangan
Inspektorat	Pengawasan	4	2	15	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan Evaluasi Laporan kinerja Perangkat Daerah dan review LKIP Pemda

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	**Urusan**	**Bidang**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
6.01.02.2.01.02	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Review Kinerja dan Keuangan
6.01.02.2.01.02	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Review Kinerja dan Keuangan
6.01.02.2.01.02	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Review Kinerja dan Keuangan
6.01.02.2.01.04	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Evaluasi Kinerja dan Keuangan

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	15	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pengembangan Data /informasi	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	15	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pengembangan Data /informasi	Penyusunan profile daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	15	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pengembangan Data /informasi	Survey Persepsi Publik
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	15	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pengembangan Data /informasi	Pengembangan sistem Database dan Informasi Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Pengembangan sistem Database dan Informasi Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	19	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Koordinasi perencanaan penanganan program nasional di daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	20	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	20	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	20	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	21	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan rancangan RPJPD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan rancangan RPJPD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	21	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program perencanaan pembangunan daerah	Penetapan RPJPD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penetapan RPJPD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	21	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan rancangan RPJMD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan rancangan RPJMD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	21	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program perencanaan pembangunan daerah	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	21	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program perencanaan pembangunan daerah	Penetapan RPJMD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penetapan RPJMD

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
5.01.02.2.01.07	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.08	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.07	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.08	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah
0	0	0	0	0	TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI
5.04.02.2.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5.04.02.2.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5.01.02.2.01.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
5.01.02.2.01.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan
5.01.02.2.01.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
5.01.02.2.01.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan
5.01.02.2.01.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
5.01.02.2.01.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan
5.01.02.2.01.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
5.01.02.2.01.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan
5.01.02.2.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
5.01.02.2.01.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
5.01.02.2.01.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	21	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan rancangan RKPD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan rancangan RKPD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan rancangan RKPD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan rancangan RKPD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan rancangan RKPD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	21	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program perencanaan pembangunan daerah	Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	21	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	21	19	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program perencanaan pembangunan daerah	Monitoring, Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Monitoring, Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Monitoring, Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Monitoring, Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	21	20	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program perencanaan pembangunan daerah	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	22	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	22	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Ekonomi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Ekonomi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Ekonomi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Ekonomi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Ekonomi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	22	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	23	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program perencanaan sosial dan budaya	Penyusunan perencanaan pengembangan bidang sosial dan SDM
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan perencanaan pengembangan bidang sosial dan SDM
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan perencanaan pengembangan bidang sosial dan SDM

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
5.01.02.2.01.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
5.01.02.2.01.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan
5.01.02.2.01.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5.01.02.2.01.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya
5.01.02.2.01.06	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
5.01.02.2.03.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
5.01.02.2.03.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM
5.01.02.2.03.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
5.01.02.2.03.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.08	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah
5.01.04.2.01.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
5.01.04.2.02.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5.01.04.2.03.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
5.01.04.2.01.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
5.01.04.2.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
5.01.04.2.02.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5.01.04.2.02.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5.01.04.2.03.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
5.01.04.2.03.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
0	0	0	0	0	TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI
5.01.03.2.01.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5.01.03.2.02.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5.01.03.2.03.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	23	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program perencanaan sosial dan budaya	Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan SDM
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan SDM
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan SDM
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan SDM
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan SDM
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan SDM
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	23	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program perencanaan sosial dan budaya	Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Budaya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Budaya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Budaya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Budaya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Budaya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Budaya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	23	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program perencanaan sosial dan budaya	Penyusunan perencanaan pengembangan bidang pemerintahan dan budaya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan perencanaan pengembangan bidang pemerintahan dan budaya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan perencanaan pengembangan bidang pemerintahan dan budaya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	26	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	27	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Perencanaan Infrastruktur	Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Infrastruktur
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Infrastruktur
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Infrastruktur
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	27	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Perencanaan Infrastruktur	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Daerah

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
5.01.03.2.01.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5.01.03.2.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5.01.03.2.02.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5.01.03.2.02.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5.01.03.2.03.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5.01.03.2.03.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5.01.03.2.01.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5.01.03.2.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5.01.03.2.02.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5.01.03.2.02.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5.01.03.2.03.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5.01.03.2.03.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5.01.03.2.01.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5.01.03.2.02.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5.01.03.2.03.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
0	0	0	0	0	TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI
5.01.05.2.01.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5.01.05.2.02.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
5.01.05.2.03.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan
5.01.05.2.01.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5.01.05.2.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5.01.05.2.02.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	29	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	29	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran	Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	29	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran	Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	29	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penyusunan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penyusunan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan							Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penyusunan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	4	3	30	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Pembiayaan Pembangunan	Koordinasi Penyusunan Program dan Pembiayaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan	4	7	28	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Penyusunan SIDA
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan	4	7	28	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Penyusunan Kajian Kebijakan pembangunan, inovasi dan teknologi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan pembangunan, inovasi dan teknologi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan pembangunan, inovasi dan teknologi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan pembangunan, inovasi dan teknologi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan pembangunan, inovasi dan teknologi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan pembangunan, inovasi dan teknologi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan pembangunan, inovasi dan teknologi

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
5.01.05.2.02.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
5.01.05.2.03.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan
5.01.05.2.03.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan
5.01.02.2.02.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah
5.01.02.2.02.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah
5.02.02.2.01.10	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
5.02.02.2.01.11	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
5.02.02.2.01.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
5.02.02.2.01.10	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
5.02.02.2.01.11	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
5.02.02.2.01.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
5.01.02.2.02.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah
5.01.02.2.02.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.04.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
5.05.02.2.03.07	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
5.05.02.2.03.08	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
5.05.02.2.03.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
5.05.02.2.03.10	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
5.05.02.2.03.11	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.05.02.2.03.12	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
5.05.02.2.03.13	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan pembangunan, inovasi dan teknologi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan pembangunan, inovasi dan teknologi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan pembangunan, inovasi dan teknologi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan pembangunan, inovasi dan teknologi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan pembangunan, inovasi dan teknologi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan	4	7	28	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan	4	7	28	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
5.05.02.2.04.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
5.05.02.2.04.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
5.05.02.2.04.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
5.05.02.2.04.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
5.05.02.2.04.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
5.05.02.2.04.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
5.05.02.2.01.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
5.05.02.2.01.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
5.05.02.2.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
5.05.02.2.01.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
5.05.02.2.01.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
5.05.02.2.01.06	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
5.05.02.2.01.07	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
5.05.02.2.01.08	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
5.05.02.2.01.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
5.05.02.2.01.10	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
5.05.02.2.01.11	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
5.05.02.2.01.12	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
5.05.02.2.01.13	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
5.05.02.2.01.14	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	**Bidang**	**Kode Urusan**	**Kode Bidang**	**Kode Program**	**Kode Kegiatan**	**Urusan**	**Program**	**Kegiatan**
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan							Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	**Urusan**	**Bidang**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
5.05.02.2.01.15	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang
5.05.02.2.02.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
5.05.02.2.02.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.05.02.2.02.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5.05.02.2.02.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
5.05.02.2.02.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
5.05.02.2.02.06	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
5.05.02.2.02.07	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.05.02.2.02.08	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.05.02.2.02.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
5.05.02.2.02.10	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
5.05.02.2.02.11	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Keuangan	4	4	19	13	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Intensifikasi pajak dan retribusi daerah non PBB dan BPHTB	Pelayanan pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak daerah.	RENSTRA 2020	5.02.04.2.02.08	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Keuangan							Pelayanan pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak daerah.	RENSTRA 2020	5.02.04.2.02.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Keuangan							Pelayanan pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak daerah.	RENSTRA 2020	5.02.04.2.02.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Keuangan	4	4	19	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Intensifikasi pajak dan retribusi daerah non PBB dan BPHTB	Pemutakhiran data sumber-sumber retribusi daerah.	RENSTRA 2020	5.02.04.2.02.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Keuangan	4	4	19	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Intensifikasi pajak dan retribusi daerah non PBB dan BPHTB	Evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.	RENSTRA 2020	5.02.04.2.02.11	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Keuangan	4	4	20	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Pendataan dan Pengelolaan Data Base SISMIOP PBB dan BPHTB	RENSTRA 2020	5.02.04.2.02.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Keuangan							Pendataan dan Pengelolaan Data Base SISMIOP PBB dan BPHTB	RENSTRA 2020	5.02.04.2.02.10	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Pemeriksanaan Pajak Daerah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Keuangan	4	4	20	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Penetapan dan Verifikasi PBB dan BPHTB	RENSTRA 2020	5.02.04.2.02.08	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Keuangan							Penetapan dan Verifikasi PBB dan BPHTB	RENSTRA 2020	5.02.04.2.02.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Keuangan	4	4	20	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Penagihan PBB dan BPHTB	RENSTRA 2020	5.02.04.2.02.08	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Keuangan							Penagihan PBB dan BPHTB	RENSTRA 2020	5.02.04.2.02.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Keuangan							Penagihan PBB dan BPHTB	RENSTRA 2020	5.02.04.2.02.10	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Pemeriksanaan Pajak Daerah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Keuangan	4	4	22	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah	RENSTRA 2020	5.02.04.2.02.06	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Keuangan	4	4	22	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	RENSTRA 2020	5.02.04.2.02.11	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Keuangan							Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	RENSTRA 2020	5.02.04.2.02.10	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Pemeriksanaan Pajak Daerah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Keuangan							Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	RENSTRA 2020	5.02.04.2.02.07	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Keuangan	4	4	22	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah	RENSTRA 2020	5.02.04.2.02.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	4	4	16	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Penyusunan Sistem Informasi Barang Milik Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Sistem Informasi Barang Milik Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Sistem Informasi Barang Milik Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Sistem Informasi Barang Milik Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Sistem Informasi Barang Milik Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Sistem Informasi Barang Milik Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Sistem Informasi Barang Milik Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Sistem Informasi Barang Milik Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Sistem Informasi Barang Milik Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Sistem Informasi Barang Milik Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Sistem Informasi Barang Milik Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Sistem Informasi Barang Milik Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Sistem Informasi Barang Milik Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	4	4	16	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Penghapusan dan Penjualan BMD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penghapusan dan Penjualan BMD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penghapusan dan Penjualan BMD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penghapusan dan Penjualan BMD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penghapusan dan Penjualan BMD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	4	4	16	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Sertifikasi Tanah BMD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Sertifikasi Tanah BMD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Sertifikasi Tanah BMD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Sertifikasi Tanah BMD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	4	4	17	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Raperda Tentang APBD

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
5.02.03.2.01.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
5.02.03.2.01.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.06	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.07	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.08	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.10	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.11	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.12	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD
5.02.03.2.01.13	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.08	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.10	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.06	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.07	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.06	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.08	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
5.02.02.2.01.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Raperda Tentang APBD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Raperda Tentang APBD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Raperda Tentang APBD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Raperda Tentang APBD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	4	4	17	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Rancangan peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	4	4	17	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	4	4	17	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Rancangan peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	4	4	18	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten /Kota	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan gaji pada SKPD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	4	4	18	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten /Kota	Fasilitasi Penatausahaan Pengeluaran
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Fasilitasi Penatausahaan Pengeluaran
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Fasilitasi Penatausahaan Pengeluaran
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	4	4	18	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten /Kota	Peningkatan Pengelolaan Kas Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Peningkatan Pengelolaan Kas Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Peningkatan Pengelolaan Kas Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Peningkatan Pengelolaan Kas Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Peningkatan Pengelolaan Kas Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	4	4	23	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kualitas Laporan Keuangan	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
5.02.02.2.01.07	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
5.02.02.2.01.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
5.02.02.2.01.10	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
5.02.02.2.01.11	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
5.02.02.2.01.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
5.02.02.2.01.06	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
5.02.02.2.01.07	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
5.02.02.2.01.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
5.02.02.2.01.10	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
5.02.02.2.01.11	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
5.02.02.2.01.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
5.02.02.2.02.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
5.02.02.2.02.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
5.02.02.2.02.08	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
5.02.02.2.02.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
5.02.02.2.02.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
5.02.02.2.02.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5.02.02.2.02.06	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.02.02.2.02.07	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas
5.02.02.2.02.10	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5.02.02.2.03.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.10	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.12	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	4	4	23	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kualitas Laporan Keuangan	Penyusunan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan							Penyusunan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	4	4	23	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kualitas Laporan Keuangan	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
5.02.02.2.03.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
5.02.02.2.03.06	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5.02.02.2.03.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5.02.02.2.03.07	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian	4	5	11	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Disiplin PNS/ASN	Pembinaan Disiplin Aparatur	RENSTRA 2020	5.03.02.2.03.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Kapastitas ASN	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian							Pembinaan Disiplin Aparatur	RENSTRA 2020	5.03.02.2.02.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Administrasi Kepegawaian	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian							Pembinaan Disiplin Aparatur	RENSTRA 2020	5.03.02.2.02.06	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Administrasi Kepegawaian	Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian							Pembinaan Disiplin Aparatur	RENSTRA 2020	5.03.02.2.03.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Kapastitas ASN	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian							Pembinaan Disiplin Aparatur	RENSTRA 2020	5.03.02.2.05.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pembinaan ASN	Pembinaan Disiplin ASN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian							Pembinaan Disiplin Aparatur	RENSTRA 2020	5.03.02.2.05.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pembinaan ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian	4	5	11	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Disiplin PNS/ASN	Sosialisasi/ Orientasi CPNS/PNS	RENSTRA 2020	5.03.02.2.03.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Kapastitas ASN	Fasilitasi Profesi ASN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian	4	5	12	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pemberhentian dan Kesejahteraan ASN	Pemberian Penghargaan Bagi PNS/ASN Yang Berprestasi	RENSTRA 2020	5.03.02.2.05.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pembinaan ASN	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian	4	5	12	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pemberhentian dan Kesejahteraan ASN	Peningkatan Pengeloaan Administrasi Kesejahteraan ASN	RENSTRA 2020	5.03.02.2.02.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Administrasi Kepegawaian	Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian							Peningkatan Pengeloaan Administrasi Kesejahteraan ASN	RENSTRA 2020	5.03.02.2.03.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Kapastitas ASN	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian	4	5	13	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pengembangan Aparatur Daerah	Seleksi dan Pengangkatan dalam Jabatan	RENSTRA 2020	5.03.02.2.02.08	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian							Seleksi dan Pengangkatan dalam Jabatan	RENSTRA 2020	5.03.02.2.02.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Administrasi Kepegawaian	Penataan dan Mutasi Jabatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian							Seleksi dan Pengangkatan dalam Jabatan	RENSTRA 2020 c	5.03.02.2.03.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Kapastitas ASN	Pengembangan Assessment Center
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian	4	5	13	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pengembangan Aparatur Daerah	Peningkatan Pengeloaan Administrasi Mutasi ASN	RENSTRA 2020	5.03.02.2.02.07	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Mutasi ASN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian							Peningkatan Pengeloaan Administrasi Mutasi ASN	RENSTRA 2020	5.03.02.2.02.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Administrasi Kepegawaian	Penataan dan Mutasi Jabatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian							Peningkatan Pengeloaan Administrasi Mutasi ASN	RENSTRA 2020	5.03.02.2.02.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Administrasi Kepegawaian	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian	4	5	13	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Pengembangan Aparatur Daerah	Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat dan Pengangkatan PNS/ASN	RENSTRA 2020	5.03.02.2.02.10	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian							Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat dan Pengangkatan PNS/ASN	RENSTRA 2020	5.03.02.2.02.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Administrasi Kepegawaian	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian							Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat dan Pengangkatan PNS/ASN	RENSTRA 2020	5.03.02.2.02.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Administrasi Kepegawaian	Pembuatan Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian	4	5	17	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pemutakhiran Data, Formasi dan Pengadaan ASN	Pemutakhiran Database Kepegawaian	RENSTRA 2020	5.03.02.2.01.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian							Pemutakhiran Database Kepegawaian	RENSTRA 2020	5.03.02.2.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian							Pemutakhiran Database Kepegawaian	RENSTRA 2020	5.03.02.2.01.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian							Pemutakhiran Database Kepegawaian	RENSTRA 2020	5.03.02.2.01.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Kepegawaian	4	5	17	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pemutakhiran Data, Formasi dan Pengadaan ASN	Seleksi Penerimaan ASN	RENSTRA 2020	5.03.02.2.02.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Administrasi Kepegawaian	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan	4	6	15	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah	Pendikan dan Pelatihan Bagi PNS/ASN	RENSTRA 2020	5.03.02.2.03.06	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Kapastitas ASN	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pendikan dan Pelatihan Bagi PNS/ASN	RENSTRA 2020	5.04.02.2.02.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fu
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pendikan dan Pelatihan Bagi PNS/ASN	RENSTRA 2020 c	5.04.02.2.02.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pendikan dan Pelatihan Bagi PNS/ASN	RENSTRA 2020 c	5.04.02.2.02.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pendikan dan Pelatihan Bagi PNS/ASN	RENSTRA 2020 c	5.04.02.2.02.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pendikan dan Pelatihan Bagi PNS/ASN	RENSTRA 2020 c	5.04.02.2.02.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pendikan dan Pelatihan Bagi PNS/ASN	RENSTRA 2020 c	5.04.02.2.02.06	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pendikan dan Pelatihan Bagi PNS/ASN	RENSTRA 2020 c	5.04.02.2.01.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pendikan dan Pelatihan Bagi PNS/ASN	RENSTRA 2020 c	5.04.02.2.02.07	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pendikan dan Pelatihan Bagi PNS/ASN	RENSTRA 2020 c	5.04.02.2.02.08	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabata
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pendikan dan Pelatihan Bagi PNS/ASN	RENSTRA 2020 c	5.04.02.2.01.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umu
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pendikan dan Pelatihan Bagi PNS/ASN	RENSTRA 2020	5.03.02.2.03.08	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Kapastitas ASN	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan	4	6	15	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah	Pembinaan Pengembangan SDM PNS/ASN Daerah	RENSTRA 2020	5.03.02.2.03.07	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Kapastitas ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pembinaan Pengembangan SDM PNS/ASN Daerah	RENSTRA 2020	5.03.02.2.03.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Kapastitas ASN	Peningkatan Kapasitas ASN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pembinaan Pengembangan SDM PNS/ASN Daerah	RENSTRA 2020	5.03.02.2.03.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Kapastitas ASN	Fasilitasi Profesi ASN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pembinaan Pengembangan SDM PNS/ASN Daerah	RENSTRA 2020	5.03.02.2.04.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Karir ASN	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pembinaan Pengembangan SDM PNS/ASN Daerah	RENSTRA 2020	5.03.02.2.04.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Karir ASN	Pengembangan Karir dan Promosi ASN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pembinaan Pengembangan SDM PNS/ASN Daerah	RENSTRA 2020	5.04.02.2.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pembinaan Pengembangan SDM PNS/ASN Daerah	RENSTRA 2020 c	5.03.02.2.03.09	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Kapastitas ASN	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pembinaan Pengembangan SDM PNS/ASN Daerah	RENSTRA 2020 c	5.04.02.2.01.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umu

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pembinaan Pengembangan SDM PNS/ASN Daerah	RENSTRA 2020 c	5.04.02.2.01.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pendidikan dan Pelatihan							Pembinaan Pengembangan SDM PNS/ASN Daerah	RENSTRA 2020 c	5.04.02.2.01.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	22	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman dan Ketertiban							Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	22	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Penyusunan Peta Rawan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	22	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Posko Komando Siaga Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	22	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk Ditempat Penampungan Sementara
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	22	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	29	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan kemampuan petugas	Pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	30	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Penanganan tanggap darurat bencana	Posko Komando Siaga bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	30	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Penanganan tanggap darurat bencana	Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan sementara
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	31	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pasca Bencana	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.05.03.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
1.05.03.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.02.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.03.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.02.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.02.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.03.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.02.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **DINAS PENDIDIKAN**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	10	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	X	1.01.02.2.01.21	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	10	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pembangunan Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD	X	1.01.02.2.02.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Fasilitas Parkir
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pembangunan Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD		1.01.02.2.02.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	10	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary SD	X	1.01.02.2.02.24	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	10	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pembangunan Ruang Guru Sekolah	X	1.01.02.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	10	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Daerah Terpencil/Sangat Terpencil	X	1.01.02.2.02.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	10	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD	X	1.01.02.2.02.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	10	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Dasar	X	1.01.02.2.02.14	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	10	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Rehabilitasi ruang guru SD	X	1.01.02.2.02.15	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	10	23	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pelaksanaan sosialisasi wajar 9 tahun	X	0	0	0	0	0	TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	10	24	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	X	1.01.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	10	26	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pembangunan Sekolah SD	X	1.01.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	10	27	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pengadaan Mebeluer Sekolah	X	1.01.02.2.02.25	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Mebeluer Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	10	28	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pengadaan buku-buku SD	X	1.01.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	10	29	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	X	1.01.02.2.02.35	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	10	30	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pembangunan, Peningkatan Prasarana SD	X	1.01.02.2.02.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pembangunan, Peningkatan Prasarana SD		1.01.02.2.02.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pembangunan, Peningkatan Prasarana SD		1.01.02.2.02.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Kantin Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pembangunan, Peningkatan Prasarana SD		1.01.02.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pembangunan, Peningkatan Prasarana SD		1.01.02.2.02.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	10	31	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Rehabilitasi Prasarana SD	X	1.01.02.2.02.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	10	32	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pengadaan Sarana Pembelajaran SD	X	1.01.02.2.02.27	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	11	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	X	1.01.02.2.02.24	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	11	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	X	1.01.02.2.02.32	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	11	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	11	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Pembangunan Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	11	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	11	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Pengadaan Mebeluer Sekolah SMP	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	11	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Beasiswa Siswa Berprestasi	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	11	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Penyelenggaraan Lomba Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	11	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	11	25	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Penyediaan Beasiswa Kurang Mampu	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	11	26	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	11	27	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	11	29	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	11	30	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Pembangunan, Peningkatan Prasarana SMP	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pembangunan, Peningkatan Prasarana SMP	
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pembangunan, Peningkatan Prasarana SMP	
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pembangunan, Peningkatan Prasarana SMP	
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pembangunan, Peningkatan Prasarana SMP	
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pembangunan, Peningkatan Prasarana SMP	
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	11	31	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Rehabilitasi Prasarana SMP	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Rehabilitasi Prasarana SMP	
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Rehabilitasi Prasarana SMP	
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Rehabilitasi Prasarana SMP	
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Rehabilitasi Prasarana SMP	
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Rehabilitasi Prasarana SMP	
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Rehabilitasi Prasarana SMP	
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	11	32	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Pengadaan Sarana Pembelajaran SMP	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	13	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pengadaan Buku	X

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.01.02.2.02.32	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.02.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Fasilitas Parkir
1.01.02.2.02.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.2.02.25	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Mebeluer Sekolah
1.01.02.2.02.32	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.02.38	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.01.03.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1.01.02.2.02.32	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru
1.01.02.2.02.14	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1.01.02.2.02.35	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01.02.2.02.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.2.02.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1.01.02.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1.01.02.2.02.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Kantin Sekolah
1.01.02.2.02.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium
1.01.02.2.02.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1.01.02.2.02.24	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.2.02.23	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
1.01.02.2.02.18	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
1.01.02.2.02.17	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1.01.02.2.01.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1.01.02.2.02.14	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1.01.02.2.02.19	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
1.01.02.2.02.27	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1.01.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	13	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pembangunan Ruang ibadah SD	1.01.02.2.02.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	13	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pelaksanaan Pra Ujian dan Ujian	1.01.02.2.02.36	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	13	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	1.01.03.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	13	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pembangunan ruang Perpustakaan SD	1.01.02.2.02.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	13	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan	1.01.02.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	13	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Penyelenggaraan Akreditasi SD	1.01.02.2.01.24	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Penyelenggaraan Akreditasi SD	1.01.02.2.01.28	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	13	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Rehabilitasi Uks/ Kantin Sekolah SD	1.01.02.2.01.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	13	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Penyelenggaraan Lomba Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	1.01.02.2.02.38	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	13	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Pengadaan sarana prasarana penunjang peningaktan mutu SD	1.01.02.2.02.27	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	14	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Beasiswa Siswa Berprestasi SMP	1.01.02.2.02.32	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	14	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Pelaksanaan Pra Ujian dan Ujian SMP	1.01.02.2.02.36	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	14	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum SMP	1.01.02.2.02.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	14	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan SMP	1.01.02.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	14	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Penyelenggaraan Akreditasi SMP	1.01.02.2.02.37	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Penyelenggaraan Akreditasi SMP	1.01.02.2.02.41	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	14	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Penyelenggaraan Lomba Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP	1.01.02.2.02.38	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	14	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan	1.01.02.2.01.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	14	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Pembangunan ruang ibadah SMP	1.01.02.2.02.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	14	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Pembangunan ruang perpustakaan SMP	1.01.02.2.02.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	14	19	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Rehabilitasi ruang perpustakaan SMP	1.01.02.2.02.17	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	14	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Pengadaan sarana prasarana penunjang peningaktan mutu SMP	1.01.02.2.02.27	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	18	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Non Formal	Pengembangan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan	1.01.02.2.04.16	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	18	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	1.01.02.2.04.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	18	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	1.01.02.2.04.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	18	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	1.01.02.2.04.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Non Formal	Pembangunan ruang kelas dan praktek SKB	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	18	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Non Formal	Pembangunan WC SKB	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	18	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Non Formal	Pengadaan buku - buku SKB	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	18	33	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Non Formal	Penyediaan Bantuan Tenaga Pendidik PAUD/TKA	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	18	34	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Non Formal	Pembangunan ruang kelas PAUD, Dikmas dan SKB	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	18	35	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Non Formal	Rehabilitasi ruang kelas PAUD, Dikmas dan SKB	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	18	36	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Non Formal	Pengadaan buku-buku PAUD	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	18	37	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Non Formal	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Prasarana dan sarana PAUD, Dikmas dan SKB	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	18	41	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Non Formal	Pengadaan Sarana Penunjang PAUD, Dikmas dan SKB	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pengadaan Sarana Penunjang PAUD, Dikmas dan SKB	
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pengadaan Sarana Penunjang PAUD, Dikmas dan SKB	
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pengadaan Sarana Penunjang PAUD, Dikmas dan SKB	
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pengadaan Sarana Penunjang PAUD, Dikmas dan SKB	
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pengadaan Sarana Penunjang PAUD, Dikmas dan SKB	
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	18	42	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan Pendidikan Non formal	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Penyelenggaraan Pendidikan Non formal	
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	18	43	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Non Formal	Pembangunan Peningkatan Prasarana PAUD, DIKMAS dan SKB	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pembangunan Peningkatan Prasarana PAUD, DIKMAS dan SKB	
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	18	44	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Non Formal	Rehabilitasi Prasarana PAUD, DIKMAS dan SKB	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Rehabilitasi Prasarana PAUD, DIKMAS dan SKB	
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	20	25	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SD	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	20	26	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SMP	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	20	28	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	20	29	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik SD	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	20	30	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemberian Tunjangan Secara Proporsional kepada Guru di daerah terpencil	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pemberian Tunjangan Secara Proporsional kepada Guru di daerah terpencil	

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.01.02.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1.01.03.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1.01.02.2.03.15	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
1.01.02.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
1.01.02.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
1.01.03.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1.01.02.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.01.02.2.03.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan PAUD
1.01.02.2.03.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
1.01.02.2.04.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.03.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
1.01.02.2.03.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Mebeluer PAUD
1.01.02.2.04.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
1.01.03.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1.01.02.2.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.01.02.2.04.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.03.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.01.02.2.01.27	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.02.2.02.40	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.01.27	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.02.2.01.27	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.02.2.01.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.02.2.02.39	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	20	34	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penyediaan Bantuan Tenaga Pendidik SD/MDA	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	20	35	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penyediaan Bantuan Tenaga Pendidik SMP/Ponpes	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	22	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	22	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Evaluasi Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	22	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	22	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengelolaan Website	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	22	19	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pembinaan manajemen informasi sekolah	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pembinaan manajemen informasi sekolah	
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Pembinaan manajemen informasi sekolah	
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	26	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	Akreditasi PAUD, Dikmas dan SKB	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Akreditasi PAUD, Dikmas dan SKB	
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	26	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	Peringatan Hari Aksara Internasional	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	26	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	Lomba Siswa Berprestasi	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	26	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik PAUD	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	26	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	26	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	26	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	Sosialisasi PAUD	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Sosialisasi PAUD	

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.01.02.2.01.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.02.2.02.39	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.03.14	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
1.01.02.2.01.24	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
1.01.02.2.04.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.02.37	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.02.41	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
1.01.02.2.02.41	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
1.01.02.2.04.16	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.03.17	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
1.01.02.2.02.41	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
1.01.02.2.02.41	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
1.01.02.2.04.16	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.03.17	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
1.01.02.2.04.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.16	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
0	0	0	0	0	TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI
1.01.02.2.02.38	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.01.02.2.03.16	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
1.01.02.2.03.16	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
1.01.02.2.03.16	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
1.01.02.2.03.17	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
1.01.05.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	26	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	Apresiasi PTK PAUD Dikmas	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	27	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Apresiasi Bunda PAUD	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	27	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Penyelenggaraan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	
Dinas Pendidikan	Pendidikan							Penyelenggaraan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	28	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penyediaan Bantuan Tenaga Pendidik SD/MDA	X
Dinas Pendidikan	Pendidikan	1	1	28	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penyediaan Bantuan Tenaga Pendidik SMP/PONPES	X
Dinas Pendidikan	Kebudayaan	2	16	16	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	X
Dinas Pendidikan	Kebudayaan							Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	
Dinas Pendidikan	Kebudayaan							Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	
Dinas Pendidikan	Kebudayaan							Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	
Dinas Pendidikan	Kebudayaan							Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	
Dinas Pendidikan	Kebudayaan	2	16	17	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	X
Dinas Pendidikan	Kebudayaan							Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	
Dinas Pendidikan	Kebudayaan							Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	
Dinas Pendidikan	Kebudayaan							Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	
Dinas Pendidikan	Kebudayaan							Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	
Dinas Pendidikan	Kebudayaan	2	16	17	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	X
Dinas Pendidikan	Kebudayaan							Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.01.02.2.03.16	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
1.01.02.2.03.16	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
1.01.02.2.03.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
1.01.02.2.03.17	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
1.01.03.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1.01.02.2.01.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.02.2.02.40	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2.22.06.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
2.22.06.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
2.22.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2.22.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2.22.02.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
2.22.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2.22.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
2.22.02.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
2.22.05.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendayagunaan Cagar Budaya
2.22.05.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
2.22.02.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
2.19.03.2.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Pendidikan	Kebudayaan	2	16	17	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan X Peninggalan Bawah Air
Dinas Pendidikan	Kebudayaan							Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Dinas Pendidikan	Kebudayaan							Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Dinas Pendidikan	Kebudayaan							Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Dinas Pendidikan	Kebudayaan							Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.22.06.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
2.22.06.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
2.22.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2.22.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2.22.02.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **DINAS KESEHATAN**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	15	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengadaan dan Peningkatan Kefarmasian	Penyediaan Obat dan BMHP	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.16	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Obat, Vaksin
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Penyediaan Obat dan BMHP	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.17	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Bahan Habis Pakai
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Penyediaan Obat dan BMHP	RENSTRA 2020	1.02.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Penyediaan Obat dan BMHP	RENSTRA 2020	1.02.04.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	15	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengadaan dan Peningkatan Kefarmasian	Peningkatan Pengelolaan Obat dan BMHP	RENSTRA 2020	1.02.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	47	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Barabai	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	48	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Awang Besar	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	49	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Pantai Hambawang	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	50	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Durian Gantang	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	51	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Kasarangan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	52	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Sei.Buluh	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	53	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Haruyan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	54	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Barikin	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	55	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Pandawan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	56	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Kambat Utara	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	57	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Pagat	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	58	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Kalibaru	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	59	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Hantakan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	60	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Birayang	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	61	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Kubur Jawa	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	62	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Ilung	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	63	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Limpasu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	64	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Batu Tangga	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	65	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOK Puskesmas Tandilang	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	16	66	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Monitoring Bantuan Operasional Kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	19	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.18	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	RENSTRA 2020	1.02.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	RENSTRA 2020	1.02.05.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	19	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Dan Usia Lanjut	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Dan Usia Lanjut	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	19	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.16	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	19	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	RENSTRA 2020	1.02.05.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	20	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.15	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	21	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengawasan Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat	RENSTRA 2020	1.02.04.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	21	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pembinaan Sanitasi Masyarakat	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.17	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	21	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengelolaan Limbah Medis	RENSTRA 2020	2.11.05.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pengelolaan Limbah Medis	RENSTRA 2020	1.03.05.2.01.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	25	35	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Peningkatan dan Pembangunan PKM dan Pustu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pembangunan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan dan Pembangunan PKM dan Pustu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengembangan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan dan Pembangunan PKM dan Pustu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan dan Pembangunan PKM dan Pustu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan dan Pembangunan PKM dan Pustu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.33	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan dan Pembangunan PKM dan Pustu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.34	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan dan Pembangunan PKM dan Pustu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan dan Pembangunan PKM dan Pustu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan dan Pembangunan PKM dan Pustu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan dan Pembangunan PKM dan Pustu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan dan Pembangunan PKM dan Pustu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.14	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan dan Pembangunan PKM dan Pustu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.24	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan dan Pembangunan PKM dan Pustu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.30	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan dan Pembangunan PKM dan Pustu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan dan Pembangunan PKM dan Pustu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	25	37	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Pengadaan Sarana Prasarana PKM / Pustu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	29	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak,Dan Balita	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Akreditasi Puskesmas	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Akreditasi Puskesmas	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.35	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Akreditasi Puskesmas	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.35	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Akreditasi Puskesmas	RENSTRA 2020	1.02.02.2.04.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Barabai	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Awang Besar	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Pantai Hambawang	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Durian Gantang	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Kasarangan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Sei. Buluh	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Haruyan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Barikin	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Pandawan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Kambat Utara	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Pagat	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Kalibaru	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Hantakan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Birayang	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Kubur Jawa	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Ilung	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Limpasu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	19	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Batu Tangga	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Tandilang	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	RENSTRA 2020	1.02.02.2.04.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	RENSTRA 2020	1.02.02.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	41	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	RENSTRA 2020	1.02.02.2.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.19	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	42	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pelayanan kesehatan Tradisional	Upaya pelayanan kesehatan tradisional	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.19	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	43	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Pengadaan peralatan kesehatan di fasilatas pelayanan kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.14	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pengadaan peralatan kesehatan di fasilatas pelayanan kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pengadaan peralatan kesehatan di fasilatas pelayanan kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.04.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pengadaan peralatan kesehatan di fasilatas pelayanan kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pengadaan peralatan kesehatan di fasilatas pelayanan kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.18	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pengadaan peralatan kesehatan di fasilatas pelayanan kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.34	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pengadaan peralatan kesehatan di fasilatas pelayanan kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pengadaan peralatan kesehatan di fasilatas pelayanan kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.30	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pengadaan peralatan kesehatan di fasilatas pelayanan kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	43	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Pemeliharaan alat kesehatan dan bimbingan penggunaan peralatan kesehatan sesuai prosedur	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.20	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pemeliharaan alat kesehatan dan bimbingan penggunaan peralatan kesehatan sesuai prosedur	RENSTRA 2020	1.02.04.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pemeliharaan alat kesehatan dan bimbingan penggunaan peralatan kesehatan sesuai prosedur	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pemeliharaan alat kesehatan dan bimbingan penggunaan peralatan kesehatan sesuai prosedur	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.34	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pemeliharaan alat kesehatan dan bimbingan penggunaan peralatan kesehatan sesuai prosedur	RENSTRA 2020	1.02.02.2.04.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	46	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Mutu Keamanan Pangan	Pengawasan Mutu Keamanan Pangan	RENSTRA 2020	1.02.04.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pengawasan Mutu Keamanan Pangan	RENSTRA 2020	1.02.04.2.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pengawasan Mutu Keamanan Pangan	RENSTRA 2020	1.02.04.2.06.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pengawasan Mutu Keamanan Pangan	RENSTRA 2020	1.02.04.2.06.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	47	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru lahir	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	47	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru lahir	Pemberian Jaminan Persalinan Bagi Ibu Hamil Kurang Mampu	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	49	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.23	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.25	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	49	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Peningkatan Pelayanan Imunisasi	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.23	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan Pelayanan Imunisasi	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.36	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan Pelayanan Imunisasi	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	49	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Peningkatan Surveilen dan Penanggulangan KLB	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.20	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan Surveilen dan Penanggulangan KLB	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.28	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan Surveilen dan Penanggulangan KLB	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan Surveilen dan Penanggulangan KLB	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.36	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan Surveilen dan Penanggulangan KLB	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.37	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	49	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.37	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	49	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.21	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	49	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA pada Remaja	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.27	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA pada Remaja	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.22	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	50	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Penyediaan dan Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.03.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Penyediaan dan Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.03.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Penyediaan dan Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.03.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Penyediaan dan Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.03.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Penyediaan dan Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.03.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Penyediaan dan Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Penyediaan dan Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.03.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Penyediaan dan Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.03.2.05.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	50	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Pengadaan Peralatan Kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.14	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	50	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Pemeliharaan Alat Kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.02.2.01.20	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan	Kesehatan							Pemeliharaan Alat Kesehatan	RENSTRA 2020	1.02.04.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	2	51	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk	Peningkatan Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat	RENSTRA 2020	1.02.02.2.02.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	**Bidang**	**Kode Urusan**	**Kode Bidang**	**Kode Program**	**Kode Kegiatan**	**Urusan**	**Program**	**Kegiatan**
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	17	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Perlindungan Tebing Sungai	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,dan pemeliharaan Konstruksi Perkuatan Tebing Sungai
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Perlindungan Tebing Sungai	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,dan pemeliharaan Konstruksi Perkuatan Tebing Sungai
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Perlindungan Tebing Sungai	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,dan pemeliharaan Konstruksi Perkuatan Tebing Sungai
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Perlindungan Tebing Sungai	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,dan pemeliharaan Konstruksi Perkuatan Tebing Sungai
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Perlindungan Tebing Sungai	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,dan pemeliharaan Konstruksi Perkuatan Tebing Sungai
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Perlindungan Tebing Sungai	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,dan pemeliharaan Konstruksi Perkuatan Tebing Sungai
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Perlindungan Tebing Sungai	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,dan pemeliharaan Konstruksi Perkuatan Tebing Sungai
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	24	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	24	19	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Integrated Participatory Deplopment and Mangemen of Irigation (IPDMIP)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Integrated Participatory Deplopment and Mangemen of Irigation (IPDMIP)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Integrated Participatory Deplopment and Mangemen of Irigation (IPDMIP)

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	**Urusan**	**Bidang**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
1.03.02.2.01.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
1.03.02.2.01.25	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
1.03.02.2.01.35	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1.03.02.2.01.53	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
1.03.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
1.03.02.2.01.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Pembangunan Tanggul Sungai
1.03.02.2.01.24	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Rehabilitasi Tanggul Sungai
1.03.02.2.01.34	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Tanggul Sungai
1.03.02.2.02.21	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
1.03.02.2.02.27	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Operasional Unit Pengelola Irigasi
1.03.02.2.02.21	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
1.03.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1.03.02.2.02.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Integrated Participatory Deplopment and Mangemen of Irigation (IPDMIP)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Integrated Participatory Deplopment and Mangemen of Irigation (IPDMIP)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	24	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Pintu Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Pintu Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Pintu Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Pintu Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	24	24	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dan Pintu Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dan Pintu Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dan Pintu Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	24	26	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Peningkatan Pembinaan Pemanfaatan Irigasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Peningkatan Pembinaan Pemanfaatan Irigasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	27	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.03.02.2.02.14	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
1.03.02.2.01.61	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
1.03.02.2.02.14	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
1.03.02.2.02.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
1.03.02.2.02.21	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
1.03.02.2.02.27	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Operasional Unit Pengelola Irigasi
1.03.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1.03.02.2.02.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
1.03.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.03.02.2.02.27	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Operasional Unit Pengelola Irigasi
1.03.02.2.01.61	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
1.03.03.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota	Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan
1.03.03.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	27	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	27	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Kegiatan Peningkatan Koordinasi Program dan Kegiatan Bidang Keciptakaryaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Kegiatan Peningkatan Koordinasi Program dan Kegiatan Bidang Keciptakaryaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Kegiatan Peningkatan Koordinasi Program dan Kegiatan Bidang Keciptakaryaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Kegiatan Peningkatan Koordinasi Program dan Kegiatan Bidang Keciptakaryaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Kegiatan Peningkatan Koordinasi Program dan Kegiatan Bidang Keciptakaryaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	28	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengendalian Banjir	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengendalian Banjir	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengendalian Banjir	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	28	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengendalian Banjir	Pembangunan/rehabilitasi bangunan pengendali dan pengatur sungai
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengendalian Banjir	Pembangunan/rehabilitasi bangunan pengendali dan pengatur sungai
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengendalian Banjir	Pembangunan/rehabilitasi bangunan pengendali dan pengatur sungai
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengendalian Banjir	Pembangunan/rehabilitasi bangunan pengendali dan pengatur sungai
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengendalian Banjir	Pembangunan/rehabilitasi bangunan pengendali dan pengatur sungai

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.03.03.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan
1.03.03.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan
1.03.03.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaika n SPAM
1.03.03.2.01.14	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
1.03.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1.03.03.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan
1.03.03.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan
1.03.02.2.01.46	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
1.03.02.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
1.03.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
1.03.02.2.01.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Kanal Banjir
1.03.02.2.01.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1.03.02.2.01.37	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kanal Banjir
1.03.02.2.01.36	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1.03.02.2.01.27	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Kanal Banjir

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengendalian Banjir	Pembangunan/rehabilitasi bangunan pengendali dan pengatur sungai
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengendalian Banjir	Pembangunan/rehabilitasi bangunan pengendali dan pengatur sungai
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengendalian Banjir	Pembangunan/rehabilitasi bangunan pengendali dan pengatur sungai
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	29	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Optimalisasi Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab/Kota (Satker PIP Kab/Kota)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Optimalisasi Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab/Kota (Satker PIP Kab/Kota)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Optimalisasi Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab/Kota (Satker PIP Kab/Kota)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Optimalisasi Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab/Kota (Satker PIP Kab/Kota)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Optimalisasi Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab/Kota (Satker PIP Kab/Kota)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	30	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaanan Jembatan Perdesaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaanan Jembatan Perdesaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	32	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
							Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.03.02.2.01.26	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1.03.02.2.01.54	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
1.03.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
1.03.07.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
1.03.04.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1.03.04.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1.03.04.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1.03.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan
1.03.10.2.01.18	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jembatan
1.03.11.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi
1.03.11.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
1.03.11.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
1.03.11.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan , dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
							Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	32	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	33	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Kegiatan Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Kegiatan Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Kegiatan Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	38	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	40	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.03.11.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
1.03.11.2.04.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
1.03.11.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
1.03.05.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1.03.05.2.01.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1.03.05.2.01.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
1.03.05.2.01.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
1.03.05.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1.03.05.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1.03.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1.03.05.2.01.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1.03.10.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Survey Kondisi Jalan/Jembatan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	40	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kegiatan Inspeksi Kondisi Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	43	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Daerah Rawa	Pembangunan /Peningkatan /Rehabilitasi Jaringan Rawa
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Daerah Rawa	Pembangunan /Peningkatan /Rehabilitasi Jaringan Rawa
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Daerah Rawa	Pembangunan /Peningkatan /Rehabilitasi Jaringan Rawa
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Daerah Rawa	Pembangunan /Peningkatan /Rehabilitasi Jaringan Rawa
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Daerah Rawa	Pembangunan /Peningkatan /Rehabilitasi Jaringan Rawa
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Daerah Rawa	Pembangunan /Peningkatan /Rehabilitasi Jaringan Rawa
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Daerah Rawa	Pembangunan /Peningkatan /Rehabilitasi Jaringan Rawa
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	45	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	45	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	45	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rutin Jalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	45	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Berkala Jalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Berkala Jalan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.03.10.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
1.03.02.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
1.03.02.2.02.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
1.03.02.2.02.16	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
1.03.02.2.02.23	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
1.03.02.2.02.20	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa
1.03.02.2.02.29	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
1.03.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.03.10.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Pembangunan Jalan
1.03.10.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Pelebaran Jalan Menuju Standar
1.03.10.2.01.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Rekonstruksi Jalan
1.03.10.2.01.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan
1.03.10.2.01.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan
1.03.10.2.01.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Rehabilitasi Jalan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	45	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	45	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	45	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	45	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	45	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Berkala Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Berkala Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	45	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	46	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pembangunan /Rehabilitasi /Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pembangunan /Rehabilitasi /Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pembangunan /Rehabilitasi /Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pembangunan /Rehabilitasi /Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pembangunan /Rehabilitasi /Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pembangunan /Rehabilitasi /Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	47	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Publik	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Trotoar

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.03.10.2.01.21	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
1.03.10.2.01.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Pembangunan Jembatan
1.03.10.2.01.16	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Penggantian Jembatan
1.03.10.2.01.19	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan
1.03.10.2.01.20	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Pemeliharaan Berkala Jembatan
1.03.10.2.01.18	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Rehabilitasi Jembatan
1.03.10.2.01.21	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
1.03.06.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
1.03.06.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan
1.03.06.2.01.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan
1.03.06.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan
1.03.06.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
1.03.06.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Supervisi Pembangunan /Peningkatan /Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
1.03.06.2.01.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
0	0	0	0	0	TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	47	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Publik	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Negara dan Prasarana Publik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Publik	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Negara dan Prasarana Publik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	47	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Publik	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Negara
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	47	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Publik	Kegiatan Inspeksi Bangunan Gedung Negara dan Prasarana Publik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Publik	Kegiatan Inspeksi Bangunan Gedung Negara dan Prasarana Publik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Publik	Kegiatan Inspeksi Bangunan Gedung Negara dan Prasarana Publik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	47	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Publik	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	48	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.03.08.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
1.03.08.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
1.03.08.2.01.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan
1.03.09.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
1.03.12.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
1.03.12.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang
1.03.12.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
1.03.12.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	**Bidang**	**Kode Urusan**	**Kode Bidang**	**Kode Program**	**Kode Kegiatan**	**Urusan**	**Program**	**Kegiatan**
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	48	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penataan Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	48	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penataan Ruang	Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Program Penataan Ruang	Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	**Urusan**	**Bidang**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
1.03.12.2.04.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1.03.12.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1.03.12.2.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	4	15	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Perumahan	Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	2020	1.04.02.2.06.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu		1.04.02.2.06.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu		1.04.02.2.06.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu		1.04.02.2.06.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu		1.04.02.2.07.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu		1.04.02.2.06.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu		1.04.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	4	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)	2020	1.04.03.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)		1.04.02.2.03.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)		1.04.02.2.03.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)		1.04.02.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)		1.04.02.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)		1.04.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)		1.04.02.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)		1.04.02.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)		1.04.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)		1.04.02.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)		1.04.02.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)		1.04.02.2.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)		1.04.02.2.06.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)		1.04.02.2.05.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)		1.04.02.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)		1.04.02.2.03.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)		1.04.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)		1.04.02.2.03.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	4	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Perumahan	Penyusunan Kebijakan Perumahan dan Permukiman	2020	1.04.02.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyusunan Kebijakan Perumahan dan Permukiman		1.04.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyusunan Kebijakan Perumahan dan Permukiman		1.04.02.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyusunan Kebijakan Perumahan dan Permukiman		1.04.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyusunan Kebijakan Perumahan dan Permukiman		1.04.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyusunan Kebijakan Perumahan dan Permukiman		1.04.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyusunan Kebijakan Perumahan dan Permukiman		1.04.02.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyusunan Kebijakan Perumahan dan Permukiman		1.04.02.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Penyusunan Kebijakan Perumahan dan Permukiman		5.05.02.2.03.11	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	4	21	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Perumahan	Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan	2020	1.04.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan		1.04.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan		1.04.04.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan		1.04.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	4	22	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman	Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman	2020	1.04.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman		1.03.07.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman		1.03.07.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman		1.03.07.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman		1.03.07.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	4	24	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penanganan Kawasan Kumuh	Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	2020	1.04.03.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)		1.04.03.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)		1.04.03.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	4	24	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penanganan Kawasan Kumuh	Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh	2020	1.04.03.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.02.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019						
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.02.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penataausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.03.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.03.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	4	26	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Kegiatan Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis	2020	1.03.07.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan	2	4	16	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2020	2.10.06.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan							Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		2.10.05.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan							Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		2.10.10.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan							Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		2.10.10.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan							Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		2.10.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan							Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		2.10.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan							Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		2.10.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan							Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		2.10.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan							Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		2.10.06.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	**Bidang**	**Kode Urusan**	**Kode Bidang**	**Kode Program**	**Kode Kegiatan**	**Urusan**	**Program**	**Kegiatan**
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan							Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan							Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan							Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan							Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan							Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan							Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan							Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan							Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	**Urusan**	**Bidang**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
2.10.06.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota
2.10.06.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/kota
2.10.07.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
2.10.07.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.10.07.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
2.10.08.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Pemanfataan Tanah Kosong
2.10.08.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
2.10.10.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **DINAS PERDAGANGAN**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	
Dinas Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	11	15	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Kondusif	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	11	15	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Kondusif	Pengembangan Pasar Produk UKM	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	11	16	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	11	17	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	11	18	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan SDM Koperasi	Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian	RENSTRA 2020

x

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.17.08.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
2.17.07.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2.17.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.03.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2.17.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.03.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2.17.06.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	
Dinas Perdagangan	Perdagangan	3	6	15	3	Urusan Pilihan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan							Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan							Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan							Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan	3	6	17	14	Urusan Pilihan	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan							Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan							Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan							Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan							Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan							Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan							Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan							Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan							Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan							Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan							Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan							Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan							Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan							Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan	3	6	20	6	Urusan Pilihan	Program Pemberdayaan dan Revitalisasi Pasar	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pasar	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan							Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pasar	RENSTRA 2020
Dinas Perdagangan	Perdagangan	3	6	20	7	Urusan Pilihan	Program Pemberdayaan dan Revitalisasi Pasar	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	RENSTRA 2020

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3.30.06.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
3.30.06.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
3.30.06.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Penyidikan Metrologi Legal
3.30.06.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
3.30.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
3.30.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
3.30.04.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
3.30.04.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
3.30.04.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
3.30.04.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
3.30.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
3.30.05.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal
3.30.05.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional
3.30.05.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
3.30.05.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Citra Produk Ekspor
3.30.05.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
3.30.07.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota
3.30.07.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota
3.30.07.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
3.30.03.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3.30.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
3.30.03.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Perdagangan	Perindustrian	3	7	16	12	Urusan Pilihan	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pengembangan IKM melalui Fasilitasi Sertifikat Produk unggulan IKM	RENSTRA 2020	3.30.03.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Dinas Perdagangan	Perdagangan							Pengembangan IKM melalui Fasilitasi Sertifikat Produk unggulan IKM	RENSTRA 2020	3.30.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Dinas Perdagangan	Perindustrian	3	7	16	13	Urusan Pilihan	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pembinaan IKM Agro	RENSTRA 2020	3.31.02.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Dinas Perdagangan	Perindustrian							Pembinaan IKM Agro	RENSTRA 2020	3.31.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
Dinas Perdagangan	Perindustrian							Pembinaan IKM Agro	RENSTRA 2020	3.31.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
Dinas Perdagangan	Perindustrian							Pembinaan IKM Agro	RENSTRA 2020	3.31.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
Dinas Perdagangan	Perindustrian							Pembinaan IKM Agro	RENSTRA 2020	3.31.03.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri
Dinas Perdagangan	Perindustrian	3	7	16	14	Urusan Pilihan	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pembinaan IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi	RENSTRA 2020	3.31.02.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Dinas Perdagangan	Perindustrian							Pembinaan IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi	RENSTRA 2020	3.31.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
Dinas Perdagangan	Perindustrian							Pembinaan IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi	RENSTRA 2020	3.31.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
Dinas Perdagangan	Perindustrian							Pembinaan IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi	RENSTRA 2020	3.31.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
Dinas Perdagangan	Perindustrian							Pembinaan IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi	RENSTRA 2020	3.31.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Dinas Perdagangan	Perindustrian	3	7	16	15	Urusan Pilihan	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pembinaan IKM Industri Kimia, Tekstil dan Aneka	RENSTRA 2020	3.31.02.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Dinas Perdagangan	Perindustrian							Pembinaan IKM Industri Kimia, Tekstil dan Aneka	RENSTRA 2020	3.31.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
Dinas Perdagangan	Perindustrian							Pembinaan IKM Industri Kimia, Tekstil dan Aneka	RENSTRA 2020	3.31.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
Dinas Perdagangan	Perindustrian							Pembinaan IKM Industri Kimia, Tekstil dan Aneka	RENSTRA 2020	3.31.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
Dinas Perdagangan	Perindustrian							Pembinaan IKM Industri Kimia, Tekstil dan Aneka	RENSTRA 2020	3.31.02.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Dinas Perdagangan	Perindustrian	3	7	16	16	Urusan Pilihan	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Penyertaan dan partisipasi dalam pameran Industri Kecil Menengah	RENSTRA 2020	3.30.05.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional
Dinas Perdagangan	Perindustrian							Penyertaan dan partisipasi dalam pameran Industri Kecil Menengah	RENSTRA 2020	3.30.05.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	15	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Prasarana & Sarana Persampahan	X	2.11.11.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	15	13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Penyediaan Sarana & Prasarana Pengelolaan Persampahan	X	1.03.04.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Persampahan
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	15	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	X	2.11.11.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	15	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Persampahan	X	2.11.11.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	15	16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Persampahan	X	2.11.11.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup							Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Persampahan		2.11.11.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup							Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Persampahan		2.11.11.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	15	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan TPA	X	2.11.11.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	15	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan	X	2.11.11.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup							Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan		1.03.04.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Persampahan
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	16	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Kegiatan Koordinasi Kota Bersih, Teduh dan Sehat	X	2.11.03.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	16	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	X	2.11.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	16	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	X	2.11.09.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup							Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup		2.11.08.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup							Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup		2.11.03.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	16	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan	X	2.11.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup							Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan	
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	16	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Kegiatan Pemeliharaan RTH	X
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	16	19	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Kegiatan pelayanan pengujian kualitas lingkungan hidup	X
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	16	20	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Kegiatan Pembangunan Kota Bersih, Teduh dan Sehat	X
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	25	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Penataan Lingkungan Hidup	Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Sengketa Akibat Dugaan Pencemaran Lingkungan	X
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	25	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Penataan Lingkungan Hidup	Kegiatan Pengkajian dampak lingkungan	X
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	25	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Penataan Lingkungan Hidup	Kegiatan Pengawasan Penaatan Peraturan Lingkungan	X
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	25	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Penataan Lingkungan Hidup	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lingkungan Hidup	X
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	25	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Penataan Lingkungan Hidup	Kegiatan Penegakan Peraturan Lingkungan Hidup	X
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Lingkungan Hidup	2	5	26	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dan Pemberdayaan MHA dan Kearifan Lokal	X
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan	2	9	16	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Terminal /Pelabuhan	X
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan	2	9	16	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kegiatan Revitalisasi Kawasan Parkir & Terminal	X
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan							Kegiatan Revitalisasi Kawasan Parkir & Terminal	
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan							Kegiatan Revitalisasi Kawasan Parkir & Terminal	
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan							Kegiatan Revitalisasi Kawasan Parkir & Terminal	
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan	2	9	16	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kegiatan Pengadaan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	X
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan	2	9	16	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	X

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.11.03.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2.11.04.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2.11.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
2.11.03.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
2.11.10.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
2.11.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
2.11.06.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
2.11.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
2.11.10.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
2.11.07.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2.15.02.2.03.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
2.15.02.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2.15.02.2.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
1.01.02.2.02.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Fasilitas Parkir
1.01.02.2.02.22	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
2.15.02.2.06.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2.15.02.2.06.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan	2	9	16	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal	X	2.15.02.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan Gedung Terminal
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan	2	9	16	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal	X	2.15.02.2.03.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan	2	9	16	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Parkir	X	2.15.02.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan							Kegiatan Pengelolaan Kawasan Parkir		2.15.02.2.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan							Kegiatan Pengelolaan Kawasan Parkir		1.01.02.2.02.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Fasilitas Parkir
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan							Kegiatan Pengelolaan Kawasan Parkir		1.01.02.2.02.22	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan	2	9	16	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	X	2.15.02.2.06.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan	2	9	17	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya	X	2.15.02.2.06.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan	2	9	20	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Kegiatan Pengadaan Fasilitas Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	X	2.15.02.2.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan	2	9	20	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	X	2.15.02.2.05.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan	2	9	20	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	X	2.15.02.2.05.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan	2	9	20	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	X	2.15.02.2.05.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan	2	9	27	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Keselamatan LLAJ	Kegiatan FGD Lalu Lintas	X	2.15.02.2.06.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan							Kegiatan FGD Lalu Lintas		2.15.02.2.08.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan	2	9	28	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kegiatan Peningkatan Ketertiban & Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	X	2.15.02.2.06.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan							Kegiatan Peningkatan Ketertiban & Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		2.15.02.2.08.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Perhubungan	2	9	28	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kegiatan Rekayasa Lalu Lintas	X	2.15.02.2.06.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATURNAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukandan Capil	2	6	15	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)		2.12.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukandan Capil							Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	x	2.12.04.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penataan Administrasi Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukandan Capil							Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)		2.12.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukandan Capil							Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)		2.12.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukandan Capil							Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)		2.12.02.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukandan Capil							Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)		2.12.02.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukandan Capil							Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)		2.12.02.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukandan Capil							Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)		2.12.02.2.01.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukandan Capil	2	6	15	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Sosialisasi kebijakan kependudukan	x	2.12.04.2.03.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukandan Capil	2	6	16	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil		2.12.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukandan Capil							Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil	x	2.12.03.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukandan Capil	2	6	16	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Pemutakhiran Data Pencatatan Sipil		2.12.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukandan Capil				6			Pemutakhiran Data Pencatatan Sipil	x	2.12.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukandan Capil	2	6	19	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu		2.12.04.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan	Koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukandan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	x	2.12.04.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukandan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	x	2.12.04.2.03.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukandan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu		2.12.04.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penataan Administrasi Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukandan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu		2.12.04.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penataan Administrasi Kependudukan	Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil	2	6	19	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengembangan data base kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pengembangan data base kependudukan

x

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.12.04.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraanurusan Administrasi Kependudukan	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang MenyelenggarakanUrusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
2.12.04.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraanurusan Administrasi Kependudukan	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang MenyelenggarakanUrusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K
2.12.04.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraanurusan Administrasi Kependudukan	Koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan
2.12.04.2.03.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraanurusan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting
2.12.04.2.03.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraanurusan Administrasi Kependudukan	Penerimaan Dan Permintaan Data Kependudukan Dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri
2.12.04.2.03.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraanurusan Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2.12.04.2.03.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraanurusan Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
2.12.04.2.03.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraanurusan Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2.12.04.2.03.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraanurusan Administrasi Kependudukan	Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi
2.12.04.2.03.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraanurusan Administrasi Kependudukan	Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat
2.12.04.2.03.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraanurusan Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan
2.12.04.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota, termasuk Meminta Laporan Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang Berkaitan dengan Pelay
2.12.04.2.04.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Penugasan kepada Desa atau yang Disebut dengan Nama Lain
2.12.04.2.04.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang MenyelenggarakanUrusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam Rangka Pembangun
2.12.04.2.04.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2.12.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pendaftaran Penduduk
2.12.04.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pengembangan data base kependudukan	x	2.12.04.2.03.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pengembangan data base kependudukan		2.12.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pengembangan data base kependudukan		2.12.04.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Perkembangan Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pengembangan data base kependudukan		2.12.04.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pengembangan data base kependudukan		2.12.04.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pengembangan data base kependudukan		2.12.04.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil	2	6	20	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan		2.12.04.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan		2.12.05.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan		2.12.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil	2	6	20	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		2.12.04.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Capil							Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	x	2.12.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATURNAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	2	1	16	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja							Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja							Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja							Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja							Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	2	1	16	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	2	1	16	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Kegiatan Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya Produktif/Infrastruktur) dan Kewirausahaan
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja							Kegiatan Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya Produktif/Infrastruktur) dan Kewirausahaan
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	2	1	17	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja							Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	2	1	17	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Monitoring evaluasi dan pelaporan
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	2	1	18	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya Produktif/Infrastruktur) dan Kewirausahaan
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja							Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya Produktif/Infrastruktur) dan Kewirausahaan
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	2	1	18	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	2	1	20	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Keselamatan Kerja	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	2	1	20	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Keselamatan Kerja	Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.07.04.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
2.07.04.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja
2.07.04.2.04.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
2.07.04.2.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
2.07.04.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2.07.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
2.07.03.2.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.07.03.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
2.07.05.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
2.07.03.2.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.07.03.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
2.07.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
2.07.05.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2.07.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja							Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	2	1	20	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Keselamatan Kerja	Pembinaan Organisasi Ketenagakerjaan
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Penanaman Modal	2	12	15	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Penanaman Modal	2	12	15	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kegiatan Penyusunan Profil Potensi Unggulan Daerah
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Penanaman Modal	2	12	15	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kegiatan Penyusunan RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal)
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Penanaman Modal	2	12	15	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal Daerah
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Penanaman Modal							Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal Daerah
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Penanaman Modal							Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal Daerah
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Penanaman Modal							Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal Daerah
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Penanaman Modal	2	12	18	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Survei Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Penanaman Modal	2	12	18	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Kegiatan Pengembangan Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Penanaman Modal	2	12	18	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Kegiatan Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Penanaman Modal	2	12	18	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Penanaman Modal							Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Penanaman Modal	2	12	18	13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan

PERMENDAGRI90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.07.05.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
2.07.05.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
2.18.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
2.18.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
2.18.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2.18.03.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2.18.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
2.18.05.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
2.18.05.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2.18.06.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2.18.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2.18.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2.18.04.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
2.18.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
5.06.02.2.01.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENGHUBUNG	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	**Bidang**	**Kode Urusan**	**Kode Bidang**	**Kode Program**	**Kode Kegiatan**	**Urusan**	**Program**	**Kegiatan**
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	2	10	15	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pengembangan dan pengelolaan komunikasi publik	Pengawasan dan Pengendalian Menara dan Postel
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	2	10	15	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pengembangan dan pengelolaan komunikasi publik	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	2	10	15	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pengembangan dan pengelolaan komunikasi publik	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	2	10	16	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pengembangan dan pengelolaan informasi publik	Penyelenggaraan Siaran Radio Suara Murakata FM
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	2	10	16	13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pengembangan dan pengelolaan informasi publik	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	2	10	16	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pengembangan dan pengelolaan informasi publik	Pengadaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengadaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengadaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika						1	Pengadaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengadaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengadaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	**Urusan**	**Bidang**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
2.16.02.2.01.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2.16.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2.16.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
2.16.02.2.01.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
2.16.02.2.01.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Manajemen Komunikasi Krisis
2.16.02.2.01.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2.16.02.2.01.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik
2.16.02.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2.16.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
2.16.02.2.01.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Hubungan Media
2.16.02.2.01.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
2.16.02.2.01.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Manajemen Komunikasi Krisis

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengadaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	2	10	16	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pengembangan dan pengelolaan informasi publik	Peningkatan SDM Komunikasi dan Informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	2	10	20	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pengembangan dan pengelolaan E-Government	Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.16.02.2.01.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2.16.02.2.01.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
2.16.03.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2.16.03.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.16.03.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2.16.03.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
2.16.03.2.02.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.16.03.2.02.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
2.16.03.2.02.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
2.16.03.2.02.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
2.16.03.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2.16.03.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.16.03.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2.16.03.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Pengelolaan dan Pengembangan E Government
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	2	10	20	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pengembangan dan pengelolaan E-Government	Peningkatan Kapasitas SDM TIK
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	2	10	22	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pengembangan dan pengelolaan sarana infrastruktur TIK	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan dan Server
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	2	10	22	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pengembangan dan pengelolaan sarana infrastruktur TIK	Pengadaan dan Pengembangan infrastrutur TIK
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	2	10	22	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pengembangan dan pengelolaan sarana infrastruktur TIK	Peningkatan Kapasitas SDM TIK bagi Masyarakat
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	2	10	44	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi,dokumentasi kehumasan	Dokumentasi kebijakan keberhasilan pembangunan
Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	2	10	45	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Penyebarluasan informasi publik
Dinas Komunikasi dan Informatika	Statistik	2	14	15	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika	Statistik							Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika	Statistik							Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika	Statistik							Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika	Statistik							Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika	Statistik	2	14	15	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Statistik

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.16.03.2.02.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.16.03.2.02.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
2.16.03.2.02.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
2.16.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
2.16.03.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2.16.03.2.02.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2.16.03.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
2.16.03.2.02.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2.16.02.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik
2.16.02.2.01.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Hubungan Media
2.20.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Membangun Metadata Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Infrastruktur
2.20.02.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
2.20.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	**Bidang**	**Kode Urusan**	**Kode Bidang**	**Kode Program**	**Kode Kegiatan**	**Urusan**	**Program**	**Kegiatan**
Dinas Komunikasi dan Informatika	Persandian	2	15	23	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pengembangan Pengamanan Informasi dan Persandian	Pengamanan Informasi dan Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika	Persandian							Pengamanan Informasi dan Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika	Persandian							Pengamanan Informasi dan Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika	Persandian							Pengamanan Informasi dan Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika	Persandian	2	15	23	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pengembangan Pengamanan Informasi dan Persandian	Peningkatan Kapasitas SDM keamanan informasi dan persandian

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	**Urusan**	**Bidang**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
2.21.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2.21.02.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **DINAS PERTANIAN**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	**Bidang**	**Kode Urusan**	**Kode Bidang**	**Kode Program**	**Kode Kegiatan**	**Urusan**	**Program**	**Kegiatan**
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	19	13	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	19	14	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Penanganan OPT
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	19	18	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Kegiatan Pengadaan Pupuk
Dinas Pertanian	Pertanian							Kegiatan Pengadaan Pupuk
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	19	19	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Kegiatan Pengadaan Pestisida
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	19	20	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Kegiatan Pengadaan Sarana Perkebunan
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	21	3	Urusan Pilihan	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	21	7	Urusan Pilihan	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular ternak
Dinas Pertanian	Pertanian							Pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular ternak
Dinas Pertanian	Pertanian							Pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular ternak
Dinas Pertanian	Pertanian							Pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular ternak
Dinas Pertanian	Pertanian							Pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular ternak
Dinas Pertanian	Pertanian							Pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular ternak
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	21	8	Urusan Pilihan	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	24	7	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produktivitas Ternak	Peningkatan Kualitas Pakan Ternak
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	24	10	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produktivitas Ternak	Kegiatan Pengadaan Sarana dan PrasaranaTeknologi Peternakan Tepat Guna
Dinas Pertanian	Pertanian							Kegiatan Pengadaan Sarana dan PrasaranaTeknologi Peternakan Tepat Guna

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	**Urusan**	**Bidang**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
3.27.03.2.02.09	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
3.27.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.27.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
3.27.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
3.27.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.27.03.2.02.09	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
3.27.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
3.27.04.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
3.27.04.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
3.27.06.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
3.27.06.2.02.05	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
3.27.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.04.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian Laboratorium Kesehatan Mayarakat Veteriner
3.27.02.2.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
3.27.03.2.02.09	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
3.27.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Pertanian	Pertanian							Kegiatan Pengadaan Sarana dan PrasaranaTeknologi Peternakan Tepat Guna
Dinas Pertanian	Pertanian							Kegiatan Pengadaan Sarana dan PrasaranaTeknologi Peternakan Tepat Guna
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	26	1	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produksi TPH	Kegiatan Pengembangan TPH
Dinas Pertanian	Pertanian							Kegiatan Pengembangan TPH
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	26	6	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produksi TPH	Kegiatan Penyediaan Benih Bermutu TPH
Dinas Pertanian	Pertanian							Kegiatan Penyediaan Benih Bermutu TPH
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	26	7	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produksi TPH	Kegiatan Perlindungan TPH
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	26	7	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produksi TPH	Kegiatan Perlindungan TPH
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	26	8	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produksi TPH	Kegiatan Pengadaan Sarana Pra Panen
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	26	9	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produksi TPH	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	26	10	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produksi TPH	Kegiatan Fasilitasi AUTP
Dinas Pertanian	Pertanian							Kegiatan Fasilitasi AUTP
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	26	11	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produksi TPH	Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air
Dinas Pertanian	Pertanian							Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	26	12	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produksi TPH	Kegiatan Penangkaran TPH
Dinas Pertanian	Pertanian							Kegiatan Penangkaran TPH
Dinas Pertanian	Pertanian							Kegiatan Penangkaran TPH
Dinas Pertanian	Pertanian							Kegiatan Penangkaran TPH
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	26	13	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produksi TPH	Kegiatan Pengadaan Sarana TPH

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3.27.02.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
3.27.02.2.05.05	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
3.27.02.2.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
3.27.05.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.02.2.05.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
3.27.02.2.05.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
3.27.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.27.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.27.03.2.02.09	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
3.27.06.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
3.27.05.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.27.05.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
3.27.03.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
3.27.02.2.05.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
3.27.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
3.27.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3.27.02.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
3.27.03.2.02.09	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	26	14	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produksi TPH	Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Infrastruktur TPH
Dinas Pertanian	Pertanian							Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Infrastruktur TPH
Dinas Pertanian	Pertanian							Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Infrastruktur TPH
Dinas Pertanian	Pertanian							Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Infrastruktur TPH
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	32	1	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Sarana Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran	Penanganan Pasca Produk Pertanian
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	32	2	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Sarana Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	35	7	Urusan Pilihan	Program Pengembangan Komoditas Perkebunan	Kegiatan Pengembangan Komoditas Pengadaan Bibit Perkebunan
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	35	8	Urusan Pilihan	Program Pengembangan Komoditas Perkebunan	Kegiatan Pengembangan Komoditas Perkebunan
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	38	2	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Populasi dan Produksi Ternak	Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengadaan Sarana Produksi Peternakan
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	38	3	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Populasi dan Produksi Ternak	Kegiatan Pengawasan Ternak Produktif
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	39	1	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kelembagaan Petani
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	39	2	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Ketenagaan Penyuluh Pertanian
Dinas Pertanian	Pertanian							Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Ketenagaan Penyuluh Pertanian
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	39	3	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	Integrated Participatory Development adn Management of Irrigation Project (IPDMIP)
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	40	1	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran	Kegiatan Penanganan Pasca Produk Pertanian
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	40	2	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	41	1	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak	Pembibitan dan Produksi Ternak
Dinas Pertanian	Pertanian							Pembibitan dan Produksi Ternak
Dinas Pertanian	Pertanian							Pembibitan dan Produksi Ternak
Dinas Pertanian	Pertanian							Pembibitan dan Produksi Ternak
Dinas Pertanian	Pertanian							Pembibitan dan Produksi Ternak
Dinas Pertanian	Pertanian							Pembibitan dan Produksi Ternak

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3.27.03.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
3.27.03.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
3.27.03.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
3.27.03.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
3.27.03.2.02.09	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
0	0	0	0	0	TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI
3.27.02.2.06.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3.27.02.2.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
3.27.03.2.02.09	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
3.27.02.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
3.27.07.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
3.27.03.2.02.08	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
3.27.07.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
3.27.07.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
3.27.03.2.02.09	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
0	0	0	0	0	TIDAK ADA SUB KEG YANG SESUAI
3.27.02.2.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
3.27.04.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
3.27.03.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
3.27.03.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
3.27.03.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum
3.27.03.2.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	**Bidang**	**Kode Urusan**	**Kode Bidang**	**Kode Program**	**Kode Kegiatan**	**Urusan**	**Program**	**Kegiatan**
Dinas Pertanian	Pertanian							Pembibitan dan Produksi Ternak
Dinas Pertanian	Pertanian							Pembibitan dan Produksi Ternak
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	41	2	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak	Pembangunan / Pemeliharaan/ Pengadaan Prasarana dan Sarana Peternakan
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	41	3	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak	Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Dinas Pertanian	Pertanian							Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Dinas Pertanian	Pertanian	3	3	41	4	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak	Peningkatan Kualitas Pakan Ternak

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	**Urusan**	**Bidang**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
3.27.03.2.04.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum
3.27.04.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
3.27.03.2.02.09	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
3.27.04.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
3.27.02.2.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATURNAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)											PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang		Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa		2	7	15	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa	RENSTRA 2020	2.13.05.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatanyang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa		2	7	15	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	RENSTRA 2020	2.13.05.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatanyang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa		2	7	15	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan desa	RENSTRA 2020	2.13.05.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatanyang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa		2	7	15	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar dan Budaya Masyarakat	RENSTRA 2020	2.13.05.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatanyang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa		2	7	16	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	RENSTRA 2020	2.13.04.2.01.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa		2	7	16	16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Masy. Desa	RENSTRA 2020	2.13.05.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatanyang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa		2	7	20	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pelatihan aparatur pemerintahan desa	RENSTRA 2020	2.13.04.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa		2	7	20	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	RENSTRA 2020	2.13.04.2.01.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa		2	7	20	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	RENSTRA 2020	2.13.04.2.01.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa								Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	RENSTRA 2020	2.13.04.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)											PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang		Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa		2	7	20	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	RENSTRA 2020	2.13.04.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa		2	7	22	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Sumber daya alam dan teknologi tepat guna	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	RENSTRA 2020	2.13.05.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatanyang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa		2	7	22	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Sumber daya alam dan teknologi tepat guna	Pengembangan Kawasan Perdesaan	RENSTRA 2020	2.13.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial	1	6	16	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan Masyarakat Terlantar	1.06.04.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pelayanan Masyarakat Terlantar	1.06.04.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pelayanan Masyarakat Terlantar	1.06.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pelayanan Masyarakat Terlantar	1.06.04.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pelayanan Masyarakat Terlantar	1.06.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pelayanan Masyarakat Terlantar	1.06.04.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pelayanan Masyarakat Terlantar	1.06.06.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pelayanan Masyarakat Terlantar	1.06.04.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pelayanan Masyarakat Terlantar	1.06.04.2.02.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pelayanan Masyarakat Terlantar	1.06.04.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pelayanan Masyarakat Terlantar	1.06.04.2.02.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pelayanan Masyarakat Terlantar	1.06.04.2.01.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pelayanan Masyarakat Terlantar	1.06.04.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pelayanan Masyarakat Terlantar	1.06.04.2.01.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019						
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pelayanan Masyarakat Terlantar	1.06.04.2.02.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pelayanan Masyarakat Terlantar	1.06.04.2.01.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pelayanan Masyarakat Terlantar	1.06.04.2.02.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial	1	6	16	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.04.2.02.14	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.06.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.06.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.06.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.06.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.04.2.01.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.04.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.04.2.01.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial		1.06.04.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial		1.06.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial		1.06.04.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial		1.06.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial		1.06.04.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial		1.06.04.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial		1.06.04.2.02.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial		1.06.04.2.01.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial		1.06.04.2.02.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial		1.06.04.2.01.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial		1.06.04.2.02.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial		1.06.04.2.02.14	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial	1	6	16	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	X	1.06.07.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial	1	6	19	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti dan jompo	X	1.06.02.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial	1	6	19	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Peningfkatan kualitas SDM Sosial Masyarakat	X	1.06.02.2.03.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial	1	6	26	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Peningkatan Pemberdayaan PMKS	Pelatihan keterampilan berusaha bagi PMKS	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial	1	6	26	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Peningkatan Pemberdayaan PMKS	Peningkatan Pemberdayaan KAT	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Peningkatan Pemberdayaan KAT	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Peningkatan Pemberdayaan KAT	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Peningkatan Pemberdayaan KAT	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Peningkatan Pemberdayaan KAT	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial	1	6	26	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Peningkatan Pemberdayaan PMKS	Peningkatan SDM Sosial Masyarakat	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial	1	6	26	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Peningkatan Pemberdayaan PMKS	Melaksanakan Rehabilitasi dan pemeliharaan taman makam pahlawan	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Melaksanakan Rehabilitasi dan pemeliharaan taman makam pahlawan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial	1	6	27	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Proram Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan Pemberian Jaminan Sosial	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Peningkatan Pemberian Jaminan Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Peningkatan Pemberian Jaminan Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Peningkatan Pemberian Jaminan Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Peningkatan Pemberian Jaminan Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Peningkatan Pemberian Jaminan Sosial	

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.06.02.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
1.06.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
1.06.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1.06.02.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1.06.04.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
1.06.07.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1.06.06.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
1.06.06.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
1.06.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang
1.06.06.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1.06.06.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial
1.06.06.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial	1	6	27	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Proram Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan Perlindungan Sosial	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial	1	6	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Proram Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.06.04.2.01.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
1.06.06.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
1.06.06.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
1.06.06.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1.06.06.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1.06.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
1.06.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
1.06.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang
1.06.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang
1.06.06.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
1.06.04.2.01.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1.06.04.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1.06.04.2.01.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan
1.06.04.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan
1.06.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019						
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.04.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.04.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.04.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.04.2.02.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.04.2.01.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.04.2.02.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.04.2.01.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.04.2.02.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	1.06.04.2.02.14	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial	1	6	28	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendataan Sosial	Pengumpulan Data Sosial	1.06.05.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pengumpulan Data Sosial	1.06.05.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pengumpulan Data Sosial	1.06.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pengumpulan Data Sosial	1.06.05.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rujukan Anak-Anak Terlantar	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pengumpulan Data Sosial	1.06.05.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pengumpulan Data Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pengumpulan Data Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pengumpulan Data Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial	1	6	28	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendataan Sosial	Pengolahan Data Sosial	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pengolahan Data Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pengolahan Data Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pengolahan Data Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial	1	6	28	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendataan Sosial	Pengembangan Sistem Informasi Data Sosial	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pengembangan Sistem Informasi Data Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial							Pengembangan Sistem Informasi Data Sosial	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	2	18	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pembinaan Monitoring dan evaluasi GSI dan P2W-KSS	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	2	18	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.06.05.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1.06.04.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1.06.05.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1.06.04.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1.06.05.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1.06.04.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
2.08.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2.08.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2.08.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2.08.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	2	18	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pendataan data gender dan anak	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Pendataan data gender dan anak	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	2	18	16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengembangan Pengarusutamaan Gender	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Pengembangan Pengarusutamaan Gender	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Pengembangan Pengarusutamaan Gender	

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.08.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2.08.02.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG
2.08.02.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.04.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.04.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kabijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.05.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2.08.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
2.08.02.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	2	21	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak dan Partisipasi Anak	X	2.08.06.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak dan Partisipasi Anak		2.08.06.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak dan Partisipasi Anak		2.08.06.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak dan Partisipasi Anak		2.08.06.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak dan Partisipasi Anak		2.08.06.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak dan Partisipasi Anak		2.08.06.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	2	21	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Anak	X	2.08.07.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Anak		2.08.07.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Anak		2.08.07.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Anak		2.08.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Anak		2.08.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kabijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Anak		2.08.04.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Anak		2.08.04.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Anak	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Anak	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	2	21	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Pendataan Data Gender dan Anak	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Pendataan Data Gender dan Anak	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	2	21	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan	

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.08.07.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.07.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.05.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	2	21	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Peningkatan Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	2	23	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Peningkatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Peningkatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Peningkatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Peningkatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Peningkatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Peningkatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	8	15	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Kegiatan bakti sosial TNI KB KES, Kesatuan gerak PKK KB KES dan KIE	X

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.08.03.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.07.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.07.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kabijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.04.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2.14.03.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							Kegiatan bakti sosial TNI KB KES, Kesatuan gerak PKK KB KES dan KIE	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							Kegiatan bakti sosial TNI KB KES, Kesatuan gerak PKK KB KES dan KIE	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	8	15	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Pembinaan KB	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	8	15	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Bantuan Operasional KB	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	8	18	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pengolahan Data dan Informasi Program KKBPK	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							Pengolahan Data dan Informasi Program KKBPK	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	8	27	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga	Pembinaan Kesejahteraan keluarga	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							Pembinaan Kesejahteraan keluarga	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							Pembinaan Kesejahteraan keluarga	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	8	27	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga	Pengolahan Data dan Informasi Program KKBPK	X
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							Pengolahan Data dan Informasi Program KKBPK	

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.14.03.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
2.14.03.2.03.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan KB Pria
2.14.02.2.02.14	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
2.14.03.2.01.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
2.14.03.2.04.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
2.14.04.2.01.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14.02.2.02.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
2.14.04.2.01.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
2.14.04.2.01.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
2.14.02.2.02.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019						
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	8	28	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	X	2.14.03.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.14.03.2.03.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.14.03.2.03.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.14.03.2.03.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	**Bidang**	**Kode Urusan**	**Kode Bidang**	**Kode Program**	**Kode Kegiatan**	**Urusan**	**Program**	**Kegiatan**
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan	2	3	18	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan							Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan							Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan	2	3	18	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan	2	3	18	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan							Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan							Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan							Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan							Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan	2	3	18	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Diversifikasi Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan							Pengembangan Diversifikasi Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan							Pengembangan Diversifikasi Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan							Pengembangan Diversifikasi Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan	2	3	18	16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Cadangan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan							Pengembangan Cadangan Pangan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	**Urusan**	**Bidang**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
2.09.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2.09.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
2.09.04.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
2.09.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2.09.05.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2.09.03.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
2.09.03.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
2.09.03.2.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2.09.03.2.04.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
2.09.03.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2.09.03.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan							Pengembangan Cadangan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan	2	3	18	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan	2	3	18	22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Model Distribusi Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan							Pengembangan Model Distribusi Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	3	1	20	7	Urusan Pilihan	Program pengembangan budidaya perikanan	Pengembangn usaha perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengembangn usaha perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengembangn usaha perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengembangn usaha perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengembangn usaha perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengembangn usaha perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengembangn usaha perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengembangn usaha perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengembangn usaha perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	3	1	20	15	Urusan Pilihan	Program pengembangan budidaya perikanan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	3	1	20	18	Urusan Pilihan	Program pengembangan budidaya perikanan	Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	3	1	21	7	Urusan Pilihan	Program pengembangan perikanan tangkap	Pengembangan Prasarana Penangkapan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	3	1	21	7	Urusan Pilihan	Program pengembangan perikanan tangkap	Pengembangan Prasarana Penangkapan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.09.03.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2.09.03.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
2.09.03.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2.09.03.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
3.25.03.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.03.2.04.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.03.2.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
3.25.03.2.04.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.03.2.04.05	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
3.25.03.2.04.06	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
3.25.03.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.03.2.04.06	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
3.25.03.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
3.25.03.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
3.25.03.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3.25.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
3.25.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	3	1	21	8	Urusan Pilihan	Program pengembangan perikanan tangkap	Pengkayaan Sumber Daya Ikan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengkayaan Sumber Daya Ikan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengkayaan Sumber Daya Ikan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengkayaan Sumber Daya Ikan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	3	1	29	1	Urusan Pilihan	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	3	1	30	1	Urusan Pilihan	Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengadaan/pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	3	1	30	2	Urusan Pilihan	Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	3	1	30	6	Urusan Pilihan	Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Gemar Makan Ikan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	3	1	31	1	Urusan Pilihan	Program Pengembangan Usaha Perikanan	Pengembangan Budidaya Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengembangan Budidaya Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengembangan Budidaya Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengembangan Budidaya Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengembangan Budidaya Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengembangan Budidaya Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengembangan Budidaya Perikanan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3.25.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3.25.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3.25.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
3.25.02.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
3.25.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
3.25.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
3.25.05.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.05.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3.25.05.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.03.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Mengguna
3.25.03.2.04.05	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
3.25.03.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Inten
3.25.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
3.25.03.2.04.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.03.2.04.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.03.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.03.2.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengembangan Budidaya Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengembangan Budidaya Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	3	1	31	3	Urusan Pilihan	Program Pengembangan Usaha Perikanan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3.25.03.2.04.07	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
3.25.03.2.04.06	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
3.25.03.2.04.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.03.2.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Kepemudaan dan Olah Raga	2	13	16	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan organisasi kepemudaan
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Kepemudaan dan Olah Raga							
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Kepemudaan dan Olah Raga	2	13	16	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Fasilitasi Akshi Bakhti Sosisal Kepemudaan
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Kepemudaan dan Olah Raga							Fasilitasi Akshi Bakhti Sosisal Kepemudaan
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Kepemudaan dan Olah Raga	2	13	16	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pelatihan Kepemimpinan Pemuda
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Kepemudaan dan Olah Raga	2	13	20	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Kepemudaan dan Olah Raga							Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Kepemudaan dan Olah Raga							Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Kepemudaan dan Olah Raga	2	13	20	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Kepemudaan dan Olah Raga							Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Kepemudaan dan Olah Raga							Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Kepemudaan dan Olah Raga	2	13	21	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Kepemudaan dan Olah Raga	2	13	21	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.19.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
2.19.02.2.01.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
2.19.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
2.19.02.2.01.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
2.19.02.2.01.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
2.19.03.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota
2.19.03.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Seleksi Atlet Daerah
2.19.03.2.03.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota
2.19.03.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
2.19.03.2.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
2.19.03.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2.19.03.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Kepemudaan dan Olah Raga	2	13	22	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Pariwisata	3	2	15	9	Urusan Pilihan	Program pengembangan pemasaran pariwisata	pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Pariwisata							pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Pariwisata	3	2	16	2	Urusan Pilihan	Program pengembangan destinasi pariwisata	Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Pariwisata							Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Pariwisata	3	2	16	3	Urusan Pilihan	Program pengembangan destinasi pariwisata	Pembinaan Pariwisata Berbasis Masyarakat
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Pariwisata							Pembinaan Pariwisata Berbasis Masyarakat
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Pariwisata							Pembinaan Pariwisata Berbasis Masyarakat
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Pariwisata							Pembinaan Pariwisata Berbasis Masyarakat
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Pariwisata							Pembinaan Pariwisata Berbasis Masyarakat
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Pariwisata							Pembinaan Pariwisata Berbasis Masyarakat
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Pariwisata	3	2	17	3	Urusan Pilihan	Program pengembangan Kemitraan	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Pariwisata							Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Pariwisata							Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Pariwisata							Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Pariwisata							Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Pariwisata							Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.19.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
3.26.03.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.03.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
3.26.02.2.03.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03.05	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03.06	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03.07	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.02.07	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.05.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
3.26.05.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
3.26.05.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
3.26.05.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	**Bidang**	**Kode Urusan**	**Kode Bidang**	**Kode Program**	**Kode Kegiatan**	**Urusan**	**Program**	**Kegiatan**
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Pariwisata	3	2	17	8	Urusan Pilihan	Program pengembangan Kemitraan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata	Pariwisata							Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	**Urusan**	**Bidang**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
3.26.02.2.02.06	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.03.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **DINAS PERPUSTAKAAN**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Perpustakaan	Perpustakaan	2	17	15	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengembangan minat dan budaya baca	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untutk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	2.23.02.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
Dinas Perpustakaan	Perpustakaan	2	17	15	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengembangan minat dan budaya baca	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untutk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	2.23.02.2.02.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi
Dinas Perpustakaan	Perpustakaan							Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untutk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	2.23.02.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
Dinas Perpustakaan	Perpustakaan	2	17	15	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengembangan minat dan budaya baca	Pengembangan minat dan budaya baca	2.23.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
Dinas Perpustakaan	Perpustakaan	2	17	15	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengembangan minat dan budaya baca	Pengembangan minat dan budaya baca	2.23.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perpustakaan	Perpustakaan	2	17	15	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengembangan minat dan budaya baca	Pengembangan minat dan budaya baca	2.23.02.2.01.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
Dinas Perpustakaan	Perpustakaan							Pengembangan minat dan budaya baca	2.23.02.2.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Dinas Perpustakaan	Perpustakaan	2	17	15	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengembangan minat dan budaya baca	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Masyarakat	2.23.02.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
Dinas Perpustakaan	Perpustakaan	2	17	15	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengembangan minat dan budaya baca	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	2.23.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat
Dinas Perpustakaan	Perpustakaan	2	17	15	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengembangan minat dan budaya baca	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	2.23.02.2.01.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Bahan Pustaka
Dinas Perpustakaan	Perpustakaan	2	17	15	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengembangan minat dan budaya baca	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	2.23.02.2.01.09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
Dinas Perpustakaan	Perpustakaan	2	17	15	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengembangan minat dan budaya baca	Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Sekolah	2.23.02.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
Dinas Perpustakaan	Perpustakaan							Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Sekolah	2.23.02.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Perpustakaan	Perpustakaan							Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Sekolah
Dinas Perpustakaan	Perpustakaan							Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Sekolah
Dinas Perpustakaan	Perpustakaan	2	17	15	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pengembangan minat dan budaya baca	Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan
Dinas Perpustakaan	Perpustakaan	2	17	18	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Akses Perpustakaan	Pembinaan dan Pengembangan perpustakaan
Dinas Perpustakaan	Perpustakaan							Pembinaan dan Pengembangan perpustakaan
Dinas Perpustakaan	Kearsipan	2	18	16	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Dinas Perpustakaan	Kearsipan	2	18	16	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Dinas Perpustakaan	Kearsipan	2	18	16	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip
Dinas Perpustakaan	Kearsipan	2	18	16	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip
Dinas Perpustakaan	Kearsipan							Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip
Dinas Perpustakaan	Kearsipan	2	18	16	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Dinas Perpustakaan	Kearsipan	2	18	16	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Dinas Perpustakaan	Kearsipan							Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Dinas Perpustakaan	Kearsipan	2	18	17	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Dinas Perpustakaan	Kearsipan							Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.23.02.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat
2.23.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.23.02.2.01.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
2.23.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.24.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
2.24.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
2.24.03.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2.24.03.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2.24.03.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan
2.24.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
2.24.03.2.05.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
2.24.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI
2.24.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
2.24.03.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Perpustakaan	Kearsipan							Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Dinas Perpustakaan	Kearsipan							Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Dinas Perpustakaan	Kearsipan							Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Dinas Perpustakaan	Kearsipan							Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Dinas Perpustakaan	Kearsipan							Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Dinas Perpustakaan	Kearsipan	2	18	17	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
Dinas Perpustakaan	Kearsipan							Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
Dinas Perpustakaan	Kearsipan	2	18	18	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipn di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
Dinas Perpustakaan	Kearsipan							Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipn di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
Dinas Perpustakaan	Kearsipan	2	18	18	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip
Dinas Perpustakaan	Kearsipan							Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip
Dinas Perpustakaan	Kearsipan	2	18	19	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Perbaikan Pengelolaan Kearsipan	Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah
Dinas Perpustakaan	Kearsipan	2	18	19	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Perbaikan Pengelolaan Kearsipan	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Dinas Perpustakaan	Kearsipan	2	18	19	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Perbaikan Pengelolaan Kearsipan	Penyediaan Layanan Informasi Arsip Melalui Aplikasi JIKN

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.24.03.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
2.24.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI
2.24.03.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
2.24.03.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
2.24.03.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
2.24.03.2.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang
2.24.03.2.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang
2.24.03.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan
2.24.03.2.03.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan
2.24.03.2.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan
2.24.03.2.03.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan
2.24.02.2.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
2.24.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
2.24.02.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	15	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengendalian keamanan lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban							Pengendalian keamanan lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	15	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	16	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Operasional Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban							Operasional Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	16	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Pengendalian keamanan lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	18	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Forum Pembauran Kebangsaan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban							Forum Pembauran Kebangsaan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	18	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	18	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	18	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Pembinaan dan Pengawasan permasalahan peraturan perundang-undangan daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban							Pembinaan dan Pengawasan permasalahan peraturan perundang-undangan daerah

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.05.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
1.05.02.2.01.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
1.05.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban							Pembinaan dan Pengawasan permasalahan peraturan perundang-undangan daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	18	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban							Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban							Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	18	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	18	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Penyuluhan pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban							Penyuluhan pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	18	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Pendidikan dan pelatihan polisi pamong praja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban							Pendidikan dan pelatihan polisi pamong praja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban							Pendidikan dan pelatihan polisi pamong praja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	27	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban							Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	27	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.05.02.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
1.05.02.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
1.05.02.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
1.05.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
1.05.02.2.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
1.05.02.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
1.05.02.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
1.05.02.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
1.05.02.2.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja
1.05.02.2.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1.05.04.2.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
1.05.04.2.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
1.05.04.2.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
1.05.04.2.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
1.05.04.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	**Bidang**	**Kode Urusan**	**Kode Bidang**	**Kode Program**	**Kode Kegiatan**	**Urusan**	**Program**	**Kegiatan**
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	**Urusan**	**Bidang**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
1.05.04.2.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
1.05.04.2.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	17	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	17	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Seminar, talk shwo diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Seminar, talk shwo diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Seminar, talk shwo diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Seminar, talk shwo diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Seminar, talk shwo diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Seminar, talk shwo diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Seminar, talk shwo diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	17	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasn kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasn kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasn kebangsaan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
8.01.02.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.06.2.01.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.02.2.01.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.05.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.06.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.02.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.06.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
8.01.06.2.01.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.06.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.05.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasn kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasn kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasn kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasn kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasn kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasn kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasn kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasn kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasn kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasn kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	17	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Fasilitasi Verifikasi dan Pendataan Ormas / LSM
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Verifikasi dan Pendataan Ormas / LSM
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Verifikasi dan Pendataan Ormas / LSM
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Verifikasi dan Pendataan Ormas / LSM
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Verifikasi dan Pendataan Ormas / LSM

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
8.01.04.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.06.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.05.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.05.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.04.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.04.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.03.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
8.01.03.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.02.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.04.2.01.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.04.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.04.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.04.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.02.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	18	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Forum Pembauran Kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Forum Pembauran Kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Forum Pembauran Kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Forum Pembauran Kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Forum Pembauran Kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Forum Pembauran Kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Forum Pembauran Kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Forum Pembauran Kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	18	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
8.01.06.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.06.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.04.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.02.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.06.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
8.01.05.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.02.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.06.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.05.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.04.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.03.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
8.01.02.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.06.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	18	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	19	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Peningkatan Peran Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Peran Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Peran Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Peran Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Peran Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
8.01.05.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.02.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.06.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
8.01.05.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.02.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.05.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.05.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.05.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.04.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.04.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.02.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.05.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.05.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.06.2.01.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.06.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
8.01.06.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Peran Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Peran Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Peran Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Peran Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Peran Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Peran Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Peran Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Peran Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	19	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Fasilitasi Tim Terpadu Peanganan Gangguan Keamanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Tim Terpadu Peanganan Gangguan Keamanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Tim Terpadu Peanganan Gangguan Keamanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Tim Terpadu Peanganan Gangguan Keamanan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
8.01.06.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.06.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
8.01.05.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.04.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.03.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Sit
8.01.02.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.03.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.02.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.06.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
8.01.06.2.01.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.06.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
8.01.06.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Tim Terpadu Peanganan Gangguan Keamanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Tim Terpadu Peanganan Gangguan Keamanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Tim Terpadu Peanganan Gangguan Keamanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Tim Terpadu Peanganan Gangguan Keamanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Tim Terpadu Peanganan Gangguan Keamanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Tim Terpadu Peanganan Gangguan Keamanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Tim Terpadu Peanganan Gangguan Keamanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Tim Terpadu Peanganan Gangguan Keamanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Tim Terpadu Peanganan Gangguan Keamanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	20	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
8.01.06.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.02.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.05.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.05.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.04.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.04.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.03.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
8.01.03.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.06.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
8.01.05.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.02.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.05.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.02.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1						Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	21	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Penyusunan data base partai politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1						Penyusunan data base partai politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1						Penyusunan data base partai politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	21	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	21	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
8.01.05.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.03.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.03.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
8.01.04.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.03.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Sit
8.01.03.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.03.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
8.01.03.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Polit
8.01.03.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Polit

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	21	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Gladi Posko Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Gladi Posko Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Gladi Posko Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu)

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
8.01.03.2.01.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.03.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
8.01.03.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.03.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Sit
8.01.02.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan
8.01.03.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.03.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
8.01.03.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Sit

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Gladi Posko Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	21	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Fasilitasi Penyelenggaran Pemilu Legeslatif dan Pelpres
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Penyelenggaran Pemilu Legeslatif dan Pelpres
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Penyelenggaran Pemilu Legeslatif dan Pelpres
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Penyelenggaran Pemilu Legeslatif dan Pelpres
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Penyelenggaran Pemilu Legeslatif dan Pelpres
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	21	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu KADA
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu KADA

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
8.01.03.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Polit
8.01.03.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Polit
8.01.03.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
8.01.03.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.03.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Sit
8.01.02.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan
8.01.03.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Polit
8.01.03.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu KADA
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu KADA
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	21	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Latihan Dasar Kepimpinan siswa
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Latihan Dasar Kepimpinan siswa
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Latihan Dasar Kepimpinan siswa
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Latihan Dasar Kepimpinan siswa
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Latihan Dasar Kepimpinan siswa
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	21	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
8.01.03.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.03.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Sit
8.01.03.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.03.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
8.01.03.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.02.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.03.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Polit
8.01.03.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban	1	5	21	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pembinaan Partai Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban		5					Pembinaan Partai Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pembinaan Partai Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pembinaan Partai Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pembinaan Partai Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Pembinaan Partai Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban			26	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Koordinasi Pembinaan Lembaga Sosial dan Keagamaan	Peningkatan Pembinaan kepada Ormas

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
8.01.03.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.03.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Sit
8.01.02.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.03.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Polit
8.01.03.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
8.01.03.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.03.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Sit
8.01.02.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.04.2.01.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Pembinaan kepada Ormas
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Pembinaan kepada Ormas
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Pembinaan kepada Ormas
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Pembinaan kepada Ormas
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Pembinaan kepada Ormas
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Pembinaan kepada Ormas
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketentraman dan Ketertiban							Peningkatan Pembinaan kepada Ormas

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
8.01.04.2.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.04.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.04.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.02.2.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.06.2.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.06.2.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **8 KECAMATAN (PANDAWAN / LIMPASU / HANTAKAN / HARUYAN / BATU BENAWA / LABUAN AMAS UTARA / BATANG ALAI UTARA / BATANG ALAI TIMUR)**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	15	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	15	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	15	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
7.01.05.2.01.08	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.02.2.04.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.04.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
7.01.02.2.02.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
7.01.05.2.01.07	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
7.01.02.2.02.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.03.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan
7.01.02.2.04.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
7.01.02.2.04.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.02.2.02.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.05.2.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
7.01.05.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
7.01.04.2.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	18	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
7.01.04.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.01.06.2.01.11	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05.2.01.05	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.04.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
7.01.06.2.01.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.06	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
7.01.06.2.01.08	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
7.01.06.2.01.07	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
7.01.06.2.01.15	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
7.01.06.2.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.14	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
7.01.06.2.01.06	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7.01.06.2.01.05	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.12	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
7.01.06.2.01.17	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01.06.2.01.18	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
7.01.05.2.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.06.2.01.16	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	**Bidang**	**Kode Urusan**	**Kode Bidang**	**Kode Program**	**Kode Kegiatan**	**Urusan**	**Program**	**Kegiatan**
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	19	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	19	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	**Urusan**	**Bidang**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
7.01.03.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
7.01.06.2.01.09	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.13	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
7.01.06.2.01.18	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.06.2.01.17	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01.02.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.06.2.01.12	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **KECAMATAN BARABAI**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	**Bidang**	**Kode Urusan**	**Kode Bidang**	**Kode Program**	**Kode Kegiatan**	**Urusan**	**Program**	**Kegiatan**
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	15	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	15	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	15	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	**Urusan**	**Bidang**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
7.01.05.2.01.08	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.02.2.04.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.04.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
7.01.02.2.02.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
7.01.05.2.01.07	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
7.01.02.2.02.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.03.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan
7.01.02.2.04.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
7.01.02.2.04.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.02.2.02.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.05.2.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
7.01.05.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
7.01.04.2.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.01.06.2.01.11	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	18	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	19	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
7.01.05.2.01.05	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.04.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
7.01.06.2.01.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.06	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
7.01.06.2.01.08	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
7.01.06.2.01.07	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
7.01.06.2.01.15	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
7.01.06.2.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.14	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
7.01.06.2.01.06	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7.01.06.2.01.05	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.12	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
7.01.06.2.01.17	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01.06.2.01.18	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
7.01.05.2.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.06.2.01.16	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.03.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
7.01.06.2.01.09	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.13	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
7.01.06.2.01.18	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	19	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	19	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Darat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Darat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Darat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Darat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	19	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Barat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Barat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Barat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Barat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	19	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Utara
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Utara
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Utara
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Utara
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	19	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Timur
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Timur
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Timur
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Timur
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	19	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Selatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Selatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Selatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Selatan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
7.01.06.2.01.17	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01.02.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.06.2.01.12	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.03.2.02.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Evaluasi Kelurahan
7.01.03.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
7.01.03.2.02.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Evaluasi Kelurahan
7.01.03.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
7.01.03.2.02.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Evaluasi Kelurahan
7.01.03.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
7.01.03.2.02.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Evaluasi Kelurahan
7.01.03.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
7.01.03.2.02.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Evaluasi Kelurahan
7.01.03.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	**Bidang**	**Kode Urusan**	**Kode Bidang**	**Kode Program**	**Kode Kegiatan**	**Urusan**	**Program**	**Kegiatan**
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	19	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bukat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bukat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bukat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bukat

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	**Urusan**	**Bidang**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
7.01.03.2.02.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Evaluasi Kelurahan
7.01.03.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	**Bidang**	**Kode Urusan**	**Kode Bidang**	**Kode Program**	**Kode Kegiatan**	**Urusan**	**Program**	**Kegiatan**
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	15	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	15	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	15	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	**Urusan**	**Bidang**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
7.01.05.2.01.08	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.02.2.04.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.04.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
7.01.02.2.02.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
7.01.05.2.01.07	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
7.01.02.2.02.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.03.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan
7.01.02.2.04.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
7.01.02.2.04.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.02.2.02.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.05.2.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
7.01.05.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
7.01.04.2.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.01.06.2.01.11	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05.2.01.05	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	18	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	19	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
7.01.04.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
7.01.06.2.01.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.06	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
7.01.06.2.01.08	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
7.01.06.2.01.07	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
7.01.06.2.01.15	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
7.01.06.2.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.14	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
7.01.06.2.01.06	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7.01.06.2.01.05	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.12	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
7.01.06.2.01.17	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01.06.2.01.18	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
7.01.05.2.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.06.2.01.16	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.03.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
7.01.06.2.01.09	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.13	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
7.01.06.2.01.18	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.06.2.01.17	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	19	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	19	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Birayang
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Birayang
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Birayang
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Birayang

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
7.01.02.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.06.2.01.12	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.03.2.02.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Evaluasi Kelurahan
7.01.03.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan

PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - RENSTRA SKPD HST (PMDN 13/2006 vs PMDN 90/2019)

NAMA SKPD = **KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN**

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	**Bidang**	**Kode Urusan**	**Kode Bidang**	**Kode Program**	**Kode Kegiatan**	**Urusan**	**Program**	**Kegiatan**
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	15	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	15	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	15	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	**Urusan**	**Bidang**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
7.01.05.2.01.08	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.02.2.04.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.04.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
7.01.02.2.02.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
7.01.05.2.01.07	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
7.01.02.2.02.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.03.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan
7.01.02.2.04.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
7.01.02.2.04.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.02.2.02.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.05.2.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
7.01.05.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
7.01.04.2.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.01.06.2.01.11	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05.2.01.05	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	18	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	19	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
7.01.04.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
7.01.06.2.01.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.06	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
7.01.06.2.01.08	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
7.01.06.2.01.07	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
7.01.06.2.01.15	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
7.01.06.2.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.14	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
7.01.06.2.01.06	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7.01.06.2.01.05	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.12	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
7.01.06.2.01.17	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01.06.2.01.18	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
7.01.05.2.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.06.2.01.16	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.03.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
7.01.06.2.01.09	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.13	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
7.01.06.2.01.18	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.06.2.01.17	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

RENSTRA SKPD KAB. HST (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)								
SKPD Pemangku	Bidang	Kode Urusan	Kode Bidang	Kode Program	Kode Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	19	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	4	9	19	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pantai Hambawang Barat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pantai Hambawang Barat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pantai Hambawang Barat
Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)							Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pantai Hambawang Barat

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
Kode Sub Kegiatan	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
7.01.02.2.01.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.06.2.01.12	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.03.2.02.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Evaluasi Kelurahan
7.01.03.2.02.01	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan